

BERPIKIR KRONOLOGIS, SINKRONIK, DIAKRONIK, RUANG DAN WAKTU DALAM SEJARAH

Andy Suryadi

A. Pengertian Sejarah

Secara Etimologis

Sejarah berasal dari bahasa Arab yakni *syajara* yang berarti terjadi, *syajarah* yang berarti pohon dan *syajarah an-nasab* yang berarti pohon silsilah (Kuntowijoyo, 2013:1). Definisi pohon ini merujuk pada skema silsilah keluarga raja (dinasti) pada masa lalu. Kata *syajaratun* kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi *syajarah*. Adapun dalam Bahasa Indonesia disebut dengan sejarah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan *history* yang diserap dari bahasa Yunani yakni *historia*, yang memiliki makna penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa masa lampau dengan manusia sebagai tokoh utamanya (Rachmawati, 2016: 1).

Secara Terminologis

Menurut bapak sejarah Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar, disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Sementara itu, Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya. Sedangkan menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah objektif menunjuk kejadian atau peristiwa itu sendiri. Adapun sejarah subjektif dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. (Ratna Hapsari & M. Adil, 2016: 7).

Sedangkan menurut Murtadha Muthahhari (2002: 303-307), pengertian sejarah didefinisikan ke dalam tiga cabang yang saling berhubungan erat: (1) sejarah adalah cabang dari pengetahuan tentang peristiwa masa lalu dan kondisi yang berkaitan dengan masyarakat masa lalu. (2) sejarah adalah cabang pengetahuan tentang aturan

dan tradisi yang mengatur kehidupan masyarakat di masa lalu atas dasar tradisi. (3) sejarah digunakan untuk menunjukkan filsafat sejarah yaitu pengetahuan tentang perkembangan masyarakat dari tahap ke tahap dan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perubahan-perubahan tersebut.

Allan Nevin (1962: 14 dalam Ahmad Syafii Maarif, 2006: 29 dalam Aman, 2011:15), menyatakan bahwa sejarah merupakan jembatan penghubung masa silam dan masa kini, dan sebagai petunjuk ke arah masa depan.

Seyogyanya, sejarah adalah ilmu yang menggambarkan perkembangan masyarakat, suatu proses yang panjang. Sejarah juga merupakan kisah manusia dengan perjuangan yang dikenal dengan kebudayaan. Memahami asal-usul kebudayaannya, berarti memahami kenyataan dirinya dan kekiniannya. Memahami hakekat kekiniannya berarti mampu mengambil pelajaran untuk menghadapi masa depan. (Isjoni, 2007: 37).

Kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan manusia tersebut untuk dapat menjadi bahan kajian sejarah haruslah bersifat konkrit, dibatasi waktu dan tempat tertentu, sebab sejarah bersifat singular atau individual mencakup kejadian-kejadian yang bersifat unik (Wasino, 2007:2).

B. Konsep Berpikir Sinkronis dan Diakronis

Kronologis

Secara epistemologi atau ilmu asal-usul bahasa, kronologi berasal dari bahasa Yunani *khronos* yang artinya waktu, dan *logos* yang artinya ilmu. Sedangkan pengertian dari konsep kronologis itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya, dari awal hingga akhir. Sebab setiap peristiwa sejarah pastilah akan diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan (Rachmawati, 2016: 2-3).

Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikirlah secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-

kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Oleh sebab itu, cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat (Ratna Hapsari & M. Adil, 2016: 10).

Berpikir kronologi sangatlah penting agar terhindar dari anakronisme sejarah. Anakronisme adalah ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Kronologi juga dapat membantu kita untuk membandingkan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tetapi dalam waktu yang sama. Contohnya, pada Agustus 1945 dalam Perang Dunia II, pihak sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan kekalahan Jepang. Rentetan dari peristiwa tersebut adalah pada bulan dan tahun yang sama tersebut bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya (Badrika, 2006: 11).

Kronologi sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang telah terjadi. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, kronologi dapat membantu membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama, tetapi di tempat berbeda yang terkait peristiwanya. Kronologi sejarah diperlukan karena kajian sejarah terdiri atas berbagai jenis peristiwa dan bentuk yang berbeda. Setiap peristiwa perlu diklasifikasikan berdasarkan jenis dan bentuk peristiwanya. Peristiwa tersebut kemudian disusun secara runut berdasarkan waktu berlangsungnya. Peristiwa tersebut disusun dari masa paling awal hingga masa paling akhir. Tanpa konsep kronologi, penyusunan peristiwa sejarah akan mengalami kerancuan dan dikhawatirkan peristiwa yang terjadi pada suatu masa akan masuk pada masa atau zaman lain (Ririn Darini, 2013: 58).

Konsep berfikir kronologi juga bisa diartikan sebagai catatan kejadian dari sebuah peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Berfikir secara kronologis dalam sejarah sangat perlu dianjurkan. Berfikir secara kronologis atau berfikir secara urut, runtut, berkesinambungan dan teratur dapat memberikan secara utuh tentang suatu peristiwa sejarah. Manfaat berfikir kronologis yaitu kita dengan mudah dapat memahami dan mengetahui makna serta manfaat sebuah peristiwa bersejarah (*sumbersejarah1.blogspot.com*).

Konsep kronologis juga memiliki cara berpikir seperti (1) mempelajari kehidupan sosial secara memanjang dan berdimensi waktu, (2) memandang

masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat, (3) menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu kehidupan, (4) menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis, (5) digunakan dalam ilmu sejarah (*idsejarah.net*).

Contoh dalam penerapan konsep kronologis dalam sejarah salah satunya mengenai penjajahan Belanda di Indonesia dilatarbelakangi oleh putusnya hubungan dagang rempah-rempah Belanda dengan Portugis. Hal ini kemudian membuat Belanda mencari daerah rempah-rempah baru kemudian sampai ke Indonesia. Setelah berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah kemudian Belanda membentuk VOC atau kongsi dagang Belanda untuk menghindari persaingan antara pedagang Belanda. Setelah dibentuk maka era penjajahan Belanda masa VOC terjadi dengan beberapa hak istimewa yang dimiliki.

Kronologi meniscayakan peristiwa sejarah yang berlangsung sesuai urutan waktunya. Oleh karena itu, sejarah harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan kumpulan acak peristiwa-peristiwa dengan tanggalnya. Pada awalnya, para sejarawan hanya mengurutkan sejarah berdasarkan atas teknologi saja. Namun seiring perkembangan teori dan teknik –teknik seperti radiokarbon yang bisa menetapkan pertanggalan mutlak, maka mulai diklasifikasikan urutan kejadian berdasarkan masa atau waktu, sehingga penyusunan peristiwa sejarah dari satu zaman ke zaman lain tidak mengalami kerancuan. Contohnya kronologis kedatangan Spanyol dan Portugis ke Indonesia sebagai berikut ini:

- a. Tahun 1511 Portugis mendarat di Malaka, dipimpin oleh Alfonso d'Albuquerque.
- b. Tahun 1512 Portugis telah berhasil menduduki Maluku.
- c. Tahun 1521 Spanyol tiba di Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Sebastian d'Elcano.
- d. Tahun 1529 dilakukan Perjanjian Saragosa yang berisi pembagian kekuasaan antara Portugis dan Spanyol (M. Taupan, 2010: 23).

Kronologi berarti sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai urutan waktu, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-melompat urutan waktunya, atau bahkan berbalik urutan waktunya

(anakronis). Oleh sebab itu, dalam mempelajari sejarah agar kita mendapatkan pemahaman yang baik hanya memperhatikan urutan-urutan kejadiannya atau kronologisnya.

Kronologi sebagai ilmu dasar sejarah mempelajari tentang *tarikh* (sistem kalender) yang digunakan di berbagai tempat dan berbagai zaman serta menerjemahkan suatu sistem kalender terhadap sistem kalender lainnya. Sebagai contoh pada zaman Hindu di wilayah nusantara menggunakan kalender Saka. Penyesuaian kalender Saka dengan kalender Masehi dapat dilakukan dengan mudah karena keduanya menggunakan dasar peredaran matahari. Oleh sebab itu kronologis juga terbukti mampu membantu berpikir tentang akal pikir manusia pada zamannya masing-masing (Mustopo, 2006: 10).

Dalam ilmu sejarah, kronologi adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara tepat berdasarkan urutan waktu. Tujuan kronologi adalah untuk menghindari anakronisme atau kerancuan waktu dalam sejarah. Dengan memahami konsep kronologi, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu dapat direkonstruksi kembali secara tepat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Dengan bantuan konsep kronologi, kita juga dapat melihat kaitan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di belahan bumi satu dengan peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain. Kronologi merupakan ilmu dasar yang sangat penting bagi ilmu sejarah, karena ilmu ini menggambarkan proses sejarah. Sebuah kronologi dapat disusun berdasarkan waktu terjadinya atau tahun kejadiannya (Magdalia Alfian, dkk, 2006: 16).

Salah satu cara yang baik dalam menunjukan tatanan kronologis di mana peristiwa-peristiwa terjadi adalah penggunaan garis waktu. Garis waktu dapat menunjukan peristiwa-peristiwa dalam suatu hari atau satu abad. Hal ini tergantung pada skala garis tersebut. Dalam menentukan skala garis waktu tersebut, sejarawan sering harus membagi waktu dalam banyak cara. Kadang-kadang para sejarawan menggunakan periode waktu yang panjang. Misalnya, masa Orde Baru adalah sebutan yang diberikan untuk suatu periode pada akhir abad ke-20 di Indonesia. Periode tersebut merupakan masa pemerintahan rezim Soeharto yang berkuasa antara tahun 1966-1998.

Periodisasi Sejarah

Peristiwa masa lalu yang kompleks ada setiap masa perlu diklasifikasi berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut. Klasifikasi dalam ilmu sejarah menghasilkan pembagian zaman, periode, dan babakan waktu atau masa. Dalam periodisasi terdapat serialisasi rangkaian babakan menurut urutan zaman sehingga dapat dikenali jiwa atau semangat setiap zaman.

Periodisasi berasal dari bahasa Yunani *periode*, yang berarti babak, masa, atau zaman. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Periodisasi merupakan konsep penting dalam mempelajari sejarah, karena akan mempermudah kita memahami setiap peristiwa sejarah. Tanpa periodisasi tentu akan kesulitan memahami berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, bahkan dunia. Menurut Kuntowijoyo (2008:20), “periodisasi adalah hasil pemikiran komparatif antara satu periode dengan periode lainnya setelah sejarawan melihat ciri khas suatu kurun sejarah. Selebihnya sejarawan juga menandai adanya perubahan penting yang terjadi antara periode sejarah satu dengan periode sejarah lainnya”. Sebagai contoh periodisasi sejarah Indonesia adalah pembagian masa, yaitu Masa Praaksara, Masa Hindu-Budha, Masa Islam, dan seterusnya (Rachmawati, 2013: 5).

Periodisasi atau pembabakan waktu ini adalah salah satu proses pembagian waktu dalam sejarah berdasarkan zaman atau periode. Penulisan sejarah disusun berdasarkan dimensi waktu, ruang, dan tema tertentu. Untuk menentukan struktur waktu, perlu disusun periodisasi atau pembabakan waktu berdasarkan kriteria tertentu. Melalui periodisasi, kisah peristiwa sejarah yang ditulis sejarawan dan para peminat sejarah ditempatkan dalam babakan waktu. Dengan demikian kisah sejarah mudah dipahami para pembaca secara kronologis. Periodisasi sejarah yang sampai sekarang masih besar pengaruhnya ialah periodisasi sejarah yang disusun oleh Cellarius (1653-1707), seorang sejarawan Jerman yang membagi sejarah atas tiga periode, yaitu zaman kuno, mabad pertengahan, dan zaman baru (Herimanto & Eko Targiyatmi, 2017: 45).

Periodisasi dapat didefinisikan sebagai pembabakan waktu yang berurutan sesuai kejadian. Periodisasi juga dapat dipahami sebagai salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman,

atau periode. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Periodisasi atau pembagian babakan waktu merupakan inti cerita sejarah (Ririn Darini, dkk, 2013: 61). Periodisasi dibuat dengan tujuan agar dapat diketahui ciri khas atau karakteristik kehidupan manusia sehingga mudah dipahami. Melalui periodisasi dapat diketahui perkembangan kehidupan manusia, kesinambungan antara periode yang satu dan periode berikutnya, terjadinya fenomena yang berulang, dan perubahan dari periode awal sampai periode berikutnya.

Konsep teoritis tentang periodisasi sejar Indonesia pernah dibahas dalam Seminar Sejarah Nasional I tahun 1957. Diketahui bahwa pembabakan masa dalam periodisasi disusun dengan menggunakan dasar; (1) perkembangan peradaban, (2) Segi kebudayaan, (3) Agama yang masuk di Indonesia. Soekanto dalam seminar tersebut berpendapat bahwa periodisasi hendaknya disusun berdasarkan ketatanegaraan, artinya bersifat politik. Menurut Sartono Kartodirdjo, dasar periodisasi sejarag adalah derajat integrasi yang tercapai di Indonesia pada masa lampau.

Cerita sejarah yang ditulis dengan menempatkan skenario peristiwa sejarah dalam setting pembabakan waktu akan memudahkan pembaca untuk mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Adapun tujuan pembabakan waktu dalam periodisasi sejarah adalah; (1) Melakukan penyerdehanaan, (2) Memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah, (3) Mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis, (4) Memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan.

Periodisasi dalam penulisan sejarah tergantung pada jenis penulisan sejarah yang akan dilakukan. Periodisasi dapat dilakukan berdasarkan perkembangan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Berdasarkan perkembangan politik, periodisasi dapat dilakukan berdasarkan raja-raja yang memerintah di suatu daerah, seperti Kesultanan Yogyakarta. Berdasarkan perkembangan sosial ekonomi, periodisasi dapat dilakukan dengan pembagian sejarah berdasarkan sistem mata pencaharian seperti Masa Berburu dan Meramu, diikuti Masa Bercocok Tanam, sampai hidup Masa Menetap, dan seterusnya (Magdalia Alfian, 2006: 15).

Periodisasi adalah pembagian atau pembabakan peristiwa-peristiwa masa lampau yang sangat panjang menjadi beberapa zaman. Dalam kenyataan sejarah yang

sebenarnya, tidak dikenal adanya periodisasi sejarah. Karena pada hakikatnya peristiwa-peristiwa sejarah saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya dan tidak terputus dalam suatu periodisasi. Penyusunan periodisasi bertujuan untuk; (1) Memudahkan mempelajari sejarah, karena peristiwa sejarah begitu panjang, oleh sebab itu dapat dikelompokkan, disederhanakan, dan diringkas menjadi beberapa periode sehingga memudahkan memahami sejarah, (2) Memahami peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis, sebab harus dikelompokkan dan disusun berdasarkan waktu terjadinya, sehingga memudahkan pembaca memahami kronologi sejarah yang panjang dalam periode-periode yang saling berkaitan (Habib Mustopo, 2006: 10).

Periodisasi merupakan pembagian zaman atau periode/masa berdasarkan ciri-ciri budaya yang kuat. Tujuan para ahli sejarah menyusun periodisasi adalah untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan sejarah manusia, mengingat masa sejarah terlalu panjang untuk diceritakan rentang waktunya. Periodisasi dilakukan pada seluruh peristiwa sejarah di dunia. Hal ini dimaksud agar peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi bisa dengan mudah dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri budayanya (M Taupan, 2010: 24).

Kronik Sejarah

Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Meski penulis kronik memperoleh informasi secara bervariasi, beberapa kronik ditulis dari pengetahuan pelaku, beberapa dari saksi atau peserta dalam peristiwa, atau melalui mulut ke mulut. Beberapa bahan-bahan tertulis adalah piagam, surat, atau karya-karya penulis sejarah sebelumnya. Yang lain berupa cerita tentang asal-usul yang tidak diketahui sehingga memiliki status mitos. Penyalin kronik juga berpengaruh dalam hal penyalinan kreatif, dengan melakukan koreksi, memperbarui atau melanjutkan sebuah kronik dengan informasi yang dulunya tidak tersedia bagi penulis asli. Salah satu contoh kronik di Indonesia adalah Kronik Revolusi Indonesia yang disusun oleh Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Subagyo Toer dan Ediat Kamil (*wikipedia.com*).

Kronik merupakan fakta kronologis yang memberikan bahan kepada para peneliti untuk mendapat penafsiran yang saling berhubungan. Kronik dalam hal ini adalah daftar angka tahun dengan pernyataan peristiwa. Sejarawan akan mendapat

sumber sejarah, seperti prasasti, naskah, rekaman, fosil, artefak, alat batu, patung yang akan diteliti secara ilmiah dengan menggunakan alat dan bahan kimia tertentu untuk menentukan keasliannya.

Dari data tersebut akan menjadi sejarah setelah dirangkai secara baik menjadi suatu kisah. Kronik dapat dijadikan sumber sejarah dari suatu bangsa yang pernah dilalui oleh musafir atau para pendeta. Hal ini dikarenakan biasanya para musafir atau pendeta tersebut mencatat segala peristiwa yang pernah terjadi dan dilihat atau dialaminya pada daerah/ negara yang dilalui atau disinggahinya.

Menetapnya para musafir atau para pendeta di suatu daerah/negara yang dilalui memiliki tujuan yang berbeda-beda, ada yang tinggal beberapa saat, ada yang tinggal begitu lama, sehingga mereka yang tinggal lebih lama dapat menuangkan dalam catatan kejadian-kejadian dan kehidupan masyarakat nusantara pada waktu itu, oleh karena itu kronik dapat menjadi salah satu sumber tertulis di Indonesia, namun perlu diingat bahwa bahan-bahan yang dimaksud dalam kronik tersebut merupakan bahan-bahan yang lepas, yang masih perlu dirangkai secara selaras menjadi suatu kisah sejarah.

Itulah sebabnya banyak kronik-kronik Cina yang menulis keberadaan kerajaan Indonesia dalam berbagai segi, sosial, ekonomi, politik dan kepercayaan, bahkan agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, misalnya agama yang dianut oleh rakyat Tarumanegara dan agama Buddha yang dianut di Sriwijaya (Wardaya, 2009). Sedangkan secara lebih sederhana, kronik dapat diartikan sebagai catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Kronik merupakan suatu kumpulan tulisan-tulisan tentang perjalanan seorang musafir, pujangga, dan pemuka agama (*hariansejarah.id*).

Kata “kronik” dapat ditemukan dalam sejarah dinasti-dinasti dan kerajaan Cina. Kronik merupakan sejenis kumpulan tulisan-tulisan dan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina, seperti kronik dinasti Chou, Chin, Tang, Ming, Sung dan dinasti-dinasti lainnya. Kronik itu merupakan suatu kumpulan tulisan tentang perjalanan seorang musafir atau seorang pujangga dan juga seorang pendeta. Para musafir atau pujangga akan menulis seluruh peristiwa atau kejadian maupun hal-hal yang baru ditemukan ketika melakukan perjalanannya. Kronik tersebut dapat dijadikan sebagai sumber sejarah dan suatu bangsa atau negara yang pernah dilalui oleh para musafir, pujangga

atau pendeta tersebut. Para musafir, pujangga maupun pendeta mencatat segala peristiwa yang pernah dilihat atau dialaminya pada daerah yang pernah dilalui dan disinggahinya. Di mana pun mereka singgah, maka daerah dan kehidupan masyarakatnya menjadi titik tolak penulisannya (*tugassekolah.com*).

Diakronik

Pengertian diakronik adalah suatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam dalam batasan waktu. Pengertian Diakronik dalam peristiwa sejarah, sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Diakronik memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya; (1) Memanjang, berdimensi waktu, (2) Terus bergerak, hubungan kuasalitas, (3) Bersifat naratif, berproses dan bertransformasi, (4) Bersifat dinamis, (5) Lebih menekankan pada proses durasi, (6) Digunakan dalam ilmu sejarah (*sumberpengertian.co*). Diakronis berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu dan bersifat historis (*KBBI Online*).

Diakronik berasal dari bahasa Latin, dari kata *dia* dan *chronos*. *Dia* artinya melalui dan *chronos* artinya waktu. Model diakronik lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Model diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian yang konkret menjadi tujuan utama sejarah. Dengan demikian, model diakronik merupakan model yang dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Topik sejarah yang diakronik, misalnya sejarah Kerajaan Kutai (abad IV-XIV) sejarah Kerajaan Mataram Kuno (abad VIII-X). Judul-judul tersebut sengaja diberi penanda waktu, semata-mata untuk menunjukkan sifatnya yang diakronik, yakni lebih mengutamakan dimensi waktu (Ririn Darini, 2013: 58).

Konsep berpikir diakronik dalam sejarah bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa (Rachmawati, 2016: 3). Berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang, tetapi terbatas pada ruang. Berpikir diakronis mementingkan proses suatu peristiwa sejarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah merupakan suatu kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi

tersebut dibatasi waktu. Tujuan konsep berpikir diakronik adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut.

Cara berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati segala atau fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Berpikir diakronik menuntun kita melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, dalam berpikir diakronik, diperlukan konsep periodisasi dan kronologi. Sebagai contoh, jika kita mempelajari sejarah Pemilu di Indonesia, kita dapat melihat bahwa terjadi dinamika jumlah peserta pemilu. Saat pertama kali diadakan tahun 1955, pemilu diikuti oleh banyak partai. Namun, pada Orde Baru terjadi penyederhanaan jumlah partai pemilu, dan saat Reformasi, parpol kembali diikuti oleh banyak partai. (Ratna Hapsari & M Adil, 2016: 46).

Kerangka berpikir diakronik adalah memahami kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. Konsep berpikir diakronis memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak, berproses dalam hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dengan demikian, kerangka berpikir diakronis memandang kehidupan sosial sebagai sesuatu dinamis yang artinya, terus menerus berproses dan berubah dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Contoh cara berpikir diakronis antara lain ketika seorang peneliti menulis sejarah masyarakat suku Tengger, maka akan diuraikan secara kronologis proses terbentuknya suku bangsa Tengger sejak runtuhnya Majapahit, sampai dengan terbentuknya masyarakat Tengger yang berasal dari sisa-sisa masyarakat Hindu dari zaman Majapahit (Hermawan & Ufi Saraswati, 2014: 39).

Diakronik secara etimologis berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas, melalui, melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejarah merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi tersebut dibatasi oleh waktu. Contohnya:

- a. Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350-1389.
- b. Perang Diponegoro (Perang Jawa) berlangsung antara tahun 1825-1830.
- c. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942-1945.
- d. Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat, pada 8 Maret 1942.

Cara berpikir diakronik akan mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu, terhadap peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu. Masih berhubungan dengan pembatasan waktu, sejarah mengenal istilah periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu (Ratna Hapsari & M Adil, 2016: 10-11).

Dalam penulisan sejarah, model diakronik lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Model diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian konkret menjadi tujuan utama sejarah. Dengan demikian, model diakronik merupakan model dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Contoh topik sejarah yang diakronik antara lain kehidupan petani tebu di Bantul pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), kehidupan masyarakat Yogyakarta pada masa revolusi (1945-1949), dan Indonesia masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967). Judul tersebut sengaja diberi penanda waktu untuk menunjukkan sifatnya yang diakronik, yang lebih mengutamakan dimensi waktu (Herimanto & Eko Targiyatmi, 2017: 40-41).

Menurut Kuntowijoyo (2008:7) dimungkinkan terjadinya persilangan antara sejarah yang diakronis dan ilmu sosial yang sinkronis. Artinya adakalanya sejarah menggunakan ilmu sosial atau sebaliknya. Contoh percampuran penjelasan yang sinkronis dan diakronis adalah topik seperti Peran Militer dalam Politik 1945-1999 yang ditulis seorang ahli Kriminalitas, dari Batavia sampai Jakarta oleh sejarawan yang menggunakan teori sosiologi-kriminalitas.

Sejarah bersifat diakronik berarti memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu, dari waktu A sampai waktu B. Sejarah akan diceritakan secara kronologis waktunya. Sejarah bersifat diakronik digunakan untuk menceritakan kronologis suatu peristiwa di satu tempat. Hal ini berbeda dengan sejarah bersifat sinkronis yang menekankan suatu kejadian pada saat tertentu. Untuk mempermudah dalam pemahaman, berikut adalah beberapa contoh sejarah bersifat diakronik.

Konsep diakronis melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Melalui proses inilah, manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakatnya dari jaman ke jaman berikutnya. Suatu peristiwa sejarah tidak bisa lepas dari peristiwa sebelumnya dan akan mempengaruhi peristiwa yang akan datang. Sehingga, berfikir secara diakronis haruslah dapat memberikan penjelasan secara kronologis dan kausalita. Studi diakronis bersifat vertikal, misalnya menyelidiki perkembangan sejarah Indonesia yang dimulai sejak adanya prasasti di Kutai sampai kini.

Belajar sejarah dapat mendorong seseorang membuat konsep mengenai kehidupannya dalam perjalanan waktu. Banyak peristiwa sejarah yang dapat kita terapkan dengan konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Melalui interpretasi yang kritis maka kita akan dapat merekonstruksi peristiwa sejarah secara maksimal tingkat kebenarannya. Sehingga akan dapat memberikan sebuah nilai sebagai pembelajaran pada masyarakat di masa sekarang untuk menuju masa depan yang lebih baik. Penerapan berpikir diakronis merupakan cara berpikir khas sejarah dengan memanjang dalam waktu dan mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya keberadaan pemerintahan demokrasi liberal 1950-1959. Materi demokrasi liberal dapat diuraikan secara memanjang dengan menguraikan secara kronologis pembentukan pemerintahan demokrasi liberal, jatuh bangun kabinet hingga dikeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri keberadaan sistem demokrasi liberal.

Secara kronologis, demokrasi liberal dibentuk pada tahun 1950 sesudah pengembalian mandat RIS kepada NKRI. Demokrasi liberal sebagai system politik menganut system kepartaian yang multi partai, dimana presiden menunjuk seorang warga negara untuk membentuk cabinet lewat persetujuan partai-partai, dan kemudian menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila seorang perdana menteri kehilangan dukungannya di parlemen akibat suatu peristiwa, maka perdana menteri mengembalikan mandatnya kepada presiden dan presiden berkewajiban menunjuk kembali seorang warga negara untuk membentuk cabinet yang baru. Karena persaingan yang terjadi antara partai politik, akibatnya

pada masa demokrasi liberal terjadi jatuh bangun kabinet yang melahirkan ketidakstabilan politik (*modul-smn78jkt.sch.id*).

a. Kronologi Pertempuran Ambarawa (20 Oktober – 15 Desember 1945)

- 1) Tentara Sekutu yang diboncengi NICA mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945.
- 2) Tanggal 23 November 1945 ketika matahari mulai terbit, mulailah terjadi tembak-menembak antara para pejuang kemerdekaan dengan pasukan Sekutu.
- 3) Kolonel Soedirman mengadakan rapat dengan para Komandan Sektor TKR dan Laskar pada tanggal 11 Desember 1945.
- 4) Serangan mulai dilancarkan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 pagi.
- 5) Pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Sekutu dibuat mundur ke Semarang.

b. Kronologi Pertempuran Surabaya (27 Oktober – 20 November 1945)

- 1) Tentara Inggris bersama NICA mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945.
- 2) Setelah insiden perobekan bagian biru bendera Belanda, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris.
- 3) Gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945.
- 4) Setelah gencatan senjata, bentrokan-bentrokan tetap saja terjadi sampai berpuncak pada terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur) pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30.
- 5) Pengganti Mallaby, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan.
- 6) Ultimatum itu tidak dihiraukan. Pada tanggal 10 November 1945 pagi tentara Inggris melancarkan serangan besar-besaran.

c. Kronologi Pertempuran 5 Hari di Semarang (15 Oktober – 19 Oktober 1945)

- 1) Tawanan Jepang kabur pada hari Minggu, 14 Oktober 1945.
- 2) Tersiar kabar bahwa sumber air minum di Semarang telah diracun. Dr Kariadi yang hendak memeriksa sumber air dibunuh oleh tentara Jepang.

- 3) Terjadi pertempuran yang berlangsung selama lima hari mulai dari 15 Oktober 1945.
- d. Perang Padri (1821-1837) peristiwa penting yang terjadi:
 - 1) Terjadi perang antara kaum padri dan kaum adat, namun terjadi perjanjian perdamaian pada tanggal 15 juli 1825 di Padang yang mengharuskan tentara Belanda ditarik ke Jawa.
 - 2) Pada tahun 1834 belanda mengerahkan pasukan untuk menggempur pusat pertahanan kaum padri di bonjol.
 - 3) Pada tanggal 25 oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol tertangkap dan diasingkan ke Minahasa hingga wafatnya.
- e. Perang Diponegoro (1825-1830) peristiwa penting yang terjadi:
 - 1) Pemerintahan kolonial berencana membangun jalan untuk melancarkan sarana transportasi dan militer di Yogyakarta.
 - 2) Pada tanggal 20 juli 1825 perang Tegalrejo dikepung oleh serdadu Belanda.
 - 3) Diponegoro dan pengikutnya menyusun strategi gerilya.
 - 4) Belanda menerapkan strategi Benteng Stelsel pada tahun 1827.
 - 5) Tahun 1829 Kiai Maja ditangkap.
 - 6) Pangeran Diponegoro tertangkap di Magelang pada 25 maret 1930.

Sinkronik

Definisi dari sinkronis dalam sejarah berarti berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Cara berpikir sinkronis ialah dengan memahami suatu peristiwa di suatu tempat dalam kurun waktu yang sama. Dengan berpikir sinkronis kita dapat memahami peristiwa sejarah secara horizontal (meluas) dengan melihat suasana yang terjadi pada suatu peristiwa bukan hanya tahu peristiwa secara kronologi (berurutan). Ciri-ciri konsep sinkronik; (1) Mengkaji pada masa tertentu, (2) Menitik beratkan pengkajian pada strukturnya (karakternya), (3) Bersifat horizontal, (4) Tidak ada konsep perbandingan, (5) Cakupan kajian lebih sempit, (7) Memiliki sistematis yang tinggi, (8) Bersifat lebih serius dan sulit (*hariansejarah.id*). Berikut contoh studi kasus penerapan konsep sinkronis.

- a. Suasana di Jakarta Saat Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pembacaan Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa yang paling bersejarah dan paling penting bagi bangsa Indonesia dan memiliki arti yang begitu hikmat bagi segenap bangsa Indonesia serta menandai kelahiran baru.

b. Keadaan Ekonomi di Indonesia pada Tahun 1998

Keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 sangatlah terpuruk. Terjadi kerusuhan dimana-mana. Bahkan sampai presiden Soeharto mengundurkan diri. Terdapat banyak hutang perusahaan dan negara yang jatuh tempo pada tahun 1998 yang membuat banyak perusahaan gulung tikar

c. Suasana pada saat tragedi G30S/PKI

Tragedi G30S/PKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu, terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jendral tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30S/PKI.

Sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Sinkronik lebih menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronis menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap pada waktunya. Istilah memanjang dalam waktu itu meliputi juga gejala sejarah yang ada di dalam waktu yang panjang itu. Ada juga yang menyebut ilmu sinkronis adalah ilmu yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas. Misalnya tentang Tarekat Naqshabandiyah dan Qodiriyah di pesantren-pesantren Jawa (Hermanto & Eko Targiyatmi, 2017: 42).

Secara etimologis, kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *syn* yang berarti ‘dengan’ dan *chronos* yang berarti ‘waktu’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Lebih lengkapnya dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam

sejarah adalah cara mempelajari atau mengkaji, pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu (Ratna Hapsari & M Adil, 2016:14).

Konsep sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitikberatkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa namun dengan waktu terbatas. Sebagai contoh, sejarawan ingin menulis sejarah perekonomian Indonesia pada zaman Jepang. Hal yang akan dilakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan Jepang itu saja. Jika menerapkan konsep sinkronik, sejarawan tersebut hanya akan mengamati semua yang terkait dengan masalah perekonomian tersebut secara mendalam dan terstruktur.

Berbeda dengan cara berpikir diakronik, berpikir sinkronik kita hanya menganalisis suatu peristiwa tertentu. Berpikir sinkronik menuntut untuk menerangkan suatu peristiwa secara mendalam yang dikaji dari segi politik, ekonomi, atau sosial-budaya. Dengan kata lain, berpikir sinkronik adalah menganalisis suatu peristiwa masa lalu yang ditinjau dari berbagai aspek dengan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial lainnya (Rachmawati, 2016: 4).

Konsep berpikir sinkronik banyak digunakan oleh ilmu-ilmu sosial. Konsep berpikir sinkronik terbatas dalam ruang atau memiliki kurun waktu yang pendek. Hal ini membuat proses analisis peristiwanya bersifat menyeluruh, namun dalam jangka waktu yang pendek. Oleh sebab itu, dalam berpikir sinkronik, kita akan memerlukan ilmu bantu sosial lainnya. Konsep berpikir sinkronik akan membantu kita memahami lebih dalam dan menyeluruh terhadap suatu peristiwa sejarah.

Pemberontakan Petani Banten pada tahun 1888 adalah salah satu contoh hasil karya sejarah menggunakan konsep sinkronik. Dapat dianalisis bahwa peristiwa sejarah tersebut tanpa perlu mencari hubungannya dengan peristiwa sejarah lainnya. Hanya dianalisis kondisi masyarakat Banten pada saat itu, misal dari segi kondisi sosial, atau dari kepemimpinan masyarakat Banten pada saat itu.

Kerangka berpikir sinkronis memahami kehidupan sosial secara meluas dan berdimensi ruang. Dalam memahami sebuah kehidupan sosial, diuraikan berbagai aspek-aspeknya, seperti aspek geografis, ekonomi, sistem dan struktur sosial, kepercayaan dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Diuraikan juga fungsi dan struktur dari bagian-bagian tersebut. selanjutnya juga dijelaskan keterkaitan antara bagian-bagian tersebut. Konsep sinkronis banyak digunakan oleh ilmu-ilmu sosial, seperti

geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi (Hermawan & Ufi Saraswati, 2014: 39).

Contohnya, dengan cara berpikir sinkronik, seorang peneliti kehidupan sosial masyarakat suku Tengger misalnya, maka akan menguraikan secara meluas berbagai aspek yang ditemukan pada masyarakat suku Tengger meliputi, aspek letak geografis, sistem dan truktur sosial, ekonomi atau mata pencaharian, data kependudukan, kepercayaan, dan lembaga-lembaga sosial.

Konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktunya. Model sinkronik sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna dalam menganalisis sejarah (Ririn Darini, 2013: 58).

C. Konsep Ruang dan Waktu

Konsep Ruang

Sejarah mengenal adanya dimesi spasial dan dimensi temporal. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sedangkan temporal atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan manusia adalah subjek dan objek sejarah. Manusia sebagai pelaku dan penulis sejarah itu sendiri. Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa – peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Penelaahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepas dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitikberatkan pada aspek tempat, dimana peristiwa itu terjadi.

Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Tetapi, masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final, terhenti, dan tertutup. Masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Sehingga, dalam sejarah, masa lampau manusia bukan demi masa lampau itu sendiri dan dilupakan begitu saja, sebab sejarah itu berkesinambungan apa yang terjadi dimasa lampau dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak dimasa sekarang dan untuk mencapai kehidupan

yang lebih baik di masa mendatang. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang.

Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subyek atau pelaku sejarah. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat dimana manusia hidup (*donisetyawan.com*).

Konsep ruang, maksudnya tempat terjadinya peristiwa, jadi terkait dengan aspek geografisnya. Unsur ruang ini akan menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi riil. (Subagyo, 2011: 14). Contohnya sejarah reformasi Indonesia tahun 1998. Banyak sejarawan mencantumkan Jakarta sebagai tempat terjadinya peristiwa tersebut. Demikian, keberadaan Jakarta dalam peristiwa sejarah reformasi Indonesia sangatlah penting.

Tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang. Segala peristiwa terjadi di dunia berlangsung dalam ruang atau wilayah tertentu. Segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Selain itu, memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, dan sejarah dunia (Ratna Hapsari & M Adil, 2017: 11).

Di dalam KBBI disebutkan pengertian ruang adalah sela-sela antara dua deret tiang atau sela-sela empat deret tiang, atau yang juga diartikan sebagai rongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang, atau juga rongga yang tidak berbatas, tempat segala yang ada. Dalam sejarah, ruang atau tempat merupakan unsur penting yang harus ada. Bila diibaratkan sebuah pertunjukkan, maka ruang merupakan panggung ketika peristiwa sejarah berlangsung. Ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah terkait dengan unsur geografis. Akan tetapi, ruang atau tempat tersebut bukanlah ruang yang steril. Dengan demikian, suatu peristiwa sejarah merupakan proses interaksi dengan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi pada suatu ruang atau tempat tertentu (Hermawan & Ufi Saraswati, 2014: 7-8).

Saat terjadi perlawanan terhadap Belanda misalnya, maka harus ditegaskan kapan dan di mana penjajahan tersebut berlangsung. Perang Diponegoro dan Perang Padri terjadi pada waktu yang beriringan, akan tetapi keduanya terjadi pada ruang dan tempat yang berbeda. Oleh sebab itu kedua peristiwa ini memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda serta memiliki keunikan sendiri.

Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah. Jika mempelajari sejarah menggunakan konsep ruang, kita akan dapat menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat setempat (Rachmawati, 2016: 2).

Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata (Ratna Hapsari & M Adil, 2016: 8).

Konsep Waktu

Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti kelangsungan (*continuity*) dan satuan atau jangka berlangsungnya perjalanan waktu (*duration*). Kelangsungan waktu atas kesadaran manusia terhadap waktu dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) Waktu yang lalu atau *the past*, menyusul, (2) Waktu sekarang atau *the present*, dan berlanjut, (3) Waktu yang akan datang atau *the future* (*infopendidikan.me*).

Waktu (dimensi temporal) memiliki dua makna, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif merupakan satu-kesatuan, Yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Pada umumnya, berikut konsep waktu dalam mempelajari sejarah.

Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Tetapi, masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final, terhenti, dan tertutup. Masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Sehingga, dalam sejarah, masa lampau manusia bukan demi masa lampau itu sendiri dan dilupakan begitu saja, sebab sejarah itu berkesinambungan apa yang terjadi dimasa lampau dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak dimasa sekarang dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak

di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang (*donisetyawan.com*).

Konsep waktu dalam sejarah, menurut Kuntowijoyo mencakup empat hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Dalam hal perkembangan, sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lain, biasanya dari yang sederhana ke bentuk yang lebih rumit. Dalam sejarah, juga terjadi kontinuitas atau kesinambungan yang melahirkan kondisi baru, namun tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Dalam sejarah, pengulangan terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Sehingga menghasilkan perubahan yang terjadi karena praktik lama dinilai tidak memadai lagi untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan (Ratna Hapsari & M Adil, 2017:13).

Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung (*KBBI Online*). Dalam sejarah, unsur waktu merupakan unsur sangat penting. Sebab mempelajari sejarah bukanlah mempelajari sesuatu yang berhenti melainkan mempelajari sesuatu yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Setiap peristiwa sejarah berada pada kurun waktu tertentu yang memiliki latar belakang kurun waktu sebelumnya. Unsur waktu juga memberikan konteks atau setting tertentu bagi berlangsungnya peristiwa sejarah. Oleh sebab itu, dalam mempelajari sejarah, harus ditentukan dengan tegas dan jelas siapa pelakunya, kapan terjadinya, dan dimana peristiwa itu berlangsung (Hermawan & Ufi Saraswati, 2014:8-9).

Konsep waktu terbagi menjadi tiga, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Akan tetapi, konsep waktu pada masa lalu ini juga memengaruhi peristiwa pada masa sekarang. Sebagai contoh, pada masa lalu Republik Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan dengan pertimbangan kemajemukan sosial dan adanya ribuan pulau. Keputusan pemerintah tetap bertahan sampai sekarang. Oleh sebab itu, keputusan pemerintah pada masa lalu berpengaruh terhadap perkembangan negara pada masa sekarang dan masa depan (Rachmawati, 2016: 2).

Konsep waktu dalam sejarah meliputi dua hal, yakni (1) proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu, (2) kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa yang lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Sebagai contoh, pemerintahan Orde Baru yang mengalami kemunduran dengan peristiwa mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Atau contoh lain, pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945 (Ratna Hapsari & M Adil, 2017:8).

Perspektif waktu merupakan dimensi yang sangat penting dalam sejarah. Sekalipun sejarah itu erat kaitannya dengan waktu lampau, tetapi waktu lampau itu terus berkesinambungan. Sehingga perspektif waktu dalam sejarah, ada waktu lampau, kini dan yang akan datang. Waktu akan memberikan makna dalam kehidupan dunia yang sedang dijalani sehingga selama hidup manusia tidak dapat lepas dari waktu karena perjalanan hidup manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti kelangsungan dan satuan atau jangka berlangsungnya perjalanan waktu (Herimanto & Eko Targiyatmi, 2017:5-6).

D. Rangkuman

Dari berbagai penjelasan di atas, hal-hal penting yang telah Anda pelajari adalah

1. Sejarah berasal dari bahasa Arab yakni *syajaratun* yang berarti pohon. Definisi pohon ini merujuk pada skema silsilah keluarga raja (dinasti) pada masa lalu. Kata *syajaratun* kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi *syajarah*. Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah objektif menunjuk kejadian atau peristiwa itu sendiri. Adapun sejarah subjektif dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa.
2. Kronologi berasal dari Bahasa Yunani *choronos* yang artinya ‘waktu’ dan *logos* yang artinya ‘ilmu’. Kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya, dari awal hingga akhir. Setiap peristiwa sejarah akan diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runut dan berkesinambungan. Kronologi diperlukan dalam sejarah agar tidak terjadi anakronisme sejarah, yakni ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Contohnya melihat masa lalu dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang masa kini.

3. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan cir-ciri yang sama. Periodisasi merupakan konsep penting dalam sejarah. Karena akan mempermudah memahami setiap peristiwa sejarah yang terjadi. Sementara itu kata kronik adalah catatan rentetan peristiwa yang disusun sesuai urutan kejadiannya.
4. Diakronik berasal dari bahasa Yunani dia yang berarti ‘melampaui’ dan chronos yang artinya ‘waktu’. Berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang Panjang, tetapi terbatas pada ruang. Berpikir diakronis mementingkan proses suatu peristiwa sejarah.
5. Sinkronik berasal dari kata syn yang artinya ‘dengan’ atau ‘bersama’, dan chronos yang artinya ‘waktu’. Berpikir sinkronik artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas.
6. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah, misalnya sejarah local, sejarah nasional, dan sejarah internasional. Jika menggunakan konsep ruang, akan dapat menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola piker dan pola perilaku masyarakatnya.
7. Sedangkan konsep waktu terbagi menjadi tiga, yaitu masa lalu (past), masa sekarang (present), dan masa depan (future). Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Akan tetapi konsep masa lalu ini juga memengaruhi peristiwa-peristiwa di masa sekarang dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Magdalia, dkk. 2007. *Sejarah untuk SMA dan MA Kelas X*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Aman. 2011. *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta : Ombak
- Anonym. 2012. *Konsep Berpikir Diakronik dan Sinkronik dalam Sejarah*.
<http://www.rumahbelajar.com>. Diunduh tanggal 11 April 2018.
- Anonym. 2014. *Makalah Tentang Konsep Ruang, Waktu, dan Perubahan*.
<http://www.infopendidikan.me>. Diunduh tanggal 12 April 2018.
- Anonym. 2014. *Pengertian Konsep Kronologis (Diakronik) Sinkronik Ruang dan Waktu dalam Sejarah*. <http://www.sejarahdanwisata.com>. Diunduh tanggal 10 April 2018.
- Anonym. 2016. *Pengertian Kronologis (Diakronis), Sinkronik, Ruang dan Waktu*.
<http://www.idsejarah.net>. Diunduh tanggal 12 April 2018.
- Anonym. 2017. *Pengertian Sinkronik dan Diakronik Dalam Mempelajari Sejarah*.
<http://www.sumberpengertian.co>. diunduh tanggal 12 April 2018.
- Badrika, I Wayan. 2006. *Sejarah untuk SMA Kelas X*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Darini, Ririn, dkk. 2013. *Sejarah untuk SMA/MA Kelas X Kurikulum 2013 Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Penerbit Cempaka Putih.
- Hapsari, Ratna & M Adil. 2016. *Sejarah Indonesia Untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Wajib*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Hapsari, Ratna & M Adil. 2017. *Sejarah untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Peminatan (IPS)*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Hermawan & Ufi Saraswati. 2014. *Sejarah untuk SMA/MA Kelas X Peminatan Ilmu Sosial*. Jakarta. Yudhistira.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah; Historical Explanation*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- , 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Mustopo, Habib, dkk. 2006. *Sejarah SMA Kelas X*. Jakarta. Yudhistira.
- Rachmawati, Hesti Dwi. 2016. *Mandiri: Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Setyawan, Doni. 2018. *Konsep Ruang dan Waktu dalam Sejarah*.
<http://www.donisetawan.com>. Diunduh tanggal 12 April 2018.
- Subagyo. 2010. *Membangun Kesadaran Sejarah*. Semarang. UNNES Press.
- Targiyatmi, Eko & Herimanto. 2017. *Sejarah: Pembelajaran Sejarah Interaktif untuk Kelas X SMA dan MA*. Surakarta. PT Tiga Serangkai.
- Taupan, Muhamad. 2007. *Sejarah Bilingual untuk SMA/MA Kelas X Semester 1 dan 2*. Bandung. Yrama Widya.
- Teman Sejarah. 2018. *Konsep Periodisasi, Kronologi, Kronik, Kausalitas, Anakronisme, dan Historiografi*. <http://www.hariansejarah.id>. Diunduh tanggal 11 April 2018.

Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang. UNNES Press.

KONSEP PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM SEJARAH

Andy Suryadi

A. Apa itu sejarah?

Sartono Kartodirdjo dalam Rustam E. Tumburaka (2002) mengatakan bahwa sejarah dapat dibagi menjadi dua pengertian yakni: *Pertama*, sejarah dalam arti subjektif yaitu suatu konstruksi, ialah bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita yang mencakup rangkaian fakta-fakta untuk menggambarkan gejala sejarah, baik proses maupun struktur. *Kedua*, sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa yaitu sejarah dalam aktualisasinya. Dimana kejadian tersebut hanya terjadi sekali dan tidak terulang kembali. Keseluruhan proses itu berlangsung terlepas dari subjek manapun juga.

Ibrahim (1986), menterjemahkan perkataan sejarah (*History*) yang kita gunakan pada masa kini berpunca daripada perkataan Arab yaitu *Syajaratus* yang bermaksud Pohon. Dari sudut lain pula, istilah *history* merupakan terjemahan dari perkataan Yunani yakni *Histories* yang membawa makna satu penyelidikan ataupun pengkajian. Mengikut pandangan "Bapak Sejarah" Herodotus, Sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan satu kisaranan jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat dan peradaban. Mengikut definisi yang diberikan oleh Aristoteles, bahwa Sejarah merupakan satu sistem yang mengira kejadian semulajadi dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut beliau juga Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekor-rekor atau bukti-bukti yang kukuh (Suntralingam, 1985).

Sejarah ialah kisah masyarakat manusia atau kisah kebudayaan dunia, yaitu kisah perubahan-perubahan yang terjadi karena kodrat masyarakat itu seperti masa kebiadaban, masa saling membantu terus ke masa persatuan golongan, kisah revolusi, pemberontakan yang timbul antara bangsa dengan bangsa dan kisah kerajaan-kerajaan dan negara-negara yang timbul karena revolusi dan pemberontakan itu, kisah kegiatan dan pekerjaan manusia, yaitu pekerjaan untuk mendapatkan nafkah, atau kegiatan

dalam macam-macam ilmu dan usaha, dan umumnya kisah dari perubahan yang terjadi karena kodrat manusia. Keadaan dunia dan keadaan negara-negara dan adat lembaganya serta cara-cara penghidupannya (produksi) tidak tinggal tetap dan bersifat kekal (tak berubah) akan tetapi terus berubah sepanjang masa dan berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Demikian halnya manusia, waktu, kota-kota mengalami perubahan, maka iklim, masa, daerah dan negara juga akan mengalami perubahan itulah hukum yang telah ditentukan oleh Allah untuk para mukmin (Ali, 2005).

Menurut Collingwood (1966), sejarah ialah sejenis bentuk penyelidikan atau suatu penyiasatan tentang perkara-perkara yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Manakala Shefer pula berpendapat bahawa Sejarah adalah peristiwa yang telah lepas dan benar-benar berlaku. Sementara itu, Gazalba (1966), coba menggambarkan sejarah sebagai masa lampau manusia dan persekitarannya yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kefahaman tentang apa yang berlaku. Sebagai usaha susulan dalam memahami sejarah, Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka telah memberikan Sejarah sebagai asal-usul, keturunan, salasilah, peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat, tambo, tawarikh dan kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa yang telah berlaku. Sejarah dalam erti kata lain digunakan untuk mengetahui masa lampau berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah bagi membolehkan manusia memperkayakan pengetahuan supaya waktu sekarang dan akan datang menjadi lebih cerah. Dengan itu akan timbul sikap waspada (*awareness*) dalam diri semua kelompok masyarakat kerana melalui pembelajaran Sejarah, ia dapat membentuk sikap tersebut terhadap permasalahan yang dihadapi agar peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa lampau dapat dijadikan pengajaran yang berguna. Pengertian Sejarah boleh dilihat dari tiga dimensi iaitu epistemologi (kata akar), metodologi (kaedah sesuatu sejarah itu dipaparkan) dan filsafat atau pemikiran peristiwa lalu yang dianalisa secara teliti untuk menentukan sama ada ia benar atau tidak (Ibrahim, 1997).

B. Apa guna sejarah?

Sejarah sebagai pelajaran.

Pengalaman adalah guru yang paling baik, manusia banyak belajar dari pengalaman hidupnya baik pengalaman dirinya maupun dari pengalaman orang lain atau generasi sebelumnya. Pengalaman merupakan peristiwa masa lalu, dan dari peristiwa itulah kita dapat mengambil hikmahnya (pelajaran), sebagai contoh kemajemukan masyarakat Indonesia pada masa lalu dimanfaatkan oleh penjajah untuk melakukan *divide et impera*, dan berhasil, akibatnya bangsa Indonesia dijajah sampai ratusan tahun lamanya. Peristiwa masa lalu tersebut memberikan pelajaran kepada generasi sekarang, sehingga generasi sekarang harus mampu memandang kemajemukan bukan sebagai hal negatif, tetapi harus di sikapi secara positif.

Sejarah sebagai inspirasi.

Berbagai peristiwa masa lalu dapat memberikan inspirasi (ilham) pada generasi berikutnya. Masa sekarang dan yang akan datang tidak akan terlepas dari masa lalu karena waktu merupakan sebuah garis linier, tidak ada suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak ada peristiwa masa kini yang terputus dari peristiwa masa lampau. Dengan memahami masa lalu manusia dapat menarik benang merahnya dengan masa kini, contoh seseorang menjadi anggota TNI setelah terinspirasi oleh kepahlawanan Jendral Sudirman.

Sejarah sebagai rekreasi.

Setiap sejarah selalu bersamaan dengan kebudayaan nya, sehingga ketika membicarakan sejarah sering dikaitkan dengan benda peninggalan masa lampau seperti candi, keraton, patung dan benda budaya lainnya. Orang mengunjungi keraton, candi atau museum sebetulnya orang tersebut telah menjadikan sejarah dengan fungsi (kegunaan) rekreasi(hiburan). Banyak buku-buku sejarah yang ditulis, termasuk di dalamnya biografi ataupun auto biografi, semua itu merupakan sejarah sebagai kisah. ketika orang membaca kemudian menjadi senang dan tertarik karena tulisan dan gaya bahasanya yang komunikatif. sehingga pembaca dapat berimajinasi dengan isi bacaan buku-buku sejarah tersebut, maka sejarah mempunyai guna rekreatif (hiburan) seperti layaknya orang membaca sebuah buku novel (Kuntowijoyo, 2013).

Sejarah sebagai Ilmu

Sejarah dibawakan oleh Sejarawan melalui proses *Heuristik* (pencarian fakta) yang diinterpretasikan (ditafsirkan), dan kemudian diproses dengan sedemikian lupa berdasarkan subjektifitas Sejarawan dalam memahami sebuah peristiwa sejarah yang ditulis menjadi sebuah catatan. Catatan tersebutlah pengertian dari sejarah itu sendiri. Jadi sejarah dan masa lampau merupakan suatu hal yang berbeda tetapi berkaitan. Sejarah sendiri adalah kumpulan fakta peristiwa yang telah dipastikan. Sebuah peristiwa akan menjadi sebuah sejarah tergantung pada pandangan Sejarawan, sebagaimana diumpamakan oleh E.H.Carr dalam buku *Apa Itu Sejarah* (2014) Fakta-Fakta Sejarah bagaikan sebuah ikan di penjual ikan, sejarawan akan mengumpulkannya, membawanya pulang, serta memasak dan menyajikannya dengan gaya apapun yang menarik baginya. Jadi jika kita pikirkan secara mendalam maksud dari perumpamaan diatas adalah bahwa sebuah karya sejarah akan muncul sesuai dengan sudut pandang atau keinginan sejarawan tersebut dalam penulisannya.

Sejarah menurut E.H Carr (2014) adalah sebuah kumpulan fakta yang ada. Fakta tersebut diseleksi oleh Sejarawan untuk ditemukan validitasnya dan menurut perspektif masing-masing sejarawan. Jadi jelaslah bahwa fakta sejarah yang dapat menghasilkan penggambaran yang berbeda dari suatu peristiwa sejarah, hal tersebut didasarkan pandangan yang berbeda dari setiap Sejarawan berdasarkan subjektifitasnya.

Suatu hal dapat dikatakan sebagai ilmu apabila hal tersebut memenuhi syarat umum yaitu objek, tujuan, metodologi dan sistematika. Sesuatu dikatakan memiliki objek, jika ilmu itu memiliki sasaran atau tujuan penelitian. Ilmu yang memiliki tujuan adalah ilmu yang mengantarkan kepada tujuan tertentu seperti biologi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Itu berarti biologi bertujuan mengajarkan tentang makhluk hidup dan segala aspek-aspeknya. Ilmu yang memiliki metodologi adalah ilmu yang memiliki cara dalam mengembangkan materi-materi yang dibahas seperti pengalaman dan sebagainya. Sedangkan ilmu yang sistematika adalah ilmu yang secara berurutan atau kronologinya jelas sedang membahas atau mempelajari suatu hal.

Sedangkan sejarah dikatakan sebagai ilmu, jika memiliki syarat yaitu empiris, memiliki objek, memiliki teori, generalisasi dan memiliki metode. Berikut ini penjabaran dari aspek tersebut :

Sejarah Itu Empiris

Sejarah itu empiris mempunyai arti pengalaman, ini sesuai dengan ungkapan Kuntowijoyo (2013), “empiris berasal dari kata “*Empeiria*” Yunani yaitu pengalaman”. Mengapa sejarah itu empiris? Sejarah berasal dari pengalaman yang masih tercatat oleh memori kita. Pengalaman yang tadi telah diamati dituangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisan itulah yang diteliti keabsahannya oleh sejarawan untuk menentukan fakta. Fakta itu ditafsirkan secara berbeda-beda. Jika suatu ilmu alam memiliki objek yang pasti. Sedangkan sejarah menjadikan bukti sebagai objeknya. Letak perbedaan ilmu alam dan sejarah dilihat dari bagaimana mereka mengamati objeknya bukan dari cara kerjanya.

Jika dalam ilmu alam mereka bisa mengulang-ulang percobaan tentang suatu hal, akan tetapi dalam sejarah, hal itu tidak bisa dilakukan, karena sejarah itu hanya terjadi satu kali karena bersifat pengalaman, seperti pada saat proklamasi. Kejadian ini tidak bisa terjadi kembali dan diulang-ulang untuk diteliti. Hal ini yang menjadi sebab muncul perbedaan pendapat dari para sejarawan dalam mendiskripsikan suatu peristiwa tersebut. Karena kebenaran dalam sejarah hanya ada pada peristiwa itu sendiri.

Sejarah Memiliki Objek

Berbeda dari sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya. Sejarah mempelajari manusia yang dikejar oleh waktu. Jika lebih dikhususkan, objek penelitian sejarah memang manusia. Akan tetapi waktu sangat berperan penting dalam proses pembelajaran sejarah. Kebanyakan sejarawan bingung bagaimana menentukan waktu pas terjadinya sejarah tersebut. Kebanyakan ilmuwan hanya mengira-ngira waktu terdekat sejarah itu terjadi. Karena informasi yang mereka dapatkan sangat minim dan peristiwa tersebut tidak bisa terulang kembali.

Sejarah Memiliki Teori

Seiring dengan munculnya banyak filsafat sejarah di muka bumi. Tentu saja, hal ini juga memicu munculnya teori-teori tentang sejarah. teori yang terdapat dalam sejarah

ini berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lain, contohnya saja di Amerika yang berorientasi pragmatis sedangkan di Belanda mempunyai tradisi kontinental yang lebih kontemplatif. Ini semua sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo (2013) “di universitas-universitas Amerika yang berorientasi pragmatis, tidak diajarkan teori sejarah yang bersifat filosof. Sebaliknya, di negara Belanda mempunyai tradisi kontinental yang lebih kontemplatif, teori sejarah yang bersifat filosof yang diajarkan”.

Sejarah Memiliki Generalisasi

Generalisasi sejarah memiliki arti seperti yang diungkapkan Kuntowijoyo dalam bukunya pengantar ilmu sejarah. Kuntowijoyo (2013) mengemukakan, generalisasi, dari bahasa latin “generalis” yang berarti umum. Sama dengan ilmu lain sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Hanya saja perlu diingat kalau ilmu-ilmu lain bersifat nomotetis, sejarah itu pada dasarnya bersifat ideografis. Kalau sosiologi membicarakan masyarakat di pojok jalan atau antropologi membicarakan pluralisme amerika, mereka dituntut untuk menarik kesimpulan-kesimpulan umum yang berlaku dimana-mana dan dapat dianggap sebagai kebenaran umum. Generalisasi dalam hal sejarah disini mempunyai arti koreksi dari kesimpulan ilmu pengetahuan lain yang kurang akurat. Banyak kejadian atau ilmu yang belum mempunyai jawaban pasti, akan tetapi setelah menyangkut pautkan dengan sejarah akhirnya ditemukan jawaban yang pasti.

Sejarah Memiliki Metode

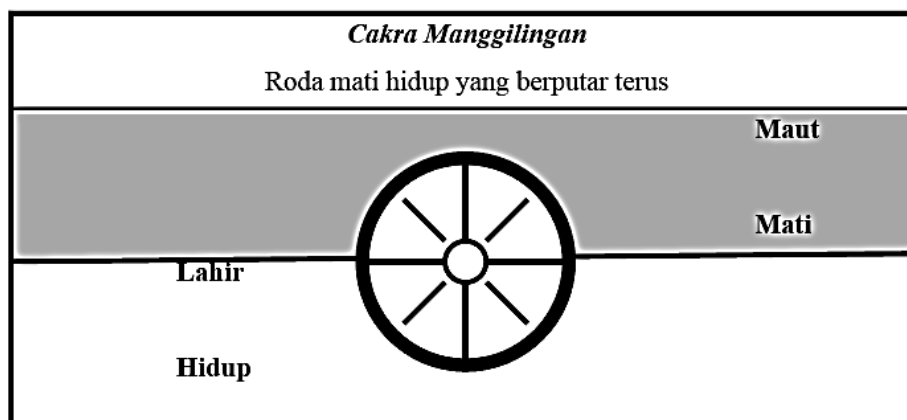
Dalam perkembangannya ternyata sejarah memiliki metode yang digunakan dalam penelitian-penelitian, seperti yang dipaparkan oleh Bailey (dalam Hamid & Majid, 2011). “...Teknik penelitian atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan metodologi adalah falsafah tentang proses penelitaian yang di dalamnya mencakup asumsi-asumsi, nilai-nilai, standar atau kriteria yang digunakan untuk menafsirkan data dan mencari kesimpulan...”. Jadi dengan adanya metode yang digunakan dalam sejarah inilah akan mempermudah sejarawan untuk mengumpulkan data dari suatu kejadian.

C. Teori Gerak Sejarah

Gerak Sejarah Menurut Hukum Fatum

Pada dasarnya alam raya sama dengan alam kecil yaitu manusia. Macro cosmos sama dengan micro cosmos. Cosmos menunjukkan bahwa alam teratur dan di alam itu hukum alam berkuasa. Hukum yang berlaku dalam macro dan micro cosmos yaitu alam raja dan alam manusia dikuasai oleh nasib (kadar) yaitu suatu kekuatan gaib yang menguasai macrocosmos-microcosmos.

Perjalanan hidup alam semesta ditentukan oleh nasib; perjalanan matahari, bulan, bintang, manusia dan sebagainya. Tak dapat menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan oleh nasib. Hukum alam yang menjadi dasar dari segala hukum cosmos ialah hukum lingkaran atau hukum *cyclus* (siklus). Setiap kejadian, setiap peristiwa akan terjadi lagi, terulang lagi. Hukum *cyclus* di Indonesia di sebut dengan cakram manggilingan yang berarti bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari cakram itu dan bahwa segala kejadian-peristiwa berlangsung dengan pasti. Cakram adalah lambang nasib (kadar) yang berputar terus serba abadi tanpa putus.



Gambar 1. Cakra Manggiling
Sumber: academia.edu

Arti Cakra manggilingan ialah bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari cakram itu, bahwa segala kejadian/peristiwa berlangsung dengan pasti (Sutrasno, 1957). Cakram adalah lambang nasib (*qadar*) yang berputar terus serba abadi tanpa henti putusnya. Manusia terikat dengan cakram itu, hidup bergerak naik turun seiring dengan gerak irama cakram di jagat raya, sesuai dengan gerak cakram jagat kecil. Nasib (*qadar*) adalah kekuatan tunggal yang menentukan gerak sejarah, manusia hanya menjalani dan menjalankan qadarnya.

Zaman lampau telah terjadi menurut kodrat alam, terlaksana menurut qadar. Zaman yang akan datang akan terjadi seperti telah dikodratkan manusia tidak akan dapat mengubah qadar itu. Qadar, nasib atau fatum bagi alam fikiran Yunani merupakan kekuatan tunggal. Oleh karena itu kejadian/peristiwa sejarah dari masa itu melukiskan kejadian/peristiwa yang tergantung pada qadar. Sifat cerita sejarah ialah realistik, menurut kenyataan.

Faham Santo Agustinus

Faham fatum Yunani kemudian menjelma dalam agama Nasrani sebagai faham ketuhanan dengan sifat-sifat yang sama:

- a. Kekuatan tunggal fatum menjadi Tuhan
- b. Serba keharusan, menurut rencana alam, menurut ketentuan faham menjadi kehendak Tuhan
- c. Sejarah sebagai wujud qadar menjadi sejarah sebagai wujud kehendak Tuhan.

Kesimpulan dari penjelmaan hukum *cakra manggilingan*, ialah bahwa manusia tidak bebas menentukan nasibnya sendiri. Ia menerima nasib dari Tuhan, apa yang diterima sebagai kehendak Tuhan. Tuhan sudah menentukan perjalanan hidup yang sudah ditentukan Tuhan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tuhan sudah menentukan perjalanan hidup manusia dan alam, manusia tidak dapat mengubah garis hidup yang sudah ditentukan. Bagi alam fikiran Yunani manusia menerima segala sesuatu dengan *amor fati* (gembira), bagi alam kodrat ilahi pemberian Tuhan diterima dengan *fiat voluntas tua* (kehendak Tuhan terlaksanalah).

Santo Agustinus menghimpun suatu teori sejarah berdasarkan *fiat voluntas tua* itu. Gerak sejarah dunia diibaratkan riwayat hidup manusia, babakan waktu disusun menurut tingkatan-tingkatan hidup manusia:

No	Santo Agustinus	Artinya	Zaman
1	infantia	Bayi	Adam sampai Nuh
2	pueritia	Kanak-kanak	Sem, Jafet
3	adulescentia	Pemuda	Ibrahim sampai Daud
4	inventus	Kejantanan	Daud
5	gravitas	Dewasa, dewasa bijaksana	Babilonia
6	kiamat	Tua	Pemilihan antara baik-jahat

Tujuan gerak sejarah ialah terwujudnya Kehendak Tuhan, yaitu *Civitas Dei* atau Kerajaan Tuhan. Bila *Civitas Dei* itu akan menjadi wujud belum diketahui, yaitu sebelum dan sesudah kiamat, tetapi nyatalah bahwa Tuhan akan mengadakan pemilihan, barang siapa taat dan menerima kehendak Tuhan di terima di sorga, barang siapa menentang kehendak Tuhan akan menjadi penduduk neraka atau jahanam.

Masa sejarah adalah masa percobaan, masa ujian bagi manusia. Kehendak tuhan harus diterima dengan rela dan ikhlas, manusia tidak dapat melepaskan diri dari kodrat ilahi. Keharusan kodrat ilahi menurut faham ini ditambah dengan ancaman di akhirat, masuk *civitas diaboli* (kerajaan iblis) atau neraka.

Zaman lampau sebagai perwujudan kehendak Tuhan adalah cermin atau hikmah untuk mengetahui kodrat ilahi. Zaman yang akan datang adalah masa medan perjuangan untuk mendapat tempat di *Civitas Dei*. Maka peri kehidupan manusia ditujukan kepada *Civitas Dei*, kepada akhirat, kecemasan dan ketakutan meliputi seluruh alam fikiran itu. Apakah nasib yang akan diterima kelak? *Fiat Voluntas tua*, kehendak Tuhan terlaksanalah! Manusia menyerah kepada kehendak Tuhan, ia menerima segala sesuatu, menyerahkan nasib kepada gereja.

Demikianlah pandangan sejarah Eropa di masa abad pertengahan (*midlle ages*), manusia hanya menanti-nantikan kedatangan *Civitas Dei*. Gerak sejarah bermata air kodrat ilahi dan bermuara pada *Civitas Dei*.

Pendapat Ibn Khaldun

Ibnu Khaldun (1332-1406) adalah seorang sarjana Arab yang ternama, ialah yang dapat dipandang sebagai ahli sejarah yang paling pertama. Teorinya didasarkan pada kehendak Tuhan sebagai pangkal gerak sejarah seperti Santo Agustinus, akan tetapi Ibnu Khaldun tidak memusatkan perhatiannya kepada akhirat. Baginya sejarah adalah ilmu berdasarkan kenyataan, tujuan sejarah ialah agar manusia sadar akan perubahan-perubahan masyarakat sebagai usaha penyempurnaan peri kehidupannya. Pendapat Ibnu Khaldun tertuang dalam bukunya *An Arab Philosophy of history translated and arranged by Charles Issawi MA*, halaman 26-30:

Sejarah ialah kisah masyarakat manusia atau kisah kebudayaan dunia, yaitu kisah perubahan-perubahan yang terjadi karena kodrat masyarakat itu seperti masa kebiadaban, masa saling membantu terus ke masa persatuan golongan, kisah revolusi, pemberontakan yang timbul antara bangsa dengan bangsa dan kisah kerajaan-kerajaan dan negara-negara yang timbul karena revolusi dan pemberontakan itu, kisah kegiatan dan pekerjaan manusia, yaitu pekerjaan untuk mendapatkan nafkah, atau kegiatan dalam macam-macam

ilmu dan usaha, dan umumnya kisah dari perubahan yang terjadi karena kodrat manusia. Keadaan dunia dan keadaan negara-negara dan adat lembaganya serta cara-cara penghidupannya (produksi) tidak tinggal tetap dan bersifat kekal (tak berubah) akan tetapi terus berubah sepanjang masa dan berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Demikian halnya manusia, waktu, kota-kota mengalami perubahan, maka iklim, masa, daerah dan negara juga akan mengalami perubahan itulah hukum yang telah ditentukan oleh Allah untuk para mukmin (Ali, 2005).

Dengan tegas Ibnu Kholdun menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena qadar Tuhan, yang terdapat dalam masyarakat adalah “naluri” untuk berubah. Justru perubahan-perubahan itu berupa revolusi, pemberontakan, pergantian lembaga, dsb, maka masyarakat dan negara akan mengalami kemajuan. Manusia dan semua lembaga-lembaga yang diciptakannya dapat maju karena perubahan. Ibnu Kholdun dengan tegas menyatakan perubahan sebagai dasar kemajuan dan itulah yang kemudian disebut *teori evolusi* (teori kemajuan) yang dicetuskan oleh Charles Darwin.

Perbedaan antara teori Santo Agustinus dan Ibnu Kholdun tampak dari akhir tujuan terakhir. Agustinus mengakhiri sejarah dengan dwitunggal sorga-neraka, bagi Ibnu Kholdun sejarah menuju ke arah timbulnya beraneka warna masyarakat, negara dengan manusianya menuju ke arah kesempurnaan hidup. Teori Agustinus menciptakan manusia menyerah, teori Ibnu Kholdun mendidik manusia menjadi pejuang yang tak kenal mundur. Puncak gerak sejarah ialah umat manusia bahagia dengan beraneka ragam masyarakat, negara, kesatuan hidup lainnya yang sempurna.

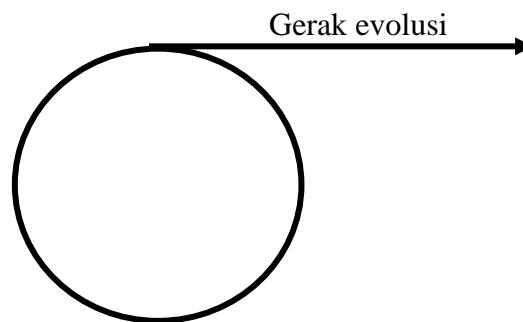
Renaissance dan Akibatnya

Pada masa *renaissance* pengaruh gereja mulai berkurang. Perhatian manusia berubah dari dunia-akhirat ke dunia-fana, kepercayaan pada diri pribadi sendiri bertambah dalam diri manusia. Sifat menyerah pada nasib berkurang dan harga diri memperkuat semangat otonom manusia. Semangat otonom itulah yang mendorong manusia ke arah pengertian tentang kehendak Tuhan.

Kemajuan ilmu pengetahuan seiring dengan kemajuan filsafat dan teknik mengakibatkan timbulnya alam fikiran baru di Eropa. Manusia lambat laun melepaskan diri dari agama serta berani mengembangkan semangat otonom. Sumber gerak sejarah tidak dicari di luar pribadinya, tetapi dicari dari dalam diri sendiri. Hubungan dengan *cosmos* diputus, ikatan dengan Tuhan ditiadakan, manusia berdiri sendiri (otonom).

Gerak sejarah berpangkal pada kemajuan (evolusi), yaitu keharusan yang memaksa segala sesuatu untuk maju. Manusia melenyapkan sorga-neraka sebagai

tujuan, tujuan fatum yang serba tidak tentu diberi batasan yang jelas. Gerak sejarah menuju ke arah kemajuan yang tidak ada batasnya. Evolusi tak terbatas adalah tujuan manusia. Abad ke-18 dan 19 merupakan masa revolusi jiwa yang luar biasa, yaitu suatu revolusi yang mematahkan kekuatan heteronomi. Hukum siklus yang mengekang daya pencipta lenyap kekuatannya. Lingkaran *cakra manggilingan* diterobos dan gerak sejarah tidak berputar-putar lagi, tetapi maju menurut garis lurus yang tidak ada akhirnya. Jika digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Teori Gerak Evolusi
Sumber: wikipedia.id

Sejarah adalah medan perjuangan manusia dan cerita sejarah adalah epos perjuangan ke arah kemajuan. Dengan ilmu pengetahuan, teknik, filsafat alam sekitarnya diselidiki dengan semangat evolusi. Mitos evolusi menjadi sumber dinamika yang dahsyat dan mengeluarkan manusia dari alam rohaniah. Evolusi berarti evolusi jasmaniah, evolusi kebendaan, evolusi duniawi, kefanaan, misalnya kemajuan teknik: kapal api, kereta api, pabrik, dsb. Gerak sejarah tidak menuju ke akhirat, tetapi ke arah kemajuan duniawi, maka dalam dunia yang seolah-olah tidak memerlukan Tuhan lagi itu, timbullah faham-faham baru yang berpedoman pada evolusi tak terbatas, diantaranya faham *historical materialism* atau *economic determinism*.

Faham *historical materialism* menerangkan bahwa pangkal gerak sejarah ialah ekonomi, gerak sejarah ditentukan oleh cara-cara menghasilkan barang kebutuhan masyarakat (produksi). Cara produksi menentukan perubahan dalam masyarakat, perubahan itu ditimbulkan oleh pertentangan kelas. Gerak sejarah terlaksana dengan pasti menuju ke arah masyarakat yang tidak mengenal pertentangan kelas. Tujuan sejarah ialah menciptakan kebahagiaan untuk setiap manusia, kelas manusia istimewa akan lenyap pada saat masyarakat tanpa kelas dapat diwujudkan.

Manusia pada dasarnya tidak bebas, tidak otonom dalam arti luas. Semua perubahan terjadi tanpa persetujuan manusia, manusia hanya dapat mempercepat jalan gerak sejarah dan tidak dapat mengubah atau menahan gerak sejarah. Kebebasan manusia sangat terbatas oleh keharusan ekonomi. Gerak sejarah tidak memerlukan Tuhan, tidak memerlukan *fatum*, tidak memerlukan manusia agar dapat terlaksana. Sejarah berlangsung dengan sendirinya, yaitu karena pertentangan kelas. Gerak sejarah bersifat mekanis, seperti jam tangan yang setelah diputar berjalan dengan sendirinya, manusia menjadi alat dari dinamika ekonomi.

Demikianlah secara singkat faham *historical materialism* (Croce, 2008: 6-13) yang dicetuskan oleh Karl Marx (1818-1883) dan Frederick Engels (1820-1895). Jelaslah bahwa otonomi yang dibanggakan manusia abad 19 sebetulnya hanya pembebasan dari Tuhan dan penambatan dari hukum ekonomi. Dunia yang tersedia ini tidak untuk difikirkan, tetapi harus diubah menurut kehendak manusia menurut hukum alam. Sejarah menjadi perjuangan manusia untuk menciptakan dunia baru guna kebahagiaan manusia. Pada abad ke-20 *historical materialism* diperjuangkan oleh Partai Komunis.

Sifat Gerak Sejarah

Dari teori-teori yang memberikan arah dan tujuan gerak sejarah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tanpa arah tujuan, seperti terdapat dalam alam fikiran Yunani berdasarkan hukum *fatum*, teori ini kemudian diperluas dan diperdalam oleh Oswald Spengler. Gerak sejarah berputar-putar, berputar-putar dan tidak terdapat sesuatu yang baru. Setiap kejadian, peristiwa, fakta pasti akan terjadi lagi seperti yang sudah-sudah.
- b. Pelaksanaan kehendak Tuhan, gerak sejarah ditentukan oleh kehendak Tuhan dan menuju ke arah kesempurnaan manusia menuju kehendak Tuhan. Manusia hanya menerima ketentuan itu dan tidak dapat mengubah nasibnya. Akhir gerak sejarah adalah Kerajaan Tuhan (*Civitas Dei*) bagi yang dapat diterima Tuhan dan kerajaan setan (*Civitas Diaboli*) bagi yang ditolak oleh Tuhan.
- c. Ada juga yang berpendapat bahwa ikhtiar, usaha dan perjuangan manusia dapat menghasilkan perubahan nasib yang sudah ditentukan Tuhan, maka gerak sejarah

merupakan perimbangan antara kehendak Tuhan dengan usaha manusia. Aliran ini merupakan perpaduan otonomi dan heteronomi.

- d. Evolusi dengan kemajuan yang tidak terbatas, gerak sejarah membawa manusia setingkat demi setingkat terus ke arah kemajuan. Dengan senang hati manusia melaksanakan gerak sejarah dengan penuh harapan akan mengalami kemajuan yang tidak terhingga. Alam semesta harus dan dapat dikuasai oleh manusia. Semakin meningkat, semakin luas dan dalam pengetahuan manusia dan makin berkuasalah ia. Aliran inilah yang sangat berpengaruh terhadap gerak sejarah di dunia Barat, sehingga bangsa-bangsa di Eropa dan Amerika mengalami kemajuan yang pesat.
- e. Disamping faham evolusi terdapat pula faham *historical materialism* yang menentukan masyarakat tanpa kelas adalah tujuan sejarah. Masyarakat tak berkelas itu adalah tujuan gerak sejarah setelah melalui masa kapitalis.
- f. Reaksi terhadap faham evolusi menghasilkan beberapa aliran baru, yaitu:
 - Aliran menuju ketuhanan seperti faham Toynbee, bahwa gerak sejarah itu akan sampai pada masa bahagia apabila manusia menerima Tuhan serta kehendak Tuhan sebagai dasar perjuangannya.
 - Aliran irama gerak sejarah menurut Sorokin yang menyatakan bahwa gerak sejarah tidak bertujuan apa-apa dan bahwa gerak itu hanya menunjukkan datang-lenyapnya atau berganti-gantinya corak; *ideational*, *sensate* dan *idealistic*
 - Aliran kemanusiaan, yaitu suatu aliran yang sangat luas dan berpusatkan pendapat mutlak bahwa manusialah yang terpenting di dunia ini. Gerak sejarah adalah perjuangan manusia untuk mencapai kemajuan yang setinggi mungkin.

D. Perubahan dalam Sejarah

Sejarah sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu dan sejarah sebagai ilmu, harus dipadukan dalam konsep yang jelas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip salah satunya atau keduanya. Hal tersebut penting, agar kekhawatiran tentang subyektifitas sejarah dalam pembelajaran sejarah tidak mengorbankan ilmu sejarah. Sebagaimana pandangan Abdullah (1996) bahwa sejarah sebagai alat pemupuk ideologi, betapapun luhurnya mempunyai resiko yang bisa meniadakan validitas dari apa yang akan disampaikan. Pemisahan kurikulum antara sejarah “kognitif” (pengetahuan) dengan yang “afektif” (perasaan) yang pernah

dilakukan, bukan saja artifisial, tetapi juga memperlihatkan kemandulan dalam pemikiran kesejarahan. Seakan-akan, sejarah yang diketahui tidak bertolak dari keingintahuan yang subyektif, demi didapatkan kearifan yang afektif.

Mengutip pernyataan dari Elton, sering muncul kecurigaan di kalangan sejarawan bahkan para pendidik, terhadap alasan mengkaitkan sejarah dengan proses pendidikan. Proses pendidikan sejarah dianggap hanya menjadi sumber kecenderungan etnosentris bahkan mengarah ke “xenophobia”. Sementara itu, Namier berpendapat bahwa peran sejarah sebagai “*moral precepts*” atau ajaran moral dianggap dapat menjelma menjadi indoktrinasi sebagai legitimasi doktrin atau ideologi tertentu (Elton dalam Widja, 1997).

Selain itu, Mahasin berpandangan bahwa kritik umum kepada pendukung nilai edukatif sejarah dalam penanaman nilai-nilai sejarah melalui proses pendidikan yang lebih menonjol adalah pencapaian tujuan-tujuan mendidik itu sendiri yang bersifat ekstrinsik atau instrumental. Padahal dalam teori belajar yang lebih utama adalah nilai instrinsik. Penekanan sifat ekstrinsik atau instrumental dalam pendidikan sejarah akan lebih mengarah pada pemahaman nilai sejarah sebagai landasan bagi pembentukan semacam alat cetak membentuk manusia yang sudah ditentukan sebelumnya (*predefined person*) baik dalam rangka “*cultural transmission*” maupun dalam penyiapan “*moral precepts*” bagi generasi baru. Dalam kerangka berpikir seperti ini, muncul kecenderungan atau dorongan pemujaan berlebihan terhadap masa lampau yang pada gilirannya memberi peluang bagi kekaburan realitas sejarah demi kepentingan masa kini atau kecenderungan presentisme. Pengaburan seperti ini bisa mendorong generasi baru hanya terpesona atau mengagumi masa lampau tanpa pernah berpikir secara kreatif merencanakan bangunan masa depannya (Mahasin dalam Widja, 1997).

Menurut Abdullah (1996) jika disimpulkan, sejarah sebagai wacana intelektual akan tampil secara bertahap dengan berbagai wajah. Pertama, sebagai sejarah yang bernada moralistik, yang merupakan pertanggungjawaban rasional akan keharusan hidup bermasyarakat. Kedua, sejarah sebagai alat pengetahuan praktis, yaitu sebagai kaca pembanding untuk mengetahui struktur hari dan dunia kini dan ketiga, sejarah sebagai pembimbing kearah pemahaman, yaitu sebagai alat dan penolong untuk

memungkinkan terjadinya dialog yang kreatif dengan pergolakan jaman yang melintas dalam pengalaman hidupnya atau alat untuk memahami dunia *intellegency*.

Pengajaran sejarah penting dalam pembentukan jiwa patriotisme dan rasa kebangsaan. Suatu pengetahuan sejarah yang ditunjang pengalaman praktis warga negara yang baik di sekolah membantu memperkuat loyalitas dan membantu anak-anak menemukan dirinya dengan latar belakang sejarah luas (Jarolimek, 1971). Rowse (1963) menegaskan bahwa sejarah adalah suatu mata pelajaran yang bernilai pendidikan tinggi. Sementara itu Collingwod (1973) mengatakan bahwa nilai sejarah adalah mengajarkan kepada kita tentang manusia dan apa yang telah dilakukannya. Dalam konteks pembentukan identitas nasional, pengetahuan sejarah mempunyai fungsi fundamental (Kartodirdjo, 1993).

Pada perkembangannya, pendidikan sejarah sangat bergantung pada ilmu sejarah. Siswa sebagai objek didik tentu membutuhkan pengetahuan dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks tentang, apa itu sejarah?, sebelum mereka mempelajari rentetan peristiwa dalam sejarah. Dalam konteks itu, ilmu sejarah sendiri secara alamiah memfokuskan diri pada kajian tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan tujuan mengambil hikmah. Masa lampau memiliki pengertian yang sangat luas, bisa berarti satu abad yang lalu, puluhan tahun yang lalu, sebulan yang lalu, sehari yang lalu atau sedetik yang lalu, bahkan waktu sekarang ketika sedang membaca tulisan ini akan menjadi masa lampau. Kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan atau berkesinambungan (*continuity*) dari satu titik ke titik selanjutnya.

Selain membahas manusia dan masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu, dalam ilmu sejarah menurut Kuntowijoyo (2001) meliputi perkembangan, keberlanjutan/kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Misalnya adalah perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Pada awalnya masyarakat di Amerika tinggal di kota-kota kecil. Di kota-kota kecil itulah

tumbuh dewan-dewan kota, tempat orang berkumpul. Dari kota kecil itu mengalami proses menjadi kota-kota besar sehingga menjadi kota metropolitan. Di sini, demokrasi berkembang mengikuti perkembangan kota (Kuntowijoyo, 2001).

Misalnya lagi, tulisan sejarah yang mengupas tentang perubahan dan keberlanjutan adalah milik Sartono Kartodirdjo (1984), *Peasant Revolt of Banten 1888*. Tulisan-tulisan Sartono sangat mudah dibedakan karena memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang lain. *Pertama*, tulisan-tulisan Sartono selalu mengusung tema-tema sosial, sejarah sosial, dan masyarakat. Berbeda dengan tulisan kebanyakan waktu itu yang mengusung tema politik dan sejarah orang besar. Pada waktu itu sejarawan UI, Nugroho Notosusanto merupakan sejarawan yang dekat dengan pemerintah merupakan pelopor sejarah politik dan militer. *Kedua*, pendekatan yang digunakan Sartono dalam setiap penulisannya yang disebutnya sebagai multidimensional *approach*, pendekatan *ilmu-ilmu sosial yang mempunyai eksplanasio lebih kuat. pemikiran Sartono ini banyak* dipengaruhi oleh pemikiran *Annales* di Perancis. Namun demikian AB. Lopian (1996), menuturkan bahwa Sartono tidak secara sengaja membuat mazhab “Sartono”. Sartono menekankan kerja metodologis dan pendekatan yang integratif, sehingga bisa keluar dari penulisan sejarah konvensional yang menitik beratkan pada politik dan narasi deskriptif. Pendekatan multidimensional dan ilmu-ilmu sosial yang dipelopornya merupakan bagian dari cara kerjanya untuk keluar dari kerangka sejarah kolonial (Kartodirdjo, 1967).

Ide dan gagasan ini secara tidak langsung memengaruhi pemikiran dan gaya penulisan sejarah murid-muridnya. Seperti diketahui bahwa setelah menamatkan kuliahnya di UI, dia memilih UGM sebagai media menyebarkan ide dan gagasannya. Sejak tahun 1956 Sartono mengajar di jurusan sejarah UGM. Di kampus inilah Sartono menyemaikan bibit pemikiran dan gagasannya. Sudah banyak akademisi dan sejarawan besar yang lahir berkat tangan dinginnya. Sebut saja Prof. T. Ibrahim Alfian, Prof. Soehartono, Prof. Djoko Soeryo, dan Prof. Taufik Abdullah. Dari beberapa mahasiswanya tersebut kemudian menyebar ke berbagai kampus di luar UGM, misalnya Muhammad Gde Ismail di Universitas Syiah Kuala Aceh, Mestika Zeid di Padang, AA Gde Putra Agung di Udayana Bali, dan Soedharmono di UNS, Djulianti

Soeroyo di Undip. Disadari atau tidak masing-masing dari mereka mengembangkan corak pemikiran Sartono.

Untuk meyakinkan pengaruh pemikiran Sartono pada muridnya mungkin bisa kita analisis dari disertasi yang dipromotori Sartono. Disertasi Ibrahim Alfian yang mengangkat Perang Aceh, perlawanan rakyat Aceh yang berlangsung terus menerus menghadapi Belanda. Dalam disertasinya Alfian membagi perlawanan rakyat Aceh dalam empat fase. *Pertama*, fase 1873-1875 disaat perang dipimpin langsung oleh para Sultan. *Kedua*, fase yang berlangsung antara tahun 1876-1896 disaat kepemimpinan beralih pada ulubalang dan Sultan hanya sebagai simbol pemersatu. *Ketiga*, fase 1896-1903 ketika ulama juga turut mengambil peran dalam perang Aceh, fase ini berakhir dengan ditandai menyerahnya Tuanku Muhammad Daud Syah. Fase *keempat* merupakan fase dimana terjadi pertempuran besar di beberapa tempat, mulai dari Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Melalui fase-fase ini Ibrahim Alfian menggunakan pendekatan analisis struktural sehingga perang Aceh dilihat sebagai proses yang berlapis-lapis bukan sekedar peristiwa tunggal. Selain itu juga tidak terlewatkan aspek sosial masyarakat, termasuk juga ideologi yang melatar belakangi munculnya perang dan perlawanan (Alfian, 1989).

Satu lagi disertasi yang menjadi bimbingan Sartono, adalah karya Soehartono yang membahas perubahan sosial yang terjadi di Surakarta melalui sistem apanage dan bekel. Soehartono (1991) mengungkapkan bahwa dengan adanya sistem apanage yang diterapkan mengakibatkan perang desa. Sistem apanage yang tidak bisa dilepaskan dengan struktur sosial, pola penguasaan tanah yang bertumpu pada hubungan *patron-client*, dan konsep *priyayi-wong cilik*. Soehartono menguraikan secara penuh dalam babnya mengenai perubahan sosial yang berlangsung akibat sistem apanage. Keresahan di kalangan pedesaan sebagai pemicu konflik. Tulisan Soehartono jelas dikategorikan sebagai sejarah sosial dengan latar belakang permasalahan agraria. Topik sejarah sosial dan pedesaan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Sartono.

Cicero, seorang filsuf Romawi mengungkapkan bahwa barang siapa yang tidak mengenal sejarahnya akan tetap menjadi anak kecil. Kemudian Sartono Kartodirdjo menambahkan barang siapa yang lupa sama sekali akan masa lampanya dapat diibaratkan seperti mereka yang sakit jiwa (Kartodirdjo, 1993). Kedua ungkapan tersebut benar adanya. Seperti yang disebutkan Sartono, bahwa mereka yang lupa akan

masa lampainya itu telah kehilangan identitas dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Hal itu disebabkan karena kelakuannya yang mungkin sudah tidak menentu dan terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Peristiwa yang terjadi adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Masa lalu merupakan masa yang telah dilalui oleh suatu masyarakat yang selalu berkaitan dengan konsep-konsep dasar berupa waktu dan ruang. Berkaitan dengan peristiwa sejarah yang merupakan perubahan dalam kehidupan manusia di masa lalu. Dewey (1959) menganjurkan bahwa dalam penulisan sejarah harus menulis masa lampau dalam kaitannya dengan masa sekarang. Sejarah harus bersifat instrumental dalam memecahkan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi di masa yang akan datang. Dengan kata lain Dewey, menyarankan bahwa sejarah harus dapat memecahkan masalah sosial yang aktual yang tengah dihadapi oleh sebuah bangsa.

Ideas Menentukan Sejarah

Dalam Marxisme, yang kita kenal sebagai *materealisme (historical materialisme)*, ada anggapan bahwa yang mengubah sejarah, masyarakat dan bangsa bukanlah ide atau gagasan tetapi teknologi, stuktur ekonomi atau penggunaan alat-alat produksi. Marx membagi stuktur masyarakat dalam dua bagian: *suprastruktur* dan *infrastruktur*. *Suprastruktur* adalah bagian yang *soft* dari sebuah kebudayaan, sedangkan *infrastruktur* adalah bagian yang *hard*. Perbandingan antara unsur dalam kebudayaan bisa disamakan dengan *software* dan *hardware* yang terdapat pada komputer. *Software* adalah peralatan komputer itu sendiri. Begitu juga dalam kebudayaan. Yang dibedakan antara program kebudayaan (*software*) dan kebudayaan itu sendiri (*hardware*).

Yang termasuk *infrastruktur* suatu kebudayaan, misalnya, struktur ekonomi atau teknologi kebudayaan itu sendiri; sedangkan *suprastrukturnya* adalah ideologi, kepercayaan, agama, ideas, dan lain-lain. Menurut Marx, *suprastruktur* ditentukan oleh *infrastruktur*. Ideologi akan sangat ditentukan oleh ekonomi. Keadaan ekonomi, misalnya, akan menentukan keadaan kelas; bukan sebaliknya. Agama kita sangat

ditentukan oleh posisi ekonomi kita di tengah masyarakat. Versi-versi keberagaman kita sangat ditentukan oleh letak dalam status sosial ekonomi. Apa yang dirumuskan oleh Marx sebetulnya merupakan antitesis dari apa yang kita bicarakan: bahwa ideas akan menentukan perubahan.

Kekuatan sejarah akan sangat ditentukan oleh ideas (gagasan-gagasan). Ideologilah yang akan menentukan perubahan ekonomi, sistem sosial, dan stuktur politik. Jika ideologi suatu masyarakat berubah, berubah pulalah infrastuktur masyarakat itu. Berbeda dengan pandangan Marx, teori ini menganggap bahwa idealah yang paling menentukan perubahan sosial. Teori yang sekaligus menjadi kritik terhadap Marx dikemukakan oleh Marx Weber (Sztompka, 2004).

Suatu masyarakat dikatakan mengalami perubahan sosial jika sistem sosialnya juga berubah. Jadi, dalam perkembangan masyarakat itu, individu tidak berperang apa-apa. Mereka hanyalah poin-poin kecil yang digerakkan oleh sistem sosial, politik, ekonomi. Dulu, para sosiolog melacak perubahan-perubahan pada masyarakat pada perubahan-perubahan institusi; individu sama sekali tidak memegang peranan. Sebagai contoh utamanya dalam tesis Marx. Namun, Weber membalikkan pandangan ini dengan mengatakan bahwa semua perubahan sosial dimulai dari perubahan tingkah laku manusia. Perubahan dari *human action*, perubahan dari tindakan-tindakan manusia yang ada dimasyarakat. Karena itu, banyak ahli menganggap Weber sebagai pendiri dari apa yang disebut *sociologi humanis*, sosiologi yang (kembali) menempatkan peranan manusia dalam perubahan-perubahan sosial. Berbeda dengan Marx, Weber berpendapat bahwa *superstructure*, *soft belief system*, *ideology* adalah faktor yang sangat aktif dan efektif dalam mengubah sejarah. Tesis Weber ini terbukti dengan munculnya kapitalisme (Rahmat, 1999).

Kapitalisme adalah sebuah sistem sosial yang di tegakkan di atas dasar pencarian keuntungan dan tindakan-tindakan rasional. Kata Marx Weber, kapitalisme adalah pengantar menuju masyarakat modern. Bersamaan dengan lahirnya kapitalisme, lahir pula institusi-institusi dan penguasaan-penguasaan baru yang independen. Pandangan baru tentang pasar (*market*) juga mulai muncul dipermukaan. Menurut Weber, sebagai sebuah sistem sosial, kelahiran kapitalisme. Ada sekelompok orang yang perilakunya berbeda dengan kebanyakan orang pada zaman itu. Kapitalisme muncul karena sekelompok orang yang di sebut Weber

sangat *newentrepreneur* (pengusaha-pengusaha baru) melakukan serangkaian tindakan (*human action*). Tindakan itu didasarkan pada semangat yang disebut semangat kapitalisme. Semangat kapitalisme terdiri dari tiga rukun berikut; Motif memperoleh laba (*profit motive*), hidup zuhud atau sederhana (*ascetic orentation*), dan semangat misi (*ideas of calling*).

Manusia-Manusia Besar

Teori tentang *great individuals* (manusia-manusia besar yang mengubah sejarah) dikemukakan oleh beberapa orang. Thomas Carlyle (1841), misalnya, adalah penulis buku *Heroes and Hero Worshipers* (para pahlawan dan pemujaan pahlawan). Menurut Carlyle, sejarah adalah biografi manusia besar “*history of the world is the biography of the great man*”. Pada salah satu bagian, dia menulis tentang Rasulullah, *The Hero as The Prophet*, pahlawan sebagai Nabi. Thomas Carlyle memandang sejarah sebagai biografi dari manusia-manusia besar. Dia mengatakan, “sejarah universal merupakan sejarah apa yang telah dicapai oleh umat manusia di dunia dan pada dasarnya adalah sejarah manusia besar yang sudah bekerja di dunia”. Lebih lanjut, Carlyle mengatakan bahwa manusia besar adalah jiwa dari seluruh sejarah umat manusia.

Ada tiga macam tipe individu di tengah-tengah masyarakat (Rahmat, 1999). Pertama, ada *ordinary people* (manusia-manusia biasa) seperti kita yang membentuk jaringan-jaringan sosial. Masyarakat sebenarnya terdiri dari sekian banyak *ordinary people*. Kita tidak bisa memasukkan mereka sebagai individu besar untuk mengubah sejarah. Kedua, *exceptional actors*, yaitu tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka bisa berbuat apa saja dan mempunyai kearifan yang dalam. Mereka bisa memahami apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. *Exceptional actors* ini termasuk para nabi, pembaharu, dan tokoh sejarah besar. Mereka mempunyai sesuatu yang istimewa yang membedakannya dengan manusia yang lain. Tipe terakhir adalah orang-orang yang berada di antara kedua tipe tadi. Orang seperti ini tidak mempunyai kebijakan dan pengetahuan seperti yang dimiliki oleh *exceptional actors*, tetapi mereka menduduki posisi penting di masyarakat. Karena itu mereka biasanya disebut *holders of exceptional positions*. Seseorang, misalnya, yang memiliki kearifan yang rendah, tiba-tiba menjadi presiden. Maka dia pun akan ikut menentukan jalannya sejarah dan dapat mempengaruhi proses perubahan perubahan sosial. Bahkan, sekiranya dia buta huruf seperti seorang kaisar di Afrika, dia dapat menentukan jalannya sejarah, paling tidak di negerinya sendiri.

Lalu apa yang dilakukan oleh *great individuals* itu untuk mengubah sejarah? Ada beberapa *type of actions* yang dilakukan oleh manusia. Sebagai anggota masyarakat kita berada dalam sebuah spektrum, dari *private actions*, tindakan orang yang mempengaruhi secara pribadi tetapi tidak begitu banyak yang menimbulkan perubahan sosial, sampai tindakan bersama (*collective actions*) yang tidak terorganisasi, biasanya dilakukan dengan cara yang buruk. Demonstrasi-demonstrasi yang belakangan marak, biasanya hanya bersifat temporer. Kerusuhan-kerusuhan juga menimbulkan perubahan sosial, tetapi tidak berdampak besar kepada masyarakat sebagai bangsa. *Collective actions* ini biasanya dilakukan oleh *social movement* (gerakan-gerakan sosial). Tindakan yang lebih bisa mengubah lagi adalah tindakan-tindakan yang terorganisasi, terencana, dan sudah disiapkan sebelumnya, seperti *organizing* dan *mobilizing*. Dalam istilah Bung Karno, ada yang dikenal dengan pembentukan kekuatan dan pemanfaatan kekuatan. Ada sebuah organisasi sosial yang mengorganisasi rencana-rencana mereka membentuk kekuatan dan memanfaatkan kekuatan itu. Tindakan yang paling akhir adalah tindakan-tindakan politik (*political action*). Seorang *great individuals* diukur pengaruhnya dari seluruh tindakan ini (Sztompka, 2004).

Revolusi

Ketika seluruh bangsa dilanda krisis, semua orang menuntut perubahan. Makin menderita bangsa itu, makin ingin perubahan itu segera terjadi. Revolusi muncul sebagai strategi terbaik. Reformasi dianggap terlalu lamban, sementara perut tidak bisa menunggu. Bila penyakit sosial seperti korupsi sudah berurat berakar dalam seluruh tubuh bangsa, kita memerlukan pembedahan total; yakni, revolusi. Ada kerinduan untuk menyongsong revolusi. Ada kebanggaan dalam gerakan revolusioner. Ada banyak contoh bangsa-bangsa besar lahir dari puing-puing revolusi. Tetapi, pada saat yang sama, ada ketakutan akan kedahsyatan revolusi. Bayangan kita tentang revolusi itu ambigu. Pada satu sisi, revolusi dipandang sebagai pelita harapan, yang membimbing kita dari kegelapan *status quo* pada cahaya masa depan. Pada sisi lain, revolusi dilihat sebagai momok yang mengerikan, bersimbah darah, dan penuh adegan kekerasan (Sztompka, 2004).

Revolusi adalah manifestasi perubahan sosial yang paling spektakuler. Revolusi menengarai guncangan fundamental dalam proses sejarah, membentuk kembali masyarakat dari dalam dan merancang lagi bangsa. Revolusi tidak

membiarkan apapun seperti sebelumnya; revolusi menutup satu zaman dan membuka zaman baru. Pada saat revolusi, masyarakat mengalami puncak perannya, ledakan potensi transformasi diri. Pada bangkitnya revolusi, masyarakat dan para anggotanya seakan-akan dihidupkan kembali, hampir dilahirkan kembali. Dalam pengertian ini, revolusi adalah tanda kesehatan sosial. Karena muatan makna yang sarat ideologis, revolusi sering dirancukan dengan berbagai cara perubahan sosial lainnya. Revolusi memang perubahan yang cepat; tetapi tidak semua perubahan yang cepat disebut revolusi. Menurut Sztompka, paling tidak ada lima ciri yang membedakan revolusi dari jenis-jenis perubahan sosial lainnya:

1. Revolusi menimbulkan perubahan pada skala yang paling luas; menyentuh semua tahap dan dimensi masyarakat: ekonomi, politik, budaya, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, kepribadian manusia.
2. Pada semua bidang kehidupan ini, perubahannya bersifat radikal, fundamental, mencapai akar atau inti dari konstitusi dan fungsi masyarakat.
3. Perubahan berlangsung dengan sangat cepat, seperti sebuah ledakan dinamika yang terbersit dari arus lambat proses sejarah.
4. Revolusi juga menunjukkan perubahan yang paling kentara; karena itu paling dikenang.
5. Revolusi menimbulkan reaksi emosional dan intelektual yang sangat istimewa pada para peserta atau saksi revolusi: semangat yang membara, ledakan mobilisasi massa, optimisme, perasaan perkasa, kegembiraan dalam keikutsertaan pada 'pesta' revolusi; aspirasi yang melangit dan utopia masa depan.

Perubahan sosial bisa dilakukan dengan revolusi atau *people's power*. Revolusi atau *people's power* merupakan bagian dari *power strategy* (strategi perubahan sosial dengan kekuasaan). Dan revolusi merupakan puncak dari semua bentuk perubahan sosial. Karena, ia menyentuh segenap sudut dan dimensi sosial secara radikal, massal, cepat, mencolok, dan mengundang gejolak intelektual dan emosional dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Strategi perubahan yang lainnya adalah *persuasive strategy* (strategi persuasif). Dalam strategi ini, media massa bisa sangat berperan. Karena, pada umumnya, strategi persuasif dijalankan lewat pembentukan opini dan pandangan masyarakat yang tidak lain melalui media massa. J.A.C. Brown memasukkan propaganda dalam strategi persuasif untuk melakukan perubahan sosial (Ritzer, 2003).

E. Keberlanjutan dalam Sejarah

Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Roeslan Abdulgani (1963) menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap tiga dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini sejalan dengan *Arnold J. Toynbee* (2004) yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau, untuk membangun masa depan (*to study history is to study the past to build the future*).

Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu, dalam ilmu sejarah menurut Kuntowijoyo (2013) meliputi perkembangan, keberlanjutan/kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Semua aspek itu memberikan pengaruh yang signifikan dalam sejarah, sehingga secara pasti dinamika perjalanan sejarah sebuah bangsa berlangsung dalam bingkai perkembangan, keberlanjutan/kesinambungan, pengulangan dan perubahan yang tidak pernah berhenti dalam satu titik atau pola.

Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Misalnya adalah perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Pada awalnya masyarakat di Amerika tinggal di kota-kota kecil. Di kota-kota kecil itulah tumbuh dewan-dewan kota, tempat orang berkumpul. Dari kota-kota kecil mengalami proses menjadi kota-kota besar hingga menjadi kota metropolitan. Di sini, demokrasi berkembang mengikuti perkembangan kota. Kesenambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukan, Belanda meniru raja-raja pribumi. Sementara itu disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya, misalnya menjelang presiden Soekarno jatuh dari kekuasaannya pada tahun 1960-an banyak terjadi aksi dan demonstrasi,

khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa. Demikian halnya menjelang presiden Soeharto jatuh pada 1998, juga banyak terjadi aksi dan demonstrasi. Sedangkan dikatakan perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya gerakan nasionalisme di Indonesia sering dianggap sebagai kepanjangan dari gerakan romantik di Eropa.

Berhubungan dengan konsep keberlanjutan ini lah dikisahkan kehidupan manusia pada masa lalu. Masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun, masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa datang (Kuntowijoyo, 2013).

F. Rangkuman

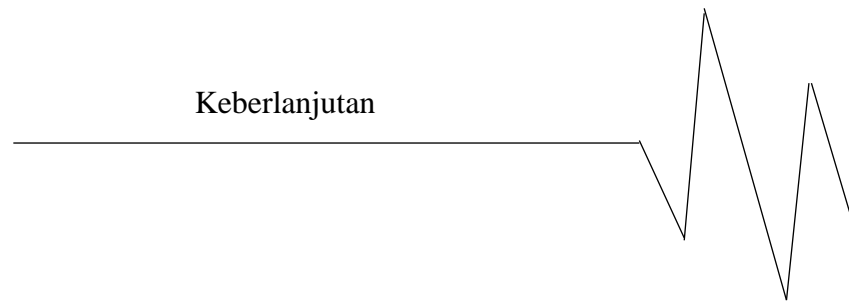
Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan modul tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Dengan demikian, Anda sebagai guru sejarah telah mampu menganalisis konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah untuk diajarkan kepada peserta didik. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dalam modul ini adalah sebagai berikut.

1. Pada dasarnya sejarah ialah kisah masyarakat manusia atau kisah kebudayaan dunia, yaitu kisah perubahan-perubahan yang terjadi karena kodrat masyarakat itu seperti masa kebiadaban, masa saling membantu terus ke masa persatuan golongan, kisah revolusi, pemberontakan yang timbul antara bangsa dengan bangsa dan kisah kerajaan-kerajaan dan negara-negara yang timbul karena revolusi dan pemberontakan itu, kisah kegiatan dan pekerjaan manusia, yaitu pekerjaan untuk mendapatkan nafkah, atau kegiatan dalam macam-macam ilmu dan usaha, dan umumnya kisah dari perubahan yang terjadi karena kodrat manusia.
2. Sejarah memiliki tiga kegunaan, yaitu sejarah sebagai pelajaran, sejarah sebagai inspirasi, dan sejarah sebagai rekreasi.
3. Sejarah sebagai ilmu adalah sebuah kumpulan fakta yang ada. Fakta tersebut diseleksi oleh Sejarawan untuk ditemukan validitasnya dan menurut perspektif

masing-masing sejarawan. Jadi jelaslah bahwa fakta sejarah yang dapat menghasilkan penggambaran yang berbeda dari suatu peristiwa sejarah, hal tersebut didasarkan pandangan yang berbeda dari setiap Sejarawan berdasarkan subjektivitasnya. Diperkuat dengan fakta bahwa sejarah Sejarah Memiliki Objek, Sejarah Memiliki Teori, Sejarah Memiliki Generalisasi, dan Sejarah Memiliki Metode.

4. Gerak sejarah berpangkal pada kemajuan (evolusi), yaitu keharusan yang memaksa segala sesuatu untuk maju. Manusia melenyapkan sorga-neraka sebagai tujuan, tujuan fatum yang serba tidak tentu diberi batasan yang jelas. Gerak sejarah menuju ke arah kemajuan yang tidak ada batasnya. Evolusi tak terbatas adalah tujuan manusia. Abad ke-18 dan 19 merupakan masa revolusi jiwa yang luar biasa, yaitu suatu revolusi yang mematahkan kekuatan heteronomi. Hukum siklus yang mengekang daya pencipta lenyap kekuatannya. Lingkaran *cakra manggilingan* diterobos dan gerak sejarah tidak berputar-putar lagi, tetapi maju menurut garis lurus yang tidak ada akhirnya. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa sejarah digerakan oleh tiga aspek, yaitu ideas, orang-orang besar, dan revolusi.
5. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Roeslan Abdulgani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap tiga dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini sejalan dengan Arnold J. Toynbee yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau, untuk membangun masa depan (*to study history is to study the past to build the future*). Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu, dalam sejarah juga membahas perkembangan, keberlanjutan/kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Adapun konsep keberlanjutan adalah kebalikan dari konsep perubahan, yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contoh konsep keberlanjutan adalah Wangsa Syailendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Konsep

keberlanjutan digambarkan sebagai garis lurus hingga terjadi perubahan yang digambarkan dengan zig-zag.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. 1963. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Prapanca.
- Abdullah, Taufik. 1996. “Di Sekitar Pengajaran Sejarah yang Reflektif dan Inspiratif”. Dalam Jurnal Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi 6 oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Alfian, T. Ibrahim. 1989. *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-191*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ali, R. Moh. 2005. *Pengantar Ilmu Sedjarah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Carlyle, Thomas. 1841. *On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History*. Six Lectures. London: James Fraser.
- Collingwood R.G. 1966. *The Idea Of History*. UK: Oxford University Press
- Dewey, Jhon. 1959. *Democracy and Education*. New York: Mac Millan.
- Carr, E.H. 2014. *Apa Itu Sejarah?*. Depok: Komunitas Bambu.
- Gazalba, Sidi. 1966. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara
- Hamid, A.R dan Madjid, M.S. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Ibrahim, M. Yusof. 1986. *Pengertian Sejarah, Beberapa Perbahasan Mengenai Teori dan Kaedah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
- Ibrahim, M. Yusof. 1997. *Ilmu Sejarah, Falsafah, Pengertian dan Kaedah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Jarolimiek, J. 1971. *Sosial studies in Elementary Education*. New York: McMillan Publising Company.
- Kartodirdjo, Sartono. “Beberapa Persoalan Sekitar Perkembangan Nasionalisme Indonesia”, *Lembaran Sejarah No.1*, 1967, Yogyakarta: Seksi Penelitian Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lapian, A.B., dkk. 1996 *Terminologi Sejarah 1945-1949 & 1950-1959*. Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat SEjarah dan Nilai TRadisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen. Pendidikan dan Kebudayaan.
- Margono, Slamet. 1985. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Rahmat, Jalaludin. 1999. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George. 2003. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rowse, A.L. 1963. *The Use of History*. London: McMillan and Co.

- Soehartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suntralingam, R. 1985. *Pengenalan Kepada Sejarah*. Kuala Lumpur: Merican and Sons., Sdn. Bhd.
- Sutrasno. 1975. *Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tamburaka, Rustam E. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Toynbee, Arnold. 2004. *Sejarah Umat Manusia (Mankind and Mother Earth): A Narrative History of the World*. Alih Bahasa. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Widja, I Gde. 1997. “Permasalahan Metodologi dalam Pengajaran Sejarah di Indonesia suatu tinjauan reflektif dalam mengantisipasi perkembangan abad XXI” dalam Kongres Nasional Sejarah 1996 Jakarta Sub Tema Perkembangan Teori dan Metodologi dan Orientasi Pendidikan Sejarah. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

SUMBER DAN METODE PENELITIAN SEJARAH

Nina Witasari

A. Sumber-sumber Sejarah

Seseorang yang mempelajari sejarah, harus memiliki cara pandang yang benar tentang sejarah. Sejarah bukan serangkaian fakta yang kering dan mati, melainkan memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, melalui sumber dan data yang diolah menjadi fakta-fakta yang kemudian dijalin menjadi sebuah penjelasan yang kronologis tentang sesuatu, peristiwa maupun tentang seseorang. Sumber sejarah seringkali disebut juga “data sejarah”. Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. Adapun klasifikasi sumber sejarah itu dapat dibedakan menurut bahannya, asal usul atau urutan penyampaian, dan tujuan sumber itu dibuat. Jenis sumber sejarah berdasarkan bahannya.

Sumber tertulis

Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan, dalam arti sempit biasa disebut dengan dokumen. Adapun dokumen dalam arti yang luas meliputi monument, artefak, foto-foto, dan sebagainya. Data yang tercantum dalam bahan-bahan documenter itu pada dasarnya merupakan alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, terutama tentang permasalahan yang tidak dapat diobservasi lagi atau tidak dapat diingat lagi. Pengkategorian dokumen tertulis secara luas lagi ditunjukkan Louis Gottschalk (1983: 60-77) menjadi 8 jenis sebagai berikut: (1) rekaman sejaran: instruksi, rekaman stenografis dan fonografis, surat-surat keluarga, dan buku-buku catatan dan memori pribadi, (2) Laporan konfidensial: berita resmi militer dan diplomatik, jurnal atau buku harian, dan surat-surat pribadi, (3) laporan umum: surat-surat kabar, memoir dan otobiografi, sejarah resmi atau diotorisasi, (4) Questionnaire tertulis tentang informasi dan opini, (5) Dokumen-dokumen pemerintah: laporan badan pemerintahan, undang-undang dan peraturan-peraturan, (6) pernyataan Opini: tajuk rencana, esei, pidato,

brostur, surat kepada redaksi, dan sebagainya, (7) Fiksi, nyanyian, dan puisi, (8) cerita rakyat atau folklore, nama-nama tempat, dan pepatah atau peribahasa. Hubungan antara konsep dan data dari dokumen-dokumen, digambarkan oleh Sartono Kartodirjo bahwa data sosial secara konseptual bisa dilihat dari ciri-ciri setiap bentuk bahan dokumenter dibawah ini.

- a. **Otobiografi.** Data otobiografi sangat berguna bagi psikologi, karena di dalam dokumen seperti itu termuat faktor-faktor subyektif, seperti segi-segi afektif, motivasi, harapan-harapan, dan pengalaman, termasuk juga di dalamnya interpretasi serta konseptualisasi terhadap faktor-faktor itu. Otobiografi dapat pula memberikan data tentang faktor-faktor obyektif, umpamanya nilai sosial, proses sosial, situasi sosial, dan perubahan sosial. Contoh otobiografi Muhammad Natsir karya Yusuf Abdullah Puar.
- b. **Surat pribadi, catatan atau buku harian dan memoirs.** Surat pribadi sebagai bahan dokumenter biasanya memuat hal-hal yang penting. Contoh yang paling akrab dengan sejarah masyarakat Indonesia adalah surat-surat R.A. Kartini kepada nyonya Abendanon, yang terkumpul dalam buku *Habis gelap Terbitlah Terang*. Buku harian merupakan dokumen yang sangat pribadi sifatnya. Dokumen semacam ini jarang sekali didapatkan, apalagi untuk masa lampau boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Satu contoh diantara catatan harian yang langka ialah *Jakarta diary* dari Mochtar Lubis, yang banyak memuat data tentang situasi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Memoirs merupakan kisah perjalanan, sehingga bisa didapatkan data tentang keadaan suatu negeri, kota, atau daerah. Misalnya kisah perjalanan yang ditulis oleh Tome Pires dalam *Suma Oriental*.



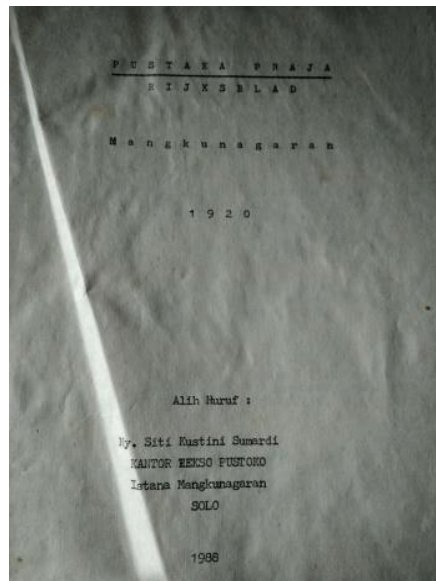
- c. Surat Kabar. Data yang dimuat dalam surat kabar kadang telah menunjukkan fakta, disamping juga merupakan opini, interpretasi, dan pikiran-pikiran spekulatif. Subjektivitas surat kabar cukup jelas, karena pada umumnya merupakan penyaluran aspirasi dari golongan politik atau social tertentu. Bagaimanapun surat kabat tetap berguna untuk melengkapi dokumen-dokumen lain, bahkan merupakan dokumen inti untuk membantu penentuan tanggal dari sumber lain.



- d. Dokumen pemerintah. Di dalam dokumen pemerintah biasanya dimuat keputusan-keputusan, berita-berita, laporan-laporan pemerintah tentang peristiwa-peristiwa, laporan tahunan, data statistik, pernyataan pemerintah, daftar personalia dalam birokrasi dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini lebih bersifat

~ Nina Witasari ~

sepihak (pemerintah), tidak mencerminkan pikiran, ide, sentimen, aktivitas serta hubungan sosial pada rakyat.



- e. Cerita Roman. Karya sastra seperti roman dan novel pada dasarnya bukan hanya merupakan karya ekspresif seseorang pengarang, tetapi didalamnya juga kadang terungkap data yang menyangkut keadaan sosial dari periode tertentu. Bahkan penggambaran keadaan sosial itu cenderung lebih mendekati kenyataan dan tidak dilukiskan semata-mata menurut fantasi atau imajinasi yang bebas. Misalnya serat musyawaratan para wali, tokoh-tokoh dalam cerita ini menunjukkan struktur keagamaan, serat centini yaitu karangan yang menggambarkan kehidupan sosial dari periode awal dan pertengahan Mataram.



Sumber Tak Tertulis

Termasuk dalam kategori sumber tak tertulis itu adalah artifak dan sumber lisan. Artifak dapat berupa foto-foto, bangunan, atau alat-alat. Sumber tidak tertulis yang lain adalah sumber lisan. Sumber ini secara metodologis merupakan bahan inti bagi sejarah lisan. Garaghan (1957:259-260) mengklasifikasikan sumber yang dimaksud menjadi dua kategori:

- a. Penyebaran lisan tentang kejadian-kejadian yang baru, dalam arti lain tentang peristiwa-peristiwa yang masih terekam dalam ingatan orang. Data lisan seperti ini dapat dicapai melalui dua jalan: pertama, melalui saksi mata yang paling dekat dengan kejadian, dan kedua, melalui saksi perantara karena sulit meruntut kembali saksi terdekat.



Gambar kegiatan wawancara dengan salah satu korban meluapnya sungai Huaycoloro, Peru, 16 Maret 2017

- b. Penyebaran lisan tentang peristiwa-peristiwa yang tipis kemungkinan terjadinya. Sumber ini lebih dikenal dengan istilah tradisi lisan (*oral tradition*), yakni informasi-informasi tentang kejadian sejarah disebarkan dari mulut ke mulut; saksi terdekat maupun saksi perantara tidak dikenal, kecuali saksi yang menghubungkan informasi itu kepada pendengar.



Fr. Thomas Rosica dalam sebuah wawancara sebagai CEO *the Salt and Light Catholic Media Foundation*, dalam program acara WITNESS di kanal TV CBS

Sejarah Lisan

Sejarah lisan secara sederhana dapat dipahami sebagai peristiwa-peristiwa sejarah terpilih yang terdapat di dalam ingatan hampir setiap individu manusia. Dengan pemahaman seperti itu, menjadi jelas ada di mana sebenarnya sejarah lisan. Sejarah lisan ada di dalam memori manusia. Untuk itu, agar sejarah lisan dapat digunakan sebagai sumber sejarah, perlu ada upaya untuk mengeluarkannya dari memori individu manusia. Tanpa itu, bisa jadi sejarah lisan tidak akan pernah bisa digunakan sebagai sumber sejarah dan akan menjadi hak milik abadi sang pemilik kisah. Dalam kaitannya dengan upaya untuk mengeluarkan sejarah lisan dari memori individu manusia maka akan sampailah pada pembicaraan tentang cara, teknik, atau metode untuk mengeluarkannya. Cara, teknik, atau metode untuk mengeluarkan sejarah lisan ini untuk mudahnya bisa disebut sebagai metode sejarah lisan.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Penelitian Sejarah Lisan

Metode sejarah lisan adalah suatu metode pengumpulan data atau bahan guna penulisan sejarah yang dilakukan sejarawan melalui wawancara terhadap para pelaku sejarah yang ingin diteliti. Di Indonesia metode wawancara dalam penulisan sejarah mulai dikembangkan dengan diawali adanya proyek sejarah lisan yang ditangani oleh Badan Arsip Nasional. Berkembangnya metode wawancara dalam penulisan sejarah di Indonesia dilatarbelakangi oleh sulitnya menemukan jejak masa lampau berupa dokumen yang sezaman serta makin berkembangnya perhatian studi sejarah

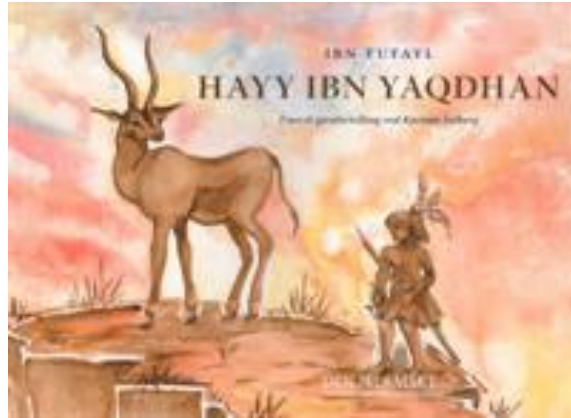
yang mengarah ke subyek masyarakat berupa orang kecil dalam peristiwa kecil yang biasanya tidak meninggalkan jejak berupa dokumen.

Wawancara adalah kegiatan melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan keterangan tertentu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang amat penting dalam penelitian survey selain teknik utama berupa Observasi. Oleh karena itu, dalam penelitian survei, teknik wawancara merupakan pembantu utama dari metode Observasi. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara terbagi menjadi tiga macam:

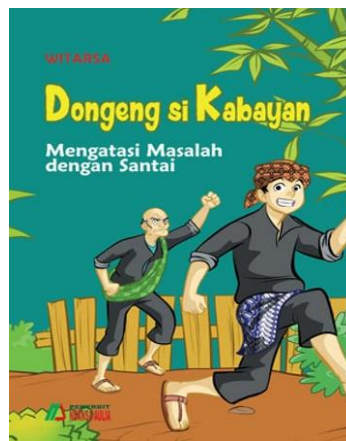
- a. *Poll Type Interview*. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan jawaban yang telah ditentukan, narasumber tinggal memilih jawaban yang ada.
- b. *Open Type Interview*. Wawancara dilakukan dengan cara pertanyaan ditentukan terlebih dahulu, sedangkan narasumber dapat menjawab bebas.
- c. *Nonstructured Interview*. Wawancara dilakukan dengan cara pertanyaan ataupun jawaban tidak ditentukan sebelumnya. Teknik wawancara merupakan teknik yang bersifat pelengkap artinya wawancara digunakan untuk melengkapi data atau informasi yang berasal dari sumber dokumen. Namun apabila sumber dokumen tidak ada barulah informasi hasil wawancara dapat dianggap sebagai bahan pokok penelitian.

Garraghan menyebutkan sejumlah terminologi mengenai sumber lisan yang kedua, *oral tradition*, sebagai berikut:

- a. Fabel (*fable*), yaitu cerita yang aktornya terdiri dari binatang-binatang buas, burung-burung, makhluk hidup yang bukan manusia atau personifikasi abstrak lainnya yang mengambil perwatakan manusia. Contohnya karya Hayy Ibn Yaqdan seperti dalam ilustrasi berikut,



- b. Dongeng (*tale*) suatu cerita yang berkaitan dengan waktu, tempat dan actor yang tidak menentu. Contohnya Dongeng Si Kabayan.



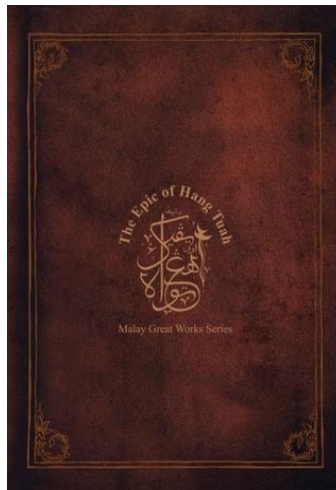
- c. Mitos (*myth*) suatu cerita atau sejenisnya yang bersumber seperti halnya sejarah, tetapi sarat dengan khayalan. Contohnya kisah para wali yang seringkali mengarah kepada bentuk mitos logis oleh para pengagumnya.



- d. Legenda (*legend*) suatu cerita yang dalam berbagai hal berisi kebenaran, termasuk di dalamnya elemen-elemen historis seringkali mengandung isi aktual. Contohnya situs kota Troya Lama diketemukan berdasarkan legenda Helen of Troy atau Great Horse of Troy.



- e. Saga, yaitu cerita yang berpusat pada tokoh pahlawan. Saga biasanya merupakan cerita yang diambil dari fakta atau kebenaran dalam literatur dengan mengungkapkan tokoh-tokoh pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanannya.



B. Langkah dalam penelitian Sejarah

Sejarawan Louis Gottschalk mengemukakan bahwa fakta sejarah merupakan keterangan yang disimpulkan dari bahan sejarah melalui kritik sejarah. Dalam pada itu, berbagai dokumen peristiwa sejarah merupakan fakta sejarah, yang disebut data. Data merupakan bahan yang perlu diolah, diseleksi dan dikategorikan atas dasar kriteria seleksi tertentu baru kemudian menjadi fakta.

Gilbert J. Garraghan (1957:33), bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Secara lebih ringkas, setiap langkah ini berturut-turut biasa juga diistilahkan dengan heuristik, kritik atau verifikasi,

interpretasi, dan historiografi. Sebelum keempat langkah ini sebenarnya ada satu kegiatan penting, yang oleh Kuntowijoyo (1995:98) ditambahkan menjadi lima tahap penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik dan rencana penelitian.

a. Pemilihan Topik Penelitian. Topik penelitian adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan atau diatasi melalui penelitian ilmiah. Topik tidak sama dengan judul, karena yang dimaksud dengan judul adalah abstraksi dari masalah atau topik yang dirumuskan dalam bentuk kalimat. Kuntowijoyo (1996:90) topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dua syarat ini dapat dipahami, bahwa topik itu bisa ditemukan atas (1) kegemaran tertentu atau pengenalan yang lebih dekat tentang hal yang terjadi disekitarnya atau pengalaman peneliti, dan (2) keterkaitan peneliti dengan disiplin ilmu atau aktivitasnya dalam masyarakat.

b. Teknik penyusunan Rencana Penelitian. Rencana penelitian bisa juga disebut usul atau proposal penelitian. Perencanaan penelitian pada pokoknya merupakan serentetan petunjuk yang disusun secara logis dan sistematis. Suatu perencanaan penelitian dalam bidang ilmiah apapun, dan khususnya bidang sejarah, membutuhkan pemikiran yang seksama sehingga seringkali memakan waktu yang tidak sebentar. Isi proposal penelitian pada umumnya terdiri atas:

- 1) Latar Belakang. Dalam latar belakang biasanya diidentikkan dengan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini uraian mengenai latar belakang suatu politik hanyalah garis besarnya saja. Dalam latar belakang perlu dikemukakan keaslian penelitian, yaitu menjelaskan bahwa masalah yang perlu dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah dilakukan.
- 2) Perumusan masalah. Bentuk perumusan masalah pada umumnya berupa kalimat pertanyaan, tetapi bisa juga dalam kalimat pernyataan yang bersifat menggugah perhatian.
- 3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian. Tujuan penelitian adalah tindak lanjut terhadap masalah yang diidentifikasi, sehingga apa yang dituju hendaklah sesuai dengan urutan masalah yang telah dirumuskan.

- 4) Lingkup Penelitian. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tidak terjerumus dalam sekian banyak data yang diteliti. Oleh karena itu luasan dan batasan penelitian dalam tempat dan waktu perlu dijelaskan.
 - 5) Tinjauan Pustaka. Bagian ini berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.
 - 6) Landasan Teori. Penyusunan landasan teori pada umumnya dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti.
 - 7) Hipotesis. Isi hipotesis adalah kesimpulan sementara yang dinyatakan dari landasan teori atau tinjauan pustaka.
 - 8) Metode Penelitian. Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti akan dihadapkan pada tahap pemilihan metode atau teknik pelaksanaan penelitian. Sedikitnya ada lima macam metode penelitian yang bisa dipilih: historis, deskriptif, korelasional, eksperimental, dan kuasi-eksperimental (surakhmad, 1984). Metode historis bertumpu pada empat langkah kegiatan: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.
- c. Teknik pengumpulan sumber.** Teknik yang dimaksud bisa dinamakan heuristik, yaitu suatu teknik, suatu seni, bukan suatu ilmu. Heuristic seringkali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci bibliografi, atau mengklarifikasi dan merawat catatan-catatan.
- d. Teknik Verifikasi; Kritik Sumber.** Seorang peneliti sejarah perlu meneliti dengan cermat semua teks dari sumber-sumber itu serta merasa yakin dalam memahami kata perkata serta ungkapan teks-teks itu dengan benar, baik yang masih berupa manuskrip maupun yang sudah dicetak, sebelum peneliti memanfaatkan segala informasi yang terdapat di dalam teks-teks tadi. Dalam hal ini yang juga harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern, dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.
- 1) Keaslian sumber (Otentitas). Peneliti melakukan pengujian atas asli dan tidaknya sumber berarti ia menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Otentitas itu minimal dapat diuji berdasarkan lima pernyataan

pokok yaitu: kapan sumber itu dibuat?, dimana sumber dibuat?, siapa yang membuat?, dari bahan apa sumber dibuat?, apakah sumber itu dalam bentuk asli?

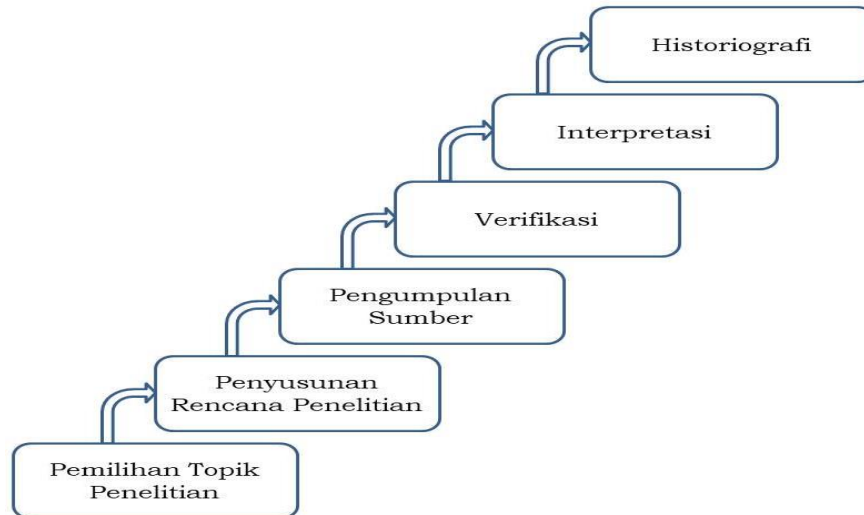
- 2) Kesahihan sumber. Penyebab kesahihan sumber sangatlah kompleks, selain kekeliruan bisa juga karena perspektif perasaan, karena ilusi dan halusinasi, sintesis dari kenyataan yang dirasakan dalam reproduksi dan komunikasi, dan kekeliruan lebih sering terjadi dalam catatan sejarah.

e. Teknik Interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Didalam proses interpretasi sejarah, seorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian factor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Didalam proses interpretasi sejarah, seorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Dalam meninterpretasikan sejarah, peneliti kadang terpaksa membuat dugaan yang dibayangkan dari data yang ada dan berusaha untuk menemukan penjelasannya sesuai dengan dugaan-dugaan itu. Metode interpretasi sejarah pada umumnya sering diarahkan kepada pandangan para ahli filsafat, sehingga sejarawan bisa mendapatkan kemungkinan jalan pemecah dalam menghadapi masalah historis.

f. Teknik penulisan: Historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Peneliti sejarah hendaknya memiliki kemampuan mengungkapkan bahasa yang dipakai untuk menulis secara baik, harus mengerti bagaimana memilih kata dan gaya bahasa yang mengungkapkan maksudnya. Hal yang membedakan penulisan sejarah dari penulisan ilmiah bidang ilmiah bidang lain ialah penekanannya pada aspek kronologis. Karena itu alur pemaparan fakta harus selalu diurutkan kronologisnya, sekalipun yang yang ditunjukkan di dalam pokok setiap pembahasan adalah tema tertentu tetap saja harus yang sesuai dengan batasan waktu tertentu pula.

Alur tahapan penelitian sejarah

Di dalam tahapan akhir penelitian sejarah ada kegiatan lain yang tidak kalah penting yaitu **Analisis dan Sintesis Sumber Sejarah**.



Secara garis besar keduanya akan dijelaskan sebagai berikut:

Analisis. Secara etimologis, kata ‘analisis’ yang dalam Bahasa Inggris ‘analysis’ berasal dari leksem bahasa Yunani *analyzein* (gabungan morfem *ana-* dan *lyein*) berarti ‘melonggarkan’ atau ‘memisahkan’ (memisahkan keseluruhan menjadi bagian-bagian). Dalam Kamus Meriam-Webster (2009: CD-ROM version), kata ‘analisis’ memiliki beberapa dimensi makna. Dua di antaranya yang berkaitan dengan filsafat dimaknai dengan “*a method in philosophy of resolving complex expressions into simpler or more basic ones*” (metode dalam filsafat yang menguraikan ungkapan yang rumit ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau yang lebih mudah) dan “*clarification of an expression by an elucidation of its use in discourse*” (klarifikasi ungkapan dengan cara menjelaskan penggunaannya dalam wacana). Selain itu, dalam konteks kebahasaan, ‘analisis’ dimaknai sebagai penyederhanaan bentuk kata dengan memisahkan akar kata dari imbuhan sebagai salah satu metode bedah bahasa. Jika analisis (Meriam Webster, 2009) dikategorikan sebagai metode berpikir dalam mengungkapkan pengetahuan dan kebijaksanaan, maka tentu di dalamnya terdapat serangkaian fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk menguraikan ataupun menyederhanakan ungkapan atau hasil pemikiran. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjelaskan setiap entitas yang dikandung dalam ungkapan pemikiran dan perasaan manusia.

Menurut istilah, ‘analisis’ merupakan bentuk kegiatan logika yang menyarikan *kebenaran* konkret suatu proposisi, dan memusatkan perhatian mula-mula dan terutama pada *forma* telanjangnya (yang pada dasarnya matematis), yaitu *nilai* kebenarannya (Palmquist, 2000). Dalam filsafat analitik (positivisme), analisis dirumuskan oleh Russel (1997) dengan pernyataan, “Dalam percobaan yang dilakukan secara serius, tidaklah selayaknya kita tempuh dengan menggunakan bahasa biasa, sebab susunan bahasa biasa itu selain buruk, juga bermakna ganda arti. Oleh karena itu saya bermaksud meyakinkan bahwa sikap bersikeras atau kepala batu untuk tetap menggunakan bahasa biasa dalam mengungkapkan pemikiran kita adalah penghalang besar bagi kemajuan filsafat.” Analisis pada akhirnya dimaknai sebagai kegiatan berpikir yang melakukan perincian terhadap istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagiannya agar dapat menangkap makna yang dikandungnya atau memahami komponen terlebih dahulu kemudian menguraikan komponen.

Sintesis. Sintesis merupakan bentuk lain dari kegiatan atau metode berpikir. Secara sederhana, Russel menyatakan bahwa sintesa logik berarti menentukan makna pernyataan atas dasar empirik. Meskipun demikian, kebenaran proposisi Russel perlu dianalisis dengan membedah pengertian yang dikemukakan. Secara etimologis, sintesis berasal dari bahasa Yunani *syntithenai* (syn- + *tithenai*) yang berarti ‘meletakkan’ atau ‘menempatkan’ (Meriam-Webster Dictionary, 2009). Lebih lanjut, dalam suber yang sama, entri sintesis diartikan sebagai komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan. Selain itu, sintesis juga diartikan sebagai kombinasi konsep yang berlainan menjadi satu secara koheren, dan penalaran induktif atau kombinasi dialektika dari tesis dan antitesis untuk memperoleh kebenaran yang lebih tinggi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) sintesis diartikan sebagai “paduan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras atau penentuan hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus.” Pengertian ini sejalan dengan pendapat Kattsof (1986) yang menyatakan bahwa logika sintesis adalah kegiatan berpikir logis yang melakukan penggabungan semua pengetahuan yang diperoleh untuk menyusun suatu pandangan atau konsep. Sintesis dalam filsafat merupakan kombinasi bagian atau elemen untuk menghasilkan pandangan atau sistem

yang lebih lengkap atau sempurna. Koherensi yang dihasilkan dianggap mampu menunjukkan kebenaran secara lengkap daripada hanya sebagai kumpulan dari bagian-bagian. Istilah sintesis juga merujuk pada peningkatan derajat kebenaran yang mengkombinasikan kebenaran tesis dan antitesis dalam filsafat dialektika Hegel berkebangsaan Jerman abad ke-19. Filsafat Jean-Paul Sartre menekankan jenis eksistensi sintesis. Dalam *Being and Nothingness*, kesadaran (*pour-soi*) selalu mencoba menjadi ada (*en-soi*), untuk mencapai sebuah sintesis sebagaimana adanya antara ke-ada-an dan ketiadaan. Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa analisis dan sintesis merupakan bentuk kegiatan berpikir atau berlogika yang menggunakan bahasa dan referensinya sebagai alat bedah nalar bagi proposisi untuk menyatakan kebenaran sebuah pernyataan.

Relasi Ganda dalam Analisis Sintesis

Istilah “analisis” dan “sintesis”, sebagai label pembedaan metode argumentasi antara yang deduktif dan induktif setidaknya seusia dengan Euklides. Dalam *Elements*-nya, Euklides menerangkan se jelas-jelasnya bahwa dua metode ini sebaiknya tidak dipahami sebagai saling terpisah, tetapi saling *melengkapi*. Metodenya memperlihatkan ketepatan teorema-teorema geometrisnya dengan mula-mula menggunakan metode argumentasi analitik (deduktif), dan kemudian mendukung simpulannya dengan penalaran sintetik (induktif). Proses praktis penyusunan deduksi (berlawanan dengan bentuk tertulisnya) berawal dengan perumusan suatu simpulan, lalu pembuktiannya dengan pencarian dua atau lebih asumsi yang benar yang bisa berfungsi sebagai landasannya. Proses induksi berawal dengan pengumpulan potongan-potongan *bukti empiris*, lalu ini digunakan sebagai landasan untuk menarik kesimpulan.

Sebagai sebuah metode, penelitian sejarah juga memerlukan pendekatan ilmu lain untuk membantu menganalisis berbagai fenomena terkait sumber yang tersedia. Dalam kerangka itulah modul ini juga dilengkapi dengan pengetahuan mengenai pendekatan sejarah yang menjelaskan dari segi mana kajian sejarah hendak dilakukan, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkannya, dan lain sebagainya. Deskripsi dan rekonstruksi yang diperoleh akan banyak ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipergunakan. Oleh sebab itu ilmu sejarah tidak segan-segan

melintasi serta menggunakan berbagai bidang disiplin atau ilmu untuk menunjang studi dan penelitiannya, yang di dalam ilmu sejarah sudah sejak awal telah dikenalnya dan disebut sebagai Ilmu-ilmu Bantu Sejarah (*sciences auxiliary to history*).

Pendekatan-pendekatan dalam Sejarah

- a. **Pendekatan Manusia.** Penelitian sejarah selalu berarti penelitian tentang sejarah manusia. Fungsi dan tugas penelitian sejarah ialah untuk merekonstruksi sejarah masa lampau manusia (*the human past*) sebagaimana adanya (*as it was*). Harus disadari sepenuhnya bahwa betapapun cermatnya suatu penelitian sejarah, dengan tugas rekonstruksi semacam itu seorang sejarawan akan masih tetap menghadapi sejumlah problem yang tidak mudah. Dengan memberikan aksentuasi "sejarah manusia" untuk mengingatkan bahwa penelitian dan rekonstruksi sejarah hendaknya lebih berperspektif pada konsep manusia seutuhnya. Manusia adalah makhluk rohani dan jasmani. Rohani dengan manifestasinya dalam bentuk akal, rasa, dan kehendak, yang menjadi sumber eksistensi kemanusiaannya, namun eksistensi hanya nyata dalam realitas di dalam alam jasmani. Perkembangan rohani manusia menjadi nampak dalam wadah agama, kebudayaan, peradaban, ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Manusia juga beraspek individu sekaligus sosial, unik (partikular) sekaligus umum (general). Keduanya sekaligus merupakan keutuhan (integritas), kesatuan (entitas), dan keseluruhan (totalitas). Rekonstruksi sejarah pun hendaknya utuh dan menyeluruh.
- b. **Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial.** Melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial dimungkinkan ilmu sejarah memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai makna-makna peristiwa sejarah. Thomas C. Cochran, misalnya, telah menerapkan konsep peranan sosial (*social role*) dalam melaksanakan eksplorasi dan eksplanasi mengenai berbagai sikap, motivasi serta peranan tokoh masyarakat Amerika pada Abad XIX. Konsep mobilitas sosial (*social mobility*) telah membuktikan sangat berguna dalam studi berbagai segi masyarakat masa lampau.
- c. **Pendekatan Sosiologi.** Pendekatan sosiologi dalam ilmu sejarah, menurut Max Weber, dimaksudkan sebagai upaya pemahanan interpretatif dalam kerangka memberikan penjelasan (eksplanasi) kausal terhadap perilaku-perilaku sosial dalam sejarah. Sejauh ini perilaku-perilaku sosial tersebut lebih dilekatkan pada

makna subjektif dari seorang individu (pemimpin atau tokoh), dan bukannya perilaku massa. Pendekatan sosiologi dalam ilmu sejarah menghasilkan sejarah sosial. Bidang garapannya pun sangat luas dan beraneka ragam. Kebanyakan sejarah sosial berkaitan erat dengan sejarah sosial-ekonomi. Tulisan Marc Bloch mengenai French Rural History, Sartono Kartodirdjo tentang Peasants' Revolt of Banten. Kelas sosial, terutama kaum buruh, menjadi bidang garapan juga bagi sejarah sosial di Inggris. Demikian pula proses transformasi sosial dengan berkembangnya pembagian kerja sosial yang kian rumit dan diferensiasi sosial yang menjadi sangat bervariasi dan terbentuknya aneka ragam institusi sosial juga tidak pernah luput dari pengamatan sejarawan sosial. Tema-tema seperti : kemiskinan, perbanditan, kekerasan dan, kriminalitas dapat menjadi bahan tulisan sejarah sosial. Di pihak lain seperti kesalehan, kekesatriaan, pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, transportasi, kesejahteraan, dan lain-lain telah banyak dikaji dan semakin menarik minat para peneliti sejarah (Kuntowijoyo, 1993 : 42-43).

- d. Pendekatan Antropologi.** Pendekatan antropologi mengungkapkan nilai-nilai, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan dan pola hidup, yang mendasari perilaku tokoh sejarah (Sartono Kartodirdjo, 1992 : 4). Antropologi dan sejarah pada hakikatnya memiliki objek kajian yang sama, ialah manusia dan pelbagai dimensi kehidupannya. Hanya bedanya sejarah lebih membatasi diri kajiannya pada peristiwa-peristiwa masa lampau, sedang antropologi lebih tertuju pada unsur-unsur kebudayaannya. Kedua disiplin ilmu itu dapat dikatakan hampir tumpang tindih, sehingga seorang antropolog terkemuka, Evans-Pritchard, menyatakan bahwa "Antropologi adalah Sejarah". Hal yang sama dikemukakan pula oleh Arnold J. Toynbee (1889-1975) yang menyatakan bahwa tugas seorang sejarawan tidak jauh berbeda dari seorang antropolog, ialah melalui studi komparasi berusaha mempelajari siklus kehidupan masyarakat, kemudian dari masing-masing kebudayaan dan peradaban mereka ditarik sifat-sifatnya yang universal (umum). Fakta yang dikaji dari kedua disiplin ilmu, antropologi dan sejarah, adalah sama pula. Terdapat tiga jenis fakta, ialah : artifact, socifact, dan mentifact. Fakta menunjuk kepada kejadian atau peristiwa sejarah. Sebagai suatu konstruk, fakta sejarah pada dasarnya sebagai hasil strukturisasi seseorang

terhadap suatu peristiwa sejarah. Maka artifact sebagai benda fisik adalah konkret dan merupakan hasil buatan. Sebagai proses artifact menunjuk hasil proses pembuatan yang telah terjadi di masa lampau. Analog dengan hal itu maka socifact menunjuk kepada peristiwa sosial yang telah mengkristalisasi dalam pranata, lembaga, organisasi dan lain sebagainya. Sedang mentifact menunjuk kepada produk ide dan pikiran manusia. Ketiganya, artifact, socifact, dan mentifact, adalah produk masa lampau atau sejarah, dan hanya dapat dipahami oleh keduanya, antropologi dan sejarah, dengan melacak proses perkembangannya melalui sejarah. Studi ini jelas menunjukkan titik temu dan titik konvergensi pendekatan antropologi dan pendekatan sejarah.

Secara metodologis pendekatan antropologi memperluas jangkauan kajian sejarah yang mencakup (Sartono Kartodirdjo, 1992 : 156):

- 1) kehidupan masyarakat secara komprehensif dengan mencakup pelbagai dimensi kehidupan sebagai totalitas sejarah;
- 2) aspek-aspek kehidupan (ekonomi, sosial, politik) dengan mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan aspek-aspek kehidupan tersebut;
- 3) golongan-golongan sosial beserta subkulturnya yang merupakan satu identitas kelompoknya;
- 4) sejarah kesenian dalam pelbagai aspek dan dimensinya, serta melacak ikatan kebudayaan sosialnya;
- 5) sejarah unsur-unsur kebudayaan : sastra, senitari, senirupa, arsitektur, dan lain sebagainya;
- 6) pelbagai gaya hidup, antara lain : jenis makanan, mode pakaian, permainan, hiburan, etos kerja, dan lain sebagainya.

Pendek kata segala bidang kegiatan manusia dapat dicakup dalam sejarah kebudayaan. Dalam sejarah kebudayaan dimensi politik tidak termasuk di dalamnya, meskipun menurut definisi yang luas kehidupan politik pun termasuk dalam kebudayaan.

- e. **Pendekatan Ilmu Politik.** Pengertian politik dapat bermacam-macam sesuai dari sudut mana memandangnya. Namun pada umumnya definisi politik menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Fokus perhatian ilmu politik, karenanya, lebih tertuju pada gejala-gejala masyarakat seperti

pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, masa dan pemilihan, budaya politik, sosialisasi politik, masa dan pemilihan, dan lain sebagainya. Apabila politik diartikan sebagai polity (kebijakan), maka definisi politik lebih dikaitkan dengan pola distribusi kekuasaan. Jelas pula bahwa pola pembagian kekuasaan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, dan kultural. Posisi sosial, status ekonomi, dan otoritas kepemimpinan seseorang dapat memberi peluang untuk memperoleh kekuasaan. Otoritas kepemimpinan senantiasa menjadi faktor kunci dalam proses politik. Max Weber membedakan tiga jenis otoritas : (1) Otoritas karismatik, yakni berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; (2) Otoritas tradisional, yakni berdasarkan pewarisan; dan (3) Otoritas legal-rasional, yakni berdasarkan jabatan serta kemampuannya. Semula politik menjadi tulang punggung sejarah. Politics is the backbone of history. Pernyataan ini menunjukkan peranan politik dalam penulisan sejarah pada masa lampau. . Pada saat sekarang sejarah politik nampak masih menonjol, namun tidak sedominan seperti dahulu. Maka ungkapannya pun bergeser menjadi "History is past politics, politics is present history." Sejarah adalah politik masa lalu, politik adalah sejarah masa kini.

Pendekatan politik dalam penulisan sejarah menghasilkan sejarah politik. Sejarah politik dapat menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan topik yang dipilih. Setidaknya terdapat 8 (delapan) macam pendekatan, meskipun antara pendekatan yang satu dengan lainnya sering saling tumpang-tidih (Kuntowijoyo, 1993 : 177-182), ialah sebagai berikut.

- 1) Sejarah intelektual. Aspirasi pokok sejarah intelektual ialah adanya *Zeitgeist* (jiwa zaman) dan pandangan sejarah idealistik yang berpendapat bahwa pikiran-pikiran mempengaruhi perilaku. Contoh tulisan Herbert Feith dan Lance Castle yang berjudul : *Pemikiran Politik Indonesia, 1945-1965*. (Jakarta : LP3ES, 1988).
- 2) Sejarah konstitusional. Dari konstitusi suatu bangsa dapat diketahui filsafat hidup, dasar pemikiran waktu membangun bangsa, dan struktur pemerintahan yang dibangun. Dalam konstitusi juga terlihat kepentingan, konsensus, dan konsesi yang diberikan kepada masing-masing kepentingan. Contohnya ialah

buku Herbert Feith. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca : Cornell University Press).

- 3) Sejarah institusional. Isinya mengenai sistem politik dengan perangkat (lembaga, struktur, institusi), baik negara (kabinet, birokrasi, parlemen, militer) dan non Negara (ormas, orsospol, LSM). Paling banyak ditulis orang mengenai partai. Contoh : Ahmad Syafii Maarif. (1988). *Islam dan Politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin*. (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press).
- 4) Sejarah behavioral, ialah mengenai perilaku (behavior) negara dan partai-partai politik dalam sosialisasi gagasan, rekrutmen pemimpin/anggota, dan pelaksanaan tindakan politik termasuk dalam sejarah perilaku. Contoh : tulisan Clifford Geertz. (1960). *The Religion of Java*. (Glencoe : The Free Press).
- 5) Sejarah komparatif. Isinya mengenai kajian komparatif tentang kehidupan politik di Indonesia. Contoh : tulisan R. William Liddle. (1972). *Culture and Politics in Indonesia*. (Ithaca : N.Y. Cornell University Press).
- 6) Sejarah sosial. Berisi sejarah kelompok-kelompok sosial (ulama, santri, pengusaha, petani, mahasiswa, dan pemuda) dengan aspirasi politiknya sesuai dengan kepentingannya. Misalnya : Heru Cahyono. (1992). *Peranan Ulama dalam Golkar*. (Jakarta : Sinar Harapan).
- 7) Studi Kasus, ialah mengenai studi kasus-kasus politik. Contoh: *Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI*. (1997). *Evaluasi Pemilu Orde Baru*. (Bandung, Mizan).
- 8) Biografis. Tentang biografi politik. Contoh : J.D. Legge. (1972). *Sukarno: A Political Biography*. (London :The Pinguin Press)

f. Pendekatan Psikologi dan Psikoanalisis. Dengan menggunakan pendekatan psikologi dan psikoanalisis studi sejarah tidak saja sekedar mampu mengungkap gejala-gejala di permukaan saja, namun lebih jauh mampu menembus memasuki ke dalam kehidupan kejiwaan, sehingga dapat dengan lebih baik untuk memahami perilaku manusia dan masyarakatnya di masa lampau. Terobosan pertama yang paling terkenal dalam menerapkan psikologi dalam (depth psychology) pada studi

ilmu sejarah dilakukan oleh Erik H. Erikson. Ternyata konsep-konsep mengenai krisis identitas di masa remaja dapat digunakan untuk mengeksplanasi perilaku tokoh-tokoh sejarah terkemuka. Mengenai mengapa Martin Luther tampil sebagai reformator, Mahatma Gandhi menjadi seorang pemimpin gerakan anti kekerasan (non violence) di India, dan Adolf Hitler tampil sebagai seorang yang anti Semitis, serta Sukarno sebagai orang anti kolonialisme dan imperialisme, dapat dilacak kembali melalui analisis kehidupan tokoh-tokoh tersebut di masa remaja mereka. Dengan demikian pendekatan *psycho history* yang dirintis oleh Erik H Erikson telah membuka suatu dimensi baru dalam studi sejarah. Pendekatan *psycho history* juga dapat dikembangkan menjadi konsep psikologi sosial (*sociopsychological*) untuk menjelaskan perilaku sekelompok anggota masyarakat. Tentu saja permasalahannya menjadi semakin kompleks. Richard Hostadter, misalnya, dalam karya tulisannya *The Age of Reform* (1955) berupaya menjelaskan bangkitnya gerakan-gerakan sosial pada Abad XIX dan XX di Amerika. Menurunnya status dan prestise masyarakat kelas menengah di Amerika pada peralihan menuju Abad XX mendorong tampilnya pemimpin-pemimpin gerakan progresif. Mereka bergerak dan melakukan perlawanan terhadap orang-orang industrialis kaya baru dan boss-boss mereka yang cenderung korup (Allan J.Lichtman, 1978 : 138).

- g. Pendekatan Kuantitatif.** Pendekatan kuantitatif adalah upaya untuk mendeskripsikan gejala-gejala alam dan sosial dengan menggunakan angka-angka. Quantum, *quantitas* dalam bahasa Latin berarti jumlah. Oleh sebab menggunakan angka-angka, maka pendekatan kuantitatif mempersyaratkan adanya pengukuran (*measurement*) terhadap tingkatan ciri-ciri tertentu dari suatu gejala yang diamati. Pengamatan kuantitatif berupaya menemukan ciri-ciri tersebut, untuk kemudian diukur berdasarkan kriteria-kriteria pengukuran yang telah ditentukan. Hasil pengukuran itu berupa angka-angka yang menggambarkan kuantitas atau derajat kualitas dari kenyataan dan eksistensi gejala alam yang diukurnya. Data-data angka hasil pengukuran dari gejala-gejala alam yang diamati itulah yang kemudian dianalisis, dicari derajat kuantitas, atau kualitasnya, dipelajari hubungannya antara gejala yang satu dengan lainnya, dikaji pengaruhnya terhadap suatu gejala, hubungan seba-akibatnya, pendek kata

dianalisis sesuai dengan tujuan peneliti. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian dan penulisan sejarah menghasilkan apa yang disebut sejarah kuantitatif (quantitative history). Sejarah kuantitatif pertama-tama dikenal di Perancis sekitar tahun 1930-an, yang mulai berkembang pada tahun 1949 dan 1950-an. Studi Crane Brinton (1930) mengenai keanggotaan partai Yakobin dalam revolusi Perancis, analisis Donald Greer (1935) tentang korban-korban masa Pemerintahan Teror pada dasarnya merupakan usaha-usaha kuantifikasi penulisan sejarah sosial (Harry Ritter, 1986: 351-352).

Menjelang tahun 1960-an sejarah kuantitatif mulai merembes ke Amerika Serikat dengan pertama-tama mengambil bentuk sejarah ekonometrik (econometric history) yang dirintis oleh sejarawan Lee Benson (1957, 1961) yang penulisannya diilhami dan didasari pada penerapan orientasi statistik dari-dari teori behaviorisme dalam ilmu-ilmu sosial-politik. Beberapa penelitian mulai memperluas penggunaan analisis statistik, tidak saja dalam sejarah-sejarah ekonom, politik dan sosial, melainkan juga dalam sejarah-sejarah cultural dan intelektual dengan menggunakan metode seperti halnya content analysis. Sejak saat itu karya-karya sejarah mulai dihiasi dengan gambar-gambar grafik, chart, table, persentase, bahkan kadang-kadang memasukkan komputasi statistik Kai-Kuadrat dan regresi.

Metode sejarah hingga sekarang lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif. Harus diakui pendekatan kualitatif mengandung banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu adalah bersumber pada tiadanya kriteria yang jelas dalam penyusunan instrumentasi yang digunakan untuk mengukur kebenaran data dan fakta, serta tiadanya kaidah-kaidah umum, apalagi khusus, dalam metode dan teknik menganalisis hubungan antar berbagai peristiwa sejarah, hingga dengan demikian dalam menganalisis hubungannya, lebih banyak ditentukan oleh intuisi dan imajinasi peneliti yang kadar kebenarannya tidak dapat diuji secara empirik. Generalisasi sejarah tak pernah mendasarkan diri pada inferensi dari hubungan antara besarnya sampel dengan jumlah populasi.

Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam metode sejarah dapat memperkecil kelemahan-kelemahan tersebut di satu pihak, dan dapat memperbesar bobot ilmiahnya dalam analisis peristiwa-peristiwa sejarah di lain

pihak. Penalaran berdasarkan tata-fikir dan prosedur statistik setidaknya-tidaknya dapat mengendalikan (mengontrol) analisis dan interpretasi berdasarkan pada pendapat-pendapat pribadi. Lebih jauh tata-fikir dan prosedur statistik dalam metode sejarah dapat membantu metodologi sejarah dalam mengefektifkan tugas-tugas ilmiahnya, ialah untuk memberikan penjelasan (eksplanasi), meramalkan (prediksi), dan mengendalikan (kontrol) terhadap gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam melakukan generalisasi, dengan demikian, sejarawan harus menjadi lebih berhati-hati dan dalam menganalisis hubungan kausal yang kompleks dan rumit dari berbagai peristiwa kiranya tidak mungkin lagi dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan pendekatan kuantitatif. Pendek kata penggunaan pendekatan kuantitatif dapat mempertajam wawasan metode sejarah.

C. Guna mempelajari Sejarah

Pada umumnya, orang tidak akan mempelajari sesuatu jika tidak ada maksud dan kegunaannya, demikian juga dengan mempelajari Sejarah. Sejarah mempunyai kegunaan secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah itu berguna sebagai pengetahuan, sedangkan secara ekstrinsik yaitu kebermanfaatan di luar dirinya.

Guna Intrinsik

Setidaknya ada empat guna sejarah secara intrinsik, yaitu (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat, (4) sejarah sebagai profesi.

- a. Sejarah sebagai ilmu.** Sejarah adalah ilmu yang terbuka. kenyataan bahwa sejarah menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan istilah-istilah teknis, memperkuat keterbukaan itu. keterbukaan itu membuat siapapun dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah, asal hasilnya dapat di pertanggungjawabkan sebagai ilmu. sejarah sebagai ilmu dapat berkembang dengan berbagai cara: (1) perkembangan dalam filsafat, (2) perkembangan dalam teori sejarah, (3) perkembangan dalam ilmu-ilmu lain, dan (4) perkembangan dalam metode sejarah. perkembangan dalam sejarah selalu berarti bahwa sejarah selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi.
- b. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau.** Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. bangsa yang belum mengenal tulisan

mengandalkan mitos, dan yang sudah mengenal tulisan umum nya mengandalkan sejarah. ada setidaknya dua sikap terhadap sejarah setelah orang mengetahui masa lampau nya, yaitu (1) melestarikan, atau (2) menolak.

c. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmu nya untuk menyatakan pendapat. bentuk pernyataan pendapat ada dua, yaitu (1) konsensus, dan (2) konflik. *Pertama*, aliran yang menekankan konsensus diantaranya terdapat dalam tesis garis depan dan tesis tentang individualisme. tesis garis depan (*frontier thesis*) mengatakan bahwa Amerika selalu menghadapi garis depan. sejak kedatangan nya di tempat baru, yang terjadi ialah masyarakat yang selalu memperluas daerah nya. demikianlah, kepergian orang orang Amerika ke seluruh dunia hanya lah kelanjutan dari garis depan itu. yang terjadi dengan individualisme juga demikian. sejak dulu kedatangan orang Amerika di daerah baru adalah untuk memperoleh kemerdekaan individual. mula mula individualisme Amerika berupa kemerdekaan beragama. kalau kemerdekaan individual kemudian berarti kebebasan berusaha, hal itu hanyalah bentuk lain dari individualisme. juga kalau kemudian Amerika jadi pembela dunia merdeka. *Kedua*, aliran yang menekankan konflik biasanya mengajukan tesis persengkongkolan (*conspiracy*). demikianlah, misalnya, perang saudara di Amerika adalah hasil persengkongkolan kaum industrialis dan kaum politisi. semboyan "free soil, free Labor" adalah dalih kaum industrialis untuk mendapatkan tenaga. perang itu terjadi karena pihak Utara melakukan provokasi. juga ada persengkongkolan pada perang dunia II. Amerika memasuki PD II adalah akibat dari "military industrial complex" yang merupakan hasil persengkongkolan kaum industrialis dengan kaum militer. menjelang PD II sebenarnya Amerika Hawaii tidak dalam bahaya ("no clear and present danger"), sehingga sebenarnya tak ada alasan untuk berperang.

d. Sejarah sebagai profesi. Tidak semua lulusan sejarah dapat terampil dalam profesi kesejarahan. Ada lulusan yang jadi karyawan pengusaha sepatu, pengalengan ikan, perusahaan farmasi, dan tidak sedikit yang jadi guru diluar ilmunya. Semua tempat itu tentu saja memerlukan orang yang dapat menulis sejarah, tetapi kita tidak dapat mengharapkan semua orang untuk mempunyai idealisme.

Guna Ekstrinsik

Sejarah dapat digunakan sebagai *liberal educatio* untuk mempersiapkan peserta didik supaya mereka siap secara filosofis. Secara umum sejarah mempunyai fungsi pendidikan, yaitu sebagai pendidikan (a) moral, (b) penalaran, (c) politik, (d) kebijakan, (e) perubahan, (f) masa depan, (g) keindahan, dan (h) ilmu bantu. selain sebagai pendidikan, sejarah juga berfungsi sebagai (i) latar belakang, (j) rujukan, dan (k) bukti.

- a. **Sejarah sebagai pendidikan moral.** Sejarah yang diajarkan melalui pelajaran kewarganegaraan di sekolah maupun dulu lewat penataran P-4 pada masyarakat mempunyai maksud agar pancasila menjadi tolak ukur benar-salah, baik-buruk, berhak-tidak, merdeka-terjajah, cinta-benci, dermawan-pelit, serta berani-takut dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, sejarah tidak boleh bersikap hitam-putih seperti itu. Kalau pendidikan moral harus berbicara benar-salah, dan sastra hanya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara dengan fakta.
- b. **Sejarah sebagai pendidikan penalaran.** Seorang yang belajar sejarah tidak akan berpikir monokausal, pikiran yang menyatakan bahwa sebab terjadinya peristiwa itu hanya satu. Sejarah harus berpikir [lurikausal, yang menjadi penyebab itu banyak. Dengan demikian akan melihat segala sesuatu mempunyai banyak segi. Dengan kata lain, sejarawan harus berpikir secara multidimensi. Sejarah memaksa orang memperhitungkan waktu. Berpikir secara sejarah berarti berpikir berdasarkan perkembangan. Orang harus memperhitungkan masa lalu untuk dapat membicarakan masa kini, dan masa kini untuk masa depan. Sejarah dapat menjadi ilmu manajemen perkembangan.
- c. **Sejarah sebagai pendidikan politik.** Tujuan dari pendidikan politik itu ialah dukungan atas politik kekuasaan dengan mendorong perbuatan-perbuatan revolusioner dan menyingkirkan kaum kontrarevolusi.
- d. **Sejarah sebagai pendidikan kebijakan.** Sejarah semacam ini diperlukan oleh semua lembaga penelitian. Untuk menentukan suatu kebijakan, dibutuhkan pandangan tentang lingkungan alam, masyarakat, dan sejarah. Kita juga tidak bisa

membayangkan bagaimana perundangan dan peraturan pemerintahan dibuat tanpa mengetahui latar belakang sejarah.

- e. **Sejarah sebagai pendidikan perubahan.** Pendidikan perubahan diperlukan oleh polisi, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam dunia yang semakin smepit ini, tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Kaum politisi yang tidak dapat mengantisipasi gelagat perubahan akan ketinggalan. Definisi sejarah ialah ilmu tentang perubahan akan banyak membantu. Sepanjang sejarah tidak mempelajari waktu waktu yang terlalu jauh, sejarah bisa relevan dengan perubahan.
- f. **Sejarah sebagai pendidikan masa depan.** Di beberapa universitas maju, seperti Amerika, *history of the future* sudah diajarkan. Sebagai negara yang mengalami industrialisasi belakangan, indonesia mempunyai keuntungan, karena dapat belajar dari negara industrial dan negara pascaindustrial. Dari Jepang kita dapat belajar bagaimana mempunyai industri besar tanpa mematikan industri kecil. Benar, bahwa kedua negara mengalami industrialisasi dalam keadaan yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama bangsa Timur dan sama-sama mempunyai tradisi. Bahkan dari negara seperti malaysia kita dapat belajar. Dari malaysia kita bisa belajar bagaimana dalam waktu yang relatif singkat mereka dapat mengangkat ekonomi bumiputera.
- g. **Sejarah sebagai pendidikan keindahan.** Pengalaman estetik akan datang melau mata waktu kita ke candi, istana, tarian, kuburan, kota, dan monumen. Waktu kita mendengarkan gamelan, gamelan juga akan terbayang para bangsawan. Demikian pula keindahan dapat terangsang lewat bacaan.
- h. **Sejarah sebagai ilmu bantu.** Sejarah sebagai ilmu antarbidang yang paripurna, *the ultimate interdisiplinarian*, akan dapat memenuhi tugas itu dengan baik. sejarah dapat mengantarkan orang secara baik, karena sejarah memberikan bantuan untuk berbagai macam disiplin.
- i. **Sejarah sebagai latar belakang.** Seorang kader sebuah LSM yang bergerak di bidang koperasi, wanita, atau perburuhan tidak akan terampil menangani permasalahannya tanpa mengetahui latar belakang sosial, gerakannya dan LSM nya. Mereka tentu saja juga dituntut untuk tahu latar belakang lingkungan kerjanya.

- j. Sejarah sebagai rujukan.** Barangkali, yang tidak memerlukan referensi hanya orang-orang genius dan yang terburu-buru. Demikianlah Soeharto, yang relatif pendidikannya rendah, mampu memimpin selama lebih dari tiga dasawarsa. Komandan pasukan di medan tempur pastilah tidak sempat membaca buku hanya untuk mengetahui bagaimana tentara sekutu mengalahkan Jerman di Arnhem.
- k. Sejarah sebagai bukti.** Sejarah selalu dipakai untuk membenarkan perbuatan. Misalnya pemerintah Orde Baru menggunakan bukti-bukti sejarah atas keberhasilan pembangunan untuk tetap memelihara stabilitas nasional dan mempertahankan Pancasila. Sekarang ini ada kecenderungan untuk mencari hari jadi. Hampir setiap kabupaten mempunyai hari jadi. Semakin tua hari jadi itu semakin baik, seolah menjadi bukti keberadaan daerah itu.

D. Rangkuman

Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan modul tentang Sumber dan Metode Penelitian Sejarah. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dalam modul ini adalah sebagai berikut.

1. Sumber sejarah seringkali disebut juga “data sejarah”. Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. Adapun klasifikasi sumber sejarah itu dapat dibedakan menurut bahannya, asal usul atau urutan penyampaian, dan tujuan sumber itu dibuat. Jenis sumber sejarah berdasarkan bahannya dipisahkan menjadi dua, sumber tertulis dan sumber tak tertulis. Melalui proses penyaringan dan uji validitas dari sumber sejarah maka didapatkanlah sejumlah fakta. Fakta sejarah merupakan keterangan yang disimpulkan dari bahan sejarah melalui kritik sejarah. Dalam hal itu, berbagai dokumen peristiwa sejarah merupakan fakta sejarah, yang disebut data. Data merupakan bahan yang perlu diolah, diseleksi dan dikategorikan atas dasar kriteria seleksi tertentu baru kemudian menjadi fakta. Pengolahan data Sejarah menggunakan metode khusus yang disebut metode penelitian Sejarah.
2. Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Secara lebih ringkas, setiap langkah ini berturut-turut biasa juga diistilahkan dengan heuristic, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sebelum keempat langkah ini sebenarnya ada satu kegiatan penting, yang oleh Kuntowijoyo (1995:98) ditambahkannya menjadi lima tahap penelitian sejarah, yaitu pemilihan topic dan rencana penelitian.

3. Sejarah mempunyai kegunaan secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah itu berguna sebagai pengetahuan, sedangkan secara ekstrinsik yaitu kebermanfaatan di luar dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman. 2011. *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dienaputra, Reiza D. 2006. *Konsep Dan Metode Sejarah Lisan*. Bandung: Minor Books.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Indonesia University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kattsoff, O. L. 1986. *Pengantar Filsafat*. Alih Bahasa Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Noor, Deliar. 1956. *Pengantar ke Pemikiran I*. Medan: Dwipa.
- Usman, Hasan. 1986. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN.
- Website:
- <http://eprints.unsri.ac.id/3680/1/1. Metodologi Sejarah Dan Implementasin Dalam PenelitianN.pdf>

DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA MASA PRA AKSARA

Syaiful Amin

A. Asal-Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia

Mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia sendiri hingga kini masih menjadi perdebatan bagi para sejarawan. Masing-masing dari mereka memberikan teori, bukti, argumen dan alasan dari pendapat mereka untuk memperoleh pembenarannya sendiri. Berikut beberapa pendapat ahli mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia:

Pendapat Drs. Moh. Ali. Drs. Moh Ali beranggapan bahwa asal usul nenek moyang bangsa Indonesia bersumber dari daerah Yunan Cina. Anggapan ini dipengaruhi oleh pendapat Mens yang menyebutkan jika bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat kala itu. Mereka kemudian berpindah ke selatan, ke pulau-pulau Austronesia termasuk Indonesia. Ali berpendapat jika nenek moyang orang Indonesia berasal dari hulu sungai besar yang berada di daratan Asia, mereka berdatangan ke Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama berlangsung sejak 3000 samai 1500 SM (Proto Melayu) sedangkan gelombang kedua terjadi pada 1500 sampai 500 SM (Deutro Melayu). Ciri kelompok yang datang pada gelombang pertama adalah mereka masih berkebudayaan Neolitikum dengan tipe perahu bercadik-satu sebagai alat transportasi menyeberangi lautan, sedangkan orang-orang yang datang pada gelombang kedua memakai perahu cadik-dua.

Pendapat Prof. Dr. H. Kern. Prof. Dr. H. Kern berpendapat bila nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Ilmuan asal Belanda ini menyebut jika hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang dipakai oleh suku-suku di Indonesia, Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia, mempunyai akar yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Dengan fakta itu, dia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang sama dengan bangsa-bangsa lain di wilayah Austronesia. Menurutnya, nenek-moyang bangsa Indonesia menggunakan perahu-perahu bercadik menuju ke kepulauan Indonesia. Pendapat Kern ini didukung oleh adanya persamaan

nama dan bahasa yang dipergunakan di daerah Campa dengan di Indonesia. Selain nama geografis, istilah-istilah binatang dan alat perang pun banyak kesamaannya. Tetapi pendapat ini disangkal oleh K. Himly dan P.W. Schmidt berdasarkan perbandingan bahasa Campa.

Pendapat Willem Smith. Untuk menentukan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, Willem Smith melakukan identifikasi terhadap bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa di sekitar Asia. Berdasarkan penelitiannya, ia kemudian mengelompokkan bahasa di sekitar Asia menjadi 3 bagian yaitu, bahasa Togon, bahasa Jerman, dan bahasa Austria. Nah, Indonesia sendiri bersama dengan Melanesia, dan Polinesia digolongkan ke dalam penggunaan bahasa Austria.

Pendapat Prof. Dr. Sangkot Marzuki. Prof. Dr. Sangkot Marzuki menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia memiliki asal usul dan keterkaitan dengan Austronesia dataran Sunda. Ini didasari oleh penelusuran terkait DNA fosil-fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Atas dasar itu, ia kemudian menyanggah pendapat Van Heine Geldern yang menyebut jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Menurutnya, Homo Erectus atau Pithecanthropus Erectus yang ditemukan sebagai manusia purba saat itu tidak memiliki signifikansi dengan DNA manusia Indonesia zaman sekarang. Menurutnya, mereka punah dan diganti oleh manusia species baru, yang berasal dari Afrika.

Pendapat Prof. Moh. Yamin. Prof. Mohammad Yamin menentang semua teori-teori yang menyebut jika nenek moyang bangsa Indonesia justru berasal dari luar Indonesia. Menurut beliau, orang Indonesia saat ini benar-benar asli berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Ia justru malah meyakini jika ada sebagian bangsa dan suku di luar negeri yang nenek moyangnya berasal dari Indonesia. Landasan pemikiran yang menjadi dasar Yamin adalah banyaknya temuan fosil dan artefak di Indonesia yang lebih lengkap dibanding daerah lain di Asia. Contohnya, temuan fosil Pithecanthropus soloensis dan wajakensis yang tidak diketemukan di daerah-daerah lain di Asia termasuk Asia Tenggara (Indochina).

Terlepas dari pendapat yang ada mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, berdasarkan penelitian dan kajian antropologi ragawi dan etnologi, diketahui bahwa kepulauan Nusantara (Indonesia) secara umum dihuni oleh populasi dua ras utama yaitu ras Austronesia dan ras Melanesia yang sebagian melakukan

asimilasi menjadi ras Austrolo-Melanesia yang diperkirakan berkembang 10.000 tahun yang lalu. Perpindahan dari daratan Asia ke kepulauan Indonesia terjadi pada kala Plestosen. Migrasi manusia sendiri telah berlangsung sejak manusia pra aksara *Homo erectus* pada awal Plestosen. Meskipun demikian, nenek moyang Indonesia modern baru muncul pada saat Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi sudah menjadi pulau-pulau (Oktorino, 2009:6).

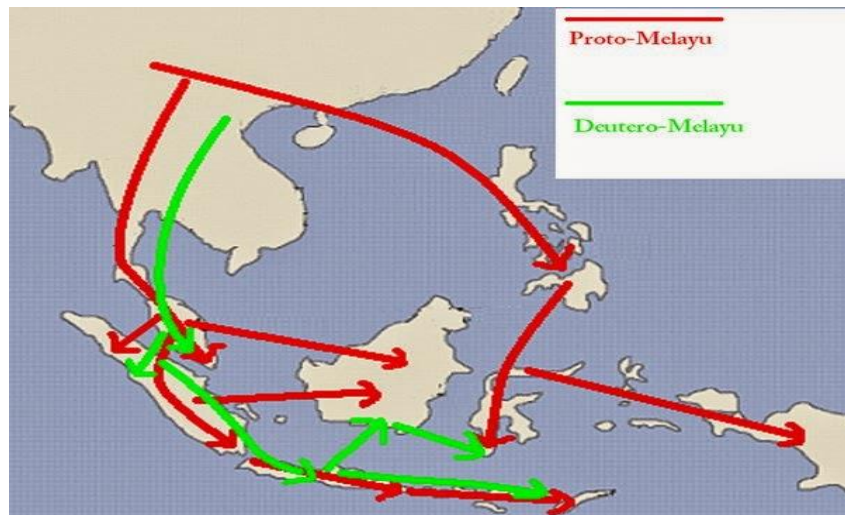
Menurut Peter Bellwood dalam *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago*, ras Austrolo-Melanesia purba sudah tinggal di kepulauan Indo-Malaysia. Sebenarnya wilayah luas dari Cina bagian selatan hingga Daratan Sunda ditinggali oleh suatu populasi yang ciri-cirinya berbeda secara nuansa. Zona ini merupakan wilayah terjadinya perubahan bertahap secara geografis dalam frekuensi sifat genetik antara Australoid (cenderung kuat di selatan) dan Mongoloid (cenderung kuat di utara). Karena itu, manusia yang hidup di situ harus dianggap sebagai satu populasi, bukan populasi yang terpisah.

Ras Australoid yang disebut juga Mongoloid Selatan berkembang lebih cepat dengan penyebaran lebih luas dibanding ras Melanesia. Bahkan akibat penyebaran ras Australoid atau Mongoloid Selatan yang luas, ras Melanesia terdesak hampir di semua pulau dan hanya menyisahkan sedikit kelompok seperti orang Negrito di Taiwan, Malaysia, Filipina, Andaman, Polinesia, Hokkaido, Papua, dan pulau-pulau sekitarnya. Populasi Melanesia yang terpisah dari kelompok yang menghuni Australia dan Nugini, secara terus menerus mengalami evolusi menjadi kelompok yang beragam dan mengalami perubahan tertentu yakni semakin mungil wajah dan tengkoraknya.

Terjadinya perkawinan antara ras Australo atau Mongoloid Selatan dengan ras Melanesia yang melahirkan ras baru Australo-Melanesia, telah menunjukkan terjadinya perubahan fisik mereka. Tanda-tanda Melanesia berupa kulit gelap, rambut keriting pekat telah pudar. Begitu juga dengan tanda-tanda Australo yang ditandai kulit kuning, rambut lurus, gigi kecil, dan mata sipit melebur menjadi ras baru yang disebut Australo-Melanesia yang menyebar di Asia Tenggara yang kemudian disebut Proto Melayu. Mengikuti perkembangan ras Proto Melayu, lahirlah ras Deutro Melayu yaitu ras Mongoloid dengan beberapa ciri Australo-Melanesia, yang menggunakan bahasa Austronesia (digunakan sekitar 2000-2500 SM) merupakan perkembangan dari bahasa

Proto Austronesia (digunakan sekitar 4000-3000 SM). Ras Proto Melayu, Deutro Melayu, dan Melanesia inilah yang menghuni kepulauan Nusantara (Sunyoto, 2012:8).

Seiring dengan terjadinya bencana alam dan peperangan antar kelompok, menjadi faktor utama bagi ras Mongoloid untuk melakukan migrasi. Meninggalkan Yunan di Asia Tenggara ke pulau-pulau Nusantara antar tahun 5000-3000 SM. Dalam proses migrasi bergelombang itu, ras Proto Melayu ikut meninggalkan Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Nusantara. Gelombang pertama ras Proto Melayu ke Nusantara diperkirakan berlangsung sekitar 1500-500 SM, yaitu saat orang-orang Mongoloid dari utara menyerbu wilayah yang dihuni ras Proto Melayu di sepanjang Sungai Irawadi, Salween, dan Mekong. Yang ikut terdesak dalam serbuan ras Mongoloid Utara itu adalah suku Shan, yang merupakan ras Palae Mongoloid. Suku Shan inilah yang menjadi leluhur orang-orang Siam, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Dayak.



Gambar 1. Peta migrasi ras Proto Melayu dan Deutro Melayu

Akibat dari migrasi ras Proto Melayu ini, ras Melanesia yang lebih dahulu tinggal di pulau-pulau Nusantara terdesak ke pedalaman di kawasan timur Nusantara. Antara tahun 300-200 SM, terjadi migrasi gelombang berikutnya dari ras Deutro Melayu yang dengan cepat membarau dengan ras Proto Melayu. Keteruanan hasil pembaruan Proto Melayu dengan Deutro Melayu itulah yang menjadi penghuni utama kepulauan Nusantara disamping ras Melanesia. Menurut Harold Foster dalam *Flowering Lotus: A View of Java in the 1950's*, suku-suku dari ras Melayu di Nusantara secara umum terbagi atas dua bagian besar. *Pertama*, suku-suku Proto Malayan seperti Batak, Toraja, Karen, Igorot, Bontoc, Ranau, Meo, Tayal, dan Wajo. Asal leluhur suku Proto

melayan terletak di kawasan pegunungan di perbatasan Burma dan Thailand. *Kedua*, suku-suku Neo Malayan (Deutro melayu) seperti suku Jawa, Bugis, Aceh, Minangkabau, Sunda, Madura, dan Bali (Sunnyoto, 2012:9).

Tabel 1. Ciri-ciri ras Proto Melayu dan Deutro Melayu

Proto Melayu	Deutro Melayu
1. Mereka bersal dari Cina bagian selatan (Yunan) dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1.500-500 SM;	1. Mereka berasal dari bangsa Indocina Utara yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 SM;
2. Memiliki kebudayaan batu muda (Neolitikum);	2. Bangsa ini telah mampu membuat benda-benda berbahan dasar logam, seperti perunggu dan besi;
3. Orang-orang bangsa Proto Melayu memiliki rambut lurus, kulit kuning yang berwarna kecoklatan, dan bermata sipit; dan	3. Hasil-hasil kebudayaan yang dihasilkan berupa kapak corong, nekara, bejana perunggu; dan
4. Mendiiami daerah-daerah Indonesia bagian Timur, seperti Dayak, Toraja, Mentawai, Nias, dan Papua.	4. Suku Melayu, Makassar, Jawa, Sunda, Bugis, Minang adalah keturunan asli bangsa ini.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, dapat kita lihat ada perbedaan-perbedaan yang mencolok dari kedua ras bangsa ini. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut.

- 1) Proto Melayu masuk ke Indonesia pada tahun 1500 SM, sedangkan Deutro Melayu masuk ke Nusantara pada gelombang kedua pada tahun 500 SM;
- 2) Bangsa Proto Melayu masuk ke Indonesia melalui jalur barat dan timur, sedangkan Deutro melayu hanya melalui jalur barat;
- 3) Bangsa Proto Melayu berasal dari Yunan (China), sedangkan Bangsa Deutro Melayu berasal dari Dongson (Vietnam);
- 4) Bangsa Deutro Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan Bangsa Proto Melayu;
- 5) Bangsa Deutro Melayu sudah bisa membuat alat-alat dari logam, sedangkan Proto Melayu tidak; dan
- 6) Suku yang termasuk keturunan Bangsa Proto Melayu adalah Suku Batak, Dayak, dan Toraja, sedangkan Suku yang termasuk keturunan Deutro Melayu adalah suku Jawa, Madura, dan Melayu.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pendukung kebudayaan Toala adalah ras *Weddoid*. Toala adalah kelompok sosial yang merupakan penduduk asal daerah Sulawesi Selatan, disamping kelompok lainnya seperti Toraja, Bugis, Makassar, dan Mandar. Kelompok Toala ini adalah “kelompok sisa” yang dulunya hidup di daerah ini. Paul dan Fritz Sarasin mengelompokkan orang Toala kedalam ras *Weddoid*. Akan tetapi keturunan wedda yang berada di Sulawesi ini sudah tidak murni lagi, namun dapat dibedakan dengan orang Bugis yang berada di tempat yang sama. Setelah diteliti, orang Toala memang tidak mempunyai hubungan dengan nenek moyang dengan orang Bugis (Melalatoa, 1995:849).

Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dulu memasukkan orang-orang Negrito dan Weddid. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan Melanesia (Pasifik), demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka, belum banyak diketahui dengan pasti (Djaldjoeni, 1984:6). Kelompok Weddid terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocephal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang; kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelaki 155 cm. Weddid artinya jenis Wedda yaitu bangsa yang terdapat di pulau Ceylon (Srilanka). Persebaran orang-orang Weddid di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi (Kubu), di Sakai (Sakai) dan di Sulawesi pojok tenggara (Toala, Tokea dan Tomuna). Periode migrasi itu berlangsung berabad-abad, kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia (Melayu-Polinesia).

Ada beberapa pengertian ras *Weddoid* atau *Weddid* yang perlu anda ketahui. Pertama, ras *weddoid* adalah ras yang berasal dari Hindia bagian selatan. Ciri-ciri dari ras ini adalah kulit hitam dan rambut keriting. Selain itu, tubuhnya berukuran sedang. Ras ini hampir sama dengan negroid akan tetapi berbeda pada ukuran tubuh. Kedua, ras *weddoid* adalah sekelompok orang yang memiliki rambut keriting, kulit hitam, dan juga bertubuh sedang. Ras ini mendiami Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Ada

beberapa ciri-ciri fisik dari ras weddoid sebagai berikut: kulit hitam, tinggi sekitar 160cm, hidung pesek, dan rambut hitam ikal.

B. Kehidupan Sosial Ekonomi Manusia Purba di Indonesia

Kondisi fisik dan iklim alam yang tidak stabil serta silih berganti telah dihadapi oleh manusia purba, sehingga mengalami perkembangan bentuk lahiriah dan perkembangan akal serta pemikirannya. Kondisi alam tersebut memaksa manusia purba untuk terus mampu mempertahankan diri di tengah-tengah alam yang serba penuh tantangan, dengan kemampuannya yang serba terbatas. Hal tersebut tentu berpengaruh pada kehidupan social ekonomi manusia purba di belahan bumi manapun, termasuk di Indonesia. Menurut R.P Soeroso, seorang sejarawan Indonesia, bahwa kehidupan manusia purba dikelompokkan ke dalam empat tahapan perkembangan. Pendapat ini diungkapkan pada tahun 1970, yang didasarkan pada pendekatan social ekonomis. Keempat tahapan kehidupan manusia purba yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian.

Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Sederhana

Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada kala Plestosen. Pada masa ini, muka bumi sering mengalami perubahan oleh gerakan endogen dan eksogen atau oleh perubahan iklim. Pada kala ini hewan dan tumbuh-tumbuhan telah hidup merata di bumi, sedangkan manusia yang muncul kemudian diketahui baru mendiami beberapa daerah antara lain Afrika, Eropa dan Asia termasuk Kepulauan Indonesia. Selain itu, kegiatan vulkanik juga banyak mengubah bentuk muka tanah permukaan bumi. Sungai dan danau merupakan bagian utama alam fisik tidak hanya mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia pada masa itu. Sungai dan danau berfungsi sebagai sumber makanan, sumber air minum, tempat mencuci dan sebagai sarana pengangkut.

Peranan sungai dan danau ini berlangsung sejak awal kehidupan manusia hingga saat ini. Pada masa plestosen juga, perubahan iklim terjadi sangat ekstrim. Selama kala plestosen telah menyebabkan meluasnya areal es ke sebagian muka bumi (Poesponegoro, 2010:45). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kala plestosen

telah terjadi paling sedikit tujuh kali masa glasial dan antar-glasial di daerah yang terkena es atau masa pluvial dan antar-pluvial terjadi di daerah tropic. Keadaan inilah yang yang membuat kegiatan perburuan dan pengumpulan makan menjadi kegiatan pokok sehari-hari dan peralatan dari batu, kayu dan tulang dipakai untuk kegiatan tersebut.

Salah satu ciri utama dalam kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana adalah hidup berkelompok kecil. Di Indonesia cara berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dialami oleh manusia jenis *Pithecanthropus* dan manusia Wajak. Ketergantungan manusia purba pada alam begitu besar sehingga menyebabkan manusia pada masa itu hidup berpindah-pindah (*nomaden*). Tujuannya untuk mencari lokasi atau daerah-daerah yang mampu mensuplai kebutuhan makanan yang mereka butuhkan. Apabila daerah yang telah disinggahi mulai menipis atau mungkin habis sumber persediaan makanannya, maka mereka akan mencari tempat baru lagi guna mendapatkan sumber makanan. Oleh karena itu, tempat-tempat yang menarik untuk didiami pada waktu itu adalah tempat yang cukup mengandung bahan makanan dan air, terutama di daerah sekitar tempat-tempat yang sering dikunjungi atau dilalui binatang. Tempat-tempat semacam itu berupa padang-padang rumput dengan semak belukar, dan hutan kecil yang terletak berdekatan dengan sungai atau danau.

Sekitar lokasi tersebut pula, manusia membuat tempat berlindung sederhana yang terbuat dari dahan-dahan dan dedaunan serta tinggal berkelompok dengan jumlah anggota kelompok yang sedikit (kelompok kecil). Dengan hidup berkelompok, hubungan anggota kelompok sangat erat. Selain itu, mereka akan lebih mudah untuk berburu dan mengumpulkan makanan serta mempertahankan kelompoknya dari serangan kelompok lain atau binatang buas. Selain ancaman dari kelompok lain dan binatang buas, pada waktu itu ancaman juga muncul dari alam. Banyak terjadi letusan-letusan gunung api dan kondisi alam yang belum stabil. Bahkan menurut hasil penelitian, dalam lapisan lahar ditemukan sisa-sisa kehidupan manusia *Pithecanthropus* yang terbawa oleh lahar letusan gunung berapi bersama dengan tulang-tulang hewan besar. Kondisi alam inilah yang menjadi salah satu sebab tidak berkembangnya kehidupan manusia purba pada waktu itu.



Gambar 2. Ilustrasi kegiatan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan

Dengan adanya pola kehidupan semacam itu, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan dibutuhkan kekuatan dan kemampuan fisik yang kuat. Hal ini dikarenakan untuk menghadapi tantangan alam yang ganas dan harus menghadapi berbagai ancaman dari berbagai sumber. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan kehidupan alam yang ganas dan berpindah-pindah untuk keberhasilan perburuan, diperkirakan pada waktu itu manusia membatasi jumlah anggota kelompoknya dengan memusnahkan anak-anak yang baru lahir, terutama anak perempuan. Kematian anak-anak pada waktu dilahirkan dan berbagai penyakit yang menimpa anggota kelompok juga menjadi penyebab kecilnya anggota kelompok. Hal tersebut di atas juga menjadi faktor lambatnya perkembangan manusia pada waktu itu.

Ketika melakukan perburuan, manusia pada waktu itu menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu, kayu, dan tulang belulang sisa hewan buruan mereka. Selain dengan berburu secara langsung, mereka juga biasanya membuat lubang-lubang jebakan di tanah atau menggiring hewan buruan bereka ke arah jurang yang terjal, sehingga mempermudah mereka untuk memburu hewan sasaran. Hasil buruan kemudian dibagikan kepada anggota kelompok berburu. Biasanya kegiatan berburu ini dilakukan oleh kelompok kecil yang terdiri dari kaum laki-laki dari masing-masing keluarga dalam kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya telah terdapat pembagian kerja dalam sebuah keluarga dan juga kelompok.

Ketika kaum laki-laki sedang berburu hewan sebagai sumber makanan, kaum perempuan dalam kelompok akan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan kecil yang dapat diburu tanpa mengeluarkan tenaga yang terlalu besar. Di samping itu, kaum perempuan juga mengurus dan merawat anak-anak. Tidak hanya dalam kehidupan manusia modern saat ini, peran penting kaum perempuan dalam sebuah keluarga juga telah berlangsung pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kaum perempuan dalam kelompok juga berperan dalam memilih tumbuh-tumbuhan yang dimakan dan membimbing anak-anak dalam meramu. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berperan dalam menentukan keberlangsungan hidup sebuah kelompok (Herimanto, 2012:80).

Setelah api ditemukan, perempuan sebagai peramu kemudian menemukan cara-cara memanasi makanan dan berkewajiban menjaga dan memelihara api. Kewajiban-kewajiban inilah yang menghambat perempuan untuk mengikuti perburuan di daerah luar dan sedikit banyak mengurangi gerak berpindah kelompok. Namun, karena perhatian perempuan lebih banyak ditujukan ke lingkungan yang terbatas, mereka kemudian mampu memperluas pengetahuannya tentang seluk beluk tumbuh-tumbuhan, meningkatkan cara menyiapkan makanan, dan mendidik anak-anak dalam mempersiapkan diri mengenal keadaan dan lingkungan alam sekitarnya.

Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Lanjut

Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut berlangsung pasca kala Pleistosein. Corak hidup pada masa ini masih terpengaruh dari masa sebelumnya. Keadaan lingkungan pada masa pasca Pleistosein tidak banyak berbeda dengan masa sebelumnya. Faktor-faktor alam seperti iklim, kesuburan tanah dan keadaan fauna sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia purba. Hidup berburu dan mengumpulkan makanan yang terdapat di alam sekitar tetap dilanjutkan. Ini terbukti dari bentuk alat yang masih terbuat dari batu, tulang, kayu dan kulit kerang. Hidup berburu dan mengumpulkan makanan merupakan cara hidup yang cocok pada waktu itu, mengingat kondisi alam dan pola pikir manusia yang masih primitif.

Di Indonesia sendiri, mulai timbul usaha-usaha untuk terempat tinggal secara tidak tetap (*semi sedenter*) di dalam gua-gua alam (*caves*) atau gua-gua payung atau curuk (*rock-shelter*) yang ada di tepi pantai (Poeponegoro, 2010:141). Gua yang

menjadi tempat tinggal merupakan gua yang dekat dengan sumber air atau berdekatan dengan sungai yang mengandung sumber-sumber kelangsungan hidup. Sewaktu-waktu gua tersebut dapat ditinggalkan dan berpindah ketempat lain, apabila sumber makanan di lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung keberlangsungan hidup mereka.

Teknologi yang digunakan pada saat itu merupakan kelanjutan dari teknologi pada masa sebelumnya. Pembuatan alat-lat batu inti menghasilkan kapak genggam Sumatera dan kapak pendek di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk alat serpih-bilah dan alat tulang menjadi alat bantu yang semakin meningkat teknologi pembuatannya. Alat bantu ini memeplihatkan teknik pembuatan yang semakin kompleks dan rumit. Alat-alat tersbut menunjukkan adanya kegiatan perburuan terhadap hewan-hewan kecil. Disamping alat-alat yang terbuat dari batu, tulang, tanduk dan kulit kerang, pada masa ini mungkin sekali dibuat alat-alat dari bambu.

Diduga bahwa bambu memegang peran penting dalam masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini. Hal ini karena bambu sangat mudah untuk diolah untuk dijadikan bermacam-macam alat keperluan sehari-hari. Penemuan api dan perkembangan teknologi pertanian merupakan proses pembaharuan yang membentuk dasar kebudayaan. Penggunaan api oleh manusia tidak hanya menjadi awal kehidupan sosial, tetapi akhirnya juga melahirkan serentetan teknologi yang saling berhubungan. Penemuan dan pemanfaatan api oleh manusia purba menjadi bagian dari proses perentangan persediaan pangan.

Berdasarkan penelitian pertanggalan karbon, telah ditemukan cikal-bakal pertanian pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sisa-sisa butiran dan sekam padi yang berasosiasi dengan gerabah pada kurun waktu 2160-1700 SM di Gua Ulu Leang 1, Maros Sulawesi Selatan. Bukti tersebut menunjukkan bahwa telah ada domestifikasi tanaman, dalam hal ini padi pada masa itu. Selain padi, ditemukan juga adanya kultivasi tanaman buah-buahan dan kacang-kacangan di Indonesia. Semua bukti tersebut ditemukan di kompleks gua Maros Sulawesi Selatan.

Ketika bertempat tinggal di dalam goa, selain membuat alat yang diperlukan, mereka juga melukiskan sesuatu di dinding gua. Lukisan tersebut biasanya tentang pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Kemudian cap-cap tangan juga dibuat

dengan dengan cara merentangkan jari-jari tangan di permukaan dinding gua atau dinding karang yang kemudian disiram dengan cat merah. Sumber inspirasi dari lukisan-lukisan mereka adalah cara mereka hidup ketergantungan pada alam. Dengan demikian lukisan-lukisan dinding gua tersebut melukiskan kehidupan sosial ekonomi dan alam kepercayaan manusia pada waktu itu.



Gambar 3. Lukisan dinding berbetuk hewan di Gua Maros (atas), dan Cap tangan manusia di Gua Leang-Leang (bawah)

Berdasarkan sebuah penelitian mengenai gambar telapak tangan pada gua-gua pra sejarah di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ditemukan beberapa pola gambar telapak tangan diantaranya (a) gambar telapak tangan tanpa pergelangan, (b) gambar telapak tangan yang memiliki lima jari, (c) gambar tepak tangan yang berukuran besar atau dewasa, (d) gambar telapak tangan yang berorientasi ke-atas, (e) gambar telapak tangan yang berwarna coklat, (f) gambar telapak tangan yang tersusun dalam kelompok secara acak, dan (g) gambar telapak tangan yang memiliki konteks telapak

tangan lain. Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan bahwa pola gambar telapak tangan tersebut adalah telapak tangan orang dewasa beroreintasi ke-atas. Selain itu, gambar telapak tangan tersebut juga mempunyai pola telapak tangan berwarna coklat, tersusun secara acak, dan memiliki konteks gambar telapak tangan lain. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat berbagai aspek bentuk cap telapak tangan. Cap telapak tangan ini merupakan suatu kesan, yang secara mekanik dibuat dari suatu bagian alamiah dari budaya yang bersifat individu (Permana, 2005:172).

Pada masa itu, kehidupan bercocok tanam sederhana mulai muncul. Kegiatan bercocok tanam dilakukan berpindah-pindah menurut keadaan kesuburan tanah. Hutan atau padang rumput yang akan dijadikan lahan pertanian dirambah dahulu dengan sistem tebang dan kemudian dibakar. Di lahan tersebut, mereka menanam umbi-umbian seperti keladi. Mereka juga sudah menanam satu jenis padi liar yang didapatkan di hutan. Setelah masa panen selesai, lahan pertanian tersebut mereka tinggalkan dan berpindah ketempat yang baru dan hidup seperti di tempat sebelumnya. Sewaktu-waktu mereka juga dapat kembali lagi ke lahan atau lokasi tempat tinggal yang pernah mereka tinggalkan dulu.

Masa Bercocok Tanam

Pada masa ini masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda menetap di suatu tempat serta mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam sederhana dan penjinakan beberapa hewan tertentu. Lokasi tempat mereka tinggal terlihat mulai mendiami lokasi terbuka yang dekat dengan air seperti pinggir sungai, tepian danau dan daerah pantai. Lokasi yang mereka diami adalah tempat-tempat yang agak tinggi dan bukit-bukit kecil yang dikelilingi oleh sungai atau jurang serta dipagar oleh hutan. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh dan gangguan binatang buas. Terkadang untuk tujuan tersebut dibuat parit dan tanggul pertahanan di sekeliling tempat tinggal.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, pada awal bercocok tanam, mereka melaksanakan perladangan berpindah atau pertanian lahan kering (*shifting cultivation*). Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan cara membuka hutan untuk ditanami dan mereka akan berpindah lokasi pertanian ke lahan yang lain apabila di rasa lahan yang mereka tanam sudah tidak produktif lagi. Sistem perladangan dapat

dilaksanakan oleh mereka ketika jumlah penduduknya masih sedikit dan huta sebagai lahan pertanian masih luas. Pada masa bercocok tanam terjadi peningkatan jumlah penduduk, sehingga berakibat pada semakin tingginya kebutuhan bahan makanan. Akibatnya sistem perladangan lambat laun semakin tidak efektif lagi ditambah dengan lahan pertanian yang banya diubah menjadi lahan pemukiman. Akhirnya masyarakat awal mulai memikirkan cara mengatasi hal ini dengan jalan pertanian yang menetap dan mempertahankan kesuburan tanah dengan pemupukan.



Gambar 4. Bentuk tempat tinggal pada masa bercocok tanam

Ketika masa bercocok tanam berlangsung, terjadi perubahan tata kehidupan yang ditandai perubahan cara memenuhi kebutuhan hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan. Begitu pula dengan pada bentuk tempat tinggal. Para peneliti berasumsi bahwa pada waktu itu telah terbentuk desa-desa kecil semacam pedukuhan. Pada setiap dukuh terdapat beberapa tempat tinggal (rumah) yang dibangun secara tidak beraturan. Rumah yang dibangun agak kecil berdekatan dengan tanah dengan atap berbentuk bulat kerucut yang terbuat dari dedaunan dan atapnya langsung menempel pada tanah. Rumah semacam itu hanya dapat didiami oleh beberapa orang. Bentuk semacam ini diyakini sebagai bentuk yang tertua dan sampai sekarang masih bisa dijumpai di beberapa wilayah timur Indonesia seperti di Papua, Kalimantan Barat, Nikobar, dan Andaman.

Pada masa ini, anak-anak dan para perempuan mulai mendapat tempat dalam kegiatan tertentu. Telah ada pembagian tugas yang jelas antara kaum laki-laki dan perempuan yang lebih terorganisir. Dengan dikenalnya cara-cara bercocok tanam, ada

dua hal penting erat hubungannya dengan tumbuhnya suatu masyarakat dan berkembangnya peradaban, yaitu telah ada masyarakat yang bertempat tinggal agak menetap dan kedua, adanya jeda waktu yang lama kelompok tinggal di suatu tempat mengakibatkan timbulnya ikatan sosial antarindividu, antarkeluarga dan antar kelompok yang lebih luas. Sistem kepemimpinan mulai berlaku dalam sebuah kelompok. Pemimpin dipilih berdasarkan prinsip *primus inter pares* yang menandakan bahwa pemimpin tersebut dipilih diantara mereka yang memiliki kelebihan fisik (kuat) maupun spritual (keahlian).

Disamping berkembangnya kehidupan sosial manusia, pada waktu itu berkembang juga sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat purba. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dikenal sistem perdagangan dengan sistem barter. Barang-barang yang dipertukarkan adalah hasil cocok tanam, hasil kerajinan tangan seperti gerabah, beliung, dan perhiasan, atau mungkin pula garam dan ikan laut yang diasinkan dan dikeringkan. Barang-barang yang dipertukarkan atau menjadi barang barter, diangkut dalam jarak yang sangat jauh melalui jalur sungai, laut dan darat. Perahu dan rakit menjadi saran penting dalam lalu lintas perdagangan, karena sebagian besar kegiatan perdagangan melalui sungai dan laut.

Selain pertanian, mata pencaharian yang dikembangkan adalah perikanan. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kehidupan berburu, dimana manusia mengambil bahan makanan yang ada di alam dalam rangka memenuhi kehidupannya. Munculnya kelompok masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dimulai ketika mereka berpindah ke tempat sekitar muara sungai atau pesisir laut. Pada awalnya mereka berburu ikan saja, namun seiring dengan bertambahnya penduduk karena tingkat kelahiran yang tinggi, berakibat teknik berburu disekitar muara sungai dan pantai sudah tidak mencukupi kebutuhan lagi, maka mereka pun mulai melirik tengah laut dan menyusuri sepanjang sungai untuk mendapatkan ikan dengan menggunakan perahu sebagai alat bantu sehingga berkembanglah kebudayaan nelayan.

Kegiatan nelayan ini sangat tergantung pada alam, karena mereka tidak membudidayakan ikan di laut. Selain itu, pada waktu atau keadaan tertentu mereka tidak bisa melaut, misalnya pada saat bulan purnama, adanya badai dan perubahan arah angin. Oleh karena itu mereka mulai berpikir untuk mengembangkan ikan sendiri di

kolam-kolam ikan tepi pantai berupa tambak-tambak yang mendapatkan air pada saat pasang dan hujan. Sejak saat itu, berkembanglah kebudayaan mengembangbiakkan ikan di tambak yang berarti mereka telah berusaha melepaskan diri dari ketergantungan pada alam (*food producing*).

Konsepsi kepercayaan terhadap roh nenek moyang (*animisme*) dan benda-benda gaib (*dinamisme*) mulai berkembang (Noor, 2015:102). Roh dianggap mempunyai kehidupan sendiri dialamnya seperti layaknya manusia yang masih hidup. Hal ini terlihat dari prosesi upacara penguburan. Pelaksanaan penguburan dilakukan dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung ditempat yang sering dihubungkan dengan asal usul anggota atau tempat yang dianggap sebagai tempat tinggal roh nenek moyang. Ketika prosesi penguburan, jasad akan dibekali dengan berbagai benda yang dianggap nantinya akan berguna di alam mereka dan terjamin kehidupannya. Benda-benda tersebut seperti perhiasan dan priuk dikubur bersama dengan jasad orang yang telah meninggal.

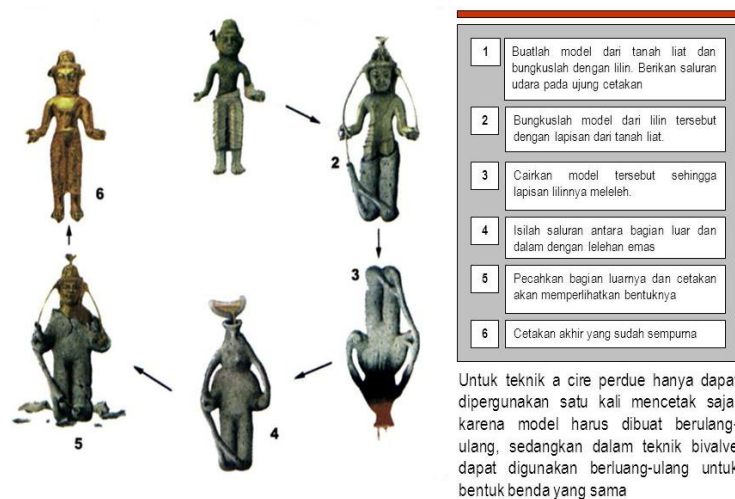
Masa Perundagian

Masa akhir dalam pra aksara Indonesia atau yang lazim disebut masa logam, oleh HR van Heekeren (1985) disebut sebagai *The Brozen-iron Age*". Penyebutan ini didasarkan pada temuan artefak tembaga, dan artefak perunggu dan besi yang ditemukan bersamaan dalam satu konteks. RP Soeroso menyebut masa ini sebagai masa perundagian. Kata perundagian diambil dari kata dasar *undagi* dalam bahasa Bali. *Undagi* adalah seorang atau sekelompok atau golongan masyarakat yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, perhiasan kayu, sampan, dan batu.

Pada masa perundagian, manusia telah menyebar ke berbagai pulau di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sisa-sisa peninggalan benda perunggu, benda besi, gerabah yang sudah maju, baik dalam bentuk hiasan dan manik-manik di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Sumba serta beberapa pulau lain di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Kemajuan teknologi yang berakibat pada meningkatnya kesejahteraan hidup dan surplus kebutuhan pangan menyebabkan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Akibatnya terbentuklah desa-desa besar yang merupakan gabungan dari dusun-dusun kecil. Dari sebuah ekskavasi di Gilimanuk (Bali),

ditemukan sebuah desa di pantai yang kegiatan utamanya adalah mencari ikan. Dari hasil ekskavasi tersebut ditemukan gambaran bahwa rata-rata umur penduduk dalam perkampungan tersebut adalah 30-40 tahun dan angka kematian anak, rata-rata 5 dari jumlah penduduk.

Kehidupan berburu binatang liar seperti harimau dan kijang juga masih dilakukan. Akan tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Perburuan ini, selain untuk menambah mata pencaharian, juga dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberanian, kegagahan, dan kedewasaan dalam lingkungan masyarakat. Kegiatan berburu ini dilakukan bersama-sama atau perseorangan dengan manai kuda dan didampingi seekor anjing sebagai bantuan untuk mengejar dan membingungkan hewan buruan. Selain sebagai pemburu binatang liar, pertanian dan perladangan menjadi mata pencaharian yang tetap, sehingga diciptakanlah alat-alat logam untuk mendukung kegiatan pertanian dan perladangan.



Gambar 5. Teknik *a cire perdue* (teknik cetak lilin)

Kaitannya dalam pembuatan alat-alat dari bahan logam, saat itu telah dikenal teknik atau cara yang dikenal dengan teknik cetakan setangkap (*bivalve*) dan teknik cetakan lilin (*a cire perdue*). Jika menggunakan teknik setangkap maka cetakan tersebut dapat digunakan berkali-kali. Namun sebaliknya jika menggunakan teknik cetakan lilin, maka cetakan tersebut hanya dapat dipergunakan sekali saja. Biasanya teknik setangkap digunakan untuk mencetak benda-benda yang tidak mempunyai bagian

yang menonjol. Sedangkan teknik cetakan lilin digunakan untuk mencetak benda-benda yang berbentuk atau memiliki bagian-bagian yang menonjol.

Teknik melebur logam dan menuangkannya ke dalam cetakan sehingga menjadi alat merupakan suatu perkembangan teknik tingkat tinggi yang belum pernah dikenalkan dan digunakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan teknik dan cara-cara khusus. Dalam hal ini logam bukanlah batu yang hanya dipukul kemudian mendapatkan sebuah alat. Disini logam harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai titik leburnya setelah itu baru dicetak menjadi perkakas yang diinginkan.

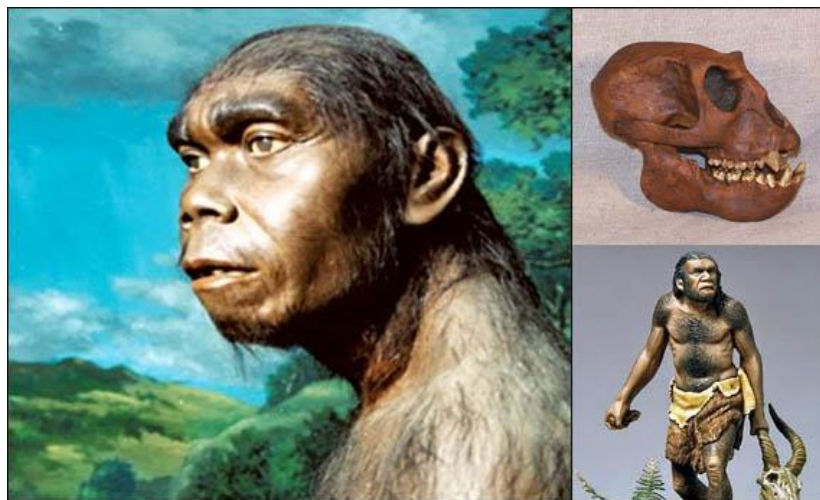
Masyarakat pada masa perundagian juga telah mengenal pengaturan air untuk kegiatan pertanian, sehingga pertanian tidak tergantung sepenuhnya pada hujan. Hasil pertanian kemudian disimpan untuk musim kemarau atau dijadikan sebagai bahan dagang. Sebagai upaya untuk menjaga agar tanah pertanian tetap dalam kondisi subur, dilakukan upacara yang melambangkan penghormatan dan permintaan terhadap kesuburan tanah dan kesejahteraan masyarakat. Hewan seperti babi, kerbau, kuda, dan beberapa jenis unggas telah diperlihara untuk persediaan makan dan untuk keperluan upacara, pertanian, atau mungkin sebagai alat angkut. Anjing digunakan untuk mengejar dan membingungkan binatang yang diburu. Perdagangan telah dilakukan antar pulau di Indonesia dengan menggunakan perahu bercadik. Sistem perdagangan masih menggunakan sistem barter (tukar menukar barang yang diperlukan masing-masing pihak). Benda-benda yang ditukar adalah benda yang mengandung magis dan bersifat khas, seperti nekara perunggu, dan manik-manik.

Terbentuknya masyarakat yang teratur dengan adanya golongan undagi ternyata berdampak pada berkembangnya daya cipta dalam berbagai bidang teknologi. Teknik penuangan perunggu tidak hanya menghasilkan ciptaan benda-benda yang sederhana, seperti kapak, perunggu, gelang, dan mata tombak, tetapi juga pada benda-benda seperti patung, nekara, dan benda-benda upacara (seperti candrasa) yang diperindah dengan pola geometris, topeng, dan binatang. Pembuatan gerabah mengalami kemajuan yang pesat dan tidak lagi hanya dibuat dengan tangan dan papan batu, tetapi telah menggunakan roda pemutar.

C. Jenis-Jenis Manusia Purba di Indonesia

Fosil manusia di Indonesia pernah ditemukan di masa lalu bersamaan dengan fosil-fosil hewan. Penelitian ilmiah tentang fosil di Indonesia telah dimulai pada abad ke-19 yang terbagi dalam tiga tahap yaitu 1) 1889-1909; 2) 1931-1941; dan 3) 1952-sekarang. Penelitian tentang fosil manusia yang ditemukan di Indonesia ini dipelopori oleh Eugene Dubois, seorang paleontolog Belanda.

Jenis Meganthropus. Fosil manusia purba paling primitif yang ditemukan di Indonesia disebut *Meganthropus paleojvanicus*. Meganthropus berasal dari kata *mega* yang berarti besar, dan *anthropo* yang berarti manusia. Fosil dari jenis meganthropus juga ditemukan di Sangiran (Jawa Tengah) oleh von Koenigswald tahun 1936 dan 1941 (Herimanto, 2012:23). Meganthropus diperkirakan hidup antara 2-1 juta tahun yang lalu. Dari rahang dan gigi yang ditemukan terlihat bahwa makhluk ini adalah pemakan tumbuhan yang tidak dimasak terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan asumsi dari temuan rahang dan gigi yang besar dan kuat.



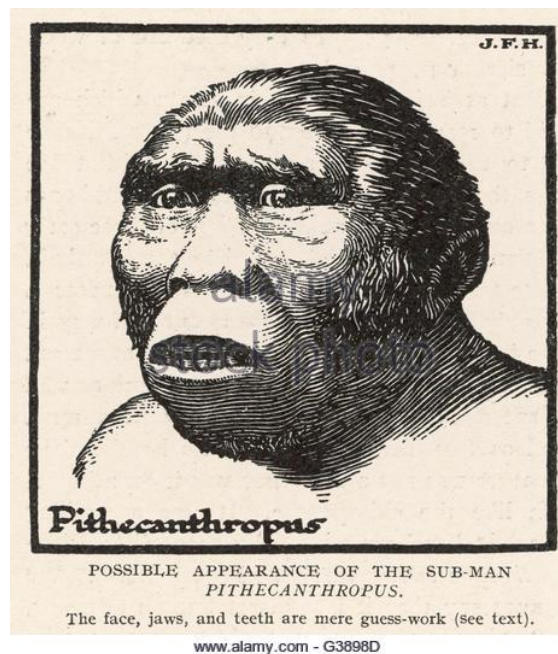
Gambar 6. Ilustrasi manusia jenis *Meganthropus*

Ketika penemuan fosil, belum ditemukan perkakas atau alat dalam lapisan ini sehingga diperkirakan jenis ini belum memiliki kebudayaan. Secara umum ciri-ciri dari manusia jenis *Meganthropus* sebagai berikut.

- 1) Hidup dikisaran 2-1 juta tahun lalu;
- 2) Memiliki tubuh kekar dan lebih tegap;
- 3) Memiliki bentuk geraham seperti manusia tetapi tidak berdagu seperti kera;

- 4) Rahang yang relative lebih besar;
- 5) Ada penonjolan pada kening dan belakang kepalanya;
- 6) Memiliki tulang pipi yang relative tebal; dan
- 7) Makanan pokok adalah tumbuh-tumbuhan (vegetarian).

Jenis Pithecanthropus. Fosil manusia yang paling banyak ditemukan adalah fosil *Pithecanthropus*, sehingga dapat dikatakan bahwa pada saat kala Plestosein di Indonesia didominasi oleh manusia jenis tersebut. *Pithecanthropus* hidup pada kala Plestosein Awal dan Tengah, dan kemungkinan juga pada Pleistosen Akhir. Sisa-sisa kehidupan manusia jenis *Pithecanthropus* banyak ditemukan di Peking, Kerdungbrubus, Trinil, Sangiran, Sambungmacan, dan Ngandong.



Gambar 7. Ilustrasi manusia jenis *Pithecanthropus*

Hidupnya mungkin dilembah-lembah atau di kaki pegunungan dekat dengan perairan darat di Jawa Tengah dan Jawa Timur (sekarang), yang mungkin dahulu merupakan padang rumput dengan pohon-pohon yang jarang. Genus *pithecanthropus* mempunyai ciri-ciri:

- 1) Tinggi badan berkisar 165-180 cm dengan tubuh dan anggota badan tegap;
- 2) Geraham yang besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dan tonjolan kepala yang nyata;

- 3) Daggu belum ada dan hidungnya lebar;
- 4) Wajah menonjol kedepan dan dahinya miring ke belakang; dan
- 5) Volume tengkorak berkisar antara 750-1300 cc;
- 6) Alat pengunyah dan otot tengkorak mengecil;
- 7) Makanan masih kasar dengan sedikit pengolahan.

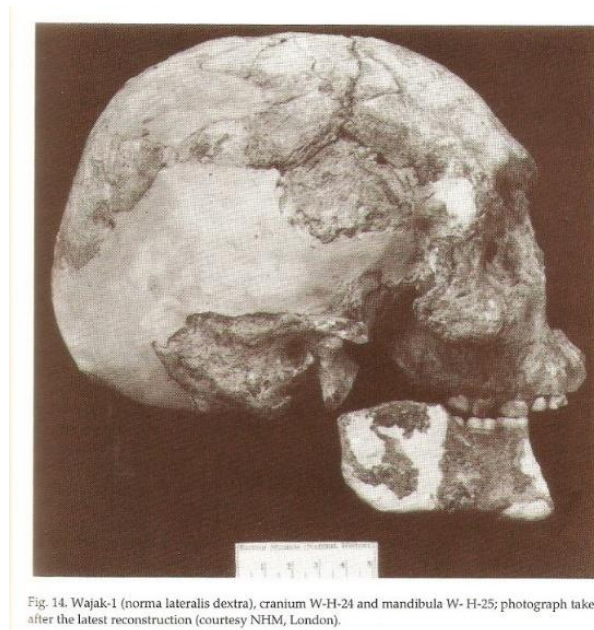
Fosil *Pithecanthropus erectus* pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di sekitar desa Trinil, wilayah Ngawi, Jawa Timur di sekitar Lembah Sungai Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan berupa tulang rahang bagian atas tengkorak, geraham, dan tulang kaki. Manusia purba *Pithecanthropus Erectus* memiliki kedudukan diantara manusia dan kera, dengan kata lain mereka mirip seperti kera tetapi dapat berjalan seperti manusia. Manusia purba *pithecanthropus erectus* hidup pada masa Pleistosen Awal, Pleistosen Tengah, dan Pleistosen Akhir. Pada masa-masa itu, daerah tempat tinggal mereka diperkirakan masih berupa padang rumput dengan pepohonan yang tidak terlalu jauh dengan sumber air.

Beberapa puluh tahun, *Pithecanthropus erectus* yang ditemukan oleh E. Dubois ini dianggap sebagai manusia purba tertua di Indonesia. tahun 1936-1941, von Koenigswald dan F. Weinderich melakukan penyelidikan disepanjang Sungai Bengawan Solo dan berhasil menemukan fosil tengkorak manusia. Berawal dari penemuan ini, kemudian disimpulkan bahwa manusia tertua bukan *Pithecanthropus erectus*, melainkan *Meganthropus paleojavanicus* (Al Anshori, 2010:4). *Pithecanthropus* yang tertua yang ditemukan adalah *Pithecanthropus modjokertensis* atau *robustus*, yang ditemukan di formasi Pucangan di sebelah utara Pening dan Mojokerto. Fosil ini ditemukan tahun 1936 berupa tengkorak anak-naka berusia sekitar 6 tahun berdasarkan tulang pelipis dan sendi rahang bawahnya.

Jenis Homo. Dilihat dari ciri-cirinya, manusia purba jenis homo lebih maju dan sempurna dari jenis manusia lain yang ditemukan di Indoensia. Manusia purba jenis homo terdapat berbagai macam perbedaan dengan pendahulunya yakni manusia purba jenis *Meganthropus* dan manusia purba jenis *Pithecanthropus*. Jika dibandingkan *Meganthropus* ataupun *Pithcanthropus*. Secara fisik, ciri-ciri manusia Homo sudah mirip dengan manusia modern sekrang ini. Misalnya, bentuk kepalanya sudah tidak

lonjong. Fosil manusia jenis *Homo* yang ditemukan di Indonesia berasal dari kala Pleistosein. Rangka yang ditemukan adalah rangka Wajak dan beberapa tulang paha dari Trinil dan tulang tengkorak dari Sangiran. *Homo* menurut definisi yang dipakai disini memiliki ciri-ciri yang lebih progresif daripada *Pithecanthropus*. Ciri-ciri manusia purba jenis *Homo* sebagai berikut.

- 1) Volume tengkorak bervariasi antara 1000-2000 cc, dengan nilai rata-rata antara 1350-1450 cc;
- 2) Tinggi badannya juga lebih besar yaitu 130-210 cm dengan berat badan 30-150 kg.
- 3) Otak dari manusia jenis *homo* lebih berkembang terutama kulit otaknya sehingga bagian terlebar tengkorak terletak di sisi tengkorak dan dahinya membulat serta lebih tinggi.
- 4) Gigi mengecil, begitu pula dengan rahang serta otot kunyah, dan muka tidak begitu menonjol ke depan; dan
- 5) Berjalan serta berdiri dengan tegak, dan koordinasi otot sudah jauh lebih cermat dan seimbang.



Gambar 8. Tengkorak *Homo wajakensis*

Temuan fosil di Wajak merupakan jenis *Homo sapiens*. Rangka Wajak ditemukan oleh Rietschoten tahun 1889. Temuan ini diselidiki pertama kali oleh Dubois, dan terdiri atas tulang tengkorak termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher.

Temuan Wajak mengisyaratkan bahwa sekitar 40.000 tahun sebelum sekarang, Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens yang tergolong ras Wajak, yang berbeda dengan ras manusia sekarang. Manusia Wajak kelihatannya tidak hanya mendiami Indonesia barat, tetapi juga di sebagian Indonesia Timur. Oleh karena itu, populasinya pasti lebih besar dari Pithecanthropus. Von Koenigswald menyebutkan barangkali *Homo Wajakensis* termasuk jenis *homo sapiens* (manusia cerdas) karena telah mengenal teknik penguburan. Diperkirakan jenis ini merupakan nenek moyang dari ras Austroloid dan menurunkan penduduk asli Asutralia yang sekarang ini (Sudrajat, 2012:11). Selain ditemukan manusia Wajak, tahun 1931-1934 von Koenigswald dan Weidenrich menemukan fosil-fosil manusia purba di lembah Sungai Bengawan Solo di dekat Desa Ngandong. Jenis manusia purba dari lembah Bengawan Solo tersebut dinamakan Homo Soloensis atau manusia dari Solo. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa ternyata manusia purba jenis Homo Soloensis lebih tinggi tingkatannya dari pada Pithecanthropus Erectus. Bahkan, sebagian para ahli menggolongkan ke dalam kelompok Homo Neanderthalensis, yang merupakan manusia purba jenis Homo Sapiens dari daratan Eropa yang sama-sama hidup dilapisan Pleistosen Atas.

Menurut para ahli, Homo Soloensis dan *Homo Neandhertalensis* merupakan hasil evolusi dari Pithecanthropus Mojokertensis. Berdasarkan penelitian fosil-fosil yang ditemukan, Homo Soloensis mempunyai ciri-ciri, antara lain sebagai berikut.

- 1) Otak kecilnya lebih besar daripada otak kecil Pithecanthropus Erectus;
- 2) Tengkoraknya lebih besar daripada Pithecanthropus Erectus dengan volumenya berkisar 1.000-1.300 cc;
- 3) Tonjolan kening agak terputus ditengah (di atas hidung); dan
- 4) Berbadan tegap dan tingginya kurang lebih 180 cm.

Penemuan manusia jenis homo, juga ditemukan di daerah timur Indonesia. Dibandingkan jenis lainnya, fosil ini memiliki keistimewaan karena tubuhnya yang kerdil. Fosil ini dinamai *Homo floresiensis* atau manusia dari Flores. Fosil ini ditemukan oleh seorang pastur bernama Verhoeven tahun 1958 di Liang Bua Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur. Homo floresiensis diperkirakan hidup pada sekitar 30.000-18.000 tahun yang lalu. Berdasarkan penemuan tersebut, dapat

diidentifikasi bahwa manusia jenis ini telah mampu membuat peralatan dari batu, pemburu handal, dan menggunakan api untuk memasak. Manusia jenis ini memiliki tubuh sekitar 1 meter dan ukuran tengkorak seperti anak kecil. Homo floresiensis mempunyai ciri memiliki tengkorak yang panjang dan rendah, berukuran kecil, dan dengan volume otak 380 cc. kapasitas cranial tersebut berada jauh di bawah Homo Erectus (1000 cc), manusia modern Homo sapiens (1400 cc), dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse (380 cc).

D. Rangkuman

Kehidupan masa pra aksara berdasarkan sosial ekonomi terbagi dalam empat tahap. Tahap pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada tahap ini manusia masih sepenuhnya tergantung pada alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan mereka pun berpindah-pindah, mencari lokasi yang mampu menyediakan sumber makanan bagi mereka. Tahap kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini, mulai muncul usaha untuk memproduksi makanan dengan cara bercocok tanam sederhana. Varietas tanaman yang menjadi sumber makanan pun masih terbatas, yaitu sejenis padi-padian. Ketergantungan pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masih belum dapat mereka tinggalkan sepenuhnya. Pada tahap ketiga adalah masa bercocok tanam. Mereka mulai memproduksi bahan makanan melalui persawahan dan pertanian. Ketergantungan pada alam mulai mereka tinggalkan. Tahap keempat adalah masa perundagian. Pada masa ini, teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup berkembang menjadi lebih maju. Mereka mulai memproduksi makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam dan menjinakkan hewan untuk dimanfaatkan daging dan tenaganya. Perdagangan dengan sistem barter berkembang pada masa ini.

Pendukung kehidupan pada tahapan kehidupan sosial ekonomi manusia purba di Indonesia terdiri dari tiga jenis manusia. Hal ini didarkan dari berbagai temuan fosil di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sangiran, Trinil, dan peninggalan-peninggalan kehidupan manusia di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Pelopor penelitian mengenai manusia purba di Indonesia adalah Eugene Dubois, seorang paleontolog asal Belanda. Selain Eugene Dubois, ada von Koenigswold yang juga meneliti tentang manusia purba di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari mereka,

berbagai jenis manusia purba ditemukan di Indonesia. Manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia dari jenis *Meganthropus*, yaitu *Meganthropus paleojavanicus*. Kemudian juga di temukan beberapa jenis *Pithecanthropus*. Penemuan manusia purba di Indonesia yang berasal dari jenis *Homo* adalah penemuan rangka di Wajak.

Mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, terdapat pendapat dari berbagai ahli. Pendapat-pendapat tersebut didasarkan pada hasil riset yang telah mereka lakukan. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat dari Prof. Dr. Moh. Ali, yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunnan, yang bermigrasi ke Nusantara sekitar 1500 SM. Migrasi ke Nusantara terdiri dari dua gelombang. Gelombang pertama terjadi sekitar 1500-500 SM, dimana ras Proto Melayu ke Nusantara karena bencana alam dan serangan dari ras Mongoloid di utara. Akibat dari migrasi ras Proto Melayu ini, ras Melanesia yang lebih dahulu tinggal di pulau-pulau Nusantara terdesak ke pedalaman di kawasan timur Nusantara. Antara tahun 300-200 SM, terjadi migrasi gelombang berikutnya dari ras Deutro Melayu yang dengan cepat membaaur dengan ras Proto melayu. Keteruanan hasil pembaruan Proto Melayu dengan Deutro Melayu itulah yang menjadi penghuni utama kepulauan Nusantara disamping ras Melanesia.

Sebenarnya sebelum kedatangan gelombang migrasi ras Proto Melayu dan Deutro Melayu, Nusantara telah dihuni oleh orang-orang dari ras *Weddoid*. ras weddoid adalah ras yang berasal dari hindia bagian selatan. Ciri-ciri dari ras ini adalah kulit hitam dan rambut keriting. Selain itu, tubuhnya berukuran sedang. Ras ini hampir sama dengan negroid akan tetapi berbeda pada ukuran tubuh. Kedua, ras weddoid adalah sekelompok orang yang memiliki rambut keriting, kulit hitam, dan juga bertubuh sedang. Ras ini mendiami maluku dan nusa tenggara timur. Ada beberapa ciri-ciri fisik dari ras weddoid sebagai berikut: kulit hitam, tinggi sekitar 160cm, hidung pesek, dan rambut hitam ikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshori, Junaedi. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia: Masa Pra Sejarah sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Mitra Panaitan.
- Daldjoeni, N. 1984. *Geografi Kesejarah II*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Herimanto. 2012. *Sejarah Indonesia Masa Pra Aksara*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Melalatoa, M Junus. 1995. *Ensiklopedia Suka Bangsa Indonesia Jilid L-Z*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Noor, Yusliani dan Mansyur. 2015. *Menelusuri Jejak-Jejak Masalalu Indonesia*. Banjarmasin: Banjarmasin Press.
- Oktorino, Nino. *Ensiklopedia Sejarah dan BudayaI: Muatan Lokal Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Permana, R. Cecep Eka. 2005. “Bentuk Gambar Telapak Tangan pada Gua-Gua Pra Sejarah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan”. Dalam jurnal *Wacana*, Vol 7 No. 2 Oktober 2005.
- Poepponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia I: Zaman Pra Sejarah di Indonesia, Edisi Pemuktahiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudrajat. 2012. *Diklat Prasejarah Indonesia*. Yogyakarta: UNY.
- Sunyoto, Agus. 2012. *Atlas Walisongo*. Depok. Pustaka IIMaN.

**HASIL BUDAYA YANG BERKEMBANG PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT
PRA AKSARA**
Syaiful Amin

A. Hasil Kebudayaan Zaman Batu (*Litik*) di Indonesia

Teknik pembuatan pembuatan peralatan batu tertua masih sangat sederhana yaitu dengan cara membenturkan sebuah batu pada batu lainnya (*block-on-block technique*) hingga menghasilkan berbagai macam pecahan. Pecahan-pecahan yang dihasilkan kemudian dipilah yang memiliki sisi yang tajam untuk digunakan sebagai alat. Sejalan dengan perkembangan pembuatan alat manusia purba, teknik bentur tadi kemudian berkembang pada tingkat yang lebih kompleks yang dikenal dengan teknik pemangkas langsung (*direct percussion*). Alat yang dihasilkan dengan cara menggunakan alat pemangkas yang dibenturkan pada bahan yang dikerjakan dalam upaya membentuk alat yang diinginkan atau melepaskan serpihan yang akan dijadikan alat. Bahan pemangkas dapat bermacam-macam, namun secara umum dapat berupa batu atau tulang (Abdullah, 2012:102).

Teknik yang lebih maju adalah pemangkas tidak langsung (*indirect percussion*) yaitu dengan cara menggunakan alat perantara seperti pahat yang dipukul dengan perkutor pada bahan yang dikerjakan teknik ini lebih dapat mengontrol arah pemangkas sehingga cenderung menghasilkan alat bentuk alat yang lebih sempurna. Teknik lainnya adalah teknik tekan (*pressure technique*), yaitu suatu alat yang dihasilkan tidak lewat alat lainnya tetapi lewat tekanan. Sebuah alat perantara, semacam pahat, ditekankan pada bahan yang dikerjakan dengan kekuatan tangan atau tenaga berat badan hingga menghasilkan alat yang diinginkan. Teknik semacam ini lebih sulit karena membutuhkan keterampilan dalam mengontrol tekanan, namun lebih dapat mengontrol arah pemangkas sehingga cenderung menghasilkan bentuk yang diinginkan.

Dilihat dari kondisi bahan, alat yang dihasilkan dapat berasal dari serpihan-serpihan yang dilepaskan (alat serpih) atau bahan yang dikerjakan itu sendiri (alat batu

inti). Fungsi alat yang dihasilkan umumnya sangat bervariasi. Setiap jenis alat pada hakikatnya dapat digunakan untuk berbagai fungsi, namun secara khusus memiliki fungsi tertentu. Secara umum fungsi alat batu inti berbeda dengan alat serpih. Jika alat batu inti cenderung digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan tenaga besar, seperti memotong benda menggali tanah, dan membunuh binatang, alat serpih digunakan untuk aktivitas yang lebih ringan, seperti mengiris, menajamkan, menghaluskan, atau memotong benda yang lebih kecil. Salah satu fungsi alat serpih yang paling menonjol adalah untuk menguliti binatang hasil buruan.

Di Indonesia, zaman batu terbagi menjadi tiga berdasarkan runtutan waktu yang terjadi. Pembagian zaman batu di Indonesia yaitu Paleolitikum (zaman batu tua), zaman batu tengah (mesolitikum), dan zaman zaman batu muda (neolitikum).

Zaman Batu Tua (Paleolitikum)

Zaman batu tua diperkirakan berlangsung pada kala Pleistosen atau kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Perkembangan kebudayaan pada masa itu diperkirakan masih sangat lambat akibat keadaan alam yang masih sangat liar dan belum stabil, dan berlangsung zaman es yang datang silih berganti. Pada zaman batu tua, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sangat sederhana dan kasar pembuatannya. Bahkan tidak mengalami perubahan yang terlalu banyak oleh tangan manusia. Alat-alat yang dibuat hampir tidak mengubah bentuk aslinya karena teknologi yang dikuasai manusia masih sangat primitive dan sederhana. Jenis alat yang dibuat masih sangat terbatas ragamnya dan bukti menunjukkan masih sangat terbatas pada kapak meski penggunaannya sangat multifungsi, tidak seperti kapak pada zaman sekarang. Kapak pada zaman ini, kapak digunakan untuk membelah, menggali, berburu, menusuk dan untuk kegiatan lainnya.

Pada zaman ini, di Indonesia dikenal dua kebudayaan yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong.

Kebudayaan Pacitan. Pertama kali dikenalkan tahun 1935 oleh sarjana Belanda, von Koenigswald mengadakan penggalian di Kali Baksoko, Punung, Pacitan-Jawa Timur. Di lokasi tersebut, von Koenigswald menemukan perkakas dalam beberapa lapisan endapan sungai, 30 meter di atas dasar sungai yang sekarang. Alat-alat itu sudah

termakan oleh iklim dan sebagian besar bercampur dengan peralatan kebudayaan neolitikum. Dalam penggaliannya tersebut, ditemukan alat-alat batu berupa:

- 1) Kapak genggam (kapak tak bertangkai yang digunakan dengan cara digenggam);
- 2) Kapak perimbas (bentuk dan cara penggunaannya hampir sama dengan kapak genggam, namun ukurannya jauh lebih besar dari kapak genggam);
- 3) Kapak penetak (bentuk dan cara penggunaannya hampir sama dengan kapak genggam maupun kapak perimbas, namun ukurannya jauh lebih besar dari kedua alat sebelumnya, karena berfungsi untuk membelah kayu, pohon, bambu, atau disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu);
- 4) Pahat genggam (memiliki bentuk lebih kecil dari ketiga alat sebelumnya). Menurut ahli, pahat genggam ini berfungsi untuk menggemburkan tanah, mencari umbi-umbian, dan lain-lain.
- 5) *Flakes* (alat serpih), ukurannya jauh lebih kecil dari alat-alat di atas (Herimanto, 2012:45).

Alat-alat tersebut juga ditemukan pada lapisan Trinil, jadi termasuk lapisan Pleistosen Tengah. Pada lapisan ini pula ditemukan fosil *Pithecanthropus erectus*, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa pendukung utama kebudayaan ini kemungkinan adalah *Pithecanthropus erectus* (manusia kera yang berjalan tegak). Masalahnya, di lokasi ditemukannya fosil *Pithecanthropus erectus* tidak didapati alat tersebut. Oleh karena itu, para ahli berupaya untuk membandingkannya dengan penemuan fosil yang serupa dengan *Pithecanthropus erectus* yakni *Sinanthropus pekinensis* yang ditemukan di Gua Choukoutien di Peking Cina. Ternyata ditempat tersebut ditemukan alat-alat yang terbuat dari batu yang jenisnya serupa dengan alat-alat yang ditemukan di Pacitan. Oleh karena itu, para ahli menyimpulkan bahwa kebudayaan Pacitan adalah milik kebudayaan *Pithecanthropus erectus*. Dengan kata lain, pendukung utama kebudayaan Pacitan adalah *Pithecanthropus erectus* yang berasal dari lapisan Pleistosen Tengah yang merupakan masa perkembangan budaya batu terawal di Indonesia.

Selain di Kali Baksoko, bukti kebudayaan Pacitan juga ditemukan di situs Song Terus, dengan ditemukannya hasil budaya litik. Dari hasil penelitian dapat diketahui adanya beberapa tipe kategori alat litik, *pertama* yaitu kelompok alat masif yang bentuknya besar dan berat. Jenis kelompok ini antara lain: kapak penetak, kapak perimbas, datu pukul dan serpih-serpih yang tergolong besar. Kategori *kedua* adalah kelompok non-masif yaitu alat-alat yang berbentuk kecil seperti alat serpih bilah (Ratnasari, 2015:48-49). Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, kehidupan di gua Song Terus merupakan pendukung kebudayaan paleolitikum.



Gambar 1. Kapak penetak (kiri) dan alat serpih/flakes (kanan)



Gambar 2. Kapak perimbas dan dan kapak genggam yang ditemukan di Pacitan

Pada hakikatnya kebudayaan Pacitan meliputi dua macam tradisi alat-alat batu yaitu tradisi batu inti yang menghasilkan alat-alat dari pemangkasan segumpal batu atau kerakal, dan tradisi serpih, yang menyaipkan alat-alat dari serpih atau pecahan-pecahan batu. Ciri utama kebudayaan Pacitan adalah alat-alat yang terbuat dari batu yang berfungsi sebagai kapak dan berbentuk tidak betangkai atau kapak genggam. Selain di Pacitan, alat-alat batu sejenis juga ditemukan di daerah lain meskipun

jumlahnya tidak banyak, seperti di Sukabumi (Jawa Barat), Perigi dan Grobogan (Jawa tengah), Tambangsawah (Bengkulu), Lahat (Sumatera Selatan), Kalianda (Lampung), Awang Bangkal (Kalimantan Selatan), Cebenge (Sulawesi Selatan), Sembiran dan Trunyan (Bali), dan Ambatua (Timor). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa daerah penyebarannya di seluruh kepulauan Indonesia.

Kebudayaan Ngandong. Selain di Pacitan, peralatan zaman batu tua juga banyak ditemukan di daerah Ngandong dan Sidorejo dekat Ngawi (Madiun) Jawa Timur. Hanya bedanya, jika penemuan di Pacitan berasal dari lapisan Plestosen Tengah, maka kebudayaan Ngandong berasal dari lapisan Plestosein Atas. Sama halnya dengan kebudayaan Pacitan, alat-alat yang ditemukan di Ngandong juga berupa kapak-kapak genggam dari batu dan alat-alat serpih (*flakes*). Akan tetapi ada satu hal yang membedakan dengan kebudayaan Pacitan adalah ditemukannya alat-alat dari tulang dan tanduk pada kebudayaan Ngandong. Alat-alat dari tulang tersebut berupa alat penusuk (belati), ujung tombak dengan gergaji pada kedua sisinya, alat pengorek ubi dan keladi, serta alat dari duri ikan pari yang digunakan sebagai mata tombak. Pada kebudayaan Ngandong juga ditemukan alat-alat dari tanduk yang memanjang dan diruncingkan. Tradisi pembuatan alat dari tulang dan tanduk yang sudah mulai berkembang sejak periode Plestosein Atas (Kebudayaan Ngandong), nantinya akan terus berkembang dan berlanjut hingga zaman mesolitikum, yakni ketika muncul tradisi kehidupan di goa-goa.



Gambar 3. Alat serpih kebudayaan Ngandong

Alat-alat budaya yang termasuk kebudayaan Ngandong juga ditemukan di daerah Sangiran (Sragen-Jawa Tengah) dan di daerah Cebenge (Sulawesi Selatan). Alat-alat yang ditemukan di lokasi tersebut berupa alat serpih (*flakes*) dan alat batu yang terbuat dari batu indah seperti *chaldecon*. Berdasarkan penelitian pendukung utama kebudayaan Ngandong adalah *Homo soloensis* dan *Homo wajakensis*. Hal ini didasarkan bahwa kedua fosil jenis manusia purba tersebut ditemukan dilapisan yang sama dengan ditemukannya alat-alat kebudayaan Ngandong.

Zaman Batu Tengah (Mesolitikum)

Zaman mesolitikum berlangsung pada kala Halosen, dan ditandai dengan adanya usaha untuk lebih menghaluskan alat-alat yang digunakan dalam bentuk perkakas dengan cara menggosok-gosokkan permukaan alat tersebut. Dibandingkan dengan zaman batu tua, perkembangan kebudayaan pada zaman ini berlangsung lebih cepat. Hal tersebut dikarenakan beberapa factor antara lain:

- 1) Pendukung kebudayaan ini adalah manusia cerdas (*Homo sapiens*).
- 2) Keadaan alam sudah tidak seliar dan selabil zaman batu tua (Paleolitikum), sehingga dalam waktu kurang lebih 20.000 tahun (sejak permulaan kala Halosen hingga zaman sekarang) manusia telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dari apa yang telah dicapai oleh manusia pada zaman Paleolitikum, 600.000 tahun yang lalu.

Pada zaman ini, alat-alat batu dari zaman batu tua masih terus digunakan dan telah mendapat pengaruh dari wilayah Asia daratan sehingga memunculkan corak tersendiri. Alat-alat tulang dan *flakes* dari zaman Paleolitikum memegang peranan penting pada zaman ini. Manusia telah mampu membuat gerabah, yaitu benda pecah belah yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Kehidupan pada zaman ini masih berberu, namun mereka sudah mempunyai tempat tinggal agak menetap dan bercocok tanam secara sederhana. Salah satu corak khas dari zaman Mesolitikum adalah adanya sampah-sampah dapur (*Kjokkenmoddinger*) berisi kulit siput dan kerrang yang merupakan bekas tempat tinggal manusia pada zaman itu. Sampah dapur (*Kjokkenmoddinger*) banyak ditemukan di sepanjang pesisir atau pinggir pantai, khususnya di wilayah pantai timur Sumatera. Tumpukan ini akibat setiap generasi

bertempat tinggal sama sehingga membuang sampah pada tempat yang sama pula. Hal ini juga membuktikan bahwa mereka tinggal menetap.



Gambar 4. Kjokkenmoddinger

Ciri khas yang lain adalah adanya kehidupan di gua-gua (*Abris Sous Roche*), terutama yang hidup di daerah pedalaman seperti di Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Contoh kehidupan gua terdapat di Sulawesi Selatan yaitu gua Leang-Leang yang berumur 4000 tahun dan di ditemukan gambar babi hutan dan lukisan tangan berwarna merah pada dinding gua tersebut. Selain di Sulawesi, kehidupan gua (*Abris Sous Roche*) juga ditemukan di situs Song Terus, Pacitan Jawa Timur. Situs ini pertama kali diteliti oleh Prof. Dr. R.P Soejono tahun 1950an dan Basoeki. Akan tetapi penelitian secara mendalam baru dimulai tahun 1994 oleh Pusat Arkeologi Nasional bekerjasama dengan museum Nasional *d'histoire naturelle* di Perancis.

Bukti hunian di gua juga terdapat di Situs Loyang Menadali, Aceh Tengah. Situs ini merupakan lokasi hunian pada masa pra aksara yang kemungkinan berlangsung pada masa meolitikum hingga awal neolitikum dan kemudian digunakan kembali pada masa berikutnya. Hunian di Loyang Mendali juga didukung dengan pemanfaatan ruang gua untuk beraktivitas. Adanya temuan rangka manusia di salah satu bagian gua menjadi semakin memperkuat dugaan bahwa gua tersebut dijadikan sebagai lokasi hunian (Setiawan, 2009:239).



Gambar 5. *Abris Sous Roche*

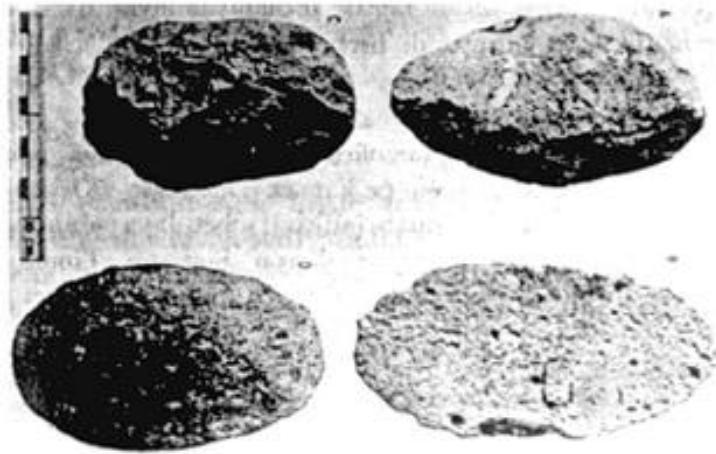
Kebudayaan Mesolitikum meliputi tiga macam kebudayaan yang masing-masing memiliki coraknya sendiri-sendiri. Kebudayaan tersebut sebagai berikut.

Kebudayaan Kapak Genggam Sumatera (*Pabble Culture*). Tahun 1925, PV van Callenfels mengadakan penelitian di sepanjang pesisir pantai Sumatera Timur Laut, tepatnya diantara Langsa (Aceh) dan Medan. Dari penelitian tersebut ditemukan beberapa tumpukan kulit kerrang yang telah membatu dan memiliki tinggi hingga 7 meter. Berdasarkan analisa para ahli, tumpukan kuit kerang tersebut dari jenis *Meretrix meretrix* dan sebagian kecil lainnya dari jenis *Ostrea*. Tumpukan kereang tersebut merupakan sampah dapur yang telah membatu. Di dalamnya van Callenfels menemukan beberapa peralatan anantara lain:

- 1) *Pabble* (kapak genggam Sumatera), penamaan atas benda tersebut didasarkan pada lokasi penemuannya di Sumatera. Kapak genggam Sumatera sangat berbeda dengan kapak genggam yang ditemukan di Pacitan (*Chopper*). Ditemukan juga *hache courte* atau kapak pendek yang diperkirakan dibuat dengan cara memukuli dan memecahkan batu serta diasah, sedangkan bagian tajamnya berada di sisi lengkungnya.
- 2) Pipisan atau batu penggilangn beserta landasannya. Diperkirakan benda ini berfungsi untuk menghaluskan bahan cat merah sebagaimana yang terdapat pada

bekas-bekasnya. Cat merah ini kemungkinan ada kaitannya dengan keagamaan/kepercayaan yakni ilmu sihir (Noor, 2015:44). Hal ini dikarenakan warna merah adalah warna darah, sedangkan darah merupakan tanda hidup. Cat merah tersebut dibubuhkan (diolehkan) di badan hingga merata dan orang yang memakainya diyakini akan bertambah kuat fisiknya.

- 3) Alu, lesung, dan batu pisau. Di kepulauan Indonesia, kebudayaan kapak Sumatera dan kapak pendek diperkirakan berasal dari kebudayaan *Baschon Hobiah* yang berpusat di teluk Tonkin, Indo Cina. Adapun pendukung kebudayaan kapak Sumatera adalah manusia dari ras *Papua Melanosoid*. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil-fosil manusia purba dari ras *Papua Melanosoid* yang banyak ditemukan di bukit-bukit kerang di Sumatera Timur (Herimanto, 2012:51).

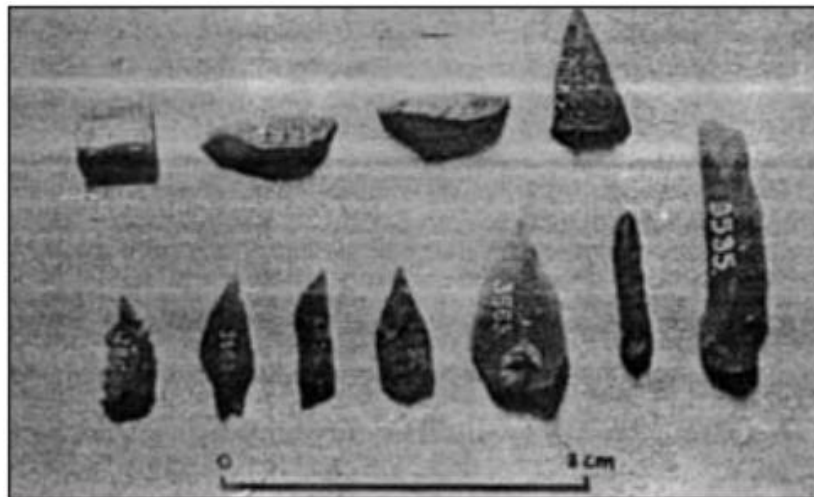


Gambar 6. Kapak genggam Sumatera (*pebble*)

Kebudayaan Tulang Samping (*Sampung Bone Culture*). Tahun 1928-1931, van Stein Callenfels pernah mengadakan penelitian di gua Lawa, dekat Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dari penelitian tersebut ditemukan alat-alat batu antara mata panah dan *flake*, batu-batu penggiling serta yang terbanyak adalah alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Sebagian besar penemuan di dalam gua Lawa ini adalah alat-alat yang terbuat dari tulang sehingga dinamai kebudayaan tulang Sampung (*Sampung Bone Culture*). Penemuan lain yang hampir serupa dengan penemuan di daerah Sampung, berada di daerah Besuki yang ditemukan oleh van Heekeren, dan beberapa penemuan di daerah Bojonegoro yang berupa alat-alat yang terbuat dari kerang dan tulang. Pendukung utama kebudayaan Sampung adalah

manusia *Papua Melanosoid*. Hal tersebut di dasarkan pada penemuan fosil-fosil manusia ras *Papua Melanosoid* yang menyertai penemuan alat-alat budaya zaman batu madya baik di bukit kerang Sumatera Timur maupun di gua-gua daerah Sampaung dan Bojonegoro.

Kebudayaan Toala (*Flake Culture*). Tahaun 1893 sapai 1896, Fritz Sarasin dan Paul Sarasin, seorang berkebangsaan Swiss, melakukan penelitian di gua-gua di daerah Lumacong Sulawesi Selatan, yaitu suatu daerah yang pada saat itu masih didiami oleh suku bangsa Toala. Dalam penelitiannya tersebut ditemukan alat-alat serpih (*flake*), mata panah bergerigi, serta alat-alat dari tulang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh van Callenfels (1933-1934), serta van Heekeren (1937) dan berdasarkan penemuannya, mereka bersesimpulan bahwa kebudayaan Toala termasuk dalam kebudayaan Mesolitikum yang berlangsung sekitar 3000 sampai 1000 SM.



Gambar 7. Alat serpih yang ditemukan di Toala

Penelitian lebih lanjut di gua-gua wilayah Maros, Bone, dan Bantaeng (Sulawesi Selatan) juga berhasil menemukan alat-alat serpih (*flakes*) dan alat-alat lain seperti penggiling, gerabah, dan bahkan kapak Sumatera (*Pabble*). Ciri khas kebudayaan Toala adalah *flakes* bergerigi. Ciri khas kebudayaan Tala tersebut juga ditemukan di gua-gua Pulau Timor, Flores, dan Roti Nusa Tenggara Timur. Di Bandung juga ditemukan *flakes* yang terbuat dari obsidian (batu hitam yang indah). Menurut Fritz dan Paul Sarasin, pendukung kebudayaan Toala adalah orang-orang yang menjadi

nenek moyang suku Toala sekarang, yakni jenis manusia dari keturunan orang-orang *Wedda* dari Sri Lanka dan termasuk ras *Weddaid*.

Zaman Batu Muda (Neolitikum)

Penamaan zaman batu muda, karena zaman ini merupakan zaman termuda dari urutan zaman batu yang terjadi di Indonesia. Yang dimaksud muda disini adalah lebih mencerminkan rentang waktu dari zaman tersebut ke zaman sekarang, bukan pengertian muda untuk batu yang digunakan. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini sudah sangat maju apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya migrasi secara bergelombang dari bangsa Proto Melayu dari wilayah Yunan di Cina Selatan ke wilayah Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Para pendatang baru tersebut membawa kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong serta menyebarkannya ke daerah-daerah yang mereka tempati. Kedua kebudayaan itulah yang menjadi ciri khas kebudayaan neolitikum.

Disamping itu muncul keterampilan mengasah benda (batu) hingga menjadi halus sehingga benda-benda yang dihasilkan sudah dibuat dengan teknik asahan yang halus. Ada juga kemampuan membuat gerabah yang lebih maju. Bahkan seorang ahli kebudayaan Indonesia R. Soekmono membuat kesimpulan bahwa kebudayaan neolitikum inilah yang menjadi dasar kebudayaan Indonesia sekarang.

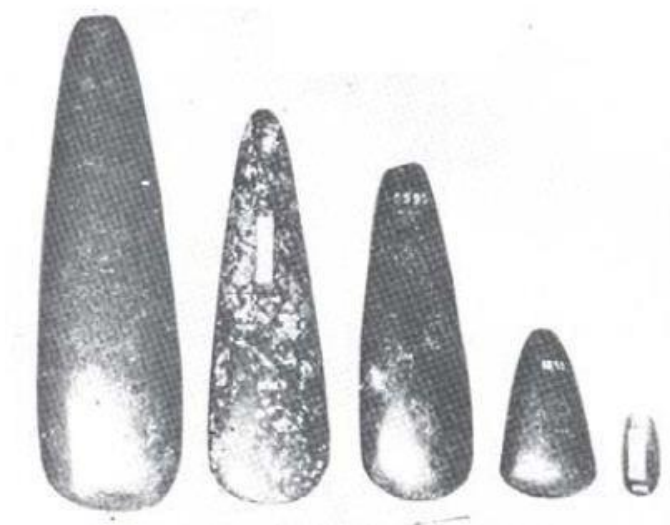
Kebudayaan Kapak Persegi. Von Heine Galdern, telah melakukan penelitian terhadap kapak persegi dengan memperhatikan penampang-alangnya yang kadang kala berbentuk persegi panjang atau trapesium sehingga memberinya nama *kapak persegi*. Di bagian barat Indonesia, kapak persegi banyak ditemukan di Sumatera, Jawa dan Bali. Di bagian timur, jumlahnya lebih sedikit dengan teknik pembuatannya yang lebih kasar dan jelek, banyak tersebar di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan sedikit di Kalimantan. Satu hal yang istimewa ialah, bahwa diantara penemuan kapak-kapak persegi itu, ada yang terbuat dari batu-batu indah (*chalcedon*) yang dibuat sangat indah dan halus, sehingga para ahli memperkirakan bahwa benda tersebut kemungkinan tidak untuk bekerja, melainkan hanya sebagai lambang kebesaran, jimat, alat upacara, atau sebagai alat tukar (barter).

Disamping itu ada variasi-variasi lain dari kapak persegi seperti yang disebut *kapak bahu*, *kapak tangga*, *kapak atap*, *kapak biola*, dan *kapa penarah*. Pendukung kebudayaan kapak persegi adalah manusia dari ras *Proto Melayu* yaitu suatu jenis manusia/bangsa yang memiliki kebudayaan setingkat lebih tinggi dari *Homo sapiens* yang pernah ditemukan di Indoensia. Pada masa sekarang keturunan ras *Proto Melayu* menjadi suku-suku bangsa Dayak, Toraja, Sasak, Batak, Papua, dan lain-lain.



Gambar 8. Kapak persegi

Kebudayaan Kapak Lonjong. Kapak lonjong adalah kapak yang penampangnya berbentuk lonjong atau bulat telur. Bentuk ujungnya agak lancip biasanya ditempatkan di tangkai, sedangkan ujung lainnya yang berbentuk bulat melebar di asah sehingga memiliki ketajaman. Disinilah bedanya dengan beliung persegi yang tidak pernah memiliki tajam simeteris (Poesponegoro, 2010:218).



Gambar 9. Kapak lonjong

~Syaiful Amin~

Kapak lonjong memiliki berbagai ukuran, yang besar disebut *walzenbeli* dan yang kecil disebut *kleinbeli*. Namun diluar kedua jenis tersebut, terdapat kapak lonjong yang dikhususkan sebagai alat upacara yakni kapak yang dibuat lebih halus dan indah daripada kapak lonjong yang hanya untuk perkakas biasa. Daerah persebaran kapak lonjong banyak ditemukan di daerah timur Indonesia terutama di Papua. Dikarenakan banyak ditemukan di Papua, sering kali kebudayaan kapak lonjong disebut sebagai *Neolitikum Papua*. Sedangkan daerah lainnya sebagai lokasi penemuan akapak lonjong berada di Sulawesi, Sangihe-Talaud, Flores, Maluku, Kepulauan Tanibar, Leti dan Maluku. Pendukung kebudayaan ini adalah bangsa *Proto Melayu* yang masuk ke Indonesia melalui jalur timur.

Selain kapak persegi dan kapak lonjong, alat-alat budaya lainnya yang ditemukan pada zaman neolitikum adalah:

1. Perhiasan. Berupa gelang dan kalung yang terbuat dari batu-batu indah. Penuman ini banyak tersebar di pulau Jawa.
2. Pakaian. Pakain pada zaman itu terbuat dari kulit kayu dan bahan tekstil. Ditemukan juga periuk belaga yang diberi hiasan tenunan dan diperkirakan berasal dari zaman yang sama, juga memberikan bukti lain bahwa disamping ada kepandaian membuat pakaian dari kulit kayu juga dari bahan tekstil tang telah dihias.
3. Tembikar. Pada zaman ini tembikar (peliuk belaga/gerabah) memegang peran penting terutama sebagai alat penampung (wadah). Di daerah Melolo Sumba banyak ditemukan gerabah atau tembikar yang berisi tulang belulang manusia.

B. Kebudayaan Megalitikum di Indoensia

Zaman megalitikum atau zaman batu besar adalah kebudayaan yang menghasilkan benda/bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar dan masif. Maksud dari pembuatan benda/bangunan tersebut sebagai sarana pemujaan atau penghormatan kepada roh nenek moyang. Kebudayaan ini muncul pada zaman neolitikum dan berlangsung terus hingga zaman logam. Bahkan pada zaman logam perkembangannya sangat luas hingga tersebar hamper ke seluruh kepulauan di Nusantara. Sampai zaman sekarang pun masih banyak dijumpai adanya tradisi megalitikum di berbagai wilayah Indonesia seperti di Nias (Sumatera), Sumba dan flores (Nusa Tenggara) dan Toraja (Slawesi).

Van Heine Galdern membagi penyebaran kebudayaan megalitikum di Indonesia menjadi dua tahap sebagai berikut.

1. Megalitikum Tua. Pada tahap ini menghasilkan bangunan-bangunan seperti menhir, punden berundak, dan arca-arca statis. Kebudayaan ini terutama dibawa oleh orang-orang Proto Melayu dan berkembang pada masa neolitikum.
2. Megalitikum Muda. Tahap perkembangan megalitik muda menghasilkan bangunan kubur peti batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Tradisi budaya ini menyebar ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Deutro Melayu (pendukung kebudayaan Dongson) dan berkembang pada zaman perunggu di Indonesia sekitar tahun 1000-100 SM.

Hasil-hasil terpenting kebudayaan megalitikum di Indonesia antara lain sebagai berikut.

- a. Menhir. Bentuk fisik menhir seperti tiang atau tugu yang berfungsi sebagai tanda peringatan dan melambangkan roh nenek moyang, sehingga menjadi bangunan pemujaan. Menhir banyak ditemukan di Sumatra Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. Dalam upacara pemujaan, menhir juga berfungsi untuk menambatkan hewan kurban. Tempat-tempat penemuan menhir di Indonesia, yaitu Pasemah (Sumatra Selatan), Pugungharjo (Lampung), Kosala, Lebak Sipedug, Leles, Karang Muara, Cisolok (Banten, Jawa Barat), Pekauman Bondowoso (Jawa Timur), Trunyan dan Sembiran (Bali), Ngada (Flores), Belu (Timor), Bada-Besoha dan Tana Toraja (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan). Menhir biasanya disimpan atau ditancapkan di atas pusara/kuburannya. Menhir ada yang sudah dihaluskan dan ada pula yang masih kasar.
- b. Dolmen. Dolmen berbentuk seperti meja batu yang berkakikan menhir. Fungsi dolmen sebagai tempat pemujaan dan sesaji roh nenek moyang. Kadangkala ada pula ada dolmen yang ditambahkan kuburan di bawahnya. Bangunan ini ditemukan di Pulau Samosir (Sumatra Utara), Pasemah (Sumatra Selatan), Leles (Jawa Barat), serta Pekauman dan Pakian di Bondowoso (Jawa Timur).
- c. Waruga. Waruga adalah kubur batu yang mempunyai bentuk kubus atau bulat dengan tutup yang berbentuk menyerupai atap rumah. Waruga banyak terdapat di Sulawesi Tengah.

- d. Sarkofagus. Berbentuk seperti palung atau lesung, tetapi mempunyai tutup dan berfungsi sebagai keranda jenzah. Pada sarkofagus sering dipahatkan motif kedok/topeng dalam berbagai ekspresi untuk melindungi roh si mati dari gangguan gaib. Sarkofagus banyak ditemukan di Indonesia terutama di Bondowoso (Jawa Timur), Pulau Samoris, dan Bali.
- e. Kubur batu. Bentuknya hamper sama seperti peti mayat dari batu. Pada keempat sisinya berdingkan papan-papan batu. Demikian pula alas dan bidang atasnya terbuat dari papan batu. Kubur batu ditemukan di Cipari Kecamatan Cigugur, Jawa Barat.
- f. Punden berundak. Bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat dan di atasnya terdapat menhir. Bangunan ini banyak dijumpai di Kosala dan Arca Domas (Banten), Cisolok (Sukabumi), serta Pugungharjo (Lampung). Konon, bangunan atas pura (Tanah Lot Bali) diilhami dari punden berundak. Punden berundak dapat ditemukan di Lebak si Bedug (Banten).
- g. Arca-arca. Arca merupakan patung dengan bentuk sederhana dan kasar, umumnya patung kepala raja. Ada dua macam gaya yang terlihat dari hasil pemahatan arca, yaitu gaya statis dan dinamis. Gaya statis mencirikan hasil pemahatan yang menggambarkan posisi gerakan kaku, sebaliknya gaya dinamis lebih menampilkan bentuk-bentuk pahatan yang plastis (Prasetyo, 2008:53). Beberapa arca sederhana menggambarkan para leluhur binatang (gajah, kerbau, monyet). Arca batu ditemukan di Sumatra Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi. Di Pasemah (Sumatra Selatan) masyarakat di sekitar mengaitkan arca batu dengan legenda Si Pahit Lidah. Arca batu juga ditemukan di Batu Raja dan Pager Dewa (Lampung), Kosala, Lebak Sipedug, dan Cisolok (Jawa Barat), Pekauman Bondowoso (Jawa Timur), serta Bada-Besoha (Sulawesi Tengah). Arca ditemukan di Sumatra, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)

Gambar 10. (a) Menhir di Situs Bori, Sulawesi; (b) Dolem di Situs Pekaumen Bondowoso; (c) Waruga di Sulawesi Tengah; (d) Sarkofagus di Pulau Samosir, Sumatera Utara; (e) Kubur batu yang ditemukan di Jawa Barat; (f) Penden berundak yang ditemukan di Lampung; dan (g) Arca di Taman Lore Lindu.

Tabel 1. Bentuk Megalitik Berdasarkan Wilayah Persebarannya di Indoensia

Wilayah sebaran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Sumatera Utara																						
Sumatera Barat																						
Bengkulu																						
Jambi																						
Sumatera Selatan																						
Lampung																						
Banten																						
Jawa Barat																						
Jawa Tengah																						
DI Yogyakarta																						
Jawa Timur																						
Bali																						
NTB																						
NTT																						
Kalimantan Utara																						
Kalimantan Barat																						
Sulawesi Utara																						
Sulawesi Tengah																						
Sulawesi Selatan																						
Maluku																						
Papua																						

Sumber: Prasetyo, Bagyo (2013:92).

Keterangan:

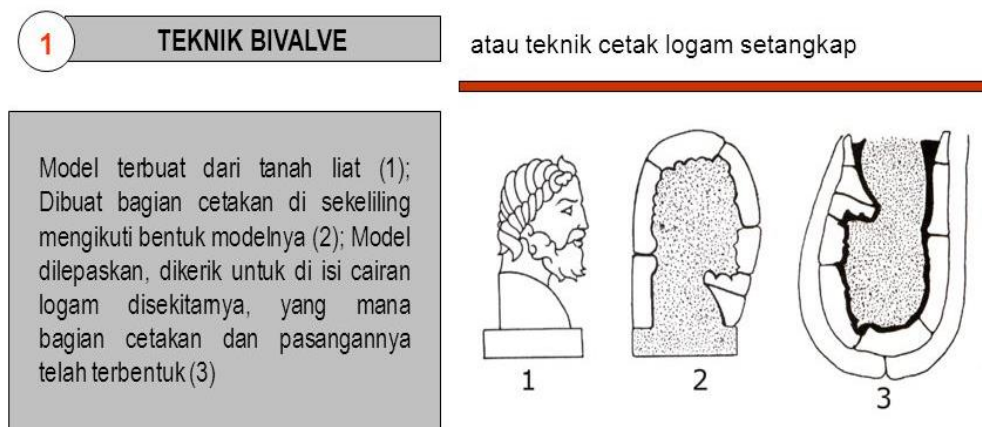
- | | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1. Lumping batu | 8. Punden berundak | 15. Batu temu gelang | 22. Perahu batu |
| 2. Tempayan batu | 9. Monolith | 16. Kursi batu | |
| 3. Batu dakon | 10. Batu berhias | 17. Bilik batu | |
| 4. Arca manusia | 11. Kubus batu | 18. Batu silindris | |
| 5. Dolmen | 12. Sarkofagus | 19. Arca hewan | |
| 6. Menhir | 13. Peti batu | 20. Phallus bat | |
| 7. Altar | 14. Lesung batu | 21. Batu bulat | |

C. Kebudayaan Logam di Indonesia

Walaupun telah menginjak zaman logam, namun sebagian kecil masyarakat tetap meneruskan tradisi kebudayaan batu. Adanya zaman logam yang menggantikan zaman batu sebenarnya hanyalah untuk menyatakan bahwa pada zaman itu logam mulai dikenalkan dan dipergunakan untuk bahan membuat alat-alat keperluan hidupnya. Jadi meskipun terdapat alat-alat logam, namun alat-alat dari batu masih dipergunakan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini penggunaan bahan dari logam jelas berbeda dari batu. Sebab untuk mendapatkan alat yang dikehendaki logam tidak dapat dipikul-

pukul ataupun dipecah, seperti batu, melainkan harus dilebur dan barulah logam di cetak. Ada dua macam teknik atau cara membuat alat-alat dari logam yang berkembang pada saat itu, yaitu teknik *bivalve* (setangkap) dan teknik *a circle perdue* (cetak lilin).

Teknik Bivalve (Setangkap). Pembuatan alat dengan teknik ini menggunakan dua cetakan yang dapat ditangkapan (dirapatkan). Adapun caranya mula-mula cetakan tersebut diberi lubang pada bagian atasnya. Kemudian lubang itu di tuang logam cair (leburan logam). Selanjutnya apabila leburan logam sudah dingin maka cetakan dapat dibuka dan jadilah alat yang dikehendaki. Namun apabila ingin membuat alat yang berongga maka harus ditambahkan tanah liat sebagai intinya, guna membentuk rongga yang dikehendaki. Penggunaan teknik cetakan ini dapat dipergunakan berkali-kali.



Gambar 11. Gambaran teknik *Bivalve*

Teknik A Cire Perdue (Cetakan Lilin). Cara membuat alat dengan teknik ini diawali dengan membuat benda-benda dari lilin yang berisi tanah liat sebagai intinya. Selanjutnya bentuk lilin tersebut dihias dengan berbagai pola hias. Kemudian bentuk lilin yang sudah lengkap dibungkus lagi dengan tanah liat yang agak lunak. Pada bagian atas dan bawah diberi lubang. Dari lubang atas dituangkan cairan/ leburan logam, sedangkan dari lubang bawah akan berfungsi untuk mengalirkan cairan lilin yang meleleh. Apabila leburan logam sudah dingin, cetakan tersebut dapat dipecah guna mengambil benda yang sudah jadi. Dengan demikian teknik cetakan semacam ini hanya dapat dipergunakan sekali saja.



Gambar 12. Teknik *a cire perdue*

Para ahli berpendapat bahwa zaman logam di Indonesia adalah zaman perunggu. Hasil kebudayaan zaman perunggu yang cukup penting diantaranya adalah kapak corong dan nekara. Sedangkan alat-alat budaya lainnya yang ditemukan yaitu perhiasan seperti cincin, gelang, *biggel* (gelang kaki), anting, dan kalung; bejana perunggu berbentuk bulat panjang; arca perunggu berupa arca manusia dan binatang dalam berbagai bentuk; benda-benda besi serta gerabah.

Kapak Corong. Kapak corong adalah kapak perunggu yang bagian atasnya berlubang, berbentuk corong yang digunakan untuk memasukkan tangkai kayu (Herimanto, 2012:66). Melihat bentuknya tersebut, kapak corong sering pula disebut dengan nama kapak sepatu. Kapak corong banyak ditemukan di daerah Sumatra Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, dan Papua. Bentuk kapak corong ada berbagai macam jenis, misalnya ada yang pendek, bulat, maupun panjang. Ada juga kapak corong yang kecil bentuknya dan halus buatannya yang disebut *candrasa*. Karena bentuknya yang kecil dan halus buatannya, kemungkinan

candrasa hanya digunakan untuk tanda kebesaran atau alat upacara saja. *Candrasa* ditemukan di daerah Yogyakarta dan Reti Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan pada kapak corong, menunjukkan bahwa benda tersebut dibuat dengan teknik *a cire perdue*.

Nekara. Hasil kebudayaan perunggu lainnya adalah nekara. Nekara adalah gendering besar yang dibuat dari bahan perunggu, berpinggang dibagian tengahnya dan tertutup dibagian atasnya. Nekara banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Sangean, Sumbawa, Roti, Leti, Selayar, dan Kepulauan Kei. Berdasarkan hasil penelitian, nekara digunakan sebagai peralatan upacara, sebagaimana hiasan-hiasan pada dinding nekara yang menunjukkan hal tersebut. Ukuran nekara ada yang besar, seperti yang ditemukan di Bali, adapula yang berukuran kecil dan ramping seperti yang ditemukan di Pulau Alor. Nekara yang kecil dan ramping tersebut dinamakan *moko* atau *mako*. Menurut penelitian Bintarti (2001), melakukan perbandingan antara nekara tipe pajeng yang ditemukan di Bali dengan nekara tipe Heger I yang banyak ditemukan di Indonesia, menyimpulkan bahwa nekara tipe pajeng adalah nekara produksi lokal. Hal ini diperkuat dengan temuan batu cetakan nekara tipe pajeng di desa Manuaba, Bali.

Nekara dibuat untuk mendukung kehidupan spiritual dan kepercayaan masyarakat, baik dari segi ritual kepercayaan maupun dari tradisi yang telah diwariskan leluhur. Nekara juga memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda setiap wilayah berkembangnya. Berbagai fungsi nekara mencerminkan pola kehidupan masyarakat pada zamannya. Nekara dapat berfungsi sebagai alat musik untuk upacara-upacara khusus, misalnya upacara pemakaman, pernikahan, juga upacara pemanggilan hujan untuk mendukung siklus pertanian (Wijaya, 2013:220).

Hiasan nekara selain sebagai petunjuk adanya kegiatan keagamaan (kepercayaan), juga dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan dan kebudayaan yang berkembang saat itu. Lukisan pada nekara biasanya berupa burung, gajah, dan ornament-ornamen lingkungan alam sekitar. Lukisan pada nekara juga dapat menjadi petunjuk mengenai daerah persebaran kebudayaan perunggu. Berdasarkan gambaran di atas, disimpulkan bahwa kebudayaan perunggu berasal dari Asia. Kemampuan membuat alat-alat dari perunggu diperkirakan berasal dari orang-

orang Vietnam (pendukung kebudayaan *Dongson*), yang menyebar ke Indonesia tahun 500 SM, dan dibawa oleh ras *Deutro Melayu* yang bermigrasi ke Indonesia.



Gambar 13. Nekara dan Moko (atas); dan Kapak Corong dan Candrasa (bawah)

Bejana Perunggu. Salah satu bentuk produk budaya Dongson adalah bejana perunggu yang ditemukan di wilayah Indonesia seperti di Kerinci, Madura, Lampung, Kalimantan dan Subang. Bejana perunggu nusantara memiliki kesamaan dalam bentuknya yaitu mirip *kepisi* atau wadah ikan, sebagian menyebutnya berbentuk seperti gitar arab (*oud-gambus*). Bejana ini dibentuk dari dua potongan sisi cembung yang sama kemudian dipadukan bersama kemudian dipadukan bersama sempurna. Bejana perunggu dibagi atas tiga bagian, yaitu mulut bejana, leher bejana, dan badan bejana. Perbedaannya hanya terdapat pada ukuran dan motif hias yang diteapkan diperkumaannya. Fungsi bejana perunggu untuk kepentingan upacara.

Bejana Perunggu Madura. Sekitar tiga puluh tahun kemudian bejana perunggu Indonesia kedua ditemukan di Asemjuran, Sampang, Madura tepatnya di tahun 1951 (Heekeren, 1958: 35). Bejana ini kemudian disimpan di Museum Nasional. Kondisi bejana perunggu Madura rusak parah di salah satu sisinya. Panjang bejana ini 90 cm yang dihitung dari tangkai bagian dasarnya dan lebarnya adalah 54 cm. Permukaan logam dipenuhi motif hias. Pada bagian mulut bejana atau sekat pertama terdapat motif segitiga dan motif burung merak, pada bagian sekat kedua di leher bejana dihiasi motif huruf kapital J dan motif anyaman, pada sekat ketiga antara leher dan badan bejana dihiasi oleh motif segitiga dan motif rusa. Pada sekat keempat atau badan bejana dihiasi oleh motif persegi, motif spiral, dan motif huruf kapital J (Sunliensyar, 2017:56).



Gambar 14. Bejana perunggu

D. Budaya Pra Aksara yang Masih Ada Hingga Saat Ini

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia. Secara umum definisi kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan

meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Masa pra aksara atau *nirleka* (*nir*: tidak ada, *leka*: tulisan) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa dimana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Zaman pra aksara dapat dikatakan bermula pada saat terbentuknya alam semesta, namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di mana terdapat kehidupan di muka Bumi dimana manusia mulai hidup. Batas antara zaman pra aksara dengan zaman aksara adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa pra aksara adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan aksara atau sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Zaman pra aksara di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, sekitar abad ke-5. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti yang berbentuk Yupa yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.

Kebudayaan pra aksara Indonesia diartikan sebagai sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia pada zaman pra aksara dan bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan pra aksara adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Di Indonesia, masih banyak terdapat peninggalan kebudayaan dari zaman prasejarah yang masih bisa dijumpai bahkan masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sisa-sisa dari kebudayaan pra aksara yang paling mudah dijumpai maupun diamati berupa benda, corak kehidupan sosial-ekonomi, dan sistem kepercayaan. Sisa-sisa kebudayaan pra aksara tersebut pada dasarnya masih ada dan masih memiliki kegunaan bagi masyarakat, bahkan ada yang beberapa di antaranya mengalami perkembangan (fungsi dan bentuk). Sisa-sisa kebudayaan pra aksara tersebut diantaranya sebagai berikut.

- a. Alat-alat dari Batu. Alat-alat batu yang lahir dan berkembang sejak jaman pra aksara sebenarnya masih ada di Indonesia. Akan tetapi alat-alat batu yang ada telah mengalami perkembangan bentuk dan fungsi. Beberapa alat tersebut adalah cobek batu dan lesung batu.
- b. Gerabah. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk dibentuk menjadi suatu obyek dengan menggunakan tangan dan kemudian dibakar. Gerabah diperkirakan telah ada sejak zaman manusia purba. Di situs-situs bersejarah, telah ditemukan banyak gerabah kuno yang berfungsi sebagai perkakas rumah tangga. Dahulu gerabah yang dibuat oleh manusia tidak memiliki corak khusus, kalupun ada hanya bercorak sederhana, akan tetapi sekarang gerabah memiliki bentuk dan corak yang beragam. Selain itu, sekarang ini gerabah tidak hanya digunakan sebagai perkakas rumah tangga, namun ada juga yang berfungsi sekedar hanya sebagai penghias ruangan.
- c. Motif Batik. Batik sebagai warisan budaya dunia memiliki corak dan motif yang beragam, namun ternyata motif yang ada sekarang ini sebenarnya merupakan pengembangan dari motif yang ada sejak jaman pra aksara. Dulu motif tersebut kebanyakan hanya digunakan untuk menghias gerabah dari tanah liat saja, akan tetapi motif sederhana (ulir, bulatan, garis, dll) kini telah berkembang dan menjadi ciri khas dari suatu kain batik.
- d. Sistem Kepercayaan. Animisme dan dinamisme merupakan kepercayaan (agama) yang dianut oleh masyarakat pra aksara. Walaupun Indonesia telah memiliki agama pokok, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang percaya bahwa arwah leluhur dan benda disekitarnya memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka. Sebagai contoh adalah upacara pemakaman. Ada suku tertentu di Indonesia yang percaya bahwa ruh orang yang meninggal masih memiliki pengaruh terhadap kahidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, mereka melakukan upacara pemakaman dengan megah dan diiringi dengan ritual-ritual tertentu. Selain itu, ada juga masyarakat yang memakamkan seseorang di tempat-tempat tertentu (misal: tebing batu) sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal.

Demikianlah beberapa sisa-sisa kebudayaan pra aksara yang masih ada dan berkembang di Indonesia hingga sampai saat ini. Sebagai bangsa yang bijak, suka atau

tidak suka kita harus menjaga kelestarian budaya tersebut, karena pada dasarnya kebudayaan yang ada merupakan warisan nenek moyang yang sangat bernilai.

E. Rangkuman

Hasil kebudayaan manusia pra aksara di Indonesia didasarkan pada penemuan alat-alat yang ditemukan oleh para peneliti. dari hasil temuan tersebut kebudayaan manusia pra aksara di Indonesia terbagi dalam tiga zaman yaitu zaman batu, zaman logam, dan kebudayaan megalitikum. Zaman batu di Indonesia terbagi menjadi zaman batu tua (paleolitikum), zaman batu tengah (mesolitikum), dan zaman batu muda (neolitikum). Hasil kebudayaan paleolitikum di Indonesia terbagi dalam kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Sedangkan hasil kebudayaan mesolitikum berupa kapak genggam Sumatera yang ditemukan di tumpukan sampah kerang (*Kjokkenmoddinger*), kebudayaan tulang Sampung, dan kebudayaan Toala. Pada zaman neolitikum di Indonesia, kebudayaan yang dihasilkan berupa kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, pakaian, dan beberapa tembikar.

Kebudayaan logam di Indonesia hanya mengalami kebudayaan perunggu. Hal ini dikarenakan kebudayaan tembaga dan besi kurang berkembang di Indonesia. Adapun hasil kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia yaitu kapak corong dan nekara yang sering digunakan sebagai alat-alat keagamaan. Kebudayaan perunggu di Indonesia berasal dari 500 SM yang dibawa oleh orang-orang Vietnam yang merupakan pendukung kebudayaan Dongson, melalui migrasi orang-orang ras *Deutro Melayu*.

Hingga saat ini, beberapa hasil kebudayaan masa pra aksara masih ada berkembang di Indonesia. Misalnya saja alat-alat yang terbuat dari batu seperti cobek, dan lesung batu, motif-motif batik, gerabah, dan sistem kepercayaan. Hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan, walaupun alat-alat dan hasil budaya tersebut telah banyak berubah seiring dengan berkembangnya dan penyesuaian terhadap zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Lopian A.B. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah: Prasejarah*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Binartati, D.D. 2001. “Nekara Tipe Pajeng: Kajian Banding terhadap Nekara Tipe Heger I”. *Disertasi*. Yogyakarta: UGM.
- Herimanto. 2012. *Sejarah Indonesia Masa Pra Aksara*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Noor, Yusliani dan Mansyur. 2015. *Menelusuri Jejak-Jejak Masalalu Indonesia*. Banjarmasin: Banjarmasin Press.
- Prasetyo, Bagyo (a). 2008. *Penempatan Benda-Benda Megalitik Kawasan Lembah Iyang-Ijen Kabupaten Bondowso dan Jember, Jawa Timur*. Disertasi memperoleh gelar Doktor Humaniora pada Program Pascasarjana Ilmu Arkeologi UI. Depok: Universitas Indonesia.
- Prasetyo, Bagyo (b). 2013. “Persebaran dan Bentuk-Bentuk Magalitikum Indonesia: Sebuah Pendekatan Kawasan”. Dalam *KALPATARU, Majalah Arkeologi*, Vol. 22, No. 2, November 2013: 61-122.
- Poeponegoro, Marwati Djoened, dan Notosusanto, Nugroho. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia I: Zaman Pra Sejarah di Indonesia, Edisi Pemuktahiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ratnasari, Sri Dwi. 2015. “Jejak Hasil Peninggalan Budaya Manusia Prasejarah di Song Terus Pacitan”. Dalam *Culture* Vol. 2 No. 1 Mei 2015.
- Setiawan, Taufiqurrahman. 2009. “Loyang Mendali Situs Hunian Prasejarah di Pedalaman Aceh: Asumsi Awal Terhadap Hasil Penelitian Gua-Gua di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Dalam *Berkala Arkeologi Sangkhakala* Vol. 12 No.24 (2009).
- Sunliensyar, Hafiful Hadi. 2017. “Menggali Makna Motif Hias Benjan Perunggu Nusantara: Pendekatan Strukturalisme Levi-Strauss”. Dalam *Berkala Arkeologi* Vol. 37 No. 1 Mei 2017: 51-68.
- Wijaya, Hanny. 2013. “Nekara: Peninggalan Seni Budaya dari Zaman Perunggu”. Dalam *Humaniora* Vol. 1 No.1, April 2013: 212-220.

NILAI-NILAI SOSIAL DAN RELIGI DALAM TRADISI MEGALITIK DI SULAWESI SELATAN

Social and Religi Values in Megalithic Tradition in South Sulawesi

Hasanuddin

Balai Arkeologi Sulawesi Selatan - Indonesia
Jl. Pajjaiyyang No. 13 Sudiang, Makassar
udin.balar@gmail.com

Naskah diterima: 16/09/2016; direvisi: 21/11 - 15/12/2016; disetujui: 15/12/2016
Publikasi ejurnal: 30/12/2016

Abstract

South Sulawesi is a region which has a several culture and megalith tradition that spread in various locations. Of those various forms and kinds of that megalith monument, there are important values that can be reinvented for the society. The purpose is to determine the social dan religious value of megalithic culture in South Sulawesi. In order to recognize those values, a research with an ethnoarchaeological approach has been done through direct observations and surveys in the society which still have megalith tradition, and focused to identify its values and functions in society. This research found that this tradition was developed since the 2nd AD until the 10th to 13th AD. During that period, the settlement system was composed of small communities that occupying highland and lowland. That small community was called wanua which spread across South Sulawesi peninsula. At the present time, that megalith tradition is still found in Torajan community, and in several ritual practices among communities in Enrekang and Soppeng regency, South Sulawesi. Generally, that megalith tradition is endorsing several values such like cooperation and spiritual.

Keywords: *tradition, ritual, settlements*

Abstrak

Sulawesi Selatan merupakan suatu daerah yang memiliki beberapa bentuk budaya dan tradisi megalitik (kebudayaan batu besar) yang tersebar di berbagai wilayah. Dari berbagai bentuk dan jenis megalitik itu tentunya memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai sosial dan religi dari kebudayaan megalitik di Sulawesi selatan. Dalam pencapaiannya digunakan pendekatan etnoarkeologi dengan cara melakukan survei di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki peninggalan megalitik. Selanjutnya dilakukan wawancara dan pengamatan langsung di masyarakat yang masih menggunakan kebudayaan megalitik untuk mengetahui fungsi dalam masyarakat. Penelitian selama ini menunjukkan bahwa kebudayaan ini berawal sekitar abad ke-2 Masehi dan terus berlanjut pada abad ke-10 hingga abad ke-13 Masehi. Sistem permukiman pada masa itu merupakan kelompok-kelompok komunitas yang menempati wilayah ketinggian dan dataran rendah. Pada awal terbentuknya populasi disebabkan adanya berbagai daerah otonom kecil yang disebut *wanuwa* yang terdapat di beberapa daerah di seluruh semenanjung Sulawesi Selatan. Budaya ini masih berkesinambungan hingga sekarang pada masyarakat Toraja, atau dalam praktek ritual seperti di Enrekang dan Soppeng, Sulawesi Selatan. Pada umumnya kebudayaan megalitik mengandung nilai-nilai kerjasama dan gotong royong serta religi yang menonjol.

Kata kunci: tradisi, ritual, permukiman

PENDAHULUAN

Kebudayaan materi (*material culture*) yang sering disebut dengan artefak merupakan suatu produk manusia masa lampau yang

mempunyai makna dan nilai, karena pernah “hidup” di tengah masyarakat. Didalamnya tergambar berbagai sistem seperti sistem sosial dan religi yang harus diungkapkan. Dengan

kajian yang mendalam terhadap kebudayaan materi, maka nilai-nilai yang melekat harus diungkapkan. Salah satu nilai yang melekat adalah nilai-nilai sosial yang melatarbelakangi terwujudnya kebudayaan tersebut.

Dalam pengkerangkaan prasejarah Indonesia (Soejono, 1984; Truman *et al*, 2012) telah membagi berbagai bentuk kebudayaan materi kedalam fase-fase kehidupan manusia. Dalam hal tersebut, kebudayaan megalitik dipandang lahir sebagai suatu akumulasi cara berfikir manusia untuk mewujudkan berbagai kepentingannya, seperti religi dan sosial. Sistem sosial dalam kebudayaan atau tradisi megalitik dapat dilihat pada fungsi dan tata cara dalam melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan kebudayaan tersebut. Dalam hal ini sistem yang dimaksudkan adalah kesatuan dari struktur yang mempunyai fungsi berbeda, namun satu sama lain saling memiliki ketergantungan dan bekerja ke arah tujuan yang sama. Masyarakat yang memiliki suatu sistem yang kompleks apabila bagian-bagian didalam masyarakat saling berkaitan dan bekerja bersama-sama guna menjaga stabilitas.

Kebudayaan materi itu merupakan produk dari kegiatan sosial. Kajian kebudayaan materi sebagai hasil produk manusia masa lampau, berarti secara langsung menghidupkan kembali aspek sosial dari manusia yang meninggalkan kebudayaan materi tersebut. Aspek sosial menyangkut interaksi antarmanusia mengenai pemberdayaan dan kekuasaan, serta watak dari besaran organisasi manusia. Aspek tersebut sangat sulit diamati secara arkeologis, sehingga dibutuhkan kajian kebudayaan yang masih hidup dan memiliki hubungan bentuk dan fungsional. Oleh karena arkeologi bertumpu pada benda materi, maka ungkapan informasi yang harus diperoleh berkisar pada bentuk dan aspek teknologi, ekonomi, kehidupan sosial, dan hubungan dengan variabel lingkungan. Analisis yang menyeluruh mengenai unsur-unsur yang dimiliki suatu artefak merupakan upaya untuk mengetahui berbagai aspek dibalik keberadaannya, seperti proses penciptaannya, budaya yang menciptakan dan bagaimana benda itu tercipta. Hasil kajian terhadap artefak seperti itu kemudian dilakukan suatu rekonstruksi tentang bagaimana benda itu beroperasi dalam sistem budaya yang terorganisir (periksa Rouse, 1972: 95).

Kebudayaan dan tradisi megalitik tersebar secara merata di Sulawesi Selatan. Berbagai jenis dan bentuk peninggalannya mencerminkan perkembangan inovasi dan rekayasa teknologi. Pada masa protosejarah atau masa berkembangnya tradisi megalitik, wilayah Sulawesi Selatan juga memiliki sejumlah situs yang merupakan mata rantai dari budaya sebelumnya. Bahkan budaya ini masih berkesinambungan hingga sekarang pada masyarakat Toraja. Kebudayaan megalitik oleh kalangan ahli diposisikan sebagai hasil budaya yang diperkenalkan oleh kelompok migran penutur bahasa Austronesia yang masuk pertama kali ke Sulawesi Selatan pada kisaran waktu 4000 BP (Simanjuntak, 2008). Hasil pertanggalan radiokarbon tentang kebudayaan megalitik yang telah dilakukan oleh beberapa ahli selama ini menunjukkan umur yang paling tua diperoleh di Lembah Besoa (Sulawesi Tengah) yaitu $2,460 \pm 120$ BP (cal. 831 SM – 232 SM) (Yuniawati, 2010: 189) sedangkan di situs megalitik Tatelu (Sulawesi Tengah) terdapat tempat penguburan dengan pertanggalan 850 ± 80 BP dan $2,070 \pm 140$ BP (Yuniawati, 2006). Demikian pula penelitian tentang potensi budaya megalitik di Lembah Rampi, Sulawesi Selatan oleh Yuniawati (2014) telah menemukan permukiman megalitik dengan masa okupasi sekitar abad ke-2 – 3 Masehi. dengan jenis peninggalan seperti arca menhir, lumpang dan dolmen. Salah satu kajian unsur kebudayaan megalitik dalam bentuk keranda mayat (Toraja: *erong*) telah dilakukan oleh Akin Duli (2012) dengan pentarikhkan menunjukkan masa perkembangan yang bermula di Toraja yaitu 1130 ± 50 BP (800 M), Enrekang antara 790 ± 50 BP (1200 M) hingga 570 ± 40 BP (1500 M), dan di Mamasa Sulawesi Barat antara 730 ± 50 BP (Duli, 2012).

Apa yang telah diutarakan sebelumnya memberi gambaran mengenai berbagai sistem yang pernah berlangsung, seperti sistem sosial termasuk kekuasaan (kepemimpinan) dan religi. Pertanyaannya adalah (a) bagaimana nilai-nilai sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk monumen megalitik di Sulawesi Selatan? dan (b) bagaimana sistem religi yang dianut masyarakat bercorak megalitik di Sulawesi Selatan? Sehubungan dengan itu, tulisan ini bertujuan mengkaji kontribusi nilai-nilai kebudayaan pada pemahaman edukasi kultural kepada masyarakat. Selain itu juga untuk

mengetahui nilai sosial dan religi dari kebudayaan megalitik di Sulawesi selatan.

METODE

Untuk mencapai pemahaman yang maksimal dalam mengkaji tradisi megalitik berkaitan dengan sistem sosial maupun religi, digunakan alur pemikiran induktif dengan mengamati bentuk maupun jenis kebudayaan materi di wilayah Soppeng, Bulukumba, dan Tana Toraja. Tahap pengolahan data dan analisis dilakukan terhadap seluruh potensi data arkeologis yang ditemukan. Selanjutnya dilakukan pengkajian dengan pendekatan etnoarkeologi untuk menjelaskan fungsi dari masing-masing bentuk yang sesuai pokok kajian ini. Hasil kajian ini selanjutnya lebih menekankan nilai-nilai yang dikandung dari bentuk maupun jenisnya secara kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Sosial dalam Struktur Batu Temu Gelang

Berbagai bentuk dan jenis megalitik di Sulawesi Selatan merupakan bentuk inovasi yang menarik untuk diperhatikan dalam bidang sosial. Sistem tersebut dapat ditemukan pola yang ditunjukkan oleh penataan megalitik Sulawesi Selatan. Pola penempatan susunan batu melingkar yang disebut temu gelang (*stone enclosure*) seperti terlihat di Bantaeng, Bulukumba, Selayar dan Soppeng mengingatkan pada konsep kepercayaan masyarakat dalam menandai titik pusat dari segalanya. Dengan demikian, tidak mengherankan jika temu gelang senantiasa dihubungkan dengan pusat kampung setiap daerah (Bahasa Makassar: *pocci butta*). *Pocci Butta* (Bugis: *Possi Tana*) adalah titik pusat kekuatan sekaligus titik kelemahan suatu daerah atau *wanuwa*.

Pembagian ruang-ruang dalam permukiman masyarakat menjadi formula yang berisi tentang suatu pengharapan kepada terbinanya kehidupan yang aman dan sejahtera. Manusia selalu mencari dunia eksistensinya melalui “dunia simbol” melalui suatu perlambangan bentuk sebagai replika dari wujud sesuatu. Namun demikian, terkadang manusia tidak mampu menunjukkan eksistensinya secara abadi, sehingga hal itu dibangunnya melalui dunia ritus (periksa Pelras, 2006: 51).

Situs megalitik yang memiliki batu temu gelang yang dijadikan simbol *Pocci Butta* atau *Possi Tana* (pusat bumi atau pusat kampung) ditemukan pada tiga wilayah di Sulawesi Selatan merupakan susunan batu melingkar yang di tengahnya diletakkan satu altar batu. Kehadirannya merupakan implementasi sistem religi yang senantiasa sangat disakralkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat meyakini sebagai pusat kekuatan magis di daerah tersebut. Lokasi tersebut digunakan untuk upacara-upacara ritual yang berkaitan dengan pertanian, yaitu memohon kepada leluhur agar hasil panen untuk satu musim tanam berjalan menghasilkan padi yang lebih bagus. Di tempat ini pula sering dilakukan upacara dengan memotong ayam, kambing, kerbau/sapi.



Gambar 1. Batu temu gelang (*stone enclosure*) yang oleh masyarakat disebut *pocci butta* (pusat bumi) berbentuk melingkar disusun dari batuan andesit ditemukan di Bantaeng (Sumber: Hasanuddin, 2015)



Gambar 2. Batu temu gelang (*stone enclosure*) yang disebut *Possi Butta* (pusat bumi) di Kajang, Bulukumba yang kini digunakan sebagai tempat pelantikan ketua adat (Sumber: Hasanuddin, 2015)

Nilai Sosial dalam Bentuk Relasi Kuasa

Berbagai bentuk megalitik seperti temu gelang, menhir dan batu alam yang dijadikan

sebagai sarana pemujaan masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Bugis Makassar dan sebagian besar masyarakat Toraja hingga kini. Upacara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Bugis Makassar erat kaitannya dengan upacara syukuran atas keberhasilannya dalam usaha pertanian. Menurut David Bulbeck, orang-orang Bugis Makassar memiliki ciri-ciri ekspresi fenotip (*phenotypically*) yang disebarkan oleh populasi manusia di Asia Tenggara kepulauan. Pada dasarnya ciri-ciri antropomorfik yang ditunjukkan memiliki ciri populasi manusia di Kepulauan Indonesia – Malaysia. Glinka (1981:105 yang dikutip oleh Bulbeck) menyebutkan bahwa orang-orang Bugis Makassar memiliki ciri fisik yang sama dengan populasi penduduk pribumi Taiwan, Philipina, Malaysia bagian Barat, dan pesisir Borneo (Bulbeck, 2004: 224).

Salah satu penyebab terjadinya penyebaran populasi penduduk adalah perubahan konstelasi politik. Pada awal terbentuknya populasi disebabkan adanya berbagai daerah otonom kecil yang disebut *wanuwa* yang terdapat di beberapa daerah di seluruh semenanjung Sulawesi Selatan. Memang pada awalnya *wanuwa-wanuwa* hanya dipimpin oleh para *matoa* (para tetua) namun dengan hadirnya *Tomanurung*, peran para *matoa* kemudian digantikan oleh raja yang berarti pula membawahi beberapa *matoa*. Dalam menjalankan pemerintahannya, seorang raja atau pemimpin memiliki kewenangan dan sistem pemerintahan yang diterapkan bersifat mutlak. Tidak disebutkan adanya sistem perwakilan rakyat, namun fungsi itu dijalankan oleh para *Matoa* karena para *Matoa* merupakan perwakilan dari seluruh rakyat. (Pelras, 2006: 125-126).

Berdasarkan sumber lontara, disebutkan bahwa beberapa daerah seperti Tinco dan Sewo (Soppeng), dan Onto dan Gantarang Keke (Bantaeng) merupakan pusat pemerintahan kerajaan masa pra-Islam. Keterangan tersebut memastikan bahwa dahulu sebuah permukiman yang telah memiliki pemimpin, pemerintahan, rakyat, dan wilayah kekuasaan. Apa yang dikemukakan dalam isi lontara tersebut, juga dibuktikan dengan budaya materi berupa temuan-temuan budaya materi (peninggalan arkeologi). Di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, terdapat bongkahan batu besar yang sering dihubungkan dengan simbol atau mitos

kedatangan orang pertama (*tomanurung*) sebagai “calon raja” dan sekaligus awal terbentuknya kerajaan di daerah tersebut seperti di Bantaeng, Soppeng, Sidenreng Rappang, Sinjai dan Bulukumba). Pelantikan raja-raja Bugis dan Makassar pada umumnya dilakukan di atas batu besar, sehingga para raja sering diberi gelar “Sang Pemijak Batu” atau *pattuppu batu* (Pelras, 2006: 32).

Bentuk peninggalan budaya megalitik yang besar dan bervariasi serta jumlah yang banyak, menunjukkan suatu corak masyarakat yang sudah teratur dengan sifat gotong royong yang tinggi. Hal demikian terlihat dari bentuk-bentuk megalitik yang didirikan, mempunyai ukuran besar yang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan orang dalam jumlah yang banyak hingga ratusan orang. Dengan demikian, sistem gotong royong yang terkait dengan kebudayaan megalitik di Sulawesi Selatan diperoleh dari studi etnografi terutama pendirian tugu batu (dalam arkeologi disebut menhir dan dalam bahasa Toraja disebut *simbuang*).

Pendirian *simbuang* di Toraja merupakan legitimasi sosial dan sekaligus memiliki pesan moral. *Simbuang* sebagai simbol status dan kehadirannya disebabkan oleh sifat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Pelaksanaannya digerakkan oleh relasi kuasa, dimana seorang pemimpin atau orang yang memiliki kemampuan ekonomi dapat melaksanakan hal itu karena melibatkan orang dalam jumlah yang banyak. Keberadaan *simbuang* (menhir) di Toraja erat kaitannya dengan upacara kematian. Kegiatan yang lebih awal dilakukan dalam rangkaian upacara kematian yaitu pengadaan batu-batu menhir untuk ditancapkan di tempat upacara (*rante*). Teknik sederhana untuk pengangkutan *simbuang*, yaitu menggunakan beberapa batang pohon enau sebagai landasan dan diletakkan secara bergantian. Selanjutnya ditarik dengan menggunakan akar kayu oleh puluhan hingga ratusan orang dan dikoordinir oleh ketua adat. Apabila melalui daerah ketinggian, maka pohon kayu yang dijadikan landasan dipasang dengan posisi melintang. Namun jika melewati daerah lembah maka landasannya dipasang membujur. Sebelum bahan menhir diangkut terlebih dahulu dilakukan upacara dengan mengurbankan satu ekor babi (Hasanuddin, 2003: 56).

Di bawah *simbuang* yang didirikan di setiap *rante* (lokasi upacara kematian) di Toraja diletakkan pula manik-manik kuning dan sepotong besi dengan harapan agar para keturunannya tetap mengenang leluhurnya. Warna keemasan dari manik-manik menyimbolkan kebangsawanan dan besi adalah kekuatan dari orang yang meninggal. Demikian pula halnya dengan sesajian babi pada saat batu ditarik, mencerminkan kepercayaan bahwa fungsi dan tujuan seorang bangsawan dapat terpenuhi yaitu untuk keselamatan dan pengukuhan status sosial (Buijs, 2009: 136-137). Demikian pula halnya dengan pembuatan *liang pa'* (lubang yang dipahat di batu untuk tempat penguburan di Toraja) menunjukkan adanya kekuasaan dalam pelaksanaannya. Kemampuan ekonomi dan pengaruh dalam masyarakat karena harus memberi upah kepada pekerja. Sebelum memulai memahat, terlebih dahulu diupacarakan dengan kurban hewan babi 10 ekor dan terkadang juga dengan ayam.



Gambar 3. Dua bentuk *simbuang* (menhir) yang terdapat di Toraja bagian Utara (Sumber: Hasanuddin, 2015)

Perbedaan ukuran *simbuang* di Toraja, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, faktor kemampuan ekonomi, untuk membuat *simbuang* dengan ukuran besar sangat dibutuhkan banyak pengorbanan secara ekonomi; kedua, faktor pengaruh dalam masyarakat, semakin kuat pengaruhnya maka semakin banyak orang yang menyumbangkan tenaga dan materi untuk mendirikan *simbuang* yang lebih besar; ketiga, faktor waktu, pendirian *simbuang* tidak boleh dilepaskan penggunaan waktu dan orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan itu harus dijamin makan dan keluarganya.

Penjelasan mengenai upacara tarik batu (*stone-dragging*) di Toraja seperti telah

diuraikan di atas, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara terorganisir yang membutuhkan biaya dan tenaga cukup banyak. Pendirian *simbuang* di Toraja merupakan simbol status sosial dan legitimasi kekuasaan bagi anak dan cucu yang ditinggalkannya, sebagai media untuk mempererat tali persaudaraan, media komunikasi antara pemimpin dengan rakyatnya, dan sebagai simbol kerjasama dalam bentuk gotong-royong (Duli, 2012: 415-418).



Gambar 4. Upacara penarikan batu (menhir) di Toraja (Sulawesi Selatan) dan di Sumba Barat (Sumber: Handini, 2008:445)

Pemindahan bahan dengan menggunakan landasan kayu seperti tersebut di atas juga merupakan teknik yang digunakan di daerah lain Indonesia seperti Nias (Hasanuddin, 2000) dan Sumba Barat (Handini, 2008). Di Sumba Barat, sebuah kubur batu dengan berat 12 ton ditarik oleh seribu orang dalam waktu tujuh jam, dengan jarak tempuh $\pm 2,2$ kilometer. Di Nias, Pelaksanaan pemindahan batu menhir dilaksanakan dalam rangkaian upacara kematian kepala suku. Batu ditarik dengan melibatkan 525 orang untuk mengangkut batu besar yang beratnya berkisar 8 – 10 ton dari tempat pengambilannya ke desa tujuan dan berlangsung selama tiga hari hingga seminggu.

Di luar Indonesia teknik sederhana seperti itu juga pernah dipraktekkan di Bougon, Prancis Barat tahun 1979. Dalam prakteknya digunakan tiga potongan kayu besar, masing-masing digerakkan oleh tenaga sebanyak 20 orang dan mampu memindahkan batu seberat 32 ton (Renfrew dan Bahn, 1991: 275).

Pendirian monumen megalit seperti di atas juga dipraktekkan oleh masyarakat di Dataran Tinggi Kelabit, Sarawak Malaysia. Dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga kerja manusia yang terorganisir dan saling bekerjasama. Megalit didirikan oleh orang-orang, baik dari dalam kampung itu sendiri atau dari kampung terdekat di sekitar Kelabit. Dalam acara tersebut turut dilaksanakan *Irau* (pesta) dan peserta dari *irau* diharapkan dapat membantu pendirian megalit tersebut. Masyarakat yang bermukim di Kelabit pada zaman dahulu menganut sistem kelas secara hierarki (Rousseau, 1990), dan hanya bangsawan terkaya yang mampu melakukan *irau* karena mampu membayar tenaga orang yang membantu pendirian batu megalit. Bangsawan Kelabit memamerkan kekayaan mereka sepanjang *irau* (pesta) tersebut, di mana mereka melakukan *irau* untuk mempertahankan status sosialnya (Harrisson, 1958: 697). Puncak dari upacara *irau* adalah pesta makan besar – kemungkinan dalam jumlah 500 orang yang berlangsung selama 4-5 hari. Semua peserta dalam *irau* berbaris dalam satu baris serta memindahkan batu-batu dari seorang ke yang lain dari sungai ke lokasi pendiriannya (Hitchner, 2009: 14-15)

Sistem Religi

Secara umum kebudayaan megalitik di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kawasan ini mempunyai berbagai bentuk dan jenis yang digunakan untuk pemujaan, lambang kekuasaan, dan pertanian yang berkembang. Di Asia Tenggara, situs-situs megalitik berfungsi sebagai simbol kekuasaan, simbol para pemimpin, serta untuk penguburan. Pada masa perkembangan megalit di Asia Tenggara, praktek ritual masih dilakukan dan juga berkaitan dengan aktivitas pertanian seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina (Hasanuddin, 2015).

Dalam konteks Asia Tenggara yang terdiri daripada daratan dan kepulauan, kebudayaan megalitik merupakan tinggalan

arkeologi yang paling menonjol pada awal Masehi dan menembus waktu hingga zaman sejarah. Pada masa itu, manusia sudah mencapai kemajuan yang signifikan tentang penguasaan teknologi, struktur sosial, dan upacara religi. Penggunaan teknologi dalam menciptakan kebudayaan megalitik memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek kehidupan masa lampau, termasuk *mental template* (konsep yang ada dalam pikiran si pembuat benda) dan pengetahuan dasar tentang batuan yang dapat dijadikan bahan untuk tujuan religi dan sosial. Manusia telah menciptakan bentuk budaya yang digunakan untuk tujuan tersebut dengan menerapkan unsur-unsur yang indah seperti meletakkan hiasan pada monumen. Demikian juga dengan upacara-upacara yang berkaitan dengan pendirian megalit yang senantiasa membutuhkan kerjasama dan gotong royong dengan jumlah orang yang banyak. Dalam pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan pendirian megalit terdapat kesamaan dengan upacara *Aluk Todolo* di Toraja dan upacara *owasa* di Nias (Indonesia), upacara *irau* di Sarawak (Malaysia) dan di Lawa (Thailand). Demikian pula dengan praktek penanaman padi sawah merupakan sebagian dari kompleks megalitik, sama dengan yang terdapat di daerah Sumatera dan Sulawesi, di mana kebudayaan megalitik berpusat di dataran tinggi seperti di Indonesia (Pasemah, Toba, Kerinci, Poso, Kalimantan, dan di Sulawesi Selatan), Malaysia (Sabah – Sarawak), dan Laos di Provinsi Tak (Hasanuddin, 2015).

Pendirian *simbuang* (menhir) di Toraja jika dihubungkan dengan antropologi budaya, mencerminkan kehidupan yang bersifat *potlatch*, yaitu suatu kebiasaan yang memberi sebanyak mungkin. Kenyataan menunjukkan bahwa memberi lebih utama daripada menerima yang juga diartikan bahwa pihak pemberi lebih tinggi kedudukannya daripada penerima (Mauss, 1992: 3 – 6). Sebuah gambaran akan hal yang hampir sama yaitu tentang orang-orang Tlingit dan Haida yang tinggal di pulau-pulau dan pegunungan di Amerika Barat Laut yang biasanya mengadakan pesta makan secara besar-besaran. Kelompok suku bangsa yang berdiam di daerah tersebut menempatkan dirinya masing-masing secara hirarki. Kegiatan itu terwujud dalam pelaksanaan upacara pernikahan, inisiasi, upacara kultus dewa,

totem, dan nenek moyang (Mauss, 1992: 5). Demikian juga dengan masyarakat Toraja yang melaksanakan upacara kematian secara besar-besaran bermuara pada pengukuhan status dan legitimasi sosial. Menurut kepercayaan masyarakat yaitu membiayai pesta secara besar-besaran turut meningkatkan martabat dan menjamin keselamatan lelehur yang diupacarakan. Meskipun dalam upacara kematian tampaknya mengandung sifat glamor (karena ada pengurbanan hewan dalam jumlah yang banyak), namun pengurbanan itu lebih dipandang sebagai persembahan dalam suasana upacara keagamaan dan bukan dalam nuansa pesta (Hasanuddin, 2003). Pemberian persembahan menyiratkan arti yang sangat mendasar, yaitu sebagai lambang untuk mengukuhkan hubungan antara si pemberi dan si penerima (Koentjaraningrat, 1985: 42). Persembahan itu harus dihayati sebagai kontribusi sosial dalam rumpun keluarga dan adat.

KESIMPULAN

Sulawesi Selatan merupakan suatu daerah yang memiliki beberapa bentuk budaya megalitik dan tersebar di berbagai wilayah. Baik bentuk maupun korelasinya dengan sumber daya alam serta berbagai nilai-nilai lelehur adalah data yang sangat mendasar untuk mengetahui berbagai bentuk aktivitas manusia masa lampau. Kebudayaan megalitik dengan berbagai corak dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan gambaran betapa kayanya peninggalan arkeologis di Sulawesi Selatan yang dapat dijadikan dasar dari bentuk-bentuk awal peradaban manusia sekitar awal Masehi. Kehadiran kebudayaan megalitik memberi corak kehidupan tersendiri yang menengahkan nilai atau falsafah masyarakat masa lampau yang diaktualisasikan melalui penataan budaya megalitik, yang terdiri atas pemikiran penentuan pusat wilayah suatu daerah, adanya relasi kuasa dalam pendirian monumen megalitik, dan corak masyarakat agraris.

Situs-situs megalitik Sulawesi Selatan pernah menjadi tempat permukiman suatu komunitas yang memiliki kemampuan mengadaptasi lingkungannya. Komunitas ini pada awalnya mendiami puncak dan lereng bukit, demi menjaga keamanan dari ancaman bahaya binatang buas atau bahaya banjir.

Kemudian dengan semakin kurangnya ancaman bahaya dan semakin berkembangnya jumlah anggota komunitas, disamping tersedianya lahan yang lebih datar baik untuk cocok tanam maupun untuk tempat tinggal, di undak-undak (teras-teras) bekas endapan sungai, maka permukiman menyebar ke bagian kaki bukit dan akhirnya sampai ke undak-undak sungai dan dataran yang memiliki kemudahan aksesibilitas. Komunitas itu mulanya memiliki pengetahuan teknologi sangat minim dan sederhana, lalu berkembang menjadi komunitas yang berpengetahuan teknologi yang lebih maju untuk ukuran saat itu, baik dalam bercocok tanam ataupun mata pencaharian lain, maupun dalam membuat perlengkapan kehidupan mereka.

Kebudayaan megalitik yang menghasilkan berbagai bentuk budaya materi yang pada umumnya terbuat dari batu, memberi pengetahuan yang tinggi kepada kita mengenai berbagai bentuk aktivitas masa lalu. Sejumlah budaya materi yang tercipta menyiratkan aktivitas yang senantiasa mengutamakan sumber daya alam yang tersedia. Temuan-temuan megalitik Sulawesi Selatan menunjukkan gambaran adanya kemajuan teknologi dalam mengeksploitasi sumberdaya alam yang cukup banyak tersedia di sekitar mereka. Konsep pemikiran manusia dilandasi oleh pencapaian tujuan (baik religi maupun sosial) yang mereka ciptakan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Keberadaan sejumlah hasil budaya megalitik tercipta oleh adanya kehidupan yang terorganisir, dimana ada pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Mereka digerakkan oleh faktor kekuasaan (legitimasi sosial dan ekonomi) yang menciptakan hasil budaya dalam menunjang kebutuhannya. Ketika itu juga terbentuk sebuah komunitas yang kompleks dan berkembangnya sistem sosial yang kompleks.

Dalam masyarakat yang kompleks, simbol kelas-kelas sosial menjadi hal yang sangat penting dalam kebudayaan mereka seperti monumen-monumen megalitik. Penduduk tersebut membentuk suatu komunitas adat dan mendirikan kampung-kampung yang dipimpin oleh para ketua adat. Kumpulan-kumpulan adat tersebut semakin lama semakin berkembang ke arah yang lebih kompleks dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Perkembangan komunitas tersebut pada

kemudian hari, yaitu abad ke-13-14 membentuk persekutuan dan menjadi kerajaan pertama yang muncul di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buijs, Kees. (2009). *Kuasa Berkat Dari Belantara dan Langit, Struktur dan Transformasi Agama Orang Toraja di Mamasa Sulawesi Barat*. Makassar: Ininnawa.
- Bulbeck, D. (2004a). Indigenous Traditions and Exogenous Influences in the Early History of Peninsular Malaysia, Dalam *Southeast Asia from Prehistory to History*, edited by Bellwood, P. and Glover, I. (eds.) London: Routledge Curzon.
- Duli, Akin. (2012). *Budaya Keranda Erong di Tana Toraja, Sulawesi, Indonesia*. Tesis PhD. (tidak diterbitkan). Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
- Handini, Retno. (2008). Upacara Tarik Batu di Tana Toraja dan Sumba Barat: Refleksi Status Sosial dalam Tradisi Megalitik. Dalam Kumpulan Makalah *Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI* di Solo, 437-445. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Harrison, Tom. (1958). A Living Megalithic in Upland Borneo, *The Sarawak Museum Journal* Vol.VIII No. 12 (New Series), No. 27 (Old Series), 694-702.
- Hasanuddin. (2000). *Peninggalan Megalitik di Situs-situs Nias Selatan: Kajian Bentuk dan Fungsi*. Tesis. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hasanuddin. (2003). Pola Permukiman Masyarakat Toraja. Dalam buku *Toraja Dulu dan Kini* (Editor: Akin Duli dan Hasanuddin). Makassar: Refleksi Pustaka.
- Hasanuddin. (2015). *Kebudayaan Megalitik di Sulawesi Selatan dan Hubungannya dengan Asia Tenggara*. Thesis Ph.D. Pulau Penang: Universiti Sains Malaysia.
- Hitchner, Sarah. (2009). The Living Kelabit Landscape: Cultural Sites and Landscape Modifications in The Kelabit Highlands of Sarawak, Malaysia, *The Sarawak Museum Journal* 46(87): 1-76.
- Koentjaraningrat. (1985). *Ritus Peralihan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mauss, Marcel. (1992). The Gift, Form and Functions of Exchange in Archaic Societies. Terjemahan oleh Parsudi Suparlan: *Pemberian, Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pelras, Christian. (2006). Manusia Bugis. Terjemahan buku *The Bugis* oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi, Nurhady Sirimorok. Jakarta: Nalar.
- Renfrew, Colin and Bahn, Paul. (1991). *Archaeology: Theories, Method, and Practise*. London: Thames and Hudson.
- Rouse, Irvin. (1972). *Settlement Patterns in Archaeology. Man, Settlement and Urbanism*. Dalam P. J. Ucko, Ruth Tringham and G. W. Dimbleby (Eds.). 95–107. England: Duckworth.
- Rousseau, J. (1990). *Central Borneo: Ethnic Identity and Social Life in A Stratified Society*. Oxford: Clarendon Press.
- Simanjuntak, Harry Truman (Ed.). (2008). *Austronesian in Sulawesi*. Jakarta: Center for Prehistoric and Austronesian Studies (CPAS).
- Soejono, R.P. (ed.). (1984). *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yuniawati, Dwi Yani. (2006). *Kubur Batu Waruga di Sub Etnis Tou'mbulu, Sulawesi Utara*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional: 24.
- Yuniawati, Dwi Yani. (2010). Temuan Tradisi Budaya Austronesia Akhir Protosejarah (Megalitik) di Lembah Besoa, Sulawesi Tengah. *Bulletin Neditira Widya* 4(2), 175-191.
- Yuniawati, Dwi Yani. (2014). “Laporan Penelitian Arkeologi, Potensi Peradaban Megalitik di Lembah Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan” (belum terbit).

TEORI MASUKNYA AGAMA HINDU-BUDHA KE INDONESIA

Ufi Saraswati

A. Hubungan Awal Masyarakat Nusantara dengan Bangsa Asing

Masyarakat Nusantara terkenal sebagai bangsa yang kuat dan pemberani. Mereka mampu berlayar hingga mencapai berbagai kawasan di dunia. Kegiatan pelayaran bukan hanya berlangsung untuk kegiatan mencari ikan, hasil alam, atau penjelajahan semata. Mereka juga melakukan hubungan perdagangan dengan masyarakat asing. Hubungan ini pelayaran dan perdagangan kuno ini sudah berkembang sejak jaman praaksara.

Didasari oleh prinsip kebutuhan dan ketersediaan barang hubungan perdagangan berkembang dengan baik. Hal ini diperkuat dengan keuntungan letak Nusantara yang sangat strategis. Kepulauan Nusantara terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Persilangan ini merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Memang pada tahun-tahun sebelum masehi jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat (jalur sutera). Kemudian pada awal abad Masehi, jalur perdagangan beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati selat Malaka. Untuk itu kepulauan Nusantara menjadi bertambah ramai. Selain itu nyatanya Nusantara memiliki hasil alam yang melimpah.

Hubungan pelayaran dan perdagangan awal masyarakat Nusantara dengan bangsa luar dapat dibuktikan dari berbagai sumber sejarah dan diruntut dari beberapa anggapan sejarawan yang antara lain:

1. Telah ditemukan adanya nekara perunggu tipe lokal dan buatan luar, seperti tipe nekara perunggu di Sangeang yang merupakan nekara yang mirip dengan tipe buatan luar. Heine Geldern meneliti nekara yang ditemukan dan menyatakan bahwa nekara yang ditemukan di daerah Sangeang diperkirakan dicetak di daerah Funan yang telah terpengaruh oleh budaya India pada 250 SM. Pengamatan menarik dari Berner Kempres menunjukkan bahwa semua nekara yang ditemukan di Bali

memiliki 4 patung katak pada bagian pukulnya. Hal ini menunjukkan bukti adanya pertukaran barang (dalam hal ini nekara) antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat luar.

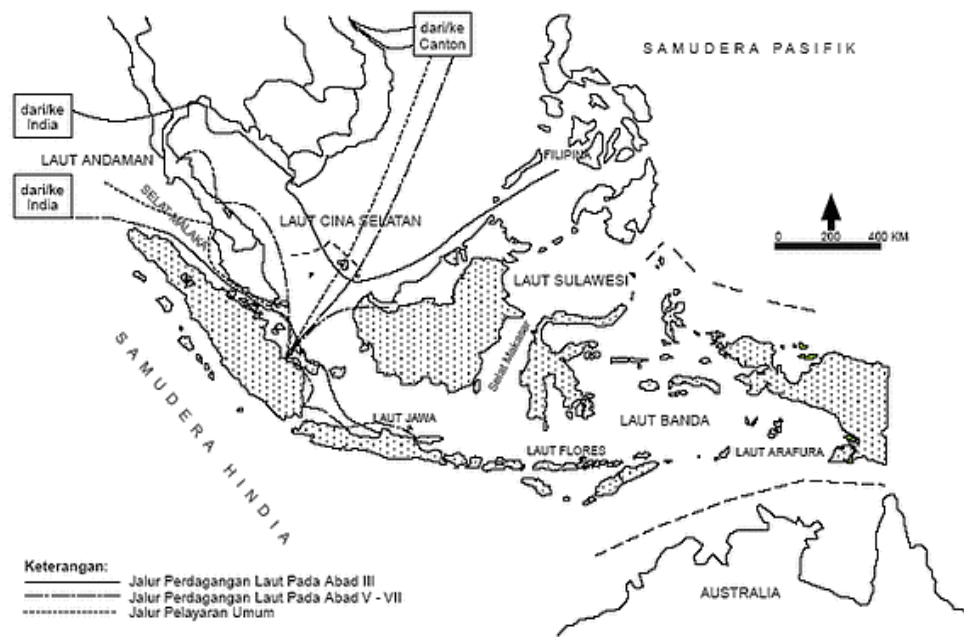


Gambar 1. Nekara tipe Heager yang ditemukan di Bali

2. Hubungan dagang antara Nusantara dan India lebih dulu berkembang dari pada hubungan Nusantara dan Cina. Hal ini seperti disampaikan oleh dua orang sejarawan yaitu J.C. van Leur & O.W. Woalters yang melihat adanya sifat tertutup bangsa Cina terhadap bangsa dan pengaruh asing.
3. Mulai berkembang sistem pelayaran yang lebih maju setelah Hippalos menemukan pelayaran berdasarkan arah mata angin. Hal ini sangat membantu pelayar dan pedagang yang sebelumnya hanya berpatokan pada arus dan perbintangan saja tanpa pengetahuan peta yang jelas.
4. Salah satu bentuk kebudayaan Nusantara yang juga terabadikan dalam relief Candi Borobudur yaitu perahu bercadik diketahui telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Persebaran itu juga diikuti dengan pesebaran bahasa. Sejarawan H. Kern menyebutkan beberapa daerah yang menjadi wilayah persebaran keduanya yaitu Polonesia, Hawaii, Madagaskar, Benggala, dan India Selatan (Soekmono, 1993: 15).

Selain keempat pendapat tersebut, berbagai sumber berita tertulis asing diketahui memuat informasi yang diperkirakan sebagai wilayah Nusantara. Berita tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Periplous, kitab ini merupakan sebuah pedoman berlayar di lautan *Erythrasa* (Samudera India) ditulis oleh seorang nahkoda Yunani-Mesir pada awal tahun Masehi. Kitab ini berisi informasi mengenai kapal-kapal Colandia yang bertolak ke *Chryse*/negara emas. Penyebutan *Chryse*/negara emas diperkirakan sebagai wilayah Sumatera (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010: 10).
2. Kitab Jataka, kitab ini merupakan sebuah manuskrip India yang ditulis pada awal tahun Masehi. Kitab Jataka menyebutkan sebuah daerah yang diberi nama *Suvarnabhumi* atau dapat pula diartikan sebagai negara emas. Para ahli sependapat bahwa yang dimaksudkan dalam kitab ini adalah Pulau Sumatera (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010: 9). Selain Kitab Jataka, Kitab Ramayana juga menjadi salah satu kitab yang memberikan gambaran jelas tentang pulau Jawa dan Sumatera (Coedes, 2015: 44)
3. Kitab Ramayana, kitab epos yang terkenal ini pada manuskrip aslinya yang ditulis di India menyebutkan sebuah tempat yang menarik. Hanoman yang ditugaskan Sang Rama mencari Shinta, diceritakan tiba di sebuah tempat yang disebut dengan *Yawadwipa* yang diartikan sebagai pulau emas/perak karena Hanoman begitu terpukau pada kekayaan dan kemegahannya. *Yawadwipa* diperkirakan sebagai Pulau Jawa. Disebutkan pula nama *Suwarnadwipa* = pulau emas, yang kemudian diperkirakan sebagai Pulau Sumatera (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010: 9).
4. Kitab Mahanidessa memberi petunjuk tempat-tempat di timur jauh India abad III M (Levi). Mahanidessa juga menyebutkan tentang kawasan yang dipercaya sebagai kawasan Nusantara yang menghasilkan sumber daya alam melimpah.
5. Kitab Geographike Hyphegesis (tuntunan geografi) ditulis oleh Claudius Ptolomeus. Dalam kitab ini Ptolomeus menulis kisah perjalanannya ke berbagai negeri asing. Ptolomeus menyebut berbagai kata yang dipercaya merujuk pada tempat-tempat di Nusantara. Tempat tersebut antara lain; *Barosae* atau Barus (kota di Pantai Sumatera), *Sinda* atau Sunda, *Sabadiba* atau *Suvarnabhumi* atau Sumatera, *Argyre Chora* atau negeri perak, *Chryse Chora* atau negeri emas, *Chryse Chersonesos* atau Semenanjung Emas, dan *Iabadiou* atau Pulau Jelai atau Pulau Jawa (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010: 12).



Gambar 2. Peta Jalur Kedatangan Pertama Bangsa Asing di Nusantara

Dilihat dari bukti sejarah dan anggapan sejarawan tersebut dapat kita yakini bahwa telah terjadi hubungan yang kuat antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat asing pada kisaran awal abad masehi. Hubungan tersebut tentunya merupakan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.

B. Pengaruh Kebudayaan India di Nusantara

Melalui hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dengan bangsa asing muncul berbagai pengaruh bagi kedua pihak. Salah satu bangsa asing yang melakukan hubungan dengan bangsa Nusantara adalah bangsa India. Masyarakat Nusantara mendapat berbagai kebudayaan baru dan kemudian mengadopsi sebagian kebudayaan dari bangsa India. Pengaruh tersebut muncul bukan merupakan hasil dari hubungan yang berlangsung secepat kilat. Dimulai pada awal tahun masehi dan berjalan hingga ratusan tahun lamanya hingga meninggalkan kesan dan pertukaran kebudayaan (Notosusanto, 1998:311). Pengaruh hubungan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa bidang berikut:

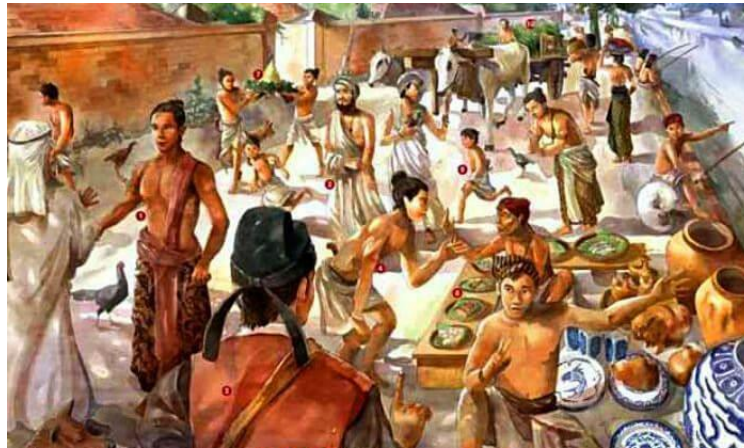
Bidang Agama. Sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India ke Nusantara, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk ke

Indonesia. Bangsa India turut serta membawa kepercayaan baru dalam hubungan dengan bangsa Nusantara. Kepercayaan tersebut adalah agama Hindu dan agama Buddha. Setelah masuknya kedua agama ini, kepercayaan animisme dan dinamisme tidak lantas ditinggalkan begitu saja, melainkan telah terjadi percampuran (akulturasi) di antara keduanya. Hal ini dapat dilihat dari segi pemujaan dewa-dewa dan roh nenek moyang.

Bidang Politik. Sistem politik kerajaan di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang India. Sebelumnya, masyarakat Nusantara masih terdiri atas kelompok-kelompok yang dipimpin oleh kepala suku. Seorang kepala suku dipilih berdasarkan keunggulan fisik dan spiritualnya, menganut hukum siapa yang kuat dia yang berkuasa. Ketika kebudayaan India semakin berkembang, kepala suku pun mulai digantikan oleh seorang raja. Diperkirakan raja pertama suatu kerajaan merupakan kepala suku terkuat yang mempunyai pengaruh yang besar yang mendapat legitimasi dari Brahmana yang datang ke Nusantara. Menurut M.C. Ricklefs, dkk. (2013: 31) bahwa Indianisasi di kawasan Asia Tenggara termasuk di nusantara kurang lebih sama dengan yang terjadi di tanah India dari akar mereka di Arya, daerah utara India. Para kepala suku setempat mengadopsi gelar Sanskerta dan konsep kedudukan raja Hindu bersama kepercayaan agama baru. Hal ini seperti diungkap sejarawan dilihat dari sumber kerajaan Kutai yaitu Yupa yang menyebut sebuah upacara Vratyastoma. Peran raja semakin menguat saat muncul anggapan bahwa raja merupakan keturunan dari dewa yang memiliki kekuatan, suci, dan dipuja. Anggapan ini berkembang seiring dengan ajaran agama yang dianut oleh kerajaan tersebut. Gelar raja selanjutnya diwariskan secara turun temurun, sehingga menghapus kesempatan pemimpin lain untuk berkuasa. Hal ini menandakan berakhirnya kepemimpinan kepala suku dan digantikan oleh raja.

Bidang Sosial Budaya

a. Aspek Sosial



Gambar 3. Ilustrasi masyarakat nusantara (atas) dan tingkat kasta (bawah)

Awalnya masyarakat Nusantara hidup berbaur dan bergotong royong dan tidak mengenal adanya tingkatan masyarakat. Setelah masuknya kebudayaan India ke Nusantara, terjadi perubahan dalam tata kehidupan masyarakat Nusantara. Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia sebelumnya sudah memiliki hierarki sosial atau tingkatan masyarakat secara sosial namun tidak spesifik seperti setelah adanya pengaruh kebudayaan India. Ketika kebudayaan itu datang diperkenalkanlah sistem kasta. Sistem kasta merupakan pembagian masyarakat berdasarkan kedudukan dalam masyarakat. Kasta dikenal dalam struktur masyarakat Hindu. Saat itu dikenal empat kasta, yaitu:

- a) Kasta Brahmana, golongan paling atas. Brahmana adalah orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual seperti sulinggih, pandita dan rohaniawan. Selain itu disandang oleh para pribumi.

~ Ufi Saraswati~

- b) Kasta Ksatria, golongan tingkat kedua. Golongan Ksatria adalah para kepala dan anggota lembaga pemerintahan. Seseorang yang menyandang gelar ini tidak memiliki harta pribadi semua harta milik negara.
- c) Kasta Waisya, golongan tingkat ketiga. Golongan Waisya adalah orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain.
- d) Kasta Sudra, golongan tingkat keempat. Golongan Sudra adalah pelayan bagi ketiga kasta di atasnya.

Sedangkan di luar sistem kasta tersebut, ada pula istilah:

- a) Kaum Paria, golongan orang rendahan yang tugasnya melayani para Brahmana dan Ksatria.
- b) Kaum Candala, golongan orang yang berasal dari Perkawinan Antar Warna, bangsa asing.

Berbeda dengan ajaran agama Hindu, dalam agama Buddha hanya terdapat golongan biksu atau biksuni, dan upasaka atau upasika (masyarakat Buddha yang tingkatannya masih seperti masyarakat kebanyakan). Pembagian golongan ini tidak mengarah pada pembagian masyarakat secara vertikal, yang berarti tidak ada tingkatan sosial masyarakat dalam agama Buddha.

- b. Aspek Arsitektur. Pengaruh India dalam bidang arsitektur dapat dilihat dari bangunan candi, meskipun bangunan candi ini merupakan pengaruh dari India, namun dalam arsitekturnya dapat perpaduan dengan arsitektur megalitikum. Hal ini dapat dilihat pada umumnya candi-candi yang berundak-undak, seperti Candi Borobudur.



Gambar 4. Candi Plaosan Klaten (atas) dan Punden Berundak (bawah)

Candi merupakan bangunan suci keagamaan. Terdapat sebuah kitab pedoman yang secara khusus memuat informasi mengenai candi, yaitu kitab Silpasastra. Candi di Nusantara yang dibangun dengan memenuhi pedoman dari Silpasastra menggabungkan unsur Nusantara. Walaupun sama-sama bangunan keagamaan, candi Hindu dan candi Buddha memiliki perbedaan. Perbedaannya dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu:

Tabel 1. Perbedaan candi Hindu dan Buddha

No	Aspek	Candi Hindu	Candi Buddha
1	Fungsi	Candi makam atau tempat memakamkan abu jenazah raja.	Tempat pemujaan dewa.
2	Bagian	Dibagi menjadi tiga: Bhurloka (bawah candi) melambangkan dunia fana. Bhurvaloka (tubuh candi) melambangkan dunia pembersih atau pemurnian. Svarloka (atap candi) melambangkan dunia para dewa.	Dibagi menjadi tiga: Kamadhatu (dasar candi) melambangkan kehidupan manusia yang penuh dosa. Rupadhatu (tengah candi) melambangkan kehidupan manusia yang hanya mementingkan nafsu. Arupadhatu (atas candi) melambangkan manusia telah mencapai nirwana.
3	Puncak	Terdapat ratna.	Terdapat stupa.
4	Arca	Arca Trimurti.	Arca Buddha.

Contoh candi Hindu yang ada di Indonesia antara lain Candi Prambanan, Candi Gedong Songo, Candi Sewu, Candi Arjuna, dan Candi Tikus.



Gambar 5. Candi Prambanan

Sedangkan contoh candi Buddha yang ada di Indonesia antara lain Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Muara Takus, Candi Sari, Candi Muara Bahal, dan Candi Ngawen. Baik candi Hindu maupun Buddha dapat kita temukan di berbagai wilayah di Indonesia.

c. Aspek Seni



Gambar 6. Relief Sang Buddha Sidharta

Pengaruh seni rupa India telah masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia. Kesenian ini dapat dilihat dari relief-relief candi. Candi Borobudur mempunyai relief yang menceritakan kisah sang Budha dan suasana alam Indonesia. Berbeda dengan Candi Borobudur, Candi Prambanan mempunyai relief yang menceritakan kisah Ramayana. Selain relief terdapat pula pengaruh seni rupa India berupa patung Buddha berlangganan Gandara yang ditemukan di kota Bangun, Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur) dan berlanggam Amarawati yang ditemukan di Sikendeng, Sulawesi.

- d. Bidang Bahasa, Aksara, dan Sastra. Dari segi bahasa, orang-orang Nusantara mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa karena pengaruh kebudayaan India. Sebelumnya masyarakat Nusantara belum mengenal budaya aksara atau tulis, walaupun dipercaya sudah ada bahasa yang asli yang digunakan masyarakat Nusantara. Pengenalan huruf inilah yang mengantar peradaban Nusantara ke masa aksara. Huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta banyak ditemukan di berbagai peninggalan sejarah, seperti halnya prasasti dan kitab sastra. Contoh prasasti yang menggunakan aksara Pallawa adalah Yupa dan Prasasti Tugu.

	Aksara Pallawa-Kawi					Aksara Hanacaraka				Aksara Daerah			
	Pallawa	Kawi Awal Baru	Kawi Akhir I	Bali Kuna	Sunda Kuna	Kawi Akhir II	Jawa Pra Modern	Jawa Modern	Bali Modern	Lampung	Recocong	Batak Karo	Bugis-Makassar
k	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓
ga	𑀕	𑀕	𑀕	𑀕	𑀕	𑀕	𑀕	𑀕	𑀕	𑀕	𑀕	𑀕	𑀕
nga	𑀗	𑀗	𑀗	𑀗	𑀗	𑀗	𑀗	𑀗	𑀗	𑀗	𑀗	𑀗	𑀗
c	𑀙	𑀙	𑀙	𑀙	𑀙	𑀙	𑀙	𑀙	𑀙	𑀙	𑀙	𑀙	𑀙
ja	𑀛	𑀛	𑀛	𑀛	𑀛	𑀛	𑀛	𑀛	𑀛	𑀛	𑀛	𑀛	𑀛
nya	𑀝	𑀝	𑀝	𑀝	𑀝	𑀝	𑀝	𑀝	𑀝	𑀝	𑀝	𑀝	𑀝
t	𑀟	𑀟	𑀟	𑀟	𑀟	𑀟	𑀟	𑀟	𑀟	𑀟	𑀟	𑀟	𑀟
da	𑀡	𑀡	𑀡	𑀡	𑀡	𑀡	𑀡	𑀡	𑀡	𑀡	𑀡	𑀡	𑀡
na	𑀣	𑀣	𑀣	𑀣	𑀣	𑀣	𑀣	𑀣	𑀣	𑀣	𑀣	𑀣	𑀣
pa	𑀥	𑀥	𑀥	𑀥	𑀥	𑀥	𑀥	𑀥	𑀥	𑀥	𑀥	𑀥	𑀥
ba	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧
ma	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩
ya	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭
ra	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯
la	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱
wa	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳
sa	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵
ha	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷

Ensiklopedi Nusantara @ edited by Empu

Gambar 7. Aksara Pallawa dan Perkembangannya di Nusantara

Selain bahasa dan aksara, turut berkembang pula seni sastra di masyarakat Nusantara. Sastra pada masa ini bercorak tradisional dan bersifat istana sentris. Artinya, karya yang ada masih terbatas pada kalangan istana saja. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama pada aman kejayaan kerajaan Kediri. Karya sastra itu antara lain,

- Arjunawiwaha, karya Mpu Kanwa yang disusun pada masa politik Airlangga.
 - Bharatayudha, karya Mpu Sedah dan Mpu Panuluh disusun pada aman kerajaan Kediri.
 - Gatotkacasraya, karya Mpu Panuluh disusun pada aman kerajaan Kediri.
 - Arjuna Wijaya, karya Mpu Tantular yang disusun pada aman kerajaan Majapahit.
 - Sutasoma, karya Mpu Tantular yang disusun pada aman kerajaan Majapahit.
 - Negarakertagama, karya Mpu Prapanca disusun pada aman kerajaan Majapahit.
 - Wretta Sancaya dan Lubdhaka, karya Mpu Tanakung yang disusun pada aman kerajaan Majapahit.
- e. Bidang Pendidikan. Pengaruh Kebudayaan India turut mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Kedatangan mereka yaitu untuk memberikan pendidikan mengenai agama Kebudayaan India kepada masyarakat Indonesia. Para pendeta tersebut kemudian mendirikan tempat-tempat pendidikan yang disebut pasraman. Di tempat

inilah masyarakat mendapatkan berabagi ilmu agama dan pengetahuan. Pada perkembangannya, tempat ini mencetak para lulusan yang terpelajar. Para pelajar ini kemudian menyebar hingga ke India untuk memperdalam agama Kebudayaan India, sekembalinya dari India mereka menyebarkan agama Hindu Budha. Bahasa pengantar pengajaran yang mereka gunakan menggunakan bahasa setempat sehingga mudah dipahami.

- f. Bidang Astronomi. Pengaruh bidang astronomi disini lebih kepada sistem kalender. Dalam agama Hindu dikenal dengan tahun Saka yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Di Indonesia terutama di Jawa dan Bali, tahun Saka sudah ditambahi dengan cara penanggalan lokal. Selain itu, ditemukan pula Candrasengkala atau angka tahun yang disimbolkan dengan kata-kata, gambar-gambar atau benda. Apabila dalam bentuk angka, harus dibaca dari belakang contoh yang paling umum adalah tahun keruntuhan kerajaan Majapahit yang ditandai dengan Candrasengkala "*Sirna Ilang Kertaning Bumi*". Sirna= 0, Ilang= 0, Kertaning = 4, Bumi =. dengan demikian, "*Sirna ilang kertaning bumi*" menggambarkan runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Saka.



Gambar 8. Surya Majapahit

Untuk Candrasangkala berupa gambar atau benda dapat dibaca melalui bagian-bagian penting bentuknya. Contoh gambar bulus di dalam mihrab Masjid Agung Demak. Meskipun berupa peninggalan Islam, namun gambar ini menunjukkan

tahun Saka. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berarti angka 1, 4 kaki berarti angka 4, badan bulus berarti angka 0, dan ekor bulus berarti angka 1 (satu). berdasarkan simbol ini diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka (Badrika, 2006: 120-122).

C. Teori Masuk Agama Hindu di Nusantara

Agama Hindu lahir di Lembah Sungai Indus, India. Para ahli memperkirakan agama Hindu merupakan sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India pada kisaran 500-200 SM. Penganut agama Hindu mempercayai adanya tiga dewa yang disebut Trimurti yakni Brahma (pencipta), Wisnu (pemelihara), dan Siwa (perusak). Kitab suci agama Hindu adalah Weda yang dibagi menjadi:

- a. regweda berisi syair-syair pujian terhadap dewa
- b. sawaweda berisi nyanyian pujian terhadap dewa
- c. yayurweda/ jayurweda berisi do'a pengantar sesajian yang di sampaikan untuk dewa
- d. atharwaweda berisi kumpulan mantra mantra gaib untuk mengusir penyakit, menghancurkan musuh, memperoleh kekuasaan.

Agama Hindu kemudian berkembang dan tersebar ke berbagai wilayah di dunia termasuk Nusantara. Mengenai siapa yang membawa/ menyebarkan agama Hindu ke Nusantara, tidak dapat diketahui secara pasti, walaupun demikian para ahli memberikan pendapat tentang proses masuknya agama Hindu atau Kebudayaan India ke Nusantara. Ada 5 teori tentang masuknya agama Hindhu ke Nusantara:

Teori Brahmana oleh J.C. Van Leur

Menurut teori yang dikemukakan oleh J.C Van Leur ini, bahwa para Brahmana datang dari India ke Nusantara atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Nusantara, terutama prasasti-prasasti berbahasa **sansekerta** dan huruf Pallawa.



Gambar 9. Ilustrasi Brahmana Tengah Menyampaikan Ajaran

Di India, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci *Weda* dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Tetapi teori ini pun diragukan kebenarannya, alasannya adalah kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai *Weda*, tetapi para pendeta Hindu itu pantang menyebrangi lautan.

Kelebihan teori ini:

- 1) Agama Hindu adalah milik kaum Brahmana sehingga merekalah yang paling tahu dan paham mengenai ajaran agama Hindu. Urusan keagamaan merupakan monopoli kaum Brahmana bahkan kekuasaan terbesar dipegang oleh kaum Brahmana sehingga hanya golongan Brahmana yang berhak dan mampu menyiarkan agama Hindu.
- 2) Prasasti Nusantara yang pertama menggunakan bahasa Sansekerta, sedangkan di India sendiri bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Bahasa Sansekerta adalah bahasa kelas tinggi sehingga sehingga tidak semua orang dapat membaca dan menulis bahasa Sansekerta. Di India hanya kasta Brahmana yang menguasai bahasa Sansekerta sehingga hanya kaum Brahmana-lah yang dapat dan boleh membaca kitab *Weda*.
- 3) Karena kepala suku yang ada di Nusantara kedudukannya ingin diakui dan kuat seperti raja-raja di India maka mereka dengan sengaja mendatangkan kaum Brahmana dari India untuk mengadakan upacara penobatan dan mensyahkan

kedudukan kepala suku di Nusantara menjadi Raja. Dan mulailah dikenal istilah kerajaan. Karena upacara penobatan tersebut secara Hindu maka secara otomatis rajanya juga dinyatakan Beragama Hindu, jika raja bertagama Hindu maka rakyatnyapun akan mengikuti rajanya.

- 4) Ketika menobatkan raja kaum Brahmana pasti membawa kitab *Weda* ke Nusantara. Sebelum kembali ke India tak jarang para Brahmana tersebut meninggalkan kitab *Weda*-nya sebagai hadiah bagi sang raja. Kitab tersebut selanjutnya akan dipelajari oleh sang raja dan digunakan untuk menyebarkan agama Hindu di Nusantara.
- 5) Karena raja telah mengenal Brahmana maka secara khusus raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Dan hal inilah maka agama dan budaya India dapat berkembang di Nusantara.
- 6) Sejak itu mulailah secara khusus kepala suku kepala suku yang lain yang tertarik terhadap budaya dan ajaran Hindu mengundang kaum Brahmana untuk datang dan mengajarkan agama dan budaya India kepada masyarakat Nusantara.

Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapat koloni India di Malaysia dan pantai Timur Sumatera yang banyak ditempati oleh orang-orang keeling dari India Selatan yang memerlukan kaum Brahmana untuk upacara agama (perkawinan dan kematian).

Kelemahan teori ini:

- 1) Mempelajari bahasa Sansekerta merupakan hal yang sangat sulit jadi tidak mungkin dilakukan oleh raja-raja di Nusantara yang telah mendapat kitab *Weda* untuk mengetahui isinya bahkan menyebarkan pada yang lain. Sehingga pasti memerlukan bimbingan kaum Brahmana.
- 2) Menurut ajaran Hindu Kuno seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan hal tersebut maka ia akan kehilangan hak akan kastanya. Sehingga mendatangkan para Brahmana ke Nusantara bukan merupakan hal yang wajar.

Teori Waisya oleh N.J. Krom



Gambar 10. Ilustrasi Kaum Waisya

Hubungan dagang antara Nusantara dan India diawali sejak tahun 1 Masehi. Menurut N.J. Krom, para pedagang India dikatakan telah melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan melalui perkawinan tersebut mereka mengembangkan kebudayaan India (Abdullah dan Lopian [ed], 2011:37). Hubungan perdagangan ini diikuti dengan hubungan kebudayaan seperti, agama, sistem pemerintahan, sosial dan budaya sehingga terjadi percampuran kebudayaan di antara dua negara tersebut. Ada beberapa teori terkait proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Golongan terbesar yang datang ke Nusantara adalah para pedagang India.

Kelebihan teori Waisya adalah: Sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisya tertarik untuk bertransaksi jual beli di Nusantara. Pada saat itu, kebanyakan pedagang yang datang ke Nusantara berasal dari Nusantara bersal dari India yang merupakan pusat agaman Hindu, shg ketika mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha.

Kelemahan teori Waisya adalah: Teori waisya diragukan kebenarannya, jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan, maka pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di wilayah perdagangan saja, seperti di pelabuhan atau pusat kota yang ada di dekatnya. Kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu ini banyak terdapat di wilayah pedalaman, seperti di buktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Jawa. Selain itu para pedagang yang

termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sansekerta dan huruf pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana.

Teori Ksatria oleh C.C Berg Mookerji dan J.L Moens

Menurut teori yang dikemukakan oleh F.D.K Bosch, pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh dlm menghadapi perang antar golongan tersebut lantas mereka meninggalkan India. Dan menyebar keberbagai wilayah dunia, rupanya diantara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Nusantara. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Kelebihan dari teori ini adalah

- a. Semangat berpetualangan dan menaklukan daerah lain, pada saat itu umumnya dimiliki oleh keluarga kerajaan.
- b. Menurut C.C Berg bahwa ksatria ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Nusantara. Mereka dijanjikan akan diberi hadiah apabila menang, yaitu dinikahkan dengan seorang putri kepala suku yang dibantunya.
- c. Menurut Mookerji bahwa para ksatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan India.

Tetapi teori ksatria ini juga memiliki kelemahan yaitu:

- a. Tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonisasi oleh para ksatria Hindu yang berasal dari India.
- b. Para ksatria tidak menguasai bahasa Sansekerta dan huruf Pallawa.
- c. Apabila daerah Nusantara pernah menjadi daerah taklukan kerajaan-kerajaan India, tentunya ada bukti prasasti yang menggambarkan penaklukan tersebut. Akan tetapi baik di India maupun Nusantara tidak ditemukan prasasti semacam itu.

Teori Sudra oleh Van Faber



Gambar 11. Ilustrasi Kaum Sudra

Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh kasta Sudra. Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan mengubah kehidupan mereka karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar.

Kelebihan teori Sudra: Semua orang ada pada kasta sudra pasti ingin memperbaiki hidup, salah satunya adalah pergi ketempat lain seperti Nusantara.

Kelemahan teori Sudra:

1. Kasta sudra umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan/pendidikan
2. Tidak menguasai bahasa sansekerta dan huruf pallawa
3. Biasanya jika ada budak maka ada tuannya, maka jika pastilah ada kasta yang lebih tinggi dari sudra yang membawa kasta sudra ke Nusantara.

Teori Arus Balik oleh F.D.K. Bosch

Menurut teori ini, yang pertama kali datang ke Nusantara adalah mereka yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Kebudayaan India, yaitu para intelektual yang ikut menumpang kapal-kapal dagang. Setelah tiba di Nusantara mereka menyebarkan agamanya. Karena pengaruhnya itu, ada diantara tokoh masyarakat yang tertarik untuk mnegikuti ajarannya. Pada perkembangan selanjutnya banyak orang Nusantara sendiri yang pergi ke India untuk berkunjung dan belajar agama Kebudayaan India di India. Kelebihan teori ini adalah:

- a Ada kemungkinan putra para bangsawan di Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan. Kebudayaan India, tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontoh kebudayaan India di India.
- b Adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Balaputradewa (Raja Sriwijaya) telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Dengan demikian, setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu disana, mereka kembali ke Nusantara.

Kelemahan teori ini adalah Pada teori ini, sepertinya tidak mungkin jika orang Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Kebudayaan India karena pada saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif, jadi tidak mungkin orang Nusantara belajar ke India untuk menuntut ilmu agama dan agama Kebudayaan India kemudian mereka kembali ke Nusantara untuk menyebarkan ilmu mereka.

D. Teori Masuknya Agama Buddha di Nusantara

Agama Buddha merupakan agama yang bisa dikatakan sebagai pembaharu dari agama Hindu yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Ayah dari Pangeran Siddhartha Gautama adalah Sri Baginda Raja Suddhodana dari Suku Sakya dan ibunya adalah Ratu Mahamaya Dewi. Pada perjalanannya sang Buddha sendiri melakukan pengembaraan untuk mencari pencerahan yang abadi. Hal ini dilakukan karena Siddhartha Gautama pernah mengalami pengalaman melihat secara langsung penderitaan rakyat yang sangat berbeda dengan keadaannya yang dipenuhi kemudahan dan kemewahan. Siddhartha mendapatkan pencerahan abadi setelah bertapa di bawah pohon Bodhi dan mendapatkan gelar Budha Sakyamuni. Selanjutnya Ia menyebarkan ajaran dan agama Buddha ke seluruh wilayah.

Berbeda halnya dengan agama Hindu, agama Buddha lebih banyak berkembang di Cina dibandingkan dengan asal mulanya agama tersebut yaitu India. Agama Buddha mempunyai kitab suci yang disebut dengan Tripitaka. Tripitaka secara harafiah diartikan sebagai tiga keranjang, kitab ini terbagi menjadi:

- a. Sutta Pitaka, berisi wejangan-wejangan dari sang Buddha.

- b. Vinaya Pitaka, berisi segala macam peraturan dan hukum yang menentukan cara hidup pemeluknya
- c. Abhidharma Pitaka, berisi penjelasan penjelasan dan kupasan soal keagamaan.

Hindu merupakan agama yang dianggap sebagai agama paling tinggi kedudukannya saat itu, karena mereka mengenal sistem kasta sehingga yang bisa mempelajarinya hanyalah kalangan tertentu saja. Sedangkan Buddha merupakan agama yang tidak mengenal kasta, sehingga dapat menyebar dengan merata tanpa memandang suatu kalangan atau pun kasta tertentu. Jika penyebaran agama Hindu dikategorikan berdasarkan golongan pembawanya, agama Buddha berbeda. Agama Buddha dipercaya menyebar ke seluruh dunia lewat perantara dua hal, yaitu:

Perdagangan. Sebagai kegiatan yang mengharuskan adanya perpindahan dan pertemuan dengan orang lain, perdagangan merupakan sarana yang paling ampuh dalam menyebarkan pengaruh, termasuk agama. Agama Buddha diperkirakan datang dan dikenalkan pertama kali lewat kegiatan perdagangan yang berkembang antara bangsa Nusantara, India, dan juga Cina. Masuknya agama Buddha di Indonesia itu sekitar awal abad pertama atau saat dimulainya perdagangan melalui jalur laut, namun itu hanyalah perkiraan kedatangan para pedagang dari India atau pun dari China. Sedangkan bukti-bukti yang menyebutkan adanya orang Indonesia yang memeluk agama Budha itu sekitar abad ke-4 M. Ditemukan Prasasti dan Ruphang Buddha (Abad ke-4) Sebuah Prasasti berasal dari abad ke-4 dekat bukit meriam di Kedah, sebuah lempengan batu berwarna ditemukan di satu puing rumah bata yang diperkirakan mungkin merupakan kamar bhiksu Buddha. Lempengan batu itu berisi 2 syair Buddhist dalam bahasa Sanskerta ditulis dengan huruf abjad Pallawa tertua. Tulisan yang kedua dari lempengan batu tersebut berbunyi: "Karma bertambah banyak karena kurang pengetahuan dharma Karma menjadi sebab tumibal lahir Melalui pengetahuan dharma menjadikan akibat tiada karma Dengan tiada karma maka tiada tumibal lahir". Bukti-bukti tertua dikatakan sekitar tahun 400 M., di Kalimantan Timur, dilembah-lembah Sungai Kapuas Mahakam dan Rata, terdapat tanda-tanda lain dari pengaruh India terlihat dalam bentuk patung Buddha dalam gaya Gupta.

Sebelum abad ke-5, di Kedah Sulawesi, Jawa Timur dan Palembang, patung-patung Buddha gaya Amaravati ditemukan (ini dihubungkan dengan tempat-tempat

tertua, Amarawati di Sungai Kitsna kira-kira 80 mil dari pantai timur India, adalah negeri aliran besar patung Buddha yang berkembang dari tahun 150 sampai 250 M.), namun adanya negara Buddha di daerah-daerah itu belum ada yang mengetahui tentang kemungkinannya. Sebuah kerajaan bernama Kan-to-li juga disebut oleh orang-orang tionghoa. Tahun 502 seorang Raja Buddha telah memerintah di sana dan tahun 519 putra raja Vijayavarman mengirim utusan ke Tiongkok. Kerajaan ini diperkirakan berada di Sumatera. Lewat berbagai bukti tersebut telah diketahui bahwa kebudayaan India yang bercorak Buddha ditemukan di berbagai wilayah di Nusantara. Hal ini menandakan adanya perdagangan yang menjadi sarana penting dalam penyebaran agama Buddha ke wilayah Nusantara.

Dharmaduta. Selain perdagangan, dalam agama Buddha dikenal pula istilah dharmaduta sebagai penyebar agama Buddha ke seluruh penjuru dunia. Dharmaduta merupakan utusan agamawan Buddha yang memang bertugas menyebarkan agama Buddha. Keberadaan dharmaduta menjadi penting karena mereka merupakan sosok yang mendalami ajaran Buddha dan hidup penuh kesederhanaan. Seseorang yang menjadi dharmaduta diharuskan memenuhi kriteria khusus dan harus mendapat pengajaran khusus sebelum diperbolehkan untuk menyebarkan agama ke berbagai wilayah. Mereka terbiasa berjalan dan mengunjungi berbagai tempat guna menyebarkan ajaran dan kebaikan dharma Buddha. Sampai saat ini keberadaan dharmaduta masih memegang peranan utama sebagai utusan agama Buddha sekaligus penyiarnya agama Buddha yang tersebar ke seluruh penjuru dunia.



Gambar 12. Ilustrasi situasi pelajaran Agama Buddha

E. Rangkuman

Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Indonesia dengan India sudah berlangsung sejak awal abad Masehi. Terbukti dengan adanya peninggalan sejarah di dalam negeri seperti Arca Budha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan dan nekara perunggu yang ditemukan di Bali. Keduanya merupakan benda buatan asing yang ditemukan di Indonesia yang menandakan adanya aktivitas perdagangan saat itu. Selain dalam negeri, adapula bukti dari luar negeri. Satu di antaranya adalah penyebutan *Suvarnabhumi* untuk menunjuk kawasan Sumatera di kitab Jataka tulisan orang India.

Hubungan pelayaran dan perdagangan ini berpengaruh terhadap masuknya budaya India ke Indonesia. Dalam bidang agama, masyarakat Nusantara mengenal agama Hindu dan Buddha. Dalam bidang sosial, budaya, dan politik dikenal berbagai tatanan baru di Nusantara. Agama Budha disebarluaskan ke Indonesia oleh para bhiksu khusus yang disebut Dharmaduta. Sedangkan mengenai pembawa agama Hindu ke Indonesia sejarawan memberikan 5 teori sebagai berikut:

1. Teori Brahmana: menurut Van Leur kaum Brahmana yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia karena hanya Brahmana yang menguasai ajaran Hindu. Kelemahan teori ini menurut ajaran brahmana tidak diperbolehkan keluar India.
2. Teori Ksatria: menurut C.C Berg Mookerji dan J.L Moens bangsawan India menaklukkan daerah-daerah tertentu di Indonesia dan menghindukan penduduknya. Kelemahan teori ini suatu kolonisasi yang dilakukan oleh golongan ksatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan, dan catatan itu tidak ditemukan.
3. Teori Waisya: Menurut N.J. Krom golongan pedagang yang menetap di Nusantara dan kemudian proses penyebaran kebudayaan India. Kelemahannya ada pada sebaran pusat kerajaan Hindu-Buddha yang ada di pedalaman, bukan hanya pesisir.
4. Teori Sudra: Menurut Van Faber, kaum pelayan datang ke Nusantara bertujuan mengubah kehidupan mereka karena di India mereka hanya hidup sebagai

pekerja kasar. Namun, sebenarnya kemungkinan mereka bisa keluar dari India sangat kecil.

5. Teori Arus Balik: Menurut F.D.K Bosch agama Hindu tersebar di Indonesia bukan hanya karena peran orang India, tetapi orang Indonesia juga berinisiatif datang ke India untuk belajar agama. Mereka adalah pelajar yang dikirim oleh Raja di Nusantara, ini tercatat pada prasasti Nalanda yang ditemukan di India. Sayangnya, masyarakat Nusantara saat itu masih pasif dan menjadikan teori ini diragukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Lopian, A.B.[ed]. 2010. *Indonesia dalam Arus Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Badrika, I Wayan. 2006. *Sejarah SMA Kelas XI program IPS*. Jakarta: Erlangga.
- Coedes, George. 2015. *Asia Tenggara Masa Hindu-Budha*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Farid, Samsul. 2013. *Sejarah Indonesia untuk SMA-MA/ SMK Kelas X*. Bandung: Yrama Widya.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho; dkk. 1998. *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- ; dkk. 1998. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- , Nugroho. [ed]. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. dkk. 2013. *Sejarah Asia Tenggara dari Masa Pra Sejarah Sampai Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Soekmono. 1993. *Sejarah Kebudayaan Indonesia II*. Yogyakarta: Kanisius.

Sumber Gambar:

- Gambar 1 : <http://gurusejarahlokal.blogspot.com/2015/11/bentuk-budaya-logam-masa-praaksara-di.html>
- Gambar 2 : <http://comparative-of-religion.weebly.com/peta-jalur-dan-teori-masuknya-hindu-budha-di-Indonesia.html>
- Gambar 3 : <http://www.ipsmudah.com/2017/03/kasta-dalam-agama-hindu-di-bali-india.html>
- Gambar 4 : <https://tempatwisata.co/tempat-wisata-di-klaten/>
https://www.kompasiana.com/www.teguh hariawan/millennarisme-membangun-candi-punden-berundak-di-gunung-gunung_552a1e0ff17e61cb5dd623c0
- Gambar 5 : <http://www.infobudaya.net/2018/02/kisah-cinta-dan-fakta-di-balik-candi-prambanan-yang-harus-kamu-tahu/>
- Gambar 6 : <http://sparklepush.com/tempat-wisata/4-sejarah-buddha-yang-dapat-dipelajari-dari-relief-candi-borobudur/>
- Gambar 7 : <http://www.batasnegeri.com/aksara-nusantara-kekayaan-tradisi-tulisan-bangsa-indonesia/>
- Gambar 8 : <http://wongjawa670.blogspot.com/2011/04/surya-majapahit-lambang-kerajaan.html>
- Gambar 9 : <https://dominorubrik.wordpress.com/2016/02/09/teori-waisya/>

**KEHIDUPAN MASYARAKAT, AKULTURASI, PEMERINTAHAN,
DAN HASIL KEBUDAYAAN, BUKTI, DAN PENINGGALAN PADA MASA
KERAJAAN HINDU BUDHA DI INDONESIA**

Ufi Saraswati

A. Kerajaan Kutai

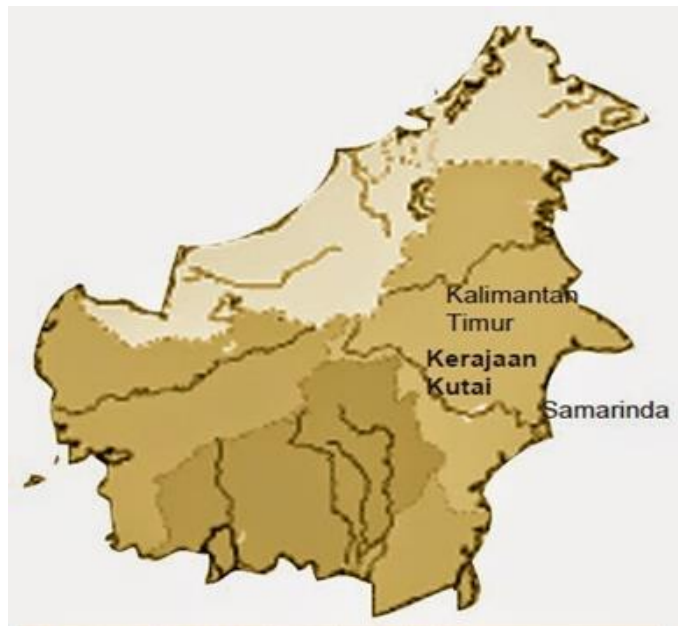
Kehidupan Politik

Kerajaan Kutai di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Sumber utama Kerajaan Kutai ialah 7 buah batu tulis yang disebut Yupa. Prasasti ditulis dengan huruf Pallawa, bahasa Sanskerta, diperkirakan pada tahun 400 M (abad ke-5 M). Isi prasasti dapat diketahui bahwa raja yang memerintah ialah Mulawarman, anak Aswawarman dan cucu Kudungga. Disebutkan pula dalam prasasti bahwa raja Mulawarman memberikan hadiah 1.000 ekor lembu kepada kaum brahmana. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010). Selain itu, juga disebutkan bahwa Aswawarman adalah wangsakarta (pendiri dinasti). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa kerajaan Kutai telah mendapat pengaruh Hindu, tetapi Kudungga belum masuk Hindu karena nama Kudungga adalah nama asli Indonesia, sehingga ia tidak disebut Wangsakarta. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dan telah memeluk agama Hindu.

Kehidupan Sosial-Ekonomi

Melihat bahwa letak Kerajaan Kutai pada jalur perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian yang utama. Rakyat Kutai sudah aktif terlibat dalam perdagangan internasional dan tentu saja mereka berdagang pula sampai ke perairan Laut Jawa dan Indonesia Timur untuk mencari barang-barang dagangan yang laku di pasaran Internasional. Dengan demikian Kutai telah termasuk daerah persinggahan perdagangan Internasional Selat

Malaka-Laut Jawa-Selat Makasar-Kutai-Cina atau sebaliknya. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010)



Gambar 1. Peta Wilayah Kerajaan Kutai

Sumber: <https://goo.gl/images/XCWvao>

Kehidupan Kebudayaan

Kehidupan kebudayaan masyarakat Kutai erat kaitannya dengan kepercayaan/agama yang dianut. Prasasti Yupa merupakan salah satu hasil budaya masyarakat Kutai, yaitu tugu batu yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia dari zaman Megalitikum, yakni bentuk Menhir. Salah satu prasasti Yupa menyebutkan suatu tempat suci dengan nama "Wapakeswara" (tempat pemujaan Dewa Siwa). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kutai memeluk agama Siwa.

B. Kerajaan Tarumanegara

Kehidupan Politik

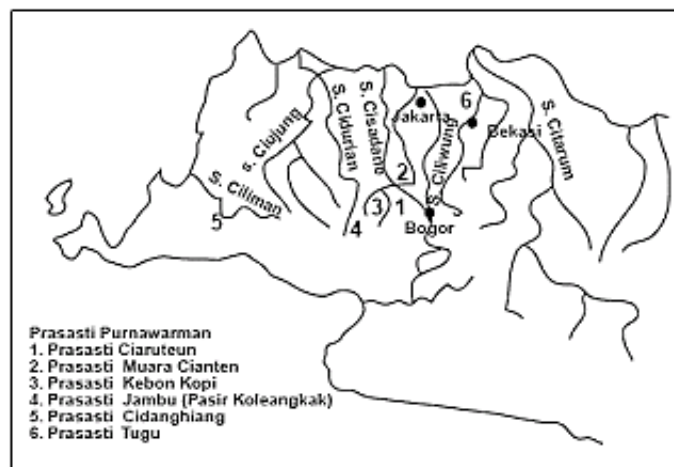
Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara dapat dikategorikan menjadi dua, bukti yang berada di luar dan bukti yang ada di dalam negeri. Bukti dari luar meliputi

- a. Berita Fa-Hsien, tahun 414 M dalam bukunya yang berjudul *Fa-Kao-Chi* menceritakan bahwa di *Ye-po-ti* hanya sedikit dijumpai orang-orang yang

beragama Buddha, yang banyak adalah orang-orang yang beragama Hindu dan sebagian masih animisme.

- b. Berita Dinasti Sui, menceritakan bahwa tahun 528 dan 535 telah datang utusan dari *To-lo-mo* yang terletak di sebelah selatan.
- c. Sebuah berita Cina pada masa Dinasti Tang mencatat adanya kerajaan *To-lo-mo* yang mengirimkan utusan ke Cina beberapa kali, antara lain tahun 528, 538, 665, dan 666 M. Utusan Kerajaan *To-lo-mo* ini melakukan misi diplomasi guna menjalin hubungan yang baik antar keduanya. Diperkirakan yang dimaksud dengan Kerajaan *To-lo-mo* tersebut adalah Kerajaan Tarumanegara yang ada di Pulau Jawa. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006)

Selain itu ada pula bukti dalam negeri, yakni prasasti yang ditemukan di Jawa Barat, meliputi (1) Prasasti Ciaruteun (Bogor), (2) Prasasti Muara Cianten (Bogor), (3) Prasasti Kebon Kopi (Bogor), (4) Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangkak (Bogor), (5) Prasasti Tugu (Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta), (6) Prasasti Lebak atau Cidanghiang (Banten Selatan), (7) Prasasti Pasir Awi atau Pasir Muara (Bogor).



Gambar 2. Peta Letak Prasasti Kerajaan Tarumanegara

Sumber: <https://goo.gl/images/bjXUhA>

Ke tujuh prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Isi Prasasti Ciaruteun selain berisi empat baris kalimat, pada prasasti ini juga dipahatkan lukisan seperti lukisan lebah-lebah dan sepasang telapak kaki. Empat baris kalimat itu berbunyi: "ini kedua telapak kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang Mulia Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang sangat gagah berani". Sedangkan isi prasasti Kebon Kopi yakni adanya dua kaki gajah yang disamakan

dengan tapak kaki gajah Airawati (gajah kendaran Dewa Wisnu). Prasasti Jambu berisi tentang kegagahan raja Purnawarman. Bunyi prasasti itu antara lain : "gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang memerintah di Taruma dan yang baju zirahnya tak dapat ditembus oleh musuh ..." Prasasti yang diketemukan semuanya tidak berangka tahun, namun dari huruf yang dipakai dapat diperkirakan bahwa Kerajaan Tarumanegara yang berkuasa di Jawa Barat sekitar abad ke-5 M dengan rajanya Purnawarman.

Selain bersumber dari prasasti, terdapat sebuah kitab peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berjudul Wangsakerta. Kitab ini memuat silsilah raja kerajaan Tarumanegara yang diawali dari nama Jayasingawarman hingga nama Linggawarman. Walaupun dikatakan kitab ini masih diragukan keabsahannya, namun informasi yang terkandung di dalamnya cukup dapat dijadikan pandangan. Silsilah raja Tarumanegara yang tercantum adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Raja-raja Tarumanegara menurut Kitab Wangsakerta

No	Raja	Pemerintahan	No	Raja	Pemerintahan
1	Jayasingawarman	358-382	7	Suryawarman	535-561
2	Dharmayawarman	382-395	8	Kertawarman	561-628
3	Purnawarman	395-434	9	Sudhawarman	628-639
4	Wisnuwarman	434-455	10	Hariwangawarman	639-640
5	Indrawarman	455-515	11	Nagajayawarman	640-666
6	Candrawarman	515-535	12	Linggawarman	666-669

Sumber: id.wikipedia.org

Kehidupan Sosial-Ekonomi

Corak utama kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Hal ini dapat diketahui dari isi Prasasti Tugu yakni tentang pembangunan atau penggalian saluran Gomati yang panjangnya mencapai 6112 tombak (12 km). Sungai ini selesai dikerjakan oleh rakyat Tarumanegara dalam kurun waktu 21 hari. Selesai penggalian Raja Purnawarman mengadakan selamatan dengan memberikan hadiah sebanyak 1.000 ekor lembu kepada para brahmana. Pembangunan/penggalian itu mempunyai arti ekonomis bagi rakyat, karena dapat digunakan sebagai sarana pengairan dan pencegahan banjir. Selain penggalian saluran

Gomati dalam prasasti Tugu juga disebutkan penggalian saluran Candrabhaga. Dengan demikian rakyat akan hidup makmur, aman, dan sejahtera.

Kehidupan Kebudayaan

Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf pada prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara, maka dapat diketahui bahwa kehidupan kebudayaan masyarakat pada masa itu sudah tinggi.

C. Kerajaan Sriwijaya

Kehidupan Politik

Sumber-sumber sejarah yang dapat digunakan untuk mengetahui kerajaan Sriwijaya adalah sebagai berikut.

- a. Berita Cina, diperoleh dari I-Tshing seorang pendeta Cina yang sering datang ke Sriwijaya sejak tahun 672 M. Menceritakan bahwa di Sriwijaya terdapat 1000 orang pendeta yang menguasai agama seperti di India dan di samping itu juga. Berita dari dinasti Sung yang menceritakan tentang pengiriman utusan dari Sriwijaya tahun 971 - 992 M. orang Cina menyebut Sriwijaya dengan sebutan *San-Fo-Tsi* dan *Che-Li-Fo-Che*.
- b. Berita Arab, banyak orang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan di Sriwijaya. Sehingga banyak juga bermunculan perkampungan-perkampungan Arab. Orang-orang Arab menyebut Sriwijaya dengan nama *Zabaq*, *Sabay* atau *Sribusa*.
- c. Berita India, Kerajaan Sriwijaya sudah menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan India, seperti kerajaan Nalanda dan kerajaan Chola mandala.
- d. Prasasti-prasasti (enam di Sumatra Selatan dan satu di Pulau Bangka).
- e. Prasasti Kedukan Bukit (605S/683M) di Palembang. Isinya: Dapunta Hyang mengadakan ekspansi 8 hari dengan membawa 20.000 tentara, kemudian berhasil menaklukkan dan menguasai beberapa daerah. Dengan kemenangan itu Sriwijaya menjadi makmur.

- f. Prasasti Talang Tuo (606 S/684M di sebelah barat Palembang. Isinya tentang pembuatan sebuah Taman Sriksetra oleh Dapunta Hyang Sri Jayanaga untuk kemakmuran semua makhluk. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006)

Menurut sumber berita Cina yang ditulis oleh I-tsing dinyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 M. Berdasarkan prasasti Ligor, pusat pemerintahan Sriwijaya di Muara Takus, yang kemudian dipindahkan ke Palembang. Kerajaan Sriwijaya kemudian muncul sebagai kerajaan besar di Asia Tenggara. Perluasan wilayah dilakukan dengan menguasai Tulang Bawang (Lampung), Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Tanah Genting Kra dan Jawa (Kaling dan Mataram Kuno). Dengan demikian Kerajaan Sriwijaya bukan lagi merupakan kerajaan senusa (negara yang berkuasa atas satu pulau saja) melainkan merupakan negara antarnusa (negara yang berkuasa atas beberapa pulau), sehingga Sriwijaya merupakan negara kesatuan pertama di Indonesia. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006; Soekmono, 1984)



Gambar 3. Peta Kerajaan Sriwijaya
Sumber: wikipedia.org

Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputra Dewa. Raja ini mengadakan hubungan persahabatan dengan Raja Dewapala Dewa dari India.

~ Ufi Saraswati ~

Dalam Prasasti Nelandra disebutkan bahwa Raja Dewapala Dewa menghadiahkan sebidang tanah untuk mendirikan sebuah biara untuk para pendeta Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India. Selain itu dalam Prasasti Nelandra juga disebutkan bahwa adanya silsilah raja Balaputra Dewa dan dengan tegas menunjukkan bahwa raja Syailendra (Darrarindra) merupakan nenek moyangnya.

Kehidupan Sosial Ekonomi

Letak Sriwijaya sangat strategis di jalur perdagangan antara India-Cina. Di samping itu juga berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, menjadikan Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional. Penguasaan Sriwijaya atas Selat Malaka mempunyai arti penting terhadap perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim.

Kehidupan Budaya dan Keagamaan

Peninggalan kerajaan Sriwijaya banyak terdapat di kawasan Bukit Siguntang, Palembang.



Gambar 4. Persebaran Peninggalan Sriwijaya di Palembang
Sumber: National Geographic

Dalam bidang agama, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya ialah Agama Buddha Mahayana, salah satu tokohnya ialah Dharmakirti. Para peziarah agama Buddha dalam pelayaran ke India ada yang singgah dan tinggal di Sriwijaya. Di antaranya ialah I'tsing. Sebelum menuju ke India ia mempersiapkan diri dengan mempelajari bahasa Sanskerta selama 6 bulan (1671); setelah pulang dari India ia tinggal selama 4 tahun (681-685) untuk menerjemahkan agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Di samping itu juga ada pendeta dari Tibet, yang bernama Atica yang datang dan tinggal di Sriwijaya selama 11 tahun (1011-1023) dalam rangka belajar agama Buddha dari seorang guru besar Dharmapala dan Sakyakirti.

D. Kerajaan Mataram Kuno

Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung, seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi-Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Bumi Mataram diperintah oleh dua wangsa atau dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu (di bagian utara) dan Dinasti Syailendra yang beragama Buddha (di bagian selatan). Dalam hal pembuatan candi agaknya kedua dinasti dapat bekerja sama, tetapi di bidang politik terjadi perebutan kekuasaan. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006; Soekmono, 1984)



Gambar 5. Peta Kekuasaan Mataram Kuno
Sumber: wikipedia.org

~ Ufi Saraswati ~

Kehidupan Politik

Pada mulanya yang berkuasa di Mataram adalah Dinasti Sanjaya. Bukti adanya kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah dapat diketahui dari Prasasti Canggal, di kaki Gunung Wukir, Magelang. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Sanjaya berangka tahun berbentuk candrasengkala berbunyi "srutiindriyarasa" atau tahun 654 Saka = 732 M (dengan huruf Pallawa bahasa Sanskerta). Isi pokok Prasasti Canggal adalah pendirian sebuah lingga di bukit Stirangga. Sang Raja Sanjaya mendirikan lingga yang ditandai dengan tanda-tanda di bukit yang bernama Stirangga untuk keselamatan rakyatnya.

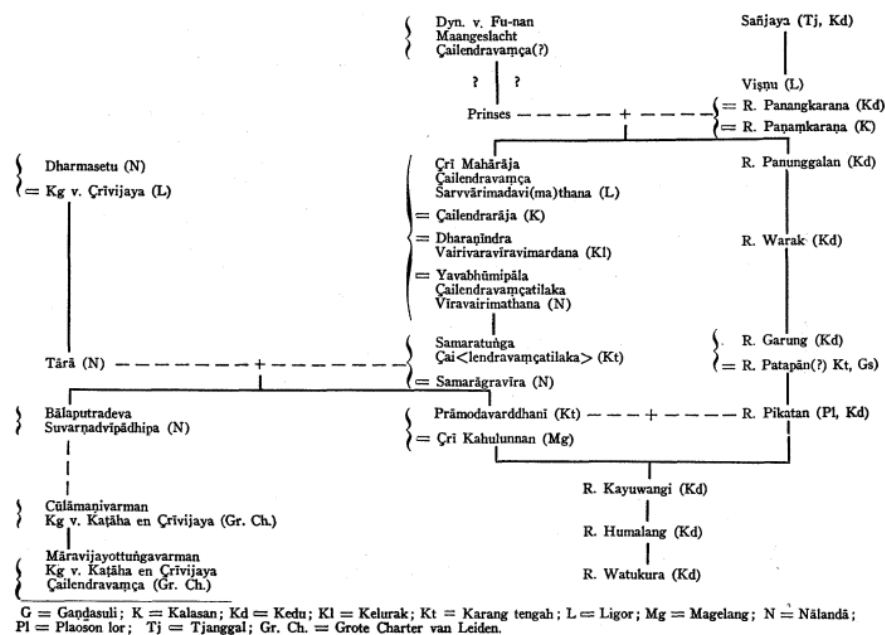
Petunjuk lain tentang Sanjaya di samping Prasasti Canggal juga Prasasti Mantyasih atau Prasasti Kedu yang dibuat oleh raja Balitung yang menyebutkan bahwa nama Sanjaya adalah raja pertama (wangsakarta) dengan ibukota di Mdang ri Poh Pitu. Dalam prasasti itu disebutkan raja-raja yang pernah memerintah.

Prasasti Dinoyo di Jawa Timur tahun 706 menyebutkan adanya Raja Gajayana yang mendirikan tempat pemujaan Dewa Agastya (perwujudan Siwa sebagai Mahaguru) diwujudkan pula dalam bentuk lingga. Di samping itu juga mendirikan Candi Badut dengan berlanggam candi Jawa Tengah. Kemudian Prasasti Kalasan tahun 778 M menyebutkan bahwa keluarga Syailendra berhasil membujuk Panangkaran untuk mendirikan bangunan suci untuk Dewi Tara (istri Buddha) dan sebuah biara untuk para pendeta. Panangkaran juga menghadiahkan Desa Kalasan kepada Sanggha. Dalam Prasasti Balitung yang berangka tahun 907 M disebutkan nama keluarga raja-raja keturunan Sanjaya memuat nama Panangkaran. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada waktu itu dinasti Sanjaya dan Syailendra sama-sama berperan di Jawa Tengah. Dinasti Sanjaya di bagian utara dengan mendirikan candi Hindu, seperti Gedong Songo di Ungaran dan Candi Dieng di dataran tinggi Dieng. Sedangkan Dinasti Syailendra di bagian selatan dengan mendirikan candi Buddha, seperti Borobudur, Mendut, dan Kalasan. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006; Soekmono, 1984)

Dalam Prasasti Kelurak (di daerah Prambanan) tahun 782 disebutkan tentang pembuatan acara Manjusri sebagai perwujudan Buddha, Dharma dan Sanggha yang dapat disamakan dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Mungkin sekali bangunan sucinya ialah Candi Lumbung yang terletak di sebelah utara Prambanan. Raja yang

memerintah pada waktu itu ialah Indra. Pengganti Indra yang terkenal ialah Smaratungga yang dalam pemerintahannya mendirikan Candi Borobudur tahun 824, (yang merupakan salah satu bangunan keajaiban dunia). Di bawah pemerintahan putri Smaratungga, yakni Pramodhawardani dinasti Syailendra dan Sanjaya menjadi satu karena perkawinannya dengan Rakai Pikatan, yang kemudian membangun candi-candi Buddha dan Hindu. Seperti Candi Plaosan yang merupakan candi Buddha banyak disebut nama Sri Kahulunan Sri Pikatan, dapat diartikan nama Sri Kahulunan adalah gelar Pramodhawardani. Rakai Pikatan mendirikan candi Hindu yakni Candi Prambanan (Roro Jonggrang) yang sangat megah. Dengan dibangunnya candi Hindu dan Buddha yang berdekatan, menggambarkan adanya kerukunan beragama di Bumi Mataram.

Pada tahun 856 terjadi perubahan besar di Jawa Tengah Balaputra Dewa (adik Pramodhawardani) yang pusat pemerintahannya di pegunungan selatan yang terkenal dengan Istana Ratu Boko, berusaha untuk merebut kekuasaan. Namun ia malah tersingkir dari Jawa Tengah dan akhirnya melarikan diri ke Sumatra (menjadi raja di Sriwijaya). Di Jawa Tengah kemudian sepenuhnya diperintah oleh Dinasti Sanjaya. Raja terakhir adalah Wawa dan digantikan Empu Sendok yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.



Gambar 6. Silsilah Raja-raja Kerajaan Mataram Kuno
 Sumber: Bosch, 1982

~ Ufi Saraswati ~

Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan

© Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Kehidupan Sosial Ekonomi

Kehidupan ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian. Kondisi alam bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomian dengan pesat. Pada masa Balitung aktivitas perhubungan dan perdagangan dikembangkan melalui Sungai Bengawan Solo. Pada Prasasti Wonogiri (903) bahwa desa-desa yang terletak di kanan-kiri sungai dibebaskan dari pajak dengan catatan harus menjamin kelancaran lalu-lintas lewat sungai tersebut.

Kehidupan Agama dan Kebudayaan

Bumi Mataram diperintah oleh dua dinasti, yakni Dinasti Sanjaya dan Dinasti Syailendra. Dinasti Sanjaya beragama Hindu dengan pusat kekuasaannya di utara dengan hasil budayanya berupa candi-candi seperti Gedong Songo dan Dieng. Dinasti Syailendra beragama Buddha dengan pusat kekuasaannya di daerah selatan, dan hasil budayanya dengan mendirikan candi-candi seperti candi Borobudur, Mendut, dan Pawon. Semula terjadi perebutan kekuasaan namun kemudian terjalin persatuan ketika terjadi perkawinan antara Pikatan (Sanjaya) yang beragama Hindu dengan Pramodhawardhani (Syailendra) yang beragama Buddha. Sejak itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Hal ini menunjukkan betapa besar jiwa toleransi bangsa Indonesia. Toleransi ini merupakan salah sifat kepribadian bangsa Indonesia yang wajib kita lestarikan agar tercipta kedamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan.

E. Dinasti Isana di Jawa Timur

Seperti telah dikemukakan di depan bahwa pada abad ke-10 pusat pemerintahan di Jawa Tengah yang dipindahkan ke Jawa Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pendapat lama menyatakan karena (1) bencana alam, yakni meletusnya gunung berapi, dan (2) akibat banyak tenaga laki-laki yang dipekerjakan untuk membuat candi sehingga sawah menjadi terbengkalai. Pendapat baru menyatakan adanya dua faktor, yakni (1) keadaan alam; alam Bumi Mataram tertutup secara alamiah dari dunia luar sehingga sulit untuk berkembang. Sebaliknya alam Jawa Timur lebih terbuka untuk mengembangkan aktivitas perdagangan dengan dunia luar. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas dapat dipakai sebagai sarana perhubungan dan

perdagangan antara pedalaman dan pantai. Di samping itu tanah di Jawa Timur masih subur dibandingkan dengan Jawa Tengah yang sudah lama dimanfaatkan; (2) masalah politik; yakni untuk menghindarkan diri dari serangan Sriwijaya. Sebab setelah Dinasti Syailendra terdesak dari Jawa Tengah dan menetap di Sumatra, merupakan ancaman yang serius. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006; Soekmono, 1984)

Kehidupan Politik

Pemindahan kekuasaan ke Jawa Timur dilakukan oleh raja Empu Sendok, dan membentuk dinasti baru yakni Isana. Nama Isana diambil dari gelar resmi Empu Sendok yakni Sri Maharaja Rake Hino Sri Isanawikramatunggadewa. Wilayah kekuasaan Empu Sendok meliputi Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di timur, Surabaya di utara dan Malang di selatan. Empu Sendok memegang pemerintahan dari tahun 929–947 dengan pusat pemerintahannya di Watugaluh. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana dengan melakukan berbagai usaha untuk kemakmuran rakyat. Di antaranya ialah membuat bendungan-bendungan untuk perairan, dan memberikan hadiah-hadiah tanah untuk pemeliharaan bangunan-bangunan suci. Di samping itu juga memerintahkan untuk mengubah sebuah kitab agama Buddha aliran Tantrayana yang diberi judul *Sang Hyang Kamahayanikan*. Setelah Empu Sendok meninggal kemudian digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isanatunggawijaya. Putri ini kawin dengan Lokapala, dari pernikahannya lahirlah seorang putra yang bernama Makutawangsawardana yang meneruskan takhta ibunya. Setelah Makutawangsawardana meninggal yang menggantikannya ialah Dharmawangsa (990–1016). Dalam pemerintahannya ia berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang hidup dari pertanian dan perdagangan.

Pada saat itu pusat perdagangan di Indonesia dikuasai oleh Sriwijaya, maka Dharmawangsa berusaha untuk menyerang Sriwijaya dengan tujuan untuk menguasai daerah Sriwijaya bagian selatan (Selat Sunda). Akan tetapi, selang beberapa tahun kemudian Sriwijaya bangkit mengadakan serangan balasan. Dalam hal ini Sriwijaya mengadakan kerja sama dengan kerajaan Worawari (kerajaan asal di Jawa). Serangan Worawari sangat tepat, yakni ketika Dharmawangsa melangsungkan upacara pernikahan putrinya dengan Airlangga (1016). Dharmawangsa beserta seluruh

pembesar istana mengalami pralaya, tetapi Airlangga berhasil meloloskan diri beserta pengiringnya yang setia Narotama, menuju hutan Wonogiri diringi juga oleh para pendeta. Selama tiga tahun (1016-1019) Airlangga digembleng lahir dan batin oleh para pendeta. Atas tuntutan rakyat dan pendeta, Airlangga bersedia menjadi raja menggantikan Dharmawangsa. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006; Soekmono, 1984)

Pada tahun 1019, Airlangga dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Rake Halu Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramatunggadewa. Tugas Airlangga ialah menyatukan kembali daerah kekuasaan semasa Dharmawangsa dan usaha ini dapat berhasil dengan baik. Ibukota kerajaan pada tahun 1031 di Wutan Mas, kemudian dipindahkan ke Kahuripan pada tahun 1037. Selanjutnya Airlangga melakukan pembangunan di segala bidang demi kemakmuran rakyatnya. Pada tahun 1042 Airlangga mengundurkan diri dari takhta dan menjadi seorang petapa dengan nama Jatinindra atau Resi Jatayu. Sebelumnya Airlangga menobatkan putrinya, Sri Sanggramawijaya namun menolak dan ia juga menjadi seorang petapa dengan nama Dewi Kili Suci. Akhirnya kerajaan dibagi menjadi dua yakni Jenggala dengan ibukota Kahuripan dan Panjalu yang dikenal dengan nama Kediri. Jenggala diperintah oleh Gorasakan, sedangkan Kediri oleh Samarawijaya (keduanya terlahir dari selir). (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006; Soekmono, 1984)

Kehidupan Sosial-Ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kerajaan di Jawa Timur ini cukup baik, karena mendapat perhatian dari raja-raja yang memerintah. Di antaranya Airlangga yang memerintahkan membuat tanggul di Waringit Pitu (Prasasti Kalegen 1037) dan waduk-waduk di beberapa bagian Sungai Brantas untuk pengairan sawah-sawah dan mengurangi bahaya banjir. Untuk memajukan aktivitas perdagangan, Airlangga juga mengadakan perbaikan pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya di sungai Brantas; sedangkan pelabuhan Kembang Putih di Tuban diberikan hak-hak istimewa.

F. Kerajaan Kediri

Kehidupan Politik

Dalam persaingan antara Panjalu dengan Kediri, ternyata Kediri yang unggul dan menjadi negara yang besar kekuasaannya. Raja terbesar dari Kerajaan Kediri adalah Jayabaya (1135-1157). Jayabaya ingin mengembalikan kejayaan seperti masa Airlangga dan ternyata ini dapat berhasil, Panjalu dan Jenggala dapat bersatu kembali. Lencana kerajaan memakai simbol Garuda Mukha, simbol Airlangga. Pada masa pemerintahannya kesusastraan diperhatikan. Empu Sedah dan Empu Panuluh menggubah karya sastra Kitab Bharatayudha, yang menggambarkan peperangan antara Pandawa melawan Kurawa; tetapi sebenarnya merupakan peperangan antara Jenggala melawan Kediri. Empu Panuluh juga menggubah Kakawin Hariwangsa dan Gatotkacasraya. Jayabaya juga terkenal sebagai pujangga yang ahli meramal kejadian masa depan, terutama yang akan menimpa Tanah Jawa, ramalannya terkenal dengan "Jangka Jayabaya".



Gambar 7. Peta Wilayah Kerajaan Panjalu (Kediri) dan Jenggala.

Sumber: <https://goo.gl/images/kf21QU>

Raja Kediri yang juga memerhatikan kesusastraan ialah Kameswara. Empu Tan Akung menulis Kitab Wartasancaya dan Lubdaka sedangkan Empu Dharmaja menulis Kitab Kakawin Smaradahana. Di dalam Kitab Smaradahana ini Kameswara dipuji-puji sebagai titisan Kumajaya, permaisurinya ialah Sri Kirana atau putri Candrakirana. Raja Kediri yang terakhir ialah Kertajaya yang pada tahun 1222 kekuasaannya dihancurkan oleh Ken Arok, berakhirlah kerajaan Kediri dan muncul kerajaan Singasari. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006)

Kehidupan Sosial Ekonomi

Pada masa Kejayaan Kediri, perhatian raja terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat juga besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan karya-karya sastra saat itu, yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat itu. Diantaranya Kitab Lubdaka yang berisi ajaran moral, bahwa tinggi rendahnya martabat manusia tidak diukur berdasarkan asal dan kedudukan, melainkan berdasarkan kelakuannya. Dapat pula diketahui bahwa kehidupan sosial masyarakat Kediri terwujud dalam hal berikut ini (1) rakyat Kediri pada umumnya memiliki tempat tinggal yang baik, bersih dan rapi, (2) hukuman yang dilaksanakan ada dua macam, yakni hukuman denda (berupa emas) dan hukuman mati (khususnya bagi pencuri dan perampok).

Berdasarkan kronik-kronik Cina, maka kehidupan perekonomian rakyat Kediri dapat dikemukakan antara lain (1) rakyat hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, (2) Kediri banyak menghasilkan beras, (3) barang-barang dagangan yang laku di pasaran saat itu, antara lain, emas, perak, gading dan kayu cendana, (4) pajak rakyat berupa hasil bumi, seperti beras, dan palawija.

Kehidupan Kebudayaan

Di bidang kebudayaan khususnya sastra, di Kahuripan dan Kediri berkembang pesat, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pada masa Dharmawangsa, berhasil disadur Kitab Mahabarata ke dalam bahasa Jawa Kuno yang disebut Kitab Wirataparwa. Selain itu juga disusun kitab hukum yang bernama Siwasasana.
- b. Di zaman Airlangga, disusun Kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa.
- c. Masa Jayabaya, berhasil digubah Kitab Bharatayudha oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Di samping itu Empu Panuluh juga menulis Kitab Hariwangsa dan Gatotkacasraya.
- d. Masa Kameswara, berhasil ditulis Kitab Smaradhahana oleh Empu Dharmaja. Kitab Lubdaka dan Wertasancaya oleh Tan Akung.

G. Kerajaan Singhasari

Kehidupan Politik

Ken Arok (1222-1227). Pendiri Kerajaan Singasari ialah Ken Arok. Ken Arok kemudian mengangkat dirinya menjadi raja Singasari dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru yakni dinasti Rajasa (Rajasawangsa) atau Girindra (Girindra-wangsa). Ken Arok hanya memerintah selama lima tahun (1222-1227). Pada tahun 1227 ia dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati (anak tiri Ken Arok). Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa-Buddha.



Gambar 8. Peta Wilayah Kekuasaan Singasari.

Sumber: <https://goo.gl/images/xMCTHS>

Anusapati (1227-1248). Dengan meninggalnya Ken Arok maka takhta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Dalam jangka waktu pemerintahannya yang lama, Anusapati tidak melakukan pembaharuan, karena Anusapati larut dengan kesenangannya sendiri yakni menyabung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai juga ke Tohjoyo (putra Ken Arok dengan Ken Umang). Tohjoyo mengetahui bahwa Anusapati suka menyabung ayam, maka diundangnya Anusapati ke Gedong Jiwa (tempat kediaman Tohjoyo) untuk mengadakan pesta menyabung ayam. Pada saat Anusapati sedang asyik menyaksikan aduan ayamnya, secara tiba-tiba Tohjoyo menyabut keris Empu Gandring yang dibawanya dan langsung menusuk Anusapati. Dengan demikian meninggallah Anusapati dan didharmakan di Candi Kidul.

~ Ufi Saraswati ~

Tohjoyo (1248). Dengan meninggalnya Anusapati, maka takhta Kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Namun, Tohjoyo memerintah Kerajaan Singasari tidak lama, sebab anak Anusapati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggawuni berhasil menggulingkan Tohjoyo dan kemudian menduduki singgasana.

Ranggawuni (1248-1268). Ranggawuni naik takhta kerajaan Singasari pada tahun 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka (anak dari Mahesa Wongateleng) yang diberi kedudukan sebagai Ratu Angabhaya dengan gelar Narasinghamurti. Di dalam pemerintahannya, pemerintahan mereka membawa ketenteramandan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1254, Wisnuwardhana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai yuwaraja (rajamuda) dengan maksud mempersiapkannya menjadi raja besar di Kerajaan Singasari. Pada tahun 1268 Wisnuwardha meninggal dunia dan didharmakan di Jajaghu atau Candi Jago sebagai Buddha Amogapasa dan di Candi Waleri sebagai Siwa.

Kertanegara (1268-1292). Kertanegara adalah raja Singasari terakhir dan terbesar, karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik takhta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh tiga orang mahamentri yaitu Mahamentri I Hino, Mahamentri I Halu dan Mahamentri I Sirikan. Untuk dapat mewujudkan gagasan penyatuan Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan yang baru, seperti Patih Raganata digantikan oleh Patih Aragani. Banyak Wide dijadikan Bupati di Sumenep (Madura) dengan gelar Aria Wiaraja. Setelah Jawa dapat diselesaikan, kemudian perhatian ditujukan ke daerah lain. Kertanegara mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu 1275 yang berhasil menguasai Kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan mengirimkan patung Amogapasa ke Dharmasraya atas perintah raja Kertanegara. Tujuannya untuk menguasai Selat Malaka. Selain itu juga menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura (Kalimantan Barat) dan Gurun (Maluku). Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan raja Champa, dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kublai Khan dari Dinasti Mongol. Kublai Khan menuntut rajaraja di daerah selatan termasuk Indonesia mengakuinya sebagai yang dipertuan. Kertanegara menolak dengan melukai utusannya yang bernama Mengki. Tindakan Kertanegara ini

membuat Kublai Khan marah besar dan bermaksud menghukumnya dengan mengirikan pasukannya ke Jawa. Mengetahui sebagian besar pasukan Singasari dikirim untuk menghadapi serangan Mongol, maka Jayakatwang (Kediri) menggunakan kesempatan untuk menyerangnya. Serangan dilancarkan dari dua arah, yakni dari arah utara merupakan pasukan pancingan dan dari arah selatan merupakan pasukan inti. Pasukan Kediri dari arah selatan dipimpin langsung oleh Jayakatwang dan berhasil masuk istana dan menemukan Kertanegara berpesta pora dengan para pembesar istana. Kertanegara beserta pembesar-pembesar istana tewas dalam serangan tersebut. Ardharaja akhirnya berbalik memihak kepada ayahnya (Jayakatwang) sedangkan Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura dengan maksud minta perlindungan dan bantuan kepada Aria Wiraraja. Atas bantuan Aria Wiraraja, Raden Wijaya mendapat pengampunan dan mengabdikan kepada Jayakatwang serta diberikan sebidang tanah yang bernama Tanah Terik. Dengan gugurnya Kertanegara pada tahun 1292, Kerajaan Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Ini berarti berakhirilah kekuasaan Kerajaan Singasari. Sesuai dengan agama yang dianutnya, Kertanegara kemudian didharmakan sebagai Siwa-Buddha (Bairawa) di Candi Singasari. Sedangkan arca perwujudannya dikenal dengan nama Joko Dolog, yang sekarang berada di Taman Simping, Surabaya. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006; Soekmono, 1984)

Kehidupan Sosial Ekonomi

Ketika Ken Arok menjadi Akuwu di Tumapel, ia berusaha meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya. Terjaminnya kehidupan sosial masyarakat Tumapel, mengakibatkan bergabungnya daerah-daerah di sekitarnya. Perhatian Ken Arok bertambah besar, ketika ia menjadi raja di Singasari sehingga rakyat hidup dengan aman dan damai untuk mencapai kesejahteraan. Akan tetapi ketika masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakatnya kurang mendapatkan perhatian. Baru pada masa pemerintahan Wisnuwardhana, kehidupan sosial masyarakatnya teratur baik. Rakyat hidup dengan tenteram dan damai. Begitu juga masa pemerintahan Kertanegara. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat Kerajaan Singasari hidup dari pertanian, pelayaran dan perdagangan. Kehidupan Kebudayaan Kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-

candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi, di antaranya Candi Kidal, Candi Jago dan Candi Singasari. Patung, antara lain Patung Ken Dedes sebagai perwujudan dari Prajnyaparamita lambang kesempurnaan ilmu, Patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolog. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006; Soekmono, 1984)

H. Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit terletak di sekitar sungai Brantas, dengan pusatnya di daerah Mojokerto. Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan merupakan kerajaan terbesar Indonesia. Majapahit disebut juga sebagai Negara Kesatuan Kedua.

Kehidupan Politik

Raden Wijaya (1292-1309). Kerajaan Majapahit lahir dalam suasana perubahan besar dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1292 Kertanegara gugur oleh pengkhianatan Jayakatwang, Singasari hancur dan digantikan oleh Kediri. R. Wijaya terdesak oleh serangan tentara Jayakatwang di medan utara dan berhasil melarikan diri serta mendapat perlindungan dari Kepala Desa Kudadu. Selanjutnya berhasil menyeberang ke Madura minta perlindungan dan bantuan kepada Bupati Sumenep, Aria Wiraraja.

Atas saran dan jaminan Aria Wiraraja, R. Wijaya mengabdikan diri kepada Jayakatwang dan memperoleh tanah di desa Terik yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Majapahit. Tentara Kublai Khan sebanyak 200.000 orang di bawah pimpinan Shih Pie, Ike Mase, dan Kau Shing datang untuk menghukum Kertanegara. R. Wijaya bergabung dengan tentara Cina dan mengadakan serangan ke Kediri, karena Cina tidak mengetahui terjadinya perubahan kekuasaan di Jawa Timur. Setelah R. Wijaya dengan bantuan tentara Kublai Khan berhasil mengalahkan Jayakatwang, ia menghantam tentara asing tersebut. Serangan mendadak yang tidak terduga sebelumnya, memaksa tentara Kublai Khan meninggalkan Jawa Timur terburu-buru dengan sejumlah besar korban.

Akhirnya R. Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana (1292-1307). Untuk menjaga ketenteraman kerajaan, maka R. Wijaya mengadakan konsolidasi dan mengatur pemerintahan.

Orang-orang yang pernah berjasa dalam perjuangan diberi kedudukan dalam pemerintahan. Misalnya, Aria Wiraraja diberi tambahan wilayah di Lumajang sampai Blambangan, desa Kudadu dijadikan desa perdikan (bebas pajak dan mengatur daerahnya sendiri). Demikian juga teman seperjuangannya yang lain, diberi kedudukan, ada yang dijadikan menteri, kepala wilayah, dan sebagainya. Untuk memperkuat kedudukannya, keempat putri Kertanegara dijadikan istrinya, yakni Dewi Tribhuanaeswari, Dewi Narendraduhita, Dewi Prajnaparamita dan Dewi Gayatri. Tidak lama kemudian tentara Ekspedisi Pamalayu di bawah pimpinan Kebo Anabrang kembali membawa dua putri yakni Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak diambil istri oleh R. Wijaya; sedangkan Dara Jingga kawin dengan keluarga raja yang mempunyai anak bernama Adityawarman. Dialah yang kelak menjadi raja di Kerajaan Melayu. Demikianlah usaha-usaha yang dilakukan oleh R. Wijaya dalam upaya mengatur dan memperkuat kekuasaan pada masa awal Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1309 R. Wijaya meninggal dunia dan didharmakan di Candi Simping (Sumberjati, Blitar) dalam perwujudan Hariwara (Siwa dan Wisnu dalam satu arca).

Jayanegara (1309-1328). R. Wijaya kemudian digantikan oleh putranya Kalagemet dengan gelar Jayanegara (1309-1328), putra R. Wijaya dengan Dara Petak. Pada masa ini timbul kekacauan di Majapahit, karena pemerintahan Jayanegara yang kurang berbobot dan rasa tidak puas dari pejuang-pejuang Majapahit semasa pemerintahan R. Wijaya.

Kekacauan berupa empat pemberontakan yang dapat membahayakan negara, yakni sebagai berikut.

- a. Pemberontakan Ranga Lawe (1309) yang berkedudukan di Tuban tidak puas karena ia mengharapkan dapat menjadi patih di Majapahit, sedangkan yang diangkat adalah Nambi.
- b. Pemberontakan Lembu Sora (1311), karena hasutan Mahapati yang merupakan musuh dalam selimut Jayanegara.
- c. Pemberontakan Nambi (1316), karena ambisi ayahnya Aria Wiraraja agar Nambi menjadi raja. Semua pemberontakan tersebut dapat dipadamkan.
- d. Pemberontakan Kuti (1319), merupakan pemberontakan yang paling membahayakan, karena Kuti dapat menduduki istana kerajaan dan Jayanegara terpaksa menyingkir ke Bedander. Namun pasukan Bayangkari kerajaan di bawah

pimpinan Gajah Mada berhasil merebut kembali istana. Jayanegara dapat kembali ke istana lagi dan berkuasa hingga tahun 1328. Sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi patih di Kahuripan dan kemudian di Daha. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Mustopo dkk., 2006; Soekmono, 1984)

Tribhuanatunggadewi (1328-1350). Pada tahun 1328 Jayanegara wafat, karena tidak meninggalkan putra maka takhta kerajaan diserahkan kepada Gayatri. Oleh karena Gayatri telah menjadi Bhiksuni, maka yang tampil adalah putrinya Bhre Kahuripan yang bertindak sebagai wali ibunya. Bhre Kahuripan bergelar Tribhuanatunggadewi. Pemerintahannya masih dirongrong pemberontakan, yakni pemberontakan Sadeng dan Keta. Namun pemberontakan tersebut berhasil dihancurkan oleh Gajah Mada. Sebagai tanda penghargaan, pada tahun 1333 Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Majapahit, menggantikan Arya Tadah yang sudah tua. Pada waktu penobatannya, Gajah Mada mengucapkan "Sumpah Palapa" (*Tan Amukti Palapa*). Isinya, Gajah Mada bersumpah tidak akan makan buah palapa, sebelum seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Maksudnya Gajah Mada tidak akan hidup enak-enak sebelum seluruh Nusantara berhasil dipersatukan di bawah panji-panji Majapahit. Dalam usaha menyatukan seluruh Nusantara, Gajah Mada dibantu oleh Empu Nala dan Adityawarman. Mula-mula menaklukkan Bali (1334), selanjutnya satu per satu kerajaan-kerajaan di Nusantara berhasil dipersatukan

Hayam Wuruk (1350-1389). Pada tahun 1350 Gayatri wafat, maka Tribhuanatunggadewi turun takhta dan digantikan oleh putranya yakni Hayam Wuruk dengan gelar Rajasanegara. Pada masa pemerintahannya bersama Patih Gajah Mada kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Pemerintahan terlaksana secara teratur, baik di tingkat pusat (ibukota), tingkat menengah (vasal) dan tingkat desa. Sistem pemerintahan daerah (tingkat menengah dan desa) tidak berubah, sedangkan di tingkat pusat diatur sebagai berikut.

- a. Dewan Sapta Prabu, merupakan penasihat raja yang terdiri atas kerabat keraton, dengan jabatan Rakryan I Hino, Rakryan I Halu dan Rakryan I Sirikan.
- b. Dewan Panca Ring Wilwatikta, merupakan lembaga pelaksana pemerintahan (lembaga eksekutif) semacam Dewan Menteri, terdiri atas Rakryan Mahapatih,

Rakryan Tumenggung, Rakryan Demang, Rakryan Rangga, dan Rakryan Kanuruhan.

- c. Dewan Nayapati (lembaga Yudikatif) yang mengurus peradilan.
- d. Dharmadyaksa, lembaga yang mengurus keagamaan, terdiri atas Dharmadyaksa ring Kasaiwan untuk agama Hindu dan Dharmadyaksa ring Kasogatan untuk agama Buddha.

Dengan demikian pada masa Majapahit penganut agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan, rukun dan damai. "Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharmamangrawa". Inilah semboyan rakyat Majapahit dalam menciptakan persatuan dan kesatuan sehingga muncul sebagai kerajaan besar Nusantara. Di tingkat tengah terdapat pemerintah daerah yang dikepalai oleh seorang raja kecil atau bupati. Mereka dapat mengatur daerahnya secara otonom, tetapi setiap tahun berkewajiban datang ke ibukota sebagai tanda tetap setia dan tunduk kepada pemerintah pusat Majapahit. Daerah-daerah demikian disebut mancanegara, yang berarti negara (daerah) di luar daerah inti kerajaan. Jadi untuk mengikat hubungan, setiap tahun daerah taklukan harus mengirim upeti ke Majapahit, di samping juga ada petugas Majapahit yang berkeliling ke daerah-daerah. Sedangkan untuk memantau ketertiban dan keamanan dikirimlah Duta Nitiyasa (petugas sandi) ke seluruh Nusantara. Di tingkat bawah, terdapat pemerintahan desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Pemerintahan dilakukan menurut hukum adat desa itu sendiri. Struktur pemerintahan desa masih asli dan kepala desa dipilih secara demokratis.

Dengan kondisi pemerintahan yang stabil dan keamanan yang mantap, Sumpah Palapa Gajah Mada dapat diwujudkan. Satu persatu wilayah Nusantara dapat menyatu dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Dalam Kitab Negara Kertagama secara jelas disebutkan daerah-daerah yang masuk wilayah kekuasaan Majapahit ialah Jawa, Sumatra, Tanjungpura (Kalimantan), Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian, dan Semenanjung Malaka dan daerah-daerah pulau di sekitarnya. Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang jauh, seperti Siam, Champa, dan Cina. Negara-negara tersebut dianggap sebagai "Mitreka Satata" (negara sahabat yang berkedudukan sama). Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389, kemudian digantikan oleh putrinya Dyah Kusumawardhani yang didampingi oleh suaminya

Wikramawardhana (1389-1429). Hayam Wuruk dengan isteri yang lain mempunyai anak Bhre Wirabhumi yang telah diberi kekuasaan sebagai penguasa daerah (Bupati) di Blambangan. Akan tetapi ternyata Bhre Wirabumi menuntut takhta Majapahit, sehingga menimbulkan perang saudara (Peregreg) tahun 1401-1406. Pada akhirnya Bhre Wirabhumi kalah dan perang saudara tersebut mengakibatkan lemahnya kekuasaan Majapahit.

Setelah Wikramawardhana meninggal (1429) kemudian digantikan oleh Suhita yang memerintah hingga 1447, dan sampai akhir abad ke-15 masih ada raja-raja yang memerintah namun telah suram, karena tidak ada persatuan dan kesatuan. Sehingga daerah-daerah jajahan satu demi satu melepaskan diri. Para bupati di pantai utara Jawa telah menganut agama Islam, seperti Demak, Gresik, dan Tuban. Satu persatu memisahkan diri, demikian juga daerah di luar Jawa tidak mengirim upeti ke Majapahit.

Majapahit terus mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang jauh, seperti Siam, Champa, dan Cina. Negara-negara tersebut dianggap sebagai "Mitreka Satata" (negara sahabat yang berkedudukan sama). Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389, kemudian digantikan oleh putrinya Dyah Kusumawardhani yang didampingi oleh suaminya Wikramawardhana (1389-1429). Hayam Wuruk dengan isteri yang lain mempunyai anak Bhre Wirabhumi yang telah diberi kekuasaan sebagai penguasa daerah (Bupati) di Blambangan. Akan tetapi ternyata Bhre Wirabumi menuntut takhta Majapahit, sehingga menimbulkan perang saudara (Peregreg) tahun 1401-1406.

Pada akhirnya Bhre Wirabhumi kalah dan perang saudara tersebut mengakibatkan lemahnya kekuasaan Majapahit. Setelah Wikramawardhana meninggal (1429) kemudian digantikan oleh Suhita yang memerintah hingga 1447, dan sampai akhir abad ke-15 masih ada raja-raja yang memerintah namun telah suram, karena tidak ada persatuan dan kesatuan. Sehingga daerah-daerah jajahan satu demi satu melepaskan diri. Para bupati di pantai utara Jawa telah menganut agama Islam, seperti Demak, Gresik, dan Tuban. Satu persatu memisahkan diri, demikian juga daerah di luar Jawa tidak mengirim upeti ke Majapahit. Majapahit terus mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Majapahit adalah sebagai berikut.

- a. Tidak ada lagi tokoh-tokoh yang kuat di pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk.
 - b. Terjadinya perang saudara (Paregreg).
 - c. Banyak daerah-daerah jajahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit
- Dalam hal ini ada dua pendapat: (1) Tahun 1478, yakni adanya serangan Girindrawardana dari Kediri. Peristiwa tersebut diberi candrasengkala "Hilang Sirna Kertaning Bhumi" yang berarti tahun 1400 Saka/1478 M; (2) Tahun 1526, yakni adanya serangan tentara dari Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Serangan Demak ini menandai berakhirnya kekuasaan Hindu di Jawa.



Gambar 9. Peta Kekuasaan Majapahit

Sumber: wikipedia.org

Kehidupan Sosial Ekonomi

Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai dan tenteram. Dalam Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian juga peradilan, dilaksanakan secara ketat; siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Majapahit hidup dari pertanian, dan

~ Ufi Saraswati ~

Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan

© Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

perdagangan. Prasarana perekonomian dibangun, seperti jalan, lalu lintas sungai dan pelabuhan. Pelabuhan yang besar antara lain Surabaya, Gresik, Tuban, dan Sedayu. Barang dagangan yang diperjualbelikan antara lain beras, rempah-rempah, dan kayu cendana.

Kehidupan Kebudayaan

Dalam kondisi kehidupan yang aman, dan teratur, mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut.

- a. Candi. Banyak candi peninggalan Majapahit, seperti Candi Penataran (di Blitar), Candi Brahu, Candi Bentar (Waringin Lawang), Candi Bajang Ratu, Candi Tikus dan bangunan-bangunan kuno lainnya seperti Segaran, Patilasan Wali Songo, dan Makam Troloyo (di Trowulan).
- b. Kesusastraan. Zaman Majapahit bidang sastra sangat berkembang. Hasil sastranya dapat dibagi menjadi zaman Majapahit awal dan Majapahit akhir. Sastra Majapahit Awal meliputi: (1) Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Isinya tentang keadaan kota Majapahit, daerah-daerah jajahan dan perjalanan Hayam Wuruk keliling ke daerah-daerah; (2) Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Di dalam Kitab ini terdapat ungkapan yang berbunyi; "Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrawa", yang kemudian dipakai sebagai motto negara kita; (3) Kitab Arjunawijaya, karangan Empu Tantular. Isinya tentang raksasa yang dikalahkan oleh Arjuna Sasrabahu; (4) Kitab Kunjarakarna, tidak diketahui pengarangnya. Jenis sastra zaman akhir Majapahit antara lain
 - 1) Kitab Pararaton, isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit.
 - 2) Kitab Sudayana, isinya tentang Peristiwa Bubat.
 - 3) Kitab Sorandakan, isinya tentang pemberontakan Sora.
 - 4) Kitab Ranggalawe, isinya tentang pemberontakan Ranggalawe.
 - 5) Kitab Panjiwijayakrama, isinya riwayat R. Wijaya sampai menjadi raja Majapahit.
 - 6) Kitab Usana Jawa, tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Aryadamar.

- 7) Tantu Panggelaran, tentang pemindahan gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa.

I. Kerajaan Sunda

Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 Masehi di bagian Barat pulau Jawa (Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang). Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian sekitar abad ke-14 diketahui kerajaan ini telah beribukota di Pakuan Pajajaran serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama di Kalapa dan Banten.

Berdasarkan Prasasti Kebonkopi II, yang berbahasa Melayu Kuno dengan tarikh 932, menyebutkan seorang "Raja Sunda menduduki kembali tahtanya". Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Raja Sunda telah ada sebelumnya. Sementara dari sumber Tiongkok pada buku Zhufan Zhi yang ditulis pada tahun 1178 oleh Zhao Rugua menyebutkan terdapat satu kawasan dari San-fo-ts'i yang bernama Sin-to kemudian dirujuk kepada Sunda.



Gambar 10. Wilayah Kerajaan Sunda
Sumber: Wikipedia.org

Menurut naskah Wangsakerta, naskah yang oleh sebagian orang diragukan keasliannya serta diragukan sebagai sumber sejarah karena sangat sistematis, menyebutkan Sunda merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 (591 Saka).

Kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan Tarumanagara. Raja Tarumanagara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan Tirthabumi (666-669 M), menikah dengan Déwi Ganggasari dari Indraprahasta. Dari Ganggasari, beliau memiliki dua anak, yang keduanya perempuan. Déwi Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, sedangkan yang kedua, Sobakancana, menikah dengan Dapunta Hyang Sri Janayasa, yang selanjutnya mendirikan Kerajaan Sriwijaya.

Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantunya, Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh, Wretikandayun (612-702) memberontak, melepaskan diri dari Tarumanagara, serta mendirikan Kerajaan Galuh yang mandiri. Tarusbawa juga menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanagara, dan selanjutnya memindahkan kekuasaannya ke Sunda, di hulu sungai Cipakancilan dimana di daerah tersebut sungai Ciliwung dan sungai Cisadane berdekatan dan berjajar, dekat Bogor saat ini. Sedangkan Tarumanagara diubah menjadi bawahannya. Beliau dinobatkan sebagai raja Sunda pada hari Radite Pon, 9 Suklapaksa, bulan Yista, tahun 519 Saka (kira-kira 18 Mei 669 M). Sunda dan Galuh ini berbatasan, dengan batas kerajaannya yaitu sungai Citarum (Sunda di sebelah barat, Galuh di sebelah timur).

Menurut Prasasti Sanghyang Tapak yang berangka tahun 1030 (952 Saka), diketahui bahwa kerajaan Sunda dipimpin oleh Maharaja Sri Jayabupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya Sakalabuwana Mandala Swaranindita Haro Gowardhana Wikramottunggadewa.

Prasasti lain yang menyebut raja Sunda adalah Prasasti Batutulis yang ditemukan di Bogor. Berdasarkan Prasasti Batutulis berangka tahun 1533 (1455 Saka), disebutkan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata, sebagai raja yang bertahta di Pakuan Pajajaran.

Naskah kuno Fragmen Carita Parahyangan (koleksi Perpustakaan Nasional Kropak 406) menyebutkan silsilah raja-raja Sunda mulai dari Tarusbawa, penerus raja terakhir Tarumanagara, dengan penerusnya mulai dari Maharaja Harisdarma,

Rahyang Tamperan, Rahyang Banga, Rahyangta Wuwus, Prebu Sanghyang, Sang Lumahing Rana, Sang Lumahing Tasik Panjang, Sang Winduraja, sampai akhirnya kepada Rakean Darmasiksa.

Naskah kuno Carita Parahyangan (koleksi Perpustakaan Nasional) menyebutkan silsilah raja setelah masa Tarumanagara. Yang pertama disebutkan adalah Tohaan di Sunda (Tarusbawa). Berikutnya disebutkan nama-nama raja penerusnya seperti Sanjaya, Prabu Maharaja Lingga Buana, raja Sunda yang gugur dikhianati di Bubat (Jawa Timur) yang merupakan ayahnya Rahiyang Niskala Wastu Kancana, sampai Surawisesa.

Raja terakhir kerajaan Sunda adalah Prabu Ragamulya atau Prabu Suryakancana (1567-1579). Prabu Suryakancana ini merupakan pemimpin kerajaan Sunda-Galuh yang terakhir, sebab setelah beberapa kali diserang oleh pasukan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten. Hal ini mengakibatkan kekuasaan Prabu Surya Kancana dan Kerajaan Pajajaran runtuh

J. Kerajaan Bali

Masyarakat Bali banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India, terutama Hindu. Sampai sekarang, masyarakat Bali masih banyak yang menganut agama Hindu. Namun demikian, agama Hindu yang mereka anut telah tercampur dengan budaya masyarakat asli Bali sebelum Hindu. Masyarakat Bali sebelum Hindu merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga, dan memuja roh-roh nenek moyang yang mereka anggap dapat melindungi kehidupan keluarga yang masih hidup. Melalui proses sinkretisme ini, lahirlah agama Hindu Bali yang bernama Hindu Dharma.

Prasasti yang menceritakan raja yang berkuasa di Bali ditemukan di desa Blanjong, dekat Sanur. Dalam prasasti ini disebutkan Raja yang bernama Khesari Warmadewa, istananya terletak di Sanghadwala. Prasasti ini ditulis dengan huruf nagari (India) dan sebagian lagi berhuruf Bali Kuno, tetapi berbahasa Sansakerta. Prasasti ini berangka tahun 914 M (836 saka), dalam candrasengkala berbunyi *Khecara-wahni-murti*.

Kerajaan di Bali, sejak ditaklukan oleh Majapahit, diperintah oleh raja-raja keturunan Jawa. Arya Kepakisan adalah keturunan raja-raja Kediri yang memerintah

di Samprangan. Pusat pemerintahan di Samprangan kemudian berpindah ke Klungkung. Kerajaan Klungkung dianggap sebagai Dewa Agung atau raja tertinggi. Raja-raja yang memerintah kemudian menganggap dirinya sebagai “wong Majapahit” artinya keturunan Majapahit. Walaupun demikian, di Bali terdapat kerajaan-kerajaan lain seperti Gianyar, Mengwi, Tabanan, Karangasem, dan Buleleng.

Struktur masyarakat Bali dibagi ke dalam empat golongan yaitu brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Tetapi kasta ini tidak tegas seperti halnya di India. Masyarakat Bali mempunyai cara yang khas dalam memberi nama awal pada anak-anak mereka, seperti *wayan* untuk anak pertama, *made* untuk anak kedua, *nyoman* untuk anak ketiga dan *ketut* untuk anak keempat. Ada juga nama *Putu* untuk panggilan anak pertama dari kasta ksatria dan brahmana.

Sektor ekonomi di Bali dikembangkan dari sektor pertanian. Hal itu dapat dibuktikan dengan kata –kata yang terdapat dalam berbagai prasasti yang menunjukkan usaha dalam bidang pertanian seperti sawah, parlak (sawah kering), gaga (ladang), keban (kebun) dan kasuwakan (pengairan sawah).

K. Hasil Kebudayaan Masa Hindu Budha yang masih bertahan

Indonesia memiliki enam agama resmi: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keragaman agama yang ada di Indonesia pasti terkait dengan masa lalu. Sejarah masyarakat nusantara masih memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat saat ini dalam bidang agama. Adanya agama Hindu dan Budha di Indonesia saat ini dipengaruhi juga oleh sejarah nusantara.

Sampai saat ini, berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah penduduk beragama Hindu adalah 4,01 juta jiwa. Pemeluk agama Budha sejumlah 1,70 juta jiwa. Adanya penduduk Indonesia yang beragama Hindu dan agama Budha menjadi bukti adanya kesinambungan sejarah sejak abad V masehi sampai sekarang.

Dalam bidang sosial dan ekonomi, pengaruh Hindu-Budha muncul dalam beberapa hal. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, secara umum di kepulauan Nusantara terdapat pelapisan sosial. Masyarakat terbagi ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Sampai saat ini pengaruh itu masih tampak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.

Menurut sumber-sumber penemuan, baik prasasti atau kitab, ada lima aspek yang menjadi landasan pelapisan sosial masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Budha. Aspek yang melatarbelakangi terjadinya pelapisan sosial adalah (1) umur, (2) jenis kelamin, (3) pemilikan harta, (4) kedudukan dalam pemerintahan, dan (5) *warna* atau kasta. (Rahardjo, 2002)

Dalam tataran masyarakat Hindu-Budha, kekayaan merupakan indikator kesempurnaan dalam suatu kepemimpinan, mulai dari raja sampai masyarakat desa. Kedudukan seseorang akan lebih tinggi dari orang lain dapat diukur berdasarkan harta yang dimiliki. Bagi pemimpin atau raja, salah satu ciri penting yang harus dimiliki adalah sifat dewa Kuwera, yakni dewa yang menjadi simbol kekayaan.

Di tingkat desa, pelapisan sosial juga didasarkan atas kekayaan yang dimiliki, yaitu kepemilikan tanah. Dalam masyarakat desa ada dua golongan masyarakat. Pertama, elite pedesaan yang memiliki hak penuh atas tanah atau *landed gentry* yang biasanya memiliki gelar *rakai* atau *pamegat*. Kedua, kelompok “budak” atau *hulun* sebagai pekerja.

Dalam suatu pemerintahan kerajaan, terdapat adanya susunan jabatan mulai dari tingkat yang tinggi ke yang rendah. Adanya pembagian jabatan dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari pelapisan sosial. Pada masa kerajaan Hindu-Budha, terdapat kurang lebih 65 susunan jabatan dalam kerajaan mulai dari *Mahraja*, *Narapati*, sampai *Hulun*. (Rahardjo, 2002)

Pengaruh Hindu Budha tampak pula dari berbagai ritual dan upacara adat yang masih dilakukan masyarakat sampai saat ini. Masyarakat Bali yang mayoritas memeluk agama Hindu masih taat menjalankan berbagai ritual dan upacara adat. Ada dua ritual yang paling populer adalah Puja dan Yajna. Puja adalah yang paling umum dari ritual. Bagian utama dari ritual ini adalah persembahan yang dibuat dari banyak bahan. Kemudian ada pula Yajna yang dilakukan pada altar yang dibangun sementara sesuai dengan hukum-hukum Tantra. Selain puja dan yajna ada pula samskara. Samskara, artinya "perbaikan" atau "pemurnian". Samksara terdiri dari semua upacara sejak waktu kelahiran sampai waktu kematian. (Rahardjo, 2002)

Pengaruh Hindu-Budha selain di Bali tampak pada beberapa ritual yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa. Di Jawa masyarakat masih sangat percaya pada ritual keselamatan. Hampir di setiap peristiwa, selalu dilakukan selamatan. Ritual

selamatan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa mendapat pengaruh dari kepercayaan Hindu.

Peninggalan masa Hindu Budha yang sampai kini masih dapat kita temui adalah monumen-monumen keagamaan. Monumen keagamaan yang dikenal pada masa Hindu-Budha adalah Candi dan Arca. Candi menurut agama Hindu merupakan salah satu bangunan berasal dari kata *candika*, yaitu salah satu nama dari dewi Durga (dewi maut), selain itu kata *candi* berasal dari kata *candika*, yang berarti makam. Bagi agama Budha, *candi* diistilahkan dengan “*stupa*”, yaitu tempat untuk melakukan ritual keagamaan, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Namun demikian, makna filosofi *candi* tetap sama, yaitu melambangkan adanya keharmonisan antara manusia dan penciptanya, antara mikro dan makrokosmos. *Candi* juga melambangkan kehidupan manusia, di mana ada tahapan-tahapan di dalamnya.

Kata “*candi*” mengacu pada berbagai macam bentuk dan fungsi bangunan, antara lain empat beribadah, pusat pengajaran agama, tempat menyimpan abu jenazah para raja, tempat pemujaan atau tempat bersemayam dewa, petirtaan (pemandian) dan gapura. Walaupun fungsinya bermacam-macam, secara umum fungsi *candi* tidak dapat dilepaskan dari kegiatan keagamaan, khususnya agama Hindu dan Budha, pada masa yang lalu. Oleh karena itu, sejarah pembangunan *candi* sangat erat kaitannya dengan sejarah kerajaan-kerajaan dan perkembangan agama Hindu dan Budha di Indonesia, sejak abad V sampai dengan abad XIX. (Rahardjo, 2002; Soekmono, 1984)

Monumen kedua sebagai hasil peninggalan Hindu Budha adalah arca. Arca merupakan patung perwujudan dewa. Antara Hindu dan Budha terdapat perbedaan arca. Pada *candi* Hindu, arca yang kerap ditemui adalah (1) *Çiwa Mahadewa*, (2) *Çiwa Mahaguru*, (3) *Çiwa Mahakala (Bhairawa)*, (4) *Durga Mahisasuramardini*, (5) *Çiwa* sebagai *Lingga*, (6) *Wisnu*, (7) *Sri* atau *Lakshmi*, (8) *Mahadewi/Uma/Parwati*, (9) *Mahakali* atau *Bhairawi*, (10) *Brahma*, (11) *Kama*, (12) *Yama*, (13) *Surya*, (14) *Kuwera*, (15) *Ganesha*, (16) *Dewa Penjaga mata angin*. (Soekmono, 1984)

Sementara itu pada *candi* Budha yang menjadi penanda arca satu dengan lainnya antara lain adalah dari sikap mudranya. Arca Budha yang digambarkan selalu digambarkan sebagai manusia biasa dan bertangan dua. Namun demikian, terdapat pula tanda-tanda berupa telinga yang lebih panjang, pada kepala terdapat *ushnisha*, diantara kening terdapat *urna*, yaitu bulatan kecil berupa titik di dahi yang

menunjukkan kelebihan pandangan tentang segala hal. Pada agama Budha arca yang ada antara lain (1) Aksobhya, (2) Ratnasambhawa, (3) Amithaba, (4) Amogasidhata, (5) Wairocana, (6) Awalokitecwara, (7) Mairetya, (8) Manjuceri, (9) Tara, (10) Pradhnparamita. (Soekmono, 1984)

Bentuk lain pengaruh Hindu Budha tampak dalam kesenian. Beragam karya seni, seperti seni sastra, seni pertunjukan, seni rupa terpengaruh oleh Hindu Budha. Salah satu contoh perpaduan ragam seni tersebut adalah wayang kulit. Wayang kulit merupakan perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Wayang kulit biasanya diiringi oleh alunan gamelan. Dalang menjadi tokoh kunci dalam wayang kulit. Dalang berperan dalam menentukan jalan cerita, memerankan tokoh-tokoh, dan mengatur seluruh pertunjukan.

Cerita-cerita wayang sebagian besar diangkat dari kitab-kitab Hindu dan Budha. Beberapa kisah diangkat dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Namun, pertunjukan tetapi tak dibatasi hanya dengan standar atau pakem tersebut. Ki dalang bisa juga memainkan lakon carangan (gubahan). Beberapa cerita diambil dari cerita Panji.

Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003, sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga (*Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*). Wayang kulit lebih populer di Jawa bagian tengah dan timur, sedangkan wayang golek lebih sering dimainkan di Jawa Barat.

L. Rangkuman

Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan modul tentang sejarah kehidupan masyarakat pada masa Hindu Budha. Dengan demikian, Anda sebagai guru sejarah telah mampu menganalisis dan membandingkan Kehidupan masyarakat, akulturasi, pemerintahan, hasil kebudayaan dan bukti peninggalan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu/Budha di Indonesia. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dalam modul ini adalah sebagai berikut.

1. Kerajaan Kutai di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Rakyat Kutai sudah aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Kehidupan kebudayaan masyarakat Kutai erat kaitannya dengan kepercayaan/agama yang dianut.

2. Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara dapat dikategorikan menjadi dua, bukti yang berada di luar dan bukti yang ada di dalam negeri. Corak utama kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan.
3. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 M. Kerajaan Sriwijaya bukan lagi merupakan kerajaan senusa (negara yang berkuasa atas satu pulau saja) melainkan merupakan negara antarnusa (negara yang berkuasa atas beberapa pulau), sehingga Sriwijaya merupakan negara kesatuan pertama di Indonesia.
4. Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Kehidupan ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian. Kondisi alam bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomian dengan pesat.
5. Pada abad ke-10 pusat pemerintahan di Jawa Tengah yang dipindahkan ke Jawa Timur alam Jawa Timur lebih terbuka untuk mengembangkan aktivitas perdagangan dengan dunia luar. Pindahan kekuasaan ke Jawa Timur dilakukan oleh raja Empu Sendok, dan membentuk dinasti baru yakni Isana. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kerajaan di Jawa Timur ini cukup baik, karena mendapat perhatian dari raja-raja yang memerintah.
6. Dalam persaingan antara Panjalu dengan Kediri, ternyata Kediri yang unggul dan menjadi negara yang besar kekuasaannya. Pada masa Kejayaan Kediri, perhatian raja terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat juga besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan karya-karya sastra saat itu, yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat itu.
7. Kerajaan Singhasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari, adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan ini disebut pula sebagai Tumapel.
8. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun

1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia.

9. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 Masehi di bagian Barat pulau Jawa (Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang). Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian sekitar abad ke-14 diketahui kerajaan ini telah beribukota di Pakuan Pajajaran serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama di Kalapa dan Banten.
10. Kerajaan Bali merupakan cikal bakal kuatnya pengaruh Hindu di Bali pada saat ini. Prasasti yang menceritakan raja yang berkuasa di Bali ditemukan di desa Blanjong, dekat Sanur. Prasasti ini berangka tahun 914 M (836 saka). Sektor ekonomi di Bali dikembangkan dari sektor pertanian.
11. Berbagai pengaruh Hindu dan Budha masih dapat kita jumpai pada saat ini. Pengaruh Hindu Budha tampak dari berbagai ritual dan upacara adat yang masih dilakukan masyarakat sampai saat ini. Masyarakat Bali yang mayoritas memeluk agama Hindu masih taat menjalankan berbagai ritual dan upacara adat. Peninggalan masa Hindu Budha yang sampai kini masih dapat kita temui adalah monumen-monumen keagamaan. Monumen keagamaan yang dikenal pada masa Hindu-Budha adalah Candi dan Arca. Bentuk lain pengaruh Hindu Budha tampak dalam kesenian. Beragam karya seni, seperti seni sastra, seni pertunjukan, seni rupa terpengaruh oleh Hindu Budha.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, van den, HJ, 1952, *Dari Panggung Peristiwa Sejarah Dunia 1*, Jakarta-Groningen : J.B. Wolters
- Bosch, F.D.K., 1982, *Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesia*, Jakarta : Bhratara Karya Aksara
- Mulyana, Slamet, 1979, *Negarakertagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta : Bhratara Karya Aksara
- Mustopo, Habib, dkk, 2006, *Sejarah, SMA Kelas XI IPS, Jilid 2*, perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bogor: Yudhistira.
- Rahardjo, Supratikno. 2002. *Peradaban Jawa: dinamika pranata politik, agama, dan ekonomi Jawa kuno*. Depok: Komunitas Bambu.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho (ed). 1993. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soekmono, R. 1984. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jilid II. Yogyakarta : Kanisius

PERKEMBANGAN KERAJAAN HINDU-BUDDHA DI NUSANTARA

Kerajaan Kutai



Bukti Peninggalan

“Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia, mempunyai putra mahsyur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Ansuman (dewa matahari) menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra tiga, seperti Api(yang suci) tiga. Yang terkemuka dari ketiga putra ialah Sang Mulawarman raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri(selamatan) emas amat banyak. Buat peringatan kenduri itulah tugu batu didirikan oleh para brahmana.”



Kehidupan Pemerintahan



Raja Kerajaan Kutai
yang terbesar adalah
Mulawarman

Nama Kundungga
merupakan nama asli
Indonesia.

Raja Mulawarman
menyedekahkan
20.000 ekor
kepada para Brahmana
merupakan
dinasti dalam
Hindu

Mulawarman dan
Aswawarman
memperoleh pengaruh
dari India

Aswawarman sebagai
Dewa Ansuman atau
dewa Matahari dan
dianggap sebagai
pendiri keluarga raja

Kehidupan Sosial

- ❑ Sudah Mengenal Sistem Kasta (hanya kasta Brahmana dan Ksatria)
- ❑ Masyarakat setempat berada di luar pengaruh India

- ❑ Pelaksanaan upacara penyucian seseorang yang telah tercemar dan karenanya dikeluarkan dari komunitas dapat diterima kembali masuk kastanya yang Vratyastoma.

Kehidupan Budaya

Kehidupan Ekonomi

- Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai, disamping pertanian.
- Keberadaan 20.000 ekor lembu yang dipersembahkan oleh Raja Mulawarman kepada paa brahmana telah menunjukkan adanya usaha peternakan yang dilakukan oleh rakyat kutai.



Apa yang kamu tahu dari kota ini?

Kerajaan Tarumanegara





Bukti

Prasasti

1. Prasasti Tugu
2. Prasasti Ciaruteun
3. Prasasti Kebon Kopi
4. Prasasti Muara Ciar
5. Prasasti Jambu
6. Prasasti Cidanghiar
7. Prasasti Pasir Awi

Arca

1. Arca Rajarsi
2. Arca Wisnu Cibuaya
3. Arca Wisnu Cibuaya

Berita Tiongkok

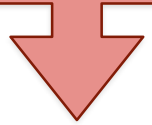
Fa-Hsien

Kehidupan Sosial



- Upacara sedekah
- Membuat saluran untuk menghadapi bencana banjir dikerjakan secara gotong royong

Kehidupan Eko



pertanian, peternakan, perburuan binatang, perdagangan. Komoditas yang diperdagangkan antara lain berupa badak, perak, dan penyu.



Nama Sriwijaya di beberapa sumber disebut dengan S she, San-fo-fsi, S dan Zabag

H. Kern berpend bahwa Sriwijaya nama raja berda pembacaan dari Kota Kapu

G. Coedes berpe bahwa Sriwij merupakan kerajaan didas pada prasasti da Cina.

BUKTI DAN SUMBER SEJARAH

- a) Berita Cina, diperoleh dari I-Tshing seorang pendatang Cina yang sering datang ke Sriwijaya sejak tahun 671 M.
- b) Berita Arab, banyak orang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan di Sriwijaya.
- c) Berita India, Kerajaan Sriwijaya sudah menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan India, kerajaan Nalanda dan kerajaan Cholamandala.
- d) Prasasti-prasasti (Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuor, Prasasti Kota Kapur, dll)

KEHIDUPAN POLITIK

Raja yang berkuasa antara lain Dapunta Hyang dan Balaputeradewa

KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI

Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, menjadikan Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional. Penguasaan Sriwijaya atas Selat Malaka mempunyai arti penting terhadap perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim.



KEHIDUPAN BUDAYA

Kerajaan Sriwijaya tidak terlalu banyak meninggalkan jejak kebudayaan. Salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah Muara Takus

KERAJAAN MATARAM KUNO

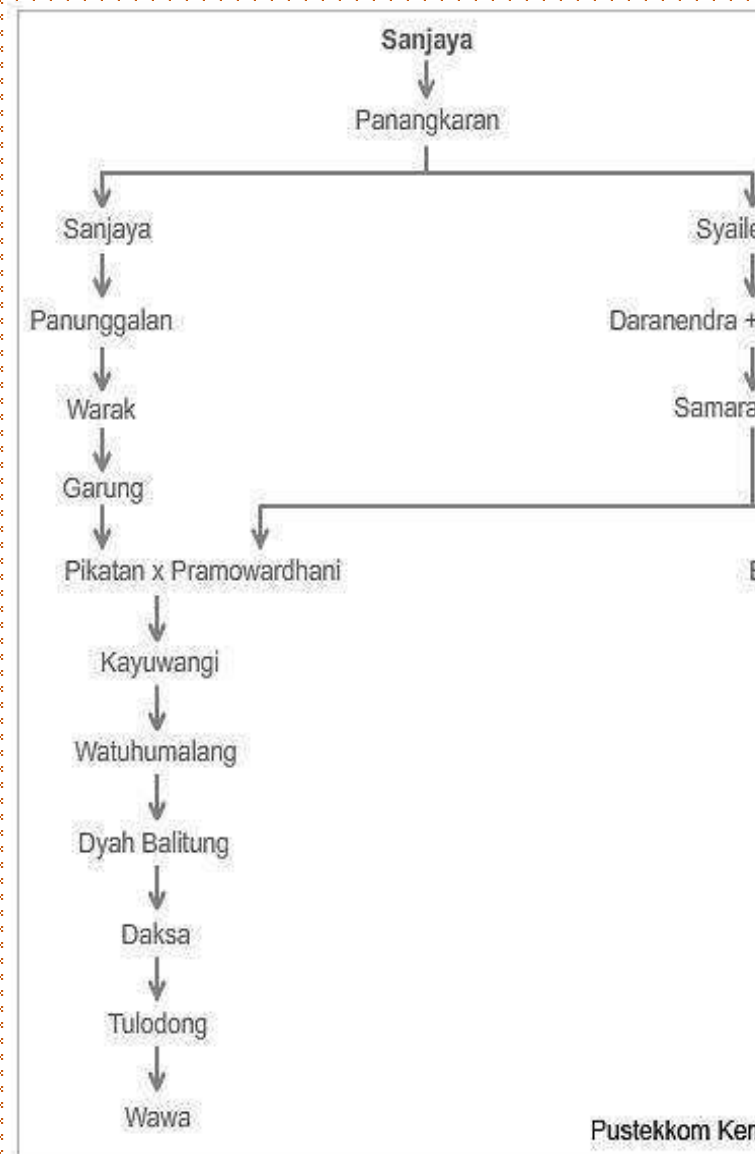


Kehidupan Politik

Ada dua Dinasti yang berkuasa atas Mataram Kuno, yaitu:

1. Dinasti Sanjaya yang berpusat di utara.
2. Dinasti Syailendra yang berpusat di selatan.

Silsilah raja Mataram tercatat pada Prasasti Mantyasih yang terlihat pada bagan di samping.



Kehidupan Ekonomi

Masyarakat Mataram Kuno bekerja di sektor agraris dan didukung oleh peternakan, perdagangan, dan kerajinan. Perdagangan dilakukan di pasar menurut hari pasaran (Legi, Pon, Pahing, Wage, Kliwon).

Kehidupan Sosial

Mataram Kuno terbuka dengan dunia luar dan memiliki perdagangan luar negeri yang ramai. Para saudagar dari China banyak yang bermukim dan membayar pajak.

KEHIDUPAN BUDAYA

- Bangunan-bangunan candi di Jawa Tengah, yang menjadi bukti peninggalan kerajaan Mataram yaitu seperti **Candi pegunungan Dieng, Candi Gedung Songo**, yang terletak di Jawa Tengah Utara.
- Selanjutnya di Jawa Tengah bagian selatan ditemukan antara lain **Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sambi Sari**, dan masih banyak candi-candi yang lain.



Candi Prambanan



Candi Pawon



Candi Sambi Sari

DINASTI ISANA

Pada abad ke-10 pusat pemerintahan Mataram di Jawa Tengah yang dipindahkan ke Jawa Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor., antara lain karena (1) bencana alam, yakni meletusnya gunung berapi; (2) akibat banyak tenaga laki-laki yang dipekerjakan untuk membuat candi sehingga sawah menjadi terbengkalai; (3) keadaan alam; alam Bumi Mataram terisolasi secara alamiah dari dunia luar sehingga sulit untuk berkembang. Sebaliknya alam Jawa Timur lebih terbuka untuk mengembangkan aktivitas perdagangan dengan dunia luar didukung adanya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Di samping itu tanah di Jawa Timur masih subur dibandingkan Jawa Tengah; (4) masalah politik; yakni untuk menghindari serangan Sriwijaya. Sebab setelah Dinasti Syailendra terpecah dari Jawa Tengah dan menetap di Sumatra.

Kehidupan Politik

Raja pertama adalah Empu Sendok dan digantikan oleh putrinya Isanatangawijaya. Kerajaan mengalami kejayaan pada masa Raja Airlangga yang sayangnya harus membagi dua wilayahnya menjadi Jenggala dan Pajajaran.

Kehidupan Sosial-Ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat cukup baik, karena mendapat perhatian dari raja-raja yang memerintah. Di antaranya Airlangga yang memerintah membuat tanggul di Waringit Pitu (Prasasti Kalegen 1037) dan waduk di beberapa bagian Sungai Brantas untuk pengairan sawah dan mencegah bahaya banjir. Airlangga juga mengadakan perbaikan pelabuhan Ujung Tuban yang letaknya di sungai Brantas; sedangkan pelabuhan Kembang Pajajaran diberikan hak-hak istimewa.

KERAJAAN KEDIRI

PETA WILAYAH KERAJAAN PANJALU (KEDIRI) DAN JENGGINALA



Kehidupan Politik

- ▣ Dalam persaingan antara Panjalu dengan Kediri ternyata Kediri yang unggul dan menjadi negara yang besar kekuasaannya. Raja terbesar dari Kerajaan Kediri adalah Jayabaya (1135-1157).

Kehidupan Sosial Ekonomi

- ▣ Pada masa Kejayaan Kediri, perhatian raja terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat juga besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan karya-karya sastra saat itu yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat itu. Diantaranya Kitab Lubdaka yang berisi ajaran moral, bahwa tinggi rendahnya martabat manusia tidak diukur berdasarkan asal dan kedudukan, melainkan berdasarkan kelakuannya.

Kehidupan Kebudayaan

- ▣ Pada masa Dharmawangsa, berhasil disadur Kitab Mahabarata ke dalam bahasa Jawa Kuno yang disebut Kitab Wirataparwa. Selain itu juga disusun kitab hukum yang bernama Siwasasana.
- ▣ Zaman Airlangga, disusun Kitab Arjuna Wiwah oleh Empu Kanwa.
- ▣ Masa Jayabaya, berhasil digubah Kitab Bharatayudha oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Di samping itu Empu Panuluh juga menulis Kitab Hariwangsa dan Gatotkacasraya.
- ▣ Masa Kameswara, berhasil ditulis Kitab Smaradana oleh Empu Dharmaja. Kitab Lubdaka dan Wertasancaya oleh Tan Akung.

PETA WILAYAH KEKUASAAN KERAJAAN SINGASARI



* KERAJAAN SINGASARI

Ken Arok (1222-1227)

Anusapati (1227-1248)

Tohjoyo (1248)

R

*Kehidupan Politik

Kertanegara (1248-1268)
Raja terbe

*Kehidupan Sosial Ekonomi

Rakyat Kerajaan Singasari hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pada masa Raja Kertanegara kehidupan masyarakat sangat diperhatikan

* Kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi, di antaranya Candi Kidal, Candi Jago dan Candi Singasari. Patung, antara lain Patung Ken Dedes sebagai perwujudan dari Prajnyaparamita lambang kesempurnaan ilmu, Patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolog.

*** Kehidupan Kebudayaan**

KERAJAAN MAJAPAHIT



Kehidupan Politik

Kerajaan Majapahit lahir dalam suasana perubahan besar dalam w yang singkat. Pada tahun 1292 Kertanegara gugur oleh pengkhian Jayakatwang, Singasari hancur dan digantikan oleh Kediri. Raden V terdesak oleh serangan tentara Jayakatwang di medan utara dan berhasil melarikan diri serta mendapat perlindungan dari Kepala D Kudadu. Selanjutnya berhasil menyeberang ke Madura minta perlindungan dan bantuan kepada Bupati Sumenep, Aria Wiraraja. saran dan jaminan Aria Wiraraja, R. Wijaya mengabdikan diri kepada Jayakatwang dan memperoleh tanah di desa Terik yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Majapahit.

Setelah Raden Wijaya muncul nama raja Jayanegara (1309-1328), Tribhuanatunggadewi (1328-1350), dan Hayam Wuruk (1350 -1389) merupakan raja terbesar. Pada masa pemerintahannya bersama P Gajah Mada kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Pemerintahan terlaksana secara teratur, baik di tingkat pusat (ibuk tingkat menengah (vasal) dan tingkat desa. Sistem pemerintahan daerah (tingkat menengah dan desa) tidak berubah.

Kehidupan Sosial Ekonomi

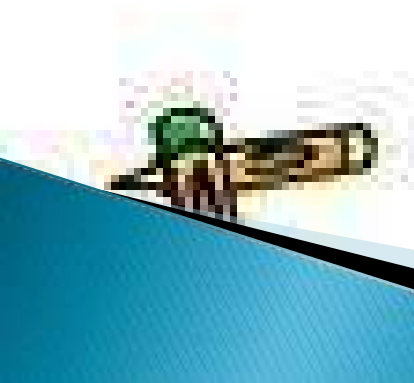
Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai dan tenteram. Dalam Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian juga peradilan, dilaksanakan secara adil. Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan.

Kehidupan Kebudayaan

Budaya masyarakat Majapahit sangat beragam, mulai dari candi, sastra berupa kitab atau kakawin. Beberapa kitab masa Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Suci isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan

Sedangkan bangunan candi peninggalan Majapahit antara lain Penataran (di Blitar), Candi Brahu, Candi Bentar (Waringin Lawa), Bajang Ratu, Candi Tikus dan bangunan-bangunan kuno lain seperti Segaran, Patilasan Wali Songo, dan Makam Troloyo (di

Terima Kasih



TEORI MASUKNYA AGAMA DAN BUDAYA ISLAM KE INDONESIA

Atno

A. Teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia

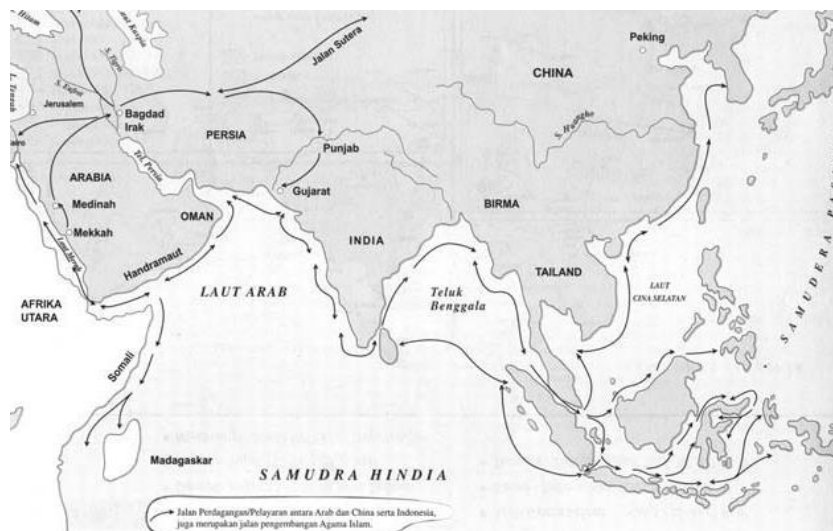
Munculnya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh persentuhan kebudayaan antara daerah Nusantara dengan negara yang membawa pengaruh Islam. Persentuhan kebudayaan ini terjadi sebagai salah satu akibat dari hubungan yang dilakukan antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang ada di Nusantara. Sebab, daerah Nusantara merupakan jalur perdagangan strategis yang menghubungkan antara dua wilayah, yaitu Laut Tengah dan Cina. Hubungan perdagangan yang semakin lama semakin intensif menimbulkan pengaruh terhadap masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan Arab, Parsi, India, dan Cina di Nusantara. Dengan kata lain, terjadilah proses akulturasi antara kebudayaan negara-negara itu dengan kebudayaan Nusantara.

Hubungan dagang antara India dan China melalui laut sudah mulai ramai sejak awal Masehi. Hal ini dimungkinkan karena sudah dikenalnya sistem bintang dan sistem angin yang berlaku di Lautan Hindia dan laut Cina sehingga memungkinkan terjadi jalur pelayaran antara Barat dengan Timur pulang balik secara teratur dan berpola tetap (Kartodirdjo, 1987). Hal ini juga menjadi salah satu faktor munculnya kota-kota pelabuhan di sepanjang jalur pelayaran. Sriwijaya menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari jazirah Arab dan Teluk Parsi serta kapal-kapal dagang dari Cina. Kapal dagang yang dari Jazirah Arab atau Teluk Parsi (Persia) serta kapal-kapal dagang dari Cina. Kapal dagang yang dari Jazirah Arab atau Teluk Parsi bergerak di sepanjang pantai Asia Selatan (Gujarat, Malabar, Koromandel, Benggala) dan memasuki kepulauan Nusantara terus Cina, demikian juga sebaliknya.

Pada awal Abad ke-7 M, ketika Islam berkembang di Jazirah Arab, Sriwijaya sedang dalam puncak kejayaannya. Dengan berdasar pada pendapat HAMKA bahwa sudah ada pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya, maka

bukan tidak mungkin bahwa di antara para pedagang Arab sudah ada yang beragama Islam. Ini artinya bahwa Islam sudah hadir dan mulai dikenal di wilayah Nusantara pada abad ke-7 M. Hal ini diperkuat dengan pendapat Syed Naquid Al-Atas menyatakan bahwa orang-orang Muslim sejak abad ke-7 M telah memiliki perkampungan di Kanton (Kartodirdjo, Poesponegoro, Notosusanto, 1975). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pedagang-pedagang Arab memang telah memasuki perairan Nusantara.

Permasalahan kapan dan di mana Islam masuk ke Indonesia masih menjadi bahan kajian para ahli sejarah. Hamka berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 M, alasan yang dikemukakan berdasar pada sumber yang berasal dari berita Cina dan berita Jepang. Kedua sumber menyebutkan bahwa pada abad ke-7 telah terdapat armada dagang yang dikenal dengan *Ta-shih* atau *Tashih-kuo*, istilah *ta-shih* atau *tashih-kuo* adalah perdagangan dari bangsa Arab atau Persia. Dalam berita itu juga disebutkan telah terdapat pemukiman orang-orang Arab di Sumatera Selatan (wilayah Sriwijaya). Hamka (1981) mengutip pendapat Sir Arnold bahwa catatan dari Cina menyebutkan adanya koloni orang Arab di Sumatera Barat pada sekitar tahun 684 M, artinya bahwa karena sudah ada koloni maka waktu kedatangan orang Arab sebelum tahun 684.



Gambar 1. Peta jalur awal masuknya Islam ke Nusantara (Indonesia)

Sebagian ahli sejarah yang lain berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13, hal ini dikaitkan dengan hancurnya Bagdad yang diserbu oleh Hulagu pada tahun 1258 M. Akibat hancurnya Bagdad maka banyak orang Islam yang menyebar ke luar dan berkelana mencari daerah baru, kelompok inilah yang sampai di Indonesia. Alasan lain yang dikemukakan adalah keterangan yang diperoleh dari catatan perjalanan Marcopolo dan Ibnu Batutah. pada catatan keduanya menyebut adanya masyarakat Islam di Sumatera. Alasan yang lebih kuat adalah diketemukannya bukti fisik yang berupa Nisan Sultan Malikus Saleh di Aceh yang berangka tahun 1297 M. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan kapan datangnya Islam di Indonesia adalah perlunya pemisahan konsep secara jelas tentang kedatangan, proses penyebaran, dan perkembangan Islam di Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa abad ke-7 M dapatlah disimpulkan sebagai waktu kedatangan Islam di Indonesia untuk pertama kali. Setidaknya mengacu pada jalur pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India atau Timur Tengah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Pada masa Sriwijaya berkuasa belum dapat dipastikan apakah pedagang-pedagang Arab telah memainkan peran ganda, yakni sebagai pedagang dan sebagai ulama yang mendakwahkan ajaran Islam. Jarak yang cukup jauh (kurang lebih 5 Abad) antara proses kedatangan hingga terbentuknya masyarakat (kerajaan Islam) di Parlak, memang masih menjadi catatan para sejarawan.

Di manakah Islam pertama kali datang di kepulauan Indonesia? tentu saja jawaban pasti mengarah pada tempat-tempat (pelabuhan-pelabuhan) yang menjadi persinggahan kapal-kapal dagang. Aceh (1985) menjelaskan bahwa daerah Perlak merupakan tempat Islam pertama kali berkembang. Hal ini didasarkan atas catatan perjalanan Marcopolo. Dari bukti pelacakan arkeologis di samping Parlak juga disebutkan adanya tempat yang bernama Pase. Sehingga disimpulkan bahwa tempat kedatangan Islam pertama kali adalah Parlak dan Pase.

Menurut Harun (1995) ada dua jalur proses masuknya Islam ke Indonesia yakni jalur darat dan jalur laut. jalur darat dari Bagda menuju Kabul Afghanistan, terus ke Kasmir, India Utara, ke Kanton, ke Jeddah Laut Merah, ke Yaman, Oman Teluk Parsi (Irak), Iran, Pakistan, Pantai Malabar, Ceilon, pantai Koromandel, Bangladesh, Birma, dan masuk ke Indonesia. Jika yang digunakan sebagai dasar

adalah dua jalur proses masuknya Islam tersebut maka, Parlak sebagai wilayah pertama kedatangan Islam dapat diterima.

Kepastian kapan dan dari mana Islam masuk di Nusantara memang tidak ada kejelasan. Setidaknya ada tiga teori yang mencoba menjelaskan tentang itu. Yaitu: *Teori Gujarat*, *Teori Makkah*, dan *Teori Persia*. Munculnya tiga teori yang berbeda ini, disinyalir oleh Ahmad Mansur Suryanegara, akibat dari kurangnya informasi yang bersumber dari fakta peninggalan agama Islam di Nusantara. Inskripsi tertua tentang Islam tidak menjelaskan tentang kapan masuknya Islam di Nusantara. Pada Inskripsi tertua itu hanya membicarakan tentang adanya kekuasaan politik Islam, Samudera Pasai pada abad ke-13 Masehi. Selain itu karena sulitnya memastikan kapan masuknya Islam di Nusantara dihadapkan pada luasnya wilayah kepulauan Nusantara. Ketiga teori tersebut berbeda pendapat mengenai: *Pertama*, waktu masuknya Islam. *Kedua*, asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam. Dan *ketiga*, pelaku penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. Berikut ini gambaran mengenai teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia:

Teori Gujarat

Teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan Teori Gujarat, karena bertolak dari pandangannya yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat, pada abad ke-13 M, dan pelakunya adalah pedagang India Muslim. Ada dugaan bahwa peletak dasar teori ini adalah Snouck Hurgronje, dalam bukunya *L'Arabie et les Indes Neerlandaises atau Revue de l'Histoire des Religions*. Snouck Hurgronje lebih menitikberatkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan pada: *Pertama*, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara. *Kedua*, adanya kenyataan hubungan dagang India-Indonesia yang telah lama terjalin. *Ketiga*, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dan Gujarat.

Sarjana lain yang mendukung teori ini adalah W. F. Stutterheim. Dalam bukunya *De Islam en Zijn Komst In de Archipel*, ia menyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan daerah asal Gujarat di dasarkan pada: *pertama*, bukti batu nisan Sultan pertama Kerajaan Samudera Pasai, yakni Malik

al-Shaleh yang wafat pada 1297. Sutterheim menjelaskan bahwa relief nisan tersebut bersifat Hinduistis yang mempunyai kesamaan dengan nisan yang terdapat di Gujarat. *Kedua*, adanya kenyataan bahwa agama Islam disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia - Cambai (Gujarat) - Timur Tengah - Eropa.

Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Moquette (1912) yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Dzulhijjah 831 H/1297 M di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulanan Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambay, Gujarat. Moquette akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat, atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafei yang dianut masyarakat muslim di Gujarat dan Indonesia.



Gambar 2. Batu nisan makam Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur

Ada beberapa sarjana lain (sejarawan, antropolog, ahli politik, dll) yang memperkuat untuk tidak mengatakan terpengaruh oleh argumen teori Gujarat ini. Di antaranya adalah Bernard H. M. Vlekke, Clifford Geertz dan Harry J. Benda. Bernard H. M. Vlekke dalam bukunya *Nusantara: a History of Indonesia*, mendasarkan argumennya pada keterangan Marco Polo yang pernah singgah di Sumatera untuk menunggu angin pada tahun 1292. Di sana disebutkan tentang

situasi ujung utara Sumatera bahwa, di Perlak penduduknya telah memeluk Islam. Selanjutnya Bernard H. M. Vlekke menandakan bahwa Perlak merupakan satu-satunya daerah Islam di Nusantara saat itu. Dengan demikian sarjana Barat ini merasa mengetahui dengan pasti kapan dan di mana Islam masuk ke Nusantara. Apalagi kemudian menurutnya, keterangan ini diperkuat dengan inskripsi tertua di Sumatera yang berupa nisan (Sultan Malik al-Shaleh) berangka tahun 1297, di mana lokasinya terletak di desa Samudera, 100 Mil dari Perlak. Seperti sejarawan sebelumnya, Bernard H. M. Vlekke juga berpandangan bahwa nisan tersebut selain mempunyai kesamaan dengan yang ada di Cambai, juga diimport dari sana pula, karena Cambai merupakan pusat perdagangan Islam sejak abad 13. Dengan adanya persamaan nisan dan persamaan ajaran mistik Islam Indonesia dengan India, maka ia berkesimpulan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat.

Tentang peranan Gujarat sebagai pusat perdagangan internasional, dan terutama sejak 1294 sebagai pusat penyebaran Islam, jauh sebelum Bernard, telah mendapat perhatian dari Schrieke dalam *Indonesian Sociological Studies*. Cuman bedanya sarjana yang terakhir ini tidak mendasarkan argumennya pada laporan Marco Polo karena menurutnya Marco Polo tidak singgah di Gujarat- tetapi pada laporan Sanudo, Pangeran Hayton dan Ibnu Battutah (1350). Dari Ibnu Battutah di dapat keterangan bahwa selain keindahan masjid dan gedung-gedungnya, juga tentang perdagangan di Aden dan adanya berbagai pedagang asing yang datang ke Cambay. Selanjutnya, Schrieke memberikan gambaran tentang adanya ketergantungan antara Malaka dengan Cambay dan sebaliknya. Juga menjelaskan tentang peranan Cambay sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama pada saat hubungan dagang Cina-India dihentikan.

Sedangkan Clifford Geertz, untuk memperkuat teori ini, dalam bukunya *The Religion of Java* lebih menitikberatkan pada perkembangan ajaran Islam di Indonesia, yang lebih diwarnai oleh ajaran Hindu, Budha bahkan animisme sebagai ajaran yang telah lama berkembang sebelum Islam. Hal ini akibat dari putusnya hubungan Indonesia dengan negara sumber Islam, yakni Makkah dan Kairo. Sehingga terlihat praktik mistik Budha yang diberi nama Arab, Raja Hindu

berubah namanya menjadi Sultan, sedangkan rakyat kebanyakan masih mempraktikkan ajaran animisme.

Senada dengan Geertz, Harry J. Benda juga mempunyai pendapat yang sama tentang besarnya peranan India ketimbang Arab dalam proses Islamisasi di Indonesia. Terutama ajaran mistik Islam yang dikembangkan di Indonesia bukan oleh bangsa Arab, melainkan oleh bangsa India yang telah beragama Islam. Bahkan Benda menegaskan bila agama Islam berasal langsung dari Timur Tengah dan menerapkan ajaran asli di Nusantara, mungkin tidak akan menemukan tempat di kepulauan itu, lebih-lebih pulau Jawa. Hanya dengan melalui pemantulan dua kalilah, rupanya agama Islam mendapatkan titik pertemuan dengan Indonesia, khususnya dengan pulau Jawa. Untuk memperkuat pendapatnya ini Benda mendasarkan pada kenyataan adanya orang-orang Arab yang telah lama tinggal di pantai-pantai, tetapi mengapa baru pada abad ke-15 dan ke-16 Islam menjadi kekuatan kebudayaan dan agama utama di Nusantara. Selain itu Benda dan kawannya Jhon Bastin juga berusaha memperlihatkan pengaruh India atas Indonesia di bidang yang lain, seperti: pengenalan adanya sawah dengan irigasi, penjinakan sapi dan kerbau, dan pelayaran.

Dari berbagai argumen yang dikemukakan oleh para pendukung teori Gujarat di atas, nampak sekali mereka sangat Hindu Sentris, seakan-akan segala perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh India. Di samping itu juga kebanyakan mereka lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam di Nusantara. Seakan-akan Islam masuk di Nusantara dan langsung menguasai struktur politik di sana. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa Islam masuk di Indonesia melalui infiltrasi kultural oleh para pedagang Muslim dan para Sufi.

Teori Makkah

Teori ini dicetuskan oleh HAMKA dalam pidatonya pada Dies Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta (1958), sebagai antithesis untuk tidak mengatakan sebagai koreksi teori sebelumnya, yakni teori Gujarat. Di sini HAMKA menolak pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat (Ahmad M Suryanegara, tt:78). Selanjutnya HAMKA

dalam Seminar Sejarah Masuknya Agama Islam di Indonesia (1963) lebih menguatkan teorinya dengan mendasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata, dan Makkah sebagai pusat, atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam.



Gambar 3. HAMKA atau Haji Abdul Karim Amrullah

HAMKA menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam baru masuk pada abad 13, karena kenyataannya di Nusantara pada abad itu telah berdiri suatu kekuatan politik Islam, maka sudah tentu Islam masuk jauh sebelumnya yakni abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriyah.

Guna dapat mengikuti lebih lanjut mengenai pendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara abad ke-7, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu tentang peranan bangsa Arab dalam perdagangan di Asia yang dimulai sejak abad ke-2 SM. Peranan ini tidak pernah dibicarakan oleh penganut teori Gujarat. Tinjauan teori Gujarat menghapuskan peranan bangsa arab dalam perdagangan dan kekuasaannya di lautan, yang telah lama mengenal samudera Indonesia dari pada bangsa-bangsa lainnya.

T.W. Arnold dalam *The Preaching of Islam: a History of the Propagation of the Muslim Faith* menulis bahwa bangsa Arab sejak abad ke-2 SM telah menguasai perdagangan di Ceylon (Samsul Munir Amin, 2013:304). Pendapat ini sama dengan pandangan Cooke seperti yang dikutip oleh Abdullah bin Nuh dan D. Shahab ketika menjadi pembanding dalam "Seminar Masuknya Agama Islam

ke Indonesia". Memang dalam informasi sejarah tersebut tidak disebutkan lebih lanjut tentang sampainya di Indonesia, tetapi menurut Suryanegara, bila dihubungkan dengan penjelasan kepustakaan Arab kuno di dalamnya disebutkan al-Hind sebagai India atau pulau-pulau sebelah timurnya sampai ke Cina, dan Indonesia pun disebut sebagai pulau-pulau Cina, maka besar kemungkinan pada abad ke-2 SM bangsa Arab telah sampai ke Indonesia. Bahkan sebagai bangsa asing yang pertama datang ke Nusantara. Karena bangsa India dan Cina baru mengadakan hubungan dengan Indonesia pada abad 1 M. Sedangkan hubungan Arab dengan Cina terjadi jauh lebih lama, melalui jalan darat menggunakan "kapal sahara", jalan darat ini sering disebut sebagai "jalur sutra", berlangsung sejak 500 SM.

Kalau demikian halnya hubungan antara Arab dengan negara-negara Asia lainnya, maka tidaklah mengherankan bila pada 674 M telah terdapat perkampungan perdagangan Arab Islam di Pantai Barat Sumatera, bersumber dari berita Cina. Kemudian berita Cina ini ditulis kembali oleh T.W. Arnold (1896), J.C. van Leur (1955) dan HAMKA (1958). Timbulnya perkampungan perdagangan Arab Islam ini karena ditunjang oleh kekuatan laut Arab.

Dari keterangan tentang peranan bangsa Arab dalam dunia perniagaan seperti di atas, kemudian dikuatkan dengan kenyataan sejarah adanya perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatera di abad ke-7, maka terbukalah kemungkinan peranan bangsa Arab dalam memasukkan Islam ke Nusantara.

Selain itu HAMKA juga mempunyai argumentasi lain yang menjadikan dirinya begitu yakin bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari daerah asalnya, Timur Tengah, yaitu pengamatannya pada masalah madzhab Syafi'i, sebagai madzhab yang istimewa di Makkah dan mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Analisis pada madzhab Syafi'i inilah yang menjadikan Hamka berbeda dengan sejarawan Barat atau orientalis. Pengamatan ini dilupakan oleh para sejarawan Barat sebelumnya, sekalipun mereka menggunakan sumber yang sama, yakni laporan kunjungan Ibnu Battutah ke Sumatera dan Cambay. Tetapi karena titik analisisnya adalah permasalahan perdagangan, sehingga yang terbaca adalah barang yang diperdagangkan dan jalur perdagangannya. Sebaliknya Hamka lebih

tajam lagi merasuk pada permasalahan madzhab yang menjadi bagian isi laporan kunjungan tersebut.

Argumentasi HAMKA ini tidak lepas dari kritik, diantaranya ialah adanya kesulitan dalam membedakan antara ajaran Syi'ah dengan madzhab Syafi'i. Juga adanya kenyataan peninggalan upacara Syi'ah dalam masyarakat Indonesia seperti, peringatan 10 Muharram atau Asyura dan Tabut Hasan Husain. Cara membaca al-Qur`an pun mempunyai kesamaan dengan Persia dari pada Arab.

Menanggapi kritikan di atas, Hamka mengingatkan kembali tentang sikap umat Islam Indonesia yang menyukai sejarah Hasan Husain, dan juga menampakkan kecintaan yang dalam terhadap keluarga Nabi Muhammad, tetapi hal itu tidak berarti menganut paham Syi'ah. Selain itu, Hamka juga mengakui adanya peninggalan ajaran Syi'ah di Indonesia, tetapi ia menolak dengan keras usaha sementara sarjana -terutama para orientalis- yang mencoba memberikan informasi sejarah yang bertujuan memisahkan Islam Indonesia dengan Makkah dan Arab dengan bahasa Arabnya.

Teori Persia

Pencetus teori ini adalah P.A. Hoesein Djajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia, singgah ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13. Nampaknya fokus Pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Makkah, sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya, serta Madzhab Syafi'i-nya (Musrifah Sunanto, 2004:26). Teori yang terakhir ini lebih menitikberatkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Di antaranya adalah: *Pertama*, Peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringayan Syi'ah atas mati syahidnya Husein. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur Syura. Di Minangkabau bulan Muharram disebut bulan Hasan-Husein. Di Sumatera Tengah sebelah barat disebut bulan Tabut, dan diperingati dengan mengarak keranda Husein untuk dilemparkan ke sungai. Keranda tersebut disebut *tabut* diambil dari bahasa arab. *Kedua*, adanya kesamaan ajaran antara Syaikh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran al-Hallaj, sekalipun al-Hallaj telah meninggal pada 310H / 922M, tetapi ajarannya

berkembang terus dalam bentuk puisi, sehingga memungkinkan Syeikh Siti Jenar yang hidup pada abad ke-16 dapat mempelajarinya. *Ketiga*, nisan pada makam Malik Saleh (1297) dan makam Malik Ibrahim (1419) di Gresik dipesan dari Gujarat. Dalam hal ini teori Persia mempunyai kesamaan muthlak dengan teori Gujarat. *Keempat*, pengakuan umat Islam Indonesia terhadap madzhab Syafi'i sebagai madzhab utama di daerah Malabar. Di sini ada sedikit kesamaan dengan teori Makkah, cuman yang membedakannya adalah P.A. Hoesein Djajadiningrat di satu pihak melihat salah satu budaya Islam Indonesia kemudian dikaitkan dengan kebudayaan Persia, tetapi dalam memandang madzhab Syafi'i terhenti ke Malabar, tidak berlanjut sampai ke pusat madzhab itu, yakni di Makkah.



Gambar 4. Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat

Kritikan untuk teori Persia ini dilontarkan oleh K.H. Saifuddin Zuhri. Ia menyatakan sukar untuk menerima pendapat tentang kedatangan Islam ke Nusantara berasal dari Persia. Alasannya bila kita berpedoman pada masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7, hal ini berarti terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umayyah. Saat itu kepemimpinan Islam di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan berada di tangan bangsa Arab, sedangkan pusat pergerakan Islam berkisar di Makkah, Madinah, Damaskus dan Bagdad, jadi belum mungkin Persia menduduki kepemimpinan dunia Islam.

Teori Cina

Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia (khususnya di Jawa) berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 M, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al Qurtuby dalam bukunya *Arus Cina Islam Jawa* menyatakan, menurut kronik masa Dinasti Tang (618-960) di daerah Kanton, Zhang-zhao, Quanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan, telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina ini bila dilihat dari beberapa sumber luar negeri (kronik) maupun lokal (babad dan hikayat), dapat diterima. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Campa, Cina bagian selatan (sekarang termasuk Vietnam). Berdasarkan *Sajarah Banten dan Hikayat Hasanuddin*, nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina, seperti "*Cek Ko Po*", "*Jin Bun*", "*Cek Ban Cun*", "*Cun Ceh*", serta "*Cu-cu*". Nama-nama seperti "*Munggul*" dan "*Moechoel*" ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol, sebuah wilayah di utara Cina yang berbatasan dengan Rusia.

Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang pada abad ke-15 seperti Gresik, misalnya, menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Meminjam istilah Azyumardi Azra, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas; artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan.

Dari uraian tentang tiga teori masuknya Islam ke Nusantara di atas, dapat dilihat beberapa perbedaan dan kesamaannya: *Pertama*, teori Gujarat dan Persia mempunyai persamaan pandangan mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat. Perbedaannya terletak pada teori Gujarat yang melihat ajaran Islam di Indonesia mempunyai kesamaan ajaran dengan mistik di India. Sedangkan teori Persia memandang adanya kesamaan dengan ajaran Sufi di Persia. Gujarat dipandang sebagai daerah yang dipengaruhi oleh Persia, dan menjadi tempat singgah ajaran Syi'ah ke Indonesia. *Kedua*, dalam hal Gujarat sebagai tempat singgah, teori Persia mempunyai persamaan dengan teori Makkah, tetapi yang membedakannya adalah teori Makkah memandang Gujarat sebagai tempat singgah perjalanan perjalanan laut antara Indonesia dengan Timur Tengah, sedangkan ajaran Islam diambilnya dari Makkah atau dari Mesir. *Ketiga*, teori Gujarat dan Persia keduanya tidak memandang peranan bangsa Arab dalam perdagangan, juga tidak dalam islamisasi di Nusantara. Dalam hal ini keduanya lebih memandang pada peranan orang India Muslim. Oleh karena itu bertolak dari laporan Marco Polo keduanya meyakini Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13. Sebaliknya teori Makkah lebih meyakini Islam masuk di Nusantara pada abad ke-7, karena abad ke-13 dianggap sebagai saat-saat perkembangan Islam di Nusantara. *Keempat*, dalam melihat sumber negara yang mempengaruhi Islam di Nusantara, teori Makkah lebih berpendirian pada Makkah dan Mesir dengan mendasarkan tinjauannya pada besarnya pengaruh madzhab Syafi'i di Indonesia. Sedangkan teori Persia, meskipun mengakui pengaruh madzhab Syafi'i di Indonesia tetapi, bagi teori ini, hal itu merupakan pengaruh madzhab Syafi'i yang berkembang di Malabar, oleh karena itu teori ini lebih menunjuk India sebagai negara asal Islam Indonesia. Walaupun dari analisa perbandingan di atas ketiga teori tersebut lebih menampakkan tajamnya perbedaan dari pada persamaan, namun ada titik temu yang bisa disimpulkan yakni, bahwa pertama, Islam masuk dan berkembang di Nusantara melalui jalan damai (infiltrasi kultural), dan kedua, Islam tidak mengenal adanya misi sebagaimana yang dijalankan oleh kalangan Kristen dan Katolik.

Kartodirdjo (1975) menyebutkan bahwa tidak hanya dari kelompok pedagang yang menyebarkan Islam, tetapi juga dari kelompok Mubaligh.

Mubaligh inilah yang dengan ilmunya membentuk kader-kader dai melalui berbagai cara, salah satu yang menonjol adalah melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren. Kelompok lain adalah para Sufi yang menyebarkan tarekat di Indonesia. Satu hal yang perlu di catat bahwa bangsa Indonesia sendiri merupakan penyebar agama Islam, Karena sebenarnya dalam proses perkembangan Islam bangsa Indonesia tidak pasif, tetapi juga aktif. Contoh yang dikemukakan antara lain, Pengislaman Kerajaan Banjar yang dilakukan oleh penghulu dari kerajaan Demak. Demikian juga dengan pengislaman Hitu dan Ternate yang dilakukan oleh santri dari Giri.

2. Bukti-bukti awal masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia

Untuk mengetahui kapan Islam masuk ke Indonesia, kita dapat menelusurinya melalui bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti tersebut antara lain seperti berikut ini.

Sumatra

Berita Cina zaman Tang tentang adanya masyarakat muslim di daerah Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Berita Marcopolo yang singgah di Perlak, sebuah kota muslim di Aceh pada tahun 1292 M. Berita Tome Pires (1512-1515) dalam tulisannya *Summa Oriental*-nya menuliskan bahwa di bagian pesisir Sumatra Utara dan Timur, yaitu mulai dari Aceh sampai Palembang sudah banyak masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Berita dari Ibnu Batutah, yang menyatakan bahwa ia mengunjungi kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1345. Makam Sultan Malik As Saleh yang berangka tahun 1297 merupakan bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di daerah Aceh pada abad ke-12. Mengingat Malik As Saleh adalah seorang sultan, maka dapat diperkirakan bahwa Islam telah masuk ke daerah Aceh jauh sebelum Malik As Saleh mendirikan Kesultanan Samudra Pasai.

Jawa

Batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran (Gresik) yang berangka tahun 475 H (1085 M). Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang berangka tahun 1419 M. Nisan kubur situs Troloyo dan Troulan, di Jawa Timur, Nisan ini

menunjukkan makam orang-orang muslim dengan tarikhnya menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriah. Pada nisan pertama yang ditemukan di Troulan, tarikhnya menunjukkan tahun 1290 Saka (1368 M), sedangkan di Troloyo tarikhnya berkisar antara 1298-1533 Saka (1376-1611). Hal yang sangat menarik adalah pada nisan ditemukan pula lambang Surya Majapahit sebagai lambang Kerajaan Majapahit. Berita Ma-Huan pada tahun 1413-15 M, ia pernah melakukan pelayaran untuk mengunjungi pesisir Jawa. Dalam bukunya yang berjudul *Ying-yai Sheng-Lan* (Peninjauan Umum tentang Pantai-pantai Samudra) diceritakan keberadaan orang-orang muslim di Gresik. Keberadaan mereka telah membuktikan bahwa di wilayah Majapahit, baik di daerah pesisir maupun di pusat kerajaan telah terjadi Islamisasi. Berita Tome Pires (1512-1515) menyebutkan bahwa selain masih adanya kerajaan Hindu-Budha, sudah ada pula kerajaan bercorak Islam di Demak dan daerah-daerah lainnya di pesisir Utara Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat.

Kalimantan

Hikayat Banjar, memberikan informasi mengenai masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Menceritakan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Nagara Daha (Kalimantan Selatan) antara Pangeran Samudra dengan Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra meminta bantuan Demak dengan syarat ia dan rakyatnya kelak akan masuk Islam. Peristiwa ini terjadi kira-kira pada tahun 1550.

Hikayat Kutai, memberikan informasi masuknya Islam di Kalimantan Timur. Dalam hikayat ini disebutkan bahwa telah datang dua orang muslim bernama Tuan di Bandang dan Tunggang Pangarang. Mereka datang ke Kutai untuk memperkenalkan Islam kepada Raja Mahkota setelah sebelumnya mereka mengislamkan Makassar. Raja Mahkota masuk Islam setelah merasa kalah dalam beradu kesaktian. Islamisasi ini diperkirakan terjadi pada tahun 1575 M.

Maluku

Tome Pires dan Antonio Galvao mengabarkan bahwa antara tahun 1460-1465, Islam telah masuk ke Maluku. Raja Ternate telah memeluk Islam dan hanya Raja Ternate yang disebut Sultan, sedangkan yang lainnya digelar Raja. Hikayat

Tanah Hitu, ditulis oleh Rijali. Hikayat ini memberikan informasi mengenai masuknya Islam di Ternate. Diperoleh informasi bahwa ia pernah menemani rajanya yang bernama Zainal Abidin (1486-1500) ke Giri, Jawa Timur untuk belajar Islam. Disebutkan pula bahwa Zainal Abidin merupakan Perdana Jamilu dan Hitu.

Sulawesi

Tome Pires, memberikan informasi tentang keberadaan Islam di Sulawesi. Menurut kesaksiannya, pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak sekali kerajaan, yaitu seperti Gowa- Tallo, Wajo, Soppeng, dan Luwu. Di daerah Gowa pada abad ke-16, telah terdapat masyarakat Muslim dan orang-orang Portugis. Hikayat Kutai, memberikan informasi masuknya Islam di Makassar oleh Tuan di Bandang sekitar tahun 1575.

B. Proses Islamisasi di Indonesia

Kartodirdjo (1975:109) menyatakan bahwa proses islamisasi di Indonesia berjalan mudah karena kedua belah pihak yakni orang-orang Muslim yang datang dan golongan masyarakat Indonesia dapat saling menerima. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara simultan telah memudahkan Islam berkembang dan diterima di Indonesia. Dipandang dari faktor politik berkembangnya Islam bersamaan dengan terjadinya pergolakan politik kerajaan Hindu Budha. Contoh kasus tentang faktor politik adalah islamisasi di Jawa Timur. Bersamaan dengan kegoncangan politik di Majapahit menjelang keruntuhannya, Islam muncul menjadi kekuatan alternatif yang sulit ditolak masyarakat.

Dilihat dari faktor ekonomi antara lain munculnya kekuatan para pedagang Islam pada pelabuhan-pelabuhan strategis di kepulauan Nusantara menjadi daya tarik luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Pedagang-pedagang Muslim dapat menunjukkan sifat dan tingkah laku yang baik, dan pemahaman keagamaan yang tinggi sehingga patut untuk dicontoh dan diikuti. Ketika kemudian banyak pedagang dan bangsawan di daerah pelabuhan memeluk Islam maka masyarakat di sekitarnya kemudian mengikuti dan memeluk Islam.

Dari segi faktor sosial dapat dijelaskan antara lain adalah penggunaan bahasa melayu oleh para Mubaligh, sehingga Islam dengan mudah dapat di pahami oleh penduduk Nusantara karena kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung (*lingua franca*). Aspek sosial lainnya adalah adanya pandangan Islam yang tidak mengenal strata, padahal sebelum kedatangan Islam masyarakat dipisahkan dalam kasta Islam dianggap sebagai nilai pembebasan dan menjunjung persamaan dalam masyarakat. Faktor budaya yang ikut mendukung berkembang Islam di Indonesia yakni sebelum kedatangan Islam masyarakat Indonesia mempunyai sikap religius yang baik, sehingga kedatangan Islam yang menawarkan sebuah keyakinan bukan hal yang asing. Sikap masyarakat Indonesia yang terbuka menerima budaya asing telah memungkinkan terjadinya interaksi dengan budaya Islam, kemampuan para mubaligh menggunakan sarana budaya untuk memperkenalkan Islam menjadi saluran Islamisasi yang efektif. Syarat yang mudah untuk menjadi muslim (hanya dengan membaca syahadat) dan ritual yang sederhana merupakan daya tarik yang cepat dapat diterima masyarakat Indonesia.

Sumber-sumber literatur Cina menyebutkan, menjelang seperempat abad ke-7, sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan-perkampungan ini diberitakan, orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas Muslim. Lambat lauan, semakin bertambah duta-duta dari Timur Tengah yang datang ke wilayah Nusantara. Seperti pada masa Dinasti Umayyah, ada sebanyak 17 duta Muslim yang datang ke Cina. Pada Dinasti Abbasiyah dikirim 18 duta ke negeri Cina. Bahkan pada pertengahan abad ke-7 sudah berdiri beberapa perkampungan Muslim di Kanfu atau Kanton.

Tentu saja, tak hanya ke negeri Cina perjalanan dilakukan. Beberapa catatan menyebutkan duta-duta Muslim juga mengunjungi Zabaj atau Sribuza atau yang lebih kita kenal dengan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini sangat bisa diterima karena zaman itu adalah masa-masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Tidak ada satu ekspedisi yang akan menuju ke Cina tanpa melawat terlebih dulu ke Sriwijaya. Selain Sabaj atau Sribuza atau juga Sriwijaya disebut-sebut telah dijamah oleh dakwah Islam, daerah-daerah lain di Pulau Sumatera seperti Aceh dan

Minangkabau menjadi lahan dakwah. Bahkan di Minangkabau ada tambo yang mengisahkan tentang alam Minangkabau yang tercipta dari Nur Muhammad. Ini adalah salah satu jejak Islam yang berakar sejak mula masuk ke Nusantara. Di saat-saat itulah, Islam telah memainkan peran penting di ujung Pulau Sumatera. Kerajaan Samudera Pasai-Aceh menjadi kerajaan Islam pertama yang dikenal dalam sejarah.

Selain di Pulau Sumatera, dakwah Islam juga dilakukan dalam waktu yang bersamaan di Pulau Jawa. Prof. Hamka dalam Sejarah Umat Islam mengungkapkan, pada tahun 674 sampai 675 masehi duta dari orang-orang *Ta Shih* (Arab) untuk Cina yang tak lain adalah sahabat Rasulullah sendiri Muawiyah bin Abu Sofyan, diam-diam meneruskan perjalanan hingga ke Pulau Jawa. Muawiyah yang juga pendiri Daulat Umayyah ini menyamar sebagai pedagang dan menyelidiki kondisi tanah Jawa kala itu. Ekspedisi ini mendatangi Kerajaan Kalingga dan melakukan pengamatan. Maka, bisa dibilang Islam merambah tanah Jawa pada abad awal perhitungan hijriah. Jika demikian, maka tak heran pula jika tanah Jawa menjadi kekuatan Islam yang cukup besar dengan Kerajaan Giri, Demak, Pajang, Mataram, bahkan hingga Banten dan Cirebon. Proses dakwah yang panjang, yang salah satunya dilakukan oleh Wali Songo atau Sembilan Wali adalah rangkaian kerja sejak kegiatan observasi yang pernah dilakukan oleh sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan.

Peranan Wali Songo dalam perjalanan Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa sangatlah tidak bisa dipisahkan. Jika boleh disebut, merekalah yang menyiapkan pondasi-pondasi yang kuat dimana akan dibangun pemerintahan Islam yang berbentuk kerajaan. Kerajaan Islam di tanah Jawa yang paling terkenal memang adalah Kerajaan Demak. Namun, keberadaan Giri tak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan Islam tanah Jawa. Sebelum Demak berdiri, Raden Paku yang berjuluk Sunan Giri atau yang nama aslinya Maulana Ainul Yaqin, telah membangun wilayah tersendiri di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Wilayah ini dibangun menjadi sebuah kerajaan agama dan juga pusat pengkaderan dakwah. Dari wilayah Giri ini pula dihasilkan pendakwah-pendakwah yang kelak dikirim ke Nusa Tenggara dan wilayah Timur Indonesia lainnya.

Perjalanan dakwah awal Islam di Nusantara tak terbatas hanya di Sumatera atau Jawa saja. Hampir seluruh sudut kepulauan Indonesia telah tersentuh oleh indahnya konsep *rahmatan lil alamin* yang dibawa oleh Islam. Ada beberapa contoh Islamisasi di kepulauan Nusantara, seperti:

Islamisasi di Jawa (Khusus Wali Sanga)

Peran wali Sanga dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Jawa nampaknya tidak dapat di sangkal lagi. Besarnya jasa mereka dalam mengislamkan tanah Jawa telah menjadi catatan yang masyhur dalam kesadaran masyarakat Islam Jawa³. Ada yang menganggap “Walisongo”-lah perintis awal gerakan dakwah Islam di Indonesia. Karena jika dilihat pada fase sebelumnya, islamisasi di Nusantara lebih dilaksanakan oleh orang perorangan tanpa manajemen organisasi. Tetapi dalam kasus Walisanga ini, aspek manajemen keorganisasian telah mereka fungsikan. Yakni, mereka dengan sengaja menempatkan diri dalam satu kesatuan organisasi dakwah yang diatur secara rasional, sistematis, harmonis, tertentu dan kontinue serta menggunakan strategi, metode dan fasilitas dakwah yang betul-betul efektif.

Untuk menunjukkan bahwa lembaga dakwah Walisanga bersifat teratur dan kontinue, Saudi Berlian dalam menyunting bukunya Widji Saksono, menunjukkan paling tidak lembaga Walisanga telah mengalami empat kali periode sidang penggantian “pengurus”. Periode I: Malik Ibrahim, Ishaq, Ahmad Jumad al-Kubra, Muhammad al-Maghribi, Malik Israil, Muhammad al-Akbar, Hasanuddin, Aliyuddin dan Subakir. Periode II: Komposisi kepengurusan dilengkapi oleh Raden Ahmad Ali Rahmatullah (Sunan Ampel) menggantikan Malik Ibrahim yang telah wafat, Ja’far Shadiq (Sunan Kudus) menggantikan Malik Israil yang telah wafat, Syarif Hidayatullah menggantikan Ali Akbar yang telah wafat. Periode III: masuk Raden Paku (Sunan Giri) menggantikan Ishaq yang pindah ke Pasai, Raden Said (Sunan Kalijaga) menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia, Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) menggantikan Maulana Hasanuddin yang telah Wafat, Raden Qasim (Sunan Drajat) menggantikan Aliyuddin yang telah wafat. Periode IV: masuk Raden Hasan (Raden Fatah) dan Fathullah Khan, keduanya menggantikan Ahmad Jumad al-Kubra dan Muhammad al-Maghribi. Periode V: masuk Sunan Muria. Tidak

dijelaskan tokoh ini menggantikan siapa, tetapi besar kemungkinan menggantikan Raden Fatah yang naik tahta sebagai Sultan I Demak.

Selanjutnya, dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa Walisanga telah menggunakan beberapa strategi dan metode dakwah. Diantaranya adalah dengan memobilisasi semua alat ta'tsir psikologis yang berupa sensasi, conciliare, sugesti, hipnotis sampai de cere. Karena sensasi inilah masyarakat awam dipaksa secara halus untuk menaruh perhatian kepada para wali dan mengesampingkan yang lainnya. Karena conciliare, publik akhirnya menganggap penting apa saja yang datang dari para wali. Karena sugesti, rakyat didorong berbuat sesuatu sehingga bergerak tanpa banyak tanya. Karena hipnotis, rakyat terpukau akan segala sesuatu yang bermerk para wali tanpa banyak selidik dan kritik. Selanjutnya, para wali dapat mengendalikan dan mengarahkan awam sebagai obyek dakwahnya ke mana saja yang mereka kehendaki. Selain strategi yang bersifat psikologis, Walisanga juga menerapkan strategi (pendekatan) politis. Ini tercermin dalam langkah-langkah yang diambil terutama oleh Raden Patah ketika mendirikan kerajaan Demak.

Widji Saksono mencatat bahwa Walisanga meneladani pendekatan Rasulullah SAW. dalam berdakwa, yaitu: Bi al-hikmah wa al-Mau'idhah hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Sebagai praktek dari mau'idhah hasanah, Walisanga memperlakukan sasaran dakwah, terutama tokoh khusus, dengan profesional dan istimewa, langsung pribadi bertemu pribadi. Kepada mereka diberikan keterangan, pemahaman dan perenungan (tazkir) tentang Islam, peringatan-peringatan dengan lemah lembut, bertukar pikiran dari hati ke hati, penuh toleransi dan pengertian. Metode ini dapat dilihat pada kasus Sunan Ampel ketika mengajak Ariya Damar dari Palembang masuk Islam. Juga pada Sunan Kalijaga ketika mengajak Adipati Pandanarang di Semarang untuk masuk Islam.

Pendekatan al-Hikmah, Walisanga menggunakannya dengan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif dan sensasional. Pendekatan ini mereka pergunakan terutama dalam menghadapi masyarakat awam. Dalam rangkaian ini kita dapati kisah Sunan Kalijaga dengan gamelan Sekatennya. Atas usul Sunan Kalijaga, maka dibuatlah keramaian Sekaten atau Syahadatain yang diadakan di Masjid Agung dengan memukul gamelan yang

sangat unik dalam hal langgam dan lagu maupun komposisi instrumental yang telah lazim selama ini. Begitu juga dakwah Sunan Kudus dengan lembunya yang dihias secara unik dan nyentrik. Apabila kedua pendekatan ini tidak berhasil, barulah mereka menempuh jalan lain yaitu al-Mujadalah billati hiya ahsan. Pendekatan ini terutama diterapkan terhadap tokoh yang secara terus terang menunjukkan sikap kurang setuju terhadap Islam. Walisanga juga memakai strategi tarbiyatul ummah, terutama sebagai upaya pembentukan dan penanaman kader, serta strategi penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Sunan Kalijaga misalnya mengkader Kiai Gede Adipati Pandanarang (Sunan Tembayat) dan mendidik Ki Cakrajaya dari Purworejo kemudian mengirimnya ke Lowanu untuk mengislamkan masyarakat di sana. Sunan Ampel mengkader Raden Patah kemudian menyuruhnya berhijrah ke hutan Bintara, membuat perkampungan dan kota baru dan mengimami masyarakat yang baru terbentuk itu. Untuk penyebaran juru dakwah dan pembagian wilayah kerja Walisanga, digambarkan oleh Mansur Suryanegara, mempunyai dasar pertimbangan geostrategis yang mapan sekali. Pembagian itu memakai rasio: 5 : 3 : 1.

Jawa Timur mendapat perhatian besar dari para wali. Di sini ditempatkan 5 Wali dengan pembagian teritorial dakwah yang berbeda. Maulana Malik Ibrahim, sebagai wali perintis, mengambil wilayah dakwanya di Gresik. Setelah wafat wilayah ini diambil alih oleh Sunan Giri. Sunan Ampel mengambil posisi dakwahnya di Surabaya. Sunan Bonang sedikit ke utara di Tuban. Sedangkan Sunan Drajat di Sedayu. Berkumpulnya kelima wali di Jawa Timur adalah karena kekuasaan politik saat itu berpusat di wilayah ini. Kerajaan Kediri di Kediri dan Majapahit di Mojokerto.

Di Jawa Tengah para wali mengambil posisi di Demak, Kudus dan Muria. Sasaran dakwah para wali di Jawa Tengah tentu berbeda dengan yang di Jawa Timur. Di Jawa Tengah dapat dikatakan bahwa pusat kekuasaan Hindu dan Budha sudah tidak berperan, tetapi realitas masyarakatnya masih banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Budha. Sehingga dalam berdakwah Walisanga di Jawa Tengah ini banyak menggunakan instrumen budaya lokal, seperti wayang, gong gamelan dll, untuk dimodifikasi sesuai dengan ajaran Islam. Saat berlangsung aktivitas ketiga wali tersebut pusat kekuasaan politik dan ekonomi beralih ke

Jawa Tengah runtuhnya Majapahit dan munculnya kerajaan Demak, yang disusul kemudian dengan lahirnya kerajaan Pajang dan Mataram II. Perubahan kondisi politik seperti ini memungkinkan ketiga tempat tersebut mempunyai arti geostrategis yang menentukan.

Sedangkan di Jawa Barat proses islamisasinya hanya ditangani oleh seorang Wali, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan pertimbangan saat itu penyebaran ajaran Islam di Indonesia Barat, terutama di Sumatera dapat dikatakan telah merata bila dibandingkan dengan kondisi Indonesia Timur. Adapun pemilihan kota Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati, hal itu tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan jalan perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi yang berasal dari Indonesia Timur. Dan Cirebon merupakan merupakan pintu perdagangan yang mengarah ke Jawa Tengah, Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Oleh karena itu, pemilihan Cirebon dengan pertimbangan sosial politik dan ekonomi saat itu, mempunyai nilai geostrategis, geopolitik dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan Islam selanjutnya.

Demikianlah beberapa strategi dan pendekatan yang dipakai oleh Walisanga dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dan apabila dikaji lebih mendalam, maka akan didapati beberapa bentuk metode dakwah Walisanga, di antaranya: Pertama, melalui perkawinan. Diceritakan dalam Babad Tanah Jawi di antaranya bahwa Raden Rahmad (Sunan Ampel) dalam rangka memperkuat dan memperluas dakwahnya ia menempuh, salah satunya, dengan menjalin hubungan genealogis. Beliau menikahkan putrinya, Dewi Murthosiah dengan Raden Ainul Yakin dari Giri. Dewi Murthosimah dengan Raden Patah. Alawiyah dengan Syarif Hidayatullah. Dan putrinya yang lain, Siti Sariyah dengan Usman Haji dari Ngudung.

Kedua, dengan mengembangkan pendidikan pesantren. Langkah persuasif dan edukatif ini mula-mula dipraktekkan oleh Syeikh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, kemudian dikembangkan dan mencapai kemajuannya oleh Sunan Ampel di desa Ampel Denta Surabaya.

Ketiga, mengembangkan kebudayaan Jawa dengan memberi muatan nilai-nilai keislaman, bukan saja pada pendidikan dan pengajaran tetapi juga meluas

pada bidang hiburan, tata sibus, kesenian dan aspek-aspek lainnya. Seperti Wayang, Sekatenan, Falasafah laku dan pacul Sunan Kalijaga.

Keempat, metode dakwah melalui sarana prasarana yang berkaitan dengan masalah perekonomian rakyat. Seperti tampilnya Sunan Majagung sebagai nayaka (mentri) urusan ini. Beliau memikirkan masalah halal haram, masak memasak, makan-makanan dll. Untuk efisiensi kerja, beliau berijtihad dengan menyempurnakan alat-alat pertanian, perabot dapur, barang pecah belah. Begitu juga Sunan Drajat tampil dengan menyempurnakan alat transportasi dan bangun perumahan.

Kelima, dengan sarana politik. Dalam bidang politik kenegaraan Sunan Giri tampil sebagai ahli negara Walisanga yang menyusun peraturan-peraturan ketataprajaan dan pedoman tatacara keraton. Begitu juga Sunan Kudus yang ahli dalam perundang-undangan, pengadilan dan mahkamah. Sebagai penutup untuk pembahasan tentang islamisasi Jawa oleh Walisanga, setidaknya ada dua faktor elementer yang menopang keunggulan dan keistimewaan dakwah para wali. Pertama, inklusifitas para wali dalam melihat ajaran Islam. Kedua, potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh para wali. Mereka telah membuktikan diri sebagai mujtahid ulung yang memahami Islam tidak saja sebagai teori abstrak tetapi juga sebagai realitas historis kemanusiaan.

Islamisasi Kalimantan

Para ulama awal yang berdakwah di Sumatera dan Jawa melahirkan kader-kader dakwah yang terus menerus mengalir. Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo kala itu. Di pulau ini, ajaran Islam masuk dari dua pintu. Jalur pertama yang membawa Islam masuk ke tanah Borneo adalah jalur Malaka yang dikenal sebagai Kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jatuhnya Malaka ke tangan penjajah Portugis kian membuat dakwah semakin menyebar. Para mubaligh-mubaligh dan komunitas Islam kebanyakan mendiami pesisir Barat Kalimantan. Jalur lain yang digunakan menyebarkan dakwah Islam adalah para mubaligh yang dikirim dari Tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini menemui puncaknya saat Kerajaan Demak berdiri. Demak mengirimkan banyak mubaligh ke negeri ini. Perjalanan dakwah pula yang akhirnya melahirkan

Kerajaan Islam Banjar dengan ulama-ulamanya yang besar, salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. (Baca: *Empat Sekawan Ulama Besar*).

Islamisasi Sulawesi

Ribuan pulau yang ada di Indonesia, sejak lama telah menjalin hubungan dari pulau ke pulau. Baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantar dakwah menembus dan merambah Celebes atau Sulawesi. Menurut catatan *company* dagang Portugis yang datang pada tahun 1540 saat datang ke Sulawesi, di tanah ini sudah bisa ditemui pemukiman Muslim di beberapa daerah. Meski belum terlalu besar, namun jalan dakwah terus berlanjut hingga menyentuh raja-raja di Kerajaan Goa yang beribu negeri di Makassar. Raja Goa pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Alaidin al Awwal dan Perdana Menteri atau Wazir besarnya, Karaeng Matopa pada tahun 1603. Sebelumnya, dakwah Islam telah sampai pula pada ayahanda Sultan Alaidin yang bernama Tonigallo dari Sultan Ternate yang lebih dulu memeluk Islam. Namun Tonigallo khawatir jika ia memeluk Islam, ia merasa kerajaannya akan di bawah pengaruh kerajaan Ternate. Beberapa ulama Kerajaan Goa di masa Sultan Alaidin begitu terkenal karena pemahaman dan aktivitas dakwah mereka. Mereka adalah Khatib Tunggal, Datuk ri Bandang, datuk Patimang dan Datuk ri Tiro. Dapat diketahui dan dilacak dari nama para ulama di atas, yang bergelar datuk-datuk adalah para ulama dan mubaligh asal Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Makassar. Pusat-pusat dakwah yang dibangun oleh Kerajaan Goa inilah yang melanjutkan perjalanan ke wilayah lain sampai ke Kerajaan Bugis, Wajo Sopeng, Sidenreng, Tanette, Luwu dan Paloppo.

Islamisasi Maluku

Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dengan hasil bumi yang melimpah membuat wilayah ini sejak zaman antik dikenal dan dikunjungi para pedagang seantero dunia. Karena status itu pula Islam lebih dulu mampir ke Maluku sebelum datang ke Makassar dan kepulauan-kepulauan lainnya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440. Sehingga, saat Portugis mengunjungi Ternate pada tahun 1512, raja ternate

adalah seorang Muslim, yakni Bayang Ullah. Kerajaan lain yang juga menjadi representasi Islam di kepulauan ini adalah Kerajaan Tidore yang wilayah teritorialnya cukup luas meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir Barat kepulauan Papua dan sebagian kepulauan Seram. Ada juga Kerajaan Bacan. Raja Bacan pertama yang memeluk Islam adalah Raja Zainulabidin yang bersyahadat pada tahun 1521. Di tahun yang sama berdiri pula Kerajaan Jailolo yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya.

Islamisasi Papua

Beberapa kerajaan di kepulauan Maluku yang wilayah teritorialnya sampai di pulau Papua menjadikan Islam masuk pula di pulau Cendrawasih ini. Banyak kepala-kepala suku di wilayah Waigeo, Misool dan beberapa daerah lain yang di bawah administrasi pemerintahan kerajaan Bacan. Pada periode ini pula, berkat dakwah yang dilakukan kerajaan Bacan, banyak kepala-kepala suku di Pulau Papua memeluk Islam. Namun, dibanding wilayah lain, perkembangan Islam di pulau hitam ini bisa dibilang tak terlalu besar.

Islamisasi Nusa Tenggara

Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dibilang sejak awal abad ke-16. Hubungan Sumbawa yang baik dengan Kerajaan Makassar membuat Islam turut berlayar pula ke Nusa Tenggara. Sampai kini jejak Islam bisa dilacak dengan meneliti makam seorang mubaligh asal Makassar yang terletak di kota Bima. Begitu juga dengan makam Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam. Bisa disebut, seluruh penduduk Bima adalah para Muslim sejak mula. Selain Sumbawa, Islam juga masuk ke Lombok. Orang-orang Bugis datang ke Lombok dari Sumbawa dan mengajarkan Islam di sana. Hingga kini, beberapa kata di suku-suku Lombok banyak kesamaannya dengan bahasa Bugis. Dengan data dan perjalanan Islam di atas, sesungguhnya bisa ditarik kesimpulan, bahwa Indonesia adalah negeri Islam. Bahkan, lebih jauh lagi, jika dikaitkan dengan peran Islam di berbagai kerajaan tersebut di atas, Indonesia telah memiliki cikal bakal atau embrio untuk membangun dan menjadi sebuah negara Islam.

3. Pola Penyebaran Islam di Indonesia

Islam, dikenal sebagai suatu agama mayoritas dianut penduduk di Indonesia, memiliki beragam pola-pola penyebarannya, di antaranya lewat jalur-jalur sebagai berikut:

Perdagangan

Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam proses Islamisasi. Tahap ini diperkirakan pada abad ke-7 M yang melibatkan pedagang Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan, sebab bisa dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Dalam agama Islam, semua orang Islam adalah penyampai ajaran Islam. Pada saluran ini hampir semua kelompok masyarakat terlibat mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai masyarakat bawah. Proses dipercepat dengan mulai runtuhnya kerajaan- kerajaan bercorak Hindu-Budha. Prosesnya mula-mula para pedagang Islam berdagang di pusat-pusat perdagangan dan kemudian di antaranya ada yang bertempat tinggal, baik hanya untuk sementara maupun untuk waktu yang cukup lama.



Gambar 5. Hubungan pedagang Timur Tengah dan India dengan masyarakat Indonesia

Dalam perkembangannya para pedagang ini banyak kemudian yang menetap sehingga lama kelamaan menjadi sebuah perkampungan. Perkampungan ini kemudian dikenal sebagai Pekojan, perkampungan orang Islam. Status mereka

secara ekonomi relatif baik, sehingga banyak menarik masyarakat di sekitarnya untuk bekerja dengan para pendatang tersebut.

Perkawinan

Saluran Islamisasi kedua adalah melalui perkawinan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap yang pertama. Banyak pedagang Muslim yang menetap tidak serta membawa keluarganya, sehingga kemudian mereka menikah dengan penduduk asli. Para pedagang lama kelamaan mulai menetap, baik untuk sementara maupun permanen. Lambat laun para pedagang ini membentuk perkampungan-perkampungan yang dikenal dengan nama *Pekojan*. Wanita yang akan dinikah sebelumnya telah masuk agama Islam, dengan demikian terbentuklah keluarga muslim. Jumlahnya lambat laun semakin banyak sehingga terciptalah masyarakat Islam. Saluran islamisasi melalui perkawinan ini sangat efektif jika yang melakukan perkawinan adalah saudagar Islam dengan anak kaum bangsawan atau Raja. Dari perkawinan ini akan mempercepat islamisasi karena pengaruh sosio politik kaum bangsawa dan para raja cukup besar di kalangan masyarakat. Pada tahap selanjutnya para pedagang ini ada yang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal, misalnya antara Raden Rahmat (Sunan Ampel) dengan Nyai Manila. Namun proses ini tidak begitu mudah, mengingat perkawinan dengan orang penganut berhala dianggap kurang sah, karena itu wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu. Hal ini dapat dijalankan dengan sederhana, karena tidak memerlukan upacara. Cukup dengan mengucapkan kalimat *Syahadat*. Adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga hasil perkawinan akan membentuk keluarga muslim. Selain itu, tidak mustahil dari pihak keluarga kedua mempelai timbul ketertarikan untuk masuk agama Islam. Dalam beberapa babad diceritakan adanya proses ini, misalnya Maulana Ishak menikahi Putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. Dalam *Babad Cirebon* diceritakan perkawinan antara Putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati, *Babad Tuban* menceritakan tentang perkawinan antara Raden Ayu Teja, Putri Adipati Tuban dengan Syekh Ngabdurahman.



Gambar 6. Ilustrasi seorang wanita pribumi sedang berinteraksi dengan pedagang India

Pendidikan

Pendidikan juga merupakan saluran Islamisasi di Indonesia. Sudah disinggung sebelumnya bahwa banyak *mubaligh* yang kemudian menyiapkan kader melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren. Para ulama, kyai, dan guru agama sangat berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh Islam ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan ditengah-tengah masyarakat. Di pesantren itulah kader ulama penerus ulama disiapkan untuk mengembangkan Islam diseluruh pelosok Indonesia. Seorang santri yang telah tamat belajar di pesantren akan kembali ke daerahnya masing-masing dan menjadi guru agama dan tokoh keagamaan. Beberapa pesantren awal yang dikenal luas adalah Ampel dan Giri yang sudah muncul ketika Majapahit masih berdiri. Ampel dan Giri dikenal sebagai tempat pendidikan para mubaligh yang banyak mengislamkan wilayah Indonesia.

Tasawuf

Tasawuf juga merupakan saluran Islamisasi yang keempat, bahkan dinilai para ahli merupakan saluran terpenting. Alasannya karena melalui Tasawuf memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat yang belum memeluk agama

Islam. Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah SWT. dan memperoleh ridha-Nya. Guru-guru Tasawuf dengan kebajikannya tetap memelihara unsur-unsur lama dalam masyarakat dengan diwarnai oleh ajaran Islam. Nilai-nilai Islam yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia menunjukkan persamaan dengan alam pikiran yang telah dimiliki oleh orang Indonesia. Hal ini dapat di buktikan pada islamisasi di Jawa dan Sumatera khususnya. Para guru Tasawuf mampu mengemas Islam dalam bahasa yang dapat dimengerti dan disarankan oleh masyarakat Indonesia, sehingga relatif tidak menimbulkan pertentangan antara Islam dengan yang sudah ada sebelumnya. Saluran tasawuf termasuk yang berperan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari Sejarah Banten, Babad, Tanah Jawi, dan Hikayat Raja-raja Pasai. Tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M dan mazhab yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i.

Kesenian

Saluran Islamisasi yang lain adalah melalui kesenian. Kesenian dengan berbagai bentuknya telah dimanfaatkan para mubaligh untuk memperkenalkan ajaran Islam. Bahkan penyebaran Islam di Jawa tidak dapat dilepaskan dari tembang-tembang Jawa yang digubah oleh para wali. Demikian juga dengan gamelan dan wayang sebagai puncak kesenian Jawa, telah dimanfaatkan Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Cabang-cabang seni yang lebih mudah menyentuh hati masyarakat sekitar adalah seni bangun, seni pahat, seni ukir, seni qasidah, dan sebagainya. Bukti-bukti perkembangannya adalah bangunan Masjid Agung, Demak, Cirebon, Bantem, Banda Aceh yang kemudian menjadi pusat kegiatan syiar Islam ke daerahnya. Di Keraton Cirebon juga kita temukan seni ukir yang bercorak Islami yaitu ukiran lafal ayat-ayat Al Qur'an.



Gambar 7. Kesenian wayang kulit yang dipakai Sunan Kalijaga dalam siar Islam

C. Rangkuman

Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan modul tentang teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Dengan demikian, Anda sebagai guru sejarah telah mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Dari modul yang sudah dipelajari, dapat diambil beberapa hal penting diantaranya:

1. Ada beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yaitu:

Teori Mekah, mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab sekitar abad pertama Hijriah. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau HAMKA

Teori Gujarat, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 H atau abad ke-13 M. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pijnapel dari Universitas Leiden, Belanda. Teori ini juga dikembangkan oleh J.P. Moquette

Teori Persia, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Pencetus teori ini adalah Hoesein Djajadiningrat yang memberikan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia.

Teori Cina, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Sumanto Al Qurtuby dalam bukunya *Arus Cina-Islam-Jawa* menyatakan, menurut kronik Dinasti Tang (618-960), di daerah Kanton, Zhang-zhao, Quanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan, telah terdapat sejumlah pemukiman Islam.

2. Beberapa bukti yang menunjukkan masuknya Islam di Indonesia adalah sebagai berikut : (a) Makam Sultam Malik As Saleh yang berangkat tahun 1297 merupakan bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di daerah Aceh; (b) Batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran (Gresik) yang berangkat tahun 475 H (1085 M).
3. Proses islamisasi di Indonesia berjalan mudah karena kedua belah pihak yakni orang-orang Muslim yang datang dan golongan masyarakat Indonesia dapat saling menerima.
4. Pola penyebaran Islam dilakukan lewat jalur-jalur diantaranya melalui: (a) Perdagangan; (b) Perkawinan; (c) Pendidikan; (d) Tasawuf; dan (e) Kesenian

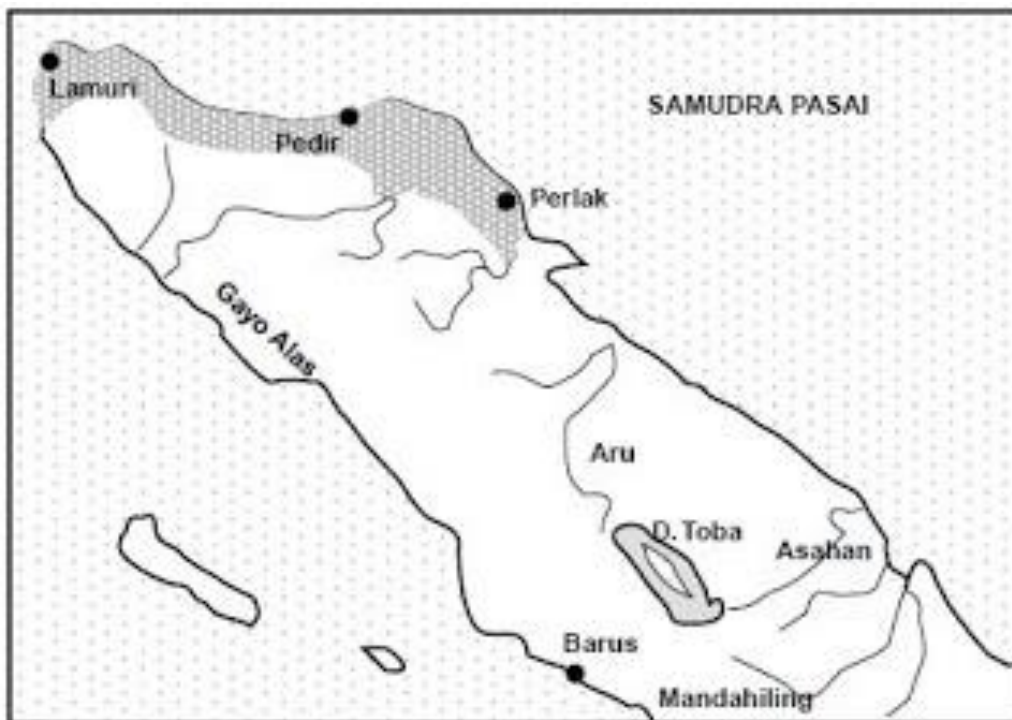
DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Usairy. 2003. *Sejarah Islam, Sejak jaman Nabi Adam hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar
- Ahmad Mansur Suryanegara, 2010. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Aqib Sumanto. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES
- Chalid Latif dan Irwin Lay. 1992. *Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Pembina Peraga.
- Deliar Noer. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Graaf, H.J. dan TH. Pigeaud. 1989. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Jakarta: Perwakilan KITLV dan Pustaka Utama Grafiti.
- Hasan, Ibrohim Hassan. 1997. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah terpadu, Bagian III: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Jakarta: GPU
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V dan VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Musrifah Sunanto. 2004. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Reid, Anthony. 2004. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Samsul Munir Amin. 2013. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Sartono Kartodirdjo. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500–1900*. Jilid 1. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Suwirta, Andi. 2002. *Tasawuf dan proses Islamisasi di Indonesia*. Bandung: Historia Utama Press.

SEJARAH KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA

Jayusman

A. Kerajaan Samudera Pasai



Gambar 1. Peta Kerajaan Samudera Pasai

Sumber: idsejarah.net

Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh, dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 M. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera di desa Beuringin, kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lhokseumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik al-Saleh adalah nama baru Meurah Silu setelah ia masuk Islam, dan merupakan sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun (1297-1326 M). Kerajaan Samudera Pasai merupakan

gabungan dari Kerajaan Pase dan Peurlak, dengan raja pertama Malik al-Saleh (Daliman, 2012).

Kehidupan Politik

Setelah resmi menjadi kerajaan Islam (kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia), Samudera Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudera Pasai. Samudera Pasai setelah pertahanannya kuat segera meluaskan kekuasaan ke daerah pedalaman, meliputi Tamiang, Balek Bimba, Samerlangga, Beruana, Simpang, Buloh Telang, Benua, Samudera, Perlak, Hambu Aer, Rama Candhi, Tukas, Pekan, dan Pasai. Dalam rangka islamisasi, Sultan Malik al Saleh menikah dengan putri Raja Perlak (Muljana, 2005)

Sultan Malik al Saleh mangkat pada tahun 1297 dan dimakamkan di Kampung Samudera Mukim Blang Me dengan nisan makam berciri Islam. Jabatan Sultan Pasai kemudian diteruskan oleh putranya, Sultan Malik al Thahir. Sultan ini memiliki dua orang putra, yaitu Malik al Mahmud dan Malik al Mansur. Ketika masih kecil, keduanya diasuh oleh Sayid Ali Ghiatuddin dan Sayid Asmayuddin. Kedua orang putranya itulah yang kemudian mewarisi takhta kerajaan. Sementara itu, kedua pengasuhnya itu diangkat menjadi perdana menteri. Ibu kota kerajaan pernah dipindahkan ke Lhok Seumawe (Kusnawati, 2005).

Sepeninggal Sultan Malik al-Saleh, Samudra Pasai diperintah oleh Malik al-Zahir I (1297-1302). Ia sering mendapat sebutan Sultan Muhammad. Pada masa pemerintahannya, tidak banyak yang dilakukan. Kemudian takhta digantikan oleh Ahmad yang bergelar Al Malik az-Zahir II. Pada masanya, Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Batutah, seorang utusan dari Delhi yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina dan singgah di sana. Menurut Ibnu Batutah, Samudra Pasai memiliki armada dagang yang sangat kuat. Baginda raja yang bermazhab Syafi'i sangat kuat imannya sehingga berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat agama Islam yang bermazhab Syafi'i (Mustopo, 2014).

Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudera Pasai pada 1521 hingga tahun 1541. Selanjutnya wilayah Samudera Pasai menjadi kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh

Darussalam. Waktu itu yang menjadi raja di Aceh adalah Sultan Ali Mughayat. Berikut ini adalah urutan para raja yang memerintah di Samudera Pasai, yakni:

- a. Sultan Malik as Saleh (Malikul Saleh).
- b. Sultan Malikul Zahir, meninggal tahun 1326.
- c. Sultan Muhammad, wafat tahun 1354.
- d. Sultan Ahmad Malikul Zahir atau Al Malik Jamaluddin, meninggal tahun 1383.
- e. Sultan Zainal Abidin, meninggal tahun 1405.
- f. Sultanah Bahiah (puteri Zainal Abidin), sultan ini meninggal pada tahun 1428.

Pada masa pemerintahan Sultan Malik as-Shalih telah terjalin hubungan baik dengan Cina. Diberitakan bahwa Cina telah meminta agar Raja Pasai untuk mengirimkan dua orang untuk dijadikan duta untuk Cina yang bernama Sulaeman dan Snam-ad-Din. Selain dengan Cina, Kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan baik dengan negeri-negeri Timur Tengah. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik az-Zahir, ahli agama mulai dari berbagai negeri di Timur Tengah salah satunya dari Persi (Iran) yang bernama Qadi Sharif Amir Sayyid dan Taj-al-Din dari Isfahan. Hubungan persahabatan Kerajaan Samudra Pasai juga terjalin dengan Malaka bahkan mengikat hubungan perkawinan (Daliman, 2012).

Kehidupan Ekonomi

Kehidupan Ekonomi masyarakat Kerajaan Samudera Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudera Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai-Arab-India-Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia (Kartodirdjo, 1975).

Karena letak geografisnya yang strategis, ini mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Menurut (Julianti, 2007) Samudera Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk:

- a) Menambah perbekalan untuk pelayaran selanjutnya

- b) Mengurus soal-soal atau masalah-masalah perkapalan
- c) Mengumpulkan barang-barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri
- d) Menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia

Tahun 1350 M merupakan masa puncak kebesaran kerajaan Majapahit, masa itu juga merupakan masa kebesaran Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai juga berhubungan langsung dengan Kerajaan Cina sebagai siasat untuk mengamankan diri dari ancaman Kerajaan Siam yang daerahnya meliputi Jazirah Malaka. Perkembangan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudera Pasai bertambah pesat, sehingga selalu menjadi perhatian sekaligus incaran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Setelah Samudera Pasai dikuasai oleh Kerajaan Malaka maka pusat perdagangan dipindahkan ke Bandar Malaka.

Kehidupan Sosial dan Budaya

Para pedagang asing yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurus perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju, bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju (Daliman, 2012).

Kerajaan Samudera Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudera Pasai ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari Dinasti Fatimah yang beraliran Syiah kepada Dinasti Mameluk yang beraliran Syafi'i. Aliran syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat (Muhlisin, 2017).

B. Kerajaan Malaka

Pembentukan kerajaan Malaka diduga ada kaitannya dengan perang saudara di Majapahit setelah Hayam Wuruk (1360-89 M) meninggal dunia. Sewaktu perang saudara tersebut, Parameswara, Putra raja Sriwijaya Palembang turut terlibat karena

ia menikah dengan salah seorang putri Majapahit. Parameswara kalah dalam perang melawan kerajaan majapahit tersebut dan melarikan diri ke Tumasik (sekarang Singapura) yang berada di bawah pemerintahan Siam saat itu. ia membunuh penguasa Tumasik, yang bernama Temagi dan kemudian menobatkan dirinya sebagai penguasa baru. Persoalan ini diketahui oleh Kerajaan Siam dan memutuskan untuk menuntut balas atas kematian Temagi. Parameswara dan pengikutnya mengundurkan diri ke Muar dan akhirnya sampai di Malaka lalu membuka sebuah kerajaan baru di sana pada tahun 1402 M (Riclefs, 2013).

Kedatangan islam ke Malaka terjadi tahun 1406 M, ketika Parameswara menganut Islam dan mengganti nama menjadi Muhammad Iskandar Syah. Pengislamannya diikuti oleh pembesar-pembesar istana dan rakyat jelata. Dengan demikian Islam mulai tersebar di Malaka. Parameswara (Muhammad Iskandar Syah) memerintah selama 12 tahun. Baginda mendapati Malaka sebagai sebuah kampung dan meninggalkannya sebagai sebuah kota serta pusat perdagangan terpenting di Selat Malaka, sehingga orang-orang Arab menggelarnya sebagai malakat (perhimpunan segala pedagang). Kitab sejarah melayu (*The Malay Annals*), turun menceritakan bahwa raja Malaka, Megat Iskandar Syah, adalah orang pertama di kesultanan itu yang memeluk agama Islam. Selanjutnya ia memerintahkan segenap warganya baik yang berkedudukan tinggi maupun rendah untuk menjadi Muslim (Suhartono, 2002).



Gambar 2. Wilayah Kekuasaan Kerajaan Malaka
Sumber: wikipedia.id

~ Jayuman ~

Kehidupan Politik

Dalam menjalankan dan menyelenggarakan politik negara, ternyata para sultan menganut paham politik hidup berdampingan secara damai (*co-existence policy*) yang dijalankan secara efektif. Politik hidup berdampingan secara damai dilakukan melalui hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Politik ini dilakukan untuk menjaga keamanan internal dan eksternal Malaka. Dua kerajaan besar pada waktu itu yang harus diwaspadai adalah Cina dan Majapahit. Maka, Malaka kemudian menjalin hubungan damai dengan kedua kerajaan besar ini. Sebagai tindak lanjut dari politik negara tersebut, Parameswara kemudian menikah dengan salah seorang putri Majapahit (Kartodirdjo, 1975).

Sultan-sultan yang memerintah setelah Prameswara (Muhammad Iskandar Syah) tetap menjalankan politik bertetangga baik tersebut. Sebagai bukti, Sultan Mansyur Syah (1459-1477) yang memerintah pada masa awal puncak kejayaan Kerajaan Malaka juga menikahi seorang putri Majapahit sebagai permaisurinya. Di samping itu, hubungan baik dengan Cina tetap dijaga dengan saling mengirim utusan. Pada tahun 1405 seorang duta Cina Ceng Ho datang ke Malaka untuk mempertegas kembali persahabatan Cina dengan Malaka. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan lain tidak berani menyerang Malaka (Al-Usairy, 2003).

Pada tahun 1411, Raja Malaka balas berkunjung ke Cina beserta istri, putra, dan menteri-menterinya. Seluruh rombongan tersebut berjumlah 540 orang. Sesampainya di Cina, Raja Malaka beserta rombongannya disambut secara besar-besaran. Ini merupakan pertanda bahwa, hubungan antara kedua negeri tersebut terjalin dengan baik. Saat akan kembali ke Malaka, Raja Muhammad Iskandar Syah mendapat hadiah dari Kaisar Cina, antara lain ikat pinggang bertatahkan muti manikam, kuda beserta sadel-sadelnya, seratus ons emas dan perak, 400.000 kwan uang kertas, 2600 untai uang tembaga, 300 helai kain khasa sutra, 1000 helai sutra tulen, dan 2 helai sutra berbunga emas. Dari hadiah-hadiah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam pandangan Cina, Malaka adalah kerajaan besar dan diperhitungkan (Poesponegoro, 2008).

Di masa Sultan Mansur Syah, juga terjadi perkawinan antara Hang Li Po, putri Maharaja Yung Lo dari dinasti Ming, dengan Sultan Mansur Shah. Dalam prosesi perkawinan ini, Sultan Mansur Shah mengirim Tun Perpateh Puteh dengan serombongan pengiring ke negeri China untuk menjemput dan membawa Hang Li Po

ke Malaka. Rombongan ini tiba di Malaka pada tahun 1458 dengan 500 orang pengiring. Suhartono (2002) menyatakan, bahwa dalam pengabdianya demi kebesaran Malaka, Laksamana Hang Tuah dikenal memiliki semboyan berikut.

- a. Esa hilang dua terbilang
- b. Tak Melayu hilang di bumi.
- c. Tuah sakti hamba negeri.

Laksamana yang kebesaran namanya dapat disamakan dengan Gajah Mada atau Adityawarman ini adalah tangan kanan Sultan Malaka, dan sering dikirim ke luar negeri mengemban tugas kerajaan. Ia menguasai bahasa Keling, Siam dan Cina. Hingga saat ini, orang Melayu masih mengagungkan Hang Tuah, dan keberadaannya hampir menjadi mitos. Namun demikian, Hang Tuah bukanlah seorang tokoh gaib. Dia meninggal di Malaka dan dimakamkan di tempat asalnya, Sungai Duyung di Singkep.

Kehidupan Ekonomi

Sejak Kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai. Bersamaan dengan melemahnya kekuatan Majapahit dan Samudera Pasai, kerajaan Malaka tidak memiliki persaingan dalam perdagangan. Tidak adanya saingan di wilayah tersebut, mendorong kerajaan Malaka membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintasi dan berlabuh di Semenanjung Malaka. Aturan tersebut adalah diberlakukan pajak bea cukai untuk setiap barang yang datang dari wilayah barat (luar negeri) sebesar 6% dan upeti untuk pedagang yang berasal dari wilayah Timur (dalam negeri). Tingkat keorganisasian pelabuhan ditingkatkan dengan membuat peraturan tentang syarat-syarat kapal yang berlabuh, kewajiban melaporkan nama jabatan dan tanggung jawab bagi kapal-kapal yang sedang berlabuh, dan sebagainya (Muljana, 2005).

Raja dan pejabat kerajaan turut serta dalam perdagangan dengan memiliki kapal dan awak-awaknya. Kapal tersebut disewakan kepada pedagang yang hendak menjual barangnya ke luar negeri. Selain peraturan-peraturan tentang perdagangan, kerajaan Malaka memberlakukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam perdagangan dan diplomatik.

Kehidupan Sosial dan Budaya

Kusnawati (2005) menyebutkan bahwa dalam pemerintahannya, raja menunjuk seorang patih untuk mengurus kerajaan, dari patih diteruskan kepada bawahannya yang terdiri dari bupati, tumenggung, bendahara raja, dan seterusnya. Masalah perpajakan diurus seorang tumenggung yang menguasai wilayah tertentu, urusan perdagangan laut diurus oleh syahbandar dan urusan perkapalan diurus oleh laksamana. Kekayaan para raja dan pejabat kerajaan semakin bertambah akibat dari penarikan upeti dan usaha menyewakan kapal. Uang yang didapat dipakai untuk membangun istana kerajaan, membuat mesjid, memperluas pelabuhan, dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang cenderung mewah. Gejala timbulnya kecemburuan sosial disebabkan oleh dominasi para bangsawan dan pedagang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang menjadi penyebab lemahnya Kerajaan Malaka.

Pada kehidupan budaya, perkembangan seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari Kerajaan Malaka seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Hang Lekir dan Hikayat Hang Jebat. Perkembangan seni sastra Indonesia pada zaman Islam pada umumnya berkembang di daerah-daerah Malaka (Melayu) dan Pulau Jawa (Graaf, 2003). Peninggalan karya sastra Islam ini dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

Hikayat

Hikayat adalah hasil karya sastra yang pada prinsipnya sama seperti dongeng, namun hikayat bercorak Islam. Secara sederhana kita dapat membuat definisi hikayat bahwa hikayat adalah dongeng khusus agama Islam. Contoh hikayat yang terkenal antara lain: Hikayat Raja-raja Pasai yang menceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Samudera Pasai, Hikayat Kepahlawanan Hang Tuah, dan Hikayat Amir Hamzah yang menceritakan perlawanan Amir Hamzah melawan raja kafir yang bernama Nursewan.

Suluk

Suluk adalah karya sastra yang berisi tentang tasawuf mengenai keesaan dan keberadaan Allah SWT. Contoh suluk adalah Suluk Wujil karya Sunan Bonang yang berisi wejangan Sunan Bonang kepada Wujil abdinya yang mencari keluhuran budi meski tubuhnya khas. Contoh suluk berikutnya adalah Suluk Sukarsa yang

menceritakan tentang seseorang bernama Sukarsa yang sedang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan hidup.

Syair

Syair adalah puisi lama yang tiap-tiap baitnya terdiri dari 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contoh syair yang terkenal antara lain: Syair Perahu, Syair Si Burung Pingai, Syair Abdul Muluk dan lain-lain. Syair saat ini berkembang dan digunakan dalam lagu-lagu populer modern yang dibawakan oleh musisi yang memiliki kepedulian terhadap budaya Melayu. Aliran musik yang menggunakan syair antara lain dan pop Melayu.

Riwayat dan Nasihat

Apakah yang dimaksud dengan riwayat? Apa pula bedanya dengan nasihat? Pada dasarnya, kedua jenis sastra Islam tersebut memuat nilai-nilai yang sama. Riwayat dan nasihat adalah jenis sastra Islam yang mengisahkan kehidupan para Nabi beserta nasihat-nasihatnya. Setiap kisah nabi memiliki pelajaran hidup yang berharga untuk diteladani oleh manusia saat ini.

Contoh riwayat adalah Kitab Manik Maya yang berisi tentang penciptaan dunia. Contoh karya sastra Islam riwayat yang terkenal adalah Kitab Bustanussalatin karya Ar-Raniri. Kitab Bustanussalatin berisi tentang kisah penciptaan bumi, masalah agama dan hukum dalam Islam, dan riwayat nabi-nabi sejak jaman Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad SAW. Kisah raja-raja Islam di India, Malaka, Pahang dan Aceh sering diabadikan dalam bentuk karya sastra riwayat (Yusuf, 2006).

C. Kerajaan Aceh

Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1496 yang sebelumnya telah dirintis pada abad ke-15 oleh Mudzaffar Syah. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Bisa dikatakan bahwa, sebenarnya kerajaan Aceh ini merupakan kelanjutan dari Samudera Pasai untuk membangkitkan dan meraih kembali kegemilangan kebudayaan Aceh yang pernah dicapai

sebelumnya. Pada awalnya, wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar tetapi pada saat pemerintahan.



Gambar 3. Peta Wilayah Kerajaan Aceh
Sumber: sejarah-negara.com

Kehidupan Politik

Berdasarkan Bustanus salatin 1637 M karangan Naruddin Ar-raniri yang berisi silsilah sultan-sultan aceh, dan berita-berita eropa. Kerajaan aceh telah berhasil membebaskan diri dari kaerajaan pedir. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan aceh menurut Badrika (2006) adalah:

Sultan Ali Mughayat Syah Adalah raja Kerajaan Aceh yang pertama. Ia memerintah tahun 1514-1528 M. Di bawah kekuasaannya, kerajaan aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Daya dan Pasai. Bahkan melakukan serangan terhadap bangsa portugis di malaka dan juga menyerang Kerajaan Aru.

Sultan Salahuddin. Wafatnya Sultan Ali Mughayat Syah pemerintahan beralih kepada putranya yang bergelar Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528-1537 M. Selama menduduki tahta kerajaan ia tidak memperdulikan pemerintahan kerajaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Oleh karena itu Sultan Salahuddin digantikan saudaranya yang bernama Alauddin Riayat Syah Al-kahar.

Sultan Alauddin Riayat Syah Al-kahar. Ia memerintah aceh dari tahun 1537-1568 M. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintahan. Pada pemerintahannya kerajaan aceh melakukan perluasan wilayah

kekuasaannya seperti melakukan serangan terhadap kerajaan malaka (tetapi gagal). Daerah kerajaan Aru berhasil diduduki. Pada masa pemerintahannya kerajaan aceh mengalami masa suram banyak pemberontakan dan perebutan kekuasaan sering terjadi.

Sultan Iskandar Muda. Ia memerintah Kerajaan Aceh tahun 1607-1636 M. Dibawah pemerintahannya kerajaan aceh mengalami kejayaan, tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan islam, bahkan menjadi bandar transito yang dapat menghubungkan dengan perdagangan islam di barat.

Untuk mencapai kebesaran Kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda meneruskan perjuangan dengan menyerang Portugis dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya untuk menguasai jalur perdagangan di selat malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Sulata Iskandar Muda juga menolak permintaan Inggris dan Belanda untuk membeli lada di pesisir Sumatra bagian barat. Selain itu, kerajaan aceh melakukan pendudukan terhadap daerah-daerah seperti Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri sehingga kerajaan aceh memiliki wilayah yang sangat luas.

Pada masa kekuasaannya terdapat dua orang ahli tasawwuf yang terkenal di aceh Syech Syamsuddin bin Abdullah Asy-samatrani dan Syech Ibrahim Asy-syamsi. Setelah sultan itu wafat digantikan oleh menantunya Iskandar Thani. **Sultan Iskandar Thani.** Ia memerintah tahun 1636-1641 M. Dalam menjalankan pemerintahannya ia melanjutkan tradisi Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya muncul seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-raniri. Ia menulis buku sejarah aceh berjudul Bustanu'salatin. Sebagai ulama besar Nuruddin Ar-raini sangat dihormati Sultan Iskandar Thani dan keluarganya serta rakyat aceh. Setelah Sultan Iskandar Thani meninggal tahta kerajaan dipegang oleh putri dari permasyurinya dengan gelar Putri Sri Alam Permaisuri (1641-1667 M).

Kehidupan Ekonomi

Letak Aceh Darussalam yang strategis menyebabkan perdagangan maju pesat. Bidang perdagangan yang maju tersebut menjadikan Aceh Darussalam makin makmur. Setelah dapat menaklukkan Pedir yang kaya akan lada putih, Aceh Darussalam makin bertambah makmur. Dengan kekayaan yang melimpah, Aceh Darussalam mampu membangun angkatan bersenjata yang kuat. Sumber pemasukan utama Kerajaan

Aceh Darussalam adalah lada dan emas. Mata pencaharian utama penduduk Aceh Darussalam adalah bidang perdagangan, terutama perdagangan lada dan emas. Selain berdagang, rakyat Aceh Darussalam juga menggantungkan diri pada sektor kelautan dan pertanian. Aceh banyak memiliki komoditas yang diperdagangkan diantaranya:

- a. Minyak tanah dari Deli;
- b. Belerang dari Pulau Weh dan Gunung Seulawah;
- c. Kapur dari Singkil;
- d. Kapur Barus dan menyan dari Barus;
- e. Emas di pantai barat;
- f. Sutera di Banda Aceh (Mustopo, 2014).

Selain itu di ibukota juga banyak terdapat pandai emas, tembaga, dan suasa yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Sedang Pidie merupakan lumbung beras bagi kesultanan. Namun di antara semua yang menjadi komoditas unggulan untuk diekspor adalah lada. Produksi terbesar terjadi pada tahun 1820. Menurut perkiraan Penang, nilai ekspor Aceh mencapai 1,9 juta dollar Spanyol. Dari jumlah ini \$400.000 dibawa ke Penang, senilai \$1 juta diangkut oleh pedagang Amerika dari wilayah lada di pantai barat. Sisanya diangkut kapal dagang India, Perancis, dan Arab. Pusat lada terletak di pantai Barat yaitu Rigas, Teunom, dan Meulaboh (Daliman, 2012).

Kehidupan Sosial dan Budaya

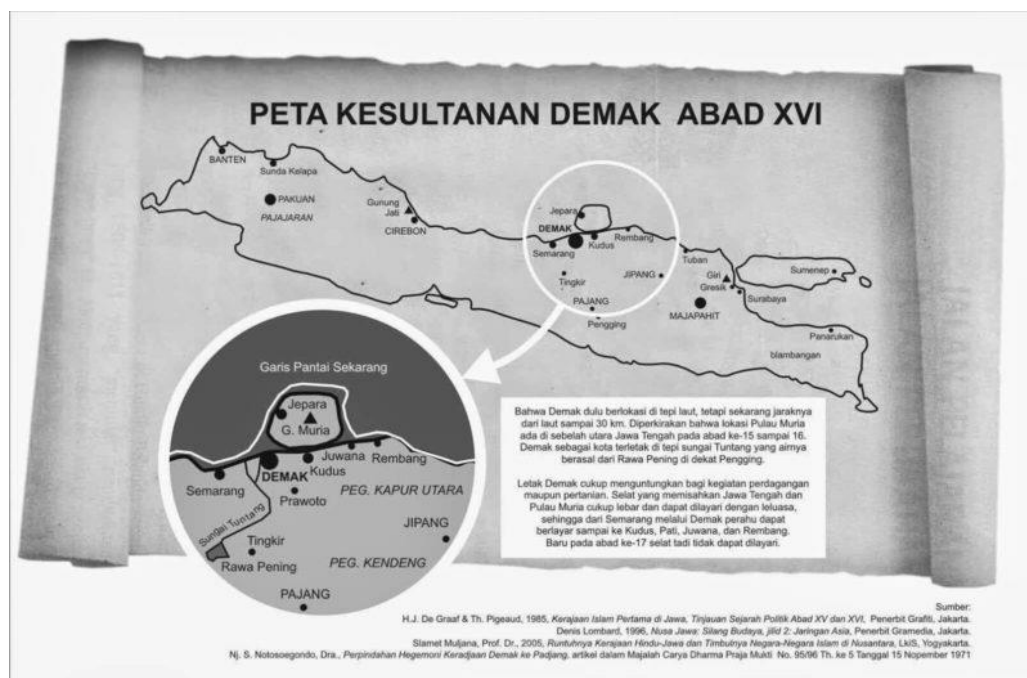
Meningkatnya kemakmuran telah menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme dan ajaran agama islam di aceh. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil dalam *golongan Teuku*, sedangkan kaum ulama yang memegang peranan penting dalam agama disebut *golongan Teungku*, namun antara kedua golongan masyarakat itu sering terjadi persaingan yang kemudian melemahkan aceh. Sejak berkuasanya Kerajaan Perlak (abad ke-12 M samapai ke-13 M) telah terjadi permusuhan antara aliran Syiah dengan Sunnah Wal Jamma'ah. Tetapi pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda aliran Syiah memperoleh perlindungan dan berkembang sampai di daerah-daerah kekuasaan Aceh (Mustopo, 2014).

Pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Thani muncul ahli tasawwuf terkenal dari gujarad yang bernama Nurrudin Ar-Raniri. Hasil karyanya yang terkenal adalah

Bustanus Salatin yang berisi sejarah Aceh. Ajaran Nurrudin Ar-Raniri bertentangan dengan ajaran Hamzah Fansyuri dan Syamsudin As-Samatrani. Hal itu menyebabkan perpecahan di kerajaan aceh pada tahun 1641, Sultan Iskandar Thani wafat. Setelah Sultan Iskandar Thani meninggal aceh mengalami kemunduran di berbagai bidang.

Kejayaan yang dialami oleh Kerajaan Aceh tersebut tidak banyak diketahui dalam bidang kebudayaan. Walaupun ada perkembangan dalam bidang kebudayaan, tetapi tidak sepesat perkembangan dalam aktifitas perekonomian. Peninggalan kebudayaan yang terlihat nyata adalah Masjid Baiturrahman. Sesudah Sultan Iskandar wafat, aliran Sunnah Wal Jamma'ah mengembangkan islam beraliran Sunnah Wal Jamma'ah, ia juga menulis sejarah aceh yang berjudul *Busnanussalatin* (Taman raja-raja dan berisi adat-istiadat aceh beserta ajaran agama Islam) (Poesponegoro, 2008).

D. Kerajaan Demak



Gambar 4. Peta Wilayah Kekuasaan Kesultanan Demak

Sumber: sijai.com

Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Demak, dan berdiri pada tahun 1478 M. Hal ini didasarkan atas jatuhnya kerajaan Majapahit yang diberi tanda Candra Sengkala: *Sirna hilang Kertaning Bumi*, yang berarti tahun saka 1400 atau 1478 M. Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Fatah. Beliau selalu memajukan agama

Islam di bantu oleh para wali dan saudagar Islam. Raden Fatah nama kecilnya adalah Pangeran Jimbun. Menurut sejarah, dia adalah putera raja Majapahit yang terakhir dari garwa Ampean, dan Raden Fatah dilahirkan di Palembang. Karena Arya Damar sudah masuk Islam maka Raden Fatah dididik secara Islam, sehingga jadi pemuda yang taat beragama Islam (Graaf, 2003).

Kehidupan Politik

Ketika kerajaan Majapahit mulai mundur, banyak bupati yang ada di daerah pantai utara Pulau Jawa melepaskan diri. Bupati-bupati itu membentuk suatu persekutuan di bawah pimpinan Demak. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, berdirilah kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di pulau Jawa. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Demak adalah menurut Graaf (2003) sebagai berikut:

Raden Patah (1500-1518). Raden Patah adalah pendiri dan sultan pertama dari kerajaan Demak yang memerintah tahun 1500-1518 (Muljana: 2005). Menurut Babad Tanah Jawi, Raden Patah adalah putra prabu Brawijaya raja terakhir. Di ceritakan prabu Brawijaya selain kawin dengan Ni Endang Sasmitapura, juga kawin dengan putri Cina dan putri Campa. Karena Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu, prabu Brawijaya terpaksa memberikan putri Cina kepada putra sulungnya, yaitu Arya Damar bupati Palembang. Setelah melahirkan Raden Patah, setelah itu putri Cina dinikahi Arya Damar, dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Kusen. Demikianlah Raden Patah dan Raden Kusen adalah saudara sekandung berlainan bapak. Menurut kronik Cina dari kuil Sam Po Kong, nama panggilan waktu Raden Patah masih muda adalah Jin Bun, putra Kung-ta-bu-mi (alias Bhre Kertabhumi) atau disebut juga prabu Brawijaya V dari selir Cina.

Babad Tanah Jawi menyebutkan, Raden Patah dan Raden Kusen menolak untuk menuruti kehendak orang tuanya untuk menggantikan ayahnya sebagai adipati di Palembang. Mereka lolos dari keraton menuju Jawa dengan menumpang kapal dagang. Mereka berdua mendarat di Surabaya, lalu menjadi santri pada Sunan Ngampel. Raden Patah tetap tinggal di Ngampel Denta, kemudian dipungut sebagai menantu Sunan Ngampel, dikawinkan dengan cucu perempuan, anak sulung Nyai Gede Waloka. Raden Kusen kemudian mengabdikan pada prabu Brawijaya di Majapahit. Raden Kusen diangkat menjadi adipati Terung, sedangkan Raden Patah pindah ke

Jawa Tengah, di situ ia membuka hutan Glagahwangi atau hutan Bintara menjadi sebuah pesantren dan Raden Patah menjadi ulama di Bintara dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitarnya. Makin lama Pesantren Glagahwangi semakin maju. Prabu Brawijaya di Majapahit khawatir kalau Raden Patah berniat memberontak. Raden Kusen yang kala itu sudah diangkat menjadi Adipati Terung diperintah untuk memanggil Raden Patah. Raden Kusen menghadapkan Raden Patah ke Majapahit. Brawijaya merasa terkesan dan akhirnya mau mengakui Raden Patah sebagai putranya. Raden Patah pun diangkat sebagai bupati, sedangkan Glagahwangi diganti nama menjadi Demak, dengan ibu kota bernama Bintara.

Menurut kronik Cina, Jin Bun alias Raden Patah pindah dari Surabaya ke Demak tahun 1475. Kemudian ia menaklukkan Semarang tahun 1477 sebagai bawahan Demak. Hal itu membuat Kung-ta-bu-mi di Majapahit resah. Namun, berkat bujukan Bong Swi Hoo (alias Sunan Ampel), Kung-ta-bu-mi bersedia mengakui Jin Bun sebagai anak, dan meresmikan kedudukannya sebagai bupati di Bing-to-lo atau Bintara (Ricklefs, 2013).

Dalam waktu yang singkat, di bawah kepemimpinan Raden Patah, lebih-lebih oleh karena jatuhnya Malaka ke tangan portugis dalam tahun 1511, Demak mencapai puncak kejayaannya. Dalam masa pemerintahan Raden Patah, Demak berhasil dalam berbagai bidang, diantaranya adalah perluasan dan pertahanan kerajaan, pengembangan islam dan pengamalannya, serta penerapan musyawarah dan kerja sama antara ulama dan umara (penguasa). Keberhasilan Raden Patah dalam perluasan dan pertahanan kerajaan dapat dilihat ketika ia menaklukkan Girindra Wardhana yang merebut takhta Majapahit (1478), hingga dapat mengambil alih kekuasaan majapahit. Selain itu, Raden Patah juga mengadakan perlawanan terhadap portugis, yang telah menduduki malaka dan ingin mengganggu demak. Ia mengutus pasukan di bawah pimpinan putranya, Pati Unus atau Adipati Yunus atau Pangeran Sabrang Lor (1511), meski akhirnya gagal. Perjuangan Raden Patah kemudian dilanjutkan oleh Pati Unus yang menggantikan ayahnya pada tahun 1518. Dalam bidang dakwah islam dan pengembangannya,

Raden patah mencoba menerapkan hukum islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid (1479) yang

sampai sekarang terkenal dengan masjid Agung Demak. Pendirian masjid itu dibantu sepenuhnya oleh walisanga.

Adipati Unus (1518-1521). Pada tahun 1518 Raden Patah wafat kemudian digantikan putranya yaitu Pati Unus. Pati Unus terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Karena keberaniannya itulah ia mendapatkan julukan Pangeran Sabrang Lor. Tome Pires dalam bukunya *Suma Oriental* menceritakan asal-usul dan pengalaman Pati Unus. Dikatakan bahwa nenek Pate Unus berasal dari Kalimantan Barat Daya. Ia merantau ke Malaka dan kawin dengan wanita Melayu. Dari perkawinan itu lahir ayah Pati Unus, ayah Pati Unus kemudian kembali ke Jawa dan menjadi penguasa di Jepara. Setelah dewasa beliau diambil mantu oleh Raden Patah yang telah menjadi Sultan Demak I. Dari Pernikahan dengan putri Raden Patah, Adipati Unus resmi diangkat menjadi Adipati wilayah Jepara (tempat kelahiran beliau sendiri). Karena ayahanda beliau (Raden Yunus) lebih dulu dikenal masyarakat, maka Raden Abdul Qadir lebih sering dipanggil sebagai Adipati bin Yunus (atau putra Yunus). Kemudian hari banyak orang memanggil beliau dengan yang lebih mudah Pati Unus.

Tahun 1512 giliran Samudra Pasai yang jatuh ke tangan Portugis. Hal ini membuat tugas Pati Unus sebagai Panglima Armada Islam tanah Jawa semakin mendesak untuk segera dilaksanakan. Maka tahun 1513 dikirim armada kecil, ekspedisi Jihad I yang mencoba mendesak masuk benteng Portugis di Malaka gagal dan balik kembali ke tanah Jawa. Kegagalan ini karena kurang persiapan menjadi pelajaran berharga untuk membuat persiapan yang lebih baik. Maka direncanakanlah pembangunan armada besar sebanyak 375 kapal perang di tanah Gowa, Sulawesi yang masyarakatnya sudah terkenal dalam pembuatan kapal. Di tahun 1518 Raden Patah, Sultan Demak I bergelar Alam Akbar Al Fattah mangkat, beliau berwasiat supaya mantu beliau Pati Unus diangkat menjadi Sultan Demak berikutnya. Maka diangkatlah Pati Unus atau Raden Abdul Qadir bin Yunus.

Armada perang Islam siap berangkat dari pelabuhan Demak dengan mendapat pemberkatan dari Para Wali yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Armada perang yang sangat besar untuk ukuran dulu bahkan sekarang. Dipimpin langsung oleh Pati Unus bergelar Senapati Sarjawala yang telah menjadi Sultan Demak II. Dari sini sejarah keluarga beliau akan berubah, sejarah kesultanan Demak akan berubah dan

sejarah tanah Jawa akan berubah. Kapal yang ditumpangi Pati Unus terkena peluru meriam ketika akan menurunkan perahu untuk merapat ke pantai. Ia gugur sebagai Syahid karena kewajiban membela sesama Muslim yang tertindas penjajah (Portugis) yang bernafsu memonopoli perdagangan rempah-rempah.

Sedangkan Pati Unus, Sultan Demak II yang gugur kemudian disebut masyarakat dengan gelar Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran (yang gugur) di seberang utara. Pimpinan Armada Gabungan Kesultanan Banten, Demak dan Cirebon segera diambil alih oleh Fadhlullah Khan yang oleh Portugis disebut Falthehan, dan belakangan disebut Fatahillah setelah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa 1527. Diambil alih oleh Fadhlullah Khan adalah atas inisiatif Sunan Gunung Jati yang sekaligus menjadi mertua karena putri beliau yang menjadi janda Sabrang Lor dinikahkan dengan Fadhlullah Khan.

Sultan Trenggono (1521-1546). Sultan Trenggono adalah Sultan Demak yang ketiga, beliau memerintah Demak dari tahun 1521-1546 M. Sultan Trenggono adalah putra Raden Patah pendiri Demak yang lahir dari permaisuri Ratu Asyikah putri Sunan Ampel. Menurut Suma Oriental, ia dilahirkan sekitar tahun 1483. Ia merupakan adik kandung Pangeran Sabrang Lor, raja Demak sebelumnya (versi Serat Kanda). Sultan Trenggono memiliki beberapa orang putra dan putri. Diantaranya yang paling terkenal ialah Sunan Prawoto yang menjadi raja penggantinya, Ratu Kalinyamat yang menjadi bupati Jepara, Ratu Mas Cempaka yang menjadi istri Sultan Hadiwijaya, dan Pangeran Timur yang berkuasa sebagai adipati di wilayah Madiun dengan gelar Ranga Jumena.

Sultan Trenggono Wafat/Mangkat Berita Sultan Trenggono wafat ditemukan dalam catatan seorang Portugis bernama Fernandez Mendez Pinto. Pada tahun 1546 Sultan Trenggono menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai Blambangan. Sunan Gunung Jati membantu dengan mengirimkan gabungan prajurit Cirebon, Banten, dan Jayakarta sebanyak 7.000 orang yang dipimpin Fatahillah. Mendez Pinto bersama 40 orang temannya saat itu ikut serta dalam pasukan Banten. Pasukan Demak sudah mengepung Panarukan selama tiga bulan, tapi belum juga dapat merebut kota itu. Suatu ketika Sultan Trenggono bermusyawarah bersama para adipati untuk melancarkan serangan selanjutnya. Putra bupati Surabaya yang berusia 10 tahun menjadi pelayannya. Anak kecil itu tertarik pada jalannya rapat

sehingga tidak mendengar perintah Trenggono. Trenggono marah dan memukulnya. Anak itu secara spontan membalas menusuk dada Trenggono memakai pisau. Sultan Demak itu pun tewas seketika dan segera dibawa pulang meninggalkan Panarukan.

Sultan Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawah Sultan Trenggana, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana (1527), Tuban (1527), Madiun (1529), Surabaya dan Pasuruan (1527), Malang (1545), dan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung timur pulau Jawa (1527-1546). Panglima perang Demak waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasai (Sumatera), yang juga menjadi menantu Sultan Trenggana. Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan, dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto

Sunan Prawata (1546-1549). Sunan Prawata adalah nama lahirnya (Raden Mukmin) adalah raja keempat Kesultanan Demak, yang memerintah tahun 1546-1549. Ia lebih cenderung sebagai seorang ahli agama daripada ahli politik. Pada masa kekuasaannya, daerah bawahan Demak seperti Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik, berkembang bebas tanpa mampu dihalanginya. Menurut Babad Tanah Jawi, ia tewas dibunuh oleh orang suruhan bupati Jipang Arya Penangsang, yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Setelah kematiannya, Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, dan Kesultanan Demak pun berakhir.

Sepeninggal Sultan Trenggana yang memerintah Kesultanan Demak tahun 1521-1546, Raden Mukmin selaku putra tertua naik tahta. Ia berambisi untuk melanjutkan usaha ayahnya menaklukkan Pulau Jawa. Namun, keterampilan berpolitiknya tidak begitu baik, dan ia lebih suka hidup sebagai ulama daripada sebagai raja. Raden Mukmin memindahkan pusat pemerintahan dari kota Bintoro menuju bukit Prawoto. Lokasinya saat ini kira-kira adalah desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oleh karena itu, Raden Mukmin pun terkenal dengan sebutan Sunan Prawoto.

Pemerintahan Sunan Prawoto juga terdapat dalam catatan seorang Portugis bernama Manuel Pinto. Pada tahun 1548, Manuel Pinto singgah ke Jawa sepulang mengantar surat untuk uskup agung Pastor Vicente Viegas di Makassar. Ia sempat

bertemu Sunan Prawoto dan mendengar rencananya untuk mengislamkan seluruh Jawa, serta ingin berkuasa seperti sultan Turki. Sunan Prawoto juga berniat menutup jalur beras ke Malaka dan menaklukkan Makassar. Akan tetapi, rencana itu berhasil dibatalkan oleh bujukan Manuel Pinto.

Cita-cita Sunan Prawoto pada kenyataannya tidak pernah terlaksana. Ia lebih sibuk sebagai ahli agama dari pada mempertahankan kekuasaannya. Satu per satu daerah bawahan, seperti Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik, berkembang bebas; sedangkan Demak tidak mampu menghalanginya.

Kehidupan Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian materi sebelumnya, bahwa letak Demak sangat strategis di jalur perdagangan nusantara memungkinkan Demak berkembang sebagai kerajaan maritim. Dalam kegiatan perdagangan, Demak berperan sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah di Indonesia bagian Timur dan penghasil rempah-rempah Indonesia bagian barat. Dengan demikian perdagangan Demak semakin berkembang. Dan hal ini juga didukung oleh penguasaan Demak terhadap pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir pantai pulau Jawa (Muchlisin, 2017).

Sebagai kerajaan Islam yang memiliki wilayah di pedalaman, maka Demak juga memperhatikan masalah pertanian, sehingga beras merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditi dagang. Dengan demikian kegiatan perdagangannya ditunjang oleh hasil pertanian, mengakibatkan Demak memperoleh keuntungan di bidang ekonomi. Letak kerajaan Demak yang strategis, sangat membantu Demak sebagai kerajaan Maritim. Lagi pula letaknya yang ada di muara sungai Demak mendorong aktivitas perdagangan cepat berkembang. Di samping dari perdagangan, Demak juga hidup dari agraris. Pertanian di Demak tumbuh dengan baik karena aliran sungai Demak lewat pelabuhan Bergota dan Jepara. Demak bisa menjual produksi andalannya seperti beras, garam dan kayu jati (Ricklefs, 2013).

Kehidupan Sosial dan Budaya

Berdirinya kerajaan Demak banyak didorong oleh latar belakang untuk mengembangkan dakwah Islam. Oleh karena itu tidak heran jika Demak gigih melawan daerah-daerah yang ada dibawah pengaruh asing. Berkat dukungan Wali

Songo, Demak berhasil menjadikan diri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa yang memiliki pengaruh cukup luas. Untuk mendukung dakwah pengembangan agama Islam, dibangun Masjid Agung Demak sebagai pusatnya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam di pulau Jawa (Ricklefs, 2013).

Sebagai pusat penyebaran Islam Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus dan Sunan Bonar. Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan kerajaan Demak bahkan para wali tersebut menjadi penasihat bagi raja Demak. Dengan demikian terjalin hubungan yang erat antara raja/bangsawan, para wali/ulama dengan rakyat. Hubungan yang erat tersebut, tercipta melalui pembinaan masyarakat yang diselenggarakan di Masjid maupun Pondok Pesantren. Sehingga tercipta kebersamaan atau Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan di antara orang-orang Islam) (Daliman, 2012).

Demikian pula dalam bidang budaya banyak hal yang menarik yang merupakan peninggalan dari kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Demak, di mana salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut Soko Tatal. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Di serambi depan Masjid (pendopo) itulah Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan Sekaten (Maulud Nabi Muhammad saw) yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon (Badrika, 2006).

Dilihat dari arsitekturnya, Masjid Agung Demak memperlihatkan adanya wujud akulturasi kebudayaan Indonesia Hindu dengan kebudayaan Islam. Salah satu peninggalan berharga kerajaan Demak adalah bangunan Masjid Demak yang terletak di sebelah barat alun-alun Demak. Masjid Agung Demak memiliki ciri khas yakni salah satu tiang utamanya terbuat dari tatal (potongan kayu), atap tumpang, dan di belakangnya terdapat makam raja-raja Demak (Muljana, 2005).

E. Kerajaan Banten

Berdirinya kerajaan Banten atas inisiatif Sunan Gunung Jati pada 1524, setelah sebelumnya mengislamkan Cirebon. Awalnya, Banten merupakan bagian dari wilayah Pajajaran yang Hindu, namun setelah Demak berhasil menghalau pasukan

Portugis di Batavia, Banten pun secara tak langsung berada di bawah kekuasaan Demak. Semasa Sunan Gunung Jati, Banten masih termasuk kekuasaan Demak. Pada tahun 1552, ia pulang ke Cirebon dan Banten diserahkan kepada anaknya, Maulana Hasanuddin (Graaf, 2003).



Gambar 5. Peta Wilayah Kerajaan Banten
Sumber: ganaislamika.com

Kehidupan Politik

Sultan pertama Kerajaan Banten ini adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1522-1570. Ia adalah putra Fatahillah, seorang panglima tentara Demak yang pernah diutus oleh Sultan Trenggana menguasai bandarbandar di Jawa Barat. Pada waktu Kerajaan Demak berkuasa, daerah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Namun setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak (Graaf, 2003)..

Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis (1511) membuat para pedagang muslim memindahkan jalur pelayarannya melalui Selat Sunda. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan. Hasanuddin memperluas kekuasaan Banten ke daerah penghasil lada, Lampung di Sumatra Selatan yang sudah sejak lama mempunyai hubungan dengan Jawa Barat. Dengan demikian, ia telah meletakkan dasar-dasar bagi kemakmuran Banten sebagai pelabuhan lada. Pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin wafat Muchlisin, 2017).

Penguasa Banten selanjutnya adalah Maulana Yusuf (1570-1580), putra Hasanuddin. Di bawah kekuasaannya Kerajaan Banten pada tahun 1579 berhasil

menaklukkan dan menguasai Kerajaan Pajajaran (Hindu). Akibatnya pendukung setia Kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yaitu daerah Banten Selatan, mereka dikenal dengan Suku Badui. Setelah Pajajaran ditaklukkan, konon kalangan elite Sunda memeluk agama Islam (Poesponegoro, 2008).

Maulana Yusuf digantikan oleh Maulana Muhammad (1580-1596). Pada akhir kekuasaannya, Maulana Muhammad menyerang Kesultanan Palembang. Dalam usaha menaklukkan Palembang, Maulana Muhammad tewas dan selanjutnya putra mahkotanya yang bernama Pangeran Ratu naik takhta. Ia bergelar Sultan Abul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa putra Pangeran Ratu yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682). Ia sangat menentang kekuasaan Belanda. Usaha untuk mengalahkan orang-orang Belanda yang telah membentuk VOC serta menguasai pelabuhan Jayakarta yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kegagalan. Setelah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mulai dikuasai oleh Belanda di bawah pemerintahan Sultan Haji (Ricklefs, 2013).

Kehidupan Ekonomi

Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Adapun faktor-faktornya ialah: (1) letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan; (2) jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka namun langsung menuju Banten; (3) Banten mempunyai bahan ekspor penting yakni lada. Banten yang menjadi maju banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina dan sebagainya. Di kota dagang Banten segera terbentuk perkampungan-perkampungan menurut asal bangsa itu, seperti orang-orang Arab mendirikan Kampung Pakojan, orang Cina mendirikan Kampung Pacinan, orang-orang Indonesia mendirikan Kampung Banda, Kampung Jawa dan sebagainya (Ricklefs, 2013).

Kehidupan Sosial dan Budaya

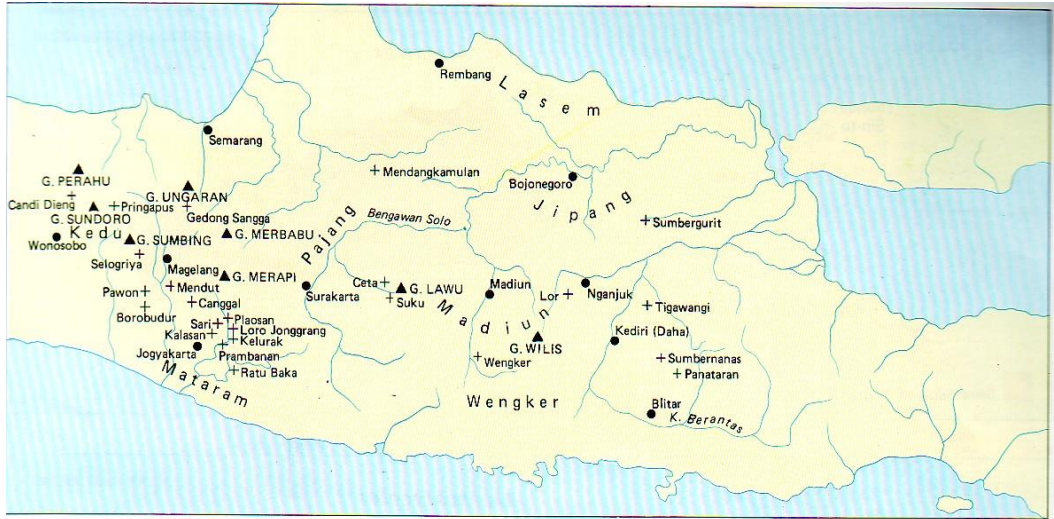
Sejak Banten di Islamkan oleh Fatahilah (Faletehan) tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Setelah

Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Pendukung kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yakni ke daerah Banten Selatan, mereka dikenal sebagai Suku Badui. Kepercayaan mereka disebut Pasundan Kawitan yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka mempertahankan tradisi-tradisi lama dan menolak pengaruh Islam (Yusuf, 2006).

Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik, karena sultan memerhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat berubah merosot tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten (tumpang lima), dan bangunan gapura-gapura di Kaibon Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lukas Cardeel, orang Belanda, pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa.

F. Kerajaan Mataram

Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat Kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kotagede. Para raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram yaitu: Panembahan Senopati (1584-1601), Panembahan Seda Krapyak (1601-1677). Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang cukup penting dalam perjalanan secara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara (Indonesia). Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, keterlibatan para pemuka agama, hingga pengembangan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa (Graaf, 2003).



Gambar 6. Peta Silayah Kerajaan Mataram Islam
Sumber: mbahrigo.wordpress.com

Kehidupan Politik

Kemajuan politik yang dicapai Sultan Agung adalah menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan menyerang Belanda di Batavia.

Penyatuan kerajaan-kerajaan Islam. Sultan Agung berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Usaha ini dimulai dengan menguasai Gresik, Jaratan, Pamekasan, Sumenep, Sampang, Pasuruhan, kemudian Surabaya. Salah satu usahanya mempersatukan kerajaan Islam di Pulau Jawa ini ada yang dilakukan dengan ikatan perkawinan. Sultan Agung mengambil menantu Bupati Surabaya Pangeran Pekik dijodohkan dengan putrinya yaitu Ratu Wandansari (Graaf, 2003).

Anti penjajah Belanda. Sultan Agung adalah raja yang sangat benci terhadap penjajah Belanda. Hal ini terbukti dengan dua kali menyerang Belanda ke Batavia, yaitu yang pertama tahun 1628 dan yang kedua tahun 1629 (Graaf, 2003). Kedua penyerangan ini mengalami kegagalan. Adapun penyebab kegagalannya, antara lain:

1. Jarak yang terlalu jauh berakibat mengurangi ketahanan prajurit mataram. Mereka harus menempuh jalan kaki selama satu bulan dengan medan yang sangat sulit
2. Kekurangan dukungan logistik menyebabkan pertahanan prajurit Mataram di Batavia menjadi lemah.

- c. Kalah dalam sistem persenjataan dengan senjata yang dimiliki kompeni Belanda yang serba modern.
- d. Banyak prajurit Mataram yang terjangkit penyakit dan meninggal, sehingga semakin memperlemah kekuatan.
- e. Portugis bersedia membantu Mataram dengan menyerang Batavia lewat laut, sedangkan Mataram lewat darat. Ternyata Portugis mengingkari. Akhirnya Mataram dalam menghadapi Belanda tanpa bantuan Portugis.
- f. Kesalahan politik Sultan Agung yang tidak menadakan kerja sama dengan Banten dalam menyerang Belanda. Waktu itu mereka saling bersaing.
- g. Sistem koordinasi yang kurang kompak antara angkatan laut dengan angkatan darat. Ternyata angkatan laut mengadakan penyerangan lebih awal sehingga rencana penyerangan Mataram ini diketahui Belanda.
- h. Akibat penghianatan oleh salah seorang pribumi, sehingga rencana penyerangan ini diketahui Belanda sebelumnya.

Kehidupan Ekonomi

Kemajuan dalam bidang ekonomi menurut Yusuf (2006) meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Mataram juga mengadakan pemindahan penduduk (transmigrasi) dari daerah yang kering ke daerah yang subur dengan irigasi yang baik. Dengan usaha tersebut, Mataram banyak mengekspor beras ke Malaka.
- b. Penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa tidak hanya menambah kekuatan politik, tetapi juga kekuatan ekonomi. Dengan demikian ekonomi Mataram tidak semata-mata tergantung ekonomi agraris, tetapi juga karena pelayaran dan perdagangan.

Kehidupan Sosial dan Budaya

Kehidupan masyarakat di kerajaan Mataram, tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian

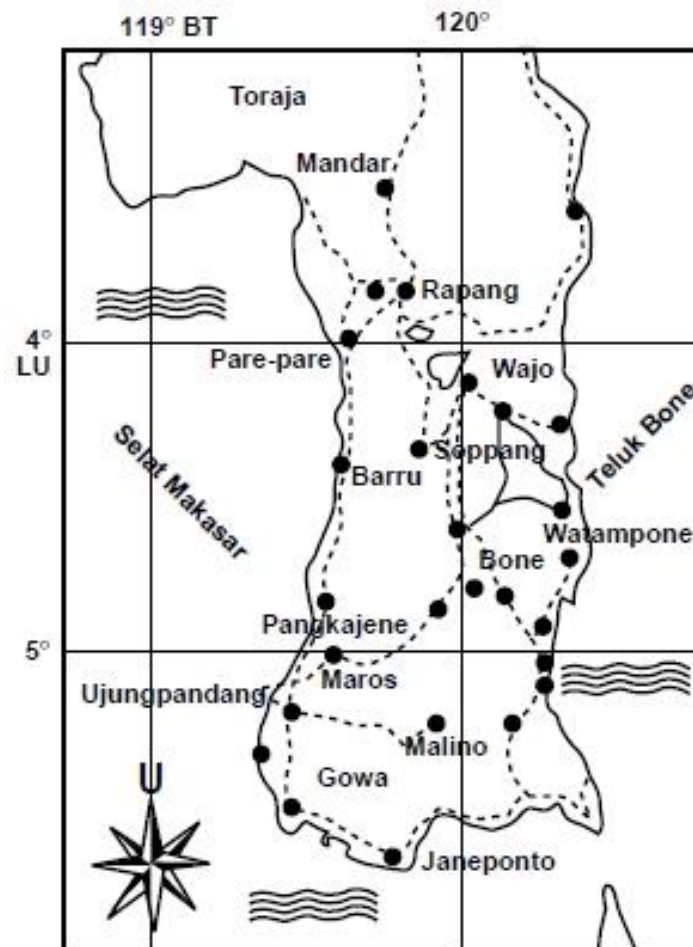
diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang keagamaan terdapat penghulu, khotib, naid, dan surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Di bidang pengadilan, dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan, diciptakan peraturan yang dinamakan *anger-anger* yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk. Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan ini menggantungkan kehidupannya dari sektor agraris. Hal ini karena letaknya yang berada di pedalaman. Akan tetapi, Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritas sebagai pelaut. Daerah pesisir inilah yang berperan penting bagi arus perdagangan Kerajaan Mataram. Kebudayaan yang berkembang pesat pada masa Kerajaan Mataram berupa seni tari, pahat, suara, dan sastra. Bentuk kebudayaan yang berkembang adalah Upacara Kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Budha dengan Islam. Di samping itu, perkembangan di bidang kesusastraan memunculkan karya sastra yang cukup terkenal, yaitu Kitab Sastra Gending yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Hukum Surya Alam (Graaf, 2003).

G. Kerajaan Gowa dan Tallo

Pada awalnya di daerah Gowa terdapat sembilan komunitas, yang dikenal dengan nama *Bate Salapang* (Sembilan Bendera), yang kemudian menjadi pusat kerajaan Gowa: Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bissei, Sero dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk Kerajaan Gowa. Cerita dari pendahulu di Gowa dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri Istana Gowa, tetapi tradisi Makassar lain menyebutkan empat orang yang mendahului datangnya Tumanurung, dua orang pertama adalah Batara Guru dan saudaranya

Kesultanan Gowa atau kadang ditulis Goa, adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari Suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Gowa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal

dengan Perang Makassar (1666-1669) terhadap VOC yang dibantu oleh Kerajaan Bone yang dikuasai oleh satu wangsa Suku Bugis dengan rajanya Arung Palakka. Perang Makassar bukanlah perang antarsuku karena pihak Gowa memiliki sekutu dari kalangan Bugis; demikian pula pihak Belanda-Bone memiliki sekutu orang Makassar. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukannya di abad ke-17 (Poesponegoro, 2008).



Gambar 7. Peta Wilayah Kerajaan Gowa dan Tallo
Sumber: sejarahakademik.blogspot.go.id

Kehidupan Politik

Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Robandang/Dato' Ri Bandang dari Sumatera, sehingga pada abad 17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan, bahkan raja Makasar pun memeluk agama Islam. Raja Makasar yang pertama memeluk agama Islam adalah Sultan Alaudin. Sejak pemerintahan

Sultan Alaudin kerajaan Makasar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Muhammad Said (1639-1653) (Taupan, 2008).

Selanjutnya kerajaan Makasar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasannudin (1653-1669). Pada masa pemerintahannya Makasar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makasar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Soppeng, dan Bone. Perluasan daerah Makasar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makasar luas, seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasannudin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Untuk itu hubungan antara Batavia (pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur) dan Ambon terhalangi oleh adanya kerajaan Makasar. Dengan kondisi tersebut maka timbul pertentangan antara Sultan Hasannudin dengan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan. Peperangan tersebut terjadi di daerah Maluku (Kusnawati, 2005).

Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasannudin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasannudin tersebut maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai Ayam Jantan dari Timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makasar yaitu dengan melakukan politik adu-domba antara Makasar dengan kerajaan Bone (daerah kekuasaan Makasar). Raja Bone yaitu Aru Pallaka yang merasa dijajah oleh Makasar mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makasar. Sebagai akibatnya Aru Pallaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makasar (Mustopo, 2014).

Akibat persekutuan tersebut akhirnya Belanda dapat menguasai ibukota kerajaan Makasar. Dan secara terpaksa kerajaan Makasar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan kerajaan Makasar. Isi dari perjanjian Bongaya antara lain:

- 1) VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makasar.

- 2) Belanda dapat mendirikan benteng di Makasar.
- 3) Makasar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makasar.
- 4) Aru Pallaka diakui sebagai raja Bone (Kartodirdjo, 1975).

Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan Makasar terhadap Belanda tetap berlangsung. Bahkan pengganti dari Sultan Hasannudin yaitu Mapasomba (putra Hasannudin) meneruskan perlawanan melawan Belanda. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makasar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Akhirnya Belanda dapat menguasai sepenuhnya kerajaan Makasar, dan Makasar mengalami kehancurannya.

Kehidupan Ekonomi

Kerajaan Makasar merupakan kerajaan Maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian Timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor:

- Letak yang strategis
- Memiliki pelabuhan yang baik
- Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur.

Sebagai pusat perdagangan Makasar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makasar. Pelayaran dan perdagangan di Makasar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade' Aloping Loping Bicaranna Pabbalue, sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makasar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makasar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makasar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian Timur Sulawesi Selatan (Taupan, 2008).

Kehidupan Sosial dan Budaya

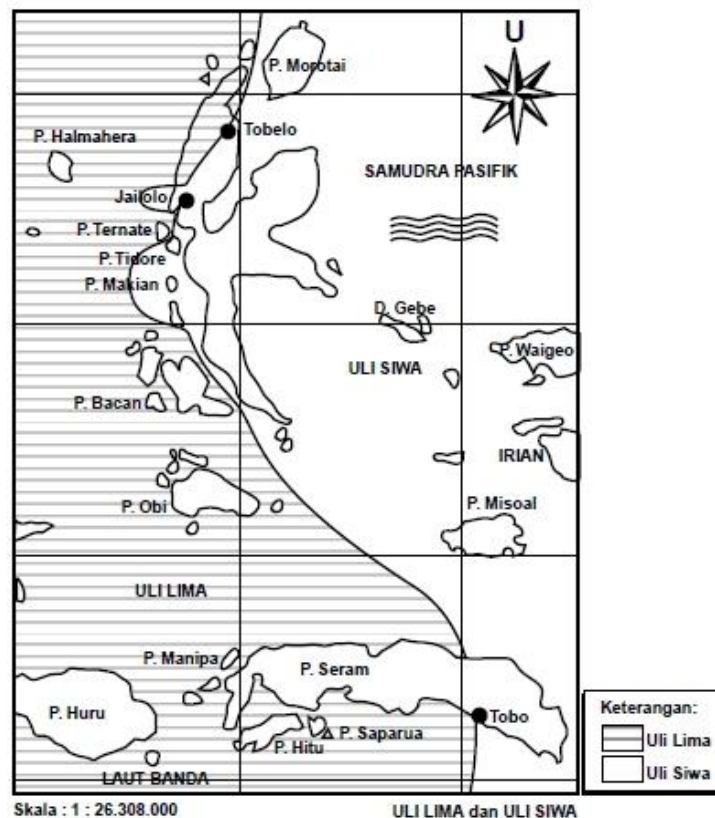
Sebagai negara Maritim, maka sebagian besar masyarakat Makasar adalah nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran

hidupnya. Walaupun masyarakat Makasar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makasar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut *Pangadakkang*. Dan masyarakat Makasar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma tersebut, masyarakat Makasar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan “*Anakarung/Karaeng*”, sedangkan rakyat kebanyakan disebut “*to Maradeka*” dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba-sahaya disebut dengan golongan “*Ata*” (Farid, 2017).

Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makasar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makasar dikenal dengan nama Pinisi dan Lombo. Kapal Pinisi dan Lombo merupakan kebanggaan rakyat Makasar dan terkenal sampai mancanegara (Djulianti, 2007).

H. Kerajaan Ternate dan Tidore

Secara geografis Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki letak yang sangat penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Kedua kerajaan ini terletak di daerah Kepulauan Maluku. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga dijuluki sebagai “*the Spice Island*”. Rempah-rempah menjadi komoditi utama dalam dunia pelayaran perdagangan saat itu, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang ke daerah Timur bertujuan untuk menemukan sumber rempah-rempah. Oleh karena itu/ muncullah hasrat untuk menguasai rempah-rempah tersebut. Keadaan seperti ini, telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Daliman, 2012).



Gambar 8. Peta Wilayah Kerajaan Ternate dan Tidore
Sumber: sejarahakademik.blogspot.go.id

Kehidupan Politik

Di Kepulauan Maluku banyak terdapat kerajaan kecil, di antaranya Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli Lima, yaitu persekutuan lima bersaudara dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sementara itu, Kerajaan Tidore memimpin Uli Siwa, yang berarti persekutuan sembilan bersaudara dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Makayan, Jahilolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di antara daerah itu sampai dengan Irian Barat (Poesponegoro, 2008).

Ketika bangsa Portugis masuk ke Maluku, Portugis langsung memihak dan membantu Ternate pada tahun 1521. Hal ini dikarenakan Portugis mengira Ternate lebih kuat. Begitu pula bangsa Spanyol yang ketika datang di Maluku langsung membantu Tidore. Terjadilah perselisihan antara kedua bangsa kulit putih tersebut di daerah Maluku. Untuk penyelesaian perselisihan kedua bangsa itu, Paus turun tangan dan menentukan garis batas wilayah timur melalui Perjanjian Saragosa. Dalam Perjanjian Saragosa dinyatakan bahwa bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku

dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap menguasai daerah-daerah di Maluku. Sultan Hairun Untuk dapat memperkuat kedudukannya di Maluku, Portugis mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Santo Paulo. Namun semakin lama tindakan Portugis semakin dibenci oleh rakyat dan bahkan oleh para pejabat Kerajaan Temate. Sultan Hairun, penguasa Ternate, semakin bertambah bend (anti) melihat tindakan-tindakan dan gerak-gerik bangsa Portugis. Oleh karena itu. Sultan Hairun secara terang-terangan menentang politik monopoli dari bangsa Portugis (Muchlis, 2017).

Sultan Baabullah Dengan kematian Sultan Hairun, rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Baabullah (putra Sultan Hairun), bangkit menentang Portugis. Tahun 1575 M, Portugis dapat dikalahkan dan diberi kesempatan untuk meninggalkan benteng. Pada tahun 1578 M, bangsa Portugis juga ingin mendirikan benteng di Ambon, tetapi tidak lama kemudian bangsa Portugis pindah ke daerah Timor Timur dan berkuasa di sana sampai tahun 1976. Sesudah tahun 1976 wilayah Timor Timur berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia hingga tahun 1999. Akan tetapi, setelah melalui jejak pendapat 1999, rakyat Timor-Timur memilih merdeka (Poesponegoro, 2008).

Kehidupan Ekonomi

Tanah di kepulauan Maluku itu subur dan diliputi hutan rimba yang banyak memberikan hasil diantaranya cengkeh dan di kepulauan Banda banyak menghasilkan pala. Pada abad ke 12 M permintaan rempah-rempah meningkat, sehingga cengkeh merupakan komoditi yang penting. Pesatnya perkembangan perdagangan keluar Maluku mengakibatkan terbentuknya persekutuan. Selain itu mata pencaharian perikanan turut mendukung perekonomian masyarakat (Poesponegoro, 2008).

Kehidupan Sosial dan Budaya

Kedatangan bangsa Portugis di kepulauan Maluku bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katholik. Dalam 1534 M, agama Katholik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, dan Ambon, berkat kegiatan Fransiskus Xaverius. Seperti sudah diketahui, bahwa sebagian dari daerah maluku terutama

Ternate sebagai pusatnya, sudah masuk agama Islam. Oleh karena itu, tidak jarang perbedaan agama ini dimanfaatkan oleh orang-orang Portugis untuk memancing pertentangan antara para pemeluk agama itu. Dan bila pertentangan sudah terjadi maka pertentangan akan diperuncing lagi dengan campur tangannya orang-orang Portugis dalam bidang pemerintahan, sehingga seakan-akan merekalah yang berkuasa. Setelah masuknya kompeni Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katholik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat besar dalam kehidupan rakyat dan semakin tertekannya kehidupan rakyat. Keadaan ini menimbulkan amarah yang luar biasa dari rakyat Maluku kepada kompeni Belanda. Di bawah pimpinan Sultan Ternate, perang umum berkobar, namun perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh kompeni Belanda. Kehidupan rakyat Maluku pada zaman kompeni Belanda sangat memprihatinkan sehingga muncul gerakan menentang Kompeni Belanda (Daliman, 2012).

Rakyat Maluku, yang didominasi oleh aktivitas perekonomian tampaknya tidak begitu banyak mempunyai kesempatan untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan rakyat Maluku tidak begitu banyak kita ketahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore (Poesponegoro, 2008).

I. Rangkuman

Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan modul tentang sejarah Kerajaan Islam di Indonesia. Dengan demikian, Anda sebagai guru sejarah telah mampu menganalisis perkembangan sejarah kerajaan Islam di Indonesia untuk diajarkan kepada peserta didik. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dalam modul ini adalah sebagai berikut.

- a. Seperti pada masa Hindu-Buddha, kehidupan politik di masa kerajaan Islam belum bisa terlepas dari konflik internal kerajaan, seringkali konflik itu yang membuat kerajaan menjadi runtuh. Misalnya saja Malaka dan Demak. Selain itu, pengaruh eksternal juga penting, yaitu VOC. Dalam perjalanannya kerajaan-kerajaan Islam dikikis eksistensinya melalui politik adu domba.

- b. Kehidupan ekonomi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia didominasi oleh sektor maritim, mengingat pada masa itu ekonomi masih berpijak pada jalur transportasi air. Disamping itu sektor agraris juga penting, pertumbuhan sektor agraris sangat pesat sejak masa Demak hingga Mataram Islam.
- c. Kehidupan sosial dan budaya pada masa kerajaan Islam biasanya didominasi oleh sastra dan seni. Sastra yang kemudian melahirkan serat syair maupun karya tulis lainnya dan seni yang kemudian melahirkan karya-karya fisik seperti arsitektur.
- d. Akulturasi pada masa kerajaan-kerajaan Islam berkuasa tidak dapat dikesampingkan. Pada dasarnya Islam yang ada di Indonesia merupakan hasil sinkretisme antara budaya lokal yang telah lama hidup serta berkembang dan Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Usairy, Ahmad. 2003. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Badri Yatim. 2006. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Press
- Badrika, I Wayan. 2006. *Sejarah untuk SMA kelas XI*. Jakarta: Erlangga
- Daliman. 2012. *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Djulianti Suroyo A.M, dkk. 2007. *Sejarah Martim Indonesia I*. Semarang: Penerbit Jeda Semarang
- Farid, Samsul. 2017. *Sejarah untuk Siswa SMA/MA Kelas XI Kelompok Peminatan IIS*. Bandung: Yrama Widya
- Gottschalk, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Graaf, H.J. De. dan TH. Pigeaud. 2003. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia III: Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesi*. Jakarta: Departemen Pandidikan dan Kebudayaan.
- Kusnawati, Maria dkk. 2005. *Sejarah 2: Untuk Kelas XI SMA Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bekasi: PT. Galaxy Puspa Mega
- Muchlis, Muhamad dkk. 2017. *Sejarah Peminatan IIS*. Klaten: PT. Macanan Jaya Cemerlang
- Muhlisin, Muhammad. 2017. *Kudeta Majapahit dan Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam di Bumi Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Araska
- Muljana, Slamet. 2005. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LKIS
- Mustopo, M. Habib. 2014. *Sejarah 2 Peminatan IIS*. Semarang: Penerbit Yudhistira
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II*. Edisi ke-4. Jakarta: Balai Pustaka
- Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ricklefs, MC. 2013. *Sejarah Asia Tenggara*. Depok: Komunitas Bambu
- Suhartono, Sudarini dkk. 2002. *Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XI Program IPS*. Semarang: Penerbit Erlangga
- Taupan, Muhamad. 2008. *Sejarah: Bilingual Untuk Kelas SMA/MA Kelas XI Semester 1 dan 2 Program IPS*. Bandung: Yrama Widya

Yusuf, Mundzirin dkk. 2006. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka

LATAR BELAKANG, PROSES MASUK, DAN PERKEMBANGAN PENJAJAHAN BANGSA EROPA DI INDONESIA

Ba'in

A. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia

Runtuhnya Kekaisaran Romawi

Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan *Kaisar Octavianus Augustus* dimana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara dan Afrika Barat. Namun setelah runtuhnya kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 M berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah Zaman Kegelapan (*Dark Ages*) dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau.



Perang Salib (Perang Suci)

Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen, dan Perang Suci oleh orang Muslim. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode.

Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun

dalam *perang Khitin*, pahlawan Islam yang terkenal ini bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bangsa barat masih tidak tinggal diam, Raja Richard The Lion Heart dari Inggris menghimbau raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem, namun mereka gagal. **Beberapa faktor penyebab Perang Salib :**

- a. Adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem.
- b. Merebut Spanyol yang telah tujuh abad dikuasai oleh Dinasti Umayyah.
- c. Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Aleksandria.

Dampak adanya Perang Salib :

- a. Jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung.
- b. Bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara besar-besaran.
- c. Adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia Timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan.

Jatuhnya Konstatinopel ke Umat Islam

Pada tahun 1453 Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai *Konstatinopel* yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan *Kerajaan Romawi-Byzantium*. Jatuhnya Konstatinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan.

Penjelajahan Samudra

Bangsa Eropa terkenal dengan kemahiranya dalam pelayaran, selain itu dalam pencarian rempah-rempah hingga **perburuan mutiara dari timur** ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudra, yaitu :

- a. Adanya semangat penaklukan (*reconquista*) terhadap orang – orang yang beragama islam.

- b. Jatuhnya Konstantinople, ibu kota Imperium ke tangan Dinasti Usmani Turki.
- c. Adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa – bangsa yang tinggal di belahan bumi lain.
- d. Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah – rempah.
- e. Kisah penjelajahan Marcopolo (1254-1324), seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience.
- f. Ingin memperoleh keuntungan / kekayaan yang sebanyak – banyaknya.
- g. Adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei bahwa bumi bulat
- h. Semangat 3G (Gold: emas, Glory: kejayaan, dan Gospel: penyebaran agama Nasrani) (Kemendikbud. 2016: 26)



Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Kemajuan teknologi pada saat itu juga mendorong bangsa barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara, penemuan seperti kompas, navigasi dan mesiu juga menjadi hal yang sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan diketemukannya benua Amerika oleh Colombus (Sardiman AM & Amurwani Dwi Lestariningsih. 2017: 73)

B. Proses Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia

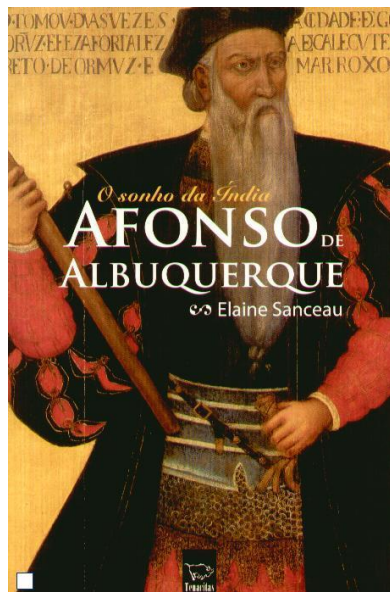
Pada permulaan abad Pertengahan, orang-orang Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia Timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani (1453) mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat (Timur Tengah) terputus.

Hal ini mendorong orang-orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia Timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Melalui penjelajahan samudra, akhirnya bangsa-bangsa Barat berhasil mencapai Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia pada mulanya lewat kongsi-kongsi perdagangan. Kongsi-kongsi perdagangan tersebut berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli.

Masuknya Bangsa Portugis ke Indonesia

Bangsa Portugis telah berhasil mencapai India (Kalikut) 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Gowa pada tahun 1509.

Pada tahun 1511 di bawah pimpinan *d'Albuquerque* Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka di bawah pimpinan *d'Abreu* tahun 1512 Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah.



Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen (Katolik) dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur (Maluku), tetapi juga ke Indonesia bagian barat (Pajajaran). Pada tahun 1522 Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik

oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak.

Terjadilah Perjanjian Sunda Kelapa (1522) antara Portugis dan Pajajaran, yang isinya sebagai berikut.

- a. Portugis diijinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa.
- b. Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata.
- c. Portugis akan memperoleh lada dari pajajaran menurut kebutuhannya.

Awal tahun 1527 Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasi Perjanjian Sunda Kelapa, namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Pertempuran berakhir dan namanya diganti menjadi Jayakarta, artinya pekerjaan yang jaya (menang) (Kemendikbud. 2016: 32)

Masuknya Bangsa Spanyol ke Indonesia

Kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia (Maluku) segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magelhaen, pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magelhaen diterima baik oleh Raja Cebu sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal Spanyol sebab dalam peperangan ini Magelhaen terbunuh.

Dengan meninggalnya Magelhaen, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah.



Dengan melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao akhirnya sampai di Maluku (1521). Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas “hak monopoli”. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol.

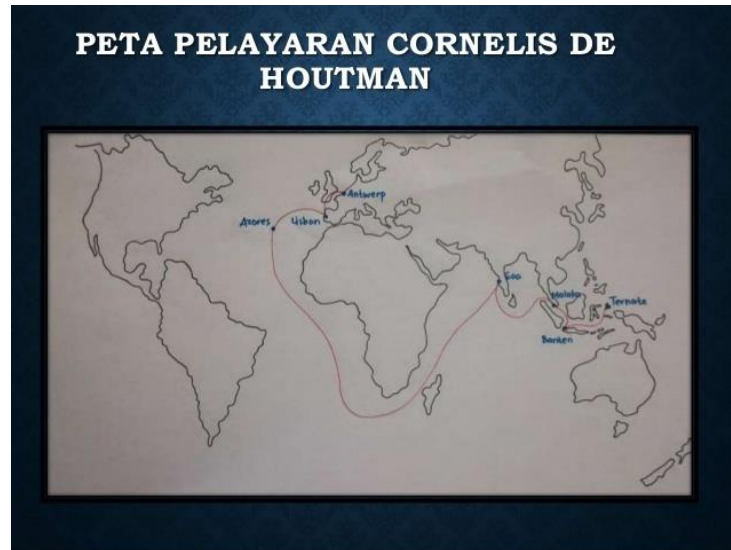
Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan Perjanjian Saragosa (22 April 1529) yang isinya sebagai berikut.

- a. Spanyol harus meninggalkan Maluku, dan memusatkan kegiatannya di Filipina.
- b. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku (Kemendikbud. 2016: 33)

Masuknya Bangsa Belanda ke Indonesia

Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon (ibu kota Portugis). Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusannya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra.

Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan empat buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute *Pantai Barat Afrika –Tanjung Harapan–Samudra Hindia–Selat Sunda–Banten*. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad (1580–1605). Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman, pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karenanya sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur akhirnya sampai di Bali.



Rombongan kedua dari Negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Neck dan Van Waerwyck, dengan delapan buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten sehingga tiga buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah (lada) dan dikirim ke Negeri Belanda, sedangkan lima buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku.

Keberhasilan rombongan Van Neck dalam perdagangan rempah-rempah, mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Olden Barneveld menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurus perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon (1602) di kepalai oleh Francois Wittert (Kemendikbud. 2016: 35) .

Tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda.
- b. Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan sesama bangsa Eropa, maupun dengan bangsa-bangsa Asia.
- c. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan, baik impor maupun ekspor.

Masuknya Bangsa Inggris ke Indonesia

Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil menemukan kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat bahkan sampai di Eropa Utara.

Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 Tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia Timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600.

Inggris justru memperkuat kedudukannya di India. Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company (EIC). Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, pada abad ke 18, sudah banyak para pedagang-pedagang Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia, bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia dengan sekutunya Perancis. Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan perusahaan dagangnya, yaitu VOC.

Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten untuk Inggris mendirikan kantord agang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantord agang di Jayakarta. Hingga abad ke 16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia, seperti Gowa, Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang

Inggris (Setiawan, 2017: 7) Adapun periode masuknya bangsa bangsa Eropa ke Indonesia adalah sebagai berikut:

- **Bangsa Portugis**

Th 1511	—————→	Alfonso de alberque	—————→	Malaka
Th 1512	—————→	d'Abreu	—————→	Maluku

- **Bangsa Spanyol**

Th 1521	—————→	Sebastian del Cano	—————→	Maluku
----------------	--------	---------------------------	--------	---------------

- **Bangsa Belanda**

Th 1596	—————→	Cornelius de Houtman	—————→	Banten
Th 1598	—————→	Jacob van Neck	—————→	Banten

- **Bangsa Inggris**

Th 1602	—————→	Sir James Lancaster	—————→	Banten
----------------	--------	----------------------------	--------	---------------

C. Perkembangan Penjajahan Portugis di Indonesia

Pada bulan April 1511, Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1200 orang dan 17 buah kapal. Peperangan pecah segera setelah kedatangannya dan berlangsung terus secara sporadis sepanjang bulan Juli hingga awal Agustus. Pihak Malaka terhambat oleh pertikaian antara Sultan Mahmud dan putranya, Sultan Ahmad yang baru saja disertai kekuasaan atas negara namun dibunuh atas perintah ayahnya.

Malaka akhirnya berhasil ditaklukan oleh Portugis. Albuquerque menetap di Malaka sampai bulan November 1511, dan selama itu dia mempersiapkan pertahanan Malaka untuk menahan setiap serangan balasan orang-orang Melayu. Dia juga memerintahkan kapal-kapal yang pertama untuk mencari Kepulauan Rempah. Sesudah itu dia berangkat ke India dengan kapal besar, dia berhasil meloloskan diri

ketika kapal itu karam di lepas pantai Sumatera beserta semua barang rampasan yang dijarah di Malaka.

Setelah satu kapal layar lagi tenggelam, sisa armada itu tiba di Ternate pada tahun itu juga. Dengan susah payah, ekspedisi pertama itu tiba di Ternate dan berhasil mengadakan hubungan dengan Sultan Aby Lais. Sultan Ternate itu berjanji akan menyediakan cengkeh bagi Portugis setiap tahun dengan syarat dibangunnya sebuah benteng di pulau Ternate.

Hubungan dagang yang tetap dirintis oleh Antonio de Abrito. Hubungannya dengan Sultan Ternate yang masih anak-anak, Kacili Abu Hayat, dan pengasuhnya yaitu Kacili Darwis berlangsung sangat baik. Pihak Ternate tanpa ragu mengizinkan De Brito membangun benteng pertama Portugis di Pulau Ternate (Sao Joao Bautista atau Nossa Seighora de Rossario) pada tahun 1522. Penduduk Ternate menggunakan istilah Kastela untuk benteng itu, bahkan kemudian benteng itu lebih dikenal dengan nama benteng Gamalama. Sejak tahun 1522 terjalin suatu hubungan dagang (cengkih) antara Portugis dan Ternate (Insulinda, 2015: 4)



Hubungan Ternate dan Portugis berubah menjadi tegang karena upaya yang lemah Portugis melakukan kristenisasi dan karena perilaku orang-orang Portugis yang tidak sopan. Pada tahun 1535, orang-orang Portugis di Ternate menurunkan Raja Tabariji (1523-1535) dari singgasananya dan mengirimnya ke Goa yang dikuasai Portugis. Disana dia masuk Kristen dan memakai nama Dom Manuel, dan setelah dinyatakan tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya, dia dikirim kembali ke Ternate untuk menduduki singgasananya lagi. Akan tetapi dalam perjalanannya dia wafat di Malaka pada tahun 1545. Namun sebelum wafat, dia menyerahkan Pulau Ambon kepada orang Portugis yang menjadi ayah baptisnya, Jordao de Freitas.

Akhirnya orang-orang Portugis yang membunuh Sultan Ternate, Hairun (1535-1570) pada tahun 1570, diusir dari Ternate pada tahun 1575 setelah terjadi pengepungan selama 5 tahun. Mereka kemudian pindah ke Tidore dan membangun benteng baru pada tahun 1578. Akan tetapi Ambonlah yang kemudian menjadi pusat utama kegiatan-kegiatan Portugis di Maluku sesudah itu. Ternate sementara itu menjadi sebuah negara yang gigih menganut Islam dan anti Portugis dibawah pemerintahan Sultan Baabullah (1570-1583) dan putranya Sultan Said ad-Din Berkat Syah (1584-1606).



Diantara para petualang Portugis tersebut ada seorang Eropa yang tugasnya memprakarsai suatu perubahan yang tetap di Indonesia Timur. Orang ini bernama Francis Xavier (1506-1552) dan Santo Ignaius Loyola yang mendirikan orde Jesuit. Pada tahun 1546-1547, Xavier bekerja di tengah-tengah orang Ambon, Ternate, dan Moro untuk meletakkan dasar-dasar bagi suatu misi yang tetap disana. Pada tahun 1560-an terdapat sekitar 10.000 orang katolik di wilayah itu dan pada tahun 1590-an terdapat 50.000-an orang. Orang-orang Dominik juga cukup sukses mengkristenkan Solor. Pada tahun 1590-an orang-orang Portugis dan penduduk lokal yang beragama Kristen di sana diperkirakan mencapai 25.000 orang (Insulinda, 2015: 6)

Selama berada di Maluku, orang-orang Portugis meninggalkan beberapa pengaruh kebudayaan mereka seperti balada-balada keroncong romantis yang dinyanyikan dengan iringan gitar berasal dari kebudayaan Portugis. Kosa kata Bahasa Indonesia juga ada yang berasal dari bahasa Portugis yaitu pesta, sabun, bendera,

meja, Minggu, dll. Hal ini mencerminkan peranan bahasa Portugis disamping bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di seluruh pelosok nusantara sampai awal abad XIX. Bahkan di Ambon masih banyak ditemukan nama-nama keluarga yang berasal dari Portugis seperti da Costa, Dias, de Fretas, Gonsalves, Mendoza, Rodriguez, da Silva, dan lain-lain. Pengaruh besar lain dari orang-orang Portugis di Indonesia yaitu penanaman agama Katolik di beberapa daerah timur di Indonesia.

D. Perkembangan Penjajahan Spanyol di Indonesia

Awak kapal Trinidad yang ditangkap oleh Portugal dan dipenjarakan kemudian dengan bantuan pelaut Minahasa dan Babontewu dari kerajaan Manado mereka dapat meloloskan diri. Ke 12 pelaut ini kemudian berdiam dipedalaman Minahasa, ke Amurang terus ke Pontak, kemudian setelah beberapa tahun mereka dapat melakukan kontak kembali dengan armada Spanyol yang telah kembali ke Pilipina. 1522 Spanyol memulai kolonisasi di Sulawesi Utara 1560 Spanyol mendirikan pos di Manado

Pada tahun 1550 Spanyol telah mendirikan benteng di Wenang dengan cara menipu Kepala Walak Lolong Lasut menggunakan kulit sapi dari Benggala India yang dibawa Portugis ke Minahasa. Tanah seluas kulit sapi yang dimaksud spanyol adalah tanah seluas tali yang dibuat dari kulit sapi itu. Spanyol kemudian menggunakan orang Mongodouw untuk menduduki benteng Portugis di Amurang pada tahun 1550-an sehingga akhirnya Spanyol dapat menduduki Minahasa. Dan Dotu Kepala Walak (Kepala Negara) Lolong Lasut punya anak buah Tonaas Wuri' Muda (Insulinda, 2015: 8)



Bartholomeo de Soisa mendarat pada 1651 dan mendirikan pelabuhan di daerah yang disebutnya 'La Quimas.' Penduduk setempat mengenal daerah ini dengan nama

~ Ba'in ~

‘Maadon’ atau juga ‘Kawuudan.’ Letak benteng Spanyol berada di muara sungai Kema, yang disebut oleh Belanda, “Spanyaardsgat,” atau Liang Spanyol.

Portugis dan Spanyol merupakan tumpuan kekuatan gereja Katholik Roma memperluas wilayah yang dilakukan kesultanan Ottoman di Mediterania pada abad ke-XV. Selain itu Portugis dan Spanyol juga tempat pengungsian pengusaha dan tenaga-tenaga terampil asal Konstantinopel ketika dikuasai kesultanan Ottoman dari Turki pada 1453. Pemukiman tersebut menyertakan alih pengetahuan ekonomi dan maritim di Eropa Selatan. Sejak itupun Portugis dan Spanyol menjadi adikuasa di Eropa. Alih pengetahuan diperoleh dari pendatang asal Konstantinopel yang memungkinkan bagi kedua negeri Hispanik itu melakukan perluasan wilayah-wilayah baru diluar daratan Eropa dan Mediterania. Sasaran utama adalah Asia-Timur dan Asia-Tenggara. Mulanya perluasan wilayah antara kedua negeri terbagi dalam perjanjian Tordisalles, tahun 1492. Portugis kearah Timur sedangkan Spanyol ke Barat. Masa itu belum ada gambaran bahwa bumi itu bulat. Baru disadari ketika kapal-kapal layar kedua belah pihak bertemu di perairan Laut Sulawesi. Kenyataan ini juga menjadi penyebab terjadi proses reformasi gereja, karena tidak semua yang menjadi “fatwa” gereja adalah Undang-Undang, hingga citra kekuasaan Paus sebagai penguasa dan wakil Tuhan di bumi dan sistem pemerintahan absolut theokratis ambruk. Keruntuhan ini terjadi dengan munculnya gereja Protestan rintisan Martin Luther dan Calvin di Eropa yang kemudian menyebar pula ke berbagai koloni Eropa di Asia, Afrika dan Amerika.

Dari kesepakatan Tordisalles itu, Portugis menelusuri dari pesisir pantai Afrika dan samudera Hindia. Sedangkan Spanyol menelusuri Samudera Atlantik, benua Amerika Selatan dan melayari samudera Pasifik. Pertemuan terjadi ketika kapal-kapal Spanyol pimpinan Ferdinand Magellan menelusuri Pasifik dan tiba di pulau Kawio, gugusan kepulauan Sangir dan Talaud di Laut Sulawesi pada 1521. Untuk mencegah persaingan di perairan Laut Sulawesi dan Maluku Utara, kedua belah pihak memperbarui jalur lintas melalui perjanjian Saragosa pada tahun 1529. Perjanjian tersebut membagi wilayah dengan melakukan batas garis tujuhbelas derajat lintang timur di perairan Maluku Utara. Namun dalam perjanjian tersebut, Spanyol merasa dirugikan karena tidak meraih lintas niaga dengan gugusan kepulauan penghasil rempah-rempah. Untuk itu mengirimkan ekspedisi menuju Pasifik Barat pada 1542.

Pada bulan Februari tahun itu lima kapal Spanyol dengan 370 awak kapal pimpinan Ruy Lopez de Villalobos menuju gugusan Pasifik Barat dari Mexico . Tujuannya untuk melakukan perluasan wilayah dan sekaligus memperoleh konsesi perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara.

Dari pelayaran ini Villalobos mendarat digugusan kepulauan Utara disebut Filipina, di ambil dari nama putera Raja Carlos V, yakni Pangeran Philip, ahli waris kerajaan Spanyol. Sekalipun Filipina tidak menghasilkan rempah-rempah, tetapi kedatangan Spanyol digugusan kepulauan tersebut menimbulkan protes keras dari Portugis. Alasannya karena gugusan kepulauan itu berada di bagian Barat, di lingkungan wilayahnya. Walau mengkonsentrasikan perhatiannya di Amerika-Tengah, Spanyol tetap menghendaki konsesi niaga rempah-rempah Maluku-Utara yang juga ingin didominasi Portugis. Tetapi Spanyol terdesak oleh Portugis hingga harus mundur ke Filipina. Akibatnya Spanyol kehilangan pengaruh di Sulawesi Utara yang sebelumnya menjadi kantong ekonomi dan menjalin hubungan dengan masyarakat Minahasa.

Peperangan di Filipina Selatan turut memengaruhi perekonomian Spanyol. Penyebab utama kekalahan Spanyol juga akibat aksi pemberontakan pendayung yang melayani kapal-kapal Spanyol. Sistem perkapalan Spanyol bertumpu pada pendayung yang umumnya terdiri dari budak-budak Spanyol. Biasanya kapal Spanyol dilayani sekitar 500 – 600 pendayung yang umumnya diambil dari penduduk wilayah yang dikuasai Spanyol. Umumnya pemberontakan para pendayung terjadi bila ransum makanan menipis dan terlalu dibatasi dalam pelayaran panjang, untuk mengatasinya Spanyol menyebarkan penanaman palawija termasuk aneka ragam cabai (rica), jahe (goraka), dan kunyit.

Kesemuanya di tanam pada setiap wilayah yang dikuasai untuk persediaan logistik makanan awak kapal dan ratusan pendayung.

Sejak itu budaya makan “pidis” yang diramu dengan berbagai bumbu masak yang diperkenalkan pelaut Spanyol menyebar pesat dan menjadi kegemaran masyarakat Minahasa (Insulinda, 2015: 11)

Ada pula yang menarik dari peninggalan kuliner Spanyol, yakni budaya Panada. Kue ini juga asal dari penduduk Amerika-Latin yang di bawa oleh Spanyol melalui

lintasan Pasifik. Bedanya, adonan panada, di isi dengan daging sapi ataupun domba, sedangkan panada khas Minahasa di isi dengan ikan.

Kota Kema merupakan pemukiman orang Spanyol, dimulai dari kalangan “pendayung” yang menetap dan tidak ingin kembali ke negeri leluhur mereka. Mereka menikahi perempuan-perempuan penduduk setempat dan hidup turun-temurun. Kema kemudian juga dikenal para musafir Jerman, Belanda dan Inggris. Mereka ini pun berbaur dan berasimilasi dengan penduduk setempat, sehingga di Kema terbentuk masyarakat pluralistik dan memperkaya Minahasa dengan budaya majemuk dan hidup berdampingan harmonis. Itulah sebabnya hingga masyarakat Minahasa tidak canggung dan mudah bergaul menghadapi orang-orang Barat.

Minahasa juga pernah berperang dengan Spanyol yang dimulai tahun 1617 dan berakhir tahun 1645. Perang ini dipicu oleh ketidakadilan Spanyol terhadap orang-orang Minahasa, terutama dalam hal perdagangan beras, sebagai komoditi utama waktu itu. Perang terbuka terjadi pada tahun 1644-1646. Akhir dari perang itu adalah kekalahan total Spanyol, sehingga berhasil diusir oleh para waranei (ksatria-ksatria Minahasa).

E. Perkembangan Penjajahan Belanda di Indonesia

Besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah dan didukung oleh pengusiran bangsa Portugis menyebabkan para penguasa di Belanda bersaing untuk berlayar ke Maluku. Harga rempah-rempah di Eropa pun semakin tidak terkendali. Melihat kenyataan ini. Parlemen Belanda atau *Staten Generaal* mengusulkan agar semua perusahaan pelayaran membentuk sebuah kongsi dagang pada tahun 1598. Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: *Verenigde Oostindische Compagnie* atau **VOC**). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602 (Indsejarah.net., 2016: 4)



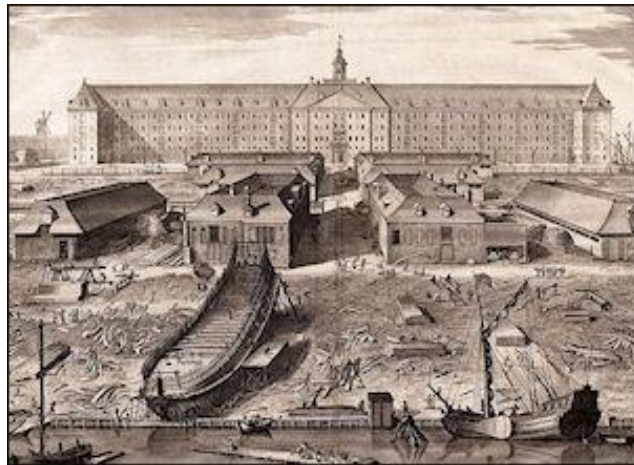
VOC mempunyai hak-hak istimewa yang disebut hak ***Oktrooi*** yang diberikan oleh parlemen Belanda. Hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika.
2. Hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan.
3. Hak berperang dan menjajah
4. Hak mengangkat pegawai.
5. Hak melakukan pengadilan dan hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri.

Di samping hak-hak istimewanya, VOC juga memiliki kewajiban khusus terhadap pemerintahan Belanda. VOC wajib melaporkan hasil keuntungan dagangnya kepada *Staten General* atau parlemen Belanda dan membantu pemerintah Belanda dalam kondisi perang.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC

menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, pada tahun 1618, Pangeran Jayakarta diserang oleh Kerajaan Banten. Kerajaan Banten di bantu oleh Inggris.



Pada tanggal 30 Mei 1619, Gubernur Jendral Jan Pieterzoon Coen, mengirimkan tujuh belas buah kapal untuk menyerang dan memukul mundur pasukan Banten. Pasukan Kerajaan Banten berhasil dikalahkan. Jan Pieterzon Coen kemudian membangun kembali kota Jayakarta dan memberinya nama Batavia. **Batavia** dijadikan pusat perdagangan dan kekuasaan Belanda dan Batavia juga resmi dijadikan markas besar VOC di Indonesia. Dalam menghadapi kerajaan-kerajaan Indonesia, Belanda melancarkan politik adu domba (*divide et impera*).

Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan utang yang dimilikinya berjumlah sangat besar. Hal ini juga diakibatkan oleh:

- a. persaingan dagang dari bangsa Perancis dan Inggris,
- b. penduduk Indonesia, terutama Jawa telah menjadi miskin, sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC
- c. perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan VOC,
- d. pegawai-pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan kecurangan-kecurangan akibat dari gaji yang diterimanya terlalu kecil,
- e. VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup besar untu memenuhi pegawai daerah-daerah yang baru dikuasai, terutama di Jawa dan Madura.

Maka pada tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1807, Republik Bataafsche dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti bentuknya

menjadi Kerajaan Holland di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte (adik dari Kaisar Napoleon).

VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799. Segala tanggung jawab VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda dan terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda (Nederlands Indies). Pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda. Dalam hal perkembangannya, Raja Louis Napoleon Bonaparte, yang bertanggung jawab atas wilayah Kerajaan Belanda, menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral di Indonesia. Dari tahun 1808-1811 Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jendral Belanda di Indonesia dengan tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya tersebut, perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan ketentaraan (Vlekke, 2010: 257)

Untuk memperkuat angkatan perangnya, Daendels melatih orang-orang Indonesia, karena tidak mungkin ia menambah tentaranya dari orang-orang Belanda yang didatangkan dari negeri Belanda. Pembangunan angkatan perangnya ini dilengkapi dengan pendirian tangsi-tangsi atau benteng-benteng, pabrik mesiu dan juga rumah sakit tentara. Di samping itu, atas dasar pertimbangan pertahanan, Daendels memerintahkan pembuatan jalan pos dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur. Pembuatan jalan ini menggunakan tenaga rakyat dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi, hingga selesainya pembuatan jalan itu. Untuk orang Belanda, pekerjaan menyelesaikan pembuatan jalan pos ini merupakan keberhasilan yang gemilang, tetapi lain halnya dengan bangsa Indonesia, di mana setiap jengkal jalan itu merupakan peringatan terhadap rintihan dan jeritan jiwa orang yang mati dalam pembuatan jalan tersebut (Indsejarah.net., 2016: 6)

Setelah pembuatan jalan selesai, Daendels memerintahkan pembuatan perahu-perahu kecil, karena perahu-perahu perang Belanda tidak mungkin dikirim dari negeri Belanda ke Indonesia. Selanjutnya pembuatan pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya perahu-perahu perang itu, Daendels merencanakan di daerah Banten Selatan. Pembuatan pelabuhan itu telah memakan ribuan korban jiwa orang Indonesia di Banten akibat dari penyakit malaria yang menyerang para pekerja paksa. Akhirnya pembuatan pelabuhan itu tidak selesai. Walaupun Daendels bersikeras untuk tetap menyelesaikannya, tetapi Sultan Banten menentangnya. Daendels menganggap jiwa

rakyat Banten tidak ada harganya, sehingga hal ini mengakibatkan pecahnya perang antara Daendels dengan Kerajaan Banten.



Di samping itu, pembuatan pelabuhan di Merak juga mengalami kegagalan dan hanya usaha untuk memperluas pelabuhan di Surabaya yang cukup memuaskan. Pada tahun 1810 Kerajaan Belanda di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Negeri Belanda dijadikan wilayah kekuasaan Perancis. Dengan demikian, wilayah jajahannya di Indonesia secara otomatis menjadi wilayah jajahan Perancis. Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter, maka pada tahun 1811 ia dipanggil kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansens.

Belanda kembali menguasai wilayah Indonesia berdasarkan Konvensi London tahun 1814. Pemerintahan kolonial Belanda selanjutnya dipegang oleh sebuah komisi yang beranggotakan Van der Capellen, Elout, dan Buyskes. Van der Capellen mempunyai peranan paling besar, ia berusaha mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Belanda yang cukup besar selama perang. Kebijakan yang diambil oleh Van der Capellen salah satunya adalah dengan menyewakan tanah kepada penguasa-penguasa Eropa. Selanjutnya pemerintah kolonial Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van de Bosch mengambil kebijakan tanam paksa pada tahun 1830 yang dikenal sebagai *cultuurstelsel* dalam bahasa Belanda yang mulai diterapkan di Indonesia (Sartono, 1987: 393)

Sistem Tanam Paksa telah merendahkan harkat dan martabat Bangsa Indonesia di rendahkan sampai menjadi perkakas bangsa Asing dalam usaha penjajah asing untuk mengisi kasnya. Keadaan rakyat sudah tentu kacau, sawah dikurangi untuk keperluan tanam paksa, rakyat dipaksa bekerja dimana-mana, kadang-kadang harus bekerja di kebun yang letaknya sampai 45 kilometer dari desanya. Kerja rodi dilaksanakan, pajak tanah harus dibayar, di pasar di peras oleh orang asing yang memborong pasar-pasar itu. Ditambah lagi para pegawai pemerintah kolonial Belanda ikut-ikutan memeras rakyat. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa keuntungan yang sangat besar untuk pihak Belanda. Dari keuntungan ini, utang Belanda dapat dilunasi dan semua masalah keuangan bisa diatasi (Poesponegoro, 1993: 68-75)



Demikianlah nasib rakyat Indonesia yang di jajah Belanda. Akibat program-program Belanda yang ingin menambah kas keuangan mereka rakyat menjadi sengsara, kelaparan merajalela, bahkan sampai menimbulkan kelaparan yang berujung kematian. Keadaan ini menimbulkan reaksi yang keras sampai di negeri Belanda. Mereka berpendapat bahwa sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti keikutsertaan pihak swasta Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sistem tanam paksa kemudian secara berangsur-angsur dihapuskan tahun 1861, 1866, 1890, dan 1916.

Pada tahun 1870 di Indonesia mulai dilaksanakan politik kolonial liberal yang sering disebut "Politik Pintu Terbuka (open door policy)". Sejak saat itu pemerintah

Hindia Belanda membuka Indonesia bagi para pengusaha asing untuk menanamkan modalnya, khususnya di bidang perkebunan (Poesponegoro, 1993: 89)

Periode antara tahun 1870 -1900 disebut zaman liberalisme. Pada waktu itu pemerintahan Belanda dipegang oleh kaum liberal yang kebanyakan terdiri dari pengusaha swasta mendapat kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia dengan cara besar-besaran. Mereka mengusahakan perkebunan besar seperti perkebunan kopi, teh, tebu, kina, kelapa, cokelat, tembakau, kelapa sawit dan sebagainya. Mereka juga mendirikan pabrik seperti pabrik gula, pabrik cokelat, teh, rokok, dan lain-lain. Pelaksanaan politik kolonial liberal ditandai dengan keluarnya undang-undang Agraria dan Undang-Undang Gula.

Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870

Undang-undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum agraria kolonial di Indonesia yang berlangsung dari 1870 sampai 1960. Peraturan itu hapus dengan dikeluarkannya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960) oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jadi Agrarische Wet itu telah berlangsung selama 90 tahun hampir mendekati satu abad umurnya. Wet itu tercantum dalam pasal 51 dari Indische Staatsregeling, yang merupakan peraturan pokok dari undang-undang Hindia Belanda.

Menteri jajahan Belanda De Waal, berjasa menciptakan wet ini yang isinya, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 : Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah.
- Pasal 2 : Gubernur jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undang- undang.
- Pasal 13 : Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak Erfpacht, yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen paling lama 75 tahun, dan seterusnya.

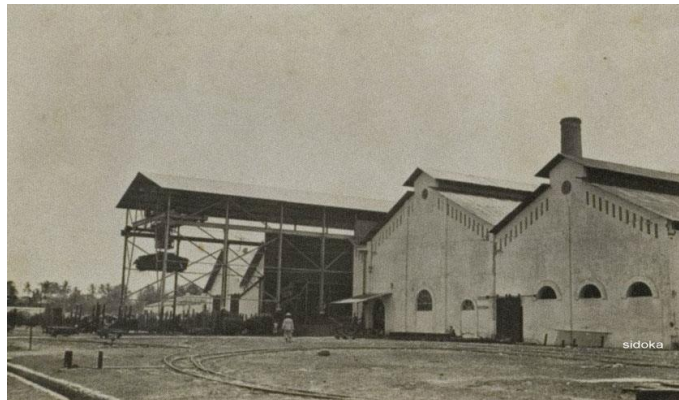
Undang-undang agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Maka pemerintah Belanda memberi mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Sewa-menyewa tanah itu diatur dalam Undang-Undang Agraria

tahun 1870. Undang-undang itu juga dimaksudkan untuk melindungi petani, agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Tetapi seringkali hal itu tidak diperhatikan oleh pembesar-pembesar pemerintah.

Dengan dibukanya perkebunan di daerah pedalaman, maka rakyat di desa- desa langsung berhubungan dengan dunia modern. Mereka mulai benar-benar mengenal artinya uang. Mereka juga mengenal hasil bumi yang diekspor dan barang luar negeri yang diimpor, seperti tekstil. Hal ini tentu membawa kemajuan bagi petani. Sebaliknya usaha bangsa sendiri banyak yang terdesak, misalnya usaha kerajinan, seperti pertenunan menjadi mati. Di antara pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik. Karena adanya perkebunan- perkebunan itu, Hindia Belanda menjadi negeri pengeksport hasil perkebunan (Poesponegoro, 1993: 96)

Undang-Undang Gula (Suiker Wet)

Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke luar Indonesia, tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta juga diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru (Poesponegoro, 1993: 97).



Sejak itu Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil perkebunan yang penting. Apalagi sesudah Terusan Suez dibuka, perkebunan tebu menjadi bertambah luas, dan produksi gula juga meningkat.

Terbukanya Indonesia bagi swasta asing berakibat munculnya perkebunan-perkebunan swasta asing di Indonesiaseperti perkebunan teh dan kina di Jawa Barat, perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur, perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan perkebunan karet di Serdang. Selain di bidang perkebunan, juga terjadi

penanaman modal di bidang pertambangan, seperti tambang timah di Bangka dan tambang batu bara di Umbilin.

Khusus perkebunan di Sumatera Timur yaitu Deli dan Serdang, tenaga kerjanya didatangkan dari Cina di bawah sistem kontrak. Dengan hapusnya sistem perbudakan, maka sistem kerja kontrak kelihatan sebagai jalan yang paling logis bagi perkebunan-perkebunan Sumatera Timur, untuk memperoleh jaminan bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan pekerja-pekerja untuk beberapa tahun.

Dalam tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur yang disebut (Koeli Ordonnantie). Koeli Ordonnantie ini, yang mula-mula hanya berlaku untuk Sumatera Timur tetapi kemudian berlaku pula di semua wilayah Hindia Belanda di luar Jawa, memberi jaminan-jaminan tertentu pada majikan terhadap kemungkinan pekerja-pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka menurut kontrak kerja habis. Di lain pihak juga diadakan peraturan-peraturan yang melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang dari sang majikan. Untuk memberi kekuatan pada peraturan-peraturan dalam Koeli Ordonnantie, dimasukkan pula peraturan mengenai hukuman-hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran, baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja. Dalam kenyataan ternyata bahwa ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pihak majikan hanya merupakan peraturan di atas kertas jarang atau tidak pernah dilaksanakan. Dengan demikian ancaman hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran hanya jatuh di atas pundak pekerja-pekerja perkebunan. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pelaksanaan politik pintu terbuka, tidak membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tetap buruk nasibnya. Banyak di antara penduduk yang bekerja di perkebunan-perkebunan swasta dan pabrik-pabrik dengan perjanjian kontrak kerja. Mereka terikat kontrak yang sangat merugikan. Mereka harus bekerja keras tetapi tidak setimpal upahnya dan tidak terjamin makan dan kesehatannya. Nasib rakyat sungguh sangat sengsara dan miskin.

Melihat kenyataan itu, para pengabdian kemanusiaan yang dulu menentang tanam paksa, mendorong pemerintah colonial untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Sudah menjadi kewajiban pemerintah Belanda untuk memajukan bangsa Indonesia, baik jasmani maupun rohaninya. Dengan dalih untuk memajukan bangsa Indonesia itulah kemudian dilaksanakan Politik Etis (Vlekke, 2010: 392)

Pada pekerja-pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan- ketentuan kontrak kerja kemudian terkenal sebagai poenale sanctie. Poenale sanctie membuat ketentuan bahwa pekerja-pekerja yang melarikan diri dari perkebunan-perkebunan Sumatera Timur dapat ditangkap oleh polisi dan dibawa kembali ke perkebunan dengan kekerasan jika mereka mengadakan perlawanan. Lain-lain hukuman dapat berupa kerja paksa pada pekerja-pekerja umum tanpa pembayaran atau perpanjangan masa kerja yang melebihi ketentuan-ketentuan kontrak kerja.



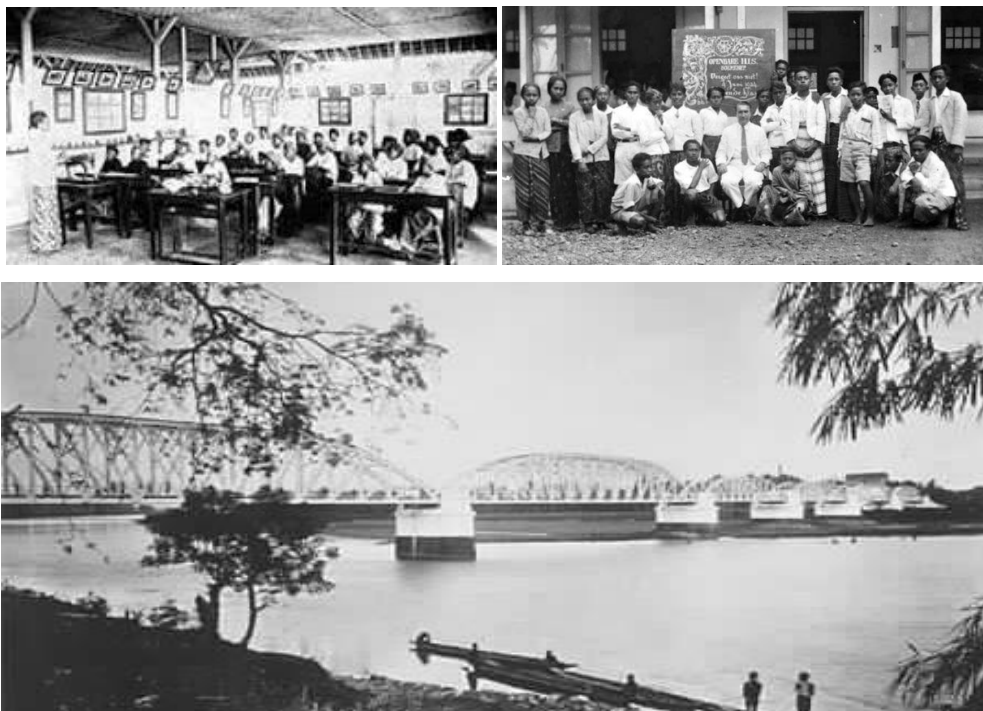
Pencetus politik etis (politik balas budi) ini adalah Van Deventer. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah DeGids yang berjudul *IEeu Eereschuld* (Hutang Budi). Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan.

Menurut Van Deventer, ada tiga cara untuk memperbaiki nasib rakyat tersebut, yaitu memajukan.

- a. **Edukasi (Pendidikan).** Dengan edukasi akan dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia sehingga dapat diajak memajukan perusahaan perkebunan dan mengurangi keterbelakangan.
- b. **Irigasi (pengairan).** Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah.
- c. **Emigrasi (pemindahan penduduk).** Dengan emigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan, akan dapat diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa.

Pendukung Politik Etisusulan Van Deventer adalah sebagai berikut.

- a. Mr. P. Brooshoof, redaktursurat kabar De Lokomotif, yang padatahun 1901 menulis buku berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial).
- b. K.F. Holle, banyak membantu kaum tani.
- c. Van Vollen Hoven, banyak memperdalam hokum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.
- d. Abendanon, banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi.
- e. Leivegoed, seorangjurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia.
- f. Van Kol, banyak menulis tentang keadaanp emerintahan Hindia Belanda.
- g. Douwes Dekker (Multatuli), dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar, Saya dan Adinda.



Usulan Van Deventer tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah Belanda, pemerintah Belanda menerima saran tentang Politik Etis, namun akan diselaraskan dengan sistem kolonial di Indonesia. (Edukasi dilaksanakan, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan). Pendidikan dipisah- pisah antara orang Belanda, anak bangsawan, dan rakyat. Bagi rakyat kecil hanya tersedia sekolah rendah

untuk mendidik anak menjadi orang yang setia pada penjajah, pandai dalam administrasi dan sanggup menjadi pegawai dengan gaji yang rendah.

Dalam bidang irigasi (pengairan) diadakan pembangunan dan perbaikan. Tetapi pengairan tersebut tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, namun untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial.

Emigrasi juga dilaksanakan oleh pemerintah Belanda bukan untuk memberikan penghidupan yang layak serta pemerataan penduduk, tetapi untuk membuka hutan-hutan baru di luar pulau Jawa bagi perkebunan dan perusahaan swasta asing. Selain itu juga untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah.

Jelaslah bahwa pemerintah Belanda telah menyelewengkan Politik Etis. Usaha-usaha yang dilaksanakan baik edukasi, irigasi, dan emigrasi, tidak untuk memajukan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Sikap penjajah Belanda yang demikian itu telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia dapat diperbaiki jika bangsa Indonesia bebas merdeka dan berdaulat.

F. Perkembangan Penjajahan Inggris di Indonesia

Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat yaitu sekitar 5 tahun. Inggris menguasai pulau Jawa setelah melakukan penyerangan dengan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia pada 26 Agustus 1811 kemudian diteruskan dengan Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Saat itu yang memimpin Indonesia adalah Stamford Raffles yang memiliki kebijakan - kebijakan diantaranya.

Pemerintahan

Raffles membagi pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan, sistem ini diteruskan Belanda sampai akhir pendudukan di Indonesia. Dengan adanya sistem karesidenan ini memudahkan Inggris dalam mengorganisir pemerintahan. Selain itu juga mengubah sistem pemerintahan ke corak barat.

Bidang Ekonomi

Penghapusan kewajiban tanaman ekspor menjadi awal kebijakan Raffles, selain itu Raffles juga menghapus pajak hasil bumi (*Contingenten*) serta sistem penyerahan wajib (*Verplichte leverentie*) yang dahulu diterapkan oleh VOC. Raffles melakukan sistem sewa tanah untuk mendapatkan pemasukan kas Inggris. Namun pelaksanaannya mengalami kegagalan, ada 3 faktor yang menjadi penyebab kegagalan yaitu : Sulitnya menentukan jumlah pajak tanah karena harus melakukan pengukuran dan penelitian tentang kesuburan tanah, Sistem uang sebagai pajak yang harus dibayar belum berlaku sepenuhnya di masyarakat Indonesia, Kepemilikan tanah masih bersifat tradisional.

Hukum

Pada bidang hukum, Raffles mengubah pelaksanaan hukum yang sebelumnya pada pemerintahan Daendels berorientasi pada ras (warna kulit) namun pada masa Raffles lebih cenderung pada besar kecilnya kesalahan.

Sosial

Raffles menghapus adanya kerja rodi dan perbudakan, namun dalam kenyataannya Raffles juga melakukan pelanggaran undang - undang dengan melakukan kegiatan serupa.

Ilmu Pengetahuan

Pada bidang Ilmu pengetahuan Raffles menulis suatu buku yang dinamakan *History of Java* di London 1817. Selain itu ia juga menulis buku *History of the East Indian Archipelago*. Raffles mendukung perkumpulan *Bataviaach Genootschap* serta melakukan temuan berupa bunga *Rafflesia Arnoldi*. Raffles juga pernah mengundang para ahli pengetahuan dari luar negeri untuk melakukan penelitian - penelitian di Indonesia. Raffles menemukan bunga raksasa yang diyakini sebagai bunga terbesar di dunia bersama seroang bernama Arnoldi. Adanya gejolak di Eropa atas situasi Inggris dan Belanda berdampak pula bagi pemerintahan Indonesia di bawah Inggris. Ditandatangani perjanjian London yang berisi bahwa Belanda mendapatkan kembali jajahannya pada 1814 menjadi akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia.

Belanda secara resmi kembali menguasai Indonesia semenjak tahun 1816 (Kemendikbud. 2016: 39)

Kebijakan Sewa Tanah Masa Pemerintahan Raffles

Setelah Inggris menguasai Indonesia, Raffles ditunjuk untuk menjadi Gubernur EIC (*East Indies Company*) di Indonesia yang diangkat pada 19 Oktober 1811 dan menjabat selama lima tahun (1811 - 1816). Raffles yang menjabat sebagai Gubernur melakukan perubahan - perubahan baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Kebijakan *Contingenten* yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan Daendels kemudian diganti dengan kebijakan sistem sewa tanah (*Landrent*). Dengan adanya kebijakan ini, pribumi harus membayar sewa atas tanah mereka, karena semua tanah dianggap milik negara.

Pokok Sistem Sewa Tanah

- a. Kerja paksa dan penyerahan wajib yang pernah berlaku dihapuskan.
- b. Hasil pertanian oleh pribumi diambil langsung oleh pemerintah tanpa adanya perantara dari bupati
- c. Rakyat harus membayar tanah atas kepemilikan tanah yang mereka gunakan kepada pemerintah.

Kegagalan Sistem Sewa Tanah

- a. Sulitnya menentukan pajak untuk luas yang berbeda - beda kepada pemilik tanah
- b. Sulitnya menentukan tingkat kesuburan suatu tanah
- c. Terbatasnya jumlah pegawai
- d. Sistem uang belum sepenuhnya berlaku di masyarakat pedesaan

Pembagian Wilayah Pada Masa Pemerintahan Raffles

Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh Raffles yaitu dengan membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Kebijakan ini dilakukan agar pemerintahan Inggris lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap daerah - daerah di pulau Jawa. Setiap residen tersebut dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. 16 Karesidenan tersebut diantaranya Madura, Banyuwangi, Besuki, Pasuruan, Surabaya,

Gresik, Rembang, Jepara, Jipang-Grobogan, Kedu, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Batavia dan Banten. Untuk wilayah pedalaman yaitu pada Kasunana Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta wilayah tersebut meliputi Mancanegara Wetan dan Mancanegara Kilen (Indsejarah.net. 2016:2)

Setelah menentukan 16 karesidenan, kemudian karesidenan tersebut dibagi menjadi wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Bupati tersebut dibantu oleh seorang patih yang bertugas sebagai pengawas teritorial. Kepala residen membawahi bidang pemerintahan, peradilan serta pajak negara.

G. Rangkuman

1. Secara umum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dilatarbelakangi oleh (1) Jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan bangsa Turki; (2) Kemajuan ilmu dan teknologi; (3) Keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat; (4) Adanya buku *Imago Mundi* yang menceritakan tentang perjalanan Marcopolo ke duniatimur yang kaya akan rempah-rempah dan emas; (5) Adanya semangat *Reconquesta*: semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam; (6) keinginan mencari daerah penghasil rempah-rempah.
2. Proses Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia diawali dari proses penjelajahan samudra yang akhirnya mendatangkan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris.
3. Penjajahan Portugis diawali dari Alfonso de Albuquerque yang menyerang Malaka dan berhasil menguasainya pada tahun 1511. Malaka saat itu diperkirakan memiliki banyak kekayaan berupa rempah-rempah. Di bawah pimpinan Francisco Serro sampai di Maluku pada tahun 1512 tepatnya di Ternate setelah sebelumnya singgah terlebih dahulu di Gresik dan Banda. Portugis mampu menguasai Maluku dikarenakan jasanya membantu Ternate mengalahkan Tidore.
4. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku merupakan impian yang menjadi nyata bagi bangsa Spanyol yaitu sampai di daerah penghasil rempah - rempah. Orang - orang Spanyol kemudian melakukan perdagangan dengan orang - orang Maluku. Kedatangan dan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan oleh bangsa Portugis yang menganggap bahwa Spanyol melanggar

hak monopoli Portugis. Selanjutnya terjadi persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol yang kemudian diselesaikan dengan perjanjian Saragoza 1529.

5. Perkembangan Penjajahan Belanda di Indonesia diawali dari pendirian VOC. VOC dibentuk pada Maret 1602 karena adanya persaingan dagang antara sesama kongsi dagang Belanda. Tujuan dibentuk VOC untuk mengatasi persaingan antara para pedagang Belanda. Setelah VOC bubar dan diambil alih oleh Belanda, maka Raja Louis Napoleon Bonaparte menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Herman Willem Daendels berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811. Belanda menguasai kembali Indonesia setelah berhasil mengalahkan Inggris dengan adanya Konvensi London tahun 1814.
6. Kekuasaan Inggris di Indonesia diwakili oleh Maskapai Hindia Timur (The East India Company) disingkat EIC yang berpusat di Calcutta, India. EIC mendapat hak Oktroi dari Ratu Elizabeth I. Saat Gubernur Jenderal Lord Minto menjadi pemimpin EIC, dia mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Indsejarah.net. 2016. *Sejarah Penjajahan Belanda di Indonesia*. [www.idsejarah.net /2016/10/ sejarah-penjajahan-belanda-di-indonesia.html](http://www.idsejarah.net/2016/10/sejarah-penjajahan-belanda-di-indonesia.html) (diunduh 11 april 2018)
- . 2016. *Sejarah Penjajahan Inggris di Indonesia*. [www.idsejarah.net /2016/10/ sejarah-penjajahan-belanda-di-indonesia.html](http://www.idsejarah.net/2016/10/sejarah-penjajahan-belanda-di-indonesia.html) (diunduh 11 april 2018)
- Insulinda. 2015. *Penjajahan Bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia*. [https://insulinda.wordpress.com /2015 /09/08/penjajahan-bangsa-portugis-dan-spanyol-di-indonesia/](https://insulinda.wordpress.com/2015/09/08/penjajahan-bangsa-portugis-dan-spanyol-di-indonesia/) (diunduh 11 april 2018)
- Kemendikbud. 2016. *Guru Pembelajar, Modul Pelatihan Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA/SMK*. Jakarta: Kemendikbud
- Kartodirjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta:PT Gramedia.
- Poesponegoro, Djoned Marwati, dan Notosusanto, Nugroho. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sardiman AM, Amurwani Dwi Lestariningsih. 2017. *Buku Guru Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI*. Jakarta. Kemendikbud.
- Setiawan, Iwan. 2017. *Masuknya Bangsa Eropa ke Indonesia*. [https://kangone.blogspot.co.id/ 2017/08/materi-5a-masuknya-bangsa-eropa-ke.html](https://kangone.blogspot.co.id/2017/08/materi-5a-masuknya-bangsa-eropa-ke.html) (diunduh 11 April 2018)
- Vlekke, H.M.Bernard. 2010. *Nusantara Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia,

LATAR BELAKANG, PROSES MASUK DAN PERKEMBANGAN PENJAJAHAN BANGSA EROPA DI INDONESIA

kolonialisme & imperialisme?

**Latar Belakang
Bangsa Eropa
ke dunia Timur**

**Penjelajah Bangsa Eropa
ke Indonesia**

**Masuknya Kekuatan Asing
di Indonesia**

**Akibat dari kolonialisme &
imperialisme di Indonesia**

LATAR BELAKANG MASUKNYA BANGSA EROPA KE INDONESIA

1 Jatuhnya kota Konstantinopel
Tahun 1453 ke tangan penguasa
Turki Usmani.

Kisah perjalanan Marco Polo
ke dunia Timur, yaitu
perjalanan kembalinya Marco
Polo dari negari Cina melalui
jalur pelayaran.

3 Penemuan Copernicus
yang didukung oleh
Galileo, yang
menyatakan bumi itu
bulat.



Penemuan Kompas.

Semangat *reconquista* yaitu semangat untuk
menaklukkan Islam di seluruh dunia.

5





Penjelajahan Bangsa Eropa ke Indonesia

PENJELAJAHAN SAMUDRA
Dipelopori oleh

PORTUGIS

SPANYOL

MASUKNYA KEKUATAN ASING DI INDONESIA

Pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis di Indonesia



Pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Spanyol di Indonesia



Pembentukan kekuasaan kolonial dan imperialisme Belanda di Indonesia



Masa kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia



PENGARUH DAN KEKUASAAN KOLONIALISME PORTUGIS DI INDONESIA

Penjelajah Pertama

Penjelajah Pertama adalah Bartholomeus Diaz. Berhasil mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1487. Kemudian Vasco da Gama menginjakkan kaki di Calicut pada tahun 1498. Setiap daerah yang baru memasang *batu padrao* yaitu batu bertulis dengan simbol gambar bola dunia.

Tujuan dan Upaya Keberhasilan

Tujuan:

- Tujuan Ekonomi untuk mencari keuntungan yang besar dari hasil perdagangan rempah-rempah.
 - Tujuan agama untuk menyebarkan agama Nasrani
 - Tujuan petualangan untuk mencari daerah jajahan.
- Menguasai wilayah perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara.

Alfonso d'Albuquerque bersama armadanya berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan sampai di Maluku tahun 1512 dan bersahabat dengan Ternate.

PERKEMBANGAN PENJAJAHAN PORTUGIS DI INDONESIA



- ✘ Pada 1511-1526, Nusantara secara rutin menjadi rute maritim Portugis untuk menuju Pulau Maluku, Jawa, Sumatera dan Banda.
- ✘ Pada 1511 Portugis menaklukkan Kerajaan Malaka.
- ✘ Pada 1512 Portugis menjalin Hubungan dengan Kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang. Perjanjian ini Portugis dibolehkan membangun benteng dan gudang di Sunda Kelapa.
- ✘ Pada 1512 Afonso de Albuquerque mengirim Francisco Serrao serta Antonio Albreu untuk memimpin armadanya mencari jalan ke tempat asal rempah-rempah di Maluku dan mendarat di Kepulauan Penyu dan Kepulauan Banda. Setelah menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat - seperti dengan Kerajaan Ternate di pulau Ternate, Portugis mendapat izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli.
- ✘ Hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berjalan lama, sebab Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Pertemanan Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570.
- ✘ Pada 1605, Belanda berhasil membuat Portugis menyerahkan pertahanannya di Tidore kepada Cornelisz Sebastiansz dan di Ambon kepada Steven van der Hagen.

KEPULAUAN MALUKU



KEDATANGAN DAN KEKUASAAN KOLONIALISME SPANYOL DI INDONESIA

Ingat Perjanjian **Tordesilas** bangsa Spanyol berlayar ke arah **barat**.

Para penjelajah Spanyol antara lain:

1. CHRISTOPHORUS COLUMBUS

Melakukan pelayaran ke Benua Amerika 1492-1502.

2. FERDINAND MAGELHAENS

Sampai ujung selatan Amerika dikenal dengan Selat Magelhaens dan menyeberang Samudera Pasifik dan mendarat di Filipina 1521.

3. SEBASTIAN DEL CANO

Tiba di Maluku tahun 1521 setelah melalui Filipina, Kalimantan Utara kemudian langsung ke Tidore. Portugis yang telah dahulu berada di Tidore tidak mau tersaingi akhirnya dibuat **Perjanjian Saragosa** (tahun 1526) yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Tidore dan kembali ke Filipina.

PERKEMBANGAN PENJAJAHAN SPANYOL DI INDONESIA



- Pada 1521 bangsa Spanyol sampai di Tidore (Maluku) yang kemudian singgah di Bacan dan Jailolo.
- Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh orang - orang Maluku karena pada saat itu orang - orang Maluku sedang melakukan perlawanan terhadap Portugis.
- Kedatangan dan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan oleh bangsa Portugis yang menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis.
- Penyelesaian dari konflik ini yaitu dilakukannya perjanjian Saragoza (Spanyol) pada 1529. Perjanjian ini berisi :
 - Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina
 - Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku.
- 1522 Spanyol memulai kolonisasi di Sulawesi Utara
- 1550 Spanyol berhasil merebut benteng Portugis di Wenang hingga akhirnya Spanyol dapat menduduki Minahasa
- 1560 Spanyol mendirikan pos di Manado

KEDATANGAN DAN KEKUASAAN KOLONIALISME BELANDA DI INDONESIA

- 1. Cornelis de Houtman (1596), menempuh perjalanan Ke Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan sampai di Banten. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman bersikap kasar dan sombong.**
- 2. Jacob Van Neck (1598), kedatangannya disambut baik oleh rakyat Banten.
VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan Gubernur Jenderal pertamanya Pieter Both.**

TUJUAN DIDIRIKANNYA VOC:

- MENGHINDARI PERSAINGAN DAGANG ANTAR SESAMA PEDAGANG BELANDA.
- MEMONOPOLI REMPAH-REMPAH DI HINDIA TIMUR.
- MENGHADAPI PERSAINGAN DENGAN PARA PEDAGANG ASING.
- MENGHADAPI KERAJAAN-KERAJAAN DI INDONESIA.

Hak Oktroi:

- Hak untuk memerintah di Negara jajahan
- Hak untuk memonopoli perdagangan
- Hak untuk mencetak mata uang sendiri
- Hak untuk memiliki angkatan perang sendiri
- Hak untuk memiliki senjata
- Hak untuk mengadakan perjanjian
- Hak untuk mengumumkan perang.

KEADAAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR JENDERAL JAN PIETERSZOOM COEN 1619.

**VOC MEMINDAHKAN KANTOR DAGANGNYA KE JAYAKARTA,
DENGAN ALASAN :**

- JAYAKARTA MERUPAKAN TEMPAT YANG SANGAT STRATEGIS**
- VOC AKAN DENGAN MUDAH MENGAWASI GERAK GERIK
PORTUGIS DI MALAKA.**
- VOC MENGGANTI JAYAKARTA MENJADI BATAVIA.**

ATURAN MONOPOLI VOC :

- Rakyat Maluku hanya boleh menanam rempah-rempah atas izin VOC
- Luas wilayah perkebunan dibatasi oleh VOC
- Harga jual ditentukan VOC
- Tempat menanam rempah-rempah ditentukan VOC

STRATEGI VOC DALAM MENGENDALIKAN MONOPOLI:

- **HAK EKSTIRPASI YAITU HUKUMAN BAGI PARA PELANGGAR MONOPOLI PERDAGANGAN.**
- **PELAYARAN HONGI YAITU PELAYARAN BERSENJATA LENGKAP YANG DILAKUKAN VOC UNTUK MENGAWASI JALANNYA MONOPOLI PERDAGANGAN.**



MASA DAENDLES

- ✖ 1808, Herman William Daendles ditunjuk sebagai gubernur jenderal Indonesia
- ✖ Mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris
- ✖ Usaha Daendles :
 - + Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan
 - + Melaksanakan sistem rodi untuk kepentingan pertahanan
 - + Melaksanakan sistem perdagangan budak
 - + Menjalankan pemerintahan secara diktator

Pengaruh kolonialisme dan imperilaisme Inggris di Indonesia

- ✘ Inggris mendirikan kongsi dagang EIC (*East Indian Company*) tahun 1600.
- ✘ 1811, Louis Napolleon mencopot kedudukan Daendles diangkatlah Jenderal Janssens
- ✘ 3 Agustus 1811 Inggris muncul di Batavia dan tokohnya Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia.
- ✘ Inggris mengadakan Perjanjian London (convention London) dengan Belanda.
- ✘ Menerapkan pajak tanah (*land rent*)
- ✘ 19 Agustus 1816, penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda.

GAMBOR THOMAS STANFORD RAFFLES



KEKUASAAN DIAMBIL ALIH PEMERINTAH BELANDA

- ✘ Kekuasaan Raffles berakhir pada 1814 setelah terjadi Konvensi London antara Inggris dan Belanda
- ✘ Pemerintahan kolonial Belanda dipegang oleh: a) Komisaris Jendral (1816-1819) yang terdiri Elout, Buyskes, dan Van der Capellen, b) Van der Capellen (1819-1826), c) De Gisignnes (1826-1830), dan d) Van den Bosh (1830-1870)
- ✘ Van den Bosh mengambil kebijakan Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). Sistem dimana setiap petani di Jawa wajib menanam tanaman perdagangan ekspor yang laku dipasaran Eropa/dunia.

✖ Latar Belakang Taman Paksa

- + Belanda terlilit utang LN
- + Belanda banyak mengeluarkan anggaran

✖ Tujuan

- + Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya

✖ Aturan

- + Rakyat menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami perdagangan (ekspor)
- + Tanah bebas pajak
- + Waktu mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi
- + Jika ada kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat
- + Kegagalan panen, bila bukan salah penggarap (bencana/hama) ditanggung pemerintah
- + Penduduk yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja diperkebunan pemerintah selama 66 hari.

✖ Pelaksanaan

- + Dilakukan dengan aturan yang cukup berat, masih sering diselewengkan penguasa pribumi karena tingginya Cultuur Procenten (imbalan kepada penguasa lokal yang berhasil menyerahkan hasil bumi yang melebihi ketentuan)

✖ Akibat

- + Bagi rakyat Indonesia
 - ✖ Tidak ada kesempatan untuk mengerjakan sawah ladang sendiri
 - ✖ Warga desa banyak menjadi perampok
- + Bagi negara Belanda
 - ✖ Mendatangkan keuntungan yang sangat besar

PENENTANG CULTUURSTELSEL



PENENTANG CULTUURSTELSEL



PENENTANG CULTUURSTELSEL

- ✕ BARON VAN HOOVELL
- ✕ MELALUI PARLEMEN

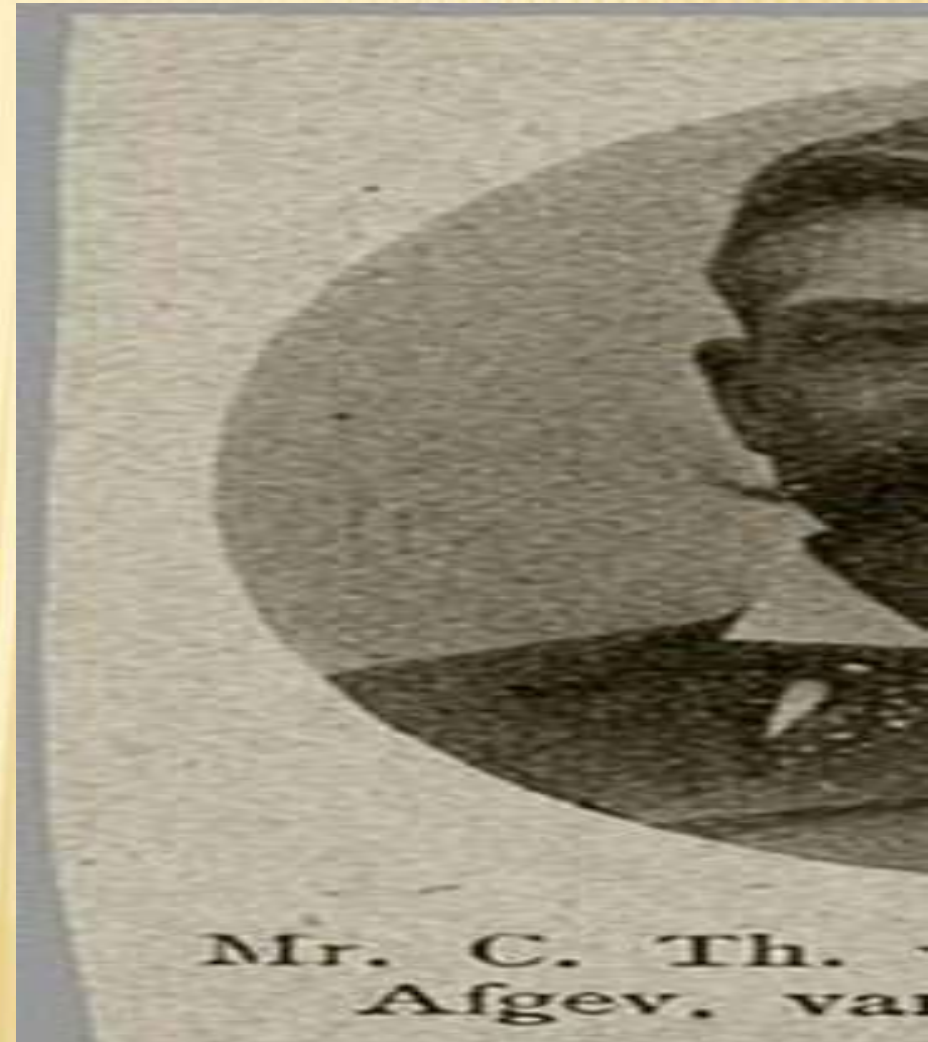


PENENTANG CULTUUR STELSEL



DAMPAK

- ✗ Dihapuskan Tanam Paksa
- ✗ Diterapkan UU Agraria 1870
- ✗ Diberlakukan Politik Etis berdasarkan trilogi/tiga usulan van deventer edukasi, irigasi, dan transmigrasi



PENGHAPUSAN TANAM PAKSA

- ✖ Pieter Brooschoff
- ✖ Tanaman Tebu (1870)
- ✖ Tanaman Kelapa Sawit (1870)
- ✖ Tanaman Lada (1860)
- ✖ Tanaman Teh (1865)
- ✖ Tanaman Nila (1865)



POLITIK PINTU TERBUKA 1870 - 1900

- ✘ Pemerintahan Belanda dipegang oleh kaum liberal yang kebanyakan terdiri dari pengusaha swasta
- ✘ Mereka ingin mendapat kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia
- ✘ Mereka ingin membuka perkebunan-perkebunan besar dan pabrik-pabrik pengolah hasil tanaman perkebunan



LANJUTAN



- ✖ Pelaksanaan politik kolonial liberal ditandai dengan keluarnya undang-undang Agraria dan undang-undang Gula 1870
- ✖ Undang-Undang Agraria:
 - ✖ Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah
 - ✖ Gubernur jenderal boleh menyewakan tanah
 - ✖ Hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen paling lama 75 tahun

LANJUTAN



- ✖ Undang undang Gula
 - ✖ Tebu tidak boleh diangkut ke luar Indonesia, harus diproses di Indonesia
 - ✖ Pabrik gula milik pemerintah dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta
 - ✖ Pihak swasta diberi kesempatan mendirikan pabrik gula baru
- ✖ Terbukanya Indonesia bagi swasta asing berakibat munculnya perkebunan- perkebunan swasta asing di Indonesia

DAMPAK POLITIK PINTU TERBUKA

- ✖ Berkembangnya perkebunan – perkebunan besar milik swasta
- ✖ Berkembangnya sistem ekonomi mata uang
- ✖ Ekspor meningkat
- ✖ Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan
- ✖ Pembangunan sarana transportasi dan irigasi
- ✖ Sistem tanam paksa dihapuskan
- ✖ Uang digunakan sebagai alat pembayaran
- ✖ Profesi petani berubah menjadi buruh perkebunan/kuli kontrak/mandor perkebunan

POLITIK ETIS

Latar Belakang

- ✗ Munculnya Politik Etis tidak bisa dilepaskan dari adanya Tanam Paksa yang dilanjutkan dengan Politik Pintu Terbuka.
- ✗ Politik Etis muncul akibat adanya kemenangan kaum liberal atas kaum konservatif di parlemen Belanda.



- Politik Etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi
- Munculnya kaum Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

ISI POLITIK ETIS

Pencetus politik Etis adalah Van Deventer. Isi dari politik Etis terkenal dengan istilah Trilogi Van deventer atau Trias Van deventer. Isi politik etis yaitu:

- ✖ **Irigasi** (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
- ✖ **Emigrasi** yakni mengajak penduduk Jawa untuk bertransmigrasi untuk mengolah lahan yang belum diolah menjadi lahan perkebunan.
- ✖ **Edukasi** yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

PENYIMPANGAN POLITIK ETIS

- ✘ Irigasi. Irigasi atau pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda.
- ✘ Edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah.
- ✘ Migrasi. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda.

DAMPAK POLITIK ETIS

- ✘ Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api yang memperlancar perpindahan barang dan manusia
- ✘ Pembangunan infratraktur pertanian dalam hal ini bendungan yang nantinya bermanfaat bagi pengairan.
- ✘ Berdirinya berbagai sekolah mengakibatkan munculnya kaum terpelajar atau cendikiawan yang nantinya menjadi pelopor Pergerakan Nasional seperti contoh Soetomo mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi Budi Utomo.

**STRATEGI PERLAWANAN BANGSA INDONESIA TERHADAP
PENJAJAHAN BANGSA EROPA SAMPAI DENGAN ABAD KE-20
Ba'in**

A. Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Portugis

Portugis merupakan salah satu negara pelopor penjelajahan samudera. Pada awalnya kedatangan bangsa Portugis untuk mencari tempat penghasil rempah rempah. Dari berbagai penjelajah Portugis, pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka yang menjadi tempat penting bagi perdagangan rempah-rempah. Penguasaan Portugis terhadap Malaka kemudian memunculkan berbagai perlawanan rakyat Indonesia.



Serangan Kerajaan Aceh terhadap Portugis

Sejak kedatangan orang Portugis di Malaka pada tahun 1511, telah terjadi persaingan yang berbuntut permusuhan antara Portugis dan Kesultanan Aceh. Sultan Aceh pada waktu itu diperintah oleh Sultan Ali Mughayat Syah (1514- 1528), menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam politik, ekonomi, dan penyebaran agama (Setyawan, Doni : 2016). Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain:

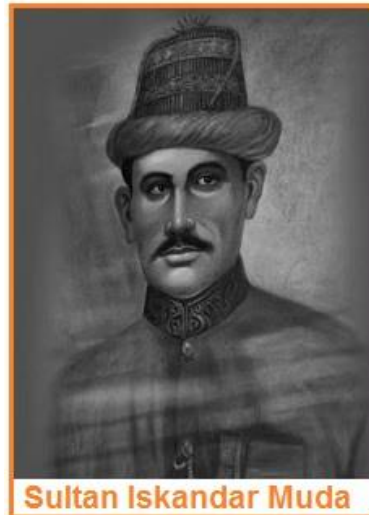
- a. Adanya monopoli perdagangan oleh Portugis
- b. Pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah
- c. Penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis.

Untuk itulah, Kesultanan Aceh tetap pada pendiriannya, bahwa Portugis harus segera diusir dari Malaka. Itulah sebabnya, ketika terjadi penyerangan Kerajaan Demak ke Malaka, Aceh membantunya dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, tindakan kapal-kapal Portugis telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Sebagai persiapan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain:

- a. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam dan prajurit
- b. Mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567.
- c. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara.

Perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah. Untuk itu, Sultan Alaudin Riayat Syah mengirim utusan ke Konstantinopel (Turki) untuk meminta bantuan militer dan permintaan khusus mengenai pengiriman meriam-meriam, pembuatan senjata api, dan penembak-penembak. Selain itu, Aceh juga meminta bantuan dari Kalikut dan Jepara.

Dengan semua bantuan dari Turki maupun kerajaan-kerajaan lainnya, Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Meskipun demikian, Sultan Alaudin telah menunjukkan ketangguhan sebagai kekuatan militer yang disegani dan diperhitungkan di kawasan Selat Malaka.



Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, Kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang muslim segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis selalu berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan.

Setelah berbagai bantuan berdatangan, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di Formosa/Benteng. Portugis harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan pada tahun 1569 Portugis balik menyerang Aceh, tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh.

Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Penyerangan terhadap Portugis dilakukan pada masa Sultan Iskandar Muda memerintah. Pada tahun 1629, Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan sejumlah kapal yang memuat 19.000 prajurit. Pertempuran sengit tak terelakkan yang kemudian berakhir dengan kekalahan di pihak Aceh.

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1639) armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu wilayah Kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629 Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Penyerangan yang dilakukan Aceh

ini belum berhasil mendapat kemenangan. Namun demikian Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka.

Sejak Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), perjuangan mengusir Portugis mencapai puncaknya (Sahid, Syahmi : 2016). Untuk mencapai tujuannya, Sultan Iskandar Muda menempuh beberapa cara untuk melumpuhkan kekuatan Portugis, seperti blokade perdagangan. Sultan Aceh melarang daerah-daerah yang dikuasai Aceh menjual lada dan timah kepada Portugis. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan Portugis benar-benar lumpuh, karena tidak memiliki barang yang harus dijual di Eropa. Upaya ini ternyata tidak berhasil sepenuhnya, sebab raja-raja kecil yang merasa membutuhkan uang secara sembunyi-sembunyi menjual barang dagangannya kepada Portugis. Gagal dengan taktik blokade ekonomi, Sultan Iskandar Muda menyerang kedudukan Portugis di Malaka pada tahun 1629. Seluruh kekuatan tentara Aceh dikerahkan. Namun, upaya itu mengalami kegagalan. Pasukan Kesultanan Aceh dapat di pukul mundur oleh pasukan Portugis. Faktor penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka adalah:

- a. Tidak dipersiapkan dengan baik
- b. Perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana
- c. Terjadi konflik internal dikalangan pejabat Kerajaan Aceh

Usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain:

- a. Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat (India),
- b. Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang muslim di Jawa,
- c. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh,
- d. Meningkatkan kerja sama dengan Kerajaan Demak dan Makassar.

Permusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan, sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC tahun 1641. VOC bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin

menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami Malaka sebelum kedatangan Portugis dan VOC.

Kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Iskandar Muda wafat dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani (1636–1841). Pada saat Iskandar Thani memimpin Aceh masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tetapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Safiatuddin (1641–1675) Aceh tidak dapat berbuat banyak mempertahankan kebesarannya.

Serangan Kerajaan Demak terhadap Portugis di Malaka

Perlawanan kesultanan Demak terjadi karena kesultanan-kesultanan Islam yang lain juga terancam terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Kedatangan bangsa Portugis ke Pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopez de Sequeira menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Akibatnya, aktivitas perdagangan di pelabuhan Malaka menjadi terganggu karena banyak pedagang Islam yang merasa dirugikan.

Akibat dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Oleh karena itu, Sultan Demak R. Patah mengirim pasukannya di bawah Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Perlawanan rakyat Demak tersebut dipimpin oleh Adipati Unus. Pati Unus melancarkan serangannya pada tahun 1512 dan 1513. Dengan kekuatan 100 kapal laut dan lebih dari 10.000 prajurit Adipati Unus menyerang Portugis.

Namun, serangan tersebut mengalami kegagalan dan belum berhasil. Kemudian pada tahun 1527, tentara Demak kembali melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruhnya di Sunda Kelapa. Di bawah pimpinan Fatahillah tentara Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta.

Perlawanan Adipati Unus (1518 – 1521)

Hanya kurang lebih satu tahun setelah kedatangan Portugis di Malaka (1511), perlawanan terhadap dominasi Barat mulai muncul. Jatuhnya Malaka ke pihak Portugis sangat merugikan jaringan perdagangan para pedagang Islam dari Kepulauan Indonesia. Solidaritas sesama pedagang Islam terbangun saat Malaka

jatuh ke pihak Portugis. Kerajaan Aceh, Palembang, Banten, Johor, dan Demak bersekutu untuk menghadapi Portugis di Malaka. Pada tahun 1513,

Demak mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Adipati Unus, putra Raden Patah. Namun, serbuan Demak tersebut mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan serangan Demak ke Portugis di Malaka adalah:

- a. Serangan tersebut tidak dilakukan dengan persiapan yang matang
- b. Jarak yang terlalu jauh
- c. Kalah persenjataan

Dipati Unus atau Yunus adalah putra Raden Patah, penguasa Kerajaan Demak di Jawa. Dipati Unus mendapat sebutan “Pangeran Sabrang Lor” karena jasanya memimpin armada laut Demak dalam penyerangan ke Malaka. Pemerintahan Pangeran Sabrang Lor tidak berlangsung lama, dari tahun 1518 – 1521.

Perlawanan Fatahillah (1527 – 1570)

Dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah Barat, Demak mengirim Fatahillah untuk menggagalkan rencana kerja sama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fatahillah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1527 nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau Jakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Fatahillah diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai wakil Sultan Demak yang memerintah di Banten dan Jayakarta.

Fatahillah dilahirkan sekitar tahun 1490 di Pasai, Sumatra Utara. Nama lain Fatahillah adalah Falatehan, Fadhilah Khan, Ratu Bagus Pase, dan Ratu Sunda Kelapa. Ayahnya bernama Maulana Makhdar Ibrahim selaku guru agama Islam di Pasai kelahiran Gujarat, India Selatan.

Perlawanan Rakyat Maluku

Berdasarkan Perjanjian Saragosa (1529), Portugis tetap menguasai daerah-daerah di Maluku. Sejak itu pengaruh Portugis di Maluku semakin besar. Portugis berhasil memaksakan monopoli perdagangannya. Rakyat Maluku kehilangan kebebasannya

dan mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu, Portugis mulai mencampuri urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Maluku. Rakyat Maluku semakin tertekan sehingga mereka mulai melakukan perlawanan terhadap portugis.

Sebab Perlawanan Rakyat Ternate

Perlawanan ini terjadi karena sebab-sebab berikut ini:

- a. Portugis melakukan monopoli perdagangan.
- b. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan.
- c. Portugis ingin menyebarkan agama Katholik, yang berarti bertentangan dengan agama yang telah dianut oleh rakyat Ternate.
- d. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka.
- e. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat.
- f. Keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka kehendak Portugis ditolak oleh raja Ternate. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis dapat didesak.

Perlawanan rakyat Maluku membuat Portugis terdesak dan meminta bantuan dari Malaka. Bala bantuan pun segera datang dari Malaka yang dipimpin oleh **Antonio Galvao**. Pasukan ini berhasil mengalahkan Ternate sehingga Antonio Galvao berkuasa di Maluku selama empat tahun (1536-1540). Dibawah kepemimpinan Antonio Galvao, Portugis dapat bersahabat dengan rakyat Maluku. Namun, setelah Galvao digantikan oleh penguasa lain, nafsu serakah Portugis muncul lagi dan semakin ganas.

Portugis memaksa Sultan Ternate, yaitu Sultan Hairun untuk menerima kekuasaan Portugis, dan hanya menjual cengkih dan pala kepada Portugis. d Ketika Sultan Hairun akan membicarakan masalah perdagangan dengan Portugis ini, beliau dibunuh secara licik. Rakyat Maluku tidak tinggal diam, perlawanan kembali berkobar.

Perlawanan Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun. Pada tahun 1565 Portugis semakin terdesak dan siasat perundingan pun mulai dijalankan oleh Portugis.

Perundingan antara kerajaan Ternate dan Portugis diadakan pada tahun 1570. Dalam perundingan tersebut Portugis melakukan kelecikan, yaitu membunuh Sultan Hairun. Terbunuhnya, Sultan Hairun jelas memancing kemarahan rakyat Ternate.

Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah (putra Sultan Hairun). Bersama rakyat, Sultan Baabullah bertekad menggempur Portugis. Pasukan Sultan Baabullah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Lima tahun lamanya Portugis mampu bertahan di dalam benteng yang akhirnya menyerah pada tahun 1575 karena kehabisan bekal. Kemudian Portugis melarikan diri ke Timor Timur. Pada tahun 1574 benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor-Timur sampai Tahun 1975.

B. Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Spanyol

Perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol

Perang ini terjadi tahun 1644 sampai 1683. Perang disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap usaha monopoli perdagangan beras yang dilakukan Spanyol dan kesengsaraan rakyat akibat ketamakan orang-orang Spanyol. Perang Spanyol dengan Minahasa dilakukan anak suku Tombatu (toundanow/Tansawang) di daerah Kali dan Batu Lesung atau sekitar danau Bulilin di bawah pimpinan Panglima Monde suami dari Ratu Oki sedangkan pihak Spanyol dibantu oleh Raja Loloda Mokoagouw II.



Pecah perang pertama tahun 1643 di Tompaso yang mengakibatkan 40 tentara Spanyol tewas di kali dan Batu sedang pihak Minahasa Panglima Monde beserta 9 tentara gugur. Namun demikian pasukan Spanyol dapat dikejar dan berkat bantuan

residen VOC, Herman Jansz Steynkuler berhasil diadakan kesepakatan damai pada 21 September 1694. Pada kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pasukan Minahasa menguasai Tompaso Baru, Rumoong bawah, dan Kawangkoan Bawah. sebelum akhirnya menjadi daerah otonom setingkat kecamatan di masa kekuasaan Belanda karena raja dijadikan pejabat pemerintahan Belanda.

C. Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Belanda

Monopoli perdagangan, kerja paksa, penarikan pajak, sewa tanah, dan tanam paksa menimbulkan banyak kerugian dan membuat sengsara rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak tahan lagi. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan memperjuangkan martabat dan kemerdekaannya. Dari seluruh penjuru tanah air timbul perlawanan terhadap penjajah Belanda.

Perlawanan terhadap VOC

Pada saat VOC berkuasa di Indonesia terjadi beberapa kali perlawanan. Pada tahun 1628 dan 1629, Mataram melancarkan serangan besar-besaran terhadap VOC di Batavia. Sultan Agung mengirimkan ribuan prajurit untuk menggempur Batavia dari darat dan laut. Di Sulawesi Selatan VOC mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia di bawah pimpinan Sultan Hassanuddin. Perlawanan terhadap VOC di Pasuruan Jawa Timur dipimpin oleh Untung Suropati. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa mengobarkan perlawanan di daerah Banten.

Perlawanan Pattimura (1817)

Belanda melakukan monopoli perdagangan dan memaksa rakyat Maluku menjual hasil rempah-rempah hanya kepada Belanda, menentukan harga rempah-rempah secara semena-mena, melakukan *pelayaran hongi*, dan menebangi tanaman rempahrempah milik rakyat. Rakyat Maluku berontak atas perlakuan Belanda.



Secara umum penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku ini adalah karena adanya beberapa prahara seperti penduduk wajib kerja paksa untuk kepentingan Belanda misalnya di perkebunan-perkebunan dan membuat garam, penyerahan wajib berupa ikan asin, dendeng dan kopi, banyak guru dan pegawai pemerintah diberhentikan dan sekolah hanya dibuka di kota-kota besar saja, jumlah pendeta dikurangi sehingga kegaitan menjalankan ibadah menjadi terhalang. Secara khusus yang menyebabkan kemarahan rakyat adalah penolakan Residen Van den Berg terhadap tuntutan rakyat untuk membayar harga perahu yang dipisah sesuai dengan harga sebenarnya.

Dipimpin oleh Thomas Matulesi yang nantinya terkenal dengan nama Kapten Pattimura, rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tahun 1817. Pattimura dibantu oleh Anthony Ribok, Philip Latumahina, Ulupaha, Paulus Tiahahu, dan seorang pejuang wanita Christina Martha Tiahahu. Perang melawan Belanda meluas ke berbagai daerah di Maluku, seperti Ambon, Seram, Hitu, dan lain-lain.

Belanda mengirim pasukan besarbesaran. Pasukan Pattimura terdesak dan bertahan di dalam benteng. Akhirnya, Pattimura dan kawan-kawannya tertawan. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di depan Benteng Victoria di Ambon.

Pada tahun 1817 rakyat Saparua mengadakan pertemuan dan menyepakati untuk memilih Thomas Matulesy (Kapitan Pattimura) untuk memimpin perlawanan. Keesokan harinya mereka berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua sehingga residen Van den Berg tewas. Selain Pattimura tokoh lainnya adalah Paulus Tiahahu

dan puterinya Christina Martha Tiahahu. Anthoni Reoak, Phillip Lattumahina, Said Perintah dan lain-lain. Perlawanan juga berkobar di pulau-pulau lain yaitu Hitu, Nusalaut dan Haruku penduduk berusaha merebut benteng Zeeland.

Untuk merebut kembali benteng Duurstede, pasukan Belanda didatangkan dari Ambon dibawah pimpinan Mayor Beetjes namun pendaratannya digagalkan oleh penduduk dan Mayor Beetjes tewas. Pada bulan Nopember 1817 Belanda mengerahkan tentara besar-besaran dan melakukan sergapan pada malam hari Pattimura dan kawan-kawannya tertangkap. Mereka menjalani hukuman gantung pada bulan Desember 1817 di Ambon. Paulus Tiahahu tertangkap dan menjalani hukuman gantung di Nusalaut. Christina Martha Tiahahu dibuang ke pulau Jawa.



Selama perjalanan ia tutup mulut dan mogok makan yang menyebabkan sakit dan meninggal dunia dalam pelayaran pada awal Januari tahun 1818.

Sejak Belanda berkuasa di Maluku rakyat menjadi sengsara, sehingga rakyat semakin benci, dendam kepada Belanda. Dibawah pimpinan Pattimura (Thomas Matualessi) rakyat Maluku bangkit melawan Belanda tahun 1817 dan berhasil menduduki Benteng Duurstede dan membunuh Residen Van Den Berg. Belanda kemudian minta bantuan ke Batavia, sehingga perlawanan Pattimura dapat dipatahkan, Pattimura kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung bulan Desember 1817. Dalam perjuangan rakyat Maluku ini juga terdapat seorang pejuang wanita yang bernama Christina Martha Tiahahu.

Perang Padri (1821-1837)

Dilatarbelakangi oleh perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri di Minangkabau. Kaum Padri sendiri merupakan sekelompok ulama yang baru kembali dari Timur Tengah dan kembali untuk memurnikan ajaran Islam di daerah Minangkabau. Peran

ini didasari oleh konflik antara kaum adat dan kaum padri mengenai masalah penerapan syariat di Tanah Minang.

Kaum Padri berusaha untuk menghilangkan unsur adat karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Unsur Adat tersebut antara lain kebiasaan seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Kaum Padri ini sendiri yang melakukan hal tersebut merupakan suatu aliran dalam Islam. Kaum Padri sendiri beraliran Islam Wahabi (Fundamentalis).



Terjadilah bentrokan- bentrokan antara keduanya. Karena terdesak, kaum adat minta bantuan kepada Belanda. Belanda bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Pasukan Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau wafat diganti oleh Tuanku Imam Bonjol. Pasukan Padri dengan taktik perang gerilya, berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda mengajak berunding.

Tanggal 22 Januari 1824 diadakan perjanjian Mosang dengan kaum Padri, namun kemudian dilanggar oleh Belanda. Pada April 1824 Raaf meninggal digantikan oleh Kolonel De Stuers. Dia membangun Benteng Fort De Kock, di Bukit Tinggi. Tanggal 15 November 1825 diadakan perjanjian Padang. Kaum Padri diwakili oleh Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Pasaman. Seorang Arab, Said Salimuljafrid bertindak sebagai perantara. Pada hakikatnya berulang-ulang Belanda mengadakan perjanjian itu dilatarbelakangi kekuatannya yang tidak mampu menghadapi serangan kaum Padri, di samping itu bantuan dari Jawa tidak dapat diharapkan, karena di Jawa sedang pecah Perang Diponegoro.

Tahun 1829 daerah kekuasaan kaum Padri telah meluas sampai ke Batak Mandailing, Tapanuli. Di Natal, Tapanuli Baginda Marah Husein minta bantuan kepada kaum Padri mengusir Gubernur Belanda di sana. Maka setelah selesai perang Diponegoro, Natal di bawah pimpinan Tuanku Nan Cerdik dapat mempertahankan serangan Belanda di sana. Tahun 1829 De Stuers digantikan oleh Letnan Kolonel Elout, yang datang di Padang Maret 1931. Dengan bantuan Mayor Michiels, Natal dapat direbut, sehingga Tuanku Nan Cerdik menyingkir ke Bonjol. Sejak itu kampung demi kampung dapat direbut Belanda. Tahun 1932 datang bantuan dari Jawa, di bawah Sentot Prawirodirjo. Dengan cepat Lintau, Bukit, Komang, Bonjol, dan hampir seluruh daerah Agam dapat dikuasai oleh Belanda. Melihat kenyataan ini baik kaum Adat maupun kaum Padri menyadari arti pentingnya pertahanan. Maka bersatulah mereka bersama-sama menghadapi penjajah Belanda.



Setelah daerah-daerah sekitar Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda, serangan ditujukan langsung ke benteng Bonjol. Membaca situasi yang gawat ini, Tuanku Imam Bonjol menyatakan bersedia untuk berdamai. Belanda mengharapkan, bahwa perdamaian ini disertai dengan penyerahan. Tetapi Imam Bonjol berpendirian lain. Perundingan perdamaian ini adalah siasat mengulur waktu, agar dapat mengatur pertahanan lebih baik, yaitu membuat lubang yang menghubungkan pertahanan dalam benteng dengan luar benteng, di samping untuk mengetahui kekuatan musuh di luar benteng. Kegagalan perundingan ini menyebabkan berkobarnya kembali pertempuran pada tanggal 12 Agustus 1837.

Belanda memerlukan waktu dua bulan untuk dapat menduduki benteng Bonjol, yang didahului dengan pertempuran yang sengit. Meriam-meriam Benteng Bonjol tidak banyak menolong, karena musuh berada dalam jarak dekat. Perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihindarkan lagi. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak.

~ Ba'in ~

Pasukan Padri terdesak dan benteng Bonjol dapat dimasuki oleh pasukan Belanda menyebabkan Tuanku Imam Bonjol beserta sisa pasukannya menyerah pada tanggal 25 Oktober 1837. Walaupun Tuanku Imam Bonjol telah menyerah tidak berarti perlawanan kaum Padri telah dapat dipadamkan. Perlawanan masih terus berlangsung dipimpin oleh Tuanku Tambusi pada tahun 1838. Setelah itu berakhirilah perang Padri dan daerah Minangkabau dikuasai oleh Belanda.

Perang Diponegoro (1825-1830)

Perang Diponegoro atau bisa disebut juga Perang Jawa merupakan perang besar yang pernah terjadi di Nusantara antara penjajah Belanda dan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Belanda menyebut perang ini sebagai Perang Jawa karena terjadi di Tanah Jawa, khususnya Yogyakarta. Sedangkan, di Indonesia kita lebih akrab dengan sebutan Perang Diponegoro, karena Diponegoro merupakan tokoh sentral dalam perang ini.



Perang Diponegoro yang terjadi selama lima tahun (1825-1830) telah menelan korban tewas di pihak tentara Belanda sebanyak 15.000 orang (8.000 orang tentara Eropa dan 7.000 orang pribumi), sedangkan di pihak Diponegoro sedikitnya 200.000 orang tewas. Selain melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang (sesama) saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti-Diponegoro (antek Belanda).

Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Dipimpin Pangeran Diponegoro, rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda tanggal 20 Juli

1825. Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat, Pangeran Ngabehi Jayakusuma sebagai panglima, dan Sentot Ali Basyah Prawiradirja sebagai panglima perang.

Pangeran Diponegoro menyusun barisan dengan nama Perlawanan Rakyat terhadap penjajah. Dalam barisan ini, perlawanan difokuskan pada gerakan rakyat agar perjuangannya bersifat meluas dan lama. Bentuk perlawanan ini dipilih Diponegoro untuk menghindari tuduhan Belanda bahwa ia hanya ingin merebut kekuasaan, meski akhirnya tuduhan tersebut tetap dilayangkan kepadanya.

Dalam perjuangan tersebut, Diponegoro menggunakan langkah jitu. Yakni dengan menyerukan kepada rakyat Mataram untuk berjuang bersama-sama dalam menentang Koloni yang dengan jelas menindas rakyat. Seruan kemudian disebarluaskan di seluruh tanah Mataram, khususnya di Jawa Tengah dan mendapat sambutan hampir sebagian besar lapisan masyarakat. Akhirnya, daerah Selarong penuh sesak karena dipenuhi oleh pasukan rakyat. Perang untuk menentang penguasa kolonial Belanda meledak dan membakar hampir seluruh tanah Mataram, bahkan sampai ke Jawa Timur dan Jawa Barat.

Akhirnya, peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Pasukan Belanda kewalahan menghadapi pasukan Diponegoro selama bertahun-tahun lamanya. Dalam beberapa pertempuran, pasukan Belanda selalu kalah. Hal ini membuat pasukan Belanda dari Madura dan daerah-daerah lain berdatangan untuk membantu pasukan di Yogyakarta yang sedang terserang. Akibatnya, pasukan Diponegoro banyak yang menderita kekalahan dan gugur di medan perang.



~ Ba'in ~

Pangeran Diponegoro juga didukung oleh para ulama dan bangsawan. Daerah-daerah lain di Jawa ikut berjuang melawan Belanda. Kyai Mojo dari Surakarta mengobarkan *Perang Sabil*. Antara tahun 1825-1826 pasukan Diponegoro mampu mendesak pasukan Belanda..

Dalam menangani perlawanan Diponegoro tersebut, lagi-lagi Belanda menggunakan siasat yang licik. Pada tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatra dan Sulawesi. Jenderal De Kock menerapkan taktik perang *benteng stelsel*. Taktik ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro gugur dan tertangkap. Namun demikian, pasukan Diponegoro tetap gigih. Akhirnya, Belanda mengajak berunding. Dalam perundingan yang diadakan tanggal 28 Maret 1830 di Magelang, Diponegoro disergap. Pada posisi tidak siap perang, pangeran Diponegoro serta pengawalnya dengan mudahnya di sergap, dilucuti dan dimasukkan ke dalam kendaraan khusus residen. Kendaraan ini sudah terlebih dahulu disiapkan oleh pihak Belanda. Dengan pengawalan yang ketat, pasukan Belanda kemudian membawa pangeran Diponegoro menuju Ungaran.

Diponegoro kemudian akan dibawa ke Batavia, sebelum itu dia dibawa terlebih dahulu ke kota Semarang. Tepat pada tanggal 3 Mei tahun 1830, pangeran Diponegoro dan stafnya dibawa ke daerah pembuangan, yaitu di Manado. Pangeran Diponegoro beserta 19 orang termasuk keluarga dan stafnya juga ikut dibuang. Kemudian pada tahun 1834 pangeran Diponegoro dan yang lainnya berpindah ke daerah pembuangan lain, yaitu Makassar. Setelah menjalani masa tawanan selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855 tepatnya saat berusia 70 tahun.

Perang Banjarmasin (1859-1863)

Perang Banjar diawali dari perebutan takhta yang terjadi di dalam keluarga Kesultanan Banjar. Sultan Adam yang meninggal pada 1857 mewariskan takhta kepada Pangeran Hidayat. Namun, Belanda di bawah Gubernur Jenderal Rochussen ikut campur menentukan pewaris takhta tersebut. Sultan Adam cenderung untuk memilih Pangeran Hidayatullah. Alasannya memiliki perangai yang baik, taat beragama, luas pengetahuan, dan disukai rakyat. Sebaliknya Pangeran Tamjid

kelakuannya kurang terpuji, kurang taat beragama dan bergaya hidup kebarat-baratan meniru orang Belanda. Pangeran Tamjid inilah yang dekat dengan Belanda dan dijagokan oleh Belanda. Belanda menekan Sultan Adam dan mengancam supaya mengangkat Pangeran Tamjid.

Belanda menginginkan Pangeran Tamjid Ullah menjadi sultan karena Belanda mengharapkan izinnya untuk menguasai daerah pertambangan batu bara yang berada di wilayah kekuasaan Pangeran Tamjid Ullah. Belanda kemudian mengangkat Pangeran Tamjid Ullah sebagai sultan dan Pangeran Hidayat diangkat sebagai mangkubumi (Nurhadi, dkk : 2009). Oleh karena itu, timbullah keresahan dan pemberontakan di kalangan rakyat daerah pedalaman karena rakyat menghendaki Pangeran Hidayat yang menjadi sultan. Pada akhirnya, kekuasaan di Kasultanan Banjar diambil alih pemerintah Belanda, setelah menurunkan Pangeran Tamjid Ullah dari takhta kesultanan.

Cucu Sultan Adam Al Wasikbillah ada 2 orang, yaitu:

- a. Pangeran Hidayatullah, putra Sultan Muda Abdurrahman dengan permaisuri putri keraton Ratu Siti, Putri dari Pangeran Mangkubumi Nata.
- b. Pangeran Tamjid adalah putra Abdurrahman dengan istri wanita biasa keturunan China yang bernama Nyai Aminah.

Latar Belakang Terjadinya Perlawanan Rakyat Banjar

- a. Belanda memaksakan monopoli perdagangan di Kerajaan Banjar. Dalam monopoli perdagangan lada, rotan, damar, dan hasil-hasil tambang seperti emas dan intan, Belanda bersaing dengan saudagar-saudagar Banjar dan para bangsawan Banjar. Dari persaingan menjadi permusuhan karena Belanda berusaha menguasai beberapa wilayah Kerajaan Banjar.
- b. Pemerintah kolonial Belanda ikut mencampuri urusan dalam Kraton terutama dalam pergantian sultan-sultan kerajaan Banjar. Misalnya Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi sultan pada tahun 1857. Hak Pangeran Hidayat menjadi sultan disisihkan. Padahal yang berhak menjadi sultan yang sebenarnya adalah Pangeran Hidayat sendiri.
- c. Pemerintah kolonial Belanda mengumumkan bahwa Kasultanan Banjarmasin akan dihapuskan.

Jalannya Perlawanan Rakyat Banjar dan Pangeran Antasari

Kendatipun Pangeran Hidayat tidak menjadi Sultan Kerajaan Banjar, tetapi ia telah mempunyai kedudukan sebagai Mangkubumi. Pengaruhnya cukup besar di kalangan rakyatnya. Campur tangan Belanda di kraton makin besar dan kedudukan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi makin terdesak. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengadakan perlawanan bersama sepupunya Pangeran Antasari. Di mana-mana timbul suara ketidakpuasan masyarakat terhadap Sultan Tamjidillah II (gelar Sultan Tamjid setelah naik tahta) dan kebencian rakyat terhadap Belanda. Kebencian rakyat lama-lama berubah menjadi bentuk perlawanan yang terjadi di mana-mana. Perlawanan tersebut dipimpin oleh seorang figur yang didambakan rakyat, yaitu Pangeran Antasari.



Pangeran Antasari, seorang bangsawan yang sudah lama hidup di kalangan rakyat yang berusaha mempersatukan kaum pemberontak. Pada April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang pos Belanda di Martapura dan Pengaron. Pada Maret 1860, bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1278 Hijriah, para alim ulama dan para pemimpin rakyat menobatkan Pangeran Antasari menjadi Panembahan Amirudin Kalifatul Mukminin, atau pemimpin tertinggi agama. Pangeran Antasari seorang pemimpin perlawanan yang amat anti Belanda. Ia bersama pengikutnya, Kyai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Buyasin dan Haji Langlang, berhasil menghimpun kekuatan sebanyak 3000 orang. Ia bersama pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron pada tanggal 28 April 1859. Pertempuran hebat terjadi di salah satu pusat kekuatan Pangeran Antasari, yaitu Benteng Gunung Lawak. Belanda berhasil menduduki Benteng Gunung Lawak (27 September 1859).

Niat Belanda yang sebenarnya adalah menghapuskan Kerajaan Banjar. Hal ini baru terlaksana setelah Kolonel Andresen dapat menurunkan Sultan Tamjidillah, yang dianggapnya sebagai penyebab kericuhan, sedangkan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi telah meninggalkan kraton. Belanda menghapuskan kerajaan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860 dan dimasukkan ke dalam kekuasaan Belanda. Pangeran Hidayat terlibat dalam pertempuran yang hebat melawan Belanda pada tanggal 16 Juni 1860 di Anbawang. Adanya ketidakseimbangan dalam persenjataan dan pasukan yang kurang terlatih, menyebabkan Pangeran Hidayat harus mengundurkan diri. Belanda menggunakan siasat memberikan kedudukan dan jaminan hidup kepada setiap orang yang bersedia menghentikan perlawanan dengan menyerahkan diri kepada Belanda. Ternyata siasat ini berhasil, yaitu dengan menyerahkan Kyai Demang Leman pada tanggal 2 Oktober 1861.

Akhir Perlawanan Rakyat Banjar

Penyerahan Kyai Demang Leman mempengaruhi kekuatan pasukan Pangeran Antasari. Beberapa bulan kemudian Pangeran Hidayat dapat ditangkap, akhirnya diasingkan ke Jawa pada tanggal 3 Februari 1862. Rakyat Banjar memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pangeran Antasari dengan mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembahan Amirudin Khalifatul Mukminin pada tanggal 14 Maret 1862. Perlawanan diteruskan bersama-sama pemimpin yang lain, seperti Pangeran Miradipa, Tumenggung Mancanegara, Tumenggung Surapati dan Gusti Umar. Pertahanan pasukan Pangeran Antasari ditempatkan di Hulu Teweh. Pada akhir 1860, kedudukan pasukan Pangeran Antasari semakin terjepit dan melakukan perang gerilya. Ketika wabah penyakit melanda daerah pedalaman, di di Kampung Bayam Bengkok inilah Pangeran Antasari meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1862. Akan tetapi, perlawanan terhadap Belanda tetap dilanjutkan oleh putranya Pangeran Muhammad Seman dan adiknya, Muhammad Said. Perjuangan dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Sulaiha. Perlawanan rakyat Banjar terus berlangsung dipimpin oleh putera Pangeran Antasari, Pangeran Muhamad Seman bersama pejuang-pejuang Banjar lainnya.

Perang Bali (1846-1868)

Perang Bali dilakukan untuk mengusir Belanda dari daerahnya dikenal dengan *Perang Puputan*. Perang puputan ditandai dengan pengorbanan yang luar biasa dari seluruh rakyat yang cinta daerahnya, baik pengorbanan nyawa maupun materi. Perang Puputan dilakukan oleh rakyat Bali demi mempertahankan daerah mereka dari pendudukan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat Bali tidak ingin Kerajaan Klungkung yang telah berdiri sejak abad ke-9 dan telah mengadakan perjanjian dengan Belanda tahun 1841 di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putra diduduki oleh Belanda. Sikap pantang menyerah rakyat Bali dijadikan alasan oleh pemerintah Belanda untuk menyerang Bali. Tokoh perang Bali adalah raja kerajaan Buleleng I Gusti Made Karangasem dan patihnya I Gusti Ketut Jelantik sebagai pimpinan rakyat Buleleng.

Pada abad ke-19, di Bali terdapat banyak kerajaan, yang masing-masing mempunyai kekuasaan tersendiri. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Bandung, Tabanan, Mengwi, Bangli, dan Jembrana. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut yang gencar mengadakan perlawanan terhadap Belanda adalah Buleleng dan Bandung. Raja-raja di Bali terikat dengan perjanjian yang disebut Hak Tawan Karang, yaitu hak suatu negara untuk mengakui dan memiliki kapal-kapal yang terdampar di wilayahnya. Hak Tawan Karang inilah yang memicu peperangan dengan Belanda. Pada 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di Prancak, wilayah Kerajaan Buleleng dan terkena Hukum Tawan Karang. Hukum tersebut memberi hak kepada penguasa kerajaan untuk menguasai kapal yang terdampar beserta isinya. Dengan kejadian itu, Belanda memiliki alasan kuat untuk melakukan serangan ke Kerajaan Buleleng pada 1848. Namun, rakyat Buleleng dapat menangkis serangan tersebut. Akan tetapi, pada serangan yang kedua pada 1849, pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Mayor A.V. Michies dan Van Swieeten berhasil merebut benteng pertahanan terakhir Kerajaan Buleleng di Jagaraga. Dengan serangan besar-besaran, rakyat Bali membalasnya dengan perang habis-habisan guna mempertahankan harga diri sebagai orang Bali. Pertempuran untuk mempertahankan Buleleng itu dikenal dengan Puputan Jagaraga. Puputan lainnya, yaitu Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan Klungkung (1908).

Pada sekitar abad 18, para penguasa Bali menerapkan hak tawan karang, yaitu hak yang menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan Bali berhak merampas dan menyita barang-barang dan kapal-kapal yang terdampar dan kandas di wilayah perairan Pulau Bali.

Latar Belakang Terjadinya Perlawanan Rakyat Bali

- a. Pemerintah kolonial Belanda ingin menguasai Bali. Yaitu berusaha untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dengan raja-raja Klungkung, Bandung, dan Buleleng dinyatakan bahwa raja-raja Bali mengakui bahwa kerajaannya berada di bawah kekuasaan negara Belanda. Raja memberi izin pengibaran bendera Belanda di daerahnya.
- b. Pemerintah kolonial Belanda ingin menghapuskan hak Tawan Karang yang sudah menjadi tradisi rakyat Bali. Hak Tawan Karang adalah hak raja Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya.

Pada tahun 1844, di pantai Prancak dan pantai Sangsit (pantai di Buleleng bagian timur) terjadi perampasan kapal-kapal Belanda yang terdampar di pantai tersebut. Timbul percekcoan antara Buleleng dengan Belanda. Belanda menuntut agar Kerajaan Buleleng melaksanakan perjanjian 1843, yakni melepaskan hak Tawan Karang. Tuntutan Belanda tidak diindahkan oleh Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem. Belanda menggunakan dalih kejadian ini dan menyerang Kerajaan Buleleng. Pantai Buleleng diblokade dan istana raja ditembaki dengan meriam dari pantai. Belanda mendaratkan pasukannya di pantai Buleleng. Perlawanan sengit dari pihak Kerajaan. Buleleng dapat menghambat majunya laskar Belanda. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Akhirnya Belanda berhasil menduduki satu-persatu daerah-daerah sekitar istana raja (Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Penataran, Banjar Delodpeken, Istana raja telah terkurung rapat). I Gusti Made Karangasem menghadapi situasi ini kemudian mengambil siasat pura-pura menyerah dan tunduk kepada Belanda. Raja Buleleng (Bali) beserta penulisnya. Dalam rangka perlawanan terhadap Belanda, raja-raja Bali melancarkan hukum adat hak tawan karang. Dan dalam perang melancarkan semangat puputan.

I Gusti Ketut Jelantik, patih kerajaan Buleleng melanjutkan perlawanan. Pusat perlawanan ditempatkan di wilayah Buleleng Timur, yakni di sebuah desa yang bernama desa Jagaraga. Secara geografis desa ini berada pada tempat ketinggian, di lereng sebuah perbukitan dengan jurang di kanan kirinya. Desa Jagaraga sangat strategis untuk pertahanan dengan benteng berbentuk "supit urang". Benteng dikelilingi parit dengan ranjau yang dibuat dari bambu (bahasa Bali : sungga) untuk menghambat gerakan musuh. Benteng Jagaraga diserang oleh Belanda, namun gagal karena Belanda belum mengetahui medan yang sebenarnya dan siasat pertahanan supit urang laskar Jagaraga. I Gusti Ketut Jelantik bersama seluruh laskarnya setelah memperoleh kemenangan, bertekad untuk mempertahankan benteng Jagaraga sampai titik darah penghabisan demi kehormatan kerajaan Buleleng dan rakyat Bali.

Pada 1849, Belanda kembali mengirim ekspedisi militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Michies. Mereka menyerang Benteng Jagaraga dan merebutnya. Belanda juga menyerang Karang Asem. Pada 1906, Belanda menyerang Kerajaan Badung. Raja dan rakyatnya melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan dikenal dengan puputan. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Bali yang berpusat di Jagaraga, Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran, maka setelah mengatur persiapan, mereka langsung menyerang Benteng Jagaraga. Mereka menyerang dari dua arah, yaitu arah depan dan dari arah belakang Benteng Jagaraga. Pertempuran sengit tak dapat dielakkan lagi, terutama pada posisi di mana I Gusti Ketut Jelantik berada. Benteng Jagaraga dihujani tembakan meriam dengan gencar. Korban telah berjatuhan di pihak Buleleng. Kendatipun demikian, tidak ada seorang pun laskar Jagaraga yang mundur atau melarikan diri. Mereka semuanya gugur dan pada tanggal 19 April 1849 Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Mulai saat itulah Belanda menguasai Bali Utara.

Penyebab perang Bali adalah Belanda ingin menghapus hukum tawan karang dan memaksa Raja-raja Bali mengakui kedaulatan Belanda di Bali. Isi hukum tawan karang adalah kerajaan berhak merampas dan menyita barang serta kapal-kapal yang terdampar di Pulau Bali. Raja-raja Bali menolak keinginan Belanda. Akhirnya, Belanda menyerang Bali. Belanda melakukan tiga kali penyerangan, yaitu pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Rakyat Bali mempertahankan tanah air mereka. Setelah

Buleleng dapat ditaklukkan, rakyat Bali mengadakan *perang puputan*, yaitu berperang sampai titik darah terakhir. Di antaranya Perang Puputan Badung (1906), Perang Puputan Kusumba (1908), dan Perang Puputan Klungkung (1908). Salah satu pemimpin perlawanan rakyat Bali yang terkenal adalah Raja Buleleng dibantu oleh Gusti Ketut Jelantik.

Perang Sisingamangaraja XII (1870-1907)

Perang Tapanuli (1878-1907) terjadi karena kebijakan Belanda di Nusantara, dan berlaku juga di Tapanuli, membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya karena diberlakukannya politik liberal yang membebaskan kepada para pengusaha Eropa untuk dapat menyewa tanah penduduk pribumi. Dan dalam pelaksanaannya banyak penduduk pribumi yang dipaksakan untuk menyewakan tanahnya dengan harga murah. Untuk itu Sisingamangaraja mengadakan perlawanan terhadap Belanda.

Berikut beberapa alasan Sisingamangaraja XII mengadakan perlawanan terhadap Belanda:

- a. Pengaruh Sisingamangaraja semakin kecil.
- b. Adanya Zending atau misi penyebaran agama kristen di Tapanuli dan sekitarnya
- c. Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax Netherlandica.

Sedangkan penyebab khusus perlawanan adalah kemarahan sisingamangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung.



Sampai abad ke-18, hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda kecuali Aceh dan tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah

pimpinan Raja Sisingamangaraja XII yang masih muda. Rakyat bertani dan beternak, berburu dan sedikit-sedikit berdagang. Kalau Raja Sisingamangaraja XII mengunjungi suatu negeri semua yang “terbeang” atau ditawan, harus dilepaskan. Sisingamangaraja XII memang terkenal anti perbudakan, anti penindasan dan sangat menghargai kemerdekaan.

Pada tahun 1877 para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Singamangaraja XII. Kemudian pemerintah Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja XII di Bangkara tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba.

Pada tanggal 6 Februari 1878 pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nommensen. Kemudian beserta penginjil Nommensen dan Simoneit sebagai penerjemah pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Namun kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamangaraja XII, yang kemudian mengumumkan pulas (perang) pada tanggal 16 Februari 1878 dan penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan.

Pada tanggal 14 Maret 1878 datang Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei 1878, Bangkara pusat pemerintahan Sisingamangaraja diserang pasukan kolonial dan pada 3 Mei 1878 seluruh Bangkara dapat ditaklukkan namun Singamangaraja XII beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara para raja yang tertinggal di Bangkara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia-Belanda.

Walaupun Bangkara telah ditaklukkan, Singamangaraja XII terus melakukan perlawanan secara gerilya, namun sampai akhir Desember 1878 beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Naga Saribu, Huta Ginjang, Gurgur juga dapat ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda.

Karena lemah secara taktis, Sisingamangaraja XII menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan dengan tokoh-tokoh pejuang Aceh beragama Islam untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Dia berangkat ke wilayah Gayo,

Alas, Singkel, dan Pidie di Aceh dan turut serta pula dalam latihan perang Keumala. Karena Belanda selalu unggul dalam persenjataan, maka taktik perang perjuangan Batak dilakukan secara tiba-tiba, hal ini mirip dengan taktik perang Gerilya.

Pada tahun 1888, pejuang-pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua. Mereka dibantu orang-orang Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan ini dapat dihentikan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J. A. Visser, namun Belanda juga menghadapi kesulitan melawan perjuangan di Aceh. Sehingga Belanda terpaksa mengurangi kegiatan untuk melawan Sisingamangaraja XII karena untuk menghindari berkurangnya pasukan Belanda yang tewas dalam peperangan.

Pada tanggal 8 Agustus 1889, pasukan Sisingamangaraja XII kembali menyerang Belanda. Seorang prajurit Belanda tewas, dan Belanda harus mundur dari Lobu Talu. Namun Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang, sehingga Lobu Talu dapat direbut kembali. Pada tanggal 4 September 1889, Huta Paong diduduki oleh Belanda. Pasukan Batak terpaksa ditarik mundur ke Passinguran. Pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak sehingga ketika tiba di Tamba, terjadi pertarungan sengit. Pasukan Belanda ditembak oleh pasukan Batak, dan Belanda membalasnya terus menerus dengan peluru dan artileri, sehingga pasukan Batak mundur ke daerah Horion.

Sisingamangaraja XII dianggap selalu mengobarkan perlawanan di seluruh Sumatra Utara. Kemudian untuk menanggulangnya, Belanda berjanji akan menobatkan Sisingamangaraja XII menjadi Sultan Batak. Sisingamangaraja XII tegas menolak iming-iming tersebut, baginya lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Belanda semakin geram, sehingga mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika, untuk mencari persembunyian Sisingamangaraja XII. Barisan pelacak ini terdiri dari orang-orang Senegal. Oleh pasukan Sisingamangaraja XII barisan musuh ini dijuluki “Si Gurbak Ulu Na Birong”. Tetapi pasukan Sisingamangaraja XII pun terus bertarung. Panglima Sarbut Tampubolon menyerang tangsi Belanda di Butar, sedang Belanda menyerbu Lintong dan berhadapan dengan Raja Ompu Babiati Situmorang. Tetapi Sisingamangaraja XII menyerang juga ke Lintong Nihuta, Hutaraja, Simangarongsang, Huta Paung, Parsingguran dan Pollung.

Panglima Sisingamangaraja XII yang terkenal Amandopang Manullang tertangkap. Dan tokoh Parmalim yang menjadi Penasehat Khusus Raja

Sisingamangaraja XII, Guru Somaling Pardede juga ditawan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1906. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dinamakan Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Sisingamangaraja XII. Tetapi Sisingamangaraja XII tidak bersedia menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Boru Sagala, Istri Sisingamangaraja XII, ditangkap pasukan Belanda. Ikut tertangkap putra-putri Sisingamangaraja XII yang masih kecil. Raja Buntal dan Pangkilim. Menyusul Boru Situmorang Ibunda Sisingamangaraja XII juga ditangkap, menyusul Sunting Mariam, putri Sisingamangaraja XII dan lain-lain.

Tahun 1907, di pinggir kali Aek Sibulbulon, di suatu desa yang namanya Si Onom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang, gugurlah Sisingamangaraja XII oleh peluru Marsuse Belanda pimpinan Kapten Christoffel. Sisingamangaraja XII gugur bersama dua putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi serta putrinya Lopian. Pengikut-pengikutnya berpecah dan berusaha terus mengadakan perlawanan, sedangkan keluarga Sisingamangaraja XII yang masih hidup ditawan, dihina dan dinista, mereka pun ikut menjadi korban perjuangan. Gugurnya Sisingamangaraja XII merupakan pertanda jatunya tanah Batak ke tangan Belanda.

Pada saat Sisingamangaraja memerintah Kerajaan Bakara, Tapanuli, Sumatera Utara, Belanda datang. Belanda ingin menguasai Tapanuli. Sisingamangaraja beserta rakyat Bakara mengadakan perlawanan. Tahun 1878, Belanda menyerang Tapanuli. Namun, pasukan Belanda dapat dihalau oleh rakyat. Pada tahun 1904 Belanda kembali menyerang tanah Gayo. Pada saat itu Belanda juga menyerang daerah Danau Toba. Pada tahun 1907, pasukan Belanda menyerang kubu pertahanan pasukan Sisingamangaraja XII di Pakpak. Sisingamangaraja gugur dalam penyerangan itu. Jenazahnya dimakamkan di Tarutung, kemudian dipindahkan ke Balige.

Perang Aceh (1873-1906)

Perang Aceh ialah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 sampai 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang kepada Aceh, & mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen.

Pada 8 April 1873, Belanda mendarat di Pantai Ceureumen di bawah pimpinan Johan Harmen Rudolf Köhler, & langsung bisa menguasai Masjid Raya Baiturrahman. Köhler saat itu membawa 3.198 tentara. Sebanyak 168 di antaranya para perwira.

Perang Aceh disebabkan karena:

- a. Belanda menduduki daerah Siak. Akibat dari Perjanjian Siak 1858. Di mana Sultan Ismail menyerahkan daerah Deli, Langkat, Asahan & Serdang kepada Belanda, padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda, berada di bawah kekuasaan Aceh.
- b. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirilah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London ialah Belanda & Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh.
- c. Aceh menuduh Belanda tak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yg lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung Britania.
- d. Dibukanya Terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps. Menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan.
- e. Ditandatanganinya Perjanjian London 1871 antara Inggris & Belanda, yang berisi : Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh; Belanda harus menjaga keamanan lalulintas di Selat Malaka; Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak & menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania.
- f. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, Kesultanan Usmaniyah di Singapura. Dan mengirimkan utusan ke Turki Usmani pada tahun 1871.
- g. Akibat hubungan diplomatik Aceh dengan Konsul Amerika, Italia & Turki di Singapura, Belanda menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederik Nicolaas Nieuwenhuijzen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh & meminta keterangan dari Sultan Machmud Syah tentang apa yg sudah dibicarakan di Singapura itu, tetapi Sultan Machmud menolak untuk memberikan keterangan.

Strategi Siasat Snouck Hurgronje Mata-mata Belanda

Untuk mengalahkan pertahanan & perlawanan Aceh, Belanda memakai tenaga ahli Dr. Christiaan Snouck Hurgronje yg menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan & ketatanegaraan Aceh. Ia mempelajari bahasa, adat istiadat, kepercayaan dan waktu orang-orang Aceh. Dari hasil penelitiannya akhirnya dapat diketahui bahwa sebenarnya Sultan Aceh itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa persetujuan dari kepala-kepala yang ada di bawahnya. Selain itu juga dijelaskan bahwa pengaruh kaum ulama pada rakyat adalah sangat besar. Karena itu dirasa sulit untuk menundukkan rakyat yang berkeyakinan agama yang kuat seperti rakyat Aceh itu (Wiharyanto : tt). Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh (De Acehers). Dalam buku itu disebutkan strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Usulan strategi Snouck Hurgronje kepada Gubernur Militer Belanda Joannes Benedictus van Heutsz adalah, supaya golongan Keumala yaitu Sultan yg berkedudukan di Keumala dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu.



Tetap menyerang terus & menghantam terus kaum ulama. Jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya. Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya. Menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh, dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi & membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Ternyata siasat Dr Snouck Hurgronje diterima oleh Van Heutz yg menjadi Gubernur militer & sipil di Aceh (1898-1904). Kemudian Dr Snouck Hurgronje diangkat sebagai penasehatnya.

Kronologi Perang Aceh Pertama

Perang Aceh Pertama (1873-1874) dipimpin oleh Panglima Polim & Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yg dipimpin Köhler. Köhler dengan 3000 serdadunya dapat dipatahkan, dimana Köhler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. Sepuluh hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baiturrahman, yg dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada di Peukan Aceh, Lambhuk, Lampu'uk, Peukan Bada, sampai Lambada, Krueng Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Teunom, Pidie, Peusangan, & beberapa wilayah lain. Perang Aceh Pertama ialah ekspedisi Belanda terhadap Aceh pada tahun 1873 yg bertujuan mengakhiri Perjanjian London 1871, yg menindaklanjuti traktat dari tahun 1859 (diputuskan oleh Jan van Swieten). Melalui pengesahan Perjanjian Sumatera, Belanda berhak mendapatkan pantai utara Sumatera yg di situ banyak terjadi perompakan. Komisaris Pemerintah Frederik Nicolaas Nieuwenhuijzen yg mengatur Aceh mencoba mengadakan perundingan dengan Sultan Aceh namun tak mendapatkan apa yg diharapkan sehingga ia menyatakan perang pada Aceh atas saran GubJen James Loudon. Blokade pesisir tak berjalan sesuai yg diharapkan.

Belanda kemudian memerintahkan ekspedisi pertama ke Aceh, di bawah pimpinan Jenderal Johan Harmen Rudolf Köhler & sesudah kematiannya tugasnya digantikan oleh Kolonel Eeldert Christiaan van Daalen. Dalam ekspedisi tersebut dipergunakan senapan Beaumont untuk pertama kalinya namun ekspedisi tersebut berakhir dengan kembalinya pasukan Belanda ke Jawa. Tak dapat disangkal bahwa Masjid Raya Baiturrahman direbut 2 kali (dan di saat yg kedua kalinya tewaslah Köhler). Terjadi serbuan beruntun ke istana pada tanggal 16 April di bawah pimpinan Mayor F. P. Cavaljé namun tak dapat menduduki lebih lanjut karena keulungan orang Aceh serta banyaknya serdadu yg tewas & terluka. Serdadu Belanda tak cukup persiapan yg harus ada untuk serangan tersebut. Di samping itu, jumlah artileri (berat) tak cukup & mereka tak cukup mengenali musuh. Mereka sendiri harus menarik diri dari pesisir & atas petunjuk Komisaris F. N. Nieuwenhuijzen (yang menjalin komunikasi dengan GubJen Loudon) & kembali ke Pulau Jawa.

Menurut George Frederik Willem Borel, kapten artileri, serdadu dapat memperoleh pesisir bila mendapatkan titik lain yg agak lebih kuat, namun Komandan

Marinir Koopman tak dapat memberikan kepastian bahwa ada hubungan yg teratur antara bantaran sungai & saat itu sedang berlangsung muson yg buruk, yg karena itulah kedatangan pasukan baru jadi sulit. Setelah kembalinya ekspedisi itu, angkatan tersebut banyak disalahkan akibat kegagalan ekspedisi itu. Dari situlah GubJen James Loudon mengadakan penyelidikan di mana para bawahan harus memberikan penilaian atas atasan mereka. Penyelidikan tersebut kemudian juga banyak menuai kontroversi & menimbulkan “perang kertas” sesudah Perang Aceh I (dokumen & tulisan pro & kontra penyelidikan tersebut terjadi terus menerus).

Penyelidikan itu masih berawal, sesudah Perang Aceh II, ketika kapten & kepala staf Brigade II GCE. van Daalen menolak untuk ditekan GubJen Loudon. Alasan sebelumnya ialah selama itu Loudon telah memerintahkan penyelidikan yg untuk itu pamannya EC. van Daalen, yg merupakan panglima tertinggi ekspedisi pertama sesudah kematian panglima tertinggi sebelumnya Johan Harmen Rudolf Kohler, sebagai orang jenius yg malang sesudah kegagalan ekspedisi tersebut, dihadirkan & selama penyelidikan itu (meskipun kemudian meninggal) Van Daalen, komandan Pasukan Hindia, Willem Egbert Kroesen mengetahui bahwa pemerintah Hindia-Belanda tak diberi cukup informasi atas terganggunya pembekalan senjata pada pasukan itu. Loudon tak mengizinkan Van Daalen (keponakan) mendapatkan Militaire Willems-Orde & untuk itu memandang bahwa Van Daalen harus terus dikirim uang tunjangan pensiun. Raja Willem II mulai menganugerahkan Medali Aceh 1873-1874 pada tanggal 12 Mei 1874. Yang khas ialah pembawa medali tersebut juga dapat diberi gesper bertulisan “ATJEH 1873-1874” pada pita Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. Terdapat pula salib Militaire Willems-Orde & Medaille voor Moed en Trouw.

Perang Aceh Kedua

Pada Perang Aceh Kedua (1874-1880), di bawah Jend. Jan van Swieten, Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan, 26 Januari 1874, & dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. 31 Januari 1874 Jenderal Van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari Kerajaan Belanda. Ketika Sultan Machmud Syah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawood yg dinobatkan sebagai Sultan di masjid Indragiri.

Perang Aceh Kedua diumumkan oleh KNIL terhadap Aceh pada tanggal 20 November 1873 sesudah kegagalan serangan pertama. Pada saat itu, Belanda sedang mencoba menguasai seluruh Nusantara. Ekspedisi yg dipimpin oleh Jan van Swieten itu terdiri atas 8. 500 prajurit, 4. 500 pembantu & kuli, & belakangan ditambahkan 1. 500 pasukan. Pasukan Belanda & Aceh sama-sama menderita kolera. Sekitar 1. 400 prajurit kolonial meninggal antara bulan November 1873 sampai April 1874.

Setelah Banda Aceh ditinggalkan, Belanda bergerak pada bulan Januari 1874 & berpikir mereka telah menang perang. Mereka mengumumkan bahwa Kesultanan Aceh dibubarkan & dianeksasi. Namun, kuasa asing menahan diri ikut campur, sehingga masih ada serangan yg dilancarkan oleh pihak Aceh. Sultan Mahmud Syah & pengikutnya menarik diri ke bukit, & sultan meninggal di sana akibat kolera. Pihak Aceh mengumumkan cucu muda Tuanku Ibrahim yg bernama Tuanku Muhammad Daud Syah, sebagai Sultan Ibrahim Mansur Syah (berkuasa 1874-1903).

Perang pertama & kedua ini ialah perang total & frontal, dimana pemerintah masih berjalan mapan, meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Keumala Dalam, Indrapuri, & tempat-tempat lain.

Perang Aceh Ketiga

Perang ketiga (1881-1896), perang dilanjutkan secara gerilya & dikobarkan perang fisabilillah. Dimana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1904. Perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Teuku Umar bersama Panglima Polim & Sultan. Pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dussen di Meulaboh, Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak Dhien istri Teuku Umar kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya.

Perang Aceh Keempat

Perang keempat (1896-1910) ialah perang gerilya kelompok & perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan & pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan Kesultanan.

Taktik Perang Belanda Menghadapi Aceh

Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heutz, dimana dibentuk pasukan *maréchaussée* yg dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan Colone Macan yg telah mampu & menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari & mengejar gerilyawan-gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yg dilakukan Belanda ialah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik permaisuri Sultan & Tengku Putroe (1902).

Van der Maaten menawan putera Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli & berdamai. Van der Maaten dengan diam-diam menyergap Tangse kembali, Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putera Panglima Polim, Cut Po Radeu saudara perempuannya & beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya Panglima Polim meletakkan senjata & menyerah ke Lhokseumawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim.

Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yg dilakukan di bawah pimpinan Gotfried Coenraad Ernst van Daalen yg menggantikan Van Heutz. Seperti pembunuhan di Kuta Reh (14 Juni 1904) dimana 2. 922 orang dibunuhnya, yg terdiri dari 1. 773 laki-laki & 1. 149 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyak Dhien istri Teuku Umar yg masih melakukan perlawanan secara gerilya, dimana akhirnya Cut Nya Dien dapat ditangkap & diasingkan ke Sumedang.

Surat Perjanjian Tanda Menyerah Pemimpin Aceh

Selama perang Aceh, Van Heutz telah menciptakan surat pendek (*korte verklaring*, Traktat Pendek) tentang penyerahan yg harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yg telah tertangkap & menyerah. Di mana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan, Raja (Sultan) mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda, Raja berjanji tak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yg ditetapkan Belanda.

Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yg rumit & panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi

perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh sekelompok orang (masyarakat). Hal ini berlanjut sampai Belanda enyah dari Nusantara & diganti kedatangan penjajah baru yakni Jepang.

Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Inggris

Perlawanan Kraton Yogyakarta terhadap Penjajahan Bangsa Inggris

Pada saat Inggris berkuasa menggantikan Belanda di Jawa, yang mengisi kekuasaan di pusat adalah Raffles, sedangkan Karesidenan Yogyakarta adalah John Crawfurd. Saat itu, Karesidenan Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwana II atau Sultan Sepuh. Sultan HB II terkenal keras dan sangat menentang pemerintah kolonial sehingga membuat orang Eropa (Inggris) terganggu. Sikap kerasnya tersebut terlihat ketika Raffles untu pertama kali datang ke Yogyakarta pada bulan Desember 1811. Saat itu, Sultan HB II berani bertengkar dengan Raffles. Selanjutnya, juga terjadi pada awal Januari 1812. Dalam pertemuan ini ada insiden kecil yang terjadi ketika tempat duduk Raffles di Keraton Yogyakarta dibuat lebih rendah dari Sultan HB II. Insiden ini pun berhasil diatasi.



Sultan HB II tidak puas dengan hasil pertemuannya dengan Raffles. Sultan HB II semakin kecewa dengan pemerintah Inggris. Secara diam-diam, Sunan Pakubuwana IV (Sultan PB IV) mengutus Tumenggung Ronowijoyo untuk menghadap Sultan HB II dengan membawa surat. Dalam surat itu, Sunan PB IV mengusulkan kerja sama untuk melawan Inggris dan bila berhasil akan membagi 2 wilayah yang telah dirampas oleh orang Eropa. Sultan HB II menyetujui hal itu dan mengirimkan Tumenggung Sumodiningrat. Kesepakatan tercapai pada awal Mei 1812 di Klaten antara Ronowijoyo dan Sumodiningrat.

Tanpa sepengetahuan Sultan HB II, Sunan PB IV mengutus Patih Cokronegoro untuk menemui putra mahkota Yogyakarta. Cokronegoro menyampaikan bahwa Sunan PB IV menghendaki putra mahkota Surojo naik tahta dan bersedia membantunya. Sunan PB IV menawarkan untuk kerja sama melawan Inggris dan ketika Inggris berhasil diusir dari Jawa, wilayah Jawa akan dibagi 2 antara Surakarta dan Yogyakarta. Rencana ini pun tercium oleh John Crawford yang segera mengirimkan berita itu pada Raffles. Setelah mendengar berita tersebut, Raffles memerintahkan Mayor Jenderal Gillespie untuk berangkat ke Yogyakarta dan menyerbu Keraton Yogyakarta.

Pada tanggal 19-20 Juni 1812, Inggris menyerbu Keraton Yogyakarta. Dalam pertempuran 2 hari, Inggris berkekuatan 1000 serdadu berseragam merah. Jumlah itu masih ditambah 500 prajurit Leguin Pangeran Prangwedono dari Mangkunegaran, Surakarta. Sultan HB II yang menghadapi Inggris tidak mendapat bantuan dari Surakarta seperti yang tertulis dalam surat rahasia bahwa Surakarta akan membantu Yogyakarta dalam melakukan perlawanan terhadap Inggris. Perang ini diakhiri dengan menyerahnya Sultan HB II dan dimulainya penjarahan besar-besaran harta, pusaka, dan pustaka Keraton Yogyakarta. Setelah itu, Raffles memerintahkan penangkapan Sultan HB II. Sultan HB II dibawa ke Batavia dan menunggu pengadilan disana. Sultan HB II dijatuhi hukuman pembuangan ke Pulau Penang pada awal Juli 1812. PB IV pun dirampas sebagian wilayahnya.

Perlawanan Rakyat Palembang terhadap Penjajahan Bangsa Inggris

Raffles mengirim 3 orang utusan yang dipimpin oleh Richard Philips ke Palembang untuk mengambil alih kantor sekaligus benteng Belanda di Palembang dan meminta hak kuasa sultan atas tambang timah di Pulau Bangka. Sultan Mahmud Badaruddin II menolak permintaan itu dengan merujuk pada surat Raffles sebelumnya bahwa kalau Belanda berhasil diusir, Palembang akan menjadi kesultanan yang merdeka. Raffles pun kaget luar biasa setelah mengetahui bahwa dengan cerdas Sultan Mahmud Badaruddin II menjadikan isi suratnya dahulu sebagai legitimasi untuk melepaskan diri dari kekuasaan Inggris.

Raffles pun memilih untuk mengkhianati janjinya tersebut. Ia mengirim ekspedisi perang di tahun 1812 yang dipimpin Mayor Jenderal Robert Gillespie.

Ekspedisi pun sampai dalam waktu 1 bulan di Sungai Musi. Sultan Mahmud Badaruddin II juga sudah bersiap-siap menghadapi gempuran tersebut (Aidil, Muhammad : 2016).

Kesultanan Palembang akhirnya jatuh ke tangan Inggris hanya dalam waktu 1 minggu karena pertahanan di Pulau Borang sudah jebol tanpa perlawanan yang berarti. Ternyata adik sultan yang bernama Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin telah menjadi komandan yang pengecut bagi pasukannya di pulau yang strategis itu. Mengetahui hal itu, Sultan Mahmud Badaruddin II segera meninggalkan keraton Palembang dengan membawa seluruh tanda kebesaran kesultanan lalu mempersiapkan perlawanan gerilya terhadap Inggris.



Tanggal 26 April 1812, bendera Inggris sudah berkibar di atas benteng Palembang. Dan tanggal 14 Mei 1812, Najamuddin diangkat oleh Robert Gillespie atas nama Inggris untuk menggantikan kakanya sebagai Sultan Palembang. Tambang timah di Pulau Bangka dan Belitung akhirnya diserahkan oleh sultan boneka ini kepada Inggris. Robert Gillespie ditarik pulang ke Batavia karena keberhasilannya dan digantikan oleh Kapten R. Mearers menjadi Residen Palembang. Pertengahan Agustus 1812, Mearers memimpin pasukannya untuk menyerang Sultan Mahmud Badaruddin II di Buaya Langu, hulu Sungai Musi. Mearers mengalami luka parah dalam pertempuran ini yang akhirnya meninggal di rumah sakit di Muntok.

Mearers digantikan oleh Mayor William Robinson. Tampaknya ia tidak cocok dengan Sultan Najamuddin yang dinilai menjadi sultan yang lemah dan tidak dihargai oleh rakyat. Robinson tidak setuju dengan keputusan Raffles yang mengangkat sultan

tersebut, dan juga ia tidak suka dengan kebiasaan Raffles yang suka mengumbar janji, juga pembiaran yang dilakukan Raffles pada peristiwa pembantaian paukan Belanda. Atas inisiatifnya sendiri, Robinson mengirim seorang perwira didampingi penerjemah untuk bernegosiasi dengan Sultan Mahmud Badaruddin II, namun gagal.

Pada tanggal 19 Juni 1813, Robinson datang sendiri untuk menemui Sultan Mahmud Badaruddin II di Muara Rawas. Misi yang dilaksanakan Robinson pun berhasil. Sultan Mahmud Badaruddin II mau kembali ke Palembang untuk menggantikan adiknya. Akhirnya, tanggal 13 Juli 1813, Sultan Mahmud Badaruddin II kembali ke istananya (keraton besar) di Palembang, sementara adiknya bertempat tinggal di keraton lama.

Raffles sangat tersinggung dengan keputusan Robinson karena tidak meminta pendapatnya dulu. Akhirnya, perjanjian Robinson dengan Sultan Mahmud Badaruddin II dibatalkan sepihak. Robinson pun dipecat dan ditangkap dengan alasan menerima suap dari Sultan Mahmud Badaruddin II. Tanggal 4 Agustus 1813, armada Inggris dipimpin Mayor W. Colebrooke tiba di Palembang untuk menurunkan Sultan Mahmud Badaruddin II dari tahtanya kembali untuk digantikan oleh Sultan Najamuddin. Uang yang dikatakan uang suap untuk Robinson dikembalikan pihak Inggris ke Sultan Mahmud Badaruddin II lengkap dengan bunganya. Dan tanggal 21 Agustus 1813, Sultan Najamuddin kembali menduduki tahtanya di keraton besar.

D. Rangkuman

1. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh beberapa kerajaan local. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Selain itu ada pula Perlawanan kesultanan Demak terjadi karena kesultanan-kesultanan islam yang lain juga terancam terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Di bagian timur, perlawanan Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun. Pada tahun 1565 Portugis semakin terdesak dan siasat perundingan pun mulai dijalankan oleh Portugis.
2. Perlawanan terhadap penjajahan Spanyol terjadi tahun 1644 sampai 1683. Perang disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap usaha monopoli perdagangan beras yang dilakukan Spanyol dan kesengsaraan rakyat akibat ketamakan orang-orang Spanyol. Perang Spanyol dengan Minahasa dilakukan

anak suku Tombatu (toundanow/Tansawang) di daerah Kali dan Batu Lesung atau sekitar danau Bulilin di bawah pimpinan Panglima Monde suami dari Ratu Oki sedangkan pihak Spanyol dibantu oleh Raja Loloda Mokoagouw II.

3. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda dilatarbelakangi monopoli perdagangan, kerja paksa, penarikan pajak, sewa tanah, dan tanam paksa menimbulkan banyak kerugian dan membuat sengsara rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak tahan lagi. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan memperjuangkan martabat dan kemerdekaannya. Dari seluruh penjuru tanah air timbul perlawanan terhadap penjajah Belanda, antara lain di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan sebagainya.
4. Perlawanan terhadap Inggris dilakukan di beberapa wilayah. Di Yogyakarta, Sultan HB II berani bertengkar dengan Raffles. Selanjutnya, juga terjadi pada awal Januari 1812. Dalam pertemuan ini ada insiden kecil yang terjadi ketika tempat duduk Raffles di Keraton Yogyakarta dibuat lebih rendah dari Sultan HB II. Insiden ini pun berhasil diatasi. Di Palembang, Raffles mengirim 3 orang utusan yang dipimpin oleh Richard Philips ke Palembang untuk mengambil alih kantor sekaligus benteng Belanda di Palembang dan meminta hak kuasa sultan atas tambang timah di Pulau Bangka. Sultan Mahmud Badaruddin II menolak permintaan itu dengan merujuk pada surat Raffles sebelumnya bahwa kalau Belanda berhasil diusir, Palembang akan menjadi kesultanan yang merdeka. Raffles pun kaget luar biasa setelah mengetahui bahwa dengan cerdas Sultan Mahmud Badaruddin II menjadikan isi suratnya dahulu sebagai legitimasi untuk melepaskan diri dari kekuasaan Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, Muhammad. 2016. Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Bangsa Barat. http://muhammadaidil0703.blogspot.co.id/2016_09_01_archive.html (diunduh tanggal 21 April 2018)
- Indsejarah.net. 2015. *Sejarah Penjajahan Belanda di Indonesia*. www.idsejarah.net/2016/10/sejarah-penjajahan-belanda-di-indonesia.html (diunduh 11 april 2018)
- Insulinda. 2015. *Penjajahan Bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia*. <https://insulinda.wordpress.com/2015/09/08/penjajahan-bangsa-portugis-dan-spanyol-di-indonesia/> (diunduh 11 april 2018)
- Kemendikbud. 2016. *Guru Pembelajar, Modul Pelatihan Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA/SMK*. Jakarta: Kemendikbud
- Kartodirjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nurhadi, dkk. 2009. *Jelajah Cakrawala Sosial*. Bandung : CV. Citra Praya
- Poesponegoro, Djoned Marwati, dan Notosusanto, Nugroho. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sardiman AM, Amurwani Dwi Lestariningsih. 2017. *Buku Guru Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI*. Jakarta. Kemendikbud.
- Sahid, Syahmi. 2016. Serangan Kerajaan Aceh terhadap Portugis. <http://ipsgampang.blogspot.co.id/2016/11/serangan-kerajaan-aceh-terhadap-portugis.html> (diunduh tanggal 20 April 2018)
- Setyawan, Doni. 2016. Perlawanan Rakyat terhadap Portugis. <http://www.donisetyawan.com/perlawanan-rakyat-terhadap-portugis/> (diunduh 20 April 2018)
- Setiawan, Iwan. 2017. *Masuknya Bangsa Eropa ke Indonesia*. <https://kangone.blogspot.co.id/2017/08/materi-5a-masuknya-bangsa-eropa-ke.html> (diunduh 11 April 2018)
- Vlekke, H.M. Bernard. 2010. *Nusantara Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia,
- Wiharyanto, A Kardiyat. TT. *Perlawanan Indonesia terhadap Belanda*. <https://www.google.com/search?ei=0YfTWpXhEYTrvASR6YqgAQ&q=perlawanan+bangsa+indonesia+pada+kolonialisme+bangsa+barat> (diunduh 12 April 2018)

DAMPAK KOLONIALISME DAN PERGERAKAN NASIONAL DALAM KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA

Jayusman

A. Dampak Kolonialisme di Bidang Sosial Budaya

Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di Bidang Sosial

Dalam bidang sosial, praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, membawa dampak antara lain sebagai berikut.

- a. Terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu sebagai berikut.
 - 1) golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan Timur Jauh
 - 2) golongan eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya
 - 3) golongan pribumi
- b. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa.
- c. Muncul golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis.
- d. Munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Hal ini mendorong lahirnya elit terdidik (priyai cendikiawan) di perkotaan. Walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi sangat berperan dalam perkembangan pergerakan selanjutnya.
- e. Pembentukan status sosial dimana yang tertinggi adalah Eropa lalu Asia dan Timur yang terakhir kaum Pribumi.
- f. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda.

- g. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan dilaut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah Barat atau Timur Asing sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan.



Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di Bidang Budaya

Perubahan pola hidup masyarakat Indonesia juga terpengaruh dengan adanya budaya dan pola budaya hidup orang Barat di tengah-tengah budaya tradisional. Selain itu, praktik kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, terutama bangsa Belanda menyebabkan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

- a. Merosotnya pengaruh dan peran politik penguasa pribumi, menyebabkan mereka mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Contohnya Paku Buwono V memerintahkan disusunnya serat Centhini, yaitu tentang pengetahuan mistik Jawa. Kemudian pujangga Kraton Surakarta, Raden Ngabehi Ronggowasito menulis karya-karya berbentuk prosa. Karyanya yang cukup terkenal berjudul Pustakaraja Purwa (buku tentang raja-raja pada zaman kuno). Selain itu, Mangkunegara IV menulis kitab Wedatama. Paku Alam dan Hamengkubuwono V mendorong dan melindungi Budaya di istana kerajaan.
- b. Melemahnya ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi sebagai akibat penyederhanaan upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan.
- c. Runtuhnya kewibawaan tradisional penguasa pribumi akibat tindakan pemerintah Belanda yang menghapus kedudukan mereka secara adat dan menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah.



Perubahan dalam Bidang Budaya akibat kolonialisme di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi.
- b. Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.
- c. Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito menyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.
- d. Budaya Barat berkembang secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai contohnya, kebiasaan minum minuman keras yang dilakukan oleh golongan bangsawan. Kebiasaan tersebut bukan milik asli bangsa Indonesia, tetapi kebiasaan yang berlaku di kalangan bangsa Barat yang dibawa oleh para penjajah (Westernisasi menyebar lewat jalur pendidikan dan pemerintahan).
- e. Birokrat menggunakan bahasa belanda sebagai simbol status mereka.
- f. Masuknya agama katholik dan protestan

B. Dampak kolonialisme di bidang politik, ekonomi, dan pendidikan

Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di Bidang Politik

Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh, upeti atau hasil bumi; semakin berkurang dan bahkan hilang, sebab kedudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda.

Dalam bidang politik dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan Politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda (Aluna : 2016). Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

- a. Penerapan sistem *indirect rule* (sistem pemerintahan tidak langsung) yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional, seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC.
- b. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda.
- c. Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya.
- d. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Mereka menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang diber gaji. Padahal menurut adat penguasa tradisional tersebut mendapat upeti dari rakyat.
- e. Semakin merosotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing. Bahkan sebagian diambil alih atau di bawah kekuasaan kolonial.



Dampak Kolonialisme di bidang politik adalah sebagai berikut :

- a. *Daendels* atau *Raffle* sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian.
- b. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perpektuf.
- c. Dahulu hukum yang digunakan yaitu hukum adat dan kemudian diubah menjadi hukum barat modern.
- d. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Yang mengakibatkan peranan elite kerajaan berkurang dalam politik, dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh.
- e. Pamong praja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian.
- f. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perpektuf.
- g. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern.
- h. Kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda

Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di Bidang Ekonomi

Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat di Indonesia membawa dampak, diantaranya sebagai berikut.

- a. Monopoli dan penguasaan suatu daerah (koloni) oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan.
- b. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan
- c. Praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di nusantara dari kancah perdagangan internasional
- d. Dalam mengeksploitasi tanah jajahan VOC memanfaatkan para penguasa tradisional (menerapkan sistem indirect rule) dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan (pajak hasil bumi)
- e. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru
- f. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer
- g. Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda.
- h. Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk memulai mengenal pinjaman modal. Namun, mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian.



Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di Bidang Pendidikan

Usaha – usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan tidak lain adalah untuk keuntungan pemerintahan Belanda, yaitu menghasilkan pegawai administrasi Belanda yg murah, terampil, dan terdidik. Selain itu Pemerintah Belanda menyusun kurikulum pendidikannya sendiri, akibatnya perkembangan pendidikan dan pengajaran di Indonesia sampai abad ke – 19 menunjukkan kecenderungan Politik dan Kebudayaan. Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan, masyarakat yang mempunyai jabatan lah yang dapat merasakan pendidikan, seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan yang lainnya.



Para Pahlawan kita lah yang mengajarkan pendidikan kepada rakyat - rakyat jelata, dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tidak lagi dibodoh – bodohi oleh para kolonial Belanda.

Dampak penjajahan bangsa Barat di bidang pendidikan, antara lain :

- a. Munculnya golongan - golongan terpelajar di Indonesia.
- b. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga – tenaga kerja di perusahaan Belanda.
- c. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar.

C. Pergerakan nasional: latar belakang kelahirannya, organisasi dan tokoh-tokohnya serta perjuangannya

Latar Belakang Lahirnya Pergerakan Nasional di Indonesia

Sebelum tahun 1900 bangsa Indonesia telah memberikan reaksi dan perlawanan terhadap penjajah Belanda, tetapi perlawanan tersebut masih bersifat lokal atau kedaerahan. Beberapa sifat perlawanan sebelum tahun 1900 atau sebelum pergerakan nasional muncul dan berkembang:

- a. Perlawanan bersifat kedaerahan atau lokal.
- b. Perlawanan bersifat negatif, perlawanan belum terjangkau oleh kekuasaan penjajah dan masih mencari perlindungan dengan ilmu gaib.
- c. Perlawanan bersifat irasional, maksudnya masih mengandalkan kekuatan seorang pemimpin yang karismatik (mempunyai kesaktian).



- d. Perlawanan bersifat follow-up, artinya tidak ada tindak lanjut apabila seorang pemimpin berhasil ditawan.

Kemudian setelah tahun 1900 perlawanan berubah menjadi bersifat perlawanan nasional yang terorganisir secara lebih teratur dan rasional. Pergerakan Nasional modern mulai berkembang dengan munculnya beberapa organisasi salah satunya Organisasi Budi Utomo. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang lahirnya pergerakan nasional di Indonesia, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal

- a. **Penderitaan rakyat akibat adanya penjajahan.** Penderitaan yang dialami rakyat Indonesia kemudian memunculkan rasa senasib dan sepenanggungan karena sama-sama merasa dijajah oleh Belanda. Rasa inilah yang selanjutnya

memunculkan semangat untuk bersatu mengumpulkan kekuatan untuk mengusir segala penjajahan yang pernah ada di Nusantara (Indonesia).

- b. **Perkembangan komunikasi antar pulau.** Perkembangan komunikasi menyebabkan semakin mudah dan makin seringnya orang Indonesia untuk berkomunikasi serta bertemu antara orang-orang di berbagai pulau. Pada perkembangan selanjutnya, Pers sebagai media komunikasi sangat memegang penting dalam menyadarkan rakyat dalam proses perjuangan dan menyebarkan cita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia dengan cepat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. **Perkembangan bahasa Indonesia.** Setelah pembatasan penggunaan bahasa Belanda di kalangan pribumi, menyebabkan bahasa melayu berkembang sampai menjadi bahasa Indonesia. Bahasa ini kemudian digunakan untuk tali pengikat kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki begitu banyak bahasa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maka keberagaman bahasa tidak menghambat jalannya Indonesia menuju kemerdekaan.
- d. **Terinspirasi dengan kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.** Kedua kerajaan ini merupakan kerajaan yang memiliki pengaruh dan daerah kekuasaan sangat luas di Indonesia. Pengetahuan tentang sejarah dua kerajaan ini diperoleh dari beberapa sarjana barat. Masa keemasan kerajaan Sriwijaya berlangsung pada abad ke 9 sampai 10, ditandai dengan berhasilnya menguasai seluruh kerajaan di Asia Tenggara seperti di Jawa, Sumatera, Filipina, Thailand, Semenanjung Malaya, Vietnam dan Kamboja. Hal tersebut membuat Sriwijaya menguasai jalur perdagangan Maritim di kawasan ini. Sementara itu, Kerajaan Majapahit berhasil mencapai puncak kejayaan pada saat Hayam Wuruk raja, tepatnya pada tahun 1345 sampai 1389. Kejayaan Majapahit ditandai dengan berhasilnya menguasai daerah seperti Borneo, Sumatera, Bali, Filipina dan Semenanjung Malaya.
- e. **Perkembangan pendidikan di Indonesia.** Pendidikan yang berlangsung pada masa Hindia Belanda kemudian menghasilkan beberapa tokoh kaum intelektual. Berkat pendidikan ini, para kaum intelektual Indonesia kemudian menyadari bahwa Indonesia dibodohi dan dijajah oleh Belanda. Dari kesadaran tersebut kemudian muncul semangat untuk merdeka. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin pergerakan nasional di Indonesia.

- f. **Perkembangan sekolah kebangsaan.** Seperti yang kita ketahui, pendidikan pada masa Hindia Belanda hanya untuk kaum menengah keatas. Hal ini kemudian membuat para kaum intelek berinisiatif membuat sekolah bagi masyarakat menengah ke bawah. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama sekolah kebangsaan. Dari sekolah ini kemudian muncul beberapa tokoh yang anti barat dan mendukung perjuangan pergerakan nasional Indonesia.

Faktor Eksternal

- a. **Masuknya ide-ide Barat lewat Pendidikan.** Masuknya ide-ide ini melalui pendidikan modern yang menggantikan pendidikan tradisional (wihara-wihara, pesantren dan pondok).
- b. **Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905.** Kemenangan ini membuat semangat juang kaum intelek Indonesia yang kemudian menjadi pelopor lahirnya pergerakan nasional di Indonesia untuk melawan penjajah.
- c. **Perjuangan Bangsa lain.** Perjuangan bangsa-bangsa di luar Indonesia seperti di Turki, India dan Irlandia untuk menentang penjajah membuat pergerakan nasional mulai disadari dan harus dilakukan.
- d. **Berkembangnya Liberalisme, Demokrasi dan Nasionalisme.** Berkembangnya faham baru ini di Indonesia kemudian membuat pola pikir masyarakat untuk melawan penjajahan demi suatu kebebasan dan kemerdekaan.
- e. **Perkembangan Gerakan Nasional negara tetangga.** Gerakan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India ini menjadi inspirasi para penggagas pergerakan nasional untuk melawan penjajah.

Organisasi Pergerakan Nasional

Sejak menginjakkan kakinya di bumi Indonesia pada tahun 1956, penjajah Belanda kurang memperhatikan kesejahteraan golongan pribumi (orang-orang Indonesia). Mereka terus mengeruk kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia, tanpa mau memperhatikan nasib rakyat itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, C.Th.van Deventer mengkritik keadaan itu melalui salah satu karangannya yang berjudul Utang Budi. C.Th van Deventer antara lain menyatakan bahwa kemakmuran Belanda diperoleh berkat kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Belanda sebagai bangsa

yang maju dan bermoral harus membayar utang budi kepada bangsa Indonesia. Caranya adalah dengan menjalankan Politik Balas Budi atau dikenal dengan sebutan Politik Etis. Politik Etis yang diusulkan oleh C.Th van Deventer berisi tentang perbaikan-perbaikan dalam bidang irigasi (pengairan), transmigrasi (perpindahan), dan edukasi (pendidikan). Akan tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Politik Etis sebenarnya merupakan bentuk penjajahan kebudayaan yang halus sekali. Program edukasi itu sendiri sebenarnya merupakan pelaksanaan dari Politik Asosiasi yang berarti penggantian kebudayaan asli tanah jajahan dengan kebudayaan penjajah.

Walaupun menyimpang dari tujuan semula, beberapa pelaksanaan dari Politik Etis telah membawa pengaruh yang baik. Misalnya, dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk golongan pribumi. Tujuannya adalah untuk memperoleh tenaga baru pegawai rendah yang bersedia digaji lebih murah dari pada tenaga bangsa-bangsa Belanda. Banyaknya penduduk pribumi yang bersekolah telah menghasilkan kaum cerdik pandai dikalangan penduduk pribumi. Kaum cerdik pandai inilah yang memelopori kesadaran kebangsaan, yaitu suatu kesadaran tentang perlunya persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa timbulnya kesadaran berbangsa disebut Kebangkitan Nasional Indonesia. Kaum cerdik pandai ini pula yang memelopori dan memimpin pergerakan nasional pada awal abad ke-20.

a. Budi Utomo

Organisasi Budi Utomo (BU) didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk Studiefonds.



Gagasan *Studiesfound* bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi, namun tidak mampu melanjutkan studinya. Gagasan itu tidak terwujud, tetapi gagasan itu melahirkan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) memajukan pengajaran;
- 2) memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan;
- 3) memajukan teknik dan industri
- 4) menghidupkan kembali kebudayaan.



Dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik melainkan merupakan organisasi pelajar dengan pelajar STOVIA sebagai intinya. Sampai menjelang kongresnya yang pertama di Yogyakarta telah berdiri tujuh cabang Budi Utomo, yakni di Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo.

Untuk mengonsolidasi diri (dengan dihadiri 7 cabangnya), Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Kongres memutuskan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Budi Utomo tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik.
- 2) Kegiatan Budi Utomo terutama ditujukan pada bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Ruang gerak Budi Utomo terbatas pada daerah Jawa dan Madura.
- 4) Memilih R.T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar sebagai ketua.
- 5) Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat organisasi.

Sampai dengan akhir tahun 1909, telah berdiri 40 cabang Budi Utomo dengan jumlah anggota mencapai 10.000 orang. Akan tetapi, dengan adanya kongres tersebut tampaknya terjadi pergeseran pimpinan dari generasi muda ke generasi tua. Banyak anggota muda yang menyingkir dari barisan depan, dan anggota Budi Utomo kebanyakan dari golongan priayi dan pegawai negeri. Dengan demikian, sifat protonasionalisme dari para pemimpin yang tampak pada awal berdirinya Budi Utomo terdesak ke belakang. Strategi perjuangan BU pada dasarnya bersifat kooperatif.

Mulai tahun 1912 dengan tampilnya Notodirjo sebagai ketua menggantikan R.T. Notokusumo, Budi Utomo ingin mengejar ketinggalannya. Akan tetapi, hasilnya tidak begitu besar karena pada saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya, seperti Sarekat Islam (SI) dan Indische Partij (IP).

Namun demikian, Budi Utomo tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yakni telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Itulah sebabnya tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tahun hingga sekarang.

b. Sarekat Islam (SI)

Tiga tahun setelah berdirinya Budi Utomo, yakni tahun 1911 berdirilah Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo oleh H. Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan Solo. Organisasi Sarekat Dagang Islam berdasar pada dua hal berikut ini: (1) Agama Islam; (2) Ekonomi, yakni untuk memperkuat diri dari pedagang Cina yang berperan sebagai leveransir (seperti kain putih, malam, dan sebagainya).



Atas prakarsa H.O.S. Cokroaminoto, nama Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI), dengan tujuan untuk memperluas anggota sehingga tidak hanya terbatas pada pedagang saja.

Berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912, ditetapkan tujuan Sarekat Islam sebagai berikut:

- 1) memajukan perdagangan;
- 2) membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha (permodalan);
- 3) memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli;
- 4) memajukan kehidupan agama Islam.

Melihat tujuannya tidak tampak adanya kegiatan politik. Akan tetapi, Sarekat Islam dengan gigih selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintah kolonial. Dengan demikian, di samping tujuan ekonomi juga ditekankan adanya saling membantu di antara anggota. Itulah sebabnya dalam waktu singkat, Sarekat Islam berkembang menjadi anggota massa yang pertama di Indonesia. Sarekat Islam merupakan gerakan nasionalis, demokratis dan ekonomis, serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif.



Mengingat perkembangan Sarekat Islam yang begitu pesat maka timbullah kekhawatiran dari pihak Gubernur Jenderal Indenberg sehingga permohonan Sarekat Islam sebagai organisasi nasional yang berbadan hukum ditolak dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. Pada tahun 1914 telah berdiri 56 Sarekat Islam lokal yang diakui sebagai badan hukum.

Pada tahun 1915 berdirilah Central Sarekat Islam (CSI) yang berkedudukan di Surabaya. Tugasnya ialah membantu menuju kemajuan dan kerjasama antar Sarekat Islam lokal. Pada tanggal 17–24 Juni 1916 diadakan Kongres SI Nasional Pertama di Bandung yang dihadiri oleh 80 Sarekat Islam lokal dengan anggota 360.000 orang anggota. Dalam kongres tersebut telah disepakati istilah "nasional", dimaksudkan bahwa Sarekat Islam menghendaki persatuan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi satu bangsa.

Sifat Sarekat Islam yang demokratis dan berani serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) pimpinan Sneevliet (Belanda), Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin (Indonesia). Itulah sebabnya dalam perkembangannya Sarekat Islam pecah menjadi dua kelompok berikut ini.

- 1) Kelompok nasionalis religius (nasionalis keagamaan) yang dikenal dengan Sarekat Islam Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto.
- 2) Kelompok ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama Sarekat Islam Merah dengan haluan sosialis kiri di bawah pimpinan Semaun dan Darsono.

c. Indische Partij (IP)

Indische Partij (IP) didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara (Setyawan, Doni: 2015).



Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan membutuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Cita-cita Indische Partij banyak disebar-luaskan melalui surat kabar De Expres. Di samping itu juga disusun program kerja sebagai berikut:

- 1) meresapkan cita-cita nasional Hindia (Indonesia).
- 2) memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan, maupun kemasyarakatan.
- 3) memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
- 4) memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan.
- 5) berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.
- 6) dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.

Melihat tujuan dan cara-cara mencapai tujuan seperti tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Indische Partij berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indische Partij merupakan partai politik pertama di Indonesia dengan haluan kooperasi. Dalam

waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang yang kebanyakan orang Indo.

Oleh karena sifatnya yang progresif menyatakan diri sebagai partai politik dengan tujuan yang tegas, yakni Indonesia merdeka sehingga pemerintah menolak untuk memberikan badan hukum dengan alasan Indische Partij bersifat politik dan hendak mengancam ketertiban umum. Walaupun demikian, para pemimpin Indische Partij masih terus mengadakan propaganda untuk menyebarkan gagasan-gagasannya.

Satu hal yang sangat menusuk perasaan pemerintah Hindia Belanda adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul *Als ik een Nederlander was* (seandainya saya seorang Belanda) yang isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Oleh karena kegiatannya sangat mencemaskan pemerintah Belanda maka pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin Indische Partij dijatuhi hukuman pengasingan dan mereka memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya.

Dengan diasingkannya ketiga pemimpin Indische Partij maka kegiatan Indische Partij makin menurun. Selanjutnya, Indische Partij berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP). National Indische Partij tidak pernah mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.

d. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya nonpolitik. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin.



Tujuan Muhammadiyah ialah sebagai berikut. (1) memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam; (2) mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- 1) mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam (dari TK sampai dengan perguruan tinggi);
- 2) mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, dan masjid;
- 3) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama Islam secara modern dan memperteguh keyakinan tentang agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Kegiatan Muhammadiyah juga telah memperhatikan pendidikan wanita yang dinamakan Aisyiah, sedangkan untuk kepanduan disebut Hizbut Wathon (HW).

Sejak berdiri di Yogyakarta (1912) Muhammadiyah terus mengalami perkembangan yang pesat. Sampai tahun 1913, Muhammadiyah telah memiliki 267 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Pada tahun 1935, Muhammadiyah sudah mempunyai 710 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

e. Gerakan Pemuda

Gerakan pemuda Indonesia, sebenarnya telah dimulai sejak berdirinya Budi Utomo, namun sejak kongresnya yang pertama perannya telah diambil oleh golongan tua (kaum priayi dan pegawai negeri) sehingga para pemuda kecewa dan keluar dari organisasi tersebut. Baru beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1915 di Batavia berdiri Trikoro Dharmo oleh R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, dan Sunardi.



Trikoro Dharmo yang diketui oleh R. Satiman Wiryosanjoyo merupakan organisasi pemuda yang pertama yang anggotanya terdiri atas para siswa sekolah menengah berasal dari Jawa dan Madura. Trikoro Dharmo, artinya tiga tujuan mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan perkumpulan ini adalah sebagai berikut:

- 1) mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi bumi putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan;
- 2) menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya;
- 3) membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.

Tujuan tersebut sebenarnya baru merupakan tujuan perantara. Adapun tujuan yang sebenarnya adalah seperti apa yang termuat dalam majalah Trikoro Dharmo yakni mencapai Jawa raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Oleh karena sifatnya yang masih Jawa sentris maka para pemuda di luar Jawa (tidak berbudaya Jawa) kurang senang.

Untuk menghindari perpecahan, pada kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 namanya diubah menjadi Jong Java (Pemuda Jawa). Sesuai dengan anggaran dasarnya, Jong Java ini bertujuan untuk mendidik para anggotanya supaya kelak dapat menyumbangkan tenaganya untuk membangun Jawa raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan rasa cinta pada budaya sendiri.

Sejalan dengan munculnya Jong Java, pemuda-pemuda di daerah lain juga membentuk organisasi-organisasi, seperti Jong Sumatra Bond, Pasundan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Timorees Verbond, dan lain-lain. Pada dasarnya semua organisasi itu masih bersifat kedaerahan, tetapi semuanya mempunyai cita-cita ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memajukan budaya dan daerah masing-masing.

f. Taman Siswa

Sekembalinya dari tanah pengasingannya di Negeri Belanda (1919), Suwardi Suryaningrat menfokuskan perjuangannya dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara) berhasil mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Dengan berdirinya Taman Siswa, Suwardi Suryaningrat memulai gerakan baru bukan lagi dalam bidang politik melainkan bidang pendidikan, yakni mendidik angkatan muda dengan jiwa kebangsaan Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa.



Sekolah Taman Siswa dijadikan sarana untuk menyampaikan ideologi nasionalisme kebudayaan, perkembangan politik, dan juga digunakan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang.

Dalam hal ini, sekolah merupakan wahana untuk meningkatkan derajat bangsa melalui pengajaran itu sendiri. Selain pengajaran bahasa (baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia), pendidikan Taman Siswa juga memberikan pelajaran sejarah, seni, sastra (terutama sastra Jawa dan wayang), agama, pendidikan jasmani, dan keterampilan (pekerjaan tangan) merupakan kegiatan utama perguruan Taman Siswa.

Pendidikan Taman Siswa dilakukan dengan sistem "among" dengan pola belajar "asah, asih dan asuh". Dalam hal ini diwajibkan bagi para guru untuk bersikap dan berlaku "sebagai pemimpin" yakni di depan memberi contoh, di tengah dapat memberikan motivasi, dan di belakang dapat memberikan pengawasan yang berpengaruh. Prinsip pengajaran inilah yang kemudian dikenal dengan pola kepemimpinan "Ing ngarsa sung tulodho, ing madya mangukarsa, tut wuri handayani". Pola kepemimpinan ini sampai sekarang masih menjadi ciri kepemimpinan nasional.

Berkat jasa dan perjuangannya yakni mencerdaskan kehidupan menuju Indonesia merdeka maka tanggal 2 Mei (hari kelahiran Ki Hajar Dewantara) ditetapkan sebagai hari Pendidikan Nasional. Di samping itu, "Tut Wuri Handayani" sebagai semboyan terpatris dalam lambang Departemen Pendidikan Nasional.

g. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Benih-benih paham Marxis dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama H.J.F.M. Sneevliet. Atas dasar Marxisme inilah kemudian pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma berhasil mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Ternyata ISDV tidak dapat berkembang sehingga Sneevliet melakukan infiltrasi (penyusupan) kader-kadernya ke dalam tubuh SI dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV.



Dengan cara itu Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI, lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI, seperti Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh Marxisme tulen. Akibatnya SI Cabang Semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV semakin jelas warna Marxisnya dan selanjutnya terjadilah perpecahan dalam tubuh SI.

Pada tanggal 23 Mei 1923 ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia. (PKI). Susunan pengurus PKI, antara lain Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), Bersgma (sekretaris), dan Dekker (bendahara).

PKI semakin aktif dalam percaturan politik dan untuk menarik massa maka dalam propagandanya PKI menghalalkan secara cara. Sampai-sampai tidak segan-segan untuk mempergunakan kepercayaan rakyat kepada ayat-ayat Al - Qur'an dan Hadis bahkan juga Ramalan Jayabaya dan Ratu Adil.

Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri sehingga merencanakan suatu petualangan politik. Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Batavia dan disusul di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Akhirnya, ribuan rakyat ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Tanah Merah dan Digul Atas (Papua).

h. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Algemene Studie Club di Bandung yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1925 telah mendorong para pemimpin lainnya untuk mendirikan partai politik, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin, yakni dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Kebanyakan dari mereka adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda yang baru kembali ke tanah air.



Radikal PNI telah kelihatan sejak awal berdirinya. Hal ini terlihat dari anggaran dasarnya bahwa tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan strategi perjuangannya nonkooperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka PNI berasaskan pada self help, yakni prinsip menolong diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah dengan kekuatan sendiri; nonkooperatif, yakni tidak mengadakan kerja sama dengan pemerintah Belanda; Marhaenisme, yakni mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI telah menetapkan program kerja sebagaimana dijelaskan dalam kongresnya yang pertama di Surabaya pada tahun 1928, seperti berikut.

- 1) Usaha politik, yakni memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerja sama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan politik.

- 2) Usaha ekonomi, yakni memajukan perdagangan pribumi, kerajinan, serta mendirikan bank-bank dan koperasi.
- 3) Usaha sosial, yaitu memajukan pengajaran yang bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum wanita, memerangi pengangguran, memajukan transmigrasi, memajukan kesehatan rakyat, antara lain dengan mendirikan poliklinik.

Untuk menyebarkan gagasannya, PNI melakukan propaganda-propaganda, baik lewat surat kabar, seperti Banteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Batavia, maupun lewat para pemimpin khususnya Ir. Soekarno sendiri. Dalam waktu singkat, PNI telah berkembang pesat sehingga menimbulkan kekawatiran di pihak pemerintah Belanda. Pemerintah kemudian memberikan peringatan kepada pemimpin PNI agar menahan diri dalam ucapan, propaganda, dan tindakannya.

Dengan munculnya isu bahwa PNI pada awal tahun 1930 akan mengadakan pemberontakan maka pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan secara besar-besaran dan menangkap empat pemimpinnya, yaitu Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo dan Supriadinata. Mereka kemudian diajukan ke pengadilan di Bandung.

Dalam sidang pengadilan, Ir. Soekarno mengadakan pembelaan dalam judul Indonesia Menggugat. Atas dasar tindakan melanggar Pasal "karet" 153 bis dan Pasal 169 KUHP, para pemimpin PNI dianggap mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan Belanda sehingga dijatuhi hukuman penjara di Penjara Sukamiskin Bandung. Sementara itu, pimpinan PNI untuk sementara dipegang oleh Mr. Sartono dan dengan pertimbangan demi keselamatan maka pada tahun 1931 oleh pengurus besarnya PNI dibubarkan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra.

Mereka yang pro pembubaran, mendirikan partai baru dengan nama Partai Indonesia (Partindo) di bawah pimpinan Mr. Sartono. Kelompok yang kontra, ingin tetap melestarikan nama PNI dengan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.

i. Gerakan Wanita

Munculnya gerakan wanita di Indonesia, khususnya di Jawa dirintis oleh R.A. Kartini yang kemudian dikenal sebagai pelopor pergerakan wanita Indonesia. R.A. Kartini bercita-cita untuk mengangkat derajat kaum wanita Indonesia melalui pendidikan.



Cita-citanya tersebut tertulis dalam surat-suratnya yang kemudian berhasil dihimpun dalam sebuah buku yang diterjemahkan dalam judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Cita-cita R.A. Kartini ini mempunyai persamaan dengan Raden Dewi Sartika yang berjuang di Bandung.

Semasa Pergerakan Nasional maka muncul gerakan wanita yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Organisasi-organisasi yang ada, antara lain sebagai berikut.

- 1) Putri Mardika di Batavia (1912) dengan tujuan membantu keuangan bagi wanita-wanita yang akan melanjutkan sekolahnya. Tokohnya, antara lain R.A. Saburudin, R.K. Rukmini, dan R.A. Sutinah Joyopranata.
- 2) Kartini founds, yang didirikan oleh suami istri T.Ch. van Deventer (1912) dengan membentuk sekolah-sekolah Kartini bagi kaum wanita, seperti di Semarang, Batavia, Malang, dan Madiun.
- 3) Kerajinan Amal Setia, di Koto Gadang Sumatra Barat oleh Rohana Kudus (1914). Tujuannya meningkatkan derajat kaum wanita dengan cara memberi pelajaran membaca, menulis, berhitung, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan, dan cara pemasarannya.

- 4) Aisyiah, merupakan organisasi wanita Muhammadiyah yang didirikan oleh Ny. Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlan (1917). Tujuannya untuk memajukan pendidikan dan keagamaan kaum wanita.
- 5) Organisasi Kewanitaan lain yang berdiri cukup banyak, misalnya Pawiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Susilo di Pemalang (1918), Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo, Putri Budi Sejati di Surabaya (1919), Wanito Mulyo di Yogyakarta (1920), Wanito Utomo dan Wanito Katolik di Yogyakarta (1921), dan Wanito Taman Siswa (1922).

Organisasi wanita juga muncul di Sulawesi Selatan dengan nama Gorontaloesche Mohammadaanche Vrouwenvereniging. Di Ambon dikenal dengan nama Ina Tani yang lebih condong ke politik. Sejalan dengan berdirinya organisasi wanita, muncul juga surat kabar wanita yang bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan dan pengetahuan kewanitaan. Surat kabar milik organisasi wanita, antara lain Putri Hindia di Bandung, Wanito Sworo di Brebes, Sunting Melayu di Bukittinggi, Esteri Utomo di Semarang, Suara Perempuan di Padang, Perempuan Bergolak di Medan, dan Putri Mardika di Batavia.

Puncak gerakan wanita, yaitu dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres menghasilkan bentuk perhimpunan wanita berskala nasional dan berwawasan kebangsaan, yakni Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Dalam Kongres Wanita II di Batavia pada tanggal 28–31 Desember 1929 PPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Kongres Wanita I merupakan awal dari bangkitnya kesadaran nasional di kalangan wanita Indonesia sehingga tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari Ibu.

D. Sumpah pemuda tonggak persatuan bangsa Indonesia

Latar Belakang Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda adalah salah satu kejadian penting dalam pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Sumpah atau ikrar sejumlah pemuda inilah yang menjadi penyemangat bangsa demi cita-cita berdirinya negara Indonesia. Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah

memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda.

Oleh sebab itulah organisasi-organisasi pemuda ini sepakat untuk melebur menjadi satu dan membuat pergerakan secara serentak untuk melawan penjajah. Dari kesepakatan inilah para pemuda ini sepakat untuk mengadakan kongres pemuda. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang pada saat itu terpecah belah. Kongres pemuda diadakan sebanyak dua kali, yakni Kongres Pemuda 1 yang berlangsung pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926. Sedangkan Kongres Pemuda Kedua diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928.



Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda Kedua yang diadakan selama dua hari lamanya, tepatnya di tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini diadakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) (Linkin, Dias : 2016). Anggota PPPI terdiri dari pelajar-pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Ada sejumlah perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia yang menghadiri kongres ini, yakni Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond dan Jong Ambon. Ada juga pengamat dari perwakilan etnis Tionghoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie.

Kongres yang diadakan di tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta ini bukanlah pertemuan yang pertama yang diadakan oleh para pemuda. Pertemuan pertama justru diadakan pada tahun 1926. Hasil dari pertemuan ini keluar pada tanggal 20 Februari 1927. Di tahun berikutnya, tepatnya di bulan Mei 1928,

pertemuan para pemuda ini kembali diadakan dan dilanjutkan lagi dengan pertemuan di tanggal 12 Agustus 1928 yang dihadiri oleh seluruh barisan organisasi pemuda Indonesia. Dari pertemuan tanggal 12 Agustus 1928 inilah yang memutuskan untuk mengadakan kongres di bulan Oktober 1928. Perihal susunan kepanitiaan diambil dari masing-masing perwakilan organisasi kepemudaan.

Keputusan inilah yang mengobarkan semangat para pejuang tanah air untuk memperjuangkan terbentuknya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Pada perkumpulan-perkumpulan yang membahas kemerdekaan Indonesia berikutnya, Sumpah Pemuda selalu dijadikan asas bersama. Selain itu, Sumpah Pemuda juga selalu disiarkan di semua surat kabar berbahasa Indonesia dan selalu dibacakan sebagai pembuka rapat perkumpulan-perkumpulan.

Kongres Pemuda 1

Kongres Pemuda yang pertama ini diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1928. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatra Bond Jong Ambon, Sekar Rukun Jong Batak dan para Pemuda Theosofie. Kongres pertama ini mengedepankan tema pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka.

Sejumlah tokoh yang menjadi pembicara dalam kongres ini adalah Sumarto, M. Tabrani, Muh. Yamin, Bahder Johan dan Pinontoan. Meski terbentuk kesepakatan untuk menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia, badan untuk mewadahi semua organisasi pemuda saat itu masih gagal terbentuk. Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman serta beda pendapat antara anggota kongres.

Setelah Kongres Pemuda 1 ini, masih diadakan sejumlah pertemuan lainnya untuk membahas mengenai wadah tunggal organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Keputusan penting hasil dari Kongres Pemuda 1 ini adalah:

- 1) Semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi yang bernama Pemuda Indonesia
- 2) Perlu segera diadakannya Kongres Pemuda kedua.

Kongres Pemuda 2

Ada tiga rapat yang dihadiri oleh para pemuda di Kongres Pemuda Kedua ini. Rapat pertama bertempat di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng), hari Sabtu, 27 Oktober 1928. Rapat dibuka oleh Ketua PPPI, Soegondo Djojopoespito.

Dalam sambutannya, Soegondo mengatakan bahwa ia sangat mengharapkan kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan yang ada di dalam hati para pemuda peserta kongres, dan seluruh Indonesia nantinya. Ia melanjutkan dengan menjelaskan lima factor yang bisa membuat persatuan Indonesia menjadi lebih kuat, yakni sejarah, Bahasa, hukum adat, pendidikan dan kemauan yang kuat.

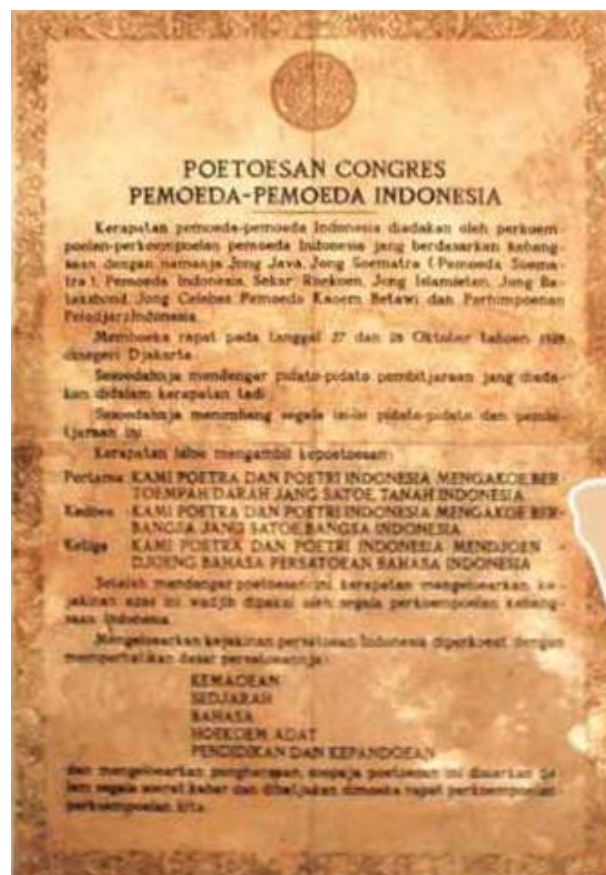
Rapat kedua bertempat di Gedung Oost-Java Bioscoop di tanggal 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini banyak membahas seputar pendidikan. Di hari kedua ini yang jadi pembicara adalah Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro. Kedua pembicara ini memiliki pendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu mereka juga mengetengahkan pentingnya keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah.

Rapat ketiga, sekaligus menutup kongres mengambil tempat di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106. Di sini Sunario yang menjadi pembicara memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi mengiringi gerakan kepanduan. Ramelan yang ikut menjadi pembicara di rapat ketiga ini mengatakan bahwa gerakan kepanduan tidak boleh dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan yang ditanamkan sejak dini pada anak-anak bisa mendidik mereka untuk menjadi disiplin dan mandiri. Kedua hal tersebut sangatlah dibutuhkan dalam perjuangan menuju kemerdekaan.

Isi Sumpah Pemuda

Yang unik adalah istilah Sumpah Pemuda tidak muncul pada hasil kongres di tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 tersebut. Istilah ini justru muncul setelah kongres itu selesai. Ini dia bunyi dari Sumpah Pemuda yang tercatat di prasasti dinding Museum Sumpah Pemuda:

- Pertama : Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe Bertoeumpah darah Jang Satoe, Tanah Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah yang Satu, Tanah Indonesia).
- Kedoea : Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia. (Kami Putran dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia).
- Ketiga : Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia. (Kami Putran dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia)



Ketiga kalimat yang menjadi rumusan Kongres Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Moehammad Yamin di atas secarik kertas yang disodorkan pada Soegdondo saat Sunario sedang berpidato di sesi terakhir kongres. Moehammad Yamin berbisik pada Soegondo bahwa ia mempunyai sebuah formula yang terlihat lebih elegan demi keputusan kongres ini.

Melihat isi dari apa yang dituliskan Moehammad Yamin, Soegondo membubuhkan paraf setuju di secarik kertas tersebut, lalu diteruskan kepada peserta

kongres untuk kemudian ikut membubuhkan paraf setuju. Pada awalnya, sumpah tersebut dibacakan Soegondo dan kemudian dijelaskan secara lebih mendetail oleh Moehammad Yamin.

Lagu Indonesia Raya

Di dalam kongres pemuda kedua yang bersejarah ini, berkumandang sebuah lagu yang diciptakan oleh W. R. Soepratman. Lagu tersebut adalah lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia yang dikumandangkan pada setiap upacara bendera di sekolah serta acara-acara penting lainnya.

Diperdengarkan untuk pertama kalinya di muka publik di tahun 1928, teks lagu Indonesia Raya juga dipublikasikan pada media cetak surat kabar Sin Po lengkap dengan kalimat dalam surat kabar tersebut yang menyatakan bahwa lagu ini adalah lagu kebangsaan. Meski sempat dilarang oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada saat itu, namun para pemuda terus menyanyikan lagu tersebut di setiap ada kesempatan.

E. Rangkuman

1. Dampak Kolonialisme di Indonesia dalam bidang sosial budaya adalah terbentuknya golongan masyarakat. Nasib rakyat Indonesia, khususnya para penguasa sangat buruk. Kedudukan mereka yang sebelumnya menjadi penguasa, berubah menjadi aparatur pemerintah kolonial Belanda. Derajat dan kehormatan mereka sebagai pemuka masyarakat pribumi menurun, kedudukan mereka tidak diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka bukan lagi sebagai penguasa, melainkan pembantu dalam menjalankan pemerintahan kolonial. Sedangkan derajat kehidupan rakyat biasa dinjak injak. Martabat dan hak mereka tidak mendapat pengakuan dan perlindungan. Keseharian mereka diliputi rasa takut, cemas, tidak percaya diri, bodoh dan terhina. Kedudukan sosial bangsa Indonesia dibagi menjadi 3 kelas, yaitu: kelas kesatu diduduki oleh bangsa Barat, kelas kedua oleh Timur Asing, dan kelas ketiga diduduki oleh masyarakat pribumi.
2. Dalam bidang politik dampak kolonialisme adalah antara lain adalah Pemerintahan kolonial ikut campur tangan dalam pemerintahan Kerajaan, kedudukan raja terikat oleh struktur pemerintahan colonial, pemerintahan

dibentuk dengan sistem sentralisasi yang pusatnya di Batavia (sekarang Jakarta). Selain pemerintahan kerajaan, rakyat pribumi pun terkena dampak tersebut. Di bidang ekonomi, ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa, para pengusaha pribumi kedudukannya menjadi aparatur pemerintah kolonial, mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan dan upeti seperti sebelumnya. Pendapatan mereka diganti dengan gaji menurut ketentuan pemerintah kolonial, akibatnya penghasilan mereka menurun drastis dari sebelumnya.

3. Sebelum tahun 1900 bangsa Indonesia telah memberikan reaksi dan perlawanan terhadap penjajah Belanda, tetapi perlawanan tersebut masih bersifat lokal atau kedaerahan. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional (1908 - 1942), dibagi dalam tiga tahap berikut. (1) Masa pembentukan (1908 - 1920) berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij; (2) Masa radikal/nonkooperasi (1920 - 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI); (3) Masa moderat/kooperasi (1930 - 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan Gapi. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan.
4. Sumpah Pemuda adalah salah satu kejadian penting dalam pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Sumpah atau ikrar sejumlah pemuda inilah yang menjadi penyemangat bangsa demi cita-cita berdirinya negara Indonesia. Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda Kedua yang diadakan selama dua hari lamanya, tepatnya di tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Yang unik adalah istilah Sumpah Pemuda tidak muncul pada hasil kongres di tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 tersebut. Istilah ini justru muncul setelah kongres itu selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, Munawar. 2013. Aplikasi Sumpah Pemuda Saat Ini. (<http://munawaraidil.blogspot.co.id/2013/10/aplikasi-sumpah-pemuda-di-masa-kini.html>) (diakses pada tanggal 08 April 2018).
- Aluna. 2016. Dampak Kolonialisme dan Imperialisme bagi Indonesia. [https:// izalewat.weebly.com/history/dampak-kolonialisme-dan-imperialisme-bagi-indonesia](https://izalewat.weebly.com/history/dampak-kolonialisme-dan-imperialisme-bagi-indonesia) (diakses tanggal 21 April 2018)
- Annafis, Asyifah. (2014). Makalah Sejarah Sumpah Pemuda. https://www.academia.edu/9746516/Makalah_sejarah_.sumpah_pemuda (diakses pada tanggal 08 April 2018).
- Dias, Linkin. 2016. Sejarah Sumpah Pemuda : Latar Belakang dan Isinya. <http://sejarah lengkap.com/indonesia/kemerdekaan/sejarah-sumpah-pemuda> (diunduh tanggal 21 April 2018)
- Harry. (2013). *Sejarah Sumpah Pemuda.*, <http://semangatpemuda-indonesia.blogspot.co.id/p/sejarah-sumpah-pemuda.html> (diakses pada tanggal 08 November 2015).
- Kartodirdjo, Sartono. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kemendikbud. 2016. *Guru Pembelajar, Modul Pelatihan Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA/SMK*. Jakarta: Kemendikbud
- Kusnodiharjo, Tukijo. (2011). *Revitalisasi Nilai Sumpah Pemuda dalam Ranah Pendidikan*. http://bapaktukijo.blogspot.co.id/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_6608.html (diakses pada tanggal 08 November 2015).
- Poesponegoro, M.D dan Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prasetyo, Ferry. (2012). *Ikrar atau Janji Sumpah Pemuda*. <http://tehkopijahe.blogspot.co.id/2012/04/ikrar-atau-janji-sumpah-pemuda.html> (diakses pada tanggal 12 April 2018).
- Pringgodigdo, A,K. 1966. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Sardiman AM, Amurwani Dwi Lestariningsih. 2017. *Buku Guru Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI*. Jakarta. Kemendikbud.
- Setyawan, Doni. 2015. Indische Partij. <http://www.donisetyawan.com/indische-partij/> (diunduh tanggal 21 April 2018)

Setiawan, Iwan. 2017. *Masuknya Bangsa Eropa ke Indonesia*. <https://kangone.blogspot.co.id/2017/08/materi-5a-masuknya-bangsa-eropa-ke.html> (diunduh 11 April 2018)

Sudiri, P. K. 1993. *Sejarah Indonesia Baru Dari Pergerakan Nasional sampai Dekrit Presiden*. Malang: IKIP Malang.

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Cahyo Budi Utomo

A. Latar Belakang dan Proses Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) merupakan periode yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa ini telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi itu merupakan dampak dari pendudukan Jepang yang sangat menekan dan sangat memeras. Masa pendudukan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun tersebut sering dipandang sebagai masa yang singkat tetapi akibat yang diterima oleh masyarakat sebanding dengan masa penjajahan Belanda sebelumnya dengan jangka waktu yang lebih lama. Kesan seperti itu wajar sekali, terutama karena didasari dari sudut pandang yang merugikan saja. Selain segi-segi merugikan yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat akibat pendudukan Jepang, segi-segi yang menguntungkanpun ada dan dirasakan pula oleh bangsa Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan; terutama yang menyangkut perkembangan gerakan nasionalisme Indonesia. Terdapat pula hal-hal yang menguntungkan bangsa Indonesia, sehingga pemahaman dan penyebaran tentang konsep kebangsaan menjadi lebih luas jangkauannya.

Pendudukan Jepang di Indonesia dapat disebut sebagai garis pemisah dalam sejarah Indonesia modern, yaitu sebuah garis yang memecahkan hubungan sosial tradisional pada tingkat lokal serta menyiapkan kondisi bagi terciptanya latar belakang revolusi nasional dan sosial tahun 1945-1949 (Aiko Kurasawa, 1988). Namun demikian, masa ini sebenarnya dapat dipandang sebagai sebuah masa transisi dari periode penjajahan kolonial Belanda dengan masa kemerdekaan (Frederik, 1989). Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun tersebut merupakan satu periode

yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia (Ricklefs, 1981). Meskipun masa pendudukan Jepang merupakan suatu pengalaman berat dan pahit bagi kebanyakan orang Indonesia, akan tetapi ini merupakan suatu masa peralihan, di mana dalam beberapa hal gerakan nasionalis mendapat kemajuan (Frederick, 1986).

Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian politik imperialism Jepang di Asia Tenggara. Kedatangannya di Indonesia merupakan bagian dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia (Marwati, 1984). Munculnya imperialisme Jepang ini didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang penting ialah keberhasilan Restorasi Meiji di Jepang yang berdampak pada proses modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Modernisasi tersebut berimplikasi pada persoalan-persoalan yang sangat kompleks seperti kepadatan penduduk, lapangan pekerjaan, bahan mentah, dan daerah pemasaran hasil produksinya.

Persoalan kepadatan penduduk dan upaya peningkatan produksi pertanian pangan, pada tahun-tahun awal dari pemerintahan Meiji juga menunjukkan suatu pertumbuhan yang terus-menerus dalam produksi pangan. Dengan penduduk yang tumbuh cepat dan mengalami lonjakan dari 33,1 juta pada tahun 1872 menjadi 41 juta pada tahun 1892, dan menjadi 52,1 juta pada tahun 1912. Maka meningkatnya produksi pangan sangat diperlukan untuk melindungi Jepang dari beras dengan kelaparan yang begitu umum pada negara-negara yang terlambat perkembangannya. Fenomena ini pada hakekatnya merupakan suatu pengukuhan pada tahap perkembangan ekonomi modern (Peter Duus, 1976).

Sebagai akibat dari kemajuan industri yang pesat di Jepang, ditempuhlah strategi ekspansi untuk mencari bahan mentah dan daerah pemasaran baru, yang dalam prakteknya juga sebagai sumber bahan pangan. Dalam buku yang berjudul *The Rise of Modern Japan*, lebih lanjut Peter Duus (1976) menyatakan: bahwa di lain pihak Jepang juga tertarik dalam bidang eksploitasi sumber ekonomi padi dari daerah-daerah yang baru saja dikuasainya untuk mendukung peperangan, bersama-sama dengan minyak, timah, karet, dan barang-barang krusial lainnya.

Imperialisme Jepang didorong pula oleh filsafat Hakko Ichiu, yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Jepang sebagai negara yang telah maju, mempunyai kewajiban untuk "mempersatukan bangsa-bangsa di dunia dan memajukannya" (Moedjanto, 1992). Ajaran tersebut merupakan dorongan psikologis sekaligus sebagai legitimasi moral politik atas tindakan ekspansionisme Jepang ke wilayah-wilayah lain.

Ajaran hakko Ichiu bagi Jepang bahkan merupakan motivasi "ideologis" (Nugroho Notosusanto, 1979). Itulah sebabnya Jepang dalam imperialisme itu melakukan langkah-langkah kongkrit suatu upaya "pembentukan lingkungan kemakmuran bersama" di kawasan Asia Timur Raya. Setelah dicapai tahap pembentukan lingkungan di kawasan Asia Tenggara dengan Jepang, Cina dan Manchukuo sebagai tulang punggungnya, kemudian Jepang menempuh langkah politik global yang dikombinasi dengan kekuatan militer yang mencakup negara-negara yang berjauhan seperti Srilangka, Selandia Baru, seluruh Oceania (termasuk Hawaii) dan negara-negara kecil di Amerika Tengah.

Menguatnya ambisi militerisme Jepang disamping itu didorong juga oleh konstalasi politik di Jepang sendiri, yaitu adanya kerjasama antara antara kaum kapitalis (Zeibatsu) dengan kaum militer (Gunbatsu). Kerjasama itu terjadi dan semakin kuat ketika pertimbangan minyak dianggap sebagai faktor penting dalam kerangka invasinya di Indonesia (Koen, 1962). Dalam kerangka politik makro, imperialisme Jepang memiliki hubungan erat dengan "dokumen Tanaka", yaitu dokumen tentang rencana ekspansionisme Jepang. Dengan demikian, invasi Jepang ke Indonesia merupakan bagian dari kerangka politik ekspansionisme Jepang di Asia Tenggara.

Cita-cita Jepang untuk membangun Kawasan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya, dicoba direalisasikan dengan mencetuskan Perang Asia Timur Raya yang picunya dimulai dengan penyerangan mendadakanya atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1941.

Dalam perhitungan Jepang, serbuan atas kekuatan Amerika Serikat di Pearl Harbour adalah untuk menghancurkan (paling tidak sebagian) kekuatan Amerika Serikat. Sebab dalam perhitungannya kalau tidak dilakukan dengan cara diserang lebih dulu, kekuatan Amerika Serikat yang utuh sewaktu-waktu akan menyerang Jepang. Karena bagaimanapun Amerika Serikat pasti akan ikut campur dalam peperangan yang terjadi.

Sejak serbuannya ke Pearl Harbour tanggal 8 Desember 1941 itu gerakan invasi militer Jepang dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara memang wilayah yang dalam perhitungan Jepang harus diduduki lebih dahulu. Asia Tenggara merupakan daerah yang cukup kaya, sehingga dapat dijadikan benteng logistik untuk mengamankan kekuasaan Jepang. Dengan cara ini Jepang merasa tidak akan tergantung dalam hal apapun kepada pihak lain, khususnya dari Eropa-Amerika. Philipina pada bulan Januari 1942 diduduki dan segera disusul dengan pendudukan Singapura pada bulan Februari 1942, dan selanjutnya giliran Indonesia pada bulan Maret 1942.

Kekuatan invasi Jepang di Jawa menunjukkan jumlah yang lebih besar dari pada jumlah kekuatan pihak Serikat. Pertempuran-pertempuran di Jawa berakhir dengan kemenangan di pihak Jepang dalam waktu yang sangat singkat. Serbuan-serbuan yang dilakukan oleh Jepang di beberapa tempat di Jawa sejak 1 Maret 1942 tidak dapat dibendung oleh pasukan Belanda yang memang sudah tidak punya kekuatan itu, sampai akhirnya memaksa Belanda untuk segera menyerah. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati tentara dan pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa sayarat kepada Jepang. Sejak itu berakhir pulalah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan Kemaharajaan Jepang di Indonesia.

Jepang tidak hanya ingin mengenyahkan kekuasaan politik bangsa Barat di kawasan Asia Pasifik, melainkan sebagaimana yang dicita-citakannya juga ingin menjadi "Tuan Besar" di Asia Pasifik. Invasi militer atau perang yang dikobarkan oleh Jepang tersebut bagi bangsa Asia Tenggara - khususnya Indonesia - dirasakan sebagai suatu malapetaka baru atau paling tidak dirasakan sebagai suatu penderitaan dan

kesengsaraan bagi rakyat Indonesia; yang peran tersebut selama ini telah dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Rakyat tidak hanya mengalami penderitaan lahiriah karena kekurangan pangan dan sandang yang kemudian mengakibatkan kelaparan dan kematian, tetapi juga penderitaan yang sifatnya rokhaniah (moral). Penjajahan Jepang telah mengakibatkan terobek-robeknya nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan sistem sosial, atau institusi sosial yang ada telah dirunyak. Martabat wanita yang dijunjung tinggi telah menjadi korban langsung kebiadaban tentara-tentara Jepang. Banyak anak gadis yang dengan paksa diambil dari keluarganya dengan bujukan akan disekolahkan ke Jepang, tetapi sebenarnya dibelokkan ke bordil-bordil ataupun ke medan perang untuk dijadikan umpan nafsu kebinatangan tentara-tentara Jepang. Sebagian dari mereka tidak dapat menahan hati dan memilih mati karena malu pulang ke kampung halaman. Perlakuan tentara Jepang terhadap kaum wanita yang dituduh bersalah karena dianggapnya ikut terlibat dalam gerakan bawah tanah lebih tidak manusiawi. Seseorang itu dimasukkan ke dalam tong yang berisi air lalu ditutup, di atas tong itu duduk para pemeriksanya, sehingga tertuduh hampir mati tenggelam, sesudah itu ditelanjangi dan diikat, kemudian diperkosa oleh algojo-algojo itu. Wanita itu dikurung enam bulan lamanya (L.D. Jong, 1987:108-109).

Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas: pertama, menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan kedua, memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Seperti halnya Belanda, Jepang bermaksud menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk itu, suatu kampanye propaganda yang intensif dimulai untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang yang luhur melawan Barat. Namun upaya tersebut sering mengalami kegagalan dengan adanya kenyataan-kenyataan akibat pendudukan Jepang itu sendiri seperti kekacauan ekonomi, teror polisi militer (Kenpeitai), romusha, penyerahan wajib beras, kesombongan, pemukulan-pemukulan, pemerkosaan, serta kewajiban memberi hormat kepada setiap orang Jepang. Kesemua tindakan dan perlakuan tersebut telah menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia yang hampir-hampir tak tertahankan lagi.

Politik imperialisme Jepang di Indonesia terlihat berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, serta mengupayakan mobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Berdasarkan orientasi itulah, Jepang secara ekstensif melakukan eksploitasi ekonomi, penetrasi politik, dan tekanan kultural pada masyarakat Indonesia hingga tingkat pedesaan.

Dalam lapangan politik, pemerintah Jepang mengadakan campur tangan yang sangat dalam pada struktur pemerintahan hingga tingkat pedesaan. Tataan politik tradisionnal di pedesaan mengalami keguncangan yang serius. Terjadi depolitisasi atas lembaga-lembaga politik tradisional di pedesaan Jawa. Lembaga-lembaga politik tradisional bukan lagi diarahkan untuk kepentingan politik, melainkan demi kepentingan ekonomi. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan dalam segi ekonomi, sosial budaya maupun mentalitas masyarakat pedesaan.

Politik Jepang untuk mengatur ekonomi masyarakat terwujud dalam politik penyerahan padi secara paksa yang berakibat pada kemiskinan endemis, menurunnya derajat kesehatan, meningkatnya angka kematian serta berbagai penderitaan fisik masyarakat pedesaan. Sedangkan untuk mendukung kemenangan perangnya, Jepang telah memobilisasi massa di pedesaan ke dalam pengerahan tenaga kerja (*romusha*), perekrutan pemuda dan masyarakat desa dalam latihan-latihan kemiliteran.

Perubahan-perubahan sosial itu telah menandai bentuk pendudukan Jepang yang berorientasi ekonomi dengan kebijakan yang sangat menekan dan memeras rakyat. Dengan demikian yang terjadi bukan saja perubahan struktural, melainkan pada aspek-aspek kultural masyarakat di pedesaan Jawa pada waktu itu. Pada umumnya Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politis paling maju, namun secara ekonomi kurang penting, sumber dayanya yang utama ialah manusia (Ricklefs, 1981).

Awal kedatangan Jepang di Indonesia secara umum diterima dan tanggapinya dengan baik oleh masyarakat. Hal ini disebabkan disamping propaganda yang dilakukan secara intensif sebelum mereka tiba, yang dikoordinir melalui Sendenbu (bagian propaganda), juga dipengaruhi oleh sikap pemerintah kolonial Belanda yang selalu mempertahankan prinsip ketenangan dan keteraturan (*rust en orde*) dengan tindakan-tindakannya yang mengecewakan kaum pergerakan. Disamping itu bagi masyarakat pedesaan di Jawa terdapat kebanggaan terhadap bangsa Jepang yang dapat

mengalahkan Sekutu, yang dengan demikian itu membawa pengharapan pulihnya saat-saat normal yang dinanti-nantikannya.

Sikap masyarakat pedesaan Jawa juga dipengaruhi oleh ramalan Jayabaya, yang secara tidak langsung telah mengarahkan pandangan masyarakat untuk menyambut kedatangan "*wong kuntet kuning saka lor*" yang hanya akan berkuasa di Indonesia "*seumur jagung*". Kata-kata ini dipahami sebagai suatu keadaan baru akibat perginya Belanda dan datangnya Jepang, dan Jepang akan memerintah dalam waktu yang tidak lama, sesudah itu bangsa Indonesia akan "merdeka". Pemahaman yang berkembang seperti ini telah memberikan harapan akan hari kemudian yang lebih baik. Sartono K. (1985) menyebutnya sebagai motivasi spekulatif teoritis masyarakat Jawa terhadap datangnya masa kebahagiaan.

Dalam menjalankan kebijakannya, pemerintah Jepang berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu: (1) mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum; (2) memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada; dan (3) meletakkan dasar agar supaya wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri bagi wilayah Selatan (Lapian, 1988). Oleh karena itu pemerintah Jepang awalnya senantiasa berupaya mencapai keadaan yang stabil, jika tidak bisa memulihkan keadaan seperti yang sebelumnya (*status quo ante*), paling tidak mendekati seperti itu.

Sejak 9 Maret 1942 Jepang menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Dengan segala cara, Jepang mengurus kekayaan dan tenaga rakyat itu dengan kekerasan, dengan rayuan, dan sebagainya. Rakyat Indonesia yang sudah jemu terhadap perang dan penjajahan menyambut kedatangan Jepang itu dengan harapan Jepang akan memberikan kedamaian dan kemakmuran. Jepang datang dianggapnya sebagai pembebas penderitaan bangsa Indonesia. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Jepang dengan sebaik-baiknya. Propaganda Jepang segera dilancarkan dan kekuasaan Fasisisme Jepang segera ditanamkan dalam menyusun pemerintahan di Indonesia.

- a. Tentara Ke-16 di pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.
- b. Tentara Ke-25 di pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi.
- c. Armada Selatan Ke-2 di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat dengan pusatnya di Makasar.

Pada awal pendudukannya, pemerintah pendudukan Jepang mengambil dua langkah penting, yaitu pertama menstabilkan kondisi ekonomi, yang terlihat dari upayanya untuk menguasai inflasi ekonomi, menetapkan patokan harga bagi sebagian besar barang dan menangani secara keras penimbun barang (Frederick, 1985). Kahin (1980) menyebut langkah ini sebagai langkah menaikkan taraf sosio-ekonomi yang memaksa pemerintah baru itu menjalankannya. Kedua, Jepang pada awal pendudukannya mengalami keadaan berlanjutnya ketidakpastian hukum, sehingga pemerintah Jepang dituntut untuk mengeluarkan aturan produk hukum baru yang disesuaikan dengan kepentingan pendudukan Jepang di Indonesia.

Terutama di wilayah Jawa, Tentara Keenambelas mengeluarkan Undang-Undang no.1 tanggal 9 Maret 1942. Pasal 1 berbunyi: Balatentara Nippon melangsungkan Pemerintahan Militer untuk sementara waktu di daerah yang ditempatinya agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.

Pemerintahan militer Jepang disebut Gunseibu. Di Jawa Barat berpusat di Bandung; Di Jawa Tengah berpusat di Semarang; dan Jawa Timur berpusat di Surabaya. Daerah Surakarta dan Yogyakarta dijadikan daerah Istimewa (Koci). Para pejabatnya disamping orang Jepang, juga dibantu oleh orang-orang Indonesia. Misalnya di Jawa Barat Mendampingi Gubernur Kolonel Matsui didampingi oleh R. Pandu Suradiningrat. Sebagai wakil Gubernur dia dibantu oleh Atik Suardi. Di Jakarta, H. Dahlan Abdulah untuk sementara diangkat sebagai kepala Pemerintahan daerah. Jabatan polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko. Di Jawa Tengah, Gubernur dijabat oleh Letnen kolonel Taga. Pendamaianya Rd. Muhammad Chalil, sebagai wakil Gubernur, dan Salaman menjadi sebagai Residen.

Selanjutnya sejak 1 April 1942 Dikeluarkan peraturan Kepegawaian. Di samping itu usaha Men-Jepang-kan Indonesia mulai dilaksanakan diseberluaskan kepada penduduk. Cara yang paling Awal untuk men-jepang-kan itu ada memasang bendera Hinomaru pada hari-hari besar Jepang, dan menyayikan lagu Kebangsaan Jepang Kimigayo pada setiap upacara negara. Di samping bangsa Jepang mulai diajarkan disekolah-sekolah. Begitu tarikh Sumera dari Jepang digunakan dalam sistem penanggalan di Indonesia. Hari lahirnya Kaisar Hirohito harus dirayakan setiap

tahun (Hari Raya Tencosetu). Untuk alat pembayaran, mata uang Hindia Belanda yang digunakan.

Dalam aspek politik pemerintahan, berdasarkan berita pemerintah nomor 14 bulan Maret 1943, dibentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan memberikan tanggungjawab pengelolaan ekonomi pada syu. Pemerintah daerah pada masa pendudukan Jepang diaktifkan kembali untuk memperkuat dukungan terhadap kebutuhan ekonomi perang.

Karesidenan (syu), berdasarkan Undang-undang nomor 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Karesidenan (Syu) dan Tokobetsu Si secara prinsip telah mengarahkan pada pengaturan ekonomi. Swasembada penuh dalam bidang ekonomi dengan demikian telah dipaksakan secara halus pada setiap syu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Selama itu pula syu telah menjadi pembatasan yang berdaya guna bagi Jepang dalam mengekang perkembangan berbagai organisasi di Indonesia (Anthony Reid, 1985).

Dengan kaum nasionalis diadakan kerjasama dengan tujuan bersatu dan berdiri sepenuhnya dibelakang Jepang, serta memperlancar pekerjaan Gunseibu. Di samping itu Jepang menyuruh kaum nasionalis untuk turut aktif di dalam pemerintahan Gunsei. Di dalam pemerintahan Gunsei ini munculah tokoh Ir. Sukarno.

Dalam pearTEMUAN dengan pihak Jepang di Bukuttinggi, Ir. Sukarno tidak akan dihalang-halangi dalam membina ke Indonesia Merdeka. Pertemuan antara Moh Hatta dengan Ir. Sukarno mengambil keputusan mengesampingkan perselisihan pahamnya jaman Partidon dan PNI Baru dan bersatu memimpin rakyat Indonesia di dalam masa sulit itu. Persatuan antara keduanya itu kemudian dikenal dengan sebutan Dwi Tunggal Sukarno-Hatta.

Kerjasama Ir. Sukarno dengan pihak Jepang dimulai dalam suatu Komisi yang menyelidiki Adat Istiadat dan Tata Negara yang dibentuk oleh Gunsei pada 8 November 1942. Komisi beranggotakan 13 orang Jepang serta pimpinan politik dan sosial bangsa Indonesia, seperti: Moh. Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Abikusno Cokrosuyoso, KH Mas Mansyur, Ki Hajar Dewantoro, Prof. Husein Joyodiningrat, Dr. RNg, Purbocaroko, Mr. Supomo. Dari anggota tersebut dikenal sebagai Empat serangkai adalah: Ir. Sokarno, Moh.Hatta, KH. Mas Mnsyur dan Ki Hajar Dewantoro.

Empat serangkai itu diberi kepercayaan untuk memimpin gerakan Pusat Tenaga Rakyat (Putera), yang dibentuk pada 9 Maret 1943. Pembentukan putera itu adalah atas usul Ir. Sukarno.

Tujuan Putera ialah mempersatukan rakyat Jawa untuk menghadapi serangan Sekutu yang semakin dekat dengan Indonesia (Jawa). Pembukaan Kantor Putera pada tanggal 26 April 1943. Somuboco (Kepala Departemen Urusan Umum) menegaskan tugas Putera ialah: menggerakkan Tenaga dan Kekuatan rakyat untuk memberi bantuan kepada usaha-usaha untuk mencapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian Jepang dapat menggunakan para pemimpin Indonesia untuk menanamkan kekuasaannya. Sebaliknya para pemimpin Indonesia juga tidak mau begitu saja diperalat oleh pemerintah Jepang. Mereka mencoba menggunakan sarana dari Jepang itu guna tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Campur tangan pemerintah pendudukan Jepang bukan saja pada lembaga-lembaga politik di pusat dan daerah saja, melainkan pada lembaga tradisional di pedesaan, yang berupa indoktrinasi dan depolitisasi lembaga politik di pedesaan serta penciptaan lembaga-lembaga politik baru yang memudahkan proses pengawasan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

Dalam bidang sosial ekonomi, pemerintah pendudukan Jepang mengadakan pengaturan terhadap distribusi barang-barang yang dianggap penting untuk kepentingan perang seperti besi, tembaga, kuningan dan sebagainya yang diatur dengan Osamu Seirei nomor 19 tahun 1944 tentang mengatur pembagian tembaga tua dan besi tua (Kan Po No. 41 April 1944).

Sesuai dengan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang untuk membentuk susunan perekonomian baru di Jawa, dilakukan politik penyerahan padi secara paksa oleh pemerintah Jepang terhadap petani-petani di pedesaan Jawa. Dasar-dasar politik beras Jepang pada awalnya adalah sebagai berikut (Kurasawa, 1988):

- a. Padi berada dibawah pengawasan negara, dan hanya pemerintah yang diijinkan melakukan seluruh proses pungutan dan penyaluran padi.
- b. Para petani harus menjual hasil produksi mereka kepada pemerintah sebanyak kuota yang ditentukan dengan harga yang ditetapkan.
- c. Harga gabah dan beras ditetapkan oleh pemerintah.

Namun demikian sebagai akibat terputusnya hubungan komunikasi antara pemerintah di Jepang dengan daerah-daerah di wilayah Selatan, maka setiap wilayah harus memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Implikasinya adalah bahwa sejak itu diberlakukannya pungutan padi secara wajib yang dibebankan kepada petani di pedesaan Jawa. Kebijakan inilah yang sekaligus membawa perubahan-perubahan mendasar pada pola hidup masyarakat petani pedesaan Jawa pada masa pendudukan Jepang.

Untuk memenuhi kepentingan perang, pemerintah pendudukan Jepang bahkan mengupayakan pengerahan tenaga kerja untuk menangani proyek-proyek pertahanan dan perang bukan hanya di wilayah Indonesia sendiri, melainkan di seluruh Asia Tenggara seperti di Philipina, Singapura, Siam, dan Birma. Tenaga kerja itulah yang sering disebut *romusha*, yakni tenaga kerja sukarela atas tekanan pemerintah Jepang untuk menangani pekerjaan-pekerjaan kasar bagi kepentingan perang Jepang.

Perlakuan-perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi seperti kurangnya makan, tidak adanya jaminan kesehatan, sangat beratnya pekerjaan dan perlakuan yang semena-mena dari bala tentara Jepang telah berakibat pada penderitaan rakyat yang berkepanjangan, ketakutan sosial, kegelisahan komunal serta munculnya perasaan tidak aman.

Sebagai bagian dari politik terhadap pemanfaatan sumber daya manusia, pemerintah pendudukan Jepang melakukan mobilisasi massa pemuda dan rakyat secara besar-besaran dalam program-program latihan semi militer. Tujuan utamanya sebenarnya adalah sebagai tenaga cadangan bagi kepentingan militer Jepang.

Mobilisasi massa rakyat dalam Seinendan, Keibodan, Fujinkai, dan Pembela Tanah Air (Peta) telah mendorong rakyat memiliki keberanian, sikap mental untuk menentang penjajah, pemahaman terhadap kemerdekaan maupun sikap mental yang mengarah pada terbentuknya nasionalisme.

B. Strategi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang di Indonesia merupakan satu periode yang menentukan dalam sejarah Indonesia. Meskipun merupakan pengalaman berat dan pahit bagi kebanyakan orang Indonesia, tetapi ini merupakan suatu masa peralihan, di mana dalam beberapa hal gerakan nasionalis mendapat kemajuan. Pergerakan nasional

Indonesia sebagai keseluruhan telah mengambil sikap yang sedikit banyak kooperatif di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Sedang sebagian lain di bawah komando Syahrir membentuk suatu jaringan "bawah tanah".

Meskipun terdapat beberapa nuansa dalam interpretasi, agaknya telah diterima sebagai suatu fakta di kalangan luas bahwa pasukan Jepang disambut dengan baik oleh orang Indonesia pada umumnya ketika mereka melakukan invasi ke kepulauan Indonesia dalam dua atau tiga bulan pertama tahun 1942 Nugroho Notosusanto (1979). Yang lebih penting bahwa Pergerakan nasional Indonesia sebagai keseluruhan telah mengambil sikap yang sedikit banyak kooperatif di bawah pimpinan tokoh senior pada waktu itu, yaitu Soekarno dan Moh. Hatta. Hal ini sangat menarik karena kedua tokoh senior tersebut selama ini terkenal sebagai non-kooperator yang gigih selama pemerintahan kolonial Belanda.

Selain propagandanya yang menarik, sikap Jepang pada mulanya menunjukkan kelunakan karena berbagai kepentingan. Tetapi hal ini tidak lama, karena Jendral Imamura sebagai penguasa tertinggi (Gunsireikan kemudian Seiko Sikikan) Pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa mulai mengubah politik lunaknya dengan mengeluarkan maklumatnya tertanggal 20 Maret 1942 yang berisi tentang larangan terhadap segala macam pembicaraan, pergerakan dan anjuran atau propaganda dan juga pengibaran sang Saka Merah Putih serta menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang sudah diijinkan sebelumnya (Mudjanto, 1992). Dengan demikian praktis semua kegiatan politik dilarang. Dan tidak hanya berhenti disitu, pemerintah Jepang kemudian secara resmi membubarkan semua perkumpulan organisasi-organisasi politik yang ada dan pihak Jepang mulai membentuk organisasi-organisasi baru untuk kepentingan mobilisasi rakyat.

Sejak semula Islam tampak menawarkan suatu jalan utama bagi mobilisasi rakyat. Pada akhir bulan Maret 1942 pihak Jepang di Jawa sudah mendirikan sebuah Kantor Urusan Agama (Shumubu). Pada bulan April 1942 usaha pertama untuk gerakan rakyat yaitu "Gerakan Tiga A" dimulai di Jawa yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, seorang nasionalis yang kurang terkenal. Di dalam gerakan tersebut pada bulan Juli 1942 didirikan suatu sub seksi Islam yang dinamakan Persiapan Persatuan Umat Islam yang dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso.

Secara umum Gerakan Tiga A ini tidak berhasil mencapai tujuan-tujuannya dan dinilai kurang berguna. Para pejabat Indonesia hanya sedikit yang mendukungnya, tidak ada seorang nasionalis Indonesia terkemuka yang terlibat di dalamnya, dan sedikit orang Indonesia yang menanggapinya secara serius. Sejak itu pihak Jepang menyadari bahwa apabila mereka ingin memobilisasikan rakyat, maka mereka harus memanfaatkan tokoh-tokoh terkemuka gerakan nasionalis. Minat terhadap kerjasama dengan tokoh-tokoh pergerakan terkemuka semakin besar setelah Jepang terpukul dalam pertempuran laut Karang 7 Mei 1942. Jepang harus memberi konsesi makin besar kepada bangsa Indonesia agar makin besar pula kesediaan bangsa Indonesia untuk memberikan kerjasamanya.

Dalam kerangka perjuangan dimasa pendudukan Jepang yang bersituasi semacam itu, tokoh-tokoh nasionalis mulai mengambil sikap dalam kerangka strategi perjuangannya. Hatta dan Syahrir yang telah bersahabat lama, memutuskan untuk memakai strategi-strategi yang bersifat saling melengkapi dalam situasi baru kekuasaan Jepang (Mavis Rose, 1987/1991). Hatta akan bekerjasama dengan Jepang dan berusaha mengurangi kekerasan pemerintahan mereka serta memanipulasi perkembangan-perkembangan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Syahrir akan tetap menjauhkan diri dan membentuk suatu jaringan "bawah tanah" yang terutama didukung oleh para mantan anggota PNI Baru. Soekarno yang telah dibebaskan oleh Jepang dari Sumatra segera bergabung dengan Hatta, yang kemudian segera mendesak kepada Jepang untuk membentuk suatu organisasi politik massa di bawah pimpinan mereka (Ricklefs, 1992: 303).

Para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak saja percaya terhadap janji-janji Jepang dengan semboyan Tiga A-nya. Mereka sangat hati-hati dalam menghadapi penjajah baru itu. Akan tetapi bangsa Indonesia tidak begitu saja dapat mengusir penjajah Jepang sebab kondisinya masih lemah. Sukarno-Hatta misalnya menyadari bahwa jalan yang dapat ditempuh adalah dengan kerja-sama. Kerja sama itu hanyalah sebuah alat untuk mempercepat proses kemerdekaan Indonesia yang telah lama diperjuangkan.

Dalam setiap kesempatan para pejuang bangsa Indonesia selalu menggembleng semangat cinta tanah air di dalam hati sanu bari rakyat Indonesia. Lembaga-lembaga yang diciptakan oleh Jrpang seperti Java Hookokai, Putera, Peta, Funjinkai, dan

sebagainya justru menjadi sarana memupuk semangat kebangsaan. Hal itu tentu memudahkan jalan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Telah sedikit disinggung di muka, bahwa dalam menghadapi penjajahan Jepang, para pejuang Indonesia memiliki strategi dan cara-cara yang tidak sama. Ada yang mau bekerja sama sambil berjuang untuk kemerdekaan, tetapi ada yang menolak kerjasama. Disamping golongan yang mau bekerja sama dengan pemerintah, ada beberapa kelompok pejuang untuk mencapai kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Kelompok-kelompok pejuang tersebut yaitu:

- a. **Kelompok Syahrir.** Golongan ini adalah pendukung demokrasi Parlemen model Eropa barat. Golongan ini memiliki pengikut kaum pelajar di pelbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Cirebon, Garut, Semarang, dsb. Syahrir menentang Jepang karena merupakan negara Fasis. Mereka berjuang dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan strategi gerakan "bawah tanah".
- b. **Kelompok Amir Syarifudin.** Kelompok ini juga anti Fasis dengan menolak sama sekali kerja sama dengan Jepang. Ia sangat keras dalam mengkritik Jepang sehingga ia ditangkap pada tahun 1943 dan dijatuhi hukuman mati tahun 1944. Atas bantuan Sukarno, hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia merdeka tahun 1945, ia bebas dari hukuman.
- c. **Golongan Persatuan Mahasiswa.** Golongan ini sebagian besar berasal dari kedokteran di Jakarta. Pengikutnya antara lain: J. Kunto, Supeno, Subandrio. Kelompok ini juga anti Jepang dan bekerja sama dengan golongan Syahrir.
- d. **Kelompok Sukarni.** Yang termasuk golongan ini adalah: Adam Malik, Pandu Wiguna, Chaerul Saleh, Maruto Nitimihardjo, dsb. Kelompok ini sangat besar peranannya di sekitar proklamasi kemerdekaan.
- e. **Golongan Kaigun.** Anggotanya bekerja pada Angkatan Laut Jepang. Akan tetapi secara terus-menerus menggalang dan membina kemerdekaan. Mereka memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh Angkatan Laut Jepang yang simpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Termasuk dalam kelompok ini adalah; Mr. Akhmad Subardjo, Mr. Maramis, Dr. Samsi, Dr. Buntaran Martoatmodjo. Kelompok Kaigun ini mendirikan asrama Indonesia Merdeka. Ketuanya Wikana, sedangkan

para pengajarnya antara lain: Ir. Sukarno, Drs. Muh. Hatta, dan Sutan Syahrir. Kelompok ini juga bekerjasama dengan kelompok bawah tanah yang lain. Hanya saja dengan cara yang hati-hati untuk menghindari kecurigaan Jepang.

- f. Pemuda Menteng.** Kelompok ini bermarkas di gedung Menteng 31 Jakarta. Mereka kebanyakan pengikut tan Malaka dari partai Murba. Tokoh terkemuka dari kelompok ini adalah: Adam malik, Chairul Saleh, dan Wikana.

Sekalipun para pejuang Indonesia itu terbagi dalam kelompok-kelompok dan menerapkan strategi yang berbeda, namun itu bukan berarti perpecahan. Mereka hanya berbeda dalam taktik, tetapi tujuannya sama yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka yang bekerja sama dengan Jepang memanfaatkan kesempatan itu untuk menggempleng diri sebagai persiapan pada masa kemerdekaan kelak kemudian hari. Mereka yang dapat menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan, militer, dan jabatan lain pada masa Jepang justru sebagai latihan untuk diterapkan pada masa kemerdekaan nantinya. Sementara itu mereka yang menentang secara terang-terangan terhadap Jepang dapat mengoreksi kekejaman tentara Jepang dalam menindas rakyat Indonesia. Menjelang kemerdekaan Indonesia mereka lebih bersikap berani untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa menunggu persetujuan Jepang.

Awal tahun 1943 usaha kearah mobilisasi mulai memberi prioritas tinggi terhadap gerakan-gerakan pemuda. Korps Pemuda yang bersifat semi militer (Seinendan) dibentuk pada bulan April 1943. Korps ini mempunyai cabang-cabang sampai ke desa-desa, meskipun yang aktif terutama di daerah perkotaan. Kemudian disusul dengan pembentukan Korps Kewaspadaan (Keibodan) sebagai organisasi polisi, kebakaran, dan serangan udara pembantu. Demikian juga dibentuk Pasukan Pembantu (Heiho) sebagai bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang di Indonesia.

Kemudian dibentuk Jawa Hokokai (kebangkitan Rakyat Jawa) pada 1 maret 1944. Pimpinan tertinggi adalah Gunseikan, sedang Ir. Sukarno menjabat sebagai Komon (penasehat). Jawa Hokokai merupakan hasil peleburan dari Fujinkai (perkumpulan Kaum Wanita), Masyumi (Majelis Sura Muslim Indonesia), Kakyō Sokai (Perhimpunan Cina); Taikū Kai (Perkumpulan Oleh Raga); Keimin Bunka Syidosyo (Himpunan Kebudayaan), dan sebagainya.

Propaganda Jepang dilancarkan terus; Misalnya Gerakan Tiga A: Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dibawah pimpinan Mr. Syamsudin. Semboyan: Jepang dan Indonesia sama-sama; Asia untuk bangsa Asia; kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan sebagainya bertujuan menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang menyelesaikan perang Asia Timur Raya. Disamping itu pula dibentuk Pemuda Asia Raya dibawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto. Pemuda Asia Raya ini kemudian diganti namanya menjadi Seinendan, pada tanggal 29 April 1942. Organisasi ini bekerjasama dengan Putera dibawah pimpinan Empat Serangkai Indonesia.

Pengerahan tenaga rakyat untuk kepentingan perang terus ditingkatkan. Untuk membantu polisi dibentuk Keibodan yang terdiri dari para pemuda yang belum termasuk Seinendan. Tenaga -tenaga laki-laki dari desa-desa dikerahkan untuk melakukan kerja paksa sebagai Romusha. Mereka bekerja untuk membangun benteng, jalan, jembatan, gedung-gedungn pemerintahan, dan sebagainya. Mereka dipekerjakan di Jawa maupun di luar Jawa, bahkan sampai diluar Indonesia. Banyak di antara mereka yang mati kelaparan, kelelahan, penyakit, siksaan para mandor, dan sebagainya. Banyak diantaranya yang tidak kembali lagi kekampung asalnya.

Selanjutnya kaum wanita digerakan dalam Fujinkai pada 3 Nopember 1943. Mereka ini dipekerjakan di garis belakang, di depur-dapur umum, Kesehatan (PPPK), dan sebagainya. Anak-anak sekolah dilatih olah raga perang Kinhorosi.

Dalam bidang kebudayaan, siasat Jepang untuk memainkan dan menanamkan kebudayaan Jepang di Indonesia, dilakukan bersama -sama dengan menggiatkan kebudayaan Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Terutama seni sastra dan kesenian mendapatkan perhatian Khusus. Para ahli bahasa membentuk Komisi bahasa Indonesia dengan berusaha memperkaya perbendaharaan bahasa. Nama-nama kota dan jalan-jalan diganti dengan nama Indonesia sepanjang ada ijin dari pemerintah Jepang. Misalnya: Batavia diganti Jakarta; Buitenzoerg diganti dengan Bogor; Meeter Cornelis diganti Jatinegara; dan sebagainya. Nama-nama Jawatan diganti dengan bahasa Jepang. Maka nampaklah bahasa Jepang akan Me-Nippon-kan Indonesia. Lagu Kebangsaan Jepang kimigayo dinyayikan di samping lagu kebangsaan Indonesia: Indonesia Raya. Latihan-latihan diadakan untuk melatih pegawai di berbagai jawatan untuk menguisi Nipponseisin (semangat Jepang). Guna mempergiat

semangat belajar bahasa Jepang, diberikan tunjangan-tunjangan istimewa kepada mereka yang telah menunjukkan kecakapannya berbahasa Jepang dalam tingkatan dai-tji (dasar), dai-ni (menengah), dai-san (atas), dai-jon (tinggi), dan dai-go (lanjut).

Sementara itu sejak 1943 golongan As (Jerman dkk) menderita kekalahan dimana-mana. Antara lain di Italia, Mussolini jatuh dan digantikan oleh Pietro Badoglio (26 Juli 1943). Di Jerman, Hitler jatuh pada 7 Mei 1945. Jepang mulai cemas terhadap serangan balasan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Rusia, Tiongkok, dan Australia) yang semakin gencar di Pasifik. Beberapa pangkalan Jepang di Jawa mulai dibom oleh Sekutu. Misalmya Surabaya.

Menghadapi itu semua, maka Jepang cepat-cepat memberikan kemerdekaannya kepada negara-negara yang telah direbutnya.: Birma (1 Agustus 1943), Pilipina (14 Oktober 1943). Sedang kepada bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk bersuara berupa usul-usul. Maka dibentuklah Tjiho Sangi Kai (semacam Dewan Daerah), Tjuo Sangi In (semacam Dewan Rakyat) dengan Ir. Sukarno sebagai Gitjo (ketua), dan RMAA Kusumoutoyo dan dr. Buntaran Martaatmaja sebagai Fuku Gitjo (wakil ketua). Tjuo sangi In dibuka pada 16 Oktober 1943 dan beranggotakan 43 orang. Kewajibannya memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Saiko Sikikan dan mengajukan usul-usul. Beberapa orang Indonesia diangkat menjadi Sjutjokan dan Fuku Sjutjokan.

Perang Pasifik semakin mendesak kekuatan Jepang. Untuk itu Jepang sangat membutuhkan bantuan dari daerah-daerah yang didudukinya. Maka berdasarkan keputusan sidang Parlemen ke-82 di Tokyo, yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Tojo, perlu dibentuk berisan semi-militer dan militer di Indonesia. Psukan ini kemudian dikenal dengan nama Tentera Sukarela Pembela Tanah Air (Peta) (Boei Giyugun). Pembentukan Peta ini mula-mula diusulkan oleh R. Gatot Mangkuprojo melalui suratnya yang ditunjukkan kepada Gunseikan Pada 7 September 1943. Tanggal 3 Oktober 1943 Letnan Jendral Kumakici Harada mengeluarkan aturan pembentukan Peta itu. Beberapa orang Indonesia mulai dilatih kemiliteran. Dan Akhirnya tanggal 22 Nopember 1943 diresmikan pembentukan Peta itu.

Disamping Peta, juga penduduk diikutsertakan membantu perang. Tanggal 8 Januari 1944 diperkenalkan tonarigumi (rukun Tetangga). Tiap kelompok terdiri dari 10-20 rumah tangga. Beberapa Tonarigumi itu dilatih pencegahan terhadap bahaya

udara, kebakaran, pembratantasan mata-mata musuh dan penyampaian iktisar pemerintah militer kepada penduduk, menganjurkan penambahan hasil bumi, dan berbakti kepada pemerintah militer di bidang lain.

Atas permintaan para pemimpin Indonesia, seperti R. Gatot Mangkupraja, KH Mas Mansyur, dan Ir. Sukarno, dibentuklah Tentara Pembela Tanah Air (Peta) pada 3 Oktober 1943 seperti tersebut diatas.

Dalam waktu 6 bulan dilatihlah calon-calon daidantjo (kepala pasukan) dan Sjudantjo (kepala regu). Mereka ini kemudian melatih calon-calon perajurit-perajurit (Peta) di bawah pimpinan dan pengawasan opsir Jepang. Organisasi ini merupakan suatu tentara sukarela Indonesia. Tidak seperti Heiho, Peta tidak secara resmi menjadi bagian dari balatentara Jepang, melainkan dimaksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu guna melawan serbuan pihak Sekutu. Disiplin Peta sangat ketat dan ide-ide nasionalisme Indonesia dimanfaatkan dalam penggemblengan para anggotanya.

Disamping Peta, Jepang juga membentuk Heiho (Pembantu tentara). bila Peta bertugas membela daerahnya masing-masing, maka Heiho bertugas membantu Jepang apabila diperlukan. Untuk mempersatukan rakyat dibentuk Tonarigumi, Ku. Mereka ini dilatih dalam pencegahan bahaya udara, dan sebagainya.

Melalui Peta maupun Heiho tersebut, pemuda-pemuda Indonesia dilatih kemiliteran yang sangat berguna untuk menghadapi serangan-serangan Baelanda yang ingin menjajah Indonesia kembali setelah Jepang menyerah pada sekutu.

Pada bulan Maret 1943 Gerakan Tiga A dihapuskan dan digantikan dengan Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Badan ini berada dalam pengawasan ketat pihak Jepang, tetapi ketuanya diangkat dari orang-orang terkemuka Indonesia pada waktu itu, yaitu: Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Dalam beberapa kesempatan tokoh-tokoh ini dapat memanfaatkan tugas-tugas mereka ketika keliling dan berpidato di depan massa. Kesempatan itu digunakan untuk menanamkan semangat nasionalisme kepada setiap pemuda dan orang Indonesia. Namun demikian, gerakan ini hanya mendapat sedikit dukungan dari rakyat. Salah satu sebabnya adalah karena Jepang tidak bersedia memberi kebebasan kepada kekuatan-kekuatan rakyat yang potensial dan membatasi ruang gerak tokoh-tokoh utamanya.

Mengingat tahun 1944 pihak Sekutu mulai mendapatkan kemenangan-kemenangannya diberbagai medan pertempuran terhadap Jepang. Pada Pebruari 1944

Kepulauan Marshall dan Karolina dapat direbut Sekutu. Dalam situasi gawat ini, Jepang berusaha memperkuat garis belakang dengan membentuk satu organisasi besar yang didukung oleh seluruh rakyat Jawa. Dibentuklah Jawa Hokokai (Himpunan kebangkitan rakyat Jawa) pada 1 Maret 1944. sebagai ganti dari Putera. Soekarno sangat berhasil dalam memanfaatkan propaganda Jawa Hokokai ini untuk memperkokoh posisinya sebagai pemimpin utama kekuatan rakyat. Jawa Hokokai menjadi lebih efektif dikarenakan memiliki alat organisatoris yang menembus sampai ke desa-desa. Rukun Tetangga (Tonari Gumi) dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk yang terdiri dari sepuluh sampai duapuluh keluarga untuk tujuan mobilisasi.

Di kota-kota besar, terutama Jakarta dan Bandung, para pemuda yang berpendidikan mulai menggalang jaringan-jaringan bawah tanah, yang dalam banyak hal ada di bawah pengaruh Syahrir (Ricklefs, 1992: 310). Mereka tahu bahwa posisi Jepang di dalam perang mulai memburuk, dan mereka mulai menyusun rencana-rencana untuk merebut kemerdekaan nasional dari kekalahan yang mengancam Jepang tersebut.

Sementara itu kemenangan Sekutu di Eropa maupun di pasifik seperti di Sialan, Gauam, Marina, mengakibatkan perubahan politik Jepang. Kabinet Tojo jatuh pada 18 Juli 1944 dan digantikan dengan kabinet Kaiso pada 22 Juli 1944. Supaya mendapatkan bantuan sepenuhnya dari rakyat Indonesia, Kabinet Kaiso menjanjikan Dokutitsu (kemerdekaan) kepada Indonesia di kemudian hari. Rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang itu sangat menderita. Disamping penghisapan tenaga rakyat untuk kepentingan perang, Jepang juga menguras kekayaan alam Indonesia. Janji Kemakmuran bersama adalah Janji kosong. Rakyat Indonesia mulai menyadari akan hal ini. Sebab yang terjadi adalah kelaparan dan tanpa pakaian. Sawah ladang tidak dipelihara, karena tenaga laki-laki dikerahkan untuk Romusha. Kekayaan penduduk diambil untuk kepentingan perang. Apabila melawan, maka Kempeitai (polisi militer Jepang) siap untuk memberikan hukuman berat. Akibatnya ekonomi rakyat menjadi rusak berat. Gerakan Awam mata-mata musuh (MMM) diperhebat. Setiap orang yang dicurigai akan ditangkap dan disiksa oleh Kempetai sampai mati atau cacat seumur hidup. Sejak 20 Desember 1944 diadakan gerakan pengumpulan emas dan permata

milik penduduk. Katanya untuk keperluan perang dan untuk memperoleh kemenangan akhir.

Akhirnya karena tidak kuat lagi menerima penderitaan itu, berontaklah para pemuda. Misalnya Di Tasikmalaya, Indramayu, Singapura, Banten, dan sebagainya. Pemberontakan terhebat terjadi pada 14 Pebruari 1945 yang dilakukan oleh anggota-anggota Peta dibawah pimpinan Supriyadi. Namun semua pemberontakan itu dapat ditindas dengan kejam oleh Jepang.

Tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso Kuniaki menjanjikan kemerdekaan bagi "Hindia Timur" (T0-Indo). Akan tetapi, tidak menentukan kapan tanggal kemerdekaan itu, dan jelas diharapkan bahwa bangsa Indonesia akan membalas janji tersebut dengan cara mendukung Jepang sebagai ungkapan terima kasih. Bendera Indonesia boleh dikibarkan lagi di kantor-kantor Jawa Hokokai. Selain itu juga mulai dibentuk kelompok-kelompok pemuda dan militer baru, seperti Barisan Pelopor dan Barisan Hisbullah.

Awal tahun 1945 keadaan Jepang semakin kritis. Beberapa daerah pendudukannya telah dapat direbut Sekutu. Untuk meredakan hati rakyat yang mulai bergolak melakukan pemberontakan-pemberontakan, Jepang meningkatkan penerangan-penerangan bahwa kemerdekaan Indonesia akan di berikan di kemudian hari.

Sejak itu pula semakin banyak orang Indonesia yang diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Sejak bulan November 1944 orang-orang Indonesia mulai diangkat menjadi wakil residen. Para penasehat (sanyo) dihimpun ke dalam semacam majelis tinggi (Dewan Sanyo, Dewan Penasehat).

Mereka mengakui perlunya memperoleh jasa baik dari pihak Indonesia, karena bagaimanapun mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Sementara itu upaya menegakkan jasa baik itu mengalami berbagai kesulitan. Pada bulan Februari 1945 Peta di Blitar menyerang gudang persenjataan Jepang dan membunuh beberapa serdadu Jepang. Jepang mulai merasa takut bahwa mungkin mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan militer Indonesia yang telah mereka ciptakan sendiri. Perasaan takut itu menjadi semakin kuat ketika pada bulan Maret 1945 angkatan bersenjata serupa di Birma berbalik melawan mereka.

Menyadari hal itu, maka pihak Jepang memutuskan untuk mulai menghapuskan kekangan-kekangan yang masih ada terhadap kekuatan rakyat Indonesia.

Sementara itu Pilipina dapat direbut Sekutu setelah terjadi pertempuran hebat di Semenanjung Leyte (1944) dan Luzon (1945). Kemudian Jepang di Asia Tenggara semakin teracim. Untuk menghadapi segala kemungkinan, maka Jepang membentuk Pasukan Berani mati (Jibaku-tai). Pemuda-pemuda dari Madiun dan Surabaya banyak masuk menjadi anggota pasukan berani mati ini. Sedikit demi sedikit, pasukan Sekutu semakin mendekati Jepang Asli. Iwo Jima dapat direbut (16 Maret 1945), kemudian Okinawa (21 Mei 1945). Disamping itu kini Jepang berperang Sendirian, sebab sekutunya: Italia (1944) dan Jerman telah menyerah kepada Sekutu (7 Maret 1945).

Setelah Sekutu dapat menduduki Tarakan dan Balikpapan, Jepang dalam Usaha memperoleh dukungan sepenuhnya dari rakyat Indonesia, membentuk Dokuritu Zyoombi Tsoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia = BPUPKI) sebagai langkah awal dari janji kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Tugas ini ialah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk Indonesia merdeka. Badan ini didirikan pada 29 April 1945. Susunan pengurusnya terdiri dari sebuah badan perundingan dan kantor tatausaha. Badan Perundingan terdiri dari seorang Kaico (Ketua), 2 orang Fuku Kaico (Wakil Ketua), 60 orang Lin (Anggota), termasuk 4 orang golongan Cina dan Golongan Arab serta seorang Golongan peranakan Belanda.

Dibadan tersebut terdapat 7 orang anggota Jepang. Mereka ini duduk sebagai pengurus Istimewa yang akan menghadiri sidang-sidang, tetapi mereka ini tidak mempunyai hak suara. Sebagai Kaico adalah dr. KRMT Rajiman Wediodiningrat, sebagai Fuku Kaico pertama dijabat oleh orang Jepang yakni Syucokan Cirebon dan R. Surowo (Syucokan, Kedu) sebagai Fuku Kaico kedua. RP Surasa diangkat pula sebagai kepala Sekretariat Dokuritu Zyoombi Tsoosakai dengan dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. AG Pringgogidgo.

Sementara itu di Bandung pada 16 Mei 1945 telah diadakan kongres pemuda seluruh Jawa dengan dipelopori oleh angkatan Muda Indonesia sebagai Pemuda Pelopor. Kongres itu dihadiri oleh utusan-utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa seluruh Jawa. Antara lain: Jamal Ali, Chaerul saleh, Anwar Cokroaminoto, dan Harsono Cokroaminoto, serta para mahasiswa IKA Daigaku Jakarta. Kongres itu

bertekad bersatu untuk mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia bukan sebagai hadiah Jepang.

Setelah tiga hari bersidang, akhirnya dicapai dua resolusi: pertama, semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda dipersatukan dan di bulatkan dibawah satu pimpinan nasional; dan kedua, dipercepatnya pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.

Disamping itu di putuskan bahwa konggres menyatakan dukungannya dan bekerja sama yang erat dengan Jepang untuk mencapai kemenangan akhir. Keputusan terakhir ini tidak memuaskan pemuda. Maka sebagai imbangannya, pada 3 Juli 1945 diadakan suatu pertemuan rahasia yang dihadiri sekitar 100 orang pemuda. Pertemuan pemuda ini membentuk panitia khusus yang diketahui oleh BM Diah dengan anggota Sukarni, Sudiro, Syarif Thoyeb, Harsono Cokroaminoto, Alkana, Chaerul Saleh, F. Gultom, Supeno, dan Asmara Hadi.

Pertemuan rahasia diadakan lagi pada 15 Juni 1945 yang hasilnya membentuk Gerakan Angkatan Baru Indonesia yang kegitannya sebagian besar, digerakan olehn Pemuda Asrama Menteng 31. Tujuan mereka tecantum dalam surat kabar Asia Raya yang terbit pada pertengahan Juni 1945. Tujuannya lebih radikal, yaitu: pertama, mencapai persatuan kompak antara seluruh golongan masyarakat Indonesia; kedua, menanamkan semangat revolusioner masa atas dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat; tiga, membentuk negara Kesatuan Repuublik Indonesia; Keempat, mempersatukan Indonesia bahu mambahu dengan Jepang, tetapi bila perlu gerakan tersebut bermaksud untuk mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, Angkatan Baru Indonesia, pendapat-pendapatnya dapat mempengaruhi usaha-usaha untuk membantu tercapainya negara Indonesia merdeka. Para pemuda seperti: Chaerul Saleh, Sukarni, BM Diah Asmara Hadi, Harsono Cokroaminoto, Alkana, Sudiaro, Supeno, Adam Malik, SK. Trimurti, Sutomo, dan Pandu Wiguna (Karta Wiguna) ikut serta dalam Gerakan Rakyat Baru yang mendapatkan ijin pendiriannya oleh *Syaiiko Syikikan* Letnan Jendral Y. Nagano di dalam pertemuan tanggal 2 Juli 1945.

Gerakan Rakyat Baru bertujuan mengobarkan semangat cinta tanah air dan semangat perang. Anggotannya terdiri seluruh rakyat Indonesia dari berbagai golongan dan ras. Jepang mengijinkan pendirian Gerakan Rakyat Baru itu berlatar

belakang dapat mengawasi gerakan pemuda Indonesia. Gerakan itu sepenuhnya harus tunduk kepada Gunseibu (pemerintah militer Jepang). Dengan kebebasan bergerak dibatasi. Gerakan Rakyat Baru diresmikan baru tanggal 28 Juli 1945. Didalamnya tergabung pula Jawa Hokokai dan Masyumi. Sikapnya Loyal kepada Jepang. Maka para pemuda yang berjiwa radikal tidak mau menjadi pengurus organisasi tersebut. Misalnya: Chaerul Saleh, Harsono Cokroaminoto, Sukarni, Asmara Hadi, dan sebagainya. Sehingga akhirnya nampaklah adanya perselisihan antara golongan tua yang setia kepada Jepang dengan golongan pemuda, tentang cara pelaksanaan berdirinya negara Indonesia.

C. Perubahan-perubahan Akibat Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar pada masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya di Jawa. Tekanan-tekanan yang bersifat politis terhadap lembaga-lembaga politik tradisional maupun lembaga politik legal telah menghancurkan tatanan sistem politik di pedesaan. Di samping itu pemerasan sumber daya ekonomi masyarakat pedesaan dilakukan secara intensif, bahkan diikuti dengan pengawasan yang ketat dan pembentukan lembaga ekonomi baru di pedesaan. Pengawasan sosial diberlakukan dengan pembentukan organisasi-organisasi sosial yang diarahkan untuk mengadakan kontrol terhadap aktivitas masyarakat, serta tekanan-tekanan mental dan agitasi yang dilaksanakan pemerintah pendudukan Jepang secara terus menerus. Untuk memahami keadaan sosiologis masyarakat dalam perspektif historis secara lebih utuh, dijelaskan konfigurasi sosio-historis masyarakat pedesaan Jawa pada masa pendudukan Jepang dalam konteks perubahan sosial yang diakibatkan proses pendudukan itu. Berikut ini satu-persatu aspek perubahan tersebut akan dibahas.

Perubahan dalam Aspek Politik Pemerintahan

Kedatangan balatentara Dai Nippon di Indonesia segera diikuti oleh perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Hal itu dimaksudkan untuk menjalankan pemerintahan di bawah pendudukan Jepang, meskipun dalam hal ini Jepang terlihat untuk berupaya mempertahankan sistem yang sudah ada.

Pada tanggal 7 Maret 1942 Pemerintah Balatentara dai Nippon mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 yang berisi antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 1 : Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempati agar supaya mendatangkan keamanan yang sentausa dengan segera;
- Pasal 2 : Pembesar Balatentara memegang kekuasaan militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu tetap di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda;
- Pasal 3 : Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan pemerintahan militer;
- Pasal 4 : Bahwa Balatentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada Jepang (Kan Po, Nomor Istimewa, 1942).

Undang-undang tersebut secara tegas menggariskan bahwa diberlakukannya pemerintahan militer untuk sementara waktu dan jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan dengan diganti oleh tentara Jepang di Jawa. Pemerintahan sipil dengan Undang-undang tersebut tetap dipertahankan untuk mencegah kekacauan. Perbedaannyaialah bahwa pimpinan dipegang oleh tentara Jepang, baik di pusat maupun di daerah.

Namun demikian, pada tanggal 5 Agustus 1942 pemerintahan Jepang mengeluarkan Undang-undang nomor 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan *Syu* dan *Tokubetu-Syi* pada tanggal 7 Agustus 1942. Dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut maka berakhirilah pemerintahan yang bersifat sementara dan berlakulah pemerintahan pendudukan jepang di Indonesia. Dalam struktur pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang tersebut terdiri atas *Syu*, *Syi*, *Ken*, *Gun*, *Son*, dan *Ku* (Kan Po, Nomor 2, September 1942).

Dalam hierarki struktural sistem pemerintahan daerah di Jawa masa Jepang adalah sebagai berikut:

Lembaga	Pimpinan
Syu (Karesidenan)	Syuchu

Si (Kotamadya)	Sicho
Ken (Kabupaten)	Kencho
Gun (Kawedanan)	Guncho
Son (Kecamatan)	Soncho
Ku (Desa/Kelurahan)	Kuncho

Karesidenan (*Syu*) dalam sistem ini merupakan lembaga yang mandiri dan otonom dalam hal pengelolaan ekonomi. Terdapat hal yang berubah dalam fungsi dan kekuasaannya. Dinyatakan oleh Marwati Djonet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (1984:14) sebagai berikut: Meskipun luas daerah *Syu* sama dengan karisidenan dahulu namun fungsi dan kekuasaannya berbeda. Residentie dulu merupakan daerah pembantu Gubernur (*resident*), sedangkan *syu* merupakan pemerintah daerah yang tertinggi dan berotonomi, di bawah seorang *Syukan* yang kedudukannya sama dengan Gubernur Jendral.

Struktur yang diciptakan itu dimaksudkan untuk memaksimalkan eksploitasi dan mobilisasi sumber daya hingga di tingkat pedesaan. Dengan demikian dalam kacamata Jepang terjadi peningkatan peran lembaga-lembaga politik tersebut.

Terdapat ambivalensi yang kuat dalam Undang-undang Pemerintahan daerah tersebut. Aturan yang secara prinsip harus mengatur kehidupan politik namun justru secara prinsip harus mengatur kehidupan ekonomi. Selain itu dalam pelaksanaan pemerintahan, Pangreh Praja dengan aturan itu menyandang kekuasaan langsung atas rakyat, tetapi mereka lebih terikat erat dengan kontrol kuat pemerintah pusat.

Campur tangan pemerintah Jepang terhadap korps Pangreh Praja bahkan merupakan bentuk-bentuk penetrasi politik dan depolitisasi terhadap lembaga-lembaga politik tradisional di pedesaan. Pelatihan-pelatihan dan indoktrinasi dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam kerangka membentuk konsep dan gaya pemerintahan Jepang. Sedangkan "politik imbalan dan hukuman" yang dilakukan pemerintah Jepang dalam kombinasi yang cerdik dalam bentuk pemecatan, pemindahan, pengangkatan, dan pemberian hukuman terhadap Pangreh Praja diarahkan untuk menyingkirkan orang-orang dalam pangreh Praja yang anti Jepang, bersikap kompromis terhadap Barat atau bergaya keningratan.

Pelatihan indoktrinasi politik dan moral dilaksanakan secara terstruktur dan teratur serta dilembagakan setelah tahun 1944. Dalam Asia Raya tanggal 13 Januari 1944 diberitakan bahwa pada bulan Juni 1943 di Gambir Timur Jakarta diselenggarakan kegiatan pelatihan guncho. Pelatihan tersebut diikuti oleh 83 guncho dari seluruh Jawa dan Madura, yang dilaksanakan sejak tanggal 12 Januari 1944 dan dilaksanakan selama tiga minggu (Asia Raya, 13 Januari 1944).

Sedangkan kursus pelatihan pertama untuk *soncho* dimulai tanggal 14 Juli 1944 selama sebulan (Asia Raya, 17 Juli 1944). Materi yang diberikan dalam pelatihan itu adalah (Asia Raya, 18 Januari, 1945): (1) pendidikan moral, (2) kebudayaan Jepang, (3) pemerintahan daerah, (4) politik, (5) pertanian, (6) kesehatan, (7) pendidikan, (8) gisi, (9) perekonomian rakyat, (10) transportasi, (11) peraturan-peraturan yang menyangkut pejabat pemerintah.

Dalam tatanan kehidupan politik tradisional di tingkat pedesaan, pemerintah Jepang dengan orientasi ekonominya telah melanggar batas-batas otonomi pemerintahan desa. Kepala desa bagi masyarakat merupakan simbol pengayom yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan ketentuan dan kriteria tertentu secara demokratis. Tetapi pada masa pendudukan Jepang, proses pemilihan dan pengangkatan kepala desa dilakukan melalui serang-kaian prosedur seleksi dan tes yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Hal itu dimaksudkan untuk memilih kepala desa yang mengerti administrasi pemerintahan dan sekaligus untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak menyukai pemerintahan Jepang. Dengan demikian pada masa itu kepala desa dilibatkan langsung dalam struktur pemerintahan administrasi Jepang dengan aturan-aturan yang dipaksakan.

Untuk memperlancar proses kepentingan ekonomi di pedesaan dan sekaligus mengontrol tindakan-tindakan rakyat, pemerintah Jepang membentuk lembaga baru yang dinamakan tonarigumi (rukun tetangga).

Sebagai akibat dari ketatnya kontrol pemerintah, maka kepala desa memiliki banyak tugas dan kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu adalah: (1) pemungutan pajak, (2) peningkatan standar hidup rakyat, (3) memimpin keibodan dan seinendan, (4) memilih dan mengangkat hak suara Sangikai (dewan penasehat setempat), (5) pengelolaan koperasi, akuntansi masjid, memberikan penerangan dalam hal

kesehatan, (6) menyampaikan informasi ke atas dan ke bawah (Aiko Kurasawa, 1993:453).

Disamping tugas tradisional tersebut, kepala desa memiliki kewajiban-kewajiban menjalankan: (1) tuntunan dalam meningkatkan produksi padi (pertanian), (2) pengawasan penanaman tanam-tanaman baru, (3) pengumpulan padi, (4) perekrutan *romusha*, (5) mengorganisasikan korps tenaga sukarela, (6) mengawasi *nogyo kumiai*, (7) memimpin *keibodan* sebagai komandan unit desa, (8) memimpin cabang *Hokokai* desa dan sebagainya.

Perubahan-perubahan struktural telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam kehidupan politik, pemerintahan dan sikap masyarakat terhadap lembaga politik. Dalam posisi sistem pemerintahan pendudukan, rakyat hanyalah sebagai obyek politik dan segala kepentingan politik yang dibebankan kepadanya. Dalam kalimat lain, pada saat itu masyarakat pedesaan merupakan obyek eksploitasi dan penetrasi demi kepentingan pemerintah pendudukan Jepang

Perubahan Sosial Ekonomi

Bentuk eksploitasi ekonomi yang berimplikasi terhadap perubahan sosial ekonomi secara mendasar pada masa pendudukan Jepang di Jawa ialah diberlakukannya politik penyerahan padi secara paksa. Logika politik ekonomi ini didasarkan pada kebutuhan bahan pangan yang makin meningkat bagi tentara Jepang di front-front pertempuran.

Selain itu akibat dari terputusnya komunikasi antara pemerintah Jepang dengan daerah-daerah Selatan sebagai akibat buruknya kondisi masa itu, telah menyebabkan daerah-daerah harus mencukupi sendiri kebutuhan ekonominya. Sehingga *Syu* harus mampu mengelola kebutuhan ekonominya sendiri. Apalagi kenyataan bahwa antara permintaan dan target penyetoran padi tidak sebanding. Di Karesidenan Kedu misalnya, dari bulan April 1943 sampai dengan bulan Maret 1944 dari target setoran sebanyak 54.000 ton, ternyata hanya dapat dipenuhi 25.237 ton atau hanya sekitar 46,7 % dari target. Bahkan dari April sampai dengan September 1945 dari total target 80.000 ton, hanya dipenuhi 17.464 ton atau hanya sekitar 21,8 %.

Selain disebabkan oleh target setoran yang tidak rasional, kemungkinan kedua adalah karena faktor produksinya. Pada tahun 1944 terjadi penurunan secara umum hasil panen sebanyak 20 % dibandingkan pada tahun 1937 dan tahun 1941.

Kemungkinan lain ialah faktor kesulitan pengangkutan dan buruknya tempat penyimpanan sehingga padi menjadi rusak dan membusuk.

Itulah sebabnya dalam sidang *Chuo Sangiin* pada bulan Nopember 1944 dibahas langkah-langkah untuk mengintensifkan penyerahan padi bahkan langsung ke desa-desa. Untuk itu dibentuk *nogyo kumiai* (koperasi pertanian) sebagai lembaga di pedesaan yang diharapkan dapat memaksimalkan hasil pertanian. Kepala Desa (*kucho*) bertanggungjawab terhadap target setoran hasil padi tersebut, sedangkan operasionalnya diserahkan melalui kumicho.

Proses eksploitasi ekonomi tersebut terlihat akibatnya secara mendasar pada kehidupan masyarakat pedesaan. Padahal dipahami bahwa perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani Jawa menurut James C. Scott (1989:4-20) ialah petani yang subsisten, yaitu ia sekaligus merupakan satu unit produksi dan konsumsi. Sehingga masalah yang dihadapi oleh petani ialah bagaimana dapat menghasilkan beras untuk makan sekeluarga, untuk membeli barang kebutuhan dan untuk memenuhi tagihan-tagihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dari pihak luar.

Implikasi dari penyerahan wajib tersebut ialah meningkatnya angka kematian dan menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Bahkan keadaan sosial serta tingkat kesejahteraan sosial yang sangat buruk sebagai akibat kelangkaan bahan pangan.

Angka kematian lebih tinggi dari angka kelahiran. Di Kudus misalnya angka kematian mencapai 45,0 perseribu (permil) sedangkan yang tertinggi adalah di Purworejo dan Wonosobo yang mencapai 42,7 dan 53,7 perseribu. Angka-angka tersebut telah menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang sangat buruk. Pola makan yang berubah, pola hidup yang bergeser serta tekanan-tekanan sosial ekonomi yang menghimpit menyebabkan perubahan mendasar dalam aspek-aspek fisik maupun psikologisnya.

Dalam aspek fisik nyata terlihat kemiskinan endemis yang makin meluas, kesehatan yang merosot serta angka kematian yang tinggi. Sedangkan dalam aspek non fisik terlihat kemiskinan mentalitas akibat rongrongan dan ketakutan yang tidak proporsional.

Akibatnya adalah berkembangnya kegelisahan komunal dan ketidaktentraman kultural yang makin meningkat frekuensinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadaan petani dan masyarakat pedesaan di Jawa pada masa pendudukan Jepang

berada dalam tingkat yang sangat buruk. Oleh James C. Scott disebut sebagai "*subsistence level*", yaitu tingkat pemenuhan diri sendiri. Bagi masyarakat pedesaan Jawa yang penting adalah berapa banyak yang diambil. Pemikiran yang digunakan ialah bagaimana mereka dapat sekedar bertahan hidup, dalam situasi yang makin memburuk dan suasana yang makin tak menentu kapan akan berakhir.

Perubahan Mentalitas Masyarakat

Kerangka pendudukan Jepang di Jawa selain untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi, juga untuk menciptakan landasan pasok ekonomi yang penting untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Untuk itu dalam rangka meningkatkan hasil produksi selain dilakukan melalui bidang produksi juga melalui peningkatan infrastruktur sehingga hal itu memerlukan dukungan sumber daya manusia.

Jawa memiliki surplus tenaga kerja yang dapat digunakan sebagai sumber daya potensial dan merupakan sumber tenaga kerja yang penting di Asia Tenggara (Aiko Kurasawa, 1993:124). Oleh Ricklefs, dinyatakan bahwa Jawa merupakan daerah yang secara politis paling maju, yang sumber daya utamanya adalah manusia (Ricklefs, 1992:297).

Dengan keadaan seperti itu masyarakat pedesaan Jawa merupakan sumber daya tenaga kerja yang banyak diambil untuk menangani proyek-proyek pembangunan fisik, seperti benteng-benteng pertahanan, lobang-lobang pertahanan, jembatan, pelabuhan maupun tempat-tempat penyimpanan bahan makanan. Tenaga kerja secara paksa (*romusha*) itu dipekerjakan seperti di Banten, Jakarta, Surabaya, Singapura, Philipina, Siam, dan Birma.

Perlakuan yang tidak manusiawi dari tentara Jepang terhadap *romusha* serta ketiadaan jaminan sosial serta kesejahteraan menyebabkan beribu-ribu *romusha* meninggal dengan mengenaskan dan tak kembali. Keadaan yang sangat buruk itu menghantui masyarakat desa yang harus juga mengirimkan penduduknya untuk berangkat menjadi *romusha*. Sehingga berkembang menjadi ketakutan kolektif dan kegelisahan komunal.

Masyarakat desa tidak berani untuk menentang perintah tentara Jepang di satu sisi namun tidak menginginkan berangkat sebagai tenaga paksa Jepang. Akhirnya terjadi kekerdilan mental sebagai akibat penetrasi politik yang sangat keras. Tekanan-

tekanan politik, ekonomi, sosial maupun kultural saat itu telah menciptakan kondisi masyarakat pedesaan yang diliputi kecemasan dan ketakutan.

Praktek-praktek romusha merupakan bentuk yang sangat nyata dari praktek eksploitasi tenaga kerja dan manusia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Hal itu sekaligus merupakan suatu bentuk pemiskinan mentalitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian telah terjadi perubahan mentalitas masyarakat di Indonesia yang sangat mendasar pada masa pendudukan Jepang sebagai akibat penetrasi dan sistem pendudukan yang bersifat militer tersebut.

Barangkali tidak ada yang dapat diambil keuntungan dari kasus-kasus romusha bagi masyarakat pedesaan Jawa waktu itu. Secara kongkrit tampak adalah proses penetrasi dan eksploitasi sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja. Dengan kondisi seperti itu dapat dipahami seberapa tinggi kualitas sumberdaya manusia pedesaan Jawa waktu itu.

Demikianlah paparan tentang materi dasar, selanjutnya agar Anda dapat lebih mudah untuk mengingat, memahami, dan mendalami keterkaitan tersebut, kerjakanlah latihan-latihan berikut ini.

D. Rangkuman

Setelah saudara mempelajari dan membaca modul di atas dapat disarikan materi sebagai berikut :

1. Pendudukan Jepang di Indonesia dapat disebut sebagai garis pemisah dalam sejarah Indonesia modern, yaitu sebuah garis yang memecahkan hubungan sosial tradisional pada tingkat lokal serta menyiapkan kondisi bagi terciptanya latar belakang revolusi nasional dan sosial tahun 1945-1949. Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian politik imperialism Jepang di Asia Tenggara. Kedatangannya di Indonesia merupakan bagian dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia. Politik imperialisme Jepang di Indonesia terlihat berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, serta mengupayakan mobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Berdasarkan orientasi itulah, Jepang secara ekstensif melakukan eksploitasi ekonomi, penetrasi politik, dan tekanan kultural pada masyarakat Indonesia hingga tingkat pedesaan.

2. Dalam menghadapi penjajahan Jepang, para pejuang Indonesia memiliki strategi dan cara-cara yang tidak sama. Ada yang mau bekerja sama sambil berjuang untuk kemerdekaan, tetapi ada yang menolak kerjasama. Disamping golongan yang mau bekerja sama dengan pemerintah, ada beberapa kelompok pejuang untuk mencapai kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Dapat dirumuskan seperti Kelompok Syahrir, Kelompok Amir Syarifudin. Golongan Persatuan Mahasiswa, Kelompok Sukarni, Golongan Kaigun, Pemuda Menteng. Awal tahun 1943 usaha kearah mobilisasi mulai memberi prioritas tinggi terhadap gerakan-gerakan pemuda. Korps Pemuda yang bersifat semi militer (Seinendan) dibentuk pada bulan April 1943. Korps ini mempunyai cabang-cabang sampai ke desa-desa, meskipun yang aktif terutama di daerah perkotaan. Kemudian disusul dengan pembentukan Korps Kewaspadaan (Keibodan) sebagai organisasi polisi, kebakaran, dan serangan udara pembantu. Demikian juga dibentuk Pasukan Pembantu (Heiho) sebagai bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang di Indonesia. Kemudian dibentuk Jawa Hokokai (kebangkitan Rakyat Jawa) pada 1 maret 1944. Pimpinan tertinggi adalah Gunseikan, sedang Ir. Sukarno menjabat sebagai Komon (penasehat). Jawa Hokokai merupakan hasil peleburan dari Fujinkai (perkumpulan Kaum Wanita), Masyumi (Majelis Sura Muslim Indonesia), Kakyo Sokai (Perhimpunan Cina); Taiku Kai (Perkumpulan Oleh Raga); Keimin Bunka Syidosyo (Himpunan Kebudayaan), dan sebagainya.
3. Pendudukan Jepang telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar pada masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya di Jawa. Tekanan-tekanan yang bersifat politis terhadap lembaga-lembaga politik tradisional maupun lembaga politik legal telah menghancurkan tatanan sistem politik di pedesaan. Perubahan akibat pendudukan Jepang terjadi pada aspek kehidupan politik, Sosial budaya dan Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Frederick, William H. 1986. "Pendudukan Jepang", dalam Colin Wild dan Peter Carey. *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kahin, George McTurnan. 1980. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Terj. Ismail bin Muhammad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pengajaran Malaysia.
- Korver, A.P.E. 1985. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*. Jakarta: Grafitipers.
- Moedjanto, G. 1992. *Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Notosusanto, Nugroho. 1979. *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Poesponegoro, Mawarti Djoned dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. 1981. *A History Of Modern Indonesia*. Terj. Drs. Dharmono Hardjowidjono. 1992. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Rose, Mavis. 1987. *Indonesia Merdeka. Biografi Politik Mohammad Hatta*. Terj. Hermawan Sulisty. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Scherer, Savitri Prastiti. 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan Pemikiran-Pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 1979. *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi*. Jakarta: Idayu.
- Suyatno. 1988. "Pemberontakan Anak Buah Kapal Zeven Provincien Tahun 1933". *Prisma*. Jakarta: LP3ES
- Utomo, Cahyo Budi. 1995. *Dinamika pergerakan Kebangsaan Indonesia. Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Wild, Colin dan Peter Carey (Peny.). 1986. *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN MAKNANYA BAGI BANGSA INDONESIA

Cahyo Budi Utomo

A. Persiapan Menuju Kemerdekaan

Janji Kemerdekaan

Memasuki tahun 1944 kekuatan bala tentara Jepang dalam perang dengan Sekutu mulai nampak kemundurannya dan posisinya semakin terjepit. Dalam bulan Juli 1944, kepulauan Saipan yang letaknya sangat dekat dengan kepulauan Jepang jatuh ke tangan Amerika Serikat. Kenyataan ini sangat mengguncangkan masyarakat Jepang. Situasi angkatan perang Jepang ini semakin memburuk dalam bulan Agustus tahun 1944. Keadaan ini nampak pada moril masyarakat mulai merosot dan produksi peralatan perangnya yang semakin mundur, sehingga persediaan senjata dan amunisi berkurang, ditambah lagi dengan timbulnya soal-soal logistik karena hilangnya sejumlah besar kapal angkut dan kapal perang. Keadaan yang tidak menguntungkan ini menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944. Sebagai gantinya kemudian diangkat Jenderal Kuniaki Koiso sebagai Perdana Menteri yang memimpin Kabinet Baru (Kabinet Koiso).

Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh Koiso dalam rangka tetap mempertahankan pengaruh Jepang di daerah-daerah yang didudukinya adalah mengeluarkan pernyataan tentang "janji kemerdekaan di kemudian hari". Dengan cara demikian pemerintah Jepang berharap bahwa rakyat di daerah pendudukan akan dengan senang hati mempertahankan negerinya itu jika kelak Sekutu datang. Indonesia sebagai daerah pendudukan kemudian diberi janji kemerdekaan di kelak kemudian hari pada tanggal 7 September 1944.

Pada tahun 1944 itu pula, dengan jatuhnya Pulau Saipan dan dipukul mundurnya tentara Jepang oleh angkatan perang Sekutu yang datang dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshal, maka seluruh garis pertahanan angkatan perang Jepang di Pasifik mulai runtuh. Ini berarti kekalahan Jepang dalam perang

besar itu sudah diambang pintu. Di wilayah Indonesia angkatan perang Jepang juga sudah mulai kewalahan ketika menghadapi serangan-serangan Sekutu atas kota-kota seperti Ambon, Makasar, Manado, dan Surabaya. Bahkan tentara Serikat dengan cukup berhasil telah dapat menduduki daerah-daerah minyak seperti di Tarakan dan Balikpapan.

Menghadapi situasi yang sangat kritis tersebut, maka pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada mencoba merealisasikan janji kemerdekaan di kemudian hari dengan mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan pelbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Pengangkatan pengurus badan ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945, dan yang diangkat sebagai Ketua (Kaico) adalah dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan Ketua Muda (Fuku Kaico) Icibangase.

Tanggal 28 Mei 1945 diselenggarakan upacara peresmian BPUPKI dengan mengambil tempat di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ikut hadir dalam upacara peresmian tersebut adalah Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano. Segera setelah peresmiannya ini, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang yang pertama ini yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, ternyata ada tiga pembicara yang mencoba memenuhi permintaan Ketua, yakni secara khusus membicarakan mengenai dasar negara. Ketiga pembicara tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno. Dengan selesainya sidang pada tanggal 1 Juni 1945, maka berakhirilah masa persidangan yang pertama dari BPUPKI. Selanjutnya dibentuklah panitia kecil yang dipimpin oleh Ir. Sukarno dengan anggota lainnya yaitu Drs. Muhammad Hatta, Sutardjohadikusumo, Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Kesemuanya berjumlah delapan orang dan mereka bertugas menampung saran-saran, usul-usul dan konsepsi-konsepsi para anggota yang oleh Ketua telah diminta untuk diserahkan melalui Sekretariat.

Sidang BPUPKI yang kedua dilakukan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Dalam sidang tersebut Ir. Sukarno melaporkan bahwa Panitia Kecil pada tanggal 22 Juni telah mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Pertemuan inilah yang kemudian membentuk sebuah panitia kecil lain yang berjumlah 9 orang. Panitia ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan terdiri dari Ir. Sukarno, Drs. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wachid Hasjim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso. Mereka menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani. Oleh Mr. Muhammad Yamin hasil Panitia Sembilan itu kemudian diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Dalam sidang BPUPKI yang kedua juga dibahas tentang rancangan undang-undang dasar, termasuk pembukaan atau preambulnya oleh sebuah Panitia Perancang Undang Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno. Panitia Perancang Undang Undang Dasar ini kemudian membentuk "Panitia Kecil Perancang Undang Undang Dasar" yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo. Setelah bekerja dengan keras, maka pada tanggal 14 Juli 1945 oleh Ketua Panitia Perancang Undang Undang Dasar dilaporkan tiga hasil, yakni: (1) Pernyataan Indonesia Merdeka, (2) Pembukaan Undang Undang Dasar, dan (3) Undang Undang Dasarnya sendiri (batang tubuhnya).

Setelah tugas BPUPKI dipandang selesai, dibentuklah sebagai gantinya yaitu Dokuritsu Junbi Iinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Indonesia. Peresmian pembentukan badan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945, sesuai dengan keputusan Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara. Para anggota PPKI ini diijinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi dengan syarat harus memperhatikan hal-hal: (1) menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena itu harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan dalam perang Asia Timur Raya, (2) Negara Indonesia itu merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya (Marwati Djonet, 1984: 77).

Pada tanggal 8 Agustus 1945, Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalat (Kahin, 1980: 158). Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka berangkat menuju ke markas besar Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Dalat pada tanggal 12 Agustus 1945 itu, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada ketiga pemimpin tersebut bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk PPKI. Pelaksanaanya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (Hatta, 1970: 18).

Anggota PPKI berjumlah duapuluh satu orang yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai daerah di Indonesia. Anggota-anggota PPKI tersebut adalah: Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dr. Radjiman Wediodiningrat, Oto Iskandardinata, Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Surjohadimidjojo, Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, R.P. Suroso, Prof. Dr. Mr. Supomo, Abdul Kadir, Purubojo, dr. Amir, Mr. Teuku Moh. Hasan, Mr. Abdul Abas, Dr. Ratu Langie, Andi Pangeran, Hamidhan, Mr. I Gusti Ketut Pudja, Mr. J. Latuharhary, dan Drs. Yap Tjwan Bing. Sebagai ketuanya adalah Ir. Sukarno, sedangkan wakil ketuanya adalah Drs. Mohammad Hatta. Anggota PPKI yang berjumlah duapuluh satu ini kemudian oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa seijin dari pemerintah pendudukan Jepang kemudian ditambah dengan enam orang lagi. Enam anggota tambahannya itu adalah: Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Ahmad Subardjo.

Kekalahan Jepang dan Kekosongan Kekuasaan

Tidak lama setelah serbuan bala tentara Jepang secara mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat yang seakan-akan lumpuh itu segera bangkit. Dalam kenyataannya Jepang tidak dapat melumpuhkan Amerika Serikat secara total, bahkan Amerika bangkit dan menjadi musuh yang paling berat bagi Jepang. Melihat fenomena ini banyak pihak menjadi bertanya-tanya apakah serangan Jepang terhadap Pearl Harbour itu bukan langkah yang keliru (Lihat Onghokham, 1989: 163). Lebih-lebih setelah lima bulan Perang Asia Timur Raya berkorbar, Amerika Serikat telah dapat memukul balik

Jepang. Dalam perang laut Karang (4 Mei 1942) dan disusul dengan perang di Guadalcanal (6 Nopember 1942), Jepang secara berturut-turut menderita kekalahan. Kekalahan yang paling besar dialami Jepang dalam pertempuran laut di dekat Kepulauan Bismarck (1 Maret 1943). Di sinilah Laksamana Yamamoto, pelaksana dan otak serangan atas Pearl Harbour, gugur. Kekalahan ini setidaknya-tidaknya telah menggoncangkan moral bala tentara Jepang di Asia Tenggara.

Untuk mempercepat peperangan ini, maka pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama di atas kota Hiroshima. Tiga hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan lagi di atas Nagasaki. Akibat bom atom itu bukan saja membawa kerugian material, karena hancurnya kedua kota tersebut dan banyaknya penduduk yang menemui ajalnya, tetapi secara politis telah mempersulit kedudukan Kaisar Hirohito, karena harus dapat menghentikan peperangan secepatnya guna menghindari adanya korban yang lebih banyak lagi. Hal ini berarti bahwa Jepang harus secepatnya menyerah kepada Sekutu atau Serikat. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Menurut rencana, dengan mengambil tempat di atas geladak kapal perang Amerika Serikat "Missouri" yang berlabuh di teluk Tokyo akan ditandatangani kapitulasi penyerahan Jepang antara Jenderal Douglas Mc Arthur dengan Hirohito pada tanggal 2 September 1945.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan itu, Sekutu mulai mengadakan perlucutan senjata, memulangkan tentara Jepang dan mengadili penjahat perang. Tugas itu di Indonesia dilaksanakan oleh tentara Inggris. Mengapa tentara Inggris dan bukan tentara Amerika Serikat? Hal ini memang dimungkinkan karena pada akhir tahun 1943 ditetapkan bahwa Pulau Sumatera masuk dalam *South East Asia Command* (SEAC), di bawah Admiral Inggris, Lord Louis Mountbatten yang pada waktu itu bermarkaskan di India, sedangkan kepulauan lain masuk dalam *South West Pasific Command* di bawah pimpinan Jenderal Amerika Serikat Douglas Mc Arthur, yang berkedudukan di Australia.

Sementara itu pemerintah *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang bermarkas di Australia telah merencanakan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia dengan cara mengekor pasukan Amerika Serikat yang akan menduduki bekas Hindia Belanda. Namun sebelum rencana ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, terjadilah perubahan strategi dari pucuk pimpinan Sekutu.

Terjadinya perubahan strategi tersebut, membawa akibat besar dalam situasi di Indonesia. Dalam Konferensi Postdam antara Truman (Presiden Amerika Serikat), Stalin (Perdana Menteri Uni Soviet) dan Attlee (Perdana Menteri Inggris) yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 1945 ditetapkan bahwa mereka akan mengembalikan perdamaian secepat mungkin. Dalam konferensi tersebut juga diberitahukan kepada Lord Louis Mountbatten sebagai Panglima *South East Asia Command* (SEAC) bahwa kepadanya diserahkan pendudukan Indo China, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, di samping Sumatera yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas itu harus dilaksanakan, tanpa menunggu jatuhnya Singapura.

Perubahan strategi tersebut sebenarnya karena dalam kenyataannya Mac Arthur merasa khawatir kalau dalam perlombaannya dengan Uni Soviet untuk menyerbu Jepang, Amerika Serikat akan ketinggalan karena sebagian tentaranya harus menduduki bekas wilayah Hindia Belanda. Tidak mau kedahuluan, maka Amerika Serikat mengubah rencana. Bagian yang seharusnya menjadi tugas South West Pacific Command di bawah pimpinan Jenderal Amerika Serikat Douglas Mac Arthur, yang berkedudukan di Australia, kemudian dilimpahkan kepada South East Asia Command di bawah komando Louis Mountbatten.

Perubahan strategi dalam Konferensi Postdam ini, menyebabkan kacaunya kedudukan Belanda (NICA). Belanda yang selama ini telah menyiapkan diri di belakang Amerika Serikat, harus secepatnya mengalihkan kedudukannya di belakang Inggris yang berpangkalan di India. Inggris sendiri harus mengamankan daerah yang lebih luas dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar pula. Keadaan ini menyebabkan kacaunya strategi Inggris untuk menduduki Indonesia, oleh sebab itu tidak mengherankan kalau mereka akhirnya terlambat datang ke Indonesia. Pada kenyataannya tentara Inggris baru dapat masuk ke Indonesia secara resmi pada tanggal 29 September 1945 setelah dibentuknya *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) yang sebelumnya telah mengadakan penjajagan-penjajagan. Kenyataan ini menimbulkan kekosongan kekuatan/kekuasaan (*vacuum of power*) di Indonesia. Kesempatan ini tentu saja tidak disia-siakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

B. Perbedaan Pendapat antar Kelompok

Sejak berdirinya organisasi pergerakan nasional pertama, yakni Boedi Oetomo hingga masa pendudukan Jepang, kaum pergerakan terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok tua dan kelompok muda. Pembagian dikotomis itu ternyata tidak hanya sekedar pembagian askriptif berdasarkan kriteria umur belaka tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam, yakni perbedaan psikologis, sosiologis, dan politis. Secara psikologis golongan tua lebih bersikap hati-hati, dan penuh dengan perhitungan dalam bertindak, sehingga di mata anak muda dianggap kurang cepat bertindak. Sementara itu golongan muda sebaliknya sering bertindak *hantam kromo*, kurang berfikir namun cepat bertindak, dan sebagainya yang menurut pandangan orang tua disebutnya sebagai ceroboh. Secara sosiologis mereka juga terbagi ke dalam "duniannya orang tua" dan "duniannya anak muda atau pemuda". Dunia orang tua, oleh karena umumnya telah bekerja telah memiliki anak isteri atau keluarga, dan secara umum hidupnya telah mapan, mereka terlibat dalam struktur, dan ruang geraknya sangat ditentukan oleh keinginan struktural. Sementara itu anak muda umumnya belum memiliki pekerjaan yang tetap, belum berkeluarga, sehingga hidupnya menjadi lebih bebas dan tindakannya tidak selalu diatur oleh tatanan-tatanan dalam struktur sosial yang mengikatnya. Mereka umumnya cenderung lebih bebas berbuat ketimbang kelompok tua. Sementara itu secara politis kelompok tua umumnya bersifat moderat, sedangkan kelompok muda cenderung bersifat revolusioner.

Terpisahnya dua kelompok itu dapat memiliki makna positif maupun negatif dalam perkembangan masyarakat. Makna negatif akan muncul apabila salah satu atau kedua kelompok ini saling memaksakan kemauannya. Keterpisahan mereka akan bermakna positif apabila mereka saling menyadari dunianya masing-masing dan berusaha mengakomodasikan kehendaknya demi kemajuan masyarakat dan integrasi bangsanya.

Dalam peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia dikotomi antara kedua kelompok ini ternyata muncul dan merebak ke permukaan hingga sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Ketegangan itu muncul sebagai akibat perbedaan pandangan tentang saat diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketegangan tersebut bermula dari berita tentang menyerahnya Jepang pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat (*unconditional surrender*). Hal ini diumumkan oleh Tenno Heika melalui radio. Kejadian itu jelas mengakibatkan pemerintah Jepang tidak dapat meneruskan janji atau usahanya mengenai kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu soal terus atau tidaknya usaha mengenai kemerdekaan Indonesia tergantung sepenuhnya kepada para pemimpin bangsa Indonesia.

Sementara itu Sutan Sjahrir sebagai seorang yang mewakili dan selalu berhubungan dengan pemuda merasa gelisah karena telah mendengar melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan memutuskan untuk menyerah pada Sekutu. Sjahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan oleh Sukarno-Hatta tanpa harus menunggu janji Jepang. Itulah sebabnya ketika mendengar kepulangan Bung Karno, Bung Hatta dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat dari Dalat (Saigon), maka ia segera datang ke rumah Bung Hatta. Adapun maksud kedatangannya adalah meminta kepada Bung Hatta untuk memproklamlirkan kemerdekaan Indonesia, tanpa harus menunggu dari pemerintahan Jepang karena Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Namun Bung Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sutan Sjahrir dan untuk tidak mengecewakan, maka diajaknya ke rumah Bung Karno. Oleh Bung Hatta dijelaskan maksud kedatangan Sutan Sjahrir, namun Bung Karno belum dapat menerima maksud Sutan Sjahrir dengan alasan bahwa Bung Karno hanya bersedia melaksanakan proklamasi, jika telah diadakan pertemuan dengan anggota-anggota PPKI yang lain. Dengan demikian tidak menyimpang dari rencana sebelumnya yang telah disetujui oleh pemerintah Jepang. Selain itu Sukarno akan mencoba dulu untuk mengecek kebenaran berita kekalahan Jepang tersebut sebelum mengadakan tindakan yang menentukan demi masa depan bangsanya.

Sikap Bung Karno dan Bung Hatta tersebut memang cukup beralasan karena jika proklamasi dilaksanakan di luar PPKI, maka Negara Indonesia Merdeka ini harus dipertahankan terhadap Sekutu (NICA) yang akan mendarat di Indonesia dan sekaligus tentara Jepang yang ingin mempertahankan jajahannya atas Indonesia, untuk menjaga *status quo* sebelum kedatangan Sekutu. Jadi dengan demikian Negara Indonesia Merdeka harus dipertahankan terhadap dua lawan sekaligus. Hal itu akan berlainan,

jika proklamasi dilaksanakan di dalam konteks PPKI, karena Jepang tidak akan memusuhinya.

Sutan Sjahrir kemudian pergi ke Menteng Raya (markas para pemuda) dan di sana ia bertemu dengan para pemuda seperti: Sukarni, BM Diah, Sayuti Melik dan lain-lain. Kemudian dilaporkan apa yang baru terjadi di kediaman Bung Hatta dan Bung Karno. Mendengar berita itu kelompok muda menghendaki agar Sukarno, Hatta (golongan tua) segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurut golongan muda, tidak seharusnya para pejuang kemerdekaan Indonesia menunggu-nunggu berita resmi dari Pemerintah Pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia harus segera mengambil inisiatifnya sendiri untuk menentukan strategi mencapai kemerdekaan.

Golongan muda ini kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 20.00 Wib). Yang hadir antara lain Chaerul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Rapat itu dipimpin oleh Chaerul Saleh dengan menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus dan sebaliknya perlu mengadakan rundingan dengan Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi (Marwati Djonet, 1984: 80).

Setelah rapat dan mengadakan musyawarah, maka diambil keputusan untuk mendesak Bung Karno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya sehingga lepas dari Jepang. Yang mendapat kepercayaan dari teman-temanya untuk menemui Bung Karno adalah Wikana dan Darwis.

Oleh Wikana dan Darwis, hasil keputusan itu disampaikan kepada Bung Karno jam 22.30 waktu Jawa jaman Jepang (22.00 wib) di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur, No 56 Jakarta. Namun sampai saat itu Bung Karno belum bersedia melepaskan keterikatannya dengan Jepang, yang berarti belum bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa PPKI. Di sini terjadi perdebatan sengit antara Bung Karno dengan Wikana dan Darwis. Dalam perdebatan itu Wikana menuntut agar proklamasi dikumandangkan oleh Sukarno pada keesokan harinya. Tuntutan itu diikuti dengan ancaman bahwa jika tidak segera diproklamasikan kemerdekaan akan terjadi

pertumpahan darah. Mendengar tekanan ini Sukarno menjadi marah dan melontarkan kata-kata yang kurang lebih sebagai berikut: "Ini leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI" (Adam Malik, 1962: 35). Jawaban Bung Karno itu di luar dugaan dan sangat mengejutkan. Selain itu Bung Karno juga mempersilahkan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa dirinya (golongan tua). Meskipun demikian para pemuda tidak berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa Bung Karno dan Bung Hatta karena khawatir apa yang dilakukan tidak mendapat dukungan dari rakyat.

Peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan antara kelompok tua dengan kelompok muda yang memiliki sifat, karakter, cara bergerak, dan dunianya sendiri-sendiri. Perbedaan pendapat itu tidak hanya berhenti pada adu argumentasi, tetapi juga sudah mengarah pada tindakan pemaksaan dari golongan muda terhadap golongan tua. Tentu saja semua itu demi kemerdekaan Indonesia. Melihat sikap Sukarno itu, maka para pemuda berdasarkan rapatnya yang terakhir pada pukul 00.30 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 24.00 WIB) tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Cikini No 47, Jakarta, akan menculik Sukarno dan Hatta untuk di bawa ke luar kota. Keputusan tersebut diambil dalam rangka untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh dari segala siasat Jepang. Di sinilah nampak sekali bahwa kebersamaan/persatuan sangat diperlukan dan hal ini sudah diperlihatkan oleh para pemuda yang tidak bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan pertimbangan bahwa apa yang dilaksanakan tanpa kebersamaan tidak akan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, yang berarti akan mendatangkan perpecahan.

Dalam rangka menjauhkan atau "mengamankan" Ir Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dari segala pengaruh Jepang, maka penculikan Sukarno Hatta itu akhirnya dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa jaman Jepang atau jam 06.00 waktu Jepang atau pukul 04.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). Kedua tokoh ini kemudian diamankan dengan dibawa ke Rengasdengklok, sebuah kota Kawedanan di sebelah Jakarta Timur. Para pemuda yang membawa kedua tokoh tersebut terdiri dari Sukarni, Winoto Danu Asmoro, Abdurrahman dan Yusuf Kunto.

Sesampainya di Rengasdengklok, maka untuk menjaga keselamatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diserahkan kepada Cudanco Subeno.

Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Sukarno-Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota Peta Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil, yakni masuk 15 km ke arah dalam dari Kedung Gede, Karawang pada jalan raya Jakarta-Cirebon. Dengan demikian akan dapat dilakukan deteksi dengan mudah terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, baik yang datang dari arah Jakarta, maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah (Marwati, 1984).

Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang, juga agar keduanya mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala kaitan dengan Jepang. Pada dasarnya Sukarno dan Mohammad Hatta tidak mau ditekan oleh anak-anak muda itu, sehingga mereka tidak mau memproklamasikan kemerdekaan dengan pertimbangan karena adanya tekanan tersebut. Dalam suatu pembicaraannya dengan Shodanco Singgih, Sukarno memang menyatakan kesediannya untuk mengadakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Berdasarkan pemikiran Sukarno itu, Singgih pada tengah hari itu juga kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi kepada kawan-kawan pemuda lainnya.

Sementara itu di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua, yakni Ahkmad Subardjo dengan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta, yang mana Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda dan Subardjo yang diikuti sekretaris pribadinya, mbah Diro menuju ke Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno. Rombongan tiba pada pukul 17.30 WIB. Akhmad Subardjo memberi jaminan dengan taruhan nyawa kepada para pemuda bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Akhirnya Cudanco Subeno bersedia melepaskan Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta.

C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Mendengar terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda sampai terjadinya peristiwa penculikan oleh golongan muda, Mr. Achmad Subardjo ikut prihatin. Sebagai orang Indonesia ia merasa terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan secepat mungkin. Namun sebelumnya perlu mempertemukan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan pemuda. Untuk itu maka Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta harus kembali lebih dahulu dari Rengasdengklok ke Jakarta.

Setelah mendapat persetujuan dari para pemuda, maka rombongan yang terdiri dari Mr. Achmad Soebardjo, Sudiro (Mbah Diro) dan Yusuf Kunto segera berangkat menuju ke Rengasdengklok, tempat di mana Soekarno dan Mohammad Hatta diamankan oleh pemuda. Rombongan tiba di Rengasdengklok pada jam 19.30 (waktu Tokyo) atau 18.00 (waktu Jawa Jepang) atau 17.30 WIB dan bermaksud untuk menjemput dan segera membawa Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta pulang ke Jakarta. Perlu ditambahkan bahwa di samping Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta ikut serta adalah Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Pada jam 01.00 (waktu Tokyo) atau 23.30 (waktu Jawa Jepang) atau 23.00 WIB rombongan yang membawa Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta itu tiba di Jakarta. Sementara itu Drs. Mohammad Hatta singgah sebentar ke rumahnya di Jl. Diponegoro 57, dan selanjutnya rombongan menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol No. 1.

Di tempat itulah pemuda-pemuda Indonesia dan golongan tua berkumpul menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi itu dirumuskan oleh tiga orang pimpinan golongan tua yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Achmad Subardjo yang disaksikan oleh tiga orang pemuda yaitu Sukarni, B.M. Diah, dan Sudiro serta beberapa orang Jepang. Penulis klad naskah proklamasi itu ialah Ir. Soekarno, sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Mr. Achmad Subardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah naskah proklamasi itu selesai ditulis dalam klad, maka kemudian Ir. Soekarno membacakannya di hadapan mereka yang hadir pada rapat di rumah Laksamana Maeda itu.

Sekarang timbulah masalah siapakah yang menandatangani naskah proklamasi itu. Ir. Soekarno menyarankan agar semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku "Wakil-wakil Bangsa Indonesia". Saran itu mendapat tantangan

dari para pemuda. Kemudian Sukarni selaku salah seorang pimpinan pemuda mengusulkan, agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Usul itu diterima dengan suara bulat.

Selanjutnya Ir. Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik klad itu, dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada tiga perubahan, yakni kata "tempoh" diganti menjadi "tempo", sedangkan bagian akhir "Wakil-wakil bangsa Indonesia" diganti dengan "Atas nama bangsa Indonesia". Cara menulis tanggal diubah sedikit menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05". Naskah yang sudah selesai diketik itu kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di rumah itu juga. Bunyi naskah itu sebagaimana disalin oleh Nugroho Notosusanto, 1985) selengkapnya adalah sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan
tjara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno/Hatta
(tanda tangan Soekarno)
(tanda tangan Hatta)

Menurut rencana pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun karena sesuatu hal rencana itu tidak dapat dilaksanakan dan akhirnya pada jam 12.00 (waktu Tokyo) atau 10.30 (waktu Jawa Jepang) atau jam 10.00 WIB teks tersebut di atas dibacakan oleh Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Adapun jalannya upacara adalah sebagai berikut:

- a. Ir. Soekarno tampil ke muka micropone satu-satunya untuk membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum teks proklamasi kemerdekaan dibacakan didahului dengan pidato pendahuluan yang singkat oleh Soekarno. Isi pidato Soekarno pada hari Proklamasi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Saudara-saudara sekalian!

Saya sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombang aksi kita untuk

mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju kearah cita-cita.

Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam jaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri.

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan
tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno/Hatta

Demikianlah, saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka!

Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah-air kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi.

Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu!”

(Dikutip dari Osman Raliby. 1953. Documenta Historica I. h. 13).

- b. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan oleh S. Suhud dan Cudanco Latief Hendraningrat. Bendera kemudian dinaikkan secara perlahan-lahan dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh para hadirin secara spontan (Marwati Djonet, 1984: 92).

Peristiwa besar tersebut hanya berlangsung lebih kurang satu jam lamanya. Namun demikian pengaruhnya besar sekali, sebab peristiwa tersebut telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya sebagai tanda bahwa sejak saat itu bangsa

Indonesia telah merdeka, tetapi di sisi lain juga merupakan detik pengebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan bagi tertib hukum nasional, suatu tertib hukum Indonesia.

Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya dan dengan didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat telah mencapai titik kulminasinya pada detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan salah satu sarana untuk merealisasikan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, serta untuk ikut membentuk "dunia baru" yang damai dan abadi, bebas dari segala penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa lain.

Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, maka secepatnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera bersidang untuk mengesahkan: (a). Pembukaan UUD 1945, dan (b). UUD 1945, serta (c). Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Sidang dilanjutkan pada hari berikutnya, yaitu tanggal 19 Agustus 1945. Dari sidang hari kedua ini telah menghasilkan beberapa keputusan penting tentang: (a) pembagian wilayah Republik Indonesia yang terbagi atas 8 (delapan) propinsi beserta para calon gubernurnya, (b) adanya Komite Nasional (Daerah). Selain itu rapat juga memutuskan adanya 12 (duabelas) departemen dan satu menteri negara.

D. Makna Proklamasi

Menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalamnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberi tahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar, bahwa pada saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari penjajahan. Kepada bangsa lain kita beritahukan bahwa kemerdekaan kita tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dihalang-halangi. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah di proklamasikannya itu, demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang baru didirikan tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat pertama pada naskah proklamasi yang berbunyi: "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Kalimat tersebut merupakan pernyataan, sedangkan kalimat kedua

merupakan amanat; seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut yaitu bahwa: "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya".

Kalimat dalam naskah proklamasi tersebut sangat singkat, hanya terdiri atas dua kalimat atau alinea, namun amat jelas, mengingat pembuatannya dilakukan dalam suasana eksplosif dan harus segera selesai secara cepat pula. Hal ini justru menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran dari para pembuatnya pada waktu itu.

Dalam kalimat kedua itu dikandung maksud agar pemindahan atau perebutan kekuasaan pemerintahan, kekuasaan atas lembaga-lembaga negara, kekuasaan di bidang senjata dan lain-lain hendaknya kita lakukan dengan hati-hati, penuh perhitungan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah secara besar-besaran. Namun tugas itu semua hendaknya dilakukan secepatnya sebelum tentara Sekutu mendarat di Indonesia, untuk menerima penyerahan Indonesia dari tangan Jepang. Dan secara nyata, sebelum tentara Sekutu yaitu AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) tiba bangsa Indonesia sudah selesai menjalankan amanat proklamasi tersebut, sehingga kedatangan Sekutu tanggal 29 September 1945 telah menyaksikan berdirinya suatu negara Republik Indonesia yang merdeka. Hal itulah yang mendorong Panglima Pasukan Sekutu untuk Indonesia (AFNEI), Letnan Jendral Sir Philip Christison memberikan pernyataan pada tanggal 1 Oktober 1945, yang dapat dipandang sebagai pengakuan secara de facto terhadap pemerintahan Republik Indonesia.

Makna atau arti penting dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang dari berbagai segi. Apabila ditelaah, maka Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu mengandung beberapa aspek: (1) dari sudut Ilmu Hukum, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga digantikan dengan tata hukum nasional (Indonesia). (2) dari sudut politik-ideologis, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan Negara Proklamasi Republik Indonesia yang bebas, merdeka dan berdaulat penuh.

Mr. Muhammad Yamin (1959) dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain mengatakan Proklamasi Kemerdekaan ialah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan dan kebahagiaan rakyat. Proklamasi menjadi dasar untuk meruntuhkan segala hal yang mendukung kolonialisme, imperialisme dan selain itu proklamasi adalah dasar untuk membangun segala hal yang berhubungan langsung dengan kemerdekaan nasional. Peraturan negara sejak 17 Agustus 1945 bersumber kepada kemerdekaan. Kemerdekaan itu sendiri dipancarkan oleh proklamasi. Jadi proklamasi kemerdekaan adalah sumber daripada segala peraturan hukum nasional yakni UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan menjadi dasar peraturan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan rakyat tersebut telah mengorbankan harta benda, darah dan jiwa yang berlangsung sudah sejak berabad-abad lamanya untuk membangun persatuan dan kesatuan dan merebut kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah. Proklamasi 17 Agustus 1945 juga merupakan mercusuar yang menerangi dan menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi dan motivasi dalam perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan.

Pada akhirnya, Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bertujuan untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Agar kita bahagia, antara lain harus ada kesamaan di antara kita semua meliputi berbagai bidang misalnya bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sastra kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain.

Dengan berhasil diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka bangsa dan negara Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara *de facto* maupun secara *de jure*. Dalam peristiwa ini memang kadang-kadang terjadi permasalahan. Sejak kapan negara Indonesia berdiri, tanggal 17 ataukah 18 Agustus 1945, mengingat pengesahan UUD 1945 dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam hal ini kita bukan menganut teori hukum murni, melainkan teori keputusan

yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai bukti dapat dikutip kembali pidato Bung Karno dalam pidato proklamasinya antara lain menyatakan bahwa: "Kita sekarang telah merdeka. Tidak satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi Insya' Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Adapun yang bertugas membentuk negara Indonesia adalah PPKI. Hal itu terbukti dari pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: "PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia".

E. Rangkuman

Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan modul tentang Proklamasi Kemerdekaan dan Maknanya Bagi Bangsa Indonesia. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dalam modul ini adalah sebagai berikut.

1. Memasuki tahun 1944 kekuatan bala tentara Jepang dalam perang dengan Sekutu mulai nampak kemundurannya dan posisinya semakin terjepit. Menghadapi situasi yang sangat kritis tersebut, maka pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada mencoba merealisasikan janji kemerdekaan di kemudian hari dengan mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
2. Sejak berdirinya organisasi pergerakan nasional pertama, yakni Boedi Oetomo hingga masa pendudukan Jepang, kaum pergerakan terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok tua dan kelompok muda. Dalam rangka menjauhkan atau "mengamankan" Ir Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dari segala pengaruh Jepang, maka penculikan Sukarno Hatta itu akhirnya dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh kelompok muda. Peristiwa ini sering disebut Peristiwa Rengasdengklok.
3. Setelah mendapat persetujuan dari para pemuda, maka rombongan yang terdiri dari Mr. Achmad Soebardjo, Sudiro (Mbah Diro) dan Yusuf Kunto segera berangkat menuju ke Rengasdengklok, tempat di mana Soekarno dan Mohammad Hatta diamankan oleh pemuda. Rombongan menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol No. 1. Di tempat itulah pemuda-pemuda Indonesia dan

golongan tua berkumpul menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945 pagi, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan.

4. Makna atau arti penting dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang dari berbagai segi. Apabila ditelaah, maka Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu mengandung beberapa aspek: (1) dari sudut Ilmu Hukum, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga digantikan dengan tata hukum nasional (Indonesia). (2) dari sudut politik-ideologis, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan Negara Proklamasi Republik Indonesia yang bebas, merdeka dan berdaulat penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Malik. 1962. *Riwayat Perjuangan Sekitar Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945*. Jakarta: Wijaya.
- Kahin, George McTurnan. 1980. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Terj. Ismail bin Muhammad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pengajaran Malaysia.
- Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mohammad Hatta. 1970. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tinta Mas.
- Onghokham. 1989. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho Notosusanto. 1985. *Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raliby, Osman. 1953. *Documenta Historica I*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Utomo, Cahyo Budi. 1995. *Dinamika pergerakan Kebangsaan Indonesia. Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang Undang dasar 1945*.

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1949

Romadi

A. Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Pembentukan BPUPKI dan PPKI

Memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang Pasifik semakin terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat dipimpin Laksamana Nimitz berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana. Kemenangan Sekutu ini memberi kesempatan untuk melakukan serangan langsung ke Kepulauan Jepang. Sementara posisi Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Douglas Mac Arthur melalui siasat loncat kataknya berhasil menguasai Pantai Irian dan membangun markas di Holandia (Jayapura). Dari Holandia inilah Jenderal Douglas Mac Arthur menyerang Filipina (Moedjanto, 1989).

Kepada bangsa Indonesia, pemerintah militer Jepang masih tetap meyakinkan bahwa Jepang akan menang dalam perang Pasifik. Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Kaiso Kuniaki. Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia, pada tanggal 19 September 1944 PM Kaiso Kuniaki mengeluarkan janji kemerdekaan kelak kemudian hari bagi bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan ini sering disebut dengan istilah *Deklarasi Kaiso* (Nasution, 1978).

Pada tanggal 1 Maret 1945 Panglima Tentara XXVI Letnan Jenderal Kumakici Harada, mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* yang berpusat di Jakarta untuk daerah kekuasaan Tentara XXVI dengan Ketua Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Sementara itu, di daerah kekuasaan Tentara XXV, juga dibentuk BPUPKI yang berpusat di Bukit Tinggi dengan Ketua Mohammad Sjafei (Bahar, 1991).

Walaupun dalam penyusunan keanggotaan berlangsung lama karena terjadi tawar-menawar antara pihak Indonesia dan Jepang, namun akhirnya BPUPKI

berhasil dilantik 28 Mei 1945 bertepatan dengan hari kelahiran Kaisar Jepang. Adapun anggotanya berjumlah 67 orang dengan ketua Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat dan R. Panji Suroso dan seorang Jepang sebagai wakilnya Ichi Bangase ditambah 7 anggota Jepang yang tidak memiliki suara.

BPUPKI dan PPKI

Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung *Chou Sang In* di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, Dr. KRT. Rajiman Widyodiningrat selaku ketua dalam pidato pembukaannya menyampaikan masalah pokok menyangkut dasar negara Indonesia yang ingin dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan pertemuan, dari pertemuan tersebut direkomendasikan Rumusan Dasar Negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Setelah piagam Jakarta berhasil disusun, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ini merupakan sidangnya yang ke-2 pada tanggal 10 - 16 Juli 1945. Panitia ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Pada sidang tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang.

Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tiga masalah pokok yaitu; pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil tiga alinea pertama Piagam Jakarta, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Hasil kerja Panitia Perancang UUD akhirnya diterima oleh BPUPKI. Setelah selesai dengan tugasnya BPUPKI dibubarkan dan dibentuk lembaga baru yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)/*Dokuritsu Jumbi Inkai* pada 7 Agustus 1945 (Anshari, 1997).

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka diberitahu bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada

Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 (Reid, 1987).

Dua hari kemudian, Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, tanggal 14 Agustus 1945 jam 13.15. Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah (Mulyana, 2008).

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI (Kartodirdjo, 1977).

Peristiwa Rengasdengklok

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta baru kembali ke tanah air setelah memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsekal Terauchi yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Baru segera mengadakan pertemuan setelah mendengar berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 08.00 malam, para pemuda berkumpul di ruang belakang Laboratorium Bakteriologi. Para pemuda bersepakat

bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada bangsa atau negara lainya (Moehkardi, 2012).

Persoalan ini tidak mendapat tanggapan dari golongan pemuda dan mereka tetap pada prinsip semula, sehingga terjadilah perbedaan pendapat mengenai masalah kemerdekaan antara golongan tua dengan golongan muda. Perbedaan pendapat itu mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta (golongan tua) ke Rengasdengklok (kota kawedanan di sebelah timur Jakarta) tanggal 16 Agustus 1945, agar jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Rengasdengklok dipilih karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta-Cirebon. Di samping itu, mereka dengan mudah dapat mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat (Kowani, 1978).

Penculikan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok merupakan realitas dan kesalahan perhitungan politik semata-mata berdasar sentimen. Golongan pemuda dikuasai emosi revolusioner-romantik, sementara golongan tua yang disebut kolaborator oleh golongan pemuda tetap dikuasai rasio untuk dapat mencapai tujuan bersama. Soekarno dan Hatta berada di Rengasdengklok sehari penuh, dengan menempati rumah milik warga masyarakat keturunan Tionghoa yang bernama Jo Ki Song. Para pemuda berupaya menekan kedua pemimpin bangsa Indonesia itu agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan tentara Jepang (Suhartono, 2001).

Saat itu, di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Ahmad Subardjo (mewakili golongan tua) dengan Wikana (mewakili golongan muda). Dari perundingan itu tercapai kata sepakat bahwa Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Di samping itu, Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bahkan ia bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia itu. Akhirnya Soekarno-Hatta dijemput dari Rengasdengklok. Sebelum berangkat ke Rengasdengklok, Ahmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Sudanco Subeno bersedia melepas Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta beserta rombongan untuk kembali ke Jakarta (Sudiyo, 2004).

Penyusunan Teks Proklamasi

Pada pertemuan tanggal 16 Agustus 1945 malam di Gedung Imam Bonjol No. 1 (sekarang Perpustakaan Nasional, Depdiknas)., hadir para anggota PPKI dan tokoh pemuda seperti Soekarni, Chaerul Saleh, Sayuti Melik dan BM. Diah, sedangkan Sutan Sahrir menolak hadir (Moehkardi, 2012). Dalam pertemuan tersebut sempat timbul diskusi antara Sukarno-Hatta dan Soekarni dalam merumuskan bunyi teks proklamasi kemerdekaan. Soekarni mula-mula menyodorkan konsep proklamasi menurut versi pemuda.

Pada awalnya, panitia kecil menawarkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh semua anggota PPKI, namun Chaerul Shaleh tidak setuju sebab PPKI diangkat oleh Jepang. Ir. Soekarno menyarankan kepada seluruh yang hadir itu agar menandatangani naskah Proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran Ir. Soekarno itu diperkuat oleh Drs. Moh. Hatta dengan mengambil contoh pada Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh 13 utusan dari negara-negara bagian. Namun usul tersebut ditentang oleh seorang tokoh golongan pemuda yaitu Sukarni. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah Proklamasi adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni itu diterima dengan baik oleh para hadirin. Setelah mendapat persetujuan, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik sesuai dengan naskah tulisan tangannya yang telah mengalami perubahan-perubahan yang telah disepakati (Badrika, 2006). Naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik itulah yang dinilai sebagai naskah proklamasi yang autentik, dan dibacakan saat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Naskah proklamasi asli tulisan tangan Ir. Sukarno dengan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik mempunyai beberapa perbedaan, dan coretan-coretan.

Pelaksanaan Proklamasi

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah selesai membuat rumusan teks proklamasi dalam sidangnya pada tanggal 16 Agustus 1945 (jam 12 malam), yang dihadiri pula oleh pemimpin-pemimpin pemuda dan beberapa orang pemimpin pergerakan dan anggota-anggota Tjoe Sangiin yang ada di Jakarta, yang berjumlah

sekitar 40 atau 50 orang-orang terkemuka, maka jam 03.00 (dini hari), sebelum sidang ditutup oleh ketua, Bung Karno memperingatkan, bahwa hari itu juga, tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, Proklamasi itu akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 di Jakarta oleh Bung Karno (Soegito, 1987).

Pembentukan Alat-Alat Kelengkapan Negara

Sidang PPKI (18 Agustus 1945). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang yang pertama sesudah proklamasi yang menghasilkan:

- a. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, dari rancangan preambule hukum dasar (piagam Jakarta) dengan perubahan.
- b. Menetapkan dan mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia, dari rancangan hukum dasar dengan beberapa perubahan.
- c. Memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, ialah Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
- d. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan menambah beberapa orang terhadap anggota PPKI.
- e. Berarti juga menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD, alinea ke-4 (Soegito, 1987).

Sidang PPKI (19 Agustus 1945). Menteri merupakan jabatan yang memimpin departemen-departemen. Oleh karena itu, pembentukan lembaga kementerian juga diikuti dengan pembentukan departemen-departemen. Departemen ini menangani bidang-bidang yang lebih khusus lagi, sehingga seorang menteri yang diangkat untuk memimpin departemen, harus memahami bidang yang ditangani itu. Pada tanggal 19 Agustus 1945, disusunlah kementerian-kementerian Negara atau departemen-departemen yang berjumlah 12 (Badrika, 2006).

Sidang PPKI (22 Agustus 1945). Dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa (Gambir Selatan, Jakarta) dibahas tiga masalah utama yang pernah dibicarakan dalam sidang sebelumnya. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Moh. Hatta (Moedjanto, 1989).

Pembentukan TKR. Cikal bakal terbentuknya TKR berawal dari pembentukan BKR, yang diputuskan oleh PPKI pada sidang tanggal 22 Agustus 1945. PPKI saat itu tidak langsung membentuk tentara, salah satu pertimbangannya adalah agar tidak dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kedatangan Sekutu. Pada pidato di RRI pada 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno mengumumkan pembentukan BKR. Sejak pengumuman itu, terbentuklah BKR di pusat dan diberbagai daerah, yang mewadahi para pejuang, dengan tugas utama sebagai Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) (Ricklefs, 2005).

Pembentukan Partai Politik. Demi perkembangan demokrasi di Indonesia, Badan Pekerja KNIP menganjurkan supaya rakyat mendirikan partai-partai. Pada mulanya di Indonesia hanya ada satu partai yaitu Partai Nasional Indonesia di bawah perlindungan Sukarno Hatta (Suhartono, 2001).

Perubahan Sistem Pemerintahan Presidenstil ke Parlementer. Latar belakang lahirnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945 ada hubungannya dengan latar belakang lahirnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, sebab pada dasarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945 itu lahir atas dasar Maklumat Wakil Presiden No. X tersebut. Adapun latar belakang lahirnya Maklumat Wakil Presiden No. X berpangkal pada kekuasaan Presiden sesuai dengan Aturan Peralihan UUD 1945 pasal IV yang sedemikian dianggap terlalu besar (Suryanegara, 2010).

B. Perjuangan Fisik dan Konfrontasi

Kedatangan Sekutu di Indonesia

Sekutu datang ke Indonesia pada 29 September 1945 dianggap relatif terlambat, apabila dilihat dari penyerahan Jepang, yaitu 14 Agustus 1945. Namun demikian, tidak dinilai terlambat apabila dilihat dari waktu penandatanganan piagam penyerahan Jepang kepada Sekutu pada 12 September 1945. Ada dua hal yang menyebabkan Sekutu terlambat datang ke Indonesia, *pertama*, Sekutu harus melakukan koordinasi di antara negara-negara anggota Sekutu, yang *kedua*, Sekutu harus mengirim dan menunggu informasi tentang keadaan di Indonesia dari pasukan mata-mata (Susanto, 1985).

Sejak memenangkan Perang Dunia II, Sekutu menguasai wilayah yang sangat luas, di Eropa, Afrika, dan Asia. Pada waktu yang relatif sama, Sekutu dalam hal ini Inggris yang sudah membentuk satuan komando bernama SEAC mengirim pasukan mata-mata untuk mengetahui kondisi di Indonesia sejak diserahkan oleh Jepang. Ternyata Sekutu datang ke Indonesia diboncengi NICA (Nederlands Indies Civil Administration), yaitu suatu pemerintahan sipil Belanda yang bertujuan untuk kembali menguasai Indonesia. Inggris sebagai Sekutu yang ditugaskan ke Indonesia, ternyata telah mengadakan perjanjian rahasia dengan Belanda, yang disebut Civil Affair Agreement pada 24 Agustus 1945 (Wiryosuparto, 1961). Isi perjanjian itu adalah Tentara Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama Pemerintah Belanda, dalam melaksanakan tugas pemerintahan sipil akan dilaksanakan oleh NICA dibawah tanggungjawab Komando Inggris, kekuasaan itu kemudian akan dikembalikan kepada Pemerintah Belanda.

Pertempuran Surabaya

Kedatangan tentara Inggris di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Mallaby. Pada tanggal 27 Oktober 1945 tentara Inggris mulai menduduki gedung pemerintahan, yang dipertahankan oleh rakyat dan pemuda Indonesia sehingga terjadi pertempuran. Tanggal 29 Oktober 1945 atas permintaan Letnan Jenderal Christison, Presiden Soekarno terbang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Usaha Bung Karno berhasil dengan tercapainya gencatan senjata. Pada tanggal 31 Oktober 1945 tersiarlah berita bahwa Brigadir Jendral Mallaby hilang kemudian ternyata terbunuh. Karena tidak dapat menangkap pembunuhnya, maka pada tanggal 9 November 1945 Mayor Jenderal Manserg dengan surat sebaran menyampaikan ultimatum (Badrika, 2006).

Sampai tanggal 10 November 1945, jam 06.00 pagi tidak ada seorang pun dari bangsa Indonesia yang datang menyerahkan diri. Saat itu jugalah mengguntur dentuman meriam-meriam Inggris yang dimuntahkan pelurunya di kota Surabaya. Rakyat dan pemuda Surabaya masih juga mencoba mempertahankan kotanya, namun senjata ringan dan bambu runcing tak berdaya menghadapi meriam-meriam berat dan tank-tank Inggris sehingga terpaksa pasukan bersenjata Indonesia mengundurkan diri ke jurusan Mojokerto (Kartodirdjo, 1977).

Perang Aceh.

Pasukan-pasukan Aceh dari Divisi Gajah I ditempatkan satu resimen di Medan Area (RIMA). Batalyon I dan II menduduki Medan Tengah dan Selatan. Divisi Gajah II akan menduduki Medan Barat, Panglima Divisi Gajah II Kolonel Simbolon. Divisi Gajah I menduduki Kota Medan. Batalyon Meriam Kapten Nukum Sanami, berada di Medan Timur, Batalyon NIP Xarim, Batalyon Bejo dan Batalyon Laskar Rakyat lainnya membantu Divisi Gajah II. Pada hari H yang telah ditentukan Gajah I dan Gajah II, tidak berhasil menduduki Kota Medan. Kompi Gajah I berhasil masuk di jalan raya Medan-Belawan, Tandem Hilir (Susanto, 1966).

Namun setelah dua hari mundur kembali, karena Jalan Medan Belawan dapat diduduki Belanda kembali. Pada Clash ke I, 21 April 1947, Belanda dapat menguasai daerah Medan Area dan mundur dari Medan Area. Yakin Belanda akan meneruskan serangannya menduduki Pangkalan Berandan daerah minyak, pasukan RI membumi-hanguskan Pangkalan Belanda. Selanjutnya, pasukan mundur ke Tanjung Pura, setelah tiga hari di Tanjung Pura terpaksa pasukan RI meninggalkannya karena Belanda langsung merebut Tanjung Pura. Pasukan RI bertahan di tepian Sungai Tanjung Pura, setelah tiga hari, bertahan di tepi sungai, Belanda menguasai seluruh Sungai Tanjung Pura dan pasukan RI mundur ke Gebang, Gebang perbatasan daerah Aceh Sumatera Timur. Pasukan baru didatangkan dari daratan Aceh, satu resimen untuk bertahan di Gebang (Poesponegoro, 1993).

Perang Ambarawa

Gerakan maju Tentera Inggris ke Ambarawa dan Magelang pada tanggal 14 Desember 1945 akhirnya dapat dipukul mundur yang dalam peristiwa sejarah dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Pada akhir September 1946, tentera Belanda mengambil alih posisi dan wilayah pendudukan dari tentera Sekutu (Inggris) sesudah mendatangkan bala bantuan dari negeri Belanda yang dikenal dengan “Divisi 7 Desember”. Hingga bulan Oktober 1946, Belanda telah dapat menghimpun kekuatan militernya sebanyak 3 divisi di Jawa dan 3 Brigade di Sumatera. Tentera Inggris menyerahkan secara resmi tugas pendudukannya kepada Tentera Belanda pada tanggal 30 November 1946. Dari segi perimbangan kekuatan militer pada masa itu, pihak Belanda telah merasa cukup

kuat untuk menegakkan kembali kekuasaan dan kedaulatannya di Indonesia, dengan memaksakan keinginannya terhadap rakyat dan pemerintah Republik Indonesia (Marwoto, 2008).

Perang Bandung Lautan Api

Pasukan Sekutu Inggris memasuki kota Bandung sejak pertengahan Oktober 1945. Menjelang November 1945, pasukan NICA melakukan aksi teror Bandung. Meskipun pihak Indonesia telah mengosongkan Bandung utara, tapi sekutu menuntut pengosongan sejauh 11 km. Hal itu menyebabkan rakyat Bandung marah. Mereka kemudian melakukan aksi pertempuran dengan membumihanguskan segenap penjuru Bandung selatan. Bandung terbakar hebat dari atas batas timur Cicadas sampai batas barat Andir. Satu juta jiwa penduduknya mengungsi ke luar kota pada tanggal 23 dan 24 Maret 1946 meninggalkan Bandung yang telah menjadi lautan api (Badrika, 2006).

Pertempuran Medan Area

Keangkuhan dan provokasi Belanda semakin meningkat sejak pendaratan Sekutu. Di Medan titik api pergolakan ada di Pension Wilhelmina di seberang Pasar Sentral Jalan Bali, yang dijadikan asrama dan markas serdadu Ambon bekas KNIL yang dipimpin Westerling. Pada Sabtu pagi, tanggal 13 Oktober 1945 serombongan orang sudah berkumpul di luar markas tersebut, karena tersiar berita bahwa seorang pengawal dari Suku Ambon telah merenggut dan menginjak-injak lambang/emblem merah putih yang dipakai seorang anak Indonesia. Terjadilah pergolakan, beberapa orang luka-luka. Di tengah baku hantam itu, dua orang Belanda yang berada di atas kendaraan melepaskan tembakan-tembakan ke arah rombongan masyarakat, satu orang tewas. Pasukan Jepang bersama dengan barisan bekas militer BPI pimpinan Ahmad Tahir yang akan beralih menjadi TKR datang untuk meredakan pertempuran. Akhirnya pihak Sekutu berjanji untuk memindahkan orang Ambon dari Pension Wilhelmina. Sementara itu, serdadu Jepang mengambil senjata-senjata dari gedung itu dan menempatkan pengawalnya di pintu pagar. Masyarakat Medan membubarkan diri pukul 13.30 dengan meninggalkan dua orang Indonesia dan seorang wanita Ambon yang meninggal dunia (Reid, 1987).

Perlawanan Rakyat di Wilayah Kekuasaan Belanda

Peringatan hari proklamasi di daerah-daerah juga tidak dilewatkan oleh masyarakat. Di Bogor rakyat merayakan sesuai dengan suasana dan keadaan. Sang Merah Putih tetap dipasang, tetapi di dinding-dinding rumah saja. Rakyat yang mempunyai gambar Presiden Sukarno, pada hari bersejarah itu menggantungkannya pula. Rakyat Bogor mengadakan selamat dengan membaca sholawat 1000 kali dan doa selamat, kemudian dhidangkan kue-kue dan bubur merah putih. Rakyat berziarah juga ke makam-makam pahlawan, namun kunjungan ke Kebun Kembang tidak dapat dilaksanakan, karena penjagaan yang ketat dari pihak Belanda. Di Bandung, panitia 17 Agustus yang dipimpin oleh R.P.S Gondokusumo telah diijinkan oleh Recomba untuk merayakan Hari Proklamasi secara tertutup dalam pertemuan yang dihadiri tidak lebih dari 50 orang (Reid, 1987).

Agresi Militer Belanda I

Latar belakangnya adalah adanya penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda yang berisi tentang keharusan RI untuk mengirim beras dan penyelenggaraan *gendarmie* (keamanan dan ketertiban bersama). Serangan ini dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan sasaran kota besar di Jawa, daerah perkebunan dan pertambangan. Tujuan Belanda melakukan serangan atas RI ialah penghancuran RI. Untuk melakukan itu Belanda tidak dapat melakukan sekaligus, oleh karena itu pada fase pertama Belanda harus mencapai sasaran (Moedjanto, 1989).

Tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar agenda Dewan Keamanan PBB. itu diterima dan dimasukkan sebagai agenda dalam pembicaraan sidang Dewan Keamanan PBB. India membela RI karena solidaritas Asia terutama sesudah konferensi internasional di New Delhi pada Maret 1947 di mana Indonesia ikutserta. Lagipula hubungan RI-India baik sekali karena politik beras Syahrir (antara 1946-1947), yaitu Indonesia membantu India yang sedang dilanda kelaparan dengan mengirim beras sebanyak 700.000 ton. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa 30 Juli 1947-4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih melakukan gerakan militer. Setelah beberapa minggu tidak

ada keputusan, akhirnya pada 25 Agustus 1947 usul AS diterima sebagai keputusan DK PBB. Usul AS adalah pembentukan *Committee of Good Officer* (Komisi Jasa-Jasa Baik) untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan pertikaian. Atas dasar putusan DK PBB tersebut, pada 18 September 1947 Belanda memilih Belgia, RI memilih Australia, dan kedua negara memilih negara ketiga yaitu AS. Komisi jasa-jasa baik, selanjutnya disebut KTN (Komisi Tiga Negara), yang beranggotakan Dr. Frank Graham (AS), Paul Van Zeelan (Belgia), dan Richard Kirby (Australia). Sebelum KTN terbentuk dan belum datang ke Indonesia, Belanda terus melakukan langkah-langkah yang merugikan RI. KTN mampu memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia, yaitu Perundingan Linggarjati (Romadi, 2001: 14).

Agresi Militer II.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan keduanya terhadap Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya pengingkaran Belanda atas hasil perjanjian Renville di mana Belanda tidak mau lagi terikat dengan perjanjian Renville. Serangan diawali penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Maguwo dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memutuskan tetap tinggal di Ibukota. Namun Sukarno Hatta beserta sejumlah menteri dan S. Suryadarma ditawan Belanda. Sebelum pihak Belanda sampai di Istana, Soekarno telah mengirim radiogram yang berisi perintah kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang sedang berkunjung ke Sumatra untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) (Supriatna, 2002).

Dalam satu bulan, pasukan TNI telah berhasil melakukan konsolidasi dan melakukan pukulan-pukulan secara teratur kepada musuh. Serangan umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda mulai dilaksanakan oleh pasukan TNI dan yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta dipimpin oleh Letkol Suharto. Dalam masa perjuangan itu para pelajar membentuk tentara-tentara pelajar. Para pelajar di Jawa Timur membentuk Tentara Pelajar Republik Indonesia (TPRI) dan Tentara Genie Pelajar (TGP) yang terdiri dari pelajar sekolah teknik (Notosusanto, 1971).

Indonesia Menghadapi Agresi Militer Belanda II

Langkah Politik/Diplomasi. Pada pukul 23.30 tanggal 18 Desember 1948, Cochran mendapat surat dari delegasi Belanda di Jakarta untuk disampaikan kepada KTN di Yogyakarta. Isi surat tersebut adalah Belanda tidak terikat lagi dengan isi perjanjian Reville. Dengan alasan bahwa PM Hatta menolak intervensi Belanda di wilayah RI dan menganggap penolakan tersebut dari Indonesia melanggar ketentuan, dan Belanda mantap untuk menyerang Yogyakarta secara mendadak. Mendengar berita penyerbuan tentara Belanda secara mendadak, Kabinet RI pun bersidang. Sampai tahun 1949, Belanda sudah memasukkan 145.000 pasukan ke Indonesia, namun hanya berhasil menguasai kota-kota dan jalan raya, sedangkan pemerintahan RI tetap berjalan wajar di desa-desa. TNI secara gerilya tetap melawan Belanda. Rakyat dan pemerinhan sipil melakukan politik non kooperasi dan ikut bergerilya pula (Poesponegoro, 1993).

Langkah Militer/Konfrontasi. Sebelum Belanda melancarkan serangan terhadap Kota Yogyakarta 19 Desember 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman pada 9 November 1948 telah mengeluarkan perintah perubahan siasat pertahanan, yang terkenal dengan Perintah Siasat Nomor 1. Dalam perintah siasat tersebut intinya merupakan penjabaran dari Pertahanan Rakyat Semesta (Poesponegoro, 1983).

Wehrkreise istilah bahasa Jerman yang berarti lingkaran pertahanan. Sistem *wehrkreise* artinya pertahanan dalam lingkaran-lingkaran pertahanan yang dapat berdiri sendiri, namun dapat juga saling membantu dan mendukung dengan lingkaran pertahanan yang lain. Prajurit yang sudah mundur dari garis pertahanan pertama dapat menggabungkan diri dengan daerah pertahanan berikutnya. Dengan demikian, maka gerak musuh dapat dihambat.

Reaksi Dunia Terhadap Agresi Militer Belanda II

Negara Asia dan Afrika. Tanggal 20-23 Januari 1949, atas prakarsa Perdana Menteri India dan Birma, diselenggarakan Konferensi Asia untuk membahas masalah Indonesia. Konferensi Asia mengeluarkan tiga resolusi untuk penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda, yang isinya antara lain berupa kecaman keras terhadap agresi militer Belanda di Indonesia. Di antara resolusi-resolusi yang diterima oleh konferensi, sebuah berisi rekomendasi kepada Dewan Keamanan. Teks resolusi ini

telah dikawatirkan kepada Dewan Keamanan. Teks resolusi ini disusun dengan mengakui sepenuhnya wewenang Dewan Keamanan, terutama dalam hasrat hendak membantu memecahkan masalah Indonesia (Supriatna, 2002).

Perubahan Sikap Amerika Serikat. Amerika Serikat sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya selalu mendukung Belanda. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber, Dr. Baskara T. Wardaya (2006), menyampaikan bahwa Amerika Serikat selalu mendukung Belanda untuk menduduki kembali Indonesia. Ada sejumlah alasan bagi Amerika Serikat untuk menempatkan pada posisi demikian (Kahin, 2013). Pertama, ketakutan akan komunisme. Kedua, pentingnya Indonesia bagi kepentingan ekonomi Belanda. Indonesia yang kaya dengan berbagai sumber daya alam seperti minyak, emas, karet, bauxite, kopra dan lain-lain telah menjadi sumber utama ekonomi Belanda selama masa penjajahan. Ketiga, kepentingan ekonomi Amerika.

PBB. Dewan Keamanan PBB segera bersidang pada tanggal 24 Januari 1949 sebagai reaksi terhadap Agresi Militer Belanda II sekaligus tanggapan terhadap desakan negara-negara Asia dan Afrika dalam pertemuan di New Delhi (India). Pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi (Kahin, 2013).

Palang Merah Internasional (PMI). Permasalahan antara Indonesia dengan Belanda tidak hanya menarik perhatian dan peran serta dari Negara-Negara dari berbagai belahan dunia, tetapi juga turut menarik perhatian dan peran serta dari berbagai organisasi Internasional yang ada. Salah satu Organisasi Internasional yang tercatat pernah terlibat dalam urusan penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda ialah Organisasi Palang Merah Internasional. Salah satu upaya yang cukup mendapat perhatian karena berakhir dengan sangat tragis adalah upaya mengirimkan bantuan melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat ringan bertanda Palang Merah Internasional yang berakhir dengan kegagalan karena pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pesawat tempur Belanda saat akan mendarat di lapangan udara Magoewo di Yogyakarta (Nasution, 1978).

C. Perjuangan Diplomasi

Perjanjian Linggar Jati.

Untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda maka pada 10 November 1946 diadakan perundingan di Linggar Jati. Pihak Indonesia dipimpin oleh dr. Sudarsono, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Oerip Soemohardjo. Inggris mengirim Lord Killearn sebagai penengah setelah komisi gencatan senjata terbentuk. Pihak Belanda diwakili oleh Prof. S. Schermerhorn dan Dr. Hj. Van Mook. Isi persetujuan Linggar Jati. Setelah naskah perjanjian ditandatangani, muncul pro dan kontra dimasyarakat mengenai hasil perundingan tersebut. Tanggal 25 Maret 1947 pihak Indonesia menyetujui perjanjian Linggar Jati (Bahar, 1991).

Perundingan Renville.

Berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda No. 51 tanggal 15 Desember 1947, wakil-wakil pemerintah Belanda yang hadir dalam perundingan Renville dengan penuh kehati-hatian menghindari kata “delegasi” (Agung, 1991). Ini untuk menjelaskan bahwa persoalan Indonesia adalah masalah dalam negeri. Oleh karena itu, Keputusan Kerajaan Belanda menyebut “penunjukkan suatu komisi untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan sesuai Resolusi DK PBB tanggal 25 Agustus 1947 (Badrika, 2006).

Perjanjian Roem Royen.

Pada bulan pertama tahun 1949 karena didesak oleh Dewan Keamanan PBB, Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan politis dengan Indonesia. Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees mengundang Prof. Dr. Supomo untuk berunding. Undangan itu diterima dan merupakan pertemuan pertama antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda sejak tanggal 19 Desember 1948. Pertemuan antara Perdana Menteri Dr. Willem Drees dengan Prof. Dr. Supomo tidak diumumkan kepada masyarakat sehingga bersifat informal. Pertemuan lainnya yang bersifat informal adalah antara utusan BFO yaitu Mr. Djumhana dan Dr. Ateng dengan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 21 Januari 1949. Hasil pembicaraan secara mendetil dari pertemuan-pertemuan itu tidak pernah diumumkan secara resmi, kecuali diberitakan oleh harian Merdeka pada 19 Januari 1949 dan 24 Januari 1949. Namun demikian dari pertemuan informal tersebut dicapai kesepakatan antara RI dengan BFO yang disampaikan oleh Mr. Moh. Roem bahwa RI bersedia

berunding dengan BFO di bawah pengawasan Komisi PBB dalam suatu perundingan formal (Ricklefs, 1998).

Pada tanggal 13 Februari 1949 Wakil Presiden Mohammad Hatta secara resmi menyatakan pendapatnya bahwa perundingan dapat saja dilakukan dengan syarat dikembalikannya pemerintah RI ke Yogyakarta dan pengunduran pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 24 Januari 1949. Pendirian Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian disetujui dan didukung oleh delegasi BFO (Pujianti, 2011).

Berdasarkan kenyataan dan penjajagan politis yang dilakukan oleh Belanda terhadap para pemimpin Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya bersedia berunding. Oleh karena itu, Belanda pada tanggal 26 Pebruari 1949 mengumumkan akan mengadakan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 12 Maret 1949. KMB akan diadakan dengan diikuti oleh Belanda, Indonesia dan negara-negara bentukan Belanda guna membicarakan masalah Indonesia seperti syarat-syarat penyerahan kedaulatan dan pembentukan Uni Indonesia Belanda (Reid, 1987).

Pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda pada tanggal 28 Pebruari 1949 untuk menemui Ir. Sukarno beserta beberapa pemimpin RI yang masih ditawan di Pulau Bangka untuk menyampaikan rencana KMB. Pada tanggal 3 Maret 1949 Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung BFO tentang perlunya pengembalian kedudukan pemerintah RI sebagai syarat diadakannya perundinagn sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 4 Maret 1949 Presiden Sukarno membalas undangan Wakil Tinggi Mahkota Belanda (Suhartono, 2001).

Undangan menghadiri KMB yang dimaksud oleh Dr. Koets tentu saja bukan undangan pribadi kepada Ir. Sukarno, melainkan undangan untuk pemerintah Indonesia. Oleh karena itu Presiden Sukarno menyampaikan bahwa RI tidak mungkin berunding tanpa pengembalian pemerintahan ke Yogyakarta. Dengan demikian maka sebelum perundingan dimulai, secara tidak langsung Belanda harus sudah mengakui bahwa RI masih tegak berdiri. Sementara itu pihak BFO juga mengeluarkan surat pernyataan yang berisi pemberitahuan bahwa BFO tetap dalam pendirian semula. Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 23 Maret 1949 memberitahukan kepada Belanda bahwa Komisi PBB telah bekerja sesuai dengan resolusi Dewan Keamnaan

PBB tanggal 28 Januari 1949 dan tidak merugikan tuntutan kedua belah pihak (Suryanegara, 2010).

Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sebagai Ketua dan Mr. Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya adalah : Dr. J. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latuharhary disertai lima orang penasehat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Royen, dengan anggota-anggotanya Mr. N.S. Blom, Mr. A.S. Jacob, Dr. J.J. Van der Velde dan empat orang penasehat. Perundingan dimulai pada 14 April 1949 yang dilakukan oleh Mr. Moh. Roem (Indonesia) dengan Dr. Van Roijen (Belanda) dengan mediator Merle Cochran (anggota UNCI dari AS). Perundingan ini dilakukan di Hotel Des Indes (Hotel Duta Merlin Jakarta, sekarang) (Supriatna, 2002).

Perundingan berlarut-larut dan sempat terhenti sampai 1 Mei 1949 karena terjadinya perbedaan pendapat yang tajam. Pemerintah Belanda menghendaki agar RI menghentikan gerakan gerilya oleh pejuangnya, bersedia menghadiri KMB dan bersedia bekerjasama menciptakan keamanan dan ketertiban, barulah pemerintahan dan pemimpin RI yang ditahan Belanda dibebaskan (Bahar, 1991).

Karena perundingan berjalan sangat lamban, bahkan hampir mengalami jalan buntu, pada tanggal 24 April 1949 Drs. Mohammad Hatta datang ke Jakarta. Pihak RI menempuh cara lain yakni mengadakan perundingan informal dan langsung dengan pihak Belanda disaksikan Merle Cochran. Pada tanggal 25 April 1949 diadakan pertemuan informal pertama antara Drs. Moh. Hatta dengan ketua delegasi Belanda Dr. Van Royen. Hasil pertemuan ini tidak diumumkan, namun Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan bahwa pertemuan informal itu untuk membantu memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda (Suryanegara, 2010).

Anggota UNCI dari AS Merle Cochran mendesak Indonesia agar dapat menerima usulan Belanda dengan kompensasi bantuan ekonomi setelah pengakuan kedaulatan, tetapi sebaliknya mengancam untuk tidak memberi bantuan apapun kepada Indonesia apabila pihak RI tidak bisa melanjutkan perundingan. Selanjutnya masing-masing pihak mengeluarkan pernyataan. Persetujuan ini sebenarnya hanya berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang masing-masing menyetujui pernyataan pihak lainnya. Isi pernyataan ini ditanda tangani pada 7 Mei 1949 oleh

ketua perwakilan kedua negara yaitu Mr. Moh. Roem dan Dr. Van Roijen, oleh karena itu terkenal dengan sebutan Roem Royen Statemens (Ricklefs, 1998).

Turut serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat, yang tidak bersyarat. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian diterima oleh pemerintah Republik Indonesia selekas-lekasnya setelah dipulihkan di Yogyakarta. Bunyi statement Roem-Royen (Pujianti, 2011):

- a. Sesuai dengan resolusi DK PBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya.
- b. bekerjasama mengembalikan dan menjaga keamanan dan ketertiban.
- c. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dengan tidak bersyarat.

Statement Delegasi Belanda (Diucapkan oleh Dr. Van Royen)

Delegasi Belanda diberi kuasa menyatakan bahwa, berhubungan dengan kesanggupan yang baru saja diucapkan oleh Mr. Roem, ia menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan Roem-Royen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara RI, BFO dan Belanda di bawah pengawasan komisi PBB, dipimpin oleh Critchley (Australia). Hasil perundingan itu adalah:

- a. Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. Karesidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda pada tanggal 1 Juli 1949 dan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya daerah itu.
 - b. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.
 - c. Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag (Ricklefs, 1998).
- Setelah para pemimpin RI berkumpul kembali di Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 jam 20.30, diadakan sidang Kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu, Mr. Sjafrudin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil

Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta. Sedangkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mendukung pemerintah RI dengan syarat (Nasution, 1987). Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta, yang sudah ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Belanda pada akhir bulan juni. Soedirman dan pimpinan-pimpinan tentara lainnya enggan mengakui kekuasaan sipil yang mereka anggap telah meninggalkan Republik. Pada tanggal 1 Agustus, diumumkanlah gencatan senjata yang akan mulai berlaku di Jawa pada tanggal 11 Agustus dan Sumatera pada tanggal 15 Agustus (Poesponegoro, 1993).

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut, pemerintah darurat RI di Sumatra memerintahkan kepada Sultan Hamengkubowono IX untuk mengambilalih pemerintahan di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta. Partai politik yang pertama kali menyatakan setuju dan menerima baik tercapainya persetujuan Roem-Royen adalah Masyumi. Dr. Sukiman selaku ketua umum Masyumi menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh delegasi RI adalah dengan melihat posisi RI di dunia internasional dan di dalam negeri sendiri, apalagi dengan adanya sikap BFO yang semakin menyatakan hasratnya untuk bekerjasama dengan RI. Sedangkan Mr. Surjono Hadinoto, ketua umum PNI menyatakan bahwa Persetujuan Roem-Royen merupakan satu langkah ke arah tercapainya penyelesaian dari masalah-masalah Indonesia (Reid, 1987).

D. Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Pengakuan Kedaulatan

Pimpinan TNI Kembali ke Kota Yogyakarta. Masuknya TNI dan para pemimpin yang kembali dari pengasingan ke Yogyakarta diperingati sebagai Hari Yogya Kembali, yang akhirnya juga diabadikan dengan Monumen Yogya Kembali. Itu berarti Monumen Yogya Kembali bukan hanya untuk mengabadikan kembalinya TNI ke Yogyakarta, tetapi juga kembalinya pemimpin bangsa. Dari fakta sejarah justru nampak bahwa pembangunan monumen ini tidak langsung berkaitan dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Suharto. Selama ini kita selalu berpendapat bahwa pembangunan Monumen Yogya Kembali untuk memperingati Serangan Fajar yang berhasil merebut Kota Yogyakarta selama 6 jam (Sumarmo, 1985).

Konferensi Inter Indonesia

Hubungan antara pemimpin-pemimpin BFO dan Republik Indonesia, pertama kali dijalin pada 1949 ditempat pengasingan di Bangka.waktu itu, pembentukan negara federal Indonesia Serikat masih kabur kerana syarat mutlak pembebasan para pemimpin Republik Indonesia belum dilaksanakan. Pemimpin-pemimpin BFO masih ragu-ragu terhadap kekuatan perlawanan gerilyawan terhadap tentara Belanda yang dianggapnya akan mengalami kegagalan. Untuk menyelamatkan kedudukan sebagai pemimpin di negaranya masing-masing pemimpin-pemimpin BFO mengadakan siasat yang dapat memberi jaminan negara-negara BFO yang akan menjadi negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat. Mereka yakin bahwa perundingan Konferensi Meja Bundar akan menghasilkan pembentukan Negara Indonesia Serikat yang berdaulat penuh atas pertimbangan faktor-faktor. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman serta menyatukan langkah menghadapi Belanda dalam KMB, negara-negara bagian dan RI mengadakan konferensi bersama. Konferensi ini diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949 dan dilanjutkan di Jakarta pada 30 Juli-2 Agustus 1949. Pemilihan kedua kota ini atas pertimbangan bahwa Yogyakarta merupakan wilayah negara RI sedangkan Jakarta termasuk daerah negara bagian. Dengan demikian tercipta sikap saling menghargai dan sejajar (Moedjanto, 1989).

Delegasi BFO untuk menghadiri Konferensi Antar Indonesia tahap pertama yang diselenggarakan di istana negara Yogyakarta, dipimpin oleh Sultan Hamdi Algdrie dari Pontianak. Kedatangan mereka disambut sangat gembira oleh masyarakat Yogyakarta sehingga timbul kesan bahwa kecurigaan sudah musnah sama sekali. Konferensi tahap pertama membahas ketatanegraan Indonesia bertalian dengan maksud mendirikan Negara Indonesia Serikat. Keputusan Konferensi Inter Indonesia adalah :

- a. Agustus ditetapkan sebagai Hari Nasional Negara RIS
- b. Bendera Merah Putih sebagai bendera RIS
- c. Lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya
- d. Bahasa Nasional RIS yaitu Bahasa Indonesia (Mulyana, 2008)

Detik-Detik Menjelang dan Pelaksanaan Konferensi Meja Bundar

Tindak lanjut mempersiapkan penyelenggaraan konferensi meja bundar (KMB) di den haag, negeri Belanda, perdana menteri NIT, ide Anak Agung Gde Agung, yang merangkap sebagai wakil ketua pertemuan musyawarah federal (PMF, yang lebih dikenal BFO) menyarankan agar sebelum diselenggarakan KMB, terlebih dahulu diadakan suatu konferensi antara BFO dan RI. Maksudnya ialah, untuk membentuk suatu rekonsiliasi antara pemimpin-pemimpin RI dan wakil-wakil negara bagian dan daerah-daerah di luar wilayah kekuasaan RI, karena adanya perselisihan paham dan jurang pemisah antara mereka akibat politik memecah belah pemerintah Belanda. Selain itu, agar tercapai kerjasama dan kekompakan menghadapi Belanda selama pembicaraan pada sidang KMB (Ricklefs, 2005).

Dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949, konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag. Hatta mendominasi pihak Indonesia selama berlangsungnya perundingan-perundingan dan semua peserta mengaguminya. Suatu uni yang longgar antara negeri Belanda dan RIS disepakati dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis. Soekarno akan menjadi presiden RIS dan Hatta sebagai perdana menteri (1949-1950) merangkap wakil presiden. Pada tanggal 27 Desember 1949, negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk Papua, kepada RIS, sebuah Negara federal yang hanya bertahan secara utuh selama beberapa minggu saja (Wirawan, 2012).

Pada tanggal 31 Oktober 1949 delegasi RI dan BFO menerima usul yang bersifat kompromi dari UNCI tentang status Irian Barat. Semula soal ini sangat pelik dan hampir buntu dari penyelesaian, akhirnya bersedia menerima usulan UNCI walaupun lebih merugikan Indonesia. Usulan UNCI adalah masalah Irian Barat (Nieuw Guineo) akan diselesaikan setahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan antara RIS dengan Kerajaan Belanda. Setelah masalah Irian disetujui RI dan BFO maka pada 2 Nopember 1949 KMB ditutup oleh Ratu Juliana (Suryanegara, 2012).

Pengesahan Hasil KMB

Berdasarkan hasil KMB maka daerah-daerah bekas jajahan Hindia Belanda yang sejak 17 Agustus 1945 diproklamasikan sebagai Republik Indonesia dengan bentuk kesatuan, sejak 17 Desember 1949 berubah menjadi negara federal dengan nama

Republik Indonesia Serikat. Sementara itu, RI hanya merupakan negara bagian dari RIS dengan wilayah Yogyakarta. Republik Indonesia Serikat adalah sebuah Negara federal tergabung di dalamnya 15 negara bagian yang telah didirikan Belanda selama 3 tahun sebelumnya di wilayah yang didudukinya, sebagai taktik *divide et impera* untuk melawan Republik Indonesia. Dengan dibentuknya RIS, disahkanlah Konstitusi RIS 1949 di Gedung Proklamasi, Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada 14 Desember 1949. Selanjutnya pada 16 Desember 1949 di Yogyakarta dilakukan pemilihan Presiden RIS. Terpilihlah Presiden Sukarno yang dilantik pada 18 Desember 1949, dan Bung Hatta menjadi Perdana Menteri yang kemudian membentuk *zaken cabinet* RIS (ANRI, 2002).

Hasil-hasil persetujuan yang tercapai dalam perundingan antara delegasi Indonesia dan Belanda di Den Haag, walaupun tidak memuaskan sepenuhnya, dan masih banyak mengandung kekecewaan terutama mengenai soal Irian dan ekonomi/keuangan tak dapat dikatakan memenuhi syarat yang penting untuk meneruskan perjuangan rakyat mencapai cita-citanya, dengan adanya pengakuan kedaulatan *de facto* dan *de jure* bukan saja oleh negeri Belanda, melainkan sekarang nyatanya juga oleh beberapa negara besar dan kecil.

Persetujuan KMB menimbulkan pro dan kontra, hal ini sangat lumrah karena satu persetujuan mesti ada segi-segi kompromi. Presiden Sukarno memberi persetujuan tetapi menyesalkan mengapa Irian Barat dibiarkan belum masuk, dengan begitu wilayah Negara Proklamasi masih belum lengkap. Walaupun menimbulkan banyak ketidakpuasan, KMB menurut pemerintah merupakan hasil perjuangan diplomasi maksimal yang dapat dicapai pada waktu itu. Oleh karena itu agar hasil KMB bisa dilaksanakan maka memerlukan persetujuan dari wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sekembalinya ke tanah air, Perdana Menteri Hatta memberikan laporan kepada kabinet hasil perundingan Konferensi Meja Bundar dalam sidang kabinet tanggal 16 November 1949. Dengan suara bulat, kabinet menerima hasil perundingan dan menyarankan agar secepatnya dimintakan pengesahan pleno KNIP. Tanggal 7-15 Desember, KNIP mengadakan sidang pleno untuk mendengarkan tanggapan para anggotanya terhadap keterangan pemerintah tentang hasil KMB yang dimintakan pengesahan. Akhirnya, hasil-hasil KMB diterima dengan suara 226 berbanding 62

dan 31 blanko. Golongan yang tidak setuju adalah golongan komunis dan partai Murba. Golongan Partai Sosialis Indonesia memberikan suara blanko. Di Nederland, piagam persetujuan KMB disahkan pada tanggal 14 Desember dengan suara 71 berbanding 29 di Dewan Perwakilan Rakyat (kamar kedua) dan 34 berbanding 15 di Dewan Senat (kamar pertama). Terkait pengesahan piagam persetujuan KMB oleh sidang KNIP di atas, tanggal 16 Desember dilaksanakan pemilihan presiden untuk Republik Indonesia Serikat di Gedung Kepatihan Yogyakarta oleh wakil-wakil 16 negara bagian (Suryanegara, 2010).

Selanjutnya KNIP mengadakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden RIS. Terpilihlah Ir. Sukarno sebagai Presiden RIS dengan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Presiden Sukarno yang pada tanggal 17 Desember 1949 dilantik sebagai presiden RI yang pertama, pada tanggal 28 Desember 1949 pindah dari Yogyakarta ke Jakarta, diikuti oleh pemerintah seluruhnya. Pada tanggal 19 Desember 1949, Kabinet RIS yang pertama dibentuk Mohamad Yamin sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan, Anak Agung Gde Agung sebagai Menteri Dalam Negeri, Syafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan, Ir. Juanda sebagai Menteri Kemakmuran, Ir. Laoh sebagai Menteri Perhubungan, Prof. Mr. Supomo sebagai Menteri Kehakiman, Dr. Abu Hanifah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. J. Leimena sebagai Menteri Kesehatan. Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menerima pengakuan kedaulatan dari Ratu Belanda. Di waktu yang sama, HVS. Loving menghadap Presiden Soekarno di Jogjakarta untuk mohon diri sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda terakhir. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Jogjakarta Mr. Assaat disumpah sebagai pemangku jabatan sementara jabatan Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu segala perlengkapan dan aparatur negara RIS dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Pada 27 Desember 1949 pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia tidak termasuk Irian Barat kepada pemerintah RIS dan membebaskan seluruh tahanan politik yang berjumlah sekitar 12.000 orang (Soebagijo. 1981).

E. Rangkuman

Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan modul tentang Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Mempertahankan Kemerdekaan tahun 1945-1949. Dengan demikian, Anda sebagai guru sejarah telah mampu menganalisis perkembangan sejarah Indonesia Pada Masa Revolusi untuk diajarkan kepada peserta didik. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dalam modul ini adalah sebagai berikut.

1. Dalam Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan yang didalamnya terdiri dari adanya pembentukan BPUPKI dan PPKI sebagai badan pembentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu juga, dalam peristiwa proklamasi terdapat pengasingan Ir. Soekarno yang dibawa oleh kaum muda ke Rengasdengklok, dan juga dalam mempersiapkan teks proklamasi dan sebagainya sehingga terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda telah mendorong semangat bangsa Indonesia untuk mengadakan perlawanan, terutama dengan adanya perang gerilya berdasarkan perintah Siasat No. 1 Tahun 1948.
3. Adanya perjuangan diplomasi antara Indonesia dan Belanda, mempunyai tujuan untuk mewujudkan keutuhan Indonesia, namun di sisi lain juga adanya perlawanan dari beberapa daerah yang ada di Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
4. Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan solusi yang ditawarkan oleh UNCI untuk mengakhiri konflik Indonesia-Belanda. Melalui KMB inilah tercapai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I Gde Anak. 1991. *Renville*. Jakarta. Penerbit Pustaka Sinar Harapan
- Algadri, Hamid. 1991. *Suka Duka Masa Revolusi*. Jakarta: UPI
- Anshari, H. Endang Saifudin. 1977. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press
- Bahar, Saafroedin. 1991. *Perjuangan Menuju Persatuan dan Kesatuan Bangsa* Semarang: PT. Mandira Jaya Abadi
- Basri, Agus. 1989. *Mohammad Natsir, Politik Melalui Jalan Dakwah*. Jakarta. Majalah Tempo
- Dinas Sejarah Militer TNI dan Angkatan Darat. 1972. *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat*. Jakarta: Fa Mahjuna
- Hardjosoediro, Soejitno. 1992. *Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hutagalung, Batara R. 2010. *Serangan Umum 1 Maret 1949 (Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia)* Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang
- Imran, Amrin dkk. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah ; Perang dan Revolusi*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Iskandar, Amrin Imran Mohammad dkk. 2012 *Indonesia dalam Arus Sejarah Perang dan Revolusi* Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hove
- Kahin, George Mc Turnan. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu
- Kartodirjo, Sartono, dkk. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta. Depdikbud Balai Pustaka
- Kowani. 1978. *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta. PN. Balai Pustaka
- Marwoto, Kolonel Caj. 2008. *Rute Perjuangan Geriliya Panglima Besar Jenderal Sudirman*. Jakarta: Ami Global Media
- Moedjanto, G, 1989. *Indonesia Abad Ke-20 Dari Perang Kemerdekaan Sampai Pelita III*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius
- Moehkardi. 2012. *Revolusi Nasional 1945 di Semarang* Yogyakarta: DnA Optimax
- Mulyana, Slamet. 2008. *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan* Yogyakarta: LkiS
- Nasution, AH. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia-Agresi Militer Belanda II*
- Nasution, AH. 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa

- Nasution, AH. 1984. *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa lalu dan Yang Akan Datang*. Bandung. Penerbit Angkasa
- Negara, Ahmad Masyur Surya. 2010. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani Pustaka
- Notosusanto, Nugroho. 1971. *Ichdisar Sedjarah Republik Indonesia (1945-Sekarang)*. Jakarta. Pusat Sejarah ABRI Dephankam
- Notosusanto, Nugroho, dkk. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia 3*. Jakarta. Depdikbud
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka
- Pujianti, Selvi M. 2011. *Perundingan Roem-Royen Versi I*, diunduh pada tanggal 27 November 2014.
- Reid, Anthony. 1987. *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ricklefs, MC. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sekretariat Negara. 1986. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada
- Setiono, Benny G. 2008. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Transmedia Pustaka
- Soebagijo I.N. 1981. *Sudiro Pejuang Tanpa Henti*. Jakarta. PT. Gunung Agung
- Soegito, AT. 1987. *Sejarah Ketatanegaran Republik Indonesia*. Semarang: Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
- Soenario. 1971. *Banteng Segitiga dan Indonesia Menggugat*. Jakarta.Yayasan Marinda
- Sudiyo. 2004. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan* Jakarta: Rineka Cipta
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Sumarmo, Iwa. 1985. *Indonesia Merdeka atau Mati: Sejarah Pasukan Pelajar IMAM selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Keluarga Besar Imam
- Suprpto, Bibit. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Supriatna, Nana. 2002. *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Sumiyati, Sri Endang, Tataq Chidmad, Budi Hartono. 2001. *Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2010. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadi Pustaka Semesta
- Susanto, Sewan. 1985. *Perjuangan Tentara Pelajar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Wardaya, Baskara T, SJ, Dr. 2006. *Bung Karno Menggugat Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal 65 Hingga G 30 S*. Yogyakarta: Penerbit Galangpres
- Wirawan, Anak Agung Bagus. 2012. *Pusaran Revolusi Indonesia di Sunda Kecil 1945-1950*. Denpasar: Udayana University Press
- Wiryosuparto, Sucipto, RM. 1961. *Sejarah Indonesia Jilid II Abad ke XVI Sampai Sekarang*. Jakarta: Indira

UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

Hamdan Tri Atmaja

A. Pemberontakan PKI Madiun

Peristiwa Pembrontakan PKI Madiun 1948 merupakan konflik politik yang bersumber S perbedaan tersebut dalam dalam kontek pluralism, maka perbedaan ideologi menjadi kekuatan dalam membangun bangsa. Begitu juga dengan perbedaan kepentingan, selama perbedaan kepentingan disepakati sebagai dinamika dalam berpikir kritis dengan tetap bersepakat pada mengutamakan kepentingan nasional, maka perbedaan kepentingan menjadi kekuatan dalam berpikir kritis dalam membangun bangsa. Namun sebaliknya selama perbedaan kepentingan dipandang sebagai kepentingan kelompok yang dipaksakan dengan mengalahkan kepentingan nasional, maka perbedaan kepentingan menjadi bisa sumber konflik.

PKI adalah partai politik berhaluan kiri yang dalam sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari *ZIndische Social Democratissche Vereeniging* (ISDV) atau (Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda), yang didirikan pada tahun 1914 oleh Henk Sneevliet. Ia adalah seorang pemimpin sayap kiri Serikat Buruh Kereta Api dan yang sebelumnya merupakan tokoh sayap kiri gerakan sosialis, yang terpaksa hijrah ke Indonesia pada tahun 1913. ISDV sendiri pada mulanya lahir dari keberadaan Sarekat Islam yang melarang anggotanya berideologi ganda dalam perjuangan pergerakan Indonesia. Situasi tersebut membuat para anggota yang beraliran komunis kecewa dan keluar dari Sarekat Islam, kemudian mendirikan partai sendiri yang diberi nama ISDV. Selanjutnya pada Kongres ISDV pada bulan Mei tahun 1920, nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia (PKH), dengan Samuan sebagai ketuanya. Perlu dicatat di sini PKH merupakan partai pertama di Asia, yang menjadi bagian dari Komunis International. Kemudian pada tahun 1924 nama PKH diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pembrontakan PKI dilakukan oleh PKI yang bergabung dengan Front Demokraksi Rakyat atau (FDR). FDR adalah sebuah front persatuan partai-partai dan organisasi sayap kiri yang didirikan pada tanggal bulan Februari 1948 oleh Amir Syarifudin. Organisasi yang tergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBSI dan Persindo.

Pada saat bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Belanda, baik berjuang secara fisik melalui kekuatan bersenjata maupun secara diplomasi, melalui perjanjian-perjanjian dengan pihak Belanda, tiba-tiba PKI menelikung dari belakang dengan melakukan pembrontakan di Madiun pada tahun 1948, peristiwa tersebut kemudian di kenal dengan nama Pembrontakan PKI Madiun. Pembrontakan PKI dilakukan oleh PKI yang bergabung dengan Front Demokraksi Rakyat atau (FDR). FDR adalah sebuah front persatuan partai-partai dan organisasi sayap kiri yang didirikan pada tanggal bulan Februari 1948 oleh Amir Syarifudin. Organisasi yang tergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBSI dan Persindo.

Latar belakang pembrontakan PKI Madiun, berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Syariffudin. Sebagai Perdana Menteri yang mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville. Sejak penandatanganan perjanjian Renville, Amir Syarifudin tidak lagi mendapat dukungan dalam kabinet. Selanjutnya dibentuk Kabinet baru dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pembentukan kabinet baru tidak disetujui oleh Amir Syarifudin dengan kelompok sayap kiri lainnya, yang kemudian bergabung dalam FDR. Sementara itu Muso seorang tokoh komunis dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 Agustus 1948, menawarkan sebuah gagasan yang dikenal dengan nama jalan baru untuk Republik Indonesia. Muso menghendakai partai kelas buruh dengan memakai nama PKI. Untuk itu perlu dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxisme- Leninisme, yaitu PKI, Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut “Komite Front Nasional”. Untuk menyampaikan gagasannya Muso dan Amir Syarifudin berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan melakukan aksi agitasi, demonstrasi dan aksi-aksi pengacauan. Peristiwa Madiun pecah pada 1948, ketika tentara di bawah Sukarno dan Hatta menyerang PKI, Aidit

melarikan diri dari Jawa Tengah dan bersembunyi di Jakarta – kota yang sudah sangat dikenalnya sejak ia menjadi aktivis nasionalis pada pertengahan 1940-a (Rosa, 2008).

Di bawah pimpinan Muso PKI berusaha meraih kekuasaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih kekuasaan adalah dengan menarik partai dan berbagai organisasi untuk bergabung dengan FDR. Mendorong melakukan demonstrasi, pemogokan kaum buruh dan petani. Muso juga memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah, dengan melakukan kritik atau pernyataan yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang pada waktu itu ditengahi oleh Amerika Serikat (AS) (Rosa, 2008). Pernyataan-pernyataan Muso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet, sementara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua Negara berseberangan dalam Perang Dingin, Puncak dari upaya yang dilakukan oleh PKI adalah melakukan pembontakan Senjata pada tanggal 18 September 1948 di Kota Madiun. Bersmaan dengan itu pula diproklamkan berdirinya “Republik Soviet Indonesia” dan dibentuknya pemerintahan baru (Taufik Abdullah, 2012).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meredam aksi yang dilakukan PKI adalah dengan melakukan diplomasi dengan pimpinan PKI Muso. Namun demikian upaya diplomasi menemukan jalan buntu. Mengingat situasi pada saat itu sudah semakin memanas. Aksi yang dilakukan oleh PKI pada awal pembontakan adalah melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, tokoh-tokoh partai politik anti komunis dan juga membunuh kaum santri. PKI juga melakukan tindakan penangkapan sewenang wenang terhadap tokoh-tokoh yang berseberangan dengan PKI tidak segan-segan mereka membunuh dan menembak lawan-lawan politiknya. Pembontakan PKI Madiun akhirnya dapat ditumpas oleh pasukan Divisi Siliwangi. Pembontakan PKI Madiun dapat dipadamkan dan pemimpin pemberontakan Muso tewas tertembak, sementara Amir Syarifudin ditangkap dan jatuh hukuman mati. Sedangkan tokoh-tokoh PKI muda seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri dan pada saat itu PKI belum dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

B. Pemberontakan DII/TII

Pembontakan DII/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwirjo, pada awalnya hanya berlangsung di Jawa Barat, kemudian menyebar

ke seluruh wilayah Indonesia, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Kartosuwirjo sendiri pada awalnya seorang pejuang melawan Belanda. Ia diangkat menjadi sekretaris Masyumi Jawa Barat. Berawal dari hasil perjanjian Renville, sesuai dengan perjanjian Renville, maka TNI harus meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Sementara itu laskar Hisbullah dan Sabilillah di bawah pengaruh Kartosuwirjo tidak bersedia pindah atau meninggalkan Jawa Barat, bahkan mereka membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Bersama dengan TII, kemudian Kartosuwirjo menyatakan pembentukan Darul Islam pada Agustus 1949 (Taufik Abdullah, 2012)

Pada saat pasukan Siliwangi tersebut berhijrah, DII/TII dengan leluasa melakukan gerakannya dengan merusak dan membakar rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, serta menyiksa dan merampas harta benda yang dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Kemudian ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat, Kartosuwirjo tidak mau mengakui TNI, kecuali TNI bergabung dengan DII/TII. Itu artinya Kartosuwirjo tidak mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Pada Tanggal 7 Agustus 1949, di sebuah desa yang terletak di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mengumumkan bahwa Negara Islam Indonesia telah berdiri di Negara Indonesia, dengan gerakannya yang disebut dengan DI (Darul Islam) dan para tentaranya diberi julukan dengan sebutan TII (Tentara Islam Indonesia). Gerakan DI/NII ini dibentuk pada saat provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh Pasukan Siliwangi yang sedang berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan Renville.

Usaha untuk menumpas pembrontakan DI/TII ini memakan waktu cukup lama di karenakan oleh beberapa faktor, yaitu: (a) tempat tinggal pasukan DI/TII ini berada di daerah pegunungan yang sangat mendukung organisasi DI/TII untuk bergerilya, (b) pasukan Sekarmadji dapat bergerak dengan leluasa di lingkungan penduduk, (c) pasukan DI/TII mendapat bantuan dari orang Belanda yang di antaranya pemilik perkebunan, dan para pendukung Negara pasundan, (d) Suasana Politik yang tidak konsisten, serta perilaku beberapa golongan partai politik yang telah mempersulit usaha untuk pemulihan keamanan (Djoened, 2010).



Gambar 1. Penangkapan Kartosuwiryo

Selanjutnya, untuk menghadapi pasukan DI/TII, pemerintah mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meringkus kelompok ini. Pada tahun 1960 para pasukan Siliwangi bekerjasama dengan rakyat untuk melakukan operasi “Bratayudha” dan “Pagar Betis” untuk menumpas kelompok DI/TII tersebut. Pada Tanggal 4 Juni 1962 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan para pengawalnya di tangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Bratayudha yang berlangsung di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Setelah Sekarmadji ditangkap oleh pasukan TNI, Mahkamah Angkatan Darat menyatakan bahwa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati, dan setelah Sekarmadji meninggal, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dapat dimusnahkan.

Pemberontakan DI/TII merupakan pemberontakan yang hampir menyeluruh terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berikut merupakan cakupan wilayah pemberontakan DI/TII.

Tabel 1. Pemberontakan DI/TII di berbagai wilayah

No	Pemberontakan	Waktu	Pemimpin
1	Pemberontakan DI/TII Jawa Barat	7 Agustus 1949	Kartosuwiryo
2	Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah	23 Agustus 1949	Amir Fatah
3	Pemberontakan DI/TII Aceh	20 Spetember 1953	Daud Beureueh

	Pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan	Oktober 1959	Haderi bin Umar
4	Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan	1951	Kahar Muzakar

C. Pemberontakan APRA

Salah satu dari hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Indonesia sebagai Negara RIS, tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kestauan Republik Indonesia, meskipun pengakuan sebagai Negara merupakan suatu proses untuk kembali ke NKRI, karena memang hampir semua masyarakat dan perangkat-perangkat pemerintahan di Indonesia tidak setuju dengan bentuk negara federal (Djoened, 2010). Tapi juga tidak sedikit yang tetap menginginkan Indonesia dengan bentuk negara federal. Keinginan-keinginan yang berbeda ini menimbulkan banyak ketidakpuasan yang pada ujungnya menimbulkan pemberontakan-pemberontakan atau kekacauan-kekacauan yang terjadi pada saat itu. Pemberontakan-pemberontakan ini dilakukan oleh golongan-golongan tertentu yang mendapatkan dukungan dari Belanda karena merasa takut jika Belanda meninggalkan Indonesia maka hak-haknya atas Indonesia akan hilang.

Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut APRA merupakan pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda sebagai Negara RIS. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di pimpinan oleh Kapten Raymond Westerling dan didalangi oleh golongan kolonialis Belanda. Landasan yang mendorong gerakan APRA adalah kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami bahwa sebagian rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik oleh Belanda atau Jepang, mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Menurut ramalan itu akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman dan damai dan rakyat akan makmur dan sejahtera. Selanjutnya Westerling menghimpun rakyat dan

mantan tentara KNIL yang pro terhadap Belanda untuk ikut bergabung menjadi bagian dari tentara APRA.

APRA sebenarnya sudah dibentuk sebelum Konferensi Meja Bundar itu disahkan. Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah "Ratu Adil Persatuan Indonesia" (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan anggota KNIL dan yang melakukan desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.

Tujuan Westerling membentuk APRA ini adalah mengganggu prosesi pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. Upaya itu dihalangi oleh Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda. Tujuan lainnya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS (Djoened, 2010).

Pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh mantan Kapten KNIL Raymond Westerling bukanlah pemberontakan yang dilancarkan secara spontan, tetapi telah direncanakan sejak beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Pada 25 Desember 1949 Westerling menghubungi Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda untuk menanyakan bagaimana pendapat van Vreeden mengenai rencananya untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda terhadap Indonesia. Van Vreeden memang telah mendengar berbagai rumor, antara lain ada sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan, tidak terkecuali rumor mengenai pasukan yang dipimpin oleh Westerling. Jenderal van Vreeden yang

bertanggung-jawab atas kelancaran penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 tersebut memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan seperti apa yang diungkapkan padanya.

Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah sebuah ultimatum. Westerling menuntut agar Pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Negara Pasundan serta Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif terkait ultimatum tersebut dalam waktu 7 hari dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar. Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld, Nederlandse Hoge Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda) yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerjasama dengan Westerling.

Pada 10 Januari 1950 Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelumnya, ketika Lovink masih menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota (WTM), dia telah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal *exorbitante rechten* terhadap Westerling. Sementara itu, Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Jakarta. Sebelumnya, mereka pernah bertemu bulan Desember 1949. Westerling menerangkan tujuannya, dan meminta Hamid menjadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi Westerling tersebut, namun dia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak membuahkan hasil apapun.

Pertengahan Januari 1950, Menteri UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr.J.H. van Maarseven berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseven, bahwa dia telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling. Ketika berkunjung ke Belanda,

Menteri Perekonomian RIS Juanda pada 20 Januari 1950 menyampaikan kepada Menteri Götzen, agar pasukan elit RST yang dipandang sebagai faktor risiko, secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST telah dievakuasi ke Ambon dan tiba di Ambon tanggal 17 Januari 1950. Pada 21 Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen bahwa Jenderal Buurman van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking telah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RST.

Operasi penumpasan dan pengejaran terhadap gerombolan APRA yang sedang melakukan gerakan mundur segera dilakukan oleh TNI. Sisa pasukan Wasterling di bawah pimpinan Van der Meulen yang bukan anggota KNIL Batujajar dan polisi yang menuju Jakarta, pada 24 Januari 1950 dihancurkan Pasukan Siliwangi dalam pertempuran daerah Cipeuyeum dan sekitar Hutan Bakong dan dapat disita beberapa truk dan pick up, tiga pucuk bren, 4 pucuk senjata ukuran 12,7 dan berpuluh karaben.

Pada 24 Januari 1950 tengah malam terjadi tembak-menembak di Kramatalaan No.29 Jakarta antara pasukan TNI dengan gerombolan yang diduga adalah deseteurs (anggota tentara yang melarikan diri dari dinas tentara). Tembak-menembak tersebut berlangsung sampai 25 Januari 1950 pagi. Dalam penggerebekan pasukan kita berhasil merampas 30 pucuk *owens-guns*.

Di kota Bandung juga diadakan pembersihan dan penahanan terhadap mereka yang terlibat, termasuk beberapa orang tokoh Negara Pasundan. Bagaimana dengan Wasterling? Setelah melarikan diri dari Bandung, Westerling masih melanjutkan petualangannya di Jakarta. Ia merencanakan suatu gerakan untuk menangkap semua Menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet, dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. A. Budiardjo, dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang.

Gerakan tersebut dapat digagalkan dan kemudian diketahui bahwa otaknya adalah Sultan Hamid II, yang juga menjadi anggota Kabinet RIS sebagai Menteri tanpa portofolio. Sultan Hamid II dapat segera ditangkap, sedangkan Westerling sempat melarikan diri ke luar negeri pada 22 Februari 1950 dengan menumpang

pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Dengan kaburnya Wasterling, maka gerakannya pun jadi bubar.

D. Pemberontakan Andi Azis

Pemberontakan Andi Azis yang terjadi di Makassar pada tahun 1950, dipimpin oleh Andi Aziz sendiri, seorang perwira mantan KNIL. Diawali oleh adanya kekacauan yang berlangsung di Makassar, yakni adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal, mereka mendesak NIT supaya segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya Negara Federal. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April 1950 pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak satu Batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan “Pasukan Bebas” di bawah komando kapten Andi Azis. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya.

Pada dasarnya pemberontakan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Andi Aziz dengan gerombolannya ingin mempertahankan Negara Indonesia Timur. Disamping di latar belakang pula oleh penolakan masuknya TNI ke dalam bagian Angkaran Perang Republik Indonesia Serikat. Tindakan yang dilakukan oleh Andi Aziz adalah menduduki tempat-tempat penting, dan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginta. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberontakan Andi Aziz adalah : (a) Menuntut bahwa keamanan di Negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja. (b) Menentang campur tangan pasukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) terhadap konflik di Sulawesi Selatan. (c) Mempertahankan berdirinya Negara Indonesia Timur.

Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Azis menyerang markas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertempat di Makassar, dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan, Letkol Mokoginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Azis. Akhirnya, Ir.P.D Diapri (Perdana Menteri NIT) mengundurkan diri karena

tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Azis dan ia digantikan oleh Ir. Putuhena yang pro-RI. Pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai Wali Negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Untuk menanggulangi pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Azis, pada tanggal 8 April 1950 pemerintah memberikan perintah kepada Andi Azis bahwa setiap 4 x 24 Jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Untuk pasukan yang terlibat dalam pemberontakan tersebut diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada waktu yang sama, dikirim pasukan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan.

Tanggal 15 April 1950, Andi Azis pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati, Presiden dari Negara NIT. Namun karena keterlambatannya untuk melapor, Andi Azis akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan untuk pasukan TNI yang dipimpin oleh Mayor H. V Worang terus melanjutkan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menguasai Makassar tanpa adanya perlawanan dari pihak pemberontak.

Pada Tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh A.E Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan-pun tidak berlangsung lama karena keberadaan anggota KL-KNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Para anggota KL-KNIL memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KL-KNIL dengan pasukan APRIS.

Pertempuran antara pasukan APRIS dengan KL-KNIL berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1950. Kota Makassar pada saat itu sedang berada dalam kondisi yang sangat menegangkan karena terjadinya peperangan antara pasukan KL-KNIL dengan APRIS. Pada pertempuran tersebut pasukan APRIS berhasil menaklukkan lawan, dan pasukan APRIS-pun melakukan strategi pengepungan terhadap tentara-tentara KNIL tersebut.

Tanggal 8 Agustus 1950, pihak KL-KNIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi untuk berperang

dan melawan serangan dari lawan. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel A.E Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jendral Scheffelaar dari pihak KL-KNIL. Hasil perundingan kedua belah pihakpun setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar tersebut, dan dalam waktu dua hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar.

Pada tanggal 30 Januari 1984 seluruh keluarga dari Andi Azis diselimuti oleh duka yang mendalam karena kepergian sang Kapten, Andi Abdoel Azis. Di usianya yang sudah menginjak 61 Tahun, ia meninggal di Rumah Sakit Husada Jakarta karena serangan jantung yang dideritanya. Andi Azis meninggalkan seorang Istri dan jenasahnya diterbangkan dari Jakarta Ke Sulawesi Selatan, lalu dimakamkan di pemakaman keluarga Andi Djuanna Daeng Maliungan yang bertempat di desa Tuwung, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Dalam suasana duka, mantan Presiden RI, BJ. Habibie beserta istrinya Hasri Ainun, mantan Wakil Presiden RI, Try Sutrisno dan para anggota perwira TNI turut berduka cita dan hadir dalam acara pemakaman Andi Azis.

E. Pemberontakan RMS

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda

Pemerintah RMS yang pertama dibawah pimpinan dari J.H. Manuhutu, Kepala Daerah Maluku dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah Mr. dr. Chris Soumokil dibunuh secara illegal atas perintah Pemerintah Indonesia, maka dibentuk Pemerintah dalam pengasingan di Belanda dibawah pimpinan Ir. [Johan Alvarez Manusama], pemimpin kedua [drs. Frans Tutuhaturunewa] turun pada tanggal 24 april 2009. Kini mr. John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

Tagal serangan dan aneksasi illegal oleh tentara RI, maka Pemerintah RMS - diantaranya Mr. Dr. Soumokil, terpaksa mundur ke Pulau Seram dan memimpin guerilla di pedalaman Nusa Ina (pulau Seram). Ia ditangkap di Seram pada 2

Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.

Pemberontakan Andi Azis, Westerling, dan Soumokil memiliki kesamaan tujuan yaitu, mereka tidak puas terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI). Pemberontakan yang mereka lakukan menggunakan unsur KNIL yang merasa bahwa status mereka tidak jelas dan tidak pasti setelah KMB. Keberhasilan anggota APRIS mengatasi keadaan yang membuat masyarakat semakin bersemangat untuk kembali ke pangkuan NKRI. Namun, dalam usaha untuk mempersatukan kembali masyarakat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi beberapa hambatan yang diantaranya terror dan intimidasi yang di tujukan kepada masyarakat, terlebih setelah terror yang dibantu oleh anggota Polisi yang telah dibantu dengan pasukan KNIL bagian dari Korp Speciale Troepen yang dibentuk oleh seorang kapten bernama Raymond Westerling yang bertempat di Batujajar yang berada di daerah Bandung. Aksi terror yang dilakukannya tersebut bahkan sampai memakan korban jiwa karena dalam aksi terror tersebut terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Benih Separatisme-pun akhirnya muncul. Para biokrat pemerintah daerah memprovokasi masyarakat Ambon bahwa penggabungan wilayah Ambon ke NKRI akan menimbulkan bahaya di kemudian hari sehingga seluruh masyarakat diingatkan untuk menghindari dan waspada dari ancaman bahaya tersebut.

Pada tanggal 20 April tahun 1950, diajukannya mosi tidak percaya terhadap parlemen NIT sehingga mendorong kabinet NIT untuk meletakkan jabatannya dan akhirnya kabinet NIT dibubarkan dan bergabung ke dalam wilayah NKRI. Kegagalan pemberontakan yang di lakukan oleh Andi Abdoel Azis (Andi Azis) menyebabkan berakhirnya Negara Indonesia Timur. Akan tetapi Soumokil bersama para anggotanya tidak akan menyerah untuk melepaskan Maluku Tengah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indoneisa. Bahkan dalam perundingan yang berlangsung di Ambon dengan pemuka KNIL beserta Ir. Manusaman, ia mengusulkan supaya daerah Maluku Selatan dijadikan sebagai daerah yang merdeka, dan bila perlu seluruh anggota dewan yang berada di daerah Maluku Selatan dibunuh. Namun, usul tersebut ditolak karena anggota dewan justru mengusulkan supaya yang melakukan proklamasi kemerdekaan di Maluku Selatan tersebut adalah Kepala Daerah Maluku

Selatan, yaitu J. Manuhutu. Akhirnya, J. Manuhutu terpaksa hadir pada rapat kedua di bawah ancaman senjata.

Pemberontakan RMS yang didalangi oleh mantan jaksa agung NIT, Soumokil bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diproklamasikannya Republik Maluku Selatan (RMS), Gubernur Sembilan Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan RI. Di sisi lain, dalam menjelang proklamasi RMS, Soumokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Soumokil. Dan pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS), dengan J.H Manuhutu sebagai Presiden dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri. Para menterinya terdiri atas Mr.Dr.C.R.S Soumokil, D.j. Gasperz, J. Toule, S.J.H Norimarna, J.B Pattiradjawane, P.W Lokollo, H.F Pieter, A. Nanlohy, Dr.Th. Pattiradjawane, Ir.J.A. Manusama, dan Z. Pesuwarissa.

Tanggal 27 April 1950 Dr.J.P. Nikijuluw ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan pada 3 Mei 1950, Soumokil menggantikan Munuhutu sebagai Presiden Rakyat Maluku Selatan. Pada tanggal 9 Mei, dibentuk sebuah Angkatan Perang RMS (APRMS) dan Sersan Mayor KNIL, D.J Samson diangkat sebagai panglima tertinggi.

Dalam upaya penumpasan, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara diplomasi perdamaian. Cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu, dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh Dr. Leimena. Namun, misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Soumokil. Selanjutnya misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Soumokil.

Karena upaya perdamaian yang diajukan oleh pemerintah tidak berhasil, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan Gerakan Operasi Militer (GOM) III yang dipimpin

oleh seorang kolonel bernama A.E Kawilarang, yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Setelah pemerintah membentuk sebuah operasi militer, penumpasan pemberontakan RMS pun akhirnya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950, dan pada tanggal 15 Juli 1950, pemerintahan RMS mengumumkan bahwa Negara Republik Maluku Selatan sedang dalam bahaya. Pada tanggal 28 September, pasukan militer yang diutus untuk menumpas pemberontakan menyerbu ke daerah Ambon, dan pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk benteng Nieuw Victoria yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut.

Dengan jatuhnya pasukan RMS yang berada di daerah Ambon, maka hal ini membuat perlawanan yang dilakukan oleh pasukan RMS dapat ditaklukan. Pada tanggal 4 sampai 5 Desember, melalui selat Haruku dan Saparua, pusat pemerintahan RMS beserta Angkatan Perang RMS berpindah ke Pulau Seram. Pada tahun 1952, J.H Munhutu yang tadinya menjabat sebagai presiden RMS tertangkap di pulau Seram, Sementara itu sebagian pimpinan RMS lainnya melarikan diri ke Negara Belanda. Setelah itu, RMS kemudian mendirikan sebuah organisasi di Belanda dengan pemerintahan di pengasingan (Government In Exile).

Pada Tahun 1978 anggota RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda di Assen-Wesseran. Teror tersebut juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang berada di bawah pimpinan RMS, seperti kelompok Bunuh Diri di Maluku Selatan. Dan pada tahun 1975 kelompok ini pernah merampas kereta api dan menyandera 38 penumpang kereta api tersebut.

Pada tahun 2002, pada saat peringatan proklamasi RMS yang ke-15 dilakukan, diadakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku. Akibat dari kejadian ini, 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapan aktivis tersebut dilakukan, mereka tidak menerima penangkapan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya mereka memperadilkan Gubernur Maluku beserta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku karena melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 15 orang yang diduga sebagai propokator dan pelaksana pengibaran bendera RMS tersebut. Aksi pengibaran bendera tersebut terus dilakukan, dan pada tahun 2004, ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati. Akibat dari pengibaran bendera ini, sejumlah aktivis yang berada di bawah

naungan RMS ditangkap dan akibat dari penangkapan tersebut, terjadilah sebuah konflik antara sejumlah aktivis RMS dengan Kelompok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

F. Pemberontakan PRRI-Permesta

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan PERMESTA sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan pada saat bersamaan Divisi Banteng diciutkan sehingga menjadi kecil dan hanya menyisakan satu brigade. Brigade ini pun akhirnya diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi IX Banteng yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu juga, terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah.

Ketidakpuasan tersebut akhirnya memicu terbentuknya dewan militer daerah yaitu Dewan Banteng yang berada di daerah Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956. Dewan ini diprakarsai oleh Kolonel Ismail Lengah (mantan Panglima Divisi IX Banteng) bersama dengan ratusan perwira aktif dan para pensiunan yang berasal dari Komando Divisi IX Banteng yang telah dibubarkan tersebut. Letnan Kolonel Ahmad Husein yang saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri 4 TT I BB diangkat menjadi ketua Dewan Banteng. Kegiatan ini diketahui oleh KASAD dan karena Dewan Banteng ini bertendensi politik, maka KASAD melarang perwira-perwira AD untuk ikut dalam dewan tersebut. Akibat larangan tersebut, Dewan Banteng justru memberikan tanggapan dengan mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muloharjo, dengan alasan Ruslan Muloharjo tidak mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal (Djoened, 2010).

Selanjutnya, PRRI membentuk Dewan Perjuangan dan tidak mengakui kabinet Djuanda. Dewan Perjuangan PRRI akhirnya membentuk Kabinet baru yang disebut Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Kabinet PRRI).

Pembentukan kabinet ini terjadi pada saat Presiden Soekarno sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Tokyo, Jepang. Pada tanggal 10 Februari 1958, Dewan Perjuangan PRRI melalui RRI Padang mengeluarkan pernyataan berupa “Piagam Jakarta” yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno supaya “bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional, menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan...”. Tuntutan tersebut antara lain (a) mendesak kabinet Djuanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno, (b) mendesak pejabat presiden, Mr. Sartono untuk membentuk kabinet baru yang disebut Zaken Kabinet Nasional yang bebas dari pengaruh PKI (komunis), (c) mendesak kabinet baru tersebut diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja hingga pemilihan umum yang akan datang, (d) mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi, (e) Jika tuntutan tersebut di atas tidak dipenuhi dalam waktu 5×24 jam maka Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri.

Setelah tuntutannya di tolak, PRRI membentuk sebuah Pemerintahan dengan anggota kabinetnya. Pada saat pembangunan Pemerintahan tersebut di mulai, PRRI memperoleh dukungan dari PERMESTA dan rakyat setempat. Pada tanggal 2 Maret 1957, di Makasar yang berada di wilayah timur Negara Indonesia terjadi sebuah acara proklamasi Piagam Perjuangan Republik Indonesia (PERMESTA) yang diproklamasikan oleh Panglima TT VII, Letkol Ventje Sumual. Pada hari berikutnya, PERMESTA mendukung kelompok PRRI dan pada akhirnya kedua kelompok itu bersatu sehingga gerakan kedua kelompok itu disebut PRRI/PERMESTA. Tokoh-tokoh PERMESTA terdiri dari beberapa pasukan militer yang diantaranya adalah Letnan Kolonel D.J Samba, Letnan Kolonel Vantje Sumual, Letnan Kolonel saleh Lahade, Mayor Runturambi, dan Mayor Gerungan.

Tujuan dari pemberontakan PRRI ini adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh, sebab pada saat itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa. PRRI memberikan usulan atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Taufik Abdullah, 2012). Meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI ini benar, namun cara yang digunakan untuk mengoreksi pemerintah pusat itu

salah. PRRI menuntut kepada pemerintah pusat dengan nada paksaan, sehingga pemerintah menganggap bahwa tuntutan itu bersifat memberontak. Hal tersebut menimbulkan kesan bagi pemerintah pusat bahwa PRRI adalah suatu bentuk pemberontakan. Akan tetapi, jika PRRI itu dikatakan sebagai pemberontak, hal ini merupakan anggapan yang tidak tepat sebab sebenarnya PRRI ingin membenahi dan memperbaiki sistem pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia.

Karena ketidakpuasan PRRI terhadap keputusan pemerintah pusat, akhirnya PRRI membentuk dewan-dewan daerah yang terdiri dari Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda. Pada tanggal 15 Februari 1958, Achmad Husein memproklamasikan bahwa berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Proklamasi PRRI tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia bagian Timur. Tidak lama setelah proklamasi PRRI dilakukan, pasukan gerakan PERMESTA memutuskan untuk bergabung ke dalam kelompok PRRI. Dalam rapat raksasa yang diselenggarakan di beberapa daerah, Kolonel D.J Somba menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 1958, Komando Daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi tengah menyatakan putus hubungan dengan pemerintahan pusat dan mendukung PRRI

Terjadinya pemberontakan PRRI/PERMESTA ini mendorong pemerintahan RI untuk mendesak Kabinet Djuanda dan Nasution supaya menindak tegas pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi PRRI/PERMESTA tersebut (Dahlan. 1994). Kabinet Nasution dan para mayoritas pimpinan PNI dan PKI menghendaki supaya pemberontakan tersebut untuk segera di musnahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk pimpinan Masyumi dan PSI yang berada di Jakarta sedang mendesak adanya perundingan dan penyelesaian secara damai. Namun pada akhirnya, pemerintah RI memilih untuk menindak para pemberontak itu dengan tegas. Pada akhir bulan Februari, Angkatan Udara Republik Indonesia memulai pengeboman instansi-instansi penting yang berada di kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado.

Pada awal bulan Maret, pasukan dari Divisi Diponogoro dan Siliwangi yang berada di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani didaratkan di daratan Pulau Sumatera. Sebelum pendaratan itu dilakukan, Nasution telah mengirimkan Pasukan

Resmi Para Komando Angkatan Darat di ladang-ladang minyak yang berada di kepulauan Sumatera dan Riau. Pada tanggal 14 Maret 1958, daerah Pecan Baru berhasil dikuasai, dan Operasi Militer kemudian dikerahkan ke pusat pertahanan PRRI. Pada tanggal 4 Mei 1958 Bukit tinggi berhasil dikuasai dan selanjutnya Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) membereskan daerah-daerah bekas pemberontakan PRRI. Pada penyerangan tersebut, banyak pasukan PRRI yang melarikan diri ke area perhutanan yang berada di daerah tersebut.

Untuk melancarkan penumpasan terhadap Pemberontakan tersebut, pemerintah membentuk sebuah pasukan Operasi Militer yang operasinya disebut Operasi Merdeka pada bulan April 1958 dan operasi tersebut di pimpin oleh Letkol Rukminto Hendradiningrat. Organisasi PERMESTA diduga mendapatkan bantuan dari tentara asing, dan bukti dari bantuan tersebut adalah jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh A.L Pope (Seorang Warga negara Amerika) yang tertembak jatuh di Ambon pada tanggal 18 Mei 1958. Pada tanggal 29 Mei 1961, Achmad Husein menyerahkan diri, dan pada pertengahan tahun 1961, para tokoh-tokoh yang bergabung dalam gerakan PERMESTA juga menyerahkan diri.

Pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan PRRI/PERMESTA ini membawa dampak besar terhadap hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Dukungan dari negara Amerika Serikat terhadap pemberontakan tersebut membuat hubungan antara Indonesia dengan Amerika menjadi tidak harmonis. Apalagi dukungan dari Amerika Serikat terhadap PRRI/PERMESTA terbukti benar dengan jatuhnya pesawat pengebom B-26 yang dikemudikan oleh seorang pilot bernama Allen Pope pada tanggal 18 Mei 1958 di lokasi yang tidak jauh dari kota Ambon. Presiden RI, Ir. Soekarno beserta para pemimpin sipil, dan militernya memiliki perasaan curiga terhadap negara Amerika Serikat dan Negara lainnya. Malaysia yang baru merdeka pada tahun 1957 ternyata juga mendukung gerakan PRRI dengan menjadikan wilayahnya sebagai saluran utama pemasok senjata bagi pasukan PRRI. Begitu pula dengan Filipina, Singapura, Korea Selatan (Korsel), dan Taiwan juga mendukung gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI.

Akibat dari pemberontakan ini, pemerintah pusat akhirnya membentuk sebuah pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. Hal ini mengakibatkan pertumpahan darah dan jatuhnya korban jiwa baik dari TNI maupun

PRRI. Selain itu, pembangunan menjadi terbengkalai dan juga menimbulkan rasa trauma di masyarakat Sumatera terutama daerah Padang.

G. Pembrontakan G30S/PKI

Peristiwa G30S merupakan puncak kemelut politik, dari pertikaian kekuatan-kekuatan politik yang bersumber pada pertentangan (konflik) ideologi yang telah berlangsung sebelumnya. Ideologi menjadi sumber konflik, mengingat dalam sejarah kepartaian di Indonesia, partai tumbuh dan berkembang berdasarkan pada ideologi tertentu. Di penghujung pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, tiga kekuatan politik hadir dipentas perpolitikan Indonesia. Tiga kekuatan tersebut adalah Soekarno sebagai sosok yang memegang kekuasaan, Militer-TNI AD sebagai penjaga kedaulatan negara yang sekaligus memiliki peran sosial-politik, dan PKI sebagai kekuatan politik yang memiliki basis masa cukup kuat dan sebagai satu-satunya kekuatan politik yang mampu mengimbangi kekuatan militer. Munculnya tiga kekuatan politik tersebut, merupakan sebuah proses panjang dari pertikaian kekuatan politik yang bernuansa ideologis dalam setiap periode pemerintahan, dari Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin, kemudian bermuara pada tragedi berdarah peristiwa G30S.

Sekitar pada tahun 1960-1963, diwarnai dengan aksi-aksi sepihak yang dilakukan PKI. Aksi sepihak di daerah-daerah, memaksa orang-orang PKI harus berhadapan dengan TNI-AD, orang-orang PNI, NU, dan kelompok Islam lainnya. Diawali dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) 1960, kedua Undang-undang tersebut mengatur tentang hak dan pengelolaan atas tanah. Melalui kedua UU tersebut, PKI dan organisasi masanya khususnya Barisan Tani Indonesia (BTI) memobilisasi kaum petani untuk menghantam tuan tanah, yang kemudian oleh lawan-lawannya disebut “aksi-aksi sepihak”. Sebagian besar aksi sepihak dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Taufik Abdullah, 2012).

Selanjutnya, konflik tidak sebatas pada persoalan tanah, konflik meluas akibat perbedaan identitas budaya antara PKI dengan lawan-lawannya, karena pemilik tanah di daerah ada dari kalangan NU atau PNI, sehingga aksi-aksi sepihak ditujukan terhadap pemilik tanah dari NU atau PNI. Konflik terus meluas tidak hanya tentang

siapa mempunyai apa, dan berapa banyak bisa didapat, melainkan lebih tentang klaim siapa yang bermoral tinggi (Budiawan, 2004:122) Kemudian dengan jargon-jargon politiknya PKI menyebut para pemilik tanah di desa-desa dengan “setan desa” sedangkan mereka yang duduk dalam perusahaan negara disebut dengan “setan kota”. Aksi-aksi sepihak yang dilakukan akhirnya harus berhadapan dengan aparat teritorial Angkatan Darat dan ormas-ormas Islam yang secara asasi antikomunis, yang menyebabkan suhu politik di daerah semakin memanas.

Kondisi politik menjadi semakin memanas dengan adanya usulan angkatan ke-5. Gagasan angkatan ke-5 yang pada awalnya dilontarkan Soekarno dalam pidatonya di depan siswa Lemhanas, yang dihadiri juga oleh semua panglima angkatan. Dalam ceramah itu, Bung Karno mengatakan bahwa pada waktu berkunjung ke Shanghai, Perdana Menteri RRC Chou En Lai memberitahukan di RRC terdapat empat angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Milisi. Dijelaskan milisi adalah rakyat yang dipersenjatai dan sangat efektif bagi pertahanan negara (Katoppo, 2000:36)

Gagasan tersebut mendapat sambutan hangat dari PKI, karena sesuai dengan strategi PKI untuk menggalang kekuatan secara militer. Sesuai dengan konsep politik yang dianut oleh D.N. Aidit, PKI menetapkan jalan revolusioner, di samping parlementer, sebagai upaya mewujudkan kekuatan komunis Indonesia. Upaya PKI untuk memiliki kekuatan bersenjata, dilaksanakan dengan cara membentuk kekuatan di luar militer, yaitu kekuatan dari buruh dan tani (Katoppo, 2000:37-38). Hal ini sesuai dengan konsep Angkatan ke-5 yang telah diusulkan PKI. Usulan pembentukan angkatan ke-5 mendapat tantangan keras dari TNI-AD. A Yani secara tegas menolak pembentukan angkatan ke-5, dengan alasan tidak efisien karena sudah ada Hansip (Pertahanan Sipil). Walaupun di negara-negara komunis kaum buruh dan tani dipersenjatai, A Yani berpendapat bahwa hal itu tidak perlu diterapkan di Indonesia (Katoppo, 2000:39). Ketegasan A Yani, menunjukkan kekompakan TNI-AD terhadap PKI, baik Nasution maupun A Yani memiliki sikap sama menentang PKI. A Yani bahkan menegaskan “mulai saat ini, kita tidak akan mundur selangkahpun terhadap PKI” (Nusa Bakti, 1999:97)

Di tengah-tengah konflik yang semakin memuncak antara TNI-AD dengan PKI, muncul *Dokumen Gilchrist*, sebuah dokumen yang isinya memojokkan TNI-AD.

Dokumen *Gilchrist*, berupa sebuah surat yang diketik pada formulir yang biasa digunakan oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dengan nama pembuat surat yaitu Sir Andrew Gilchrist, Duta Besar Inggris (1963-1966) untuk Indonesia, tetapi tanpa tanda tangan. Inti dari isi dokumen tersebut seolah-olah telah terjadi hubungan kerjasama antara Angkatan Darat dengan Inggris (*Our local Army*). Surat tersebut diterima Soebandrio, dan kemudian diserahkan pada Soekarno. Pada tanggal 26 Mei 1965 diadakan rapat yang dihadiri oleh panglima keempat angkatan, dalam rapat tersebut Soekarno menanyakan pada A.Yani, adakah anggota Angkatan Darat yang memiliki hubungan dengan Inggris dan Amerika, secara tegas dijawab tidak ada oleh A.Yani. Demikian juga halnya dengan pertanyaan Presiden Soekarno tentang Dewan Jenderal, yang juga secara tegas menyatakan tidak ada hubungan. Pihak TNI-AD mencurigai bahwa dokumen tersebut yang membuat PKI untuk memojokan posisi TNI-AD, meski sampai sekarang tidak diketahui siapa sebenarnya pembuat dokumen tersebut. Melalui pertemuan dengan Soekarno dan beberapa panglima, masalah *Dokumen Gilchrist* sudah dijernihkan, namun masalah tersebut dijadikan rumor oleh PKI untuk meniupkan isu tentang Dewan Jenderal yang akan mengadakan cup atas bantuan CIA. Isu tersebut menjadi isu politik yang amat strategis untuk menyerang TNI-AD, sampai meletusnya peristiwa G30S.



Gambar 3. Jendral yang gugur dalam peristiwa G30S/PKI

Puncaknya terjadi pada malam 30 September 1965. Terjadi penculikan para jenderal. Dari peristiwa tersebut membuat ketujuh jenderal tersebut meninggal dunia. Setelah peristiwa puncak tersebut, muncul berbagai pandangan dan saling melempar tanggung jawab mengenai siapa dalang dibalik peristiwa kejam tersebut. Terjadi pergolakan hebat setelah hari – hari tersebut. PKI yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab mendapat tekanan yang luar biasa. Namun demikian Presiden Soekarno tetap menghimbau rakyat untuk tetap bersatu dan tidak termakan fitnah. Dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Bogor Presiden Sukarno menegaskan pendiriannya, sebagai berikut :

- a. Mengutuk pembunuhan buas terhadap para perwira Angkatan Darat yang telah diangkat sebagai pahlawan revolusi.
- b. Menyatakan segala duka atas hilangnya pahlawan revolusi tersebut.
- c. Tidak membenarkan pembentukan Dewan Revolusi.
- d. Dibutuhkan suasana tenang dan tertib untuk mengambil tindakan seperlunya terhadap oknum-oknum dan semua pihak yang ikut serta dalam peristiwa 30 September dan untuk mencari penyelesaian.
- e. Di samping itu agar supaya kita jangan kehilangan akal dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat untuk melanjutkan dan menyelamatkan revolusi khususnya terhadap ancaman Nekolim yang sudah tentu akan dilaksanakan jika revolusi Indonesia menjadi kacau balau.
- f. Untuk itu Presiden menegaskan agar jangan kita dikemudikan oleh peranan perorangan oleh tindakan – tindakan yang membikin kehidupan bangsa terpecah-pecah membikin Angkatan Bersenjata kita terpecah belah. Ini memang yang dikehendaki dan ditunggu-tunggu oleh Nekolim. Pelajaran dari masa lampau ialah bahwa gontok-gontokan antara kita – selalu diikuti oleh serangan dari pihak Nekolim.

Himbauan Presiden Soekarno sudah tidak lagi mampu untuk menenangkan gejolak masyarakat yang pada masa itu tersulut emosi oleh peristiwa tersebut. Terjadi sebuah perpecahan di masyarakat, PKI dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Masyarakat secara luasa menuntut dibubarkannya PKI, tuntutan tersebut yang sering dikenal dengan Tritura. Bubarkan PKI, Perombakan kabinet Dwikora,

dan turunkan harga pangan. Tuntutan tersebut akhirnya didengar dan kemudian presiden Soekarno akhirnya mengambil sikap dengan tujuan untuk mengamankan pemerintahan. Soekarno mengeluarkan surat perintah guna pengamanan Pemerintahan, yang sampai saat ini dikenal sebaga Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).



Gambar 4. Suasana Gejolak Masyarakat Sesudah peristiwa G30S



Gambar 5. Soekarno mengumumkan Surat Perintah Sebelas Maret

Supersemar dimandatkan pada Soeharto yang kemudian menjadi senjata TNI untuk kemudian mampu dengan leluasa memberantas apa yang telah menjadi ancaman sebuah bangsa meskipun harus menggunakan cara – cara yang subversif, termasuk pemberantasan PKI.

H. Rangkuman

Setelah saudara mempelajari dan membaca modul di atas dapat disarikan materi sebagai berikut :

1. Lahirnya separatisme yang mengancam integrasi bangsa adalah dilandasi faktor kepentingan. Dan dari beberapa organisasi sepratisme tersebut memiliki perbedaan dan kepentingan. Faktor kepentingan ini yang dimaksud adalah kepentingan kelompok, kepentingan lokal(daerah). Pemberontakan – pemberontakan yang didasarkan pada kepentingan daerah antara lain APRA, Andi Azis, dan RMS. Disamping faktor kepentingan gerakan separatisme pemberontakan juga dilatarbelakangi faktor ideologi seperti misalnya pemberontakan yang dilakukan DI/TII dan PKI Madiun, serta G30S/PKI.
2. Latar belakang lahirnya gerakan separatisme disebabkan adanya kelompok atau individu yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan individu dibandingkan kepentingan nasional, tidak bisa menghargai perbedaan budaya dan ideologi, tidak bersedia menyelesaikan permasalahan atau mengambil keputusan melalui kegiatan musyawarah dan mufakat, namun lebih didasarkan pada tindakan secara sepihak atau pribadi, tidak menghargai dan menerima serta melakukan apa yang sudah menjadi kebijakan nasional.
3. Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menumpas gerakan – gerakan sparatisme diantaranya adalah, Kesigapan TNI dalam menumpas gerakan – gerakan tersebut seperti yang dilakukan oleh TNI dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI. Disamping itu dukungan masyarakat Indonesia terhadap tindakan – tindakan yang dilakukan oleh TNI didalam menumpas gerakan tersebut dengan demikian rakyat seluruh Indonesia pada dasarnya sangat mendukung dan mempertahankan tegaknya kedaulatan NKRI dan ini seara moral mendukung apa yang dilakukan oleh TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristides Katoppo, dkk., *Menyingkap Kabut Halim 1965*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 36
- Bhakti, Ikrar Nusa dkk. 1999. *Tentara yang Gelisah Hasil Penelitian Yipika tentang Posisi ABRI dalam Gerakan Reformasi*. Jakarta: Peerbit Mizan
- Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh, 1989, *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia*, Jakarta, Intermasa.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto (ed). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI. Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Rosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Sejarah Indonesia, Buku Teks SMA kelas XII kurikulum 2013, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sudirman, Adi. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia: Dari Era Klasik hingga Kini*. Diva Press. Yogyakarta.
- Taufik Abdullah, A. L. (2012). *Indonesia Dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van hoeve.
- Thaib, Dahlan. 1994. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*(Edisi Revisi), UPP AMP YKPN, Yogyakarta

**PERAN DAN NILAI-NILAI PERJUANGAN TOKOH NASIONAL DAN
DAERAH DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA DAN
BANGSA INDONESIA PADA MASA 1945-1965**

R. Suharso

A. Tokoh dan kiprahnya pada masa Revolusi Fisik 1945-1950

Zaman revolusi fisik (1945-1950) merupakan suatu zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, hak-hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa oleh bangsa Indonesia. Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah sentral dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa Indonesia itu sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk suatu tatanan sosial yang lebih adil akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Tradisi nasional yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia berjuang bahu-membahu selama revolusi hanya merupakan sedikit dasar sejarah (Ricklefs, 1991: 317). Pergulatan masa revolusi telah melahirkan tokoh-tokoh yang sebagian dari mereka kemudian dikenal sebagai Pahlawan Nasional. Tokoh-tokoh itu diantaranya;

H. Agus Salim

Menurut keterangan Adam Malik, nama Haji Agus Salim pertama kali menonjol di luar negeri ketika diadakan konferensi buruh sedunia di Jenewa pada tanggal 30 Mei 1929. Pemerintah kolonial mengirimkan dua orang utusan ke konferensi ini, pertama Haji Agus Salim untuk bergabung dengan delegasi buruh Nederland dan Achmad Djajadiningrat bergabung dalam delegasi Belanda sebagai ahli (Teknis). Mulai saat itu nama Agus Salim dikenal di dalam pergaulan internasional, yang oleh pemerintah

kolonial berusaha ditutup-tutupi aktivitas bangsa Indonesia dan kesanggupannya (Noer, 1953).

Cita-cita Indonesia merdeka terwujud dalam proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan Hukum Internasional, dengan adanya proklamasi oleh bangsa Indonesia tersebut berarti telah terbentuknya negara berdasarkan hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan proklamasi kemerdekaan itu berarti bahwa bangsa Indonesia menyatakan secara sepihak telah melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Belanda dan mengambil nasibnya di tangannya sendiri. Dengan proklamasi itu bangsa Indonesia membentuk organisasi kekuasaan yang berdaulat. Akibat proklamasi tersebut di atas maka berdasarkan Hukum Internasional tersebut telah terjadi perubahan-perubahan. Pertama-tama, perubahan menyangkut perubahan siapa yang berdaulat. Sebelum proklamasi yang berdaulat adalah kerajaan belanda, sedangkan setelah proklamasi yang berdaulat adalah RI (Supriyanto, 2007).



Gambar 1. Presiden Soekarno, Wapres Mohammad Hatta dan Haji Agus Salim
Sumber: academia.edu

Pemerintah Republik Indonesia yang awalnya berpusat di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena keadaan di Jakarta tidak aman, sedangkan Yogyakarta dianggap lebih aman. Sebelumnya pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden yang isinya pencabutan diadakan gerakan Rakyat Nasional yang disebut Partai Nasional Indonesia dan sebagai penggantinya dianjurkan pembentukan partai-partai dengan tujuan menghindarkan pertumbuhan keditaktoran. Akibat dari lahirnya partai-partai yang seperti jamur dimusim hujan itu mengakibatkan timbulnya kabinet parlementer pertama dengan Sutan Syahrir sebagai perdana Menteri.

Pada kabinet Syahrir I Agus salim tidak duduk dalam jajaran kabinet, ia ditugasi saat itu sebagai penasihat menteri luar negeri Ahmad Subardjo, sebagai menteri luar negeri pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaannya. Baru, pada kabinet Syahrir II yang dibentuk pada tanggal 12 Maret 1946 Agus salim ditunjuk sebagai menteri luar negeri muda, dengan sutan syahrir yang langsung merangkap jadi menteri luar negeri. Kabinet Syahrir II ini diberi mandat kekuasaan yang jelas oleh KNIP dalam sidangnya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 2 Maret 1946. Mandat ini meliputi: (1) mengadakan perundingan dengan para penguasa Belanda atas dasar pengakuan penuh kedaulatan RI, (2) menyiapkan pembelaan bagi RI, (3) menyusun suatu dasar demokratis untuk pemerintahan pusat dan pemerintahan tingkat propinsi, (4) menyelenggarakan pengadaan produksi secara maksimum dan pembagian barang-barang secara adil, dan (5) menjalankan perkebunan dan industri penting dengan pengawasan pemerintah (Surpiyanto, 2007).

Oleh karena dibutuhkannya pengakuan kedaulatan terhadap RI atas kerajaan Belanda, maka dimulailah sejumlah perundingan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan perundingan Linggajati. Dari tanggal 22 Oktober 1946 hingga 15 November 1946 diadakan Sepuluh Tahap perundingan linggarjati. Isi perjanjian linggarjati pada intinya, berisi: Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Dengan demikian, proses berlangsungnya pembuatan perjanjian Linggajati itu sendiri sudah merupakan pengakuan *de facto* Kerajaan Belanda terhadap Indonesia.

Sesudah dua hari membicarakannya di bulan November 1946 kabinet memutuskan memberikan kuasa kepada delegasi RI untuk menandatangani perjanjian linggajati dan kabinet berpegang teguh kepadanya. Hatta menyatakan di hadapan seribu mahasiswa di Yogyakarta tanggal 3 Desember 1946 bahwa perjanjian linggajati itu harus dipandang sebagai saat istirahat dan batu loncatan menuju tahap perjuangan berikutnya untuk merebut kedaulatan dan kemerdekaan RI yang

mencakup seluruh Hindia Belanda dahulu. Jadi, pembatasan atas kedaulatan yang disetujui oleh delegasi RI itu bersifat sementara dan berguna menghimpun kekuatan (Supriyanto, 2007).

Sementara itu, Agus Salim selaku menteri luar negeri muda pada saat itu tanggal 23 maret 1947 menghadiri konferensi Hubungan Antar-Asia (*Inter-Asian Relations Conference*) di New Delhi, India. Ketika itu, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah menjadi sangat populer di India dan mendapat bantuan dan sokongan yang amat meriah dari partai-partai dan rakyat India. Delegasi Republik Indonesia yang beranggotakan 30 orang dan diketuai oleh Dr. Abu Hanifah, Agus Salim pada saat itu bertindak sebagai penasehat delegasi. Dalam pengakuan B. A Ubain dan Mohammad Moein (Moei, 1984), menyatakan:

Delegasi disambut dengan meriah di lapangan terbang Palm di New delhi. Pak Haji Agus Salim yang bertubuh kecil, berjenggot putih, berpeci khas dan berusia lanjut itu menarik perhatian masyarakat India karena beliau lincah dan aktif dan suka bergaul dengan siapa saja. Beliau menguasai banyak bahasa asing, seperti inggris, perancis dan arab, dan pintar membicarakan segala sesuatu, dari soal politik, ekonomi dan sosial hingga sampai kepada pengobatan timur tradisional dengan gaya yang mudah dimengerti oleh si pendengarnya. Selama berada di New Delhi sampai akhir konferensi tanggal 1 april 1947, beliau aktif bertemu dan bertukar pikiran dengan pimpinan pemerintah India (yang masih bersifat interim), pemimpin-pemimpin dari Indian National Congress dan All-India Muslim League, seperti Pandit Jawaharlal Nehru dan Muhammad Ali Jinnah.

Sesudah konferensi, Agus Salim meneruskan perjalanan ke Mesir sebagai ketua Misi Republik Indonesia ke Timur Tengah. Misi itu berangkat melalui Bombay di mana beliau dan anggota misi dijamu makan siang oleh Sayeed Abdul Munim Zawawi, seorang hartawan Arab dari Oman yang simpatik terhadap dan menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Misi berangkat bersama-sama dengan konsul Jenderal Mesir di Bombay, Mohammad Abdul Munim. Mereka sampai di Mesir tanggal 19 April 1947.

Misi diplomatik RI yang di pimpin H. Agus salim ke beberapa negara Arab, beranggotakan juga Muhammad Rasyidi, Nazir Pamuntjak, abdul Kadir dan A.R.Baswedan. Akibat usaha ini negara-negara Islam mengakui Republik Indonesia secara de jure. Pada tanggal 10 Juni 1947 Haji Agus Salim menanda-tangani persahabatan antara Republik Indonesia dan Mesir di Kairo. Perjanjian persahabatan ini ditandatangani oleh Haji Agus Salim sebagai wakil Republik Indonesia,

sedangkan pihak Mesir ditandatangani oleh M.F. Nokrasyi sebagai wakil dari pemerintahan Mesir. Mesir juga mengadakan perjanjian perdagangan dengan Indonesia.



Gambar 2. Agus Salim bersama AR Baswedan, saat berada di Timur Tengah
Sumber: Academia.edu

Delegasi Republik Indonesia kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Republik Siria. Perjanjian diplomatik dengan suriah itu juga mengakui secara *de jure* adanya Republik Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 2 Juli 1947. Republik Siria diwakili oleh Jamil Mardam Bey sebagai Menteri Luar Negeri Suriah. Perjanjian dengan Siria ini persis seperti perjanjian RI-Mesir, hanya tidak ada perjanjian tentang perdagangan (Mukayat, 1981). Upaya-upaya misi diplomatik ini dibutuhkan dalam kenyataan Republik yang masih muda ini memerlukan bukan hanya perlawanan bersenjata, namun sekaligus perjuangan diplomasi untuk memenangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.



Gambar 3. HAS bersama Hasan Al-Banna
Sumber: hariansejarah.id

Pada waktu dibentuk kabinet baru pada tanggal 3 Juli 1947 oleh Amir Sjarifuddin sebagai perdana Menteri, Haji Agus Salim ditunjuk sebagai menteri luar negeri. Sementara Amir Sjarifuddin melaksanakan tugasnya di dalam negeri, Haji Agus Salim menjalankan tugasnya ke Suriah, Irak dan Lebanon. Beliau sampai di Damaskus (suriah) pada tanggal 6 Juli 1947 dan di Baghdad pada tanggal 16 Juli. Melalui Surat No. 155/L tanggal 7 Agustus 1947 Haji Agus Salim menyampaikan kepada kerajaan Mesir keberlangsungan tugas Delegasi RI untuk negara-negara Arab sebagai berikut. Mohammad Rasyidi ditugaskan sebagai Charge d’Affaires, M. Nazir Pamuncak sebagai Counsellor, Mohammad Zein Hassan sebagai sekretaris I, dan Mansur Abu Makarim sebagai sekretaris II. Mereka menjadi staf kedutaan RI pada tingkat Charge d’affaires di Kairo. Ini merupakan kedutaan RI yang pertama dibuka di luar negeri semenjak proklamasi. Staf ini juga merangkap sebagai misi diplomatik RI tetap untuk negara-negara anggota Liga Arab. Dari segi hukum Internasional ini mengandung makna bahwa Arab Saudi mengakui secara *de facto* eksistensi RI. Kunjungan Agus Salim ke Irak pada saat itu belum menghasilkan pengakuan dari Irak atas kemerdekaan Indonesia, sedangkan usaha Libanon berhasil, Libanon mengakui *de jure* Republik Indonesia (Mukayat, 1981).

Berhubung pada tanggal 12 Agustus akan diadakan sidang Dewan Keamanan guna membicarakan sengketa antara Indonesia dan Belanda, maka pemerintah Republik Indonesia mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan agar mengizinkan Menteri Luar Negeri RI Haji Agus Salim dan penasihatnya St. Syahrir untuk menghadiri persidangan guna memberikan keterangan-keterangan seperlunya. Dalam persidangan itu setelah diadakan pemungutan suara dengan berkesudahan 8 setuju dan 3 tidak setuju, maka wakil-wakil Indonesia diperkenankan mengikuti sidang Dewan Keamanan. Delapan Negara yang menyetujui tadi adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Polandia, Australia, Cina, Siria, Kolombia dan Brazilia. Sedangkan tiga negara yang tidak setuju ialah Inggris, Perancis dan Belgia.

Dalam sidang dewan keamanan ini dibicarakan pembentukan sebuah komisi yang akan dikirimkan ke Indonesia atas usul Australia. Wakil Belanda sangat menentang bila wakil Republik Indonesia diberi kesempatan memberikan keterangan-keterangan dalam sidang dewan keamanan. Tetapi Amerika Serikat mengatakan bahwa justru Republik Indonesia perlu memberikan penjelasan. Tanggal 14 Agustus

1947 Sutan Syahrir diberi ijin untuk pertama kali memberikan keterangan tentang keadaan di Indonesia selaku duta Republik Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan ini.

Akhirnya Dewan Keamanan menentukan dua keputusan yaitu; *pertama*, konsul-konsul Jenderal di Jakarta supaya memberikan laporan tentang pelaksanaan gencatan senjata di Indonesia serta menyebutkan pihak mana yang tidak menaati peraturan tersebut dan apa alasannya mereka berbuat demikian. *Kedua*, Baik Belanda maupun Republik Indonesia memilih negara ketiga untuk menjadi perantara dalam penyelesaian antara sengketa Indonesia-Belanda. Akibat keputusan Dewan keamanan ini maka pada tanggal 6 September 1947 kabinet Amir Syarifuddin atas usul Haji Agus Salim meminta agar Australia bersedia menjadi anggota komisi Tiga negara atau KTN, sedangkan Belanda memilih Belgia sebagai negara ketiga. Pada tanggal 19 September 1947 Australia dan Belgia menunjuk Amerika Serikat sebagai negara penggenap dari komisi tiga Negara (Mukayat, 1981).

Pada tanggal 27 Oktober 1947 anggota KTN datang di Indonesia. Dua hari kemudian mereka menuju Yogyakarta dalam usaha berunding dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa perundingan Indonesia-belanda yang diawasi oleh KTN akan diadakan di tempat netral yang disetujui oleh kedua belah pihak. Akhirnya diputuskan bahwa perundingan diadakan di kapal perang *renville*, kemudian perundingan ini dikenal dengan sebutan perundingan Renville. Perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Coa si Kien, Mr. Mohd. Roem, Haji Agus Salim, Mr. Nasrun dan Ir. Juanda. Sedangkan wakil-wakil Belanda terdiri dari Van Vredenburg, Abdulkadir Wijatomo, Dr. Soomokil, Pangeran Kertanegara dan Zulkarnaen.

Perundingan Renville berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 dan menelorkan perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Abdul Kadir Wijoyatomo sebagai wakil Belanda sedangkan pemerintah Negara Republik Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifudin. Di antara putusan perjanjian Renville menyatakan baik tentara Belanda maupun Indonesia harus ditarik mundur di belakang garis demarkasi, yaitu daerah kosong (daerah tidak bertuan) dan biasanya disebut daerah/garis status quo. Garis demarkasi itu merupakan batas daerah yang diduduki oleh tentara Belanda di

satu pihak dan pemerintah Indonesia di lain pihak, sesuai dengan proklamasi pemerintah Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947. Dalam perundingan Renville ini komisi Tiga negara memberikan sumbangan tentang prinsip tambahan di dalam usaha menyelesaikan politik terutama mengenai soal prosedur pembentukan negara Indonesia serikat dan pemerintahan dalam masa peralihan (Mukayat, 1981).

Perjanjian Renville tidak membawa kebahagiaan bagi negara Republik Indonesia dan pemerintahannya. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, maka partai Masyumi dan PNI mencabut wakil-wakilnya yang duduk dalam kabinet Amir Syarifuddin. Kedua partai itu yang ikut serta bertanggungjawab atas adanya perundingan Renville, tetapi pada akhirnya malahan membubarkan kabinetnya sendiri. Akibatnya karena kegawatan situasi dalam pembentukan kabinet, maka Presiden Sukarno menunjuk wakil presiden Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet presidensial. Kabinet Hatta yang pertama ini terdiri dari 17 kementerian. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dijabat oleh Hatta sendiri. Sedangkan jabatan Menteri luar negeri dipercayakan kepada Haji Agus Salim. Meskipun kabinet sudah diganti ternyata suasana di dalam negeri semakin bertambah keruh dengan timbulnya pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948 yang dapat dipadamkan oleh Divisi Siliwangi pada tanggal 1 Oktober 1948. Belanda melihat kesempatan ini, maka dengan segera mengadakan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

Setelah meletusnya agresi yang kedua ini, yang dimulai dengan serangan Belanda secara mendadak berhasil menduduki pangkalan udara Maguwo. Pendaratan tentara payung di pangkalan udara Maguwo tidak mengalami perlawanan yang berarti. Pendaratan itu dilakukan jam 02.00 malam hari. Perjalanan menuju ke kota Yogyakarta juga hanya mengalami perlawanan kecil-kecilan, hal ini disebabkan karena Tentara Republik Indonesia sengaja mengundurkan diri ke luar kota. Pada jam 16.00 kota Yogyakarta telah diduduki oleh Belanda. Tentara Republik Indonesia mengundurkan diri dari kota, bersiap-siap untuk melakukan perang gerilya. Pada waktu itu para pemimpin Republik Indonesia yang berada di kota Yogyakarta sedang membicarakan situasi politik, di Istana Presiden. Diputuskan dalam sidang itu untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera yang akan dipimpin oleh Mr.

Safruddin Prawiranegara, yaitu kemakmuran yang sedang mengadakan perjalanan di Sumatera (Zed, 1997).

Mandat Presiden kepada Mr. Safruddin itu ditandatangani oleh Dwi Tunggal Sukarno-Hatta. Diantara bunyi mandat itu sebagai berikut: “Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah menyerang ibukota. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, maka kami menugaskan dan menguasai kepada Mr. Safruddin Prawiranegara, Menteri kemakmuran republik Indonesia unruk membentuk pemerintahan Republik Darurat di Sumatera”. Dikawatkan pula pada dr. Sudarsono, Palar dan Mr. A.A Maramis di New Delhi untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di India, bila ikhtiar Mr. Syafruddin Prawiranegara tidak berhasil. Instruksi ini ditandatangani oleh Presiden sendiri dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Semua pemimpin yang berada di Istana negara ditawan oleh pemerintah Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta untuk meneruskan perang gerilya. Menteri-menteri Susanto Tritoprojo, IJ.Kasimo dan Lukman Hakim berhasil meloloskan diri dan ikut serta dalam melaksanakan perang gerilya. Sebagian pemimpin-pemimpin yang lain menyerahkan diri dengan tujuan untuk dapat selalu berhubungan dengan Komisi Tiga Negara, sehingga perjuangan politik dan perjuangan fisik dapat dilaksanakan (Mukayat, 1981).

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Desember 1948 mengeluarkan resolusi yang isinya agar gencatan senjata segera dilaksanakan dan para pemimpin RI segera dibebaskan. Tetapi pihak Belanda tidak mau melaksanakan resolusi itu, akibatnya pada tanggal 20 Januari 1949 Dewan Keamanan mengeluarkan resolusinya yang lebih keras dan lebih terperinci, sehingga terpaksa wakil Belanda menyerah, tetapi tetap menghindarkan pelaksanaan resolusi itu. Sebelum Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi 28 Januari 1949, perdana menteri Nehru dari India berhasil mengadakan konprensi yang dihadiri oleh 21 negara dan konferensi itu terkenal dengan nama konferensi New Delhi. Isi konferensi itu sangat menguntungkan Indonesia, karena desakan-desakan dari dari dewan keamanan dan opini dari negara-negara Islam di Timur Tengah serta Konferensi New Delhi terpaksa Belanda mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia yang pada akhirnya lahir

persetujuan Roem-Royen, itulah Yogyakarta kembali ke tangan Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 1949 tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta dan pada tanggal 30 Juni 1949 adalah hari bahagia bagi seluruh rakyat Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juli 1949 presiden Sukarno, wakil presiden Mohammad Hatta, Haji Agus Salim dan lain-lain pemimpin RI kembali ke Yogyakarta (Zed, 1997).

Setelah konferensi antar Indonesia maka pada tanggal 23 Agustus 1949 lahirlah konferensi Meja Bundar di Den Haag. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Hatta termasuk di antaranya Haji Agus Salim. Pada tanggal 29 Oktober 1949 telah ditandatangani piagam persetujuan tentang Konstitusi RIS dan pada tanggal 16 Desember 1949 dilangsungkan pemilihan Presiden untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta yang dilakukan oleh wakil-wakil dari 16 Negara Bagian. Pilihan jatuh pada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, akhirnya pada tanggal 30 Desember 1949 pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat.

Demikian alur peristiwa dalam memperoleh pengakuan internasional atas kedaulatan bangsa Indonesia, hingga perundingan di Den Hag Belanda tahun 1949 yang pada akhirnya mengakui secara de Jure kemerdekaan Indonesia, walaupun beberapa kesepakatan didalamnya terasa sangat kontroversial. Tapi yang jelas Indonesia diakui baik secara de facto maupun secara de jure akan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam memperoleh pengakuan kedaulatan atas kemerdekaan bangsa Indonesia di dunia Internasional ini, hingga berakhirnya agresi pertama hingga meletusnya agresi kedua, kita telah melihat peran yang tak ada absen dari sosok Agus salim. Perjuangan lebih kurang 3 tahun (1946-1949) telah cukup melelahkan kerajaan Belanda, dan telah membuat sebagian besar negara-negara di dunia mengakui kedaulatan Indonesia dan menyokong atas pengakuan kedautan tersebut secara Internasional. Yang membuat sedikit banyaknya belanda tidak lagi banyak ulah dalam agresi militer keduanya dan segera mengakhiri agresi militernya tersebut untuk kemudian mengakui secara penuh, atau dalam bahasa hukum baik pengakuan secara de facto maupun de jure atas kemerdekaan Indonesia.

Jenderal Sudirman

Dikenal sebagai salah satu pahlawan Indonesia, jasa-jasanya sangat dikenang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Besar Soedirman menurut Ejaan

Soewandi dibaca Sudirman, Ia merupakan salah satu orang yang memperoleh pangkat bintang lima selain Soeharto dan A.H Nasution. Jenderal besar Indonesia ini lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiuraji dan ibunya bernama Siyem. Namun ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokrosunaryo setelah diadopsi. Ketika Sudirman pindah ke Cilacap di tahun 1916, ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah dan menjadi siswa yang rajin serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi serta ketaatan dalam Islam menjadikan ia dihormati oleh masyarakat. Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar di antara sedikit orang lainnya yang pernah dilahirkan oleh suatu revolusi. Saat usianya masih 31 tahun ia sudah menjadi seorang jenderal. Meski menderita sakit paru-paru yang parah, ia tetap bergerilya melawan Belanda. Ia berlatar belakang seorang guru HIS Muhammadiyah di Cilacap dan giat di kepanduan Hizbul Wathan.



Gambar 4. Panglima Besar Soedirman
Sumber: academia.edu

Perjalanan Sang Jenderal

Ketika pendudukan Jepang, ia masuk tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor yang begitu tamat pendidikan, langsung menjadi Komandan Batalyon di Kroya. Menjadi Panglima Divisi V/Banyumas sesudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia (Panglima TNI). Ia merupakan Pahlawan Pembela Kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda Republik ini.

Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini boleh dilihat ketika Agresi Militer II Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa ia disebutkan merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi negeri ini.

Sudirman yang dilahirkan di Bodas Karangjati, Purbalingga, 24 Januari 1916, ini memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang terkenal berjiwa nasional yang tinggi. Kemudian ia melanjutkan ke HIK (sekolah guru) Muhammadiyah, Solo tapi tidak sampai tamat. Sudirman muda yang terkenal disiplin dan giat di organisasi Pramuka Hizbul Wathan ini kemudian menjadi guru di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kedisiplinan, jiwa pendidik dan kepanduan itulah kemudian bekal pribadinya hingga bisa menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Perang.

Sementara pendidikan militer diawalinya dengan mengikuti pendidikan tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor. Setelah selesai pendidikan, ia diangkat menjadi Komandan Batalyon di Kroya. Ketika itu, pria yang memiliki sikap tegas ini sering memprotes tindakan tentara Jepang yang berbuat sewenang-wenang dan bertindak kasar terhadap anak buahnya. Karena sikap tegasnya itu, suatu kali dirinya hampir saja dibunuh oleh tentara Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran dengan pasukan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Itulah jasa pertamanya sebagai tentara pasca kemerdekaan Indonesia. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi V/Banyumas dengan pangkat Kolonel. Dan melalui Konferensi TKR tanggal 2 Nopember 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR/Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat Jenderal diberikan padanya lewat pelantikan Presiden. Jadi ia memperoleh pangkat Jenderal tidak

melalui Akademi Militer atau pendidikan tinggi lainnya sebagaimana lazimnya, tapi karena prestasinya.

Ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut dibonceng. Karenanya, TKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikianlah pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 12 Desember tahun yang sama, dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran yang berkobar selama lima hari itu akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang.

Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya atau yang lebih dikenal dengan Agresi Militer II Belanda, Ibukota Negara RI berada di Yogyakarta sebab Kota Jakarta sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit. Keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya yang hanya tinggal satu yang berfungsi. Dalam Agresi Militer II Belanda itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkannya untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan. Namun anjuran itu tidak bisa dipenuhinya karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan pada Belanda serta mengingat akan tanggungjawabnya sebagai pemimpin tentara.

Melakukan Perang Gerilya

Maka dengan ditandu, ia berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama tujuh bulan ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali sementara obat juga hampir-hampir tidak ada. Tapi kepada pasukannya ia selalu memberi semangat dan petunjuk seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Namun akhirnya ia harus pulang dari medan gerilya, ia tidak bisa lagi memimpin Angkatan Perang secara langsung, tapi pemikirannya selalu dibutuhkan.

Sudirman yang pada masa pendudukan Jepang menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan

Banyumas, ini pernah mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Jenderal yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, ini akhirnya harus meninggal pada usia yang masih relatif muda, 34 tahun. Pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar ini meninggal dunia di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai Pahlawan Pembela Kemerdekaan.

Pasukan Tentara Belanda melakukan serangan penyerangan militer ke II melakukan serangan dari udara laut dan darat keseluruh wilayah nusantara. Pada tanggal 19 Desember 1948. Tujuannya ialah menguasai nusantara kembali dengan cara keseluruhan, dari pihak Indonesia tak mungkin melakukan perlawanan perang melewati perang stelling alias frontale corlog, disebabkan peralatan yang tak lebih dari sisi persenjataan yang tak lebih memadai untuk mempersiapkan alat alat itu tak memungkinkan bagi Indonesia sebab Indonesia yang baru membentuk Negara maka belum siap untuk mempersiapkan alat alat perang itu.

Pasukan Indonesia wajib mencari tutorial lain untuk menghadapi serangan pasukan belanda yaitu dengan taktik perang grilia. serangan tentara belanda itu datangnya sangat mendadak yang sangat susah dihadapi Indonesia dengan cara lansung. perang gredia ini dimasukan untuk menghadapi masa perang yang panjang dan juga menghindari korban yang tak sedikit tetapi kadang-kadang rakyat dan para tentara kami tak lebih memahami taktik greliia tersebut.

Perang gerilya adalah tehknik mengepung dengan cara tak terkesan (infisibble). Perang gerilya adalah bentuk perang yang tak terbelit dengan cara resmi pada ketentuan perang. Saat itu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perang gerilya bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menghindari perang terbuka
- b. Menghantam musuh dengan cara tiba-tiba
- c. Menghilang ditengah lebatnya hutan alias kegelapan malam
- d. Menyamar sebagai rakyat biasa.

Memasuki akhir tahun 1947, tentara rpublik yang bergerilya mulai terorganisir dan mempunyai komando gerilya yang dinamis. Akibatnya belanda menjadi kesulitan untuuk menggempur tentara republik. setiap target yang diserang belanda, banyak yang telah kosong, namun pada saat yang tak disangka-sangka, tentara republik menyerang

kedudukan Belanda dengan cepat. Saat Belanda kembali menggencarkan serangan, kubu-kubu tentara republik telah kosong.

Dengan demikian, Belanda hanya menguasai kota-kota besar dan jalan raya. Sesuai itu Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selagi delapan bulan ditempuh tak lebih lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sering Soedirman wajib ditandu alias digendong sebab dalam keadaan sakit keras. Sesuai berpindah-pindah dari berbagai desa rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1. Salah satu pokok isinya ialah: Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber wingate (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya maka seluruh Pulau Jawa bakal menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang wajib melakukan wingate adalah pasukan Siliwangi.

Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih dibayangi bahaya serangan musuh. Sesampainya di Jawa Barat mereka terpaksa pula menghadapi gerombolan DI/TII. Dalam serangan itu Belanda sukses menawan presiden, wakil presiden, dan berbagai pejabat tinggi lainnya. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat (Dekat Danau Toba) dan kemudian ke Bangka. Wakil presiden Hatta langsung ditawan di Bangka. Setekah itu Belanda menyiarkan kabar keseluruhan dunia yang menyebutkan bahwa RI telah tak ada dan perlawanan TNI sama sekali tak berarti. Propaganda seperti ini jelas menyudutkan kedudukan RI di mata dunia Internasional. Kendati demikian, sebelum para pemimpin republik ditawan, Presiden Soekarno tetap semoat memimpin sidang kabinet dengan cara singkat. Hasil sidang kabinet tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Republik Indonesia memberikan amanah melalui radiogram terhadap Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, dan Sumatra.

- b. Presiden dan Wapres tetap tinggal didalam kota supaya tetap dekat dengan KTN dengan resiko ditawan Belanda.
- c. Pemimpin TNI bakal menyingkir keluar kota untuk melaksanakan perang gerilya dengan membentuk wilayah komando di Jawa dan Sumatra (Ricklefs, 1991).

Penyerangan Militer Belanda 2 ini mengajak reaksi dan kecaman dari dunia internasional. Belanda dinilai rutin mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia. Belanda pun dianggap tak menghormati setiap persetujuan yang dibuatnya. Oleh sebab itu, Dewan Keamanan PBB mulai menuturkan penyerangan Belanda yang kedua ini. Dalam pertemuan tanggal 28 January 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memerintahkan penghentian semua operasi militer Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya tentara Republik. Tidak hanya mendapat tekanan dari DK PBB, aksi militer Belanda kedua ini nyatanya tak didukung oleh negara boneka buatannya sendiri. Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundah mencela dan memprotes Penyerangan militer kedua ini. Demikian juga Amerika Serikat yang dengan cara positif telah merubah pandangan atas Indonesia, segera memberikan tekanan politik terhadap Belanda. AS mengancam tak bakal memberikan bantuan dana dari program Marshall Plan terhadap Belanda. Dampak terus menerus memperoleh tekanan politik dari dunia internasional dan terus besarnya performa pasukan Republik melancarkan serangn gerilya, akhirnya Belanda menerima resoulusi DK PBB. Resoulusi DK PBB itu telah mengakhiri aksi Belanda dalam penyerangan militer keduanya.

Moh. Hatta

Proklamasi kemerdekaan Indonesia memang sudah terlaksana 17 Agustus 1945, keesokan harinya Soekarno diangkat menjadi presiden, sementara Hatta menjadi wakil presiden. Dalam situasi ini, jangan dibayangkan proklamasi kemerdekaan dirayakan dengan sorak-sorai oleh seluruh lapisan masyarakat seolah-olah kita sudah 'menang sepenuhnya'. Dalam kondisi ini, tantangan berikutnya yang harus dihadapi adalah: **pengakuan dunia internasional**. Karena tanpa adanya pengakuan dunia internasional, proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta hanyalah dianggap sebagai bentuk "*upaya sekelompok orang yang ngaku-ngaku mendirikan negara*" yang

hanya disaksikan oleh masyarakat lokal sekitar dan tidak mewakili kehendak seluruh kepulauan Nusantara.

Negara Indonesia yang masih bayi memiliki 2 PR besar, yaitu upaya mempertahankan status kemerdekaan dari serangan militer manapun yang berupaya merebut daerah NKRI. Kedua adalah upaya memenangkan pengakuan dunia internasional yang perlu diperjuangkan dalam bentuk perundingan dan perjanjian. Dalam periode awal kemerdekaan, Bapak-Bapak pendiri Bangsa Indonesia, betul-betul harus berjuang susah-payah untuk menyelesaikan 2 PR besar tersebut. Dari mulai isi perjanjian Linggarjati dan Renville yang sangat merugikan pihak Indonesia. Sampai agresi militer Belanda 1-2 yang menggerogoti wilayah NKRI yang notabene adalah bentuk pelanggaran oleh Belanda sendiri terhadap perjanjian Linggarjati dan Renville.



Gambar 5. Keadaan Geografis Indonesia Pasca Perjanjian Linggarjati dan Renville
Sumber: zenius.net

Puncak "kekalahan" Indonesia adalah serangan agresi militer Belanda II ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948 dan berhasil menangkap Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Saat itu, Indonesia saat itu benar-benar kalah telak, hancur berantakan hampir tak berbekas. Jatuhnya ibukota negara (saat itu

Yogyakarta adalah ibukota RI), beserta presiden dan perdana menteri Indonesia menjadi tawanan musuh ini memaksa Indonesia mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Untungnya di saat-saat kritis, TNI masih bisa menunjukkan taringnya dengan melakukan serangan 1 Maret 1949 ke Yogyakarta dan memaksa Belanda untuk melakukan perundingan ulang yaitu Perjanjian Roem-Roijen. Perjanjian ini berlangsung alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka untuk mewakili Indonesia dalam kesempatan terakhir merebut kembali jati diri Negara di Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag.



Gambar 6. Bung Hatta dalam KMB 1949
Sumber: wikipedia.id

Di sinilah Bung Hatta berperan sangat luar biasa besar dalam masa-masa kritis dan paling menentukan bagi keutuhan NKRI. Di saat Indonesia sedang benar-benar di ambang kehancuran, seorang putera Minangkabau yang telah ditempa oleh kedisiplinan belajar yang mencengangkan, oleh keluasan wawasan yang didapat dari melahap 16 peti buku yang selalu ia bawa kemanapun. Dengan kepiawaiannya berargumentasi dan berdialektika, Hatta berhasil mendesak Belanda sekaligus mengambil simpatik seluruh dunia pada Konferensi Meja Bundar (23 Agustus-2 November 1949).

Dengan memanfaatkan reaksi keras dunia internasional terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan Belanda pada perjanjian Linggarjati dan Renville dengan melancarkan agresi militer. Belum lagi tindakan tegas Hatta pada penumpasan pemberontakan komunis di Madiun 1948 yang menambah simpatik pihak Amerika (yang anti-komunis) terhadap Indonesia (Ricklefs, 1991). Ditambah dengan penyalahgunaan alokasi dana setelah Perang Dunia II yang seharusnya digunakan

Belanda untuk membangun negara, malah digunakan untuk menyerang negara lain. Bung Hatta dapat pulang ke tanah air dengan senyum lebar penuh kemenangan, karena dirinya telah berhasil menghadiahkan NKRI (kecuali Irian Barat) sebuah pengakuan kedaulatan resmi dari Belanda dan juga dunia internasional. **Kalo bukan karena seorang Bung Hatta yang waktu itu pergi mewakili Indonesia di KMB, mungkin yang namanya negara Republik Indonesia sudah hilang dari peta dunia seutuhnya 65 tahun yang lalu.**

B. Tokoh dan kiprahnya pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer-liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa Demokrasi Liberal. Indonesia sendiri pada tahun 1950an terbagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang juga bernafaskan liberal (Ricklefs, 1991). Secara umum, demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal. Liberal disini dalam artian perwakilan atau representatif. Dengan pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik.

Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen). Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni politik dalam empat kabinet yang pernah berlaku. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;

Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur

yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Program pokok dari kabinet ini adalah:

- a. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
- b. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
- c. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
- d. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
- e. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian mendapatkan kendala yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan seperti: Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).



Gambar 7. Kabinet Natsir
Sumber: Wikipedia.id

Kabinet Natsir memiliki keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Dalam bidang ekonomi kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

- a. Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
- b. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

- c. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
- d. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tujuan program ini sendiri tidak dapat tercapai dengan baik meskipun anggaran yang digelontorkan pemerintah cukup besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

- a. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
- b. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
- c. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
- d. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
- e. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
- f. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Kabinet Natsir sendiri kemudian berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojokusastro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi

Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo. Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:

- a. Menjamin keamanan dan ketentraman
- b. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
- c. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
- d. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
- e. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara. RMS. dan lainnya. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerja sama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat. Kabinet Sukiman ditenggara melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan *Mutual Security Act* (MSA). MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.



Gambar 8. Kabinet Sukiman
Sumber: academia.edu

Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)



Gambar 9. Kabinet Wilopo
Sumber: wikipedia.id

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:

Program dalam negeri:

- a. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD
- b. Meningkatkan kemakmuran rakyat,
- c. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
- d. Pemulihan stabilitas keamanan negara

Program luar negeri:

- a. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
- b. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta
- c. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan

gerakan sparatis yang progresif. Ketimpangan Jawa dan luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional. Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan

Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang di dukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)

Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama Masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di Parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali Sastroamijoyo dan Wakil PM. Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR). Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I:

- a. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran
- b. Menyelenggarakan Pemilu dengan segera
- c. Pembebasan Irian Barat secepatnya
- d. Pelaksanaan politik bebas-aktif
- e. Peninjauan kembali persetujuan KMB.
- f. Penyelesaian pertikaian politik.

Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu:

- Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955
- Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955

Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia- Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :

~ R. Suharso ~

- a. Berkurangnya ketegangan dunia
- b. Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik diskriminasi ras di negaranya.
- c. Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia-Afrika dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB



Gambar 10. Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Sumber: sejarahindonesiadahulu.blogspot.co.id

Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Ali-Baba. Sistem ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini merupakan penggambaran ekonomi Pribumi-China. Sistem Ali Baba digambarkan dalam dua tokoh, yaitu: Ali sebagai pengusaha pribumi dan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi yang diarahkan pada pengusaha China.

Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan kepada pengusaha Indonesia. Sistem ekonomi ini kemudian didukung dengan :

- a. Pemerintah yang menyediakan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional
- b. Pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan pengusaha asing

Pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan kredit dari pemerintah. Kabinet Ali ini juga sama

seperti kabinet terdahulu mengalami permasalahan mengatasi pemberontakan di daerah seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD memperburuk usaha peningkatan keamanan negara. Pada masa kabinet ini keadaan ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi. Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Keretakan partai pendukung mendorong Kabinet Ali Sastro I harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955 (Riclefs, 1991).

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi.



Gambar 11. Pengambilan Sumpah Jabatan PM Burhanudin Harahap
Sumber: hariansejarah.id

Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:

- a. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah
- b. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
- c. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
- d. Perjuangan pengembalian Irian Barat

~ R. Suharso ~

e. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti:

- a. Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante.
- b. Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
- c. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat
- d. Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi

Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di Parlemen yaitu, PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi. Kabinet ini mengalami gangguan ketika kebijakan yang diambil berdampak pada banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Kabinet ini sendiri mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno ketika anggota Parlemen yang baru kurang memberikan dukungan kepada kabinet (Noer, 1983).

Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)

Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai besar di Parlemen: PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastroamijoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:

- a. Perjuangan pengembalian Irian Barat
- b. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
- c. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
- d. Menyejahterakan perimbangan keuangan negara.
- e. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
- f. Pembatalan KMB

- g. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif
- h. Melaksanakan keputusan KAA.



Gambar 12. PM Ali Sastroamidjoyo bersama dengan Pemimpin Revolusi China Mao Tse Tung
Sumber: brilio.net

Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode *planning and investment*. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB. Pada masa kabinet ini muncul gelombang anti Cina di masyarakat, meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang semakin menguat, serta mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer di Sumater dan Sulawesi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden (Muljana, 2008).

Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Kabinet baru kemudian dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaket Kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak

adanya unsur partai politik di dalamnya. Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagai Panca Karya yaitu:

- a. Membentuk Dewan Nasional
- b. Normalisasi keadaan RI
- c. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
- d. Perjuangan pengembalian Irian Jaya
- e. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Presiden Soekarno juga pernah mengusulkan dibentuknya Dewan Nasional ini sebagai langkah awal demokrasi terpimpin (Kahin, 1952). Pada masa kabinet Juanda, terjadi pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasinya diadakanlah Musyawarah Nasional atau Munas di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56 tanggal 14 September 1957. Munas tersebut membahas beberapa hal, yaitu masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Munas selanjutnya dilanjutkan dengan musyawarah nasional pembangunan (MUNAP) pada bulan November 1957 (Hapsari, 2015).

Tanggal 30 November 1957, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Keadaan negara memburuk pasca percobaan pembunuhan tersebut, banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat yang kemudian berakibat pada pemberontakan PRRI/Permesta. Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pasca Deklarasi Djuanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 13 mil yang sebelumnya hanya 9 mil (Kardiman, 2015).



Gambar 13. Pengembalian Mandat Kabinet Karya dari PM Djuanda kepada Presiden Soekarno

Sumber: kepuustakaan-presiden.pnri.go.id

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut (Kahin, 1952).

C. Tokoh dan kiprahnya pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Soekarno

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin.



Gambar 14. Soekarno Berpidato di Depan Pejabat Tinggi Negara pada Masa Demokrasi Terpimpin
Sumber: katailmu.com

Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama.

Kehidupan Soekarno menyokong pemikiran Soekarno. Kemiskinan dalam kehidupan Soekarno melahirkan buah-buah pemikiran bijaksana yang berjalan sesuai dengan norma-norma masyarakat. (Adams, 2011:27-33) Proses pendidikan Soekarno yang beriringan dengan tekanan kehidupannya membuat Soekarno berbeda dari peserta didik lainnya. Soekarno merupakan murid yang cerdas dan pandai dalam pendidikan. Kapasitas intelektual tersebut semakin hari semakin meningkat ketajamannya. kemudian pendidikannya dilanjutkan ke Hogere Burger School (HBS) Surabaya, sebenarnya sekolah ini adalah sekolah yang sangat sulit dimasuki oleh para pribumi, namun karena Soekarno mampu membayar mahal, maka Soekarno pun masuk sekolah ini dan kemudian di sekolah ini Soekarno mengenal teori marxisme dari seorang gurunya, yaitu C. Hartough yang menganut paham sosial demokrat.

Ayah Soekarno mempercayakan kepada H.O.S cokroaminoto untuk menjaga Soekarno (Mufid, 2015:37-54).

Soekarno menelaah kemerdekaan bukan sekedar kebebasan rakyat Indonesia dengan kaum penjajah saja. Lebih kepada nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri. Orientasi itu terarah kepada keengsaraan kaum marhaen atau rakyat tertindas, dari jaman kerajaan kaum marhaen tidak memiliki kebebasan secara verbal. Kaum marhaen terdahulu diatur dan dibonekakan oleh raja-raja dengan bungkus feodalisme dan kerangka monaraki yang merasukinya. Kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki sebuah garis revolusi yaitu terbebasnya kaum marhaen dari sistem penindasan apapun. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kemerdekaan yang terbebas dari belenggu Kapitalisme dan Imperialisme maupun modern Imperialism (Soekarno, 1963:262).

Demokrasi dalam pandangan Soekarno merupakan sistem yang paling ideal untuk memerintah Indonesia. Walaupun Soekarno menghendaki satu partai saja, Soekarno tetap memberikan perhatian Terhadap masalah demokrasi. Namun perlu ditekankan lagi demokrasi yang Soekarno maksudkan bukanlah demokrasi Barat yang menurut Soekarno hanya menjamin hak rakyat pada persamaan bidang politik, sedangkan hak-hak untuk persamaan ekonomi sama sekali ditinggalkan. Soekarno menganggap demokrasi barat tidak cocok dengan Indonesia. Sehingga sikap antipatinya itu bukan asal sikap yang tidak menggunakan pertimbangan sama sekali. Perstauan dan kesatuan harapan Soekarno terilhami dari Konsepsi mengenai democratisch centralisme. Ide Soekarno mengenai democratisch centralisme dapat dilihat kesinambungannya ketika Indonesia dalam tahap menyusun UUD yang akan dijadikan konstitusi Negara Indonesia Merdeka dengan mengupayakan sistem presidensil, pendirian PNI-Staatspartij dan diterapkannya demokrasi terpimpin yang semua itu mempunyai hubungan langsung dengan ide democratisch centralism yang berdasarkan cita-cita persatuan Indonesia (Basri, 2013:52).

Bentuk pemerintahan Indonesia Pada masa diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, menganut sistem demokrasi liberal. Demokrasi ini Merupakan sistem politik Secara tidak langsung kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai-partai. Kebijakan multipartai yang tertancap di Indonesia mendapati sisi negatif. Sistem demokrasi liberal dan kabinet parlementer berakibat pada

pemerintahan tidak stabil atau sering terjadi pergantian kabinet, pemerintah tidak sempat melaksanakan program kerjanya, sebab setiap kabinet hanya mempunyai masa kerja pendek dan kedudukan pemerintah tidak kuat karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan apabila tidak mendapat persetujuan DPR. Terdapat empat partai besar yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Partai-partai itulah mengirimkan wakil-wakil rakyat dalam DPR (parlemen), sehingga disebut dengan sistem kabinet parlementer. Pada tanggal 21 Februari 1957 Soekarno membongkar kabut tersebut. Soekarno mengusulkan Demokrasi terpimpin sebagai demokrasi yang cocok dengan kepribadian nasional (Ricklefs, 2005:505). Soekarno menganggap bahwa demokrasi liberal dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga demokrasi terpimpin ditawarkan sebagai sebuah gagasan baru.

Menurut Soekarno demokrasi terpimpin merupakan jalan keluar dari kegagalan demokrasi liberal sejak tahun 1950, terbukti bahwa demokrasi liberal ternyata tidak sesuai bagi kondisi di Indonesia sehingga tuntutan-tuntutan maupun dukungan untuk kembali ke UUD 1945 semakin meluas saat memasuki awal tahun 1959. PNI dan PKI sepakat dengan gagasan Presiden Soekarno, ternyata dibalik sikap politik yang menyatakan dukungan akan dikeluarkan dekrit merupakan bentuk pertarungan ideologi bahwa inilah salah satu jalan untuk dapat menerobos kekerasannya pendirian partai-partai Islam dalam Majelis Konstituante yang bertugas merumuskan UUDS 1950 menginginkan isi dari Pancasila digantikan dengan Piagam Jakarta serta dicantumkan dalam undang-undang dasar yang baru (Romadhoni, 2014:2).

Kelahiran Dekrit presiden 5 Juli dilatar belakangi atas konvensi pertemuan Soekarno dengan Perdana Menteri Djuanda, Wakil Ketua Dewan Nasional Roslan Abdoelgani, KASAD A. H. Nasution, Menteri Negara Moh. Yamin, Ketua Mahkamah Agung Mr. Wiryo dan Direktur Kabinet Presiden Mr. Tamzil pada Tanggal 4 Juli 1959, pada saat itulah gagasan kembali ke UUD 1945 mendapati konvensi tentang kelahiran dekrit presiden 5 Juli. Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 sebagai solusi dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat (Budiarjo, 1998:4).

Demokrasi Terpimpin sebenarnya, terlepas dari pelaksanaannya yang dianggap otoriter, dapat dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950-an (Feith, 1995). Untuk

menggantikan pertentangan antara partai-partai di parlemen, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Ia memberlakukan kembali konstitusi presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat dari angkatan darat. Akan tetapi Soekarno menyadari bahwa keterikatannya dengan tentara dapat membahayakan kedudukannya, sehingga ia mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer. Dari kelompok sipil ini yang paling utama adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga walau tidak begitu signifikan peranan dari golongan agama, yaitu khususnya yang diwakili oleh NU yang tergabung dalam poros nasakom soekarno semasa pemberlakuan demokrasi terpimpin. Meskipun pemimpin PKI maupun Angkatan Darat mengaku setia kepada Presiden Soekarno, mereka sendiri masing-masing terkurung dalam pertentangan yang tak terdamaikan.

Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Dalam usahanya mendapatkan dukungan yang luas untuk kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan “kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh” di dunia, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonialis, kolonialis dan imperialis). Sebagai lambang dari bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin.

Sampai dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Juli 1959, Presiden Soekarno adalah pemegang inisiatif politik, terutama dengan tindakan dan janji-janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali struktur konstitusional. Akan tetapi, tekanannya kemudian mulai bergeser kepada tindakan simbolis dan ritual, serta khususnya kepada perumusan ideologi seraya melemparkan gagasan-gagasannya berulang kali. Presiden Soekarno dalam hal ini menciptakan doktrin negara yang baru (Karim, 1993). Demokrasi terpimpin dan

gagasan presiden yang sehubungan dengan itu sudah menguasai komunikasi massa sejak pertengahan tahun 1958. Sejak itu tidak mungkin bagi surat kabar atau majalah berani terang-terangan mengecam Demokrasi Terpimpin, lambang dan semboyan-semboyan baru. Pada paruh kedua 1959, Presiden Soekarno semakin mementingkan lambang-lambang. Dalam hubungan ini yang terpenting ialah pidato kenegaraan presiden pada ulang tahun kemerdekaan RI tahun 1959 dan selanjutnya hasil kerja Dewan Pertimbangan Agung dalam penyusunan secara sistematis dalil-dalil yang terkandung dalam pidato tersebut. Pidato kenegaraan yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, sebagian besar memuat alasan-alasan yang membenarkan mengapa harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sesungguhnya hanya sedikit tema-tema baru dalam pidato presiden, tetapi pidato itu penting karena berkaitan dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar revolusioner tersebut. Tiga bulan setelah pidato kenegaraannya itu, Presiden Soekarno menyatakan naskah pidato itu menjadi “manifesto politik Republik Indonesia”. Bersamaan dengan itu presiden mengesahkan rincian sistematikanya yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam pidato-pidatonya di awal tahun 1959, presiden selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting (Maarif, 1996). Pertama, Undang-Undang Dasar 1945; kedua, sosialisme ala Indonesia; Ketiga, Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan yang terakhir kelima, kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing-masing gagasan itu maka muncullah singkatan USDEK. “Manifesto politik Republik Indonesia” disingkat “Manipol”, dan ajaran baru itu dikenal dengan nama “Manipol-USDEK”.

Manipol-USDEK benar-benar memiliki daya pikat bagi banyak masyarakat politik. Masyarakat politik ini, yang didominasi pegawai negeri, sudah lama mendukung apa yang selalu ditekankan presiden mengenai kegotong-royongan, menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan golongan dan kemungkinan mencapai mufakat melalui musyawarah yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ada dua sebab mengenai hal ini pertama, keselarasan dan kesetiakawanan merupakan nilai yang dijunjung masyarakat-masyarakat Indonesia. Dan kedua, bangsa Indonesia benar-benar menyadari betapa berat kehidupan yang mereka rasakan akibat keterpecahbelahan mereka dalam tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, banyak yang tertarik kepada gagasan bahwa apa yang diperlukan Indonesia dewasa ini adalah

orang-orang yang berpikiran benar, berjiwa benar dan patriot sejati. Bagi anggota beberapa komunitas Indonesia, terutama bagi orang-orang Jawa, mereka menemukan makna yang sesungguhnya dalam berbagai skema rumit yang disampaikan presiden itu ketika mengupas cara pandang secara panjang lebar Manipol-USDEK, yang menjelaskan arti dan tugas-tugas khusus tahapan sejarah sekarang ini.

Barangkali daya tarik terpenting Manipol-USDEK terletak pada kenyataan bahwa ideologi ini menyajikan sebuah arah baru. Mereka tidak begitu banyak tertarik pada makna dasar dari arah tersebut. Yang pokok ialah bahwa presiden menawarkan sesuatu pada saat terjadi ketidakjelasan arah yang dituju. Nilai-nilai dan pola-pola kognitif berubah terus dan saling berbenturan, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk mencari perumusan yang dogmatis dan skematis mengenai apa yang baik dalam politik. Satu tanggapan umum terhadap Manipol-USDEK ialah bahwa Manipol-USDEK bukanlah merupakan ideologi yang sangat baik atau lengkap tetapi pada akhir tahun 1950an dibutuhkan sebuah ideologi dalam kerangka pembangunan Indonesia (Crouch, 1999).

Sebenarnya hanya di sebagian masyarakat politik saja Manipol-USDEK diterima sepenuh hati, sedangkan di sebagian yang lain menaruh kecurigaan dan kekhawatiran. Manipol-USDEK itu sendiri tidaklah begitu jelas. Selain itu, bukan pula suatu upaya untuk menyelaraskan semua pola penting dari orientasi politik yang ada di Indonesia. Ideologi negara apapun belum mampu menjembatani perbedaan perbedaan besar orientasi politik kutub aristokratis Jawa dan kutub kewiraswastaan Islam. Pada pelaksanaannya, Manipol-USDEK tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, banyak kalangan Islam yang kuat keyakinannya, khususnya dari suku bukan Jawa, melihat rumusan baru itu sebagai pemikiran yang asing. Karena itulah maka pelaksanaan manipol Usdek dapat disimpulkan dilakukan dengan paksaan.

D. Rangkuman

Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan modul tentang peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945-1965. Dengan demikian, Anda sebagai guru sejarah telah mampu mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan sejarah

Indonesia tahun 1945-1965 untuk diajarkan kepada peserta didik. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dalam modul ini adalah sebagai berikut.

1. Pada masa revolusi ada dua kekuatan besar yang berhasil digunakan oleh kaum pro kemerdekaan, kekuatan itu adalah sipil dan militer yang bergerak melalui dua jalur, yaitu diplomasi dan perang gerilya. Keduanya bersinergi untuk dapat mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia.
2. Pada masa demokrasi liberal peran para Perdana Menteri tidak dapat dikesampingkan. Ketujuh kabinet yang terbentuk dengan jumlah 6 Perdana Menteri telah memberikan peran strategis untuk mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Bukan nama per nama yang penting diingat, melainkan kiprah politik dan kebangsaan dari setiap Perdana Menteri yang bertugas.
3. Pada masa demokrasi terpimpin, sosok Soekarno menduduki posisi sentral. Menurut Soekarno demokrasi terpimpin merupakan jalan keluar dari kegagalan demokrasi liberal sejak tahun 1950, terbukti bahwa demokrasi liberal ternyata tidak sesuai bagi kondisi di Indonesia sehingga tuntutan-tuntutan maupun dukungan untuk kembali ke UUD 1945 semakin meluas saat memasuki awal tahun 1959.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy. 2014. *Bung Karno Penyumbang Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta Media Presindo.
- Agustinus Supriyanto. 2007. *Pengakuan Kerajaan Belanda Dalam Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia Tahun 1945-1949*. Disertasi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum UGM.
- Alfian, Magdalia, dkk. 2007. *SEJARAH: untuk SMA dan MA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Alfian, Magdalia, dkk. 2007. *SEJARAH: untuk SMA dan MA Kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Aning, Floriberta. 2005. *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia*. Yogyakarta: Narasi.
- Artawijaya. 2014. *Belajar dari Partai Masjumi*. Jakarta: Tim Pusaka Al Kautsar.
- Basri, H. 2013. “*Pemikiran Soekarno Tentang Persatuan Indonesia Tahun 1926-1965*”. Tidak diterbitkan. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jember: Universitas Jember.
- Crouch, Herbert. 1999. *Militer & Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan,
- Deliar Noer. 1983. *Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Feith, Herbert. 1995. *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Firmansyah, A. 2010. *Hatta Si Bung yang Jujur dan Sederhana*. Jogjakarta: Garasi House Of Book.
- Hapsari, Ratna dan Adil, M. 2015. *Sejarah untuk SMA/MA kelas XII Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Kahin, G.M. (Ed). 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (2th ed.). Depok: Komunitas Bambu
- Kahin, George McTurnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Karim, Rusli. 1993. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kemdikbud.
- Matroji. 2007. *SEJARAH: untuk SMP Kelas IX*. Jakarta: Erlangga.
- Mukayat. 1981. *Haji Agus Salim*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Muljana, S. 2008. *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid II*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
- Noer, D. 1990. *Mohammad Hatta Biografi politik*. Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI.
- Ricklefs, M.C. (Eds). 2014. *Sejarah Indonesia Modern* (5th ed.). Jakarta : Serambi.

- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1988. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekarno. 1959. *Penemuan Kembali Revolusi Kita*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Soekarno. 1963. *Dibawah Bendera Revolusi* (1 vol.) (2th ed). Jakarta : Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi
- Soekarno. 1963. *Genta Suara Revolusi Indonesia*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I
- Walgito, Bimo. 1978. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.

**PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK EKONOMI BANGSA INDONESIA
PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI MASA
DEMOKRASI LIBERAL**

Hamdan Tri Atmaja

A. Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Awal tahun 1950 periode penting bangsa Indonesia. Pertentangan dan konflik berlangsung dalam hal merumuskan bentuk negara Indonesia. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit. Tetapi juga dikalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan.

Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk yang terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Dan Negara Indonesia Timur. Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (poesponogoro, 2008:301).

Bagian terpenting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun hanya setengah hati. Hal ini terbukti dengan adanya pertentangan dan perbedaan antar kelompok bangsa.

Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS

merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia.

Reaksi rakyat atas terbentuknya RIS terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang menghendaki pembubaran RIS dan penggabungan beberapa Negara bagian RIS. Belanda membentuk federal sementara yang akan berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Dalam hal ini, RI baru akan diizinkan masuk dalam NIS jika permasalahan dengan Belanda sudah dapat teratasi. Selain itu, Belanda berusaha menyalpkan RI dengan melaksanakan Agresi Militer II. Belanda berharap jika RI dilenyapkan, Belanda dapat dengan mudah mengatur negara-negara bonekanya. Akan tetapi, perhitungan Belanda melesat. Agresi militer Belanda II, menyebabkan Indonesia mendapatkan simpati dari negara Internasional. Akhirnya, Belanda harus mengakui Kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar.

Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, Indonesia berubah menjadi Negara Serikat. Akibatnya terbentuklah Republik Negara Serikat. Meskipun demikian, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia.

Proses kembalinya ke NKRI

- a. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau.
- b. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang bergabung dengan Aceh.
- c. Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari: Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia.
- d. Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur) kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam Republik.

- e. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS- NIS-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mandatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada tanggal 12 Mei 1950.
- f. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh: RIS oleh Moh. Hatta, RI oleh dr. Abdul Halim.
- g. Hasil kesepakatan “NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia perancang UUD.
- h. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUD’s ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS.
- i. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.

Indonesia mengalami perubahan bentuk Negara kesatuan menjadi Negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri, tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya keinginan Belanda sebagai Negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaanya di Indonesia membuat Negara ini sempat mengalami perubahan bentuk Negara.

Terjadinya perubahan dari Negara federal menjadi Negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide Negara federal sesungguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itulah ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal.

Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal itu tidak disenangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena sistem federal digunakan oleh Belanda sebagai muslimat untuk menghancurkan RI selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Disamping itu, konstitusi federal dianggap hanya menimbulkan perpecahan. Hal tersebut mendorong

keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Pada dasarnya pembentukan negara-negara bagian adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat karena Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS. Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, juga demonstrasi-demonstrasi yang membentuk pembubaran RIS. Sebagian dari pemimpin RI termasuk yang ada dalam parlemen, bertekad untuk secepat mungkin menghapus sistem federal dan membentuk negara kesatuan.

B. Sistem Pemerintahan Parlementer

Bangsa Indonesia semenjak Proklamasi kemerdekaan menghendaki suatu negara kesatuan, yang melindungi segenap bangsa seluruhnya. Pembentukan RIS tetaplah dipadang sebagai hasil politik Belanda semata-mata untuk memecah belah persatuan bangsa. Itulah sebabnya setelah pengakuan kedaulatan, dimana-mana di daerah-daerah bagian timbul pergolakan-pergolakan dan pertanyaan dari rakyat yang spontan dari rakyat untuk kembali ke negara kesatuan dengan jalan menggabungkan diri kepada RI (Negara Bagian).

Undang-undang Dasar Sementara 1950 seperti halnya UUD sebelumnya adalah bersifat sementara. Sifat ini ditunjukkan dari mana resminya yaitu UUD ‘sementara’. Selain itu dapat dilihat pula dalam pasal 134 UUDS 1950 yang menyebutkan:

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama, dengan pemerintahan selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini

Pembentukan UUDS 1950, sama halnya dengan pembentukan UUD 1945 dan Konstitusi RIS, merasa dirinya belum merupakan badan yang representatif untuk menetapkan sebuah UUD yang tetap. Selain itu pembentukan UUDS 1950 dilakukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan perubahan bentuk dari bentuk susunan federal menjadi bentuk susunan kesatuan. Oleh karena itu kesemuanya dilakukan tergesa-gesa. Itulah sebabnya UUDS 1950 masih akan dibentuk badan konstituante yang bersama-sama Pemerintah akan membuat UUD yang tetap, dan akan menggantikan UUDS 1950. Dengan demikian perubahan UUDS 1950 dilakukan oleh sebuah badan representatif, yang keanggotaannya dipilih oleh pemilihan umum. Selain itu daripada itu dapat disediakan waktu yang cukup untuk membuat sebuah UUD yang lebih sempurna.

Berdasarkan Undang-undang No. 7/1953 tentang “Undang-Undang Pemilihan Umum” anggota konstituante yang anggotanya-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, badan Konstituante yang dimaksud belum dapat diwujudkan. Badan Konstituante itu dilantik oleh Presiden pada tanggal 10 Nopember 1956, dalam pidato pelantikannya yang dikenal dengan judul “ Susunlah Konstitusi yang benar-benar konstitusi Ros Publica”

Penyusunan UUDS 1950 bermula semenjak diadakan perundingan-perundingan antara Pemerintahan RIS atas nama NIT dan NTS, dengan Pemerintahan RI yang ingin kembali ke Negara Kesatuan. Sebagai hasil dari perundingan yang diadakan pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan antara Pemerintahan RIS dan pemerintahan RI (ditandatangani oleh masing-masing perdana menteri). Sebagai kelanjutannya dibentuklah panitia yang merancang UUDS negara Kesatuan (diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo (pihak RIS) dan Mr Abdul Hakim (pihak RI).

Hasil dari panitia tersebut disampaikan kepada pemerintahan RIS dan kepada pemerintahan RI pada tanggal 30 Mei 1950. Dengan sedikit hasil karya Panitia itu oleh sua pemerintahan dijadikan rancangan UUDS 1950, dan diajukan kepada DPR, Senat dan Badan Pekerja KNIP yang tanpa menggunakan hak amandemenya telah menerima Rancangan tersebut pada akhirnya menjadi UUDS 1950. Oleh kerana menurut ketentuan pasal 190-K-RIS perubahan K-RIS hanyalah dapat diadakan dengan UU Federal, maka perubahan Konstituasi ini telah ditetapkan dengan UU Federal no 7 tahun 1950 (LN 56 tahun 1950). Pasal 1 UU ini memuat naskah perubahan K-RIS yang lebu di kenal dengan “ Undang- Undang Dasar Semetara Republik Indonesia” (UUDS RI)

Pada tanggal 20 Juli 1950 Pemerintahan RIS dan Pemerintahan RI menyetujui rancangan UUDS RI yang disusun untuk selanjutnya diteruskan kepada DPR oleh Pemerintahan dan kepala Bagian Pekerja KNP oleh Pemerintah RI untuk memperoleh pengesahan. 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan dalam rapat gabungan DPR dan Senat mengenai penandatanganan naskah UU-Federal yang memuat naskah UUDS RI dan terbentuknya Negara Kesatuan sebgai perubah dalam negeri.

UU Federal yang memuat naskah UUDS 1950 adalah UU No 56 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 17 agustus 1950 (pasal 2 ayat 1).

Dari ketentuan yang telah ditetapkan dapat ditunjukkan bahwa negara RI berbentuk Kesatuan. Selanjutnya bentuk kesatuan ini akan berasaskan desentralisasi. Ini menunjukkan bahwa negara akan dibagi-bagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Negara kesatuan RI, sebagaimana Republik Indonesia Serikat (RIS), adalah menganut sistem pemerintahan Kabinet Parlementer. Ketentuannya dapat dilihat pada pasal 45 ayat (1) yang mengartikan “Presiden ialah Kepala Negara”, begitu juga pasal 83 UUDS 1950, menerangkan:

1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.
2. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintahan, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Sebagai imbalan dari pertanggung jawaban Menteri-menteri maka dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintahan dengan DPR. Dimana Pemerintahan saat itu menganggap DPR tidak representatif. Pasal 84 UUDS 1950 menegaskan:

presiden berhak membubarkan DPR, keputusan Presiden yang mengatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.

Sistem pertanggung jawaban Menteri menurut UUDS 1950 adalah Kepala Negara bukan penyelenggara kekuasaan pemerintahan, oleh karena itu dapat diganggu gugat. Serta Pemerintahan diselenggarakan oleh Dewan Menteri (Kabinet dengan Perdana Menteri sebagai Ketua).

Menteri-menteri baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri harus bertanggung jawabkan kebijaksanaan pemerintahannya kepada Badan Perwakilan Rakyat dengan konsekuensi:

- a. Kalau kebijaksanaan tidak diterima, Dewan Menteri/ menteri yang bersangkutan harus jatuh;
- b. Kalau dalam perselisihan Pemerintah merasa bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi mencerminkan kemauan rakyat, dapat meminta bantuan Kepala Negara untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ternyata

masih ada perselisihan antara Pemerintahan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka Pemerintahan harus mengundurkan diri.

- c. Kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh Pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

C. Sistem Kepartaian

Keluarnya Maklumat 3 November 1945, yang ditandatangani Wakil Presiden. Diawali dengan gagasan pemerintah melalui Presiden Soekarno, yang ingin membentuk sebuah organisasi yang mewadai seluruh aspirasi perjuangan bangsa Indonesia, yang bertugas membantu Presiden dan sekaligus juga melaksanakan fungsi partai atau parlemen. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengajurkan dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI). Perlu dicatat, PNI yang dimaksud di sini bukan PNI yang didirikan Soekarno pada tahun 1926. Pidato Presiden merupakan suatu gagasan untuk membentuk sebuah partai tunggal. Namun demikian, keinginan Presiden tersebut kurang mendapat respon dari masyarakat. Oleh karena, ada kekhawatiran pembentukan partai semacam ini akan mengarah pada kekuasaan otoriter yang tidak sesuai dengan paham demokrasi. Di samping itu, keberadaannya dianggap dapat menyaingi kinerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Atas desakan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), dianjurkan untuk mendirikan partai sebanyak-banyaknya untuk menyambut pemilihan umum anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat, yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1946. Atas Desakan tersebut lahirlah Maklumat 3 November 1945.

Realitas kekuatan politik, dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945, dapat dibaca melalui lahirnya partai-partai politik. Oleh karena, dengan dikeluarkannya maklumat tersebut setiap kelompok berupaya mendirikan partai politik. Berdasarkan ideologi yang menjadi dasar partai, kepartaian Indonesia saat itu dapat dikelompokkan menjadi partai berdasarkan Ketuhanan, Kebangsaan, dan Marxisme. Meskipun jumlah partai yang lahir pada saat itu cukup banyak, kurang lebih sekitar 27 partai, 5 dari kelompok partai beraliran ketuhanan, 14 partai beraliran kebangsaan, 6 partai beraliran Marxisme, dan 2 partai tidak termasuk ketiga aliran tersebut. Meski demikian, dari seluruh jumlah partai tersebut, hanya ada tiga partai penting yang memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi kekuasaan

di era Parleментар (1950-1959). Ketiga partai tersebut, adalah Masyumi (agama), PNI (Kebangsaan), dan PSI (Sosialis-Marxis). Dalam perkembangan politik berikutnya, dua partai politik tampil dengan pengaruh yang cukup besar yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Nadlatul Ulama (NU), sebagai pecahan dari Masyumi.

Masyumi

Masyumi didirikan pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta, melalui sebuah kongres yang dihadiri tidak kurang dari lima ratus organisasi sosial keagamaan, yang mewakili semua organisasi Islam yang ada. Hasil Kongres memutuskan, mendirikan majelis syuro pusat bagi umat Islam Indonesia, yang secara resmi bernama Masyumi. Pusat pimpinan partai berada di Yogyakarta, dan di kemudian hari, tepatnya pada tahun 1950, pusat pimpinan partai pindah ke Jakarta dengan maksud untuk memudahkan hubungan dengan Pusat Pemerintahan Negara.

Latar belakang berdirinya Masyumi, tidak lain adalah untuk mempersatu-kan umat Islam dan sekaligus memposisikan Islam agar memiliki peran signifikan dalam percaturan politik di Indonesia, yang sedang mengalami perkembangan dan perubahan. Di samping itu, ada kecenderungan menginginkan tegaknya kedaulatan negara dengan bersendikan Islam, sebagaimana dicantumkan dalam tujuan partai, sebagai berikut: "...menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam, dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan."

Beberapa organisasi masa Islam yang memberi dukungan terhadap Masyumi pada awalnya hanya empat organisasi, di antaranya: Muhammadiyah, Nadlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Menyusul kemudian pada tahun 1951 Persatuan Islam (Bandung) dan Al-Irsyad (Jakarta), Al-Jamiyatul Washliyah dan Al-Ittihadiyah di Sumatra Utara. Dalam waktu singkat keberadaan partai, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan dukungan yang diberikan dari beberapa anggota istimewa seperti Muhammadiyah yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Al-Jamiyatul Washliyah dan Al-Ittihadiyah di Sumatra Utara, Persatuan Ummat Islam Indonesia (Majalengka dan Sukabumi), Persatuan Islam (Priyangan dan Bangil) Al-Irsyad (di berbagai tempat di Jawa), Persatuan Umat seluruh Aceh, Mathla'ul Anwar (Banten) dan Nadlatul Wathan (Lombok). (Deliar, 2000:59) Di samping itu, dukungan para ulama waktu itu,

menjadikan Masyumi cepat berkembang, mereka para ulama tanpa melihat lebih jauh apa tujuan dan cita-cita Masyumi. Hanya karena Masyumi merupakan partai Islam, mereka mengidentikkan dirinya dengan partai tersebut. Secara resmi pada tahun 1950, sudah memiliki 237 cabang, 1080 anak cabang dan 492 ranting, dengan jumlah anggota tercatat tidak kurang dari sepuluh juta anggota

Dalam perkembangan politik berikutnya, terjadi konflik internal dalam tubuh partai. NU yang pada awal berdirinya banyak memberi dukungan dan kontribusi dalam perkembangan dan pertumbuhan partai, dan pada akhirnya harus keluar dari Masyumi. Peran NU dalam Masyumi dapat dilihat dari keterlibatan tokoh-tokoh NU dalam kepengurusan Masyumi, seperti terpilihnya KH Hasyim Asy'ari sebagai pimpinan tertinggi Masyumi saat itu selain tokoh-tokoh lain yang duduk dalam kepengurusan Masyumi. Peran NU dapat dilihat juga dalam kedudukannya sebagai anggota istimewa dalam Masyumi, sebagaimana diketahui sebagai anggota istimewa yang mempunyai hak untuk memberi nasehat dan saran. Peran dan kontribusi NU terhadap Masyumi, pada akhirnya berbuah konflik. Konflik berawal dari perbedaan pendapat terkait dengan persoalan keinginan NU yang menempatkan kadernya untuk menjadi menteri agama dalam kabinet. Perdebatan tersebut memicu konflik berkepanjangan antara NU dengan pengurus partai Masyumi. Konflik tersebut pada akhirnya mengantarkan NU keluar dari Masyumi, melalui surat keputusan Pengurus Besar NU pada tanggal 5 April 1952, secara resmi NU keluar dari Masyumi, dan selanjutnya berdiri sendiri sebagai partai politik.

Partai Nasionalis Indonesia (PNI)

Perlu dicatat, PNI baru ini bukan kelanjutan PNI yang didirikan Soekarno pada tahun 1926, PNI ini terbentuk melalui penggabungan (fusi) dari beberapa partai yang memiliki azas dan tujuan sama. Pada awalnya bernama Serikat Rakyat Indonesia atau Serindo, yang dipimpin oleh Mangoensarkoro dan sekretarisnya Osa Maliki. Melalui beberapa perundingan dengan partai-partai politik yang memiliki tujuan dan azas sama, seperti, PNI Pati dan Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, PNI Palembang dan Sulawesi, Partai Republik Indonesia (PRI), dan beberapa partai kecil lainnya, maka pada Kongres Serindo 28 Januari sampai 1 Pebruari 1946, partai-partai tersebut difusikan.

Fusi tersebut menyepakati berdirinya partai politik baru yang diberi nama Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 29 Januari 1946 di Kediri, yang diketuai oleh Mangoensarkoro. Pemimpin PNI pada umumnya berlatar belakang priyayi, basis dukungan di kota adalah pegawai pemerintahan (birokrasi). Itulah sebabnya ketika PNI menguasai kabinet, birokrasi sempat membengkak, PNI berhasil memasukkan anggota-anggota partai ke dalam berbagai jabatan pemerintahan.

Perkembangan PNI mengalami kevakuman pada masa perang fisik atau agresi Belanda. Setelah Agresi Belanda berakhir dan Indonesia memasuki perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), PNI melakukan konsolidasi dengan menghidupkan cabang-cabang PNI di daerah. Konsolidasi partai mendapat perhatian dan sambutan di daerah khususnya di luar pulau Jawa. Di Kalimantan Selatan, Serikat Nasional Indonesia dan beberapa cabangnya meleburkan diri ke dalam PNI. Di Sulawesi Tengah berdiri cabang di bawah pimpinan Daeng Pawindu. Di Sumatera berdiri cabang di Mentok. Kemudian berangsur-angsur di Sumatera Utara, Tapanuli, Medan, Pekanbaru, Sumatera Tengah, Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Lampung. Disusul kemudian Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Tidak ketinggalan dengan Indonesia Timur, Bali, Lombok dan Sumbawa. Perkembangan PNI di luar Jawa, nampak lebih pesat dibandingkan dengan Jawa itu sendiri. Hal ini dimungkinkan di daerah-daerah B.F.O. keadaan-nya lebih stabil dibandingkan dengan republik yang belum stabil. Baru pada tahun 1950 cabang-cabang di Jawa mulai dihidupkan. Diperkirakan pada tahun 1950, partai sudah memiliki cabang 228, dan jumlah anggota kurang lebih sekitar 1.466.783 cabang.

Partai Sosialis Indonesia

Partai Sosialis Indonesia merupakan pecahan (sempalan) dari partai Sosialis. Diawali dengan adanya perbedaan paham di kalangan Dewan Partai Sosialis, tentang sikap, pendirian, visi, dan corak melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi nasional. Menurut Sutan Syahrir, sikap pendirian dan langkah-langkah Partai Sosialis selama ini terkait dengan politik dalam negeri dan luar negeri menyalahi kebijakan Partai Sosialis. Perbedaan paham yang dianggap prinsip diantaranya, (1) pembubaran Kabinet Syahrir dan kelanjutan sikap partai, (2) ketidaktegasan sikap pimpinan organisatoris partai di waktu perang, (3) tentang siaran

“Penjelasan Keadaan Politik” dari sayap kiri yang ditandatangani anggota-anggota Dewan Partai berakibat memecah persatuan dan kekuatan nasional, (4) sikap pendirian partai terhadap Presidentil Kabinet Hatta. Melalui Konferensi Dewan Partai Sosialis pada tanggal 26 Januari 1946, organisasi tersebut kemudian diperbaharui pada Konferensi Dewan Partai pada tanggal 31 Juli 1946, dan disahkan dalam Kongres Partai di Yogyakarta pada tanggal 6 September 1946. Kelompok Syahrir, mencabut keanggotaannya dan menyatakan keluar dari Partai Sosialis. Kemudian langkah berikutnya menyusun atau mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Sosialis Indonesia, yang secara resmi disahkan pada tanggal 9 September 1946.

Pemimpin Partai Sosialis Indonesia, pada umumnya adalah para cendekiawan yang berpendidikan Barat. Sesudah tahun 1950, para anggota Partai Sosialis Indonesia dapat ditemui di tengah-tengah elit birokrasi nasional dan di kalangan perwira angkatan bersenjata. Syahrir, pemimpin partai ini, menegaskan perlunya membangun basis demokrasi yang kuat di masyarakat, dan menggambarkan filsafat nasionalismenya dan anti imperialisme Sukarno yang kooperatif yang dibangun di atas “kesetiakawanan hierarkis feodalisitis” (Reindhart, 1989)

Tokoh-tokoh Partai Sosialis yang pernah duduk dalam kabinet adalah: Mr. Tandiono Manoe sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Soegondo Djojopoespito sebagai Menteri Pembangunan Masyarakat, dan Dr. Hamdani sebagai Menteri Sosial. Di era perubahan praktek penyelenggaraan pemerintahan dari Presidential ke Parleментар, Sutan Syahrir sebagai ketua Partai Sosialis Indonesia memegang kursi pemerintahan dengan berkedudukan sebagai Perdana Menteri. Di era Demokrasi Terpimpin, nasib Partai Sosialis Indonesia sama dengan Masyumi, harus membubarkan diri dengan keluarnya Keppres 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960.

Nadlatul Ulama (NU)

Pada awalnya sebagai ormas Islam yang bergerak di bidang sosial-keagamaan dan pendidikan (Jam’iyyah), didirikan di Surabaya tanggal 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asy’ari, dengan nama Nadlatul Ulama (NU) yang diartikan sebagai Kebangkitan Ulama. NU didirikan dengan tujuan membendung usaha-usaha pembaharuan dalam Islam, dengan mempertahankan ajaran tradisional, selain sebagai

forum komunikasi antara berbagai pusat pendidikan tradisional di Jawa. Kelahiran NU merupakan reaksi atas gerakan modernisasi Islam di Indonesia yang dipelopori oleh kelompok Muhammadiyah. Berbeda dengan Muhammadiyah yang cenderung lebih konsisten, tidak pernah mengubah bentuknya sebagai organisasi keagamaan. Sebaliknya, NU beberapa kali mengubah bentuknya, dari organisasi keagamaan berubah menjadi partai politik, dan pada masa Orde Baru kembali ke *khittah* sebagai organisasi keagamaan. Perubahan sikap seperti ini, melahirkan tuduhan miring terhadap NU, sebagai organisasi yang tidak konsisten, dan mudah terseret dalam pasang-surutnya politik.

Kiprahnya di bidang politik pasca-kemerdekaan, sangat terkait dengan Masyumi. Seperti diketahui, NU memberi kontribusi besar atas keberadaan Masyumi, dengan kedudukannya sebagai anggota istimewa. Perbedaan pandangan dan perselisihannya dengan pimpinan Masyumi, mengubah wajah NU dari Ormas Islam menjadi Partai Islam. Perbedaan pandangan yang memicu NU keluar dari Masyumi, adalah adanya perubahan dalam perumusan Majelis Syuro dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Dalam hal ini Majelis Syuro yang merupakan tempat penting bagi ulama dan pimpinan-pimpinan Islam, sudah tidak lagi dijadikan sebagai badan legislatif selain DPP, melainkan hanya sebagai Badan Penasehat saja. Perubahan tersebut dalam pandangan NU, Masyumi sudah berubah sifat, dari organisasi yang memberi tempat pada ulama berubah tidak lagi menjadi menghormati ulama. Perubahan tersebut menjadi alasan kuat bagi NU untuk keluar dari Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik. Penarikan diri NU dari Masyumi selanjutnya dikukuhkan dalam Kongres NU pada bulan oktober 1952 di Palembang.

Apabila ditelusuri lebih jauh, keluarnya NU dari Masyumi juga dipicu pula soal komposisi kabinet. NU melalui KH Abdul Wahab Abdullah meminta pada Masyumi agar kedudukan menteri agama dalam kabinet Wilopo diberikan pada NU. Apa yang menjadi keinginan NU, benar-benar menjadi sumber keretakan antara Masyumi dengan NU, bahkan dalam tuntutan berikutnya apa yang disampaikan KH. Wahab benar-benar bernada ultimatum. NU meminta pada Masyumi jawaban selambat-lambatnya tanggal 22 Maret, dan apabila tidak, NU akan berjuang sendiri tanpa melalui Masyumi. Apa yang disampaikan KH. Wahab mendapat dukungan dari kalangan NU. Menurutnya, apabila rais'am telah berkata, memang tidak ada pilihan,

bagi segenap warga NU, mendukung apa yang dikatakan rais'am. Apa pun alasannya, realitas politik menunjukkan NU sebagai organisasi keagamaan yang besar di Indonesia, berubah wajah menjadi partai politik. Dengan berubah menjadi partai politik, NU memiliki kedudukan yang sama dengan Masyumi, dan sekaligus sebagai kompetitor.

Sebagaimana dengan Masyumi, NU juga salah satu partai politik Islam yang sangat berseberangan dengan garis politik PKI, meskipun dalam menyikapi kebijakan politik Soekarno, NU jauh lebih akomodatif dibanding dengan Masyumi yang cenderung konfrontatif. Ditengarai bahwa NU lebih memilih jalan luwes dalam menghadapi Soekarno, dengan harapan kepentingan-kepentingan NU terlindungi. Begitu juga sebaliknya bagi Soekarno, untuk mendapat dukungan dari NU, cukup merangkul kyai-kyai sepuh NU. Sebaliknya, dalam menghadapi garis politik PKI, NU mengambil sikap tegas tanpa kompromi. Beberapa langkah yang diambil NU dalam menandingi gerak politik PKI. Ketika PKI melakukan gerakan ofensif terhadap pemuda-pemuda muslim, reaksi muncul dari NU, dengan membentuk "Banser Anshor" yang siap untuk melakukan kekerasan fisik. Begitu juga pada saat PKI menghimpun seniman-seniman yang berpaham komunis dalam wadah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), NU membentuk organisasi tandingan yang diberi nama Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi). Dalam hubungan ini, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), ditandingi NU dengan mendirikan Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) (Yusuf, 1993).

Partai Komunis Indonesia (PKI)

Sejarah PKI tidak bisa dilepaskan dari *Indische Social Democratissche Vereeniging* (ISDV) atau (Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda), yang didirikan pada tahun 1914 oleh Henk Sneevliet. Ia adalah seorang pemimpin sayap kiri Serikat Buruh Kereta Api dan yang sebelumnya merupakan tokoh sayap kiri gerakan sosialis, yang terpaksa hijrah ke Indonesia pada tahun 1913.

ISDV sendiri pada mulanya lahir dari keberadaan Sarekat Islam yang melarang anggotanya berideologi ganda dalam perjuangan pergerakan Indonesia. Situasi tersebut membuat para anggota yang beraliran komunis kecewa dan keluar dari Sarekat Islam, kemudian mendirikan partai sendiri yang diberi nama ISDV.

Selanjutnya pada Kongres ISDV pada bulan Mei tahun 1920, nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia (PKH), dengan Samuan sebagai ketuanya. Perlu dicatat di sini PKH merupakan partai pertama di Asia, yang menjadi bagian dari Komunis International. Kemudian pada tahun 1924 nama PKH diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dua tahun kemudian 1926 PKI memimpin pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatera terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Pemberontakan tersebut dapat dihancurkan, kader-kader PKI ditahan dan dibuang ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua. Setelah Kemerdekaan, PKI tampil kembali dalam kancah politik dan ikut secara aktif dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Pada bulan September 1948, kembali PKI melakukan pemberontakan. Kemudian pemberontakan dapat ditumpas, tetapi PKI tidak dinyatakan sebagai partai terlarang.

Pasca-peristiwa Madiun, PKI melakukan konsolidasi dan tampil kembali dalam panggung politik, berkat tokoh muda nasionalis D.N. Aidit dan kawan-kawan (Lukman, Nyoto dan Sudisman), yang berhasil mengambil alih pimpinan partai pada tahun 1951. Mereka berhasil mengubah dari partai “yang kualitas organisasi lemah, terpecah-pecah, dan tak berdaya, menjadi satu gerakan yang dinamis dan dengan cepat menjadi sangat kuat (Mortimer, 1974). Selanjutnya, pimpinan PKI lebih melakukan gerakan politiknya dari atas, ketimbang membangun partai kader dari bawah, dengan perlahan-lahan dan pasti. Di bawah kepemimpinan D.N Aidit, PKI mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-Barat yang diambil Soekarno. Bahkan dalam waktu yang singkat, di bawah pimpinan Aidit, PKI berkembang begitu pesat, dari sekitar 3000-5000 anggota pada tahun 1950, menjadi 165.000 pada tahun 1954, dan menjadi 1,5 juta pada tahun 1959.

Dalam anggaran dasarnya, PKI merumuskan azas dan tujuan partainya. Partai berazaskan Marxisme-Leninisme PKI, bertujuan membentuk masyarakat sosialis di Indonesia, yaitu suatu masyarakat Indonesia dengan susunan bahwa semua alat-alat produksi dimiliki oleh dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal keanggotaan, setiap warga negara Indonesia, laki-laki atau perempuan, dengan tidak memandang golongan atau agama, yang sudah berumur 18 tahun, dan tiap-tiap perhimpunan dari warganegara Indonesia, dengan syarat menyetujui dan setia kepada azas dan program-program partai, mengakui PKI sebagai satu-satunya partai yang

dapat menyusun serta memimpin kelas yang tertindas dan terhisap menuju kemerdekaan, dan memenuhi kewajiban serta menjalankan keputusan-keputusan partai, dapat diterima masing-masing menjadi anggota dan anggota luar biasa partai.

Disebutkan lebih jauh, bahwa PKI berusaha mencapai tujuannya dengan jalan perjuangan kelas yang revolusioner, yaitu perjuangan kelas buruh, tani, dan golongan-golongan yang terhisap serta tertindas terhadap kelas borjuis. Dari rumusan dan tujuan PKI seperti tersebut tampak sekali bahwa PKI dalam pola perjuangannya selalu menggunakan cara-cara revolusioner, sehingga dalam catatan sejarah menunjukkan pola-pola perjuangan PKI selalu diikuti dengan revolusi atau pemberontakan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

D. Kabinet Demokrasi Liberal

Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, sistem politik yang dimiliki oleh Indonesia telah berhasil mendorong munculnya berbagai macam partai politik. Hal tersebut disebabkan karena dalam sistem kepartaian, sistem politik Indonesia menganut sistem multipartai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer yang memiliki gaya barat dengan sistem multipartai yang dianut, maka partai-partai politik yang mulai muncul ini lah yang akan menjalankan pemerintahan Indonesia melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 sampai dengan tahun 1959.

Partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia mengalami masa berkiprahnya dalam jangka waktu antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada masa tersebut terjadi banyak pergantian kabinet atau sering jatuh bangunnya kabinet dalam pemerintahan Indonesia karena keadaan pemerintahan Indonesia yang tidak stabil, sehingga partai-partai politik yang terkuat dapat mengambil alih kekuasaan pemerintahan Indonesia dengan mudah. Pada masa tersebut partai yang terkuat dalam DPR adalah PNI dan Masyumi. Dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun (tahun 1950 sampai dengan tahun 1955), PNI dan Masyumi silih berganti untuk memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan Indonesia, adalah sebagai berikut.

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat formasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

- a. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
- b. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
- c. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
- d. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
- e. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir antara lain (1) Di bidang ekonomi, ada **Sumitro Plan** yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional (2) Indonesia masuk PBB, (3) Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Sementara kendala/masalah yang dihadapi selama kabinet Natsir adalah (1) Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan) (2) penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran kemudian (3) Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur. Hampir satu bulan beliau berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojokusastro (PNI) dan Soekiman Wijosandjojo (Masyumi) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman (Masyumi)- Soewirjo (PNI) yang dipimpin oleh Soekiman.

Program pokok Kabinet Sukiman adalah (1) Menjamin keamanan dan ketentraman, (2) Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, (3) Mempercepat persiapan pemilihan umum. (4) Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya, dan (5) Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika.

Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan

kegemaran akan barang-barang mewah. Masalah Irian barat belum juga teratasi. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojokusarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (M asyumi) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Program pokok dari Kabinet Wilopo di dalam negeri adalah Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD, Meningkatkan kemakmuran rakyat, dan Meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Sedangkan untuk program luar negeri Kabinet Wilopo berfokus pada Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, hingga menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif

Kabinet ini tidak mempunyai prestasi yang bagus, justru sebaliknya banyak sekali kendala yang muncul antara lain sebagai berikut.

- a. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
- b. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
- c. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

d. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak.

Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo, yang terbentuk pada tanggal 31 juli 1953. betapapun kabinet ini tanpa dukungan masyumi, namun kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (partai Indonesia Raya PIR).

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu, Pembebasan Irian Barat secepatnya, Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB., Penyelesaian Pertikaian politik. Kabinet Ali I memiliki beberapa program kerja yang hampir seluruhnya berhasil dilaksanakan seperti mempersiapkan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955., Konferensi Asia-Afrika I ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.

Konferensi dihadiri oleh 29 negara – negara Asia –Afrika terdiri 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang. KAA I itu ternyata memilikipengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa – bangsa Asia – Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti Berkurangnya ketegangan dunia, Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik rasdiskriminasi di negaranya, Belanda mulai repot menghadapi blok afro- asia di PBB, karena belanda masih bertahan di Irian Barat.

Konferensi Asia – Afrika I ini menghasikan beberapa kesepakatan yaitu : *Basic peper on Racial Discrimination* dan *basic peper on Radio Activity*. Kesepakatan yang lain terkenal dengan dasa sila bandung, dengan terlaksananya Konferensi Asia Afrika I merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa indonesia.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

- a. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
- b. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD

mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.

- c. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
- d. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
- e. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

NU menarik dukungan dan menteri-mentrinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi.

Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru, Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi, Perjuangan pengembalian Irian Barat, Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan

4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Melakukan Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955, yang mana menjadi penyebab kegagalan dari kabinet Ali dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Ali Sastroamijoyo kembali disertai mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Program pokok kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, seperti (a) Perjuangan pengembalian Irian Barat (b) Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD (c) Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai (d) Menyehatkan perimbangan keuangan negara (e) Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selain hal tersebut Kabinet Ali II Melakukan lobi untuk membatalkan KMB, Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, hingga Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kendala/Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

- a. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.

- b. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
- c. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
- d. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.
- e. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin oleh Ir. Juanda.

Program Kabinet Djuanda disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu Membentuk Dewan Nasional, Normalisasi keadaan Republik Indonesia, Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB, Perjuangan pengembalian Irian Jaya, Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu (1)

Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. (2) Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. (3) Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI. (4) Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

- a. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
- b. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
- c. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

Kabinet Djuanda berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

E. Pemilu 1955

Pemilihan umum adalah salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis berfungsi. Pemilihan umum tercantum sebagai salah satu program dari kabinet parlementer RI pada waktu itu. Persiapan mendasar pemilu dapat diselesaikan di masa pemerintahan Kabinet Ali-Wongso. Kabinet itu diresmikan pada tanggal 31 Juli 1953.

Salah satu persoalan di dalam negeri yang harus diselesaikan adalah persiapan pemilihan umum yang rencananya akan diadakan pada pertengahan tahun 1955.

Pada tanggal 31 Juli 1954, Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk. Panitia ini diketuai oleh Hadikusumo dari PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman dari Hadikusumo sebagai ketua panitia pemilihan umum pusat mendorong partai untuk meningkatkan kampanyenya. Mereka berkampanye sampai pelosok desa. Setiap desa dan kota dipenuhi oleh tanda gambar peserta pemilu yang bersaing. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara yang terbanyak.

Selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1965), yang melewati beberapa era seperti Revolusi fisik (1945-1949), Demokrasi parlementer (1950-1958) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965), hanya sekali terjadi pemilu, yaitu pemilu 1955. Pemilu 1955 berlangsung pada era demokrasi Parlementer, yakni pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi (29 Juli 1955-2 Maret 1956). Akan tetapi, peraturan yang dijadikan landasan dalam pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang telah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo dari PNI (30 Maret 1952-2 Juli 1953).

Pada tanggal 29 Juli 1955, Mohammad Hatta mengumumkan 3 orang formatur untuk membentuk kabinet baru. Ketiga formatur itu terdiri atas Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Asaat (nonpartai). Pada waktu itu Presiden Soekarno sedang pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Kabinet baru itu bertugas melaksanakan Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah serta Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.

Ketiga formatur itu mencapai kesepakatan dan persetujuan menempatkan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan. Namun kesulitan muncul karena Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil Presiden. Kemudian muncul perbedaan pendapat antara PNI dan Masyumi. Formatur mengusulkan kepada Soekarno untuk mengnonaktifkan Mohammad Hatta dari jabatan wakil Presiden selama ia menjadi perdana menteri. Dalam pembahasan masalah itu ketiga

formatur tidak mencapai titik temu. Pada tanggal 3 Agustus 1955, ketiga formatur mengembalikan mandat. Hatta kemudian menunjuk Mr. Burhanudin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet. Dalam program kabinet Burhanudin Harahap masalah pemilihan umum masih juga menjadi perhatian. Sesuai dengan rencana semula, pemilihan umum untuk anggota parlemen akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan untuk pemilihan anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.

Selama tiga bulan pertama sejak Indonesia merdeka Indonesia hanya menganut dan mengenal partai tunggal yaitu PNI yang didasarkan pada keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Selanjutnya pada tanggal 3 November 1945 atas usul BP. KNIP, pemerintah mengeluarkan maklumat yang pokoknya menganjurkan kepada rakyat agar mendirikan partai-partai politik. Maka sejak bulan November 1945 sampai dengan Desember 1945 tidak kurang 9 partai lahir. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 itu sendiri mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Ke luar : untuk memajukan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi
- b. Ke dalam : sebagai sarana agar segala aliran atau paham dalam masyarakat dapat dipimpin secara teratur

Dari berbagai banyaknya parpol setelah adanya maklumat 3 November 1945 maka partai politik tersebut dikelompokkan menjadi empat aliran yaitu (1) Kelompok Partai Religi/Agama, (2) Kelompok Nasionalis, (3) Kelompok Partai Sosialis, (4) Kelompok Partai Komunis

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara, belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan sekalipun ide tentang itu sudah muncul adapun latar belakangnya adalah :

- a. Revolusi fisik/perang kemerdekaan, menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan.
- b. Pertikaian Internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian.

- c. Belum adanya UU pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu (UU pemilu baru disahkan pada tanggal 4 april 1953 yang dirancang dan disahkan oleh kabinet wilopo)

Di dorong oleh kesadaran untuk menciptakan demokrasi yang sejati, masyarakat menuntut diadakan pemilu. Pesiapan pemilu dirintis oleh kabinet Ali Sastroamijoyo I. pemerintah membentuk panitia pemilu pada bulan Mei 1954. Panitia tersebut merencanakan pelaksanaan pemilu dalam dua tahap. Pemilu tahap pertama akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Pemilu tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (dewan pembuat UUD) (Insan Fahmi siregar, 2012).

Meskipun Kabinet Ali Jatuh, pemilu terlaksana sesuai dengan rencana semasa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu yang pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Sekitar 39 Juta rakyat Indonesia datang ke bilik suara untuk memberikan suaranya. Pemilu saat itu berjalan dengan tertib, disiplin serta tanpa politik uang dan tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, banyak pakar politik yang menilai bahwa pemilu tahun 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang terlaksana di Indonesia sampai sekarang.

Pemilihan umum pertama kali di Indonesia untuk memilih para anggota DPR dan Konstituante yang diadakan pada tanggal 29 september 1955 untuk pemilihan anggota DPR dan 15 desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.



Gambar 1. Surat Suara Pemilu 1955

Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya dikotak-kotak suara. Hasil pemilihan Umum I yang diikuti 172 kontestan Pemilu 1955, hanya 28 kontestan (tiga diantaranya perseorangan) yang berhasil memperoleh kursi. Empat partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi: Partai Nasional Indonesia (57 kursi/22,3%), Masyumi (57 kursi/20,9%), Nahdlatul Ulama (45 kursi/18,4%), dan Partai Komunis Indonesia (39 kursi/15,4%) (Poesponegoro, 2010)

Keseluruhan kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi. Tiga kursi sisa diberikan pada wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat Presiden. Selain itu diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tonghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian keseluruhan anggota DPR hasil Pemilu 1955 adalah 272 orang.

Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR.

Tabel 1. Lima Besar Perolehan Suara Hasil Pemilu DPR

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8

Lima besar Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Lima Besar Perolehan Suara Hasil Pemilu Konstituante

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16

Banyak penganut politik yang berpendapat bahwa pemilu 1955 telah berlangsung secara demokratis dengan memenuhi prinsip LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil), setidaknya jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu era Orde Baru yang semu dan kurang demokratis karena hasilnya telah diketahui sebelumnya.

Dalam pemilu 1955, politik aliran (ideology) masih sangat mewarnai atau dominan sebagai basis untuk mendapatkan dukungan rakyat. Sehubungan dengan itu, kendatipun pemilu 1955 telah berjalan secara LUBER JURDIL, namun hasilnya tidak memberikan dampak yang bagus pada panggung politik nasional ketika itu. Hal ini karena pemilahan politik aliran telah memicu timbulnya fragmentasi politik, seperti tampak pada perdebatan dua kubu di Dewan Konstituante (antara kubu nasionalis islam yang memonitori oleh partai-partai islam semisal Masyumi dan NU, dengan kubu Nasionalis Sekuler yang dipimpin oleh partai-partai abangan semisal PNI dan PKI). Kubu Nasionalis islam menginginkan beberapa rumusan dari piagam Jakarta dimasukkan kembali dalam konstitusi Negara RI, sementara kubu Nasionalis Sekuler menolaknya. Ketegangan kedua kubu yang mengarah pada proses jalan buntu (deadlock) di Dewan Konstituante inilah yang memicu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin.

Setelah pemilu tahun 1955, terjadi ketegangan dalam pemerintahan. Ketegangan tersebut akibat banyaknya mutasi yang dilakukan di beberapa kementerian, seperti kementerian dalam negeri, dan kementerian perekonomian. Hal itu menjadi salah satu faktor adanya desakan agar perdana menteri mengembalikan

mandatnya. Akhirnya, pada tanggal 8 maret 1956, kabinet Burhanuddin Harahap jatuh. Presiden Soekarno pada tanggal 8 maret 1956 menunjuk Ali Sastroamijoyo untuk membentuk kabinet baru. Kabinet yang dibentuk itu adalah kabinet Koalisi tiga partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan beberapa partai kecil lainnya.

Pada tanggal 20 Maret 1956, secara resmi diumumkan terbentuknya kabinet baru yang disebut kabinet Ali Sastroamijoyo II. Kabinet ini mendapat tentangan dari PKI dan PSI karena kedua partai itu tidak di ikut sertakan. Tentangan dari partai lainnya tidak begitu besar. Jumlah menteri dalam kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah 24 orang. Program kabinet itu disebut dengan rencana lima tahunan yang memuat program jangka panjang, misalnya memperjuangkan masalah Irian Barat ke wilayah republik Indonesia, melaksanakan pembentukan daerah otonom, mempercepat pemilihan anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan keuangan negara sehingga tercapai keseimbangan anggaran belanja, serta berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Kabinet yang baru berdiri itu mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Soekarno. Hal itu terlihat dari pidatonya di depan parlemen pada tanggal 26 Maret 1956 yang menyebutkan bahwa kabinet itu sebagai titik tolak periode *planning dan investment*. Namun, pada saat kabinet Ali Sastroamijoyo berkobar semangat anti cina di masyarakat dan kekacauan di beberapa daerah.

Sementara itu dengan dibatalkannya undang-undang pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956, timbul persoalan baru yaitu tentang nasib modal belanda yang ada di Indonesia. Ada anjuran untuk menasionalisasikan atau mengindonesianisasi perusahaan milik belanda yang ada di Indonesia. Ada anjuran untuk mengindonesiasikan atau menasionalisasikan perusahaan milik belanda. Namun, sebagian besar anggota kabinet menolak tindakan tersebut. Pada waktu itu banyak orang belanda yang menjual perusahaannya terutama para orang cina. Karena merekalah yang memiliki uang. Orang-orang Cina rata-rata sudah memiliki ekonomi yang kuat di Indonesia. Itulah sebabnya tanggal 19 Maret 1956, Mr. Assat di depan Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya menyatakan bahwa pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. Hal itu penting karena pengusaha Indonesia tidak mampu bersaing dengan pengusaha

nonpribumi, khususnya Cina. Pernyataan Asaat itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Kemudian lahir gerakan Asaat di mana-mana. Pemerintah menanggapi gerakan itu dengan dikeluarkannya pernyataan dari menteri perekonomian Burhanudin (NU) bahwa pemerintah akan memberi bantuan terutama kepada perusahaan yang seratus persen milik orang Indonesia.

F. Rangkuman

Setelah saudara membaca uraian mater sebagaimana tersebut diatas, maka diapat disarikan simpulan – simpulan sebagai berikut.

- a. Periode tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer yang memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet. Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang Perdana Menteri di era tersebut (1952-1953) sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partaipartai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet/ pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti.
- b. Pada masa tersebut terjadi pasang surut keadaan politik dan ekonomi sehingga menimbulkan ketidakpuasan pada perdana menteri yang tengah menjabat, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan terganggu. Kondisi ini membuat Presiden Soekarno, dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa “sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesamanya dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai”. Soekarno bahkan dalam lanjutan pidatonya menekankan untuk melakukannya sekarang juga. Pernyataan Soekarno membuat hubungan dengan Hatta semakin renggang yang akhirnya dwi tunggal menjadi tunggal ketika Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. (Anhar Gonggong, 2005). Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan dimana presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara apabila negara itu berbentuk republik dan raja apabila negara berbentuk monarki. Sedangkan kepala

pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri yang terpilih berdasarkan pemilu, meskipun demikian perdana menteri yang diangkat pada sistem parlementer di Indonesia diangkat melalui dewan formatur.

- c. Pada era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante. Rencana pemilu di Indonesia sudah diprogramkan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo I. Pada masa ini pemilu baru dalam persiapan pelaksanaan. Pelaksanaan pemilu dilakukan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap yaitu pada tahun 1955, dalam pemilu tersebut memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Hasil pemilu 1955 menghasilkan lima besar partai yang mendapatkan suara terbanyak, yaitu partai Islam yang terwakili oleh Masyumi dan NU, partai Nasionalis terwakili oleh PNI, partai Sosialis terwakili oleh PSI dan Partai komunis terwakili oleh PKI. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki Demokrasi Terpimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliar, Noer. *Partai Islam di Pentas Nasional*, Bandung, Mizan, 2000
- Gonggong, Anhar dan Musya Asy'arie (ed). *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005
- Insan Fahmi siregar. (2012). *Partai Masyumi dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*. Semarang: Widyakarya.
- Mortimer, R. (1974). *Indonesian Communism under Sukarno, Ideology and Politics 1959-1965* . London: Cornel University.
- Poesponegoro, M. D. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Reindhart, J. M. (1989). *Foreign Policy and national Integration: The Case* . Yale university Southeast asia.
- Taufik Abdullah, A. L. (2012). *Indonesia Dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van hoeve
- Yusuf, S. E. (1993). *Dinamika Kaum Santri, Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU* . Jakarta: Rajawali.



INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

BAB I

- A. Kehidupan Politik Indonesia di Masa Demokrasi Parlementer**
- B. Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Parlementer**
- C. Kehidupan Politik Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin**
- D. Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin**
- E. Perubahan Sosial dan Budaya Bangsa Indonesia**

KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA DI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

☐ Kabinet Natsir

☐ Kabinet
Sukiman

☐ Kabinet Wilopo

☐ Kabinet Ali
Sastroamidjojo I

☐ Kabinet
Burhanuddin
Harahap

☐ Kabinet Ali
Sastroamidjojo II

☐ Kabinet Djuanda
/ Kabinet Karya



Kabinet Natsir

(6 September 1950 – 21 Maret 1951)


- **Anggota Kabinet terdiri dari pakar-pakar dalam urusan kenegaraan, antara lain:**
 - **Mr. Assaat**
 - **Ir. Djuanda**
 - **Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo**
 - **Sultan Hamengkubuwono IX**
- **Prestasi Kabinet Natsir antara lain adalah membawa masuk Indonesia menjadi anggota PBB pada bulan September 1950 yang merupakan bukti kedaulatan bagi RI.**
- **Kabinet Natsir jatuh karena adanya mosi tidak percaya dari Parlemen dikarenakan kegagalan dalam perundingan dengan Belanda serta karena pencabutan PP No.39 tahun 1950 tentang DPRS dan DPRDS.**

Kabinet Natsir

(6 September 1950 – 18 April 1951)

Program-Program Utama Kabinet Natsir:

- **Mengintensifkan usaha untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban**
- **Menguatkan konsolidasi, serta penyempurnaan struktur dan susunan pemerintahan**
- **Menyelesaikan proses penyempurnaan Angkatan Perang**
- **Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat**
- **Memusatkan perhatian pada penguatan sistem ekonomi rakyat sebagai fondasi dalam menopang ekonomi nasional.**



Kabinet Sukiman

(26 April 1951 – 3 April 1952)

- Kabinet ini adalah hasil kerjasama antara tokoh PNI, **Suwirjo**, dan tokoh Masyumi, **Sukiman Wirjosandjojo**.
- Masa kerja kabinet ini diwarnai oleh adanya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo dan Kahar Muzakkar, serta kebijakan untuk menumpas PKI secara maksimal.
- Kabinet ini jatuh dikarenakan dibuatnya perjanjian **Mutual Security Act (MSA)** yaitu nota kerjasama bantuan militer, ekonomi dan persenjataan antara menlu RI, Achmad Subardjo, dengan dubes AS di Indonesia, Merle Cochran. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Sukiman

(26 April 1951 – 3 April 1952)

Agenda Kerja Kabinet Sukiman

Bidang Keamanan	Menerapkan tindakan tegas untuk menjaga ketertiban dan kemanan sebagai perwujudan negara hukum
Bidang Sosial Ekonomi	Memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbaharui hukum agraria serta meningkatkan taraf hidup veteran pejuang kemerdekaan
Bidang Politik Dalam Negeri	Menyiapkan segala usaha untuk menjalankan pemilihan umum
Bidang Politik Luar Negeri	Menerapkan politik luar negeri bebas aktif serta memperjuangkan perebutan wilayah Irian Barat.

Kabinet Wilopo

(19 Maret 1952 – 2 Juni 1953)

- Kabinet ini berbentuk **zaken kabinet**, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan tingkat keahlian dan spesialisasi dari setiap anggota kabinetnya, dan bukan berdasarkan susunan kepartaian.
- Masa kerja Kabinet ini diwarnai oleh adanya konflik internal di Angkatan Darat yang berpuncak pada **Peristiwa 17 Oktober 1952** dalam upaya menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan Parlemen.
- Kabinet ini jatuh akibat **Peristiwa Tanjung Morawa** (Sumatera Utara), yaitu aksi kekerasan polisi terhadap para petani yang menempati lahan perkebunan asing di Deli. Peristiwa ini menewaskan 5 orang petani.



Kabinet Wilopo

(3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Agenda Kerja Kabinet Wilopo

Politik Luar Negeri	Penyelesaian masalah Irian Barat, dan konsisten terhadap politik luar negeri bebas-aktif.
Politik Dalam Negeri	Mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilu untuk memilih anggota konstituante, DPR, dan DPRD.
Kemanan, Ekonomi, dan Sosial	Meningkatkan pendidikan, taraf kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta memelihara keamanan dalam negeri.

- Dalam pelaksanaan program-programnya, Kabinet Wilopo menghadapi sentimen kedaerahan sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap pendistribusian kesejahteraan ke daerah-daerah.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I

(31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)



Keberhasilan

- ✓ Berhasil menyusun kerangka pelaksanaan proses Pemilu 1955.
- ✓ Sukses dalam pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.
- ✓ Membina hubungan baik dengan Cina

Kegagalan

- ✓ Kegagalan dalam memperjuangkan Irian Barat
- ✓ Munculnya pemberontakan DI/TII Daud Beureuh di Aceh
- ✓ Munculnya konflik internal di TNI-AD dengan adanya Peristiwa 27 Juni 1955.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I

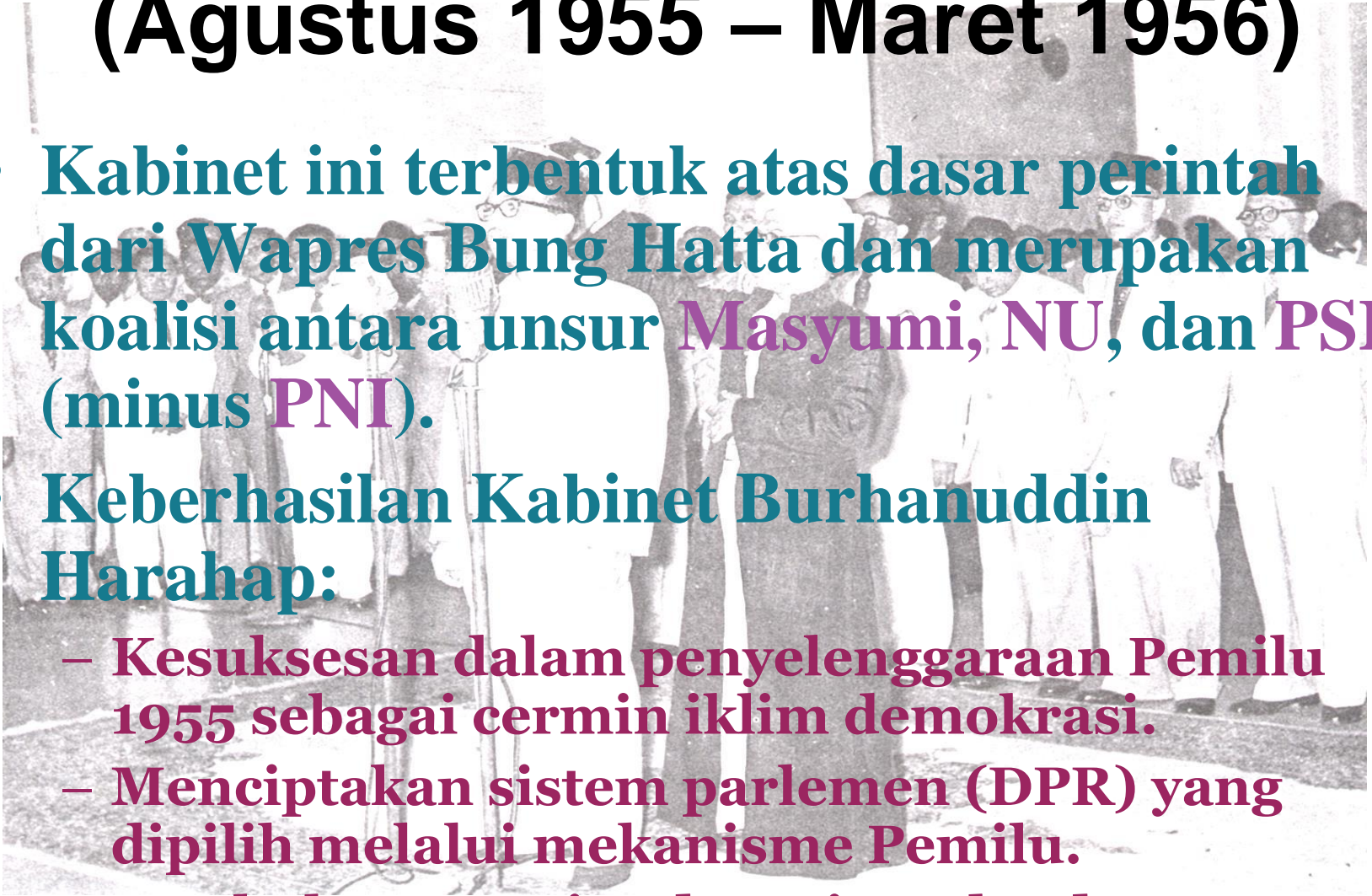
(31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I

- 1. Mempersiapkan proses pemilihan umum yang direncanakan akan digelar pada pertengahan tahun 1955.**
- 2. Mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri, seperti pemberontakan DI/TII.**
- 3. Melaksanakan politik luar negeri Indonesia bebas-aktif, dan berperan secara langsung dalam perdamaian dunia.**

Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)

- Kabinet ini terbentuk atas dasar perintah dari Wapres Bung Hatta dan merupakan koalisi antara unsur Masyumi, NU, dan PSI (minus PNI).
- Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap:
 - Kesuksesan dalam penyelenggaraan Pemilu 1955 sebagai cermin iklim demokrasi.
 - Menciptakan sistem parlemen (DPR) yang dipilih melalui mekanisme Pemilu.
 - Pembubaran Uni Indonesia-Belanda.



Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)

Agenda Utama Kabinet:

1. Memerintahkan pihak Polisi Militer (PM) untuk menangkap Mr. Djody Gondokusumo sebagai mantan Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali I, atas tuduhan korupsi.
2. Melaksanakan Pemilu secara baik, maksimal, dan secepat mungkin.
3. Mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kabinet Ali Sastroamidjojo II

(20 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

- **Kebijakan-kebijakan Kabinet:**
 - Penandatanganan UU Pembatalan KMB yang mengakibatkan berpindahnya asset-asset Belanda ke tangan para pengusaha Tionghoa.
 - Menciptakan Gerakan Assaat dalam rangka melindungi para pengusaha pribumi
- **Kendala-kendala yang dihadapi Kabinet:**
 - Ketidakpuasan daerah terhadap kinerja pemerintah Jakarta dalam pemerataan kesejahteraan.
 - Kondisi negara yang semakin genting akibat separatisme dan konflik antarpartai

Kabinet Ali Sastroamidjojo II

(20 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

Program Kerja Kabinet:

- 1. Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.**
- 2. Mempercepat proses pembentukan daerah-daerah otonom dan akselerasi pemilihan anggota-anggota DPRD.**
- 3. Meningkatkan kesejahteraan umum kaum buruh dan pegawai negeri, serta menyeimbangkan kondisi anggaran belanja dan keuangan negara.**
- 4. Mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat.**

Kabinet Djuanda / Kabinet Karya

(9 April 1957 – 10 Juli 1959)

- Kabinet ini dikenal juga dengan nama Kabinet Karya yang berbentuk **zaken kabinet** dengan dipimpin oleh **Djuanda Kartawidjaja** (tokoh non-partai).
- Normalisasi keamanan dan ketertiban menjadi agenda utama kabinet dalam rangka menghadapi gerakan separatisme
- Pada masa ini terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di **Perguruan Cikini** pada tanggal 30 November 1957.
- Masa pemerintahan Kabinet Djuanda harus berakhir dengan munculnya berbagai pergolakan daerah dan gerakan separatisme **PRRI/ PERMESTA**

Kabinet Djuanda / Kabinet Karya

(9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Panca Karya (Agenda Kerja) Kabinet Djuanda:

1. Pembentukan Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan hasil KMB
4. Memperjuangkan Irian Barat untuk kembali ke wilayah Indonesia
5. Mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan

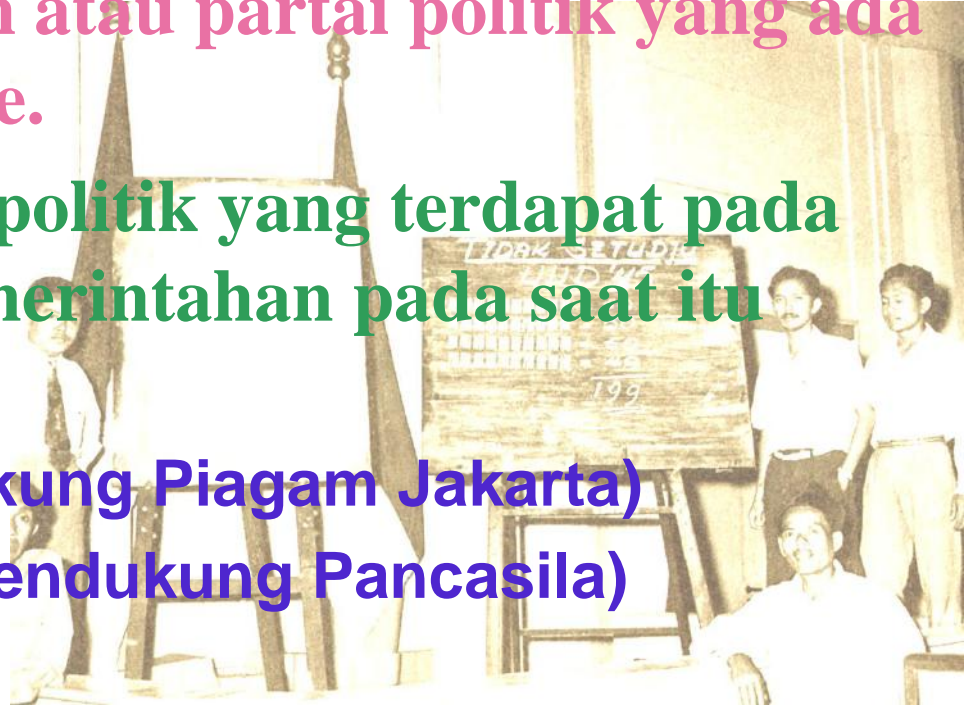
Kabinet Djuanda / Kabinet Karya

(9 April 1957 – 10 Juli 1959)

- 13 Desember 1957, Kabinet ini berhasil menetapkan pengaturan tentang laut pedalaman dan laut teritorial yang disebut dengan Deklarasi Djuanda.
- Pokok-pokok Deklarasi Djuanda antara lain:
 1. Bentuk geografi wilayah RI yang terdiri dari ribuan pulau.
 2. Keutuhan teritorial dan kekayaan negara harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.
- Dalam deklarasi ini disepakati bahwa jarak laut teritorial terluar adalah 12 mil dari garis dasar sewaktu air laut sedang surut. Laut pedalaman disepakati sebagai wilayah laut yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Kegagalan Konstituante dalam Menyusun Undang-Undang

- Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab dari kegagalan Konstituante dalam merancang UUD baru adalah terdapatnya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang ada di dalam Konstituante.
- Tiga poros kekuatan politik yang terdapat pada Konstituante dan pemerintahan pada saat itu adalah
 1. Partai Islam (pendukung Piagam Jakarta)
 2. Partai Nasionalis (Pendukung Pancasila)
 3. Partai Komunis



Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Parlementer

- Pada masa **Kabinet Sukiman**, salah satu perubahan dalam kehidupan ekonomi Indonesia adalah proses nasionalisasi ekonomi oleh pemerintah yaitu dengan melakukan nasionalisasi **de Javasche Bank** menjadi **Bank Indonesia** dengan presiden pertamanya adalah **Mr. Syafruddin Prawiranegara**.
- Sebelumnya nasionalisasi ekonomi juga dilakukan dengan cara:
 - ❑ **Pembentukan Bank Negara Indonesia** sebagai bank nasional pertama Indonesia pada tanggal 5 Juli 1946.
 - ❑ **Pemberlakuan Oeang Republik Indonesia (ORI)**

Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Parlementer

- ❖ Proyek nasionalisasi pada masa Kabinet Ali I adalah dengan menekankan nasionalisasi sektor perekonomian dan mendukung tumbuh kembangnya para pengusaha pribumi melalui program **Ali** (pribumi) – **Baba** (Tionghoa).
- ❖ Pada tanggal 19 Maret 1956, **Kongres Nasional Importir Indonesia** mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melindungi pengusaha pribumi dari pengusaha Tionghoa yang dinamakan **Gerakan Assaat**.

Kehidupan Politik Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

- ❑ Perpindahan sistem pemerintahan Indonesia dari masa Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin diwarnai oleh adanya potensi ancaman konflik internal dalam negeri yang disebabkan tingginya benturan antarpol.
- ❑ Untuk mengatasi potensi konflik, KSAD A.H. Nasution mengeluarkan peraturan Prt/ Perperu/ 040/ 1959 tentang larangan bagi seluruh aktivitas yang berbau politik.



Kehidupan Politik Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

- Kebuntuan kinerja Konstituante, akhirnya ditutup dengan pengumuman Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan berisi:
 1. **Pembubaran Konstituante**
 2. **Tidak berlakunya UUDS 1950, dan berlakunya kembali UUD 1945**
 3. **Pembentukan MPRS dan DPAS dalam tempo secepatnya.**
- Pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini merupakan momen dimulainya masa Demokrasi Terpimpin.

Kehidupan Politik Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

- Semua lembaga negara dalam masa Demokrasi Terpimpin harus berasal dari aliran **NASAKOM** (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
- Presiden Soekarno kemudian membentuk **MPRS, DPA, DEPERNAS** (Dewan Perancang Nasional), dan **Front Nasional**.
- Pada Upacara Peringatan Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1960, Bung Karno berpidato dengan judul “**Penemuan Kembali Revolusi Kita**”.
- Pidato ini kemudian dikukuhkan dalam Ketetapan MPRS No. 1/ MPRS/ 1960 menjadi GBHN dengan nama **Manifesto Politik Republik Indonesia (MANIPOL)**.
- **MANIPOL** kemudian diterapkan sebagai satu-satunya ajaran atau dotrin revolusi Indonesia.

Kehidupan Politik Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

- 5 Maret 1960, DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan. Kemudian dibentuk **DPR-GR** (DPR Gotong Royong) pada tanggal 24 Juni 1960.
- Presiden Soekarno menegaskan bahwa tugas DPR-GR adalah:
 - Melaksanakan **MANIPOL**.
 - Merealisasikan Amanat Penderitaan Rakyat (**AMPERA**).
 - Melaksanakan Demokrasi terpimpin.

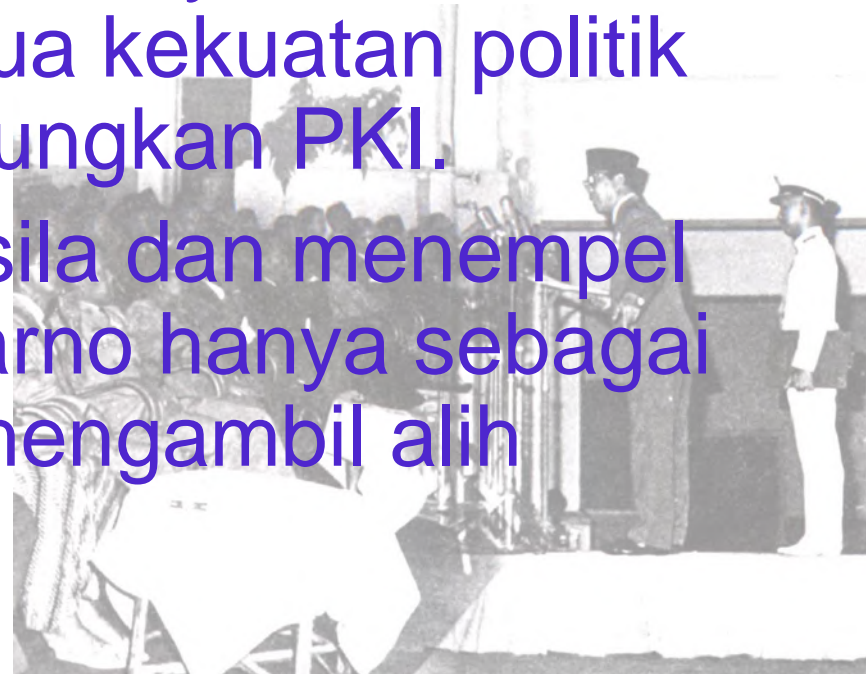


Kehidupan Politik Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

- Presiden Soekarno juga membentuk **Front Nasional** melalui Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959.
- Organisasi ini diketuai langsung oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.

Kehidupan Politik Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

- Kekuatan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin terpusat di tangan Presiden Soekarno, TNI-AD, dan PKI.
- NASAKOM yang sebenarnya dimaksudkan untuk merangkul semua kekuatan politik justru malah menguntungkan PKI.
- PKI menerima Pancasila dan menempel terus kepada Bung Karno hanya sebagai taktik/ strategi untuk mengambil alih kekuasaan.



Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

- Pemerintah melaksanakan konsep ekonomi terpimpin dengan tujuan mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia.
- Konsep ini berawal dari satu pemikiran bahwa di dalam masyarakat sosialis, setiap orang akan dijamin kehidupannya secara layak
- Dalam pelaksanaannya, kebijakan ekonomi terpimpin kemudian berubah menjadi “Sistem Lisensi”, yaitu pemberian lisensi/ surat izin dalam kegiatan ekonomi dari pemerintah kepada orang-orang tertentu saja.

Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

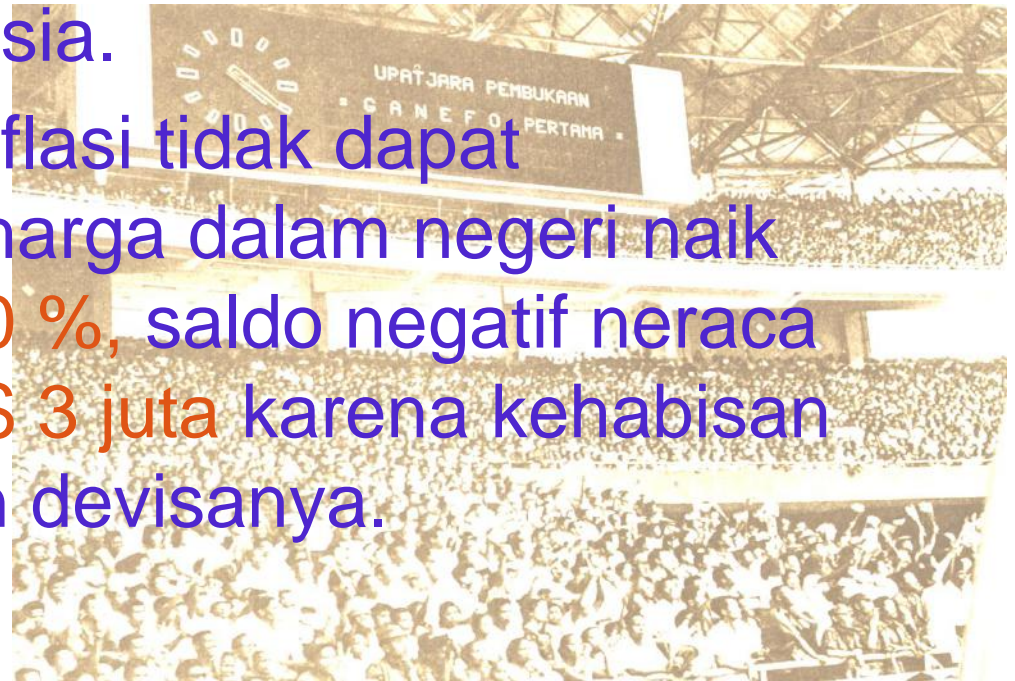
- Untuk mengatasi kesulitan perekonomian akibat tingginya inflasi, pada tanggal 23 Maret 1963, Presiden Soekarno mengumumkan **Deklarasi Ekonomi (DEKON)**.
- Pada dasarnya, perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan pengembangan dari rencana-rencana pembangunan yang telah disusun di masa Demokrasi Parlementer.
- Pada tahun 1959, dibentuk **Dewan Perancang Nasional** yang dipimpin oleh **Muhammad Yamin**.
- 26 Juli 1960, Dewan Perancang Nasional mengeluarkan Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan tahun 1961-1969 yang kemudian disahkan melalui TAP No. 2/ MPR/ 1960.

Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

- ❑ Kebijakan perekonomian pemerintah tahun 1959 dalam menghadapi tingginya inflasi, yaitu:
 - ◆ **Perpu No. 2/ 1959**, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah peredaran uang di dalam negeri.
 - ◆ **Perpu No. 3/ 1959**, yang menetapkan adanya pembekuan sebagian dari seluruh simpanan uang di bank-bank di seluruh Indonesia.
 - ◆ **Perpu No. 6/ 1959**, yang menyatakan bahwa uang kertas Rp. 1.000 dan Rp 500 yang masih berlaku dan telah dikonversi menjadi Rp 100 dan Rp 50 harus segera ditukar dengan uang kertas yang baru sebelum 1 januari 1960.

Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

- ❑ Adanya proyek mercusuar **GANEFO** (Games of the New Emerging Forces) dan **CONEFO** (Conference of the Emerging Forces) juga menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan moneter Indonesia.
- ❑ Pada tahun 1965, inflasi tidak dapat dihindarkan, harga-harga dalam negeri naik menjadi **200 % - 300 %**, saldo negatif neraca negara sebesar **US\$ 3 juta** karena kehabisan cadangan emas dan devisanya.



Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

- ❖ 1963, Dewan Perancang Nasional berubah menjadi **Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)** dengan dipimpin langsung Presiden Soekarno.
- ❖ Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai berikut:
 1. **Penetapan Presiden No. 7/ 1965, tentang pendirian Bank Tunggal Milik Negara.**
 2. **Penetapan Presiden No. 27/ 1965, tentang pengeluaran uang rupiah baru yang nilainya 1000 kali dari uang rupiah lama.**

Perubahan Sosial dan Budaya Bangsa Indonesia

- *Periode 1945-an*
- *Periode 1950-an*
- *Periode 1960-an*



Periode 1945-an

Wanita

24-26 Februari 1945, di Solo diadakan konferensi kaum wanita yang menghasilkan pendirian KOWANI (Kongres Wanita Indonesia).

Pendidikan

27 Desember 1945, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran yang bertugas meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran dan pendidikan.

16 Juni 1947, Menteri PP dan K, Mr. R. Suwandi membentuk Komisi Bahasa yang tugasnya antara lain menyederhanakan ejaan yang sudah dilakukan Ophuyzen pada tahun 1901.

Periode 1945-an

Bidang Seni	Seni Sastra : Chairil Anwar Seni Lukis : Affandi, Sudjojono, Hendra Seni Suara : Ismail Marzuki, C. Simanjuntak
Media Massa	Desember 1948 : 124 surat kabar Akhir 1949 : 166 surat kabar Terbentuk pula stasiun RRI dan stasiun Pemberontak (milik pejuang RI)
Olah Raga	Penyelenggaraan PON I (Pekan Olahraga Nasional) tanggal 9 September 1948.

Periode 1950-an

Pendidikan

Memprioritaskan pembangunan berbagai universitas, seperti:
Universitas Indonesia (1950)
Universitas Airlangga (1954)
Universitas Hasanuddin (1956)

Perfilman

Terdapat 20 studio film yang tergabung dalam wadah PPFI (Persatuan Produsen Film Indonesia)

Pers

Pers dan media mengalami perkembangan pesat dan bersifat regional (tersebar ke seluruh Indonesia).

Periode 1960-an

Pendidikan

- Pemerintah mulai mendirikan institut dan sekolah tinggi (IAIN, STT), serta beberapa kampus swasta (UII, UKI, dan UNIKA Atma Jaya)
- Kurikulum pengajaran terkait dengan ide-ide Pemimpin Besar Revolusi dan doktrin Manipol-Usdek.
- Dikeluarkannya Tridharma perguruan tinggi.

Periode 1960-an

Politik Kebudayaan

- PKI cukup mendominasi politik dan kebudayaan, Kampus juga banyak dideterminasi oleh CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia)
- Presiden Soekarno melarang kebudayaan Barat yang merupakan manifestasi dari cita-cita imperialisme.
- Presiden juga melarang berkembangnya Manifesto Kebudayaan (Manikebu) yang menekankan kebebasan individu untuk menciptakan karya secara kreatif dan independen (humanisme universal).
- Tokoh Manikebu: H.B. Jassin, Trisno Sumardjo dan Wiratmo Soekito

Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi Indonesia di Awal 1960-an

- ❖ Kondisi Indonesia pada awal tahun 1960-an sangat dipengaruhi oleh kultur budaya politik dari Demokrasi Terpimpin.
- ❖ Posisi Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertinggi negara menjadi mutlak berpengaruh terhadap seluruh pengambilan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial.
- ❖ Presiden sebagai penguasa tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi terlihat pada Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962 tentang pembentukan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPRo)
- ❖ Pengaruh PKI juga mengakar kuat di tengah masyarakat, baik dalam bidang budaya, sosial, maupun politik.

**PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA
INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**

Nina Witasari

A. Konstituante

Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang – Undang Dasar baru atau Konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam pasal 134 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa “Konstituante (lembaga pembuat UUD) bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini”. Konstituante terdiri dari 550 orang sebagai hasil dari pemilu 1955 yang diketuai oleh Mr. Wilopo dari PNI sebagai hasil sidang konstituante pada tanggal 20 November 1956.

Konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 Nopember 1956 di Bandung. Sepuluh hari berikutnya yaitu pada tanggal 20 November 1956, terpilih Mr. Wilopo dari PNI sebagai Ketua Konstituante setelah bersaing dengan KH. Mohammad Dahlan. Mr. Wilopo meraih 220 suara, sedangkan KH. Moh. Dahlan 210. Setelah terpilih ketua, selanjutnya di pilih wakil ketua I dan wakil ketua II. Wakil Ketua I jatuh ke tangan Prawoto dari Masyumi, sedangkan Wakil Ketua II dimenangkan oleh Fatturahman dari NU.

Berikutnya Konstituante melaksanakan sidang untuk merumuskan UUD yang baru dalam rangka menggantikan UUDS 1950. Namun sampai tahun 1958 Konstituante belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya perdebatan sengit yang berlarut-larut karena anggota Konstituante lebih mementingkan partainya dibanding kepentingan negara. Dalam kondisi tersebut, muncul pendapat di masyarakat untuk kembali kepada UUD 1945. Pawai, rapat, demonstrasi dan berbagai petisi dilancarkan dimana-mana untuk menuntut agar diberlakukan kembali UUD 1945. Dalam keadaan tersebut Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya

menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Amanat ini diperdebatkan dan akhirnya diputuskan untuk melakukan pemungutan suara.

Pada tanggal 30 Mei 1959, konstituante melaksanakan pemungutan suara untuk menentukan pemberlakuan kembali UUD 1945. Hasilnya 269 suara menyetujui, dan 199 suara tidak menyetujuinya. Meskipun suara yang menyetujui lebih banyak dari pada yang tidak setuju, tetapi hasil pemungutan suara tersebut masih belum memenuhi kuorum sehingga harus diulang lagi. Pemungutan suara kembali di adakan pada 1 dan 2 Juni 1959. Dari dua kali pemungutan suara, Konstituante kembali gagal mencapai dua pertiga suara yang dibutuhkan. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan untuk reses (istirahat dari kegiatan sidang) yang ternyata

Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD yang baru terjadi karena sering terjadi perpecahan pendapat antara anggota Konstituante. Terlebih, konstituante terpecah ke dalam dua kelompok besar yang saling bertentangan, yaitu kelompok Islam dan kelompok Nasionalis. Kelompok Islam menghendaki dasar Negara Islam. Sedangkan kelompok nasionalis menghendaki dasar Negara Pancasila. Kegagalan konstituante juga terjadi karena pada saat pemungutan suara tidak bisa memenuhi kuorum seperti yang di amanatkan pada pasal 137 UUDS 1950 bahwa untuk mengesahkan suatu keputusan harus mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ jumlah anggota. Setelah gagal melakukan pemungutan suara, banyak diantara anggota konstituante menolak untuk menghadiri sidang konstituante, sehingga setelah masa reses berakhir, sidang konstituante tidak kunjung juga dilaksanakan.

Pemilu 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah. Beberapa daerah mengumumkan berdirinya gerakan-gerakan bersifat kedaerahan seperti berdirinya Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Benteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi gerakan yang ingin memisahkan diri. Daerah – daerah tersebut tidak mengakui pemerintah pusat dan bahkan membentuk pemerintahan sendiri seperti PRRI dan PERMESTA.

Karena adanya perpecahan dan ketidakstabilan politik seperti yang disebutkan diatas, Presiden Soekarno beranggapan bahwa Sistem Demokrasi Liberal tidak cocok

untuk dilaksanakan di Indonesia, sehingga pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan “Konsepsi Presiden” yang isinya antara lain (1) Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin, (2) Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong” yang menteri-menterinya terdiri atas orang –orang dari empat partai besar (PNI, Masyumi, NU dan PKI), (3) Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta atau pun tidak.

Partai – partai Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI menolak konsepsi ini dan berpendapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada konstituante.

Setelah keluarnya konsepsi presiden tersebut, pergolakan – pergolakan di daerah justru semakin meningkat. Untuk meredakan pergolakan tersebut, pada tanggal 14 September 1957 diadakan Musyawarah Nasional di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur 56 yang dihadiri oleh tokoh – tokoh dari pusat dan daerah. Musyawarah tersebut membahas beberapa masalah, terutama masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang dan pembagian wilayah RI. Musyawarah Nasional kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada bulan Nopember 1957.

Melihat kondisi politik yang tidak stabil, dengan banyaknya pergolakan diberbagai daerah, maka pada tanggal 14 Maret 1957, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1957 dengan menimbang “bahwa berhubungan dengan keadaan dan ketertiban umum diseluruh wilayah negara Republik Indonesia pada waktu sekarang ini, maka perlu adanya keadaan darurat perang dalam seluruh wilayah tersebut”. Keputusan ini juga menyatakan bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua teritorial perairan, dalam keadaan perang.

Kemudian Surat Keputusan ini diperkuat dengan dikeluarkannya kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 1957. Keputusan ini kemudian di undangkan pada tanggal 27 Desember 1957 dengan terbitnya Undang – Undang Republik Indonesia No. 79 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah

Dilakukan Dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957.

Selanjutnya dengan gagalnya konstituante merumuskan UUD yang baru dan juga tidak berhasil pada saat melakukan pemungutan suara untuk memberlakukan kembali UUD 1945, dan reses sejak 3 Juni 1959, pemerintah menganggap negara semakin dalam keadaan berbahaya. Untuk menanggulangi hal – hal yang dapat membahayakan negara, Letjen AH.Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik dengan mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/045/1959 tanggal 23 Juli 1959, disementara daerah No. Prt/Peperpu/040/1959 tanggal 3 Juli 1959. Peraturan ini pada tahun 1960 diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia Nomor 60. Isi dari peraturan tersebut pada intinya adalah melarang semua kegiatan politik yaitu setiap perbuatan yang aktif dalam bentuk nyata secara lahir yang dilakukan baik didepan umum maupun secara tertutup, baik oleh perorangan, maupun secara kerja sama dari sejumlah orang yang mempunyai persamaan faham, azas tujuan politik atau azas tujuan kepentingan golongan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi haluan negara.

B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit/dekret berasal dari bahasa latin *decernere* yang berarti mengakhiri, memutuskan atau menentukan. Dekrit adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. Dekrit biasanya dikeluarkan dalam keadaan darurat tanpa status hukum yang pasti. Tujuan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah Negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.

Dengan melihat berbagai kondisi yang terjadi selama masa demokrasi Liberal, pemilu yang tidak bisa menciptakan stabilitas politik, gejala di berbagai daerah, diperparah dengan kekagagalan Konstituante dalam merumuskan UUD yang baru, maka presiden menganggap Indonesia dalam keadaan bahaya sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 ia mengeluarkan dekrit.

Inti dari dekrit presiden 5 Juli 1959 tersebut antara lain Menetapkan pembubaran Konstituante; hal ini terjadi karena konstituante dianggap gagal dalam

merumuskan UUD yang baru dan setelah pemungutan suara tanggal 2 Juni 19659, konstituante tidak lagi bersidang atau membubarkan diri, Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Hal ini sejalan dengan cita – cita awal berdirinya Negara Indonesia yang tercantum dalam Piagam Jakarta, Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.



Gambar 1 Pembacaan Dekrit 5 Juli 1959 oleh Soekarno

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Jawa. Dekrit presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan kepada segenap anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. DPR dalam sidangnya pada 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman kepada UUD 1945.

C. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah system demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin muncul seiring keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS Nomor VIII/MPRS/1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi akhir dari Demokrasi Liberal dan awal bagi Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Dalam hal

ini, Demokrasi Terpimpin diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada pada masa Demokrasi Liberal.

Konsepsi Demokrasi Terpimpin dalam pandangan Soekarno bercirikan demokrasi yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Meskipun berbeda dengan demokrasi perwakilan, namun demokrasi terpimpin bukan bentuk ketidaktaktoran atau sentralisme. Kepemimpinan akan didasarkan pada musyawarah, demokrasi terpimpin merupakan cara bukan tujuan, dan demokrasi terpimpin dimaksudkan sebagai demokrasi gotong-royong (Poesponegoro, 2010).

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965), politik luar negeri Indonesia lebih banyak mengarah kepada politik konfrontasi. Politik konfrontasi ditujukan kepada negara – negara kapitalis, yaitu Amerika Serikat dan Eropa Barat. Politik ini kemudian dianggap bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia Bebas Aktif.

Kebijakan – kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin selain bertentangan dengan politik bebas aktif, juga dianggap menguntungkan PKI. Kebijakan yang dianggap menyimpang dari politik bebas aktif antara lain adanya pandangan tentang kekuatan yang saling berlawanan yaitu Oldefo dan Nefo, yang dalam hal ini memposisikan Indonesia masuk kedalam kelompok Nefo. Selain itu Indonesia juga menggunakan politik mercusuar dan membentuk poros Jakarta – Peking.

Dari ciri-ciri tersebut dengan sendirinya sistem Demokrasi Terpimpin akan mengarah pada perombakan politik partai dan menghapus sistem multipartai, serta menyediakan tempat untuk perwakilan golongan fungsional. Dapat diduga bahwa dengan sistem seperti ini kedudukan Soekarno sebagai Presiden jauh lebih kuat dari sistem parlementer sebelumnya, karena kekuasaan eksekutif dan legislatif dipusatkan di tangan Presiden. Untuk meyakinkan agar sistem demokrasi Terpimpin bisa diterima, Soekarno selalu mengatakan bahwa sistem demokrasi parlementer yang berlaku saat itu menjadi penyebab utama kerawanan politik. Pandangan Soekarno ini tentunya tidak diterima sepenuhnya, semua partai politik yang membela sistem partai sebagai asas demokrasi menolaknya. Orang-orang dalam partai menegaskan bahwa setiap perubahan dalam sistem partai harus dilakukan melalui Parlemen.

Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dengan berdasarkan UUD 1945, situasi politik Indonesia diwarnai oleh kepentingan politik antara Soekarno, TNI-AD,

dan PKI, yang berbuah pada ketegangan politik dan bermuara pada konflik. Konflik kepentingan terjadi antara Soekarno dengan TNI-AD, dan TNI-AD dengan PKI. Meskipun Soekarno dan TNI-AD sejalan dalam upaya-upaya mencapai tujuan nasional seperti diperlihatkan dalam kesepakatannya untuk kembali ke UUD 1945 dan mengubur partai-partai politik. Namun dalam pelaksanaannya sering berbeda.

Nasution dan militer mendukung sebagian besar gagasan-gagasan nasionalistis dan anti-Barat Soekarno. Akan tetapi, menolak usaha Soekarno menarik Partai Komunis Indonesia (PKI) lebih erat ke dalam konstelasi kekuasaan (Sundhaussen, 2001). Soekarno semakin khawatir akan pertumbuhan kekuatan militer, khususnya kekuatan Nasution. Oleh karenanya, Soekarno berusaha mengurangi ketergantungannya dengan militer. Berbagai dukungan Soekarno terhadap PKI dalam pusaran kekuasaan menyebabkan terdesaknya posisi TNI-AD, sehingga kedekatan PKI dengan Soekarno dalam pandangan TNI-AD cukup meresahkan, karena akan memperkuat pengaruh PKI. Dari sinilah awal mula ketegangan TNI-AD dan PKI yang membuahkan konflik di antara keduanya.

dengan militer. Berbagai dukungan Soekarno terhadap PKI dalam pusaran kekuasaan menyebabkan terdesaknya posisi TNI-AD, sehingga kedekatan PKI dengan Soekarno dalam pandangan TNI-AD cukup meresahkan, karena akan memperkuat pengaruh PKI. Dari sinilah awal mula ketegangan TNI-AD dan PKI yang membuahkan konflik di antara keduanya.

D. Pembebasan Irian Barat

Pada Tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara *de jure*. Namun ditolak oleh Belanda. Lalu pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini membahas pembatalan uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal. Bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, namun kembali gagal.

Perjuangan Diplomasi Tingkat Internasional yang dilakukan antara dua negara menemukan jalan buntu, maka perjuangan berlanjut pada tataran Internasional. Dimulai dari Konferensi Colombo bulan April 1954, Indonesia memajukan masalah

Irian Barat. Indonesia berhasil mendapat dukungan. Perjalanan berlanjut pada tahun 1954 Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang PBB. Namun mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan yang kuat. Angin segar di dapatkan dalam KAA tahun 1955 Indonesia mendapat dukungan dalam masalah Irian Barat. Hingga tahun 1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan. Karena terus mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi.



Gambar 2 Soekarno di KAA 1955

Kegagalan perundingan penyelesaian Irian Barat di forum PBB serta sikap pemerintah yang di nilai lunak terhadap Belanda menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Sampai tahun 1957 pemerintah Indonesia telah mengupayakan penyelesaian sengketa Irian Barat secara damai, baik melalui perundingan bilateral, maupun forum internasional lainnya. Kegagalan ini mendorong perubahan politik luar negeri Indonesia dari defensif ke ofensif.

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut ini: Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia melarang

beredarnya terbitan berbahasa Belanda, Pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957. Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain *Netherlandsche Handel Maatscappij* (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie.

Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958.

Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah RI juga melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI. Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

Pembangunan militer dilakukan sejak 1958 melalui berbagai kontrak pembelian perlengkapan militer terhadap. Pembelian kapal dan pesawat perang dilakukan dengan Polandia, Cekoslavia, dan Yugoslavia. Tahun 1959 hal yang sama juga dilakukan dengan membeli peralatan perang dari Amerika Serikat dan negara Eropa Barat. Akibat pemberontakan PRRI/Permesta pengiriman ini kemudian ditangguhkan. Hal ini membuat Indonesia mencari peralatan militer kenegara Blok Timur.

Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari Trikora, pemerintah mengambil langkah-langkah berikut.

- a. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial.
- b. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
- c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air Bangsa.

Isi Trikora ini kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan rapat pada 31 Desember 1961 Depertan dan Koti yang menghasilkan: Pembentukan Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibukota Kota Baru dan Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962.

Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berada di Makasar. Berikut ini tugas Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer. Menciptakan daerah bebas secara defacto atau mendudukkan unsur kekuasaan RI di Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Panglima Mandala menyusun strategi Panglima Mandala.

Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ada tiga yang melakukan patroli laut yaitu MTB yaitu MTB RI Macan Tutul, MTB RI Harimau, dan MTB Macan Kumbang diserang oleh Belanda dari laut dan udara. Ketika itu ketiga kapal sedang mengadakan patroli di Laut Aru. Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih komando MTB Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya mundur untuk menyelamatkan diri. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya MTB Macan Tutul bersama Kapten Wiratno dan Komodor Yos Sudarso terbakar dan tenggelam (Moedjianto, 2009). Dalam rangka konfrontasi, pemerintah mengadakan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala (di Sorong dan Teminabuan), Operasi Naga (di Merauke), Operasi Banteng Ketaton (di Fak-Fak dan Kaimana), dan Operasi Jaya Wijaya. Operasi yang terakhir dilaksanakan adalah Operasi Wisnumurti. Operasi ini dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat

kepada RI tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan.

Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Bunker (seorang diplomat Amerika Serikat) untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana Bunker (Bunker's Plan) (Sundhaussen, 2001).



Gambar 3. Komodor Yos Sudarso



Gambar 4. MTB Harimau



Gambar 5. MTB Macan Tutul

Pemerintah RI menyetujui usul tersebut, namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda, berbalik menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York. Berikut ini isi Perjanjian New York.

- a. Penghentian permusuhan.
- b. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
- c. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.
- d. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963.

- e. Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB.
- f. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963.
- g. Pada tahun 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan New York, Sekjen PBB menunjuk Rolsz Bennet dari Guatemala sebagai Gubernur UNTEA merangkap wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Berdasar Persetujuan New York tahun 1962, di Irian Barat diselenggarakan “act of free choice” atau Penentuan Pendapat Rakyat (pepera). Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia.

E. Konfrontasi Indonesia Malaysia

Pada periode terpimpin dimana Soekarno yang menjadi presidennya, Indonesia banyak mengalami pasang surut politik dalam dan luar negrinya. Presiden Soekarno pada saat itu merupakan salah satu orang yang menentang keras Imperialisme barat yang salah satu bentuknya adalah pada era konfrontasi, yaitu ketika Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia. Soekarno menganggap bahwa Malaysia merupakan boneka Neokolim (neokolonialisme, kolonialisme dan imperialisme). Anggapan seperti ini dapat didasari bahwa malaysia pada saat itu masih merupakan negara jajahan Inggris, sehingga tampak dengan jelas bahwa Malaysia merupakan “Antek Kolonialisme”.

Politik konfrontasi pada dasarnya mencerminkan suatu kurun waktu ketika Indonesia, yang baru saja membebaskan diri dari sisa-sisa kolonialisme Belanda di Irian Barat yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Irian Jaya, karena merasa sedang dikepung oleh kekuatan neokolonialisme melalui pembentukan Federasi Malaysia yang akan membahayakan stabilitas dan keamanan Indonesia (Bandoro, 1994)

Di dalam pembentukan Federasi Malaysia ini mencerminkan suatu alat imperialisme berat terutama Inggris dan Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan keberadaannya dan pengaruhnya di Asia Tenggara selain itu pembentukan Malaysia juga dapat dilihat sebagai peningkatan dan munculnya Cina kedua yang akan

mendominasi politik dan ekonomi Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia sendiri (Bandoro, 1994).

Kekhawatiran Soekarno mengenai Imperialisme dan Kolonialisme barat yang diterapkan dengan adanya faktor Malaysia yang sebagai anteknya dan terutama sebagai basis militer asing adalah, bagaimana suatu bangsa dapat hidup berdampingan secara damai apabila jika basis-basis militer dan benteng-benteng ekonomi yang mengelilinginya di pergunakan untuk menggulingkan atau untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam negeri dan bangsa itu ? Bagaimana suatu bangsa dapat hidup berdampingan secara damai dengan kekuasaan dari luar yang menguasai politiknya ? Dan bagaimana juga apabila suatu bangsa dapat bertahan untuk hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara yang menghalanginya untuk mewujudkan tata sosial dan tata ekonomi yang sesuai dengan kepribadian nasionalnya ?

Dan kekhawatiran-khawatiran Soekarno itu pun terbukti, jika dilihat sekarang bagaimana basis militer asing tersebut dipergunakan pada negara-negara yang baru berkembang. Negara-negara tersebut dipergunakan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan tata urusan imperialisme dan dipergunakan sebagai alat utama dari kepentingan-kepentingan tata urusan imperialisme dan dipergunakan sebagai alat utama dari kepentingan-kepentingan imperialisme di negara-negara yang baru berkembang.

Pada kenyataan-kenyataannya bahwa Malaysia merupakan suatu negara ciptaan neokolonialisme (D.Legge, 2001), membuat Soekarno mengeluarkan pernyataan pada pidato kenegaraan di istana negara pada tanggal 11 Juli 1963 yaitu, "genyang Malaysia" menurutnya saat itu, Malaysialah yang mengadakan konfrontasi kepada Indonesia karena pembentukan Malaysia merupakan konfrontasi terhadap revolusi Indonesia.

Salah satu masalah yang sangat mendasari adanya konfrontasi ini adalah perseteruan mengenai nasib penduduk wilayah-wilayah Kalimantan tentang kesediaan mereka untuk masuk dalam Malaysia.

Sebetulnya dari pihak Malaysia dan Indonesia sendiri sudah mengupayakan untuk merendam ketegangan antar keduanya, kedua negara ini sempat melakukan kegiatan diplomasi melalui perundingan pada tanggal 7 Juni 1963 Soekarno mengadakan pertemuan dengan Teuku Abdul Rahman yang pada waktu itu selaku

perdana menteri Malaysia, untuk membahas mengenai Kalimantan , dan usaha itu berlanjut dengan adanya campur tangan dari Presiden Macapagal (Presiden Filipina) didasari oleh pergaulan hidup yang bersajarah dan warian bersama rumpun melayu, yang telah mendapatkan persetujuan dari Indonesia dan Malaysia untuk melaksanakan suatu konfederasi tetap yang akan memungkinkan ketiga negara tersebut menyelesaikan kepentingan antara ketiganya dalam bentuk pertemuan rutin (D.Legge, 2001).

Rencana tersebut dinamakan "Malphilindo" yang menghasilkan persetujuan "Manila". Isi pokok dari perjanjian tersebut adalah, sebelum Malaysia berdiri dilakukan usaha untuk mengetahui kesediaan penduduk-penduduk di wilayah-wilayah Kalimantan apakah mereka ingin menjadi anggota federasi di Malaysia. Tetapi usaha tersebut gagal , hingga pada akhirnya U Thant selaku wakil sekjen PBB pada saat itu turun tangan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. U thant mengirimkan wakilnya untuk mengadakan peninjauan terhadap pendapat para penduduk Kalimantan.

Tetapi sekali lagi terjadi perseteruan di antara Indonesia dan Malaysia, dikarenakan munculnya dua masalah baru yang mengakibatkan perseteruan antar kedua negara tersebut tidak dapat diatasi lagi, dan kedua masalah itu adalah :

- a. Persoalan pengiriman peninjauan-peninjauan yang hadir selama penelitian PBB. Yang dimana Soekarno menginginkan pengiriman 10 duta, akan tetapi Inggris hanya mendapatkan 4 visa bagi para duta. Hal ini dianggap Soekarno sebagai tindakan untuk mencegah penelitian yang jujur berdasarkan persetujuan.
- b. penentuan tanggal berdirinya Malaysia. Tengku Abdul Rahman pada tanggal 29 Agustus telah mngumumkan bahwa pada tanggal resmi berdirinya Malaysia adalah 16 September 1963,yang berarti sebelum misi PBB selesai dengan pekerjaannya. Disini soekarno menganggap bahwa keputusan Tengku merupakan pelanggaran terhadap persetujuan Manila dan tindakan tersebut menunjukkan ketetapan hatinya untuk meneruskan pembentukan federasi Malaysia tanpa harus menunggu keputusan dari U Thant .

Keadaan ini tersebut makin diperburuk dengan keadaan internal Indonesia, dimana terjadi demo besar-besaran menentang pembentukan dalam Federasi Malaysia yang dimana akhirnya memicu terjadinya kerusuhan yang merusak segala sesuatu yang

semuanya berhubungan dengan kedutaan Inggris, dan disertai dengan penyitaan aset-aset Inggris di Indonesia oleh Soekarno. Setelah kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa itu terjadi, konfrontasi menjadi politik Indonesia yang tetap, dan juga disertai pernyataan-pernyataan "Ganyang Malaysia" yang terus berkumandang.

Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pimpinan Soekarno pada saat itu adalah bahwa didalam pemebangunan di Indonesia diperlukan suatu pinjaman uang dari luar negeri, yang dimana pada saat itu Amerika dan sekutunya melalui *world Bank* dan *IMF* juga menawarkan bantuan, akan tetapi bantuan tersebut sifatnya sangat memberatkan, merugikan dan mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah Indonesia . Hingga pada akhirnya Soekarno Menjadi geram dan mengeluarkan pernyataan kepada Amerika Serikat dan sekutunya yaitu "Go To Hell With Your Aid". Ucapan tersebut mempengaruhi negara tetangga Indonesia yaitu malaysia pada saat itu, seperti yang sudah di jelaskan di atas merupakan negara jajahan Inggris sehingga dapat memperburuk hubungan antara kedua belah pihak.

Kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak hingga pada akhirnya Soekarno membuat kebijakan baru yang sifat pinjamannya lunak dan tidak mempengaruhi kebijakan dan kedaulatan negara Indonesia, maka Indonesia membentuk kerja sama dengan negara lain yang sudah memenuhi kebijakan yang telah di buat oleh Soekarno seperti dalam masalah militer dengan Rusia, masalah industri dan pertanian dengan cina, dan beberapa masalah-masalah pembangunan lainnya dengan negara-negara Non-Blok lainnya di Asia, hingga terciptalah poros Jakarta-Phnom Penh-Pyong Yang-Beijing. Dengan terciptanya poros tersebut makin membuat panas konfrontasi di Malaysia, karena dengan terciptanya poros tersebut maka Indonesia telah memboikot negara barat, maka dari itu Malaysia sebagai antek dari Imperialisme barat merasa tersinggung dengan adanya poros tersebut. Kerena poros tersebut menyebabkan kerugian bagi Malaysia.

Pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai reaksi dari masuknya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap, Soekarno menyatakan keputusannya untuk keluar dari PBB, seperti yang beliau utarakan pada pidatonya di Rapat Umum Anti Pangkalan Militer Asing bertempat di gelora Bung Karno pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tersebut menurut penulis bahwa dengan kedudukan Malaysia dalam DK PBB berarti semakin mempermudah Inggris, terutama

Amerika Serikat dengan menggunakan Malaysia sebagai anteknya untuk menyebarluaskan politik Neokolimnya, dan untuk mengantisipasi hal tersebut oleh karena itu maka Soekarno menyatakan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB.

Dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB berarti lepas sudah campur tangan PBB dan "special agentnya" seperti UNESCO, FAO, UNICEF, dll. Kembali lagi pada pernyataan Soekarno yaitu "Go To Hell With Your Aid" yang berarti Indonesia harus berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan dari siapa pun juga. Dan pertanyaannya adalah "Apakah Indonesia Mampu?" ya! Jawab Soekarno karena selama ini Indonesia telah berusaha sendiri untuk memajukan bangsanya tanpa harus ada bantuan dari PBB dan agen-agenya. Menurut Soekarno agen-agen PBB tersebut hanya menumpang nama saja dalam keberhasilan Indonesia, karena Indonesia dalam membangun negaranya menggunakan usahanya sendiri.

Dan sebagai lanjutannya terhadap Konfrontasi Malaysiatersebut Soekarno menyatakan bahwa "Malaysia Do Not Exist Legally For Us". Yang artinya adalah Malaysia menurut hukum Indonesia tidak ada, karena Malaysia adalah alat dari Imperialisme, dan Indonesia menentang Imperialisme yang dilakukan Negara Barat.

F. Rangkuman

Setelah saudara mempelajari dan membaca modul di atas dapat disarikan materi sebagai berikut :

1. Konstituante adalah lembaga khusus yang diberikan tugas untuk menyusun hukum tertulis atau Undang – undang dasar pengganti UUD 1945. Namun demikian dalam proses penyusunan Undang – undang dasar tersebut terjadi perdebatan yang tidak pernah ada titik temu. Perdebatan yang terjadi di dalam sidang konstituante menyangkut ideologi dimana partai Islam menginginkan agar dalam pembukaan UUD isi pancasila dikembalikan sesuai dengan piagam Jakarta. Sementara partai nasionalis dan partai sosialis tetap menghendaki Pancasila sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. Kedua kubu ini tidak bisa mengambil keputusan bahkan dalam sidang konstituante yang hadir tidak memnuhi quorum, padahal batas waktu yang diberikan konstituante sudah habis. Dengan mendasar pada kinerja Konstituante yang tidak bisa mengambil keputusan maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden.

2. Pada tanggal 5 juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya antara lain (a) Pembubaran Konstituante; (b) memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 (c) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.
3. Sesuai dengan perjanjian KMB, setahun setelah perjanjian belanda harus mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Namun demikian sampai pada batas waktu yang ditentukan Belanda masih tetap mempertahankan Irian barat. untuk mengembalikan Irian barat terpaksa Indonesia harus membebaskan irian barat dengan melakukan perlawanan fisik. Dengan dikeluarkannya kebijakan TRIKORA yang isinya (a) Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial, (b) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia., (c) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan Irian barat selanjutnya dilakukan dengan jalur diplomasi yang melibatkan beberapa negara dan menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York. Berikut ini isi Perjanjian New York. (a) Penghentian permusuhan. (b) Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. (c) Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. (d) Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. (e) Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. (f) Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963.
4. Pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai reaksi dari masuknya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap, Soekarno menyatakan keputusannya untuk keluar dari PBB, seperti yang beliau utarakan pada pidatonya di Rapat Umum Anti Pangkalan Militer Asing bertempat di gelora Bung Karno pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tersebut menurut penulis bahwa dengan kedudukan Malaysia dalam DK PBB berarti semakin mempermudah Inggris, terutama Amerika Serikat dengan menggunakan Malaysia sebagai anteknya untuk menyebarluaskan politik Neokolimnya, dan untuk

mengantisipasi hal tersebut oleh karena itu maka Soekarno menyatakan keluarganya Indonesia dari keanggotaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Moedjiyanto. 1984. Indonesia Abad ke-20 Jilid 2: Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai PELITA III. Jakarta: Kanisius.
- N.N. 1989. Perjalanan Bangsa dari Proklamasi sampai Orde Baru: Himpunan Dokumen Historis. Jakarta: PT Kreasi Jaya Utama.
- Roeslan, Abdoelghani. 1964. Dari Sabang Sampai Marauke: Satu nusa, Satu Bangsa. Jakarta : Departemen Penerangan RI
- Sutjibto, 1964. Irian Barat Mengenal Indonesia Eds X. Jakarta: Proyek Penerbitan Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.2000. Sejarah TNI JILID III (1960-1965). Jakarta : Pusat Sejarah dan tradisi TNI
- Poesponegoro, M. D. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1993, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta : Balai Pustaka.
- Reindhart, J. M. (1989). *Foreign Policy and national Integration: The Case* . Yale university Southeast asia.
- Sundhaussen, U. (2001). *Bung Karno dan Militer, dalam Dialog Dengan Sejarah, Soekarno Seratus Tahun*. Jakarta: Kompas.
- Taufik Abdullah, A. L. (2012). *Indonesia Dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van hoeve.

INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

Tsabit Azinar Ahmad

A. Hubungan Supersemar dan Kemunculan Orde Baru

Salah satu fase penting dalam sejarah Indonesia adalah masa peralihan dari pemerintahan Sukarno ke Soeharto. Tahapan ini dimulai setelah meletusnya peristiwa penculikan para pemimpin Angkatan Darat (AD) pada 1 Oktober 1965. Penculikan tersebut mengakibatkan pucuk pimpinan AD menjadi kosong. Melihat masalah tersebut, Soeharto sebagai salah satu pimpinan AD berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan jajaran pimpinan yang masih ada serta segera menyusun strategi untuk mengambil alih keadaan dan mengamankan situasi. Dari sini kemudian ia diberikan wewenang oleh Sukarno pada 3 Oktober 1965 sebagai pelaksana pemulihan keamanan dan ketertiban. Gerak cepat yang dikomandoi oleh Soeharto ini kemudian membawanya masuk ke dalam jajaran eksekutif pemerintahan sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat sekaligus panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Sebagai pengganti Ahmad Yani, Soeharto kemudian mengambil tindakan dengan membekukan PKI dan organisasi yang berada dalam naungannya.

Akibat peristiwa 1 Oktober 1965 itu, terjadi berbagai goncangan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Hal ini kemudian menyulut gerakan massa yang dimotori oleh para mahasiswa yang terbagung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 25 Oktober 1966. Setelah itu, banyak bermunculan kesatuan aksi lain dari berbagai lapis kelompok masyarakat. Munculnya kesatuan aksi ini bermuara pada demonstrasi besar-besaran yang mulai dilakukan pada Januari 1966. Di Jakarta demonstrasi secara maraton berlangsung selama kurang lebih 60 hari sejak 10 Januari 1966. Dari sinilah lahir aspirasi bertajuk Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah yang berisikan (1) bubarkan PKI, (2) retool kabinet Dwikora, dan (3) turunkan harga/perbaiki ekonomi (Kartasasmita, dkk., 1995).

Tuntutan dari masyarakat telah mendorong Sukarno untuk melakukan perubahan kabinet. Pada 21 Februari 1966, ia mengumumkan susunan kabinet baru

yang terdiri atas 102 menteri. Kabinet ini disebut ‘Kabinet Dwikora yang Disempurnakan.’ Akan tetapi, para mahasiswa menyebutnya sebagai ‘Kabinet 100 Menteri.’ Tak ayal lagi, hal ini memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa. Akibatnya, setelah pelantikan kabinet pada 24 Februari 1966, terjadi kembali demonstrasi dan aksi serentak pengempisan ban-ban mobil. Aksi ini mengakibatkan bentrok yang menewaskan Arif Rahman Hakim. Di tubuhnya bersarang timah panas yang dimuntahkan oleh Resimen Cakrabirawa. Ini pulalah yang mengakibatkan pada 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010).

Serangkaian peristiwa pada akhir tahun 1965 sampai awal tahun 1966 bermuara pada dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Supersemar lahir dari kegentingan situasi yang telah mencapai klimaks. Pada 10 Maret 1966, Sukarno bertemu dengan Front Pancasila dan perwakilan dari partai-partai politik membahas situasi terkini. Dalam pertemuan tersebut Front Pancasila mengusulkan agar segera dilakukan pembubaran terhadap PKI. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak terwujud (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010).

Keesokan harinya dilangsungkan sidang paripurna Kabinet Dwikora yang Disempurnakan di Istana Merdeka. Sementara itu, di luar terdapat demonstrasi mahasiswa yang menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka. Ketika Bung Karno sedang menyampaikan sambutan pembukaan, Brigadir Jendral M. Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa) masuk ke ruang sidang. Dengan ekspresi agak panik ia bermaksud memberitahu Brigjen Amirmachmud yang juga hadir dalam sidang itu, bahwa di sekitar Monas sedang bergerak pasukan tak dikenal yang tidak mengenakan atribut kesatuan mereka. Berhubung Amirmachmud menolak untuk keluar, Sabur langsung memberitahu Sukarno. Akibatnya, Sukarno menjadi panik sehingga menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II Leimena. Selanjutnya, Ia bergegas keluar dan bersama Waperdam Soebandrio menuju ke Bogor dengan menaiki helikopter (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010).

Belakangan diketahui bahwa “pasukan liar” tersebut adalah pasukan pimpinan dari Kolonal Sarwo Edhi Wibowo sejumlah dua kompi yang ditugaskan oleh Kemal Idris untuk mengamankan para menteri yang diduga terlibat peristiwa 1 Oktober 1965. Kemal Idris mendapat instruksi mengenai pengarahan pasukan tanpa atribut itu dari Letjen Soeharto.

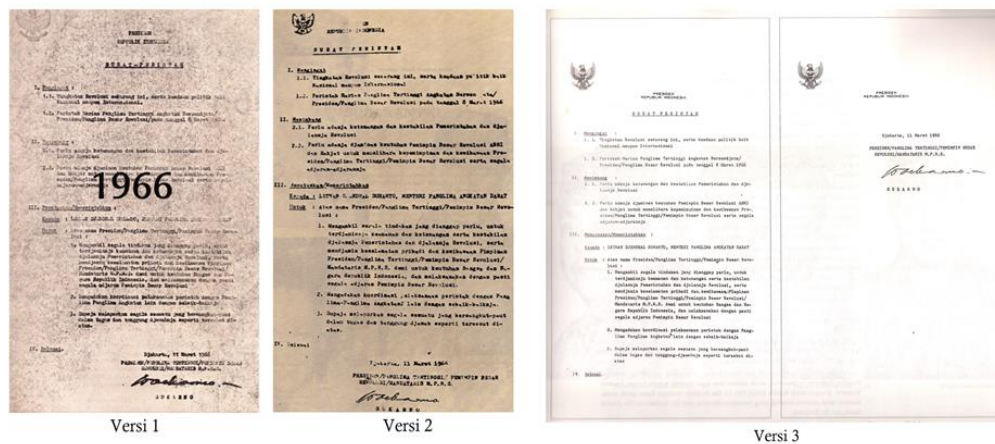
Tak lama setelah kepergian Sukarno ke Bogor, tiga orang Brigadir Jendral yakni Basuki Rachmat, M. Yusuf, dan Amirmachmud menuju kediaman Soeharto. Di sana mereka akhirnya ditugaskan untuk menemui Sukarno di Bogor. Dari sinilah kemudian lahir Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Dokumen ini sampai saat ini masih menyisakan misteri. Hal itu disebabkan dokumen yang menjadi landasan kelahiran Orde Baru telah hilang secara misterius. Supersemar berisi pemberian wewenang dari Presiden Sukarno kepada Soeharto untuk

(1) mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/ Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi/ mandataris M.P.R.S, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi, (2) mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya, (3) supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas.

Isi dalam Supersemar itu adalah memerintahkan kepada Soeharto untuk mengamankan Pancasila, mengamankan UUD 1945, menjaga stabilitas nasional, dan menjaga keamanan Bung Karno. Akan tetapi dalam perkembangannya terjadi berbagai macam kontroversi tentang naskah asli Supersemar.

Sampai sekarang ada tiga naskah Supersemar yang beredar, dua versi seperti yang terdapat dalam buku *30 Tahun Indonesia Merdeka* edisi awal di mana Supersemar hanya terdiri atas satu halaman. Versi ketiga adalah seperti yang terdapat dalam buku yang sama di edisi tahun 1995. Walau isi dari ke tiga naskah tersebut sama, masyarakat sempat dibingungkan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah “manakah diantara ketiga naskah tersebut yang benar-benar asli?”.



Gambar 1. Tiga Versi Supersemar
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Kontroversi lain yang berkembang seputar Supersemar selain otentisitas naskah adalah tentang proses keluarnya Supersemar dan dampak dari keluarnya Supersemar. Tentang proses keluarnya Supersemar, kontroversi yang bererdar adalah tentang pertanyaan-pertanyaan “apakah Sukarno mengeluarkan Supersemar dengan tanpa tekanan?”, “siapa pengetik Supersemar?.” Kemudian berkaitan dengan dampak sesudah Supersemar, beberapa kontroversi yang muncul adalah “bagaimana sebenarnya sifat dari Supersemar, apakah teknis atau politis?”, “apakah Supersemar bersifat sebagai *transfer authority*?.”

Dampak dari Supersemar sangatlah terasa. Tidak lama setelah Soeharto menerimanya, keluarlah Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin besar Revolusi Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam surat tersebut turut dibubarkan pula semua organisasi yang sejasas/berlindung/bernaung di bawah PKI. Surat tersebut ditandatangani oleh Soeharto atas nama presiden (Kartasasmita, dkk., 1995).

Tindakan kedua yang segera dilakukan oleh Soeharto adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Keputusan ini berisikan penahanan terhadap 15 menteri yang dianggap terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September atau memperlihatkan iktikad tidak baik dalam rangka penyelesaian masalah itu. Para menteri yang diamankan adalah Dr. Soebrandio, Dr. Chairul Saleh,

Ir. Setiadi Reksoprodjo, Sumardjo, Oei Tju Tat, S.H., Ir. Surachman, Jusuf Muda Dalam, Armunanto, Sutomo Martopradoto, A. Astrawinata, S.H., Mayjen Achmadi, Drs. Moh Achadi, Letkol Sjafei, J.K. Tumakaka, dan Mayjen Dr. Sumarno.

Kedudukan Supersemar semakin menguat ketika dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS. Ketetapan ini dikeluarkan bersama 23 ketetapan lain dalam sidang umum MPRS IV pada 20 Juni 1966 sampai 5 Juli 1966. Pada sidang umum itu pula Sukarno membacakan pidato berjudul *Nawaksara* (*nawa* = sembilan, *aksara* = pasal). Pidato yang sering dianggap sebagai pertanggungjawaban presiden ini ternyata dianggap tidak memenuhi harapan karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan presiden tentang peristiwa Gerakan 30 September.

Di dalam ketetapan MPRS tersebut diputuskan pula untuk “Mempercayakan kepada Letnan Jenderal TNI. Soeharto Menteri Panglima Angkatan Darat, pemegang Ketetapan tersebut, untuk memikul tanggung jawab wewenang yang terkandung didalamnya dengan penuhkebijaksanaan, demi pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan Revolusi dan demi kebulatan serta kesatuan Bangsa dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakyat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.”

Posisi Supersemar dikuatkan lagi dengan Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Di dalam memorandum tersebut dijelaskan bahwa Supersemar merupakan “kunci pembuka babak baru dalam sejarah Revolusi Indonesia, merupakan titik balik kepada dasar Revolusi yang sebernarnya ... surat perintah tersebut merupakan momentum bersejarah, merupakan suatu detik yang menentukan jalan sejarah selanjutnya bagi Revolusi Pancasila Indonesia.” Dalam ketetapan tersebut dijelaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Kemudian perwujudan dari sumber dari segala sumber hukum itu adalah (1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; (2) Dekrit 5 Juli 1959; (3) Undang-Undang Dasar Proklamasi; (4) Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan demikian, posisi Supersemar menjadi sangat kuat, termasuk Soeharto sebagai pemegangnya.

Telah dikukuhkannya Supersemar sering ditandai sebagai pembuka babakan baru dalam kehidupan bernegara. Babakan sejarah ini sering disebut sebagai Orde

Baru. Sebagaimana tertuang dalam lampiran Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, Supersemar sebagai kunci babak baru dalam sejarah revolusi Indonesia, yaitu babak pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Masih menurut ketentuan tersebut, Supersemar diharapkan mampu menguatkan pancasila dan pemerintahan, sehingga dapat merealisasikan dasar dan tujuan revolusi secara bertahap.

Setelah sidang istimewa dilaksanakan, pada 25 Juli 1966 Sukarno membubarkan kabinet Dwikora dan membentuk kabinet Ampera. Pembentukan kabinet Ampera didasarkan pada Tap MPRS No XIII tahun 1966. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden menugaskan kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban Ketetapan MPRS tersebut untuk segera membentuk Kabinet Ampera. Hal ini memperlihatkan bagaimana Soeharto telah memiliki kekuasaan yang luas. Dalam kabinet Ampera, Soeharto bertindak sebagai ketua presidium kabinet. Kabinet ini memiliki tugas pokok yang dinekal sebagai *dwidharma*, yakni stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi. Program utama kabinet Ampera terdiri atas empat aspek atau disebut *catur karya*, yakni

- a. memperbaiki peri-kehidupan Rakyat terutama dibidang sandang dan pangan;
- b. melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu seperti dicantumkan dalam Ketetapan MPRS No XI/MPRS/1966, tanggal 5 Juli 1966;
- c. melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tanggal 5 Juli 1966;
- d. melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

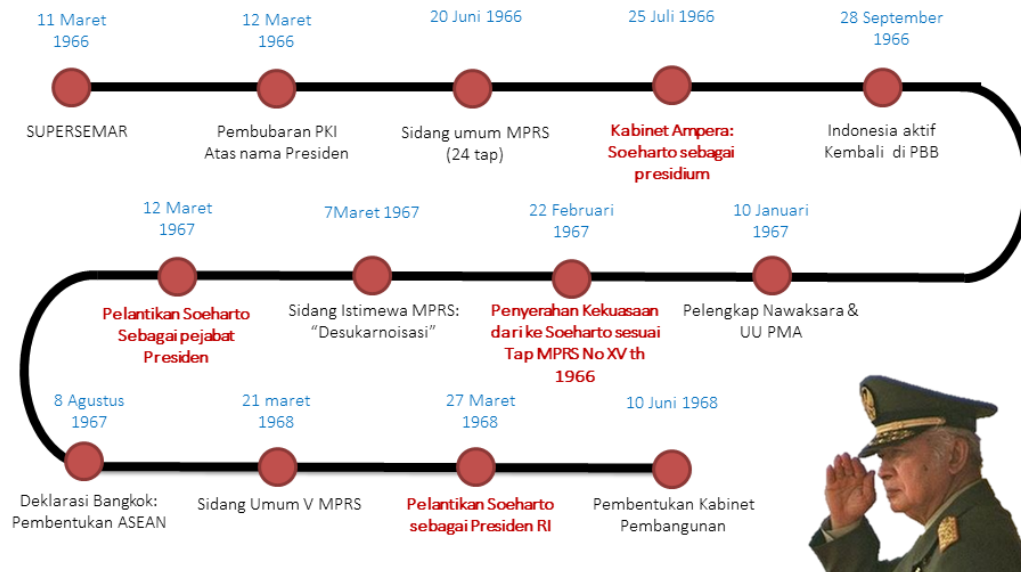
Setelah itu, posisi Sukarno semakin terdesak dan melemah. Pada 10 Januari 1967, Sukarno melalui sebuah surat menyampaikan Pelengkap Nawaksara kepada pimpinan MPRS. Akan tetapi, hasil rapat pimpinan MPRS pada 21 Januari 1967 menyatakan bahwa presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional. Sementara itu DPRGR melalui resolusi dan memorandum tanggal 9 Februari 1967 telah menolak Nawaksara dan pelengkapanya sebagai suatu pertanggungjawaban dan menganggap kepemimpinan Sukarno justru membahayakan bangsa. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya keputusan pimpinan

MPRS No 13/B/1967 tanggal 21 Januari 1967 tentang penolakan terhadap Pelengkap Nawaksara. Akibat penolakan itu, muncul demonstrasi yang dipelopori KAMI pada 27 dan 30 Januari yang menuntut diadilinya Presiden Sukarno.

Melemahnya posisi Sukarno telah mendorong upaya penyerahan kekuasaan kepada Soeharto selaku pengemban Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966. Penyerahan kekuasaan berlangsung dalam waktu singkat pada 22 Februari 1967. Penyerahan kekuasaan kepada Soeharto didasarkan pada Ketetapan MPRS No XV/MPRS/1966 bahwa “apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Surat Perintah 11 Maret memegang jabatan Presiden.” Hal ini mendapatkan respon positif dari ABRI yang secara resmi mengumunkan dukungannya pada 24 Februari 1967.

Ketidakpercayaan publik dan parlemen terhadap pemerintahan memuncak dengan diselenggarakannya Sidang Istimewa MPRS pada 7-12 Maret 1967. Dalam sidang itu keluarlah Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari presiden Sukarno dan menarik kembali mandat MPRS dari Sukarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945. Di dalamnya termuat larangan bagi Sukarno untuk melakukan kegiatan politik dan merekomendasikan langkah hukum yang berkaitan dengan Sukarno. Dengan ketetapan itu pula diangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPRS hasil pemilihan umum. Dengan demikian, terhitung sejak dilantik pada 12 Maret 1967 Soeharto bertindak sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Posisi Soeharto sebagai pejabat presiden makin dikuatkan dengan diselenggarakannya Sidang Umum V MPRS pada 21-30 Maret 1968. Pada sidang itu Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Soeharto dilantik oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 dan berhasil membentuk kabinet pada 10 Juni 1968.



Gambar 2. Garis Waktu Terbentuknya Orde Baru

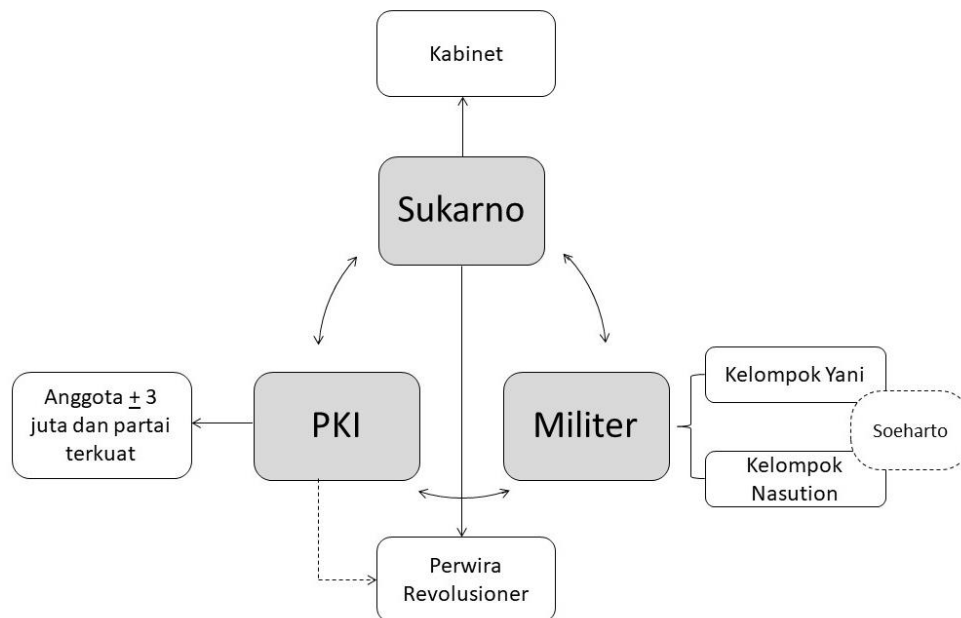
B. Kehidupan Politik dan Pemerintahan pada Masa Orde Baru

Di akhir periode demokrasi terpimpin, kondisi politik tidak stabil. Ada tiga unsur kekuatan yang mendominasi politik Indonesia, yaitu (1) Unsur Kekuatan Presiden RI, (2) Unsur Kekuatan TNI AD, (3) Unsur Kekuatan PKI (Partai Komunis Indonesia). Untuk itulah, Sukarno berupaya keras menciptakan kestabilan, namun kondisi memang sangat rumit. Unsur pertama adalah Presiden RI sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, Pemimpin Besar Revolusi dan Presiden seumur hidup, yakni Ir. Sukarno yang akrab dipanggil Bung Karno. Anggota Kabinet Dwikora masuk dalam unsur kekuatan ini.

Unsur kekuatan TNI AD ada dua kubu: Kubu Yani (Letjen TNI Ahmad Yani) yang cenderung sejalan dengan Presiden dan Kubu Nasution (Letjen TNI Abdul Haris Nasution) yang lebih keras terhadap pemerintah. Soeharto awalnya termasuk dalam Kubu Nasution, walaupun kelak mendirikan kubu sendiri. Di satu sisi terdapat pula kubu perwira revolusioner yang memiliki kedekatan dengan PKI dan Sukarno. Kubu ini berada di dua sisi.

Unsur PKI berkekuatan sekitar tiga juta anggota. Ini didukung oleh sekitar 17 juta anggota organisasi-organisasi *onderbouw* PKI seperti BTI, SOBSI dan Gerwani. Dengan jumlah itu PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRT dan Uni Soviet. Dalam Pemilu 1955 PKI menempati urutan ke-4. Dan,

sebagaimana umumnya partai besar, PKI juga memiliki anggotanya di kabinet. Mereka adalah DN Aidit, Menko/Ketua MPRS, Lukman sebagai Menko Wakil Ketua DPRGR dan Nyoto Menteri Urusan *Land-reform*.



Gambar 3. Segitiga Kekuatan Politik pada masa Demokrasi Terpimpin

Setelah meletusnya peristiwa 1965, kondisi politik semakin kacau karena antara PKI maupun TNI saling tuduh tentang siapa yang berada di balik peristiwa Gerakan 30 September. Akan tetapi, karena semakin terdesak akhirnya kekuatan PKI berhasil dihancurkan. Namun demikian, gejolak politik ini menjadi pekerjaan rumah karena telah memporandakan kehidupan politik secara global. Oleh karena itu, program utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik. Di depan sidang pleno DPRGR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal pemecatan kodnsisi mental/psikologis bagi keperluan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Hal yang paling awal dilakukan untuk mengatasi kondisi politik adalah pembubaran PKI dan pembersihannya di segala aspek. Di bidang politik luar negeri, pemulihan hubungan dengan Malaysia dilakukan dan Indonesia aktif kembali di PBB terhitung sejak 28 September 1966.

Setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan (Kartasmita, dkk., 1995). Tugas pokok kabinet ini

sebagaimana dalam Ketetapan MPRS No XLI/MPRS/1968 disebut sebagai *Pancakrida*. Rinciannya adalah sebagai berikut.

- a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum;
- b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun;
- c. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971;
- d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat rendah.

Dalam kabinet yang pertama ini, Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi. Reformasi dilakukan dengan menyederhanakan dan penggabungan departemen. Pada masa itu, hanya terdapat 5 menteri negara dan 18 menteri/pimpinan departemen yang duduk di dalam kabinet.

Sebagai tindak lanjut *Pancakrida*, pada 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Lembaga ini bertugas (1) memulihkan keamanan dan ketertiban dalam hubungan dengan sebab akibat pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan-kegiatan eksterm dan subversi lainnya; dan (2) mengamankan kewibawaan pemerintah dan alat-alatnya dari pusat sampai dengan daerah, untuk menjamin kelangsungan hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini benih-benih kekuasaan militer semakin mengemuka dan menjadi pendukung utama Orde Baru (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010).

Karakteristik Orde Baru

Menurut Prof. Dwight Y King, pakar politik dari Amerika, pemerintahan Orde Baru memiliki karakteristik *bureaucratic authoritarian*. Ciri-cirinya adalah: (1) kewenangan tertinggi di tangan militer, (2) adanya mentalitas teknokratik yang merata, (3) adanya proses untuk menciptakan massa mengambang, menciptakan konsensus dan konformitas, (4) upaya untuk mencapai tujuan melalui represi. Pada awal Orde Baru, militer memainkan lebih banyak peran dalam aspek politik

dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dalam perkembangannya militer memegang posisi penting dalam kabinet, elite birokrasi dan memiliki alokasi 20% yang duduk sebagai anggota legislatif.

Lekatnya militer dalam pemerintahan Orde Baru disebabkan konsep Dwi Fungsi yang ada di dalam militer Indonesia. Militer tidak hanya berperan dalam masalah ketahanan negara, tetapi juga dalam masalah sosial dan politik masyarakat. Selain itu, militer menjadi penopang utama kekuasaan Orde Baru, seperti mulai 1980 ada program ABRI Masuk Desa, serta adanya pengaruh yang kuat dari militer dari tingkat provinsi (Kodam [Komando Daerah Militer]) sampai tingkat desa (Babinsa [Bintara Pembina Desa]). Di tahun 1977-1980, jumlah anggota militer yang menduduki jabatan di pusat pemerintahan adalah 53,5%. Sementara itu, yang menduduki jabatan gubernur adalah 70,3%, sebagai bupati 56,6%, dan 33,3% sebagai walikota madya. Di dalam DPR terdapat pula fraksi ABRI yang berasal dari kalangan militer yang diangkat (Notosusanto [ed], 1985; Widiarto, Syafaat dan Suryokumoro, 2007).

Pada masa Orde Baru, berdasarkan Tap MPR No. VIII/MPR/1973 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa susunan keanggotaan DPR dan DPRD terdiri atas Golongan Politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. Sedangkan susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR ditambah Utusan Daerah, Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. Dalam MPR Fraksi ABRI memiliki hak veto apabila suatu keputusan politis dianggap membahayakan keselamatan negara (Widiarto, Syafaat dan Suryokumoro, 2007).

Selanjutnya, Orde Baru menekankan sendi penopang pada para teknokrat. Teknokrat terdiri atas para cendekiawan yang bekerja untuk pemerintah dan menekankan pentingnya pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat sekumpulan teknokrat populer yang disebut “Mafia Berkeley”. Mereka adalah para sarjana lulusan Universitas California di Berkeley, seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Mohamad Sadli, dan Barli Halim yang sangat terpengaruh oleh *International Monetary Fund*. Kuatnya pengaruh teknokrat sebagai penopang Orde Baru telah membentuk karakteristik pemerintahan Soeharto ke arah developmentalisme.

Di bidang ideologi, Pancasila tampak semakin diperkuat. Hal ini dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap tata urutan Pancasila melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968. Tata urutan Pancasila menjadi seperti yang kita kenal saat ini, yakni (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya memperkuat Pancasila dilakukan lagi dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa) atau yang sering dikenal dengan P4. Puncaknya adalah dengan dijadikannya Pancasila sebagai Azas Tunggal setelah berlangsungnya Sidang Umum MPR tahun 1983 dengan adanya Tap MPR No.II/1983 (Santoso, 1993).

Dalam bidang pemerintahan, tercipta pola patronase di kalangan elite. Hal ini tampak dari pengangkatan pejabat-pejabat pusat yang cenderung berasal dari lingkungan terdekat Soeharto. Akibatnya, posisi Presiden amatlah sentral karena melahirkan pola loyalitas patron-client yang berpusat pada Soeharto.

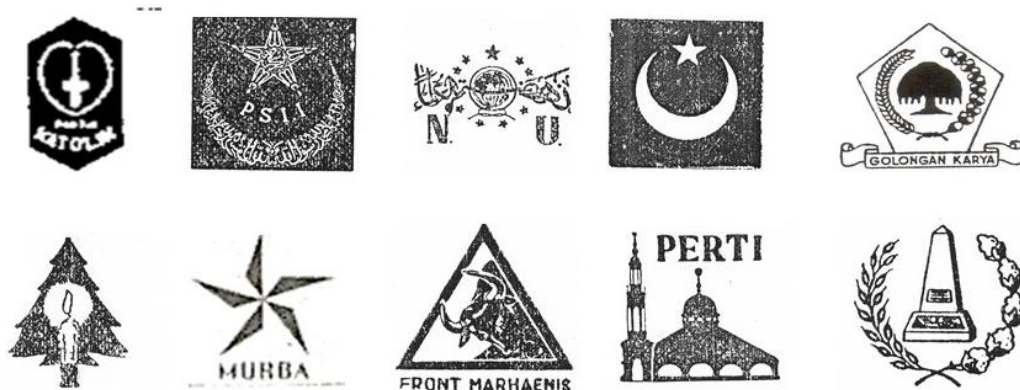
Hal lain yang menjadi fenomena menarik dalam pemerintahan Orde Baru adalah sentralisasi yang kuat dan ambivalensi hubungan pusat-daerah (Santoso, 1993). Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, diuraikan bahwa struktur pemerintah daerah dan desa untuk memperkuat kedudukan pemerintah. Dalam UU Nomor 5 tahun 1974 azas desentralisasi dan pembinaan otonomi kepada daerah dilaksanakan bersama-sama dengan azas dekonsentrasi. Sentralisasi banyak dilakukan saat itu karena banyak daerah yang belum cukup mampu membiayai pembangunan. Akibatnya, sebagian biaya pembangunan diberikan melalui subsidi pemerintah yang mengakibatkan arah kebijakan lebih banyak ditentukan oleh pusat. dampak sentralisasi adalah terwujudnya pembangunan yang lebih efisien, walaupun memunculkan kecenderungan lebih bersifat birokratis.

Pemerintahan Orde Baru telah berhasil menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Pada 14 Juli sampai 4 Agustus 1969 berhasil diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pepera dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten tentang tata cara penyelenggaraan Pepera. Kedua, pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang terdiri atas 1.026 anggota dari

delapan kabupaten. Puncaknya adalah pelaksanaan Pepera. Hasil pepera kemudian dibawa dalam Sidang Umum PBB ke 24 pada November 1969. Pada 19 November 1969, PBB menyetujui dan menerima hasil-hasil Pepera. Selain itu, untuk masalah kewilayahan, pemerintah berhasil mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan provinsi/ daerah tingkat I Timor Timur. Peraturan ini ditandatangani pada 17 Juli 1976 (Kartasasmita, dkk., 1995; Ricklefs, 2008).

Dinamika Partai Politik dan Pemilihan Umum

Sepanjang periode Orde Baru, berhasil disenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali. Pemilihan umum pertama dilakukan pada 1971. Selanjutnya pemilihan dilakukan secara rutin setiap lima tahun semenjak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilihan umum pertama tahun 1971, peserta sejumlah 10 partai politik/organisasi. Peserta ini merupakan yang terbanyak selama Orde Baru.



Gambar 4. Partai Politik dan Organisasi Peserta Pemilu 1971

Pemungutan suara dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Pada pemilu ini, partai-partai politik mendapat 124 kursi di DPR dan Golongan Karya mendapat 261 kursi. Sementara itu, ABRI mendapat 75 kursi.

Tabel 1. Perolehan Suara pada Pemilu 1971

No	Peserta	Jumlah Suara	%
1	Partai Katolik	603.740	1,10
2	Partai Sjarikat Islam Indonesia	1.308.237	2,39
3	Partai Nahdlatul Ulama	10.213.650	18,67
4	Partai Muslimin Indonesia	2.930.746	5,36
5	Golongan Karya	34.348.673	62,80
6	Partai Kristen Indonesia	733.359	1,34
7	Partai Murba	48.126	0,09
8	Partai Nasional Indonesia	3.793.266	6,93
9	Partai Persatuan Tarbiah Indonesia	381.309	0,70
10	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	338.403	0,62
	Jumlah	54.699.509	

Sumber: Diolah dari *Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1971*, 1971.

Pada pemilu kali ini untuk pertama kalinya Golongan Karya berpartisipasi dan secara luar biasa berhasil keluar sebagai pemenang. Keluarnya Golongan Karya sebagai pemenang Pemilu disebabkan larangan bagi pegawai negeri untuk bergabung dalam partai politik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1969. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1970 dan Kepres Nomor 82 tahun 1971 yang melarang seluruh pegawai negeri termasuk ABRI terlibat dalam kegiatan partai, dan menuntut loyalitas tunggal terhadap pemerintah (Santoso, 1993). Dengan demikian, suara pegawai negeri tertampung di dalam Golongan Karya (Golkar) sebagai organisasi non-partai politik. Kondisi ini terus terjadi hingga pemilu 1997.

Pada pemilihan umum selanjutnya, hanya terdapat dua partai politik dan satu golongan karya. Hal ini merupakan hasil dari penyederhanaan partai politik yang telah digagas sejak pertemuan antara predisen dengan partai politik pada 27 Februari 1970. Gagasan penyederhanaan ditindaklanjuti dengan terbentuknya kelompok nasionalis pada 4 Maret 1970 dan kelompok spirituil pada 14 Maret 1970. Kelompok Nasionalis terdiri atas PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik. Kelompok ini kemudian dinamakan kelompok demokrasi pembangunan. Sementara itu kelompok spirituil terdiri atas NU, Parmusi, PSII, dan Perti yang menamakan diri kelompok persatuan.

Pada 1973 ke dua kelompok bermetamorfosis menjadi partai politik. Pada 10 Januari 1973 kelompok demokrasi pembangunan menjadi Partai Demokrasi

Indonesia (PDI). Kemudian, pada 13 Februari 1973, kelompok persatuan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah penyederhanaan itu, keluarlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Di dalam UU itu disebutkan bahwa kepengurusan partai politik dan Golkar hanya sampai pada Daerah Tingkat II atau hanya pada level kabupaten dan kotamadya. Hal ini berdampak munculnya massa mengambang (*floating mass*) di kalangan pedesaan (Santoso, 1993).

Masyarakat desa diajak untuk apolitik dan tidak terikat secara ketat pada organisai-organisasi politik. Akibatnya, aspirasi politik mereka ditampung melalui organisasi profesi fungsional. Dalam konteks ini, Golkarlah yang kemudian mengambil peran karena lebih leluasa bergerak melalui Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa). Inilah yang membedakan Golkar dengan partai politik lain. Pembatasan gerak partai bertujuan untuk memudahkan tercapainya stabilitas politik yang menjadi prasyarat pembangunan pada masa Orde Baru (Santoso, 1993).

Hasil dari desain perpolitikan ini telah menjadikan Golkar selalu unggul dalam pemilihan umum sejak 1977-1997. Perolehan Suara untuk masing-masing partai politik dan Golongan Karya sejak 1977-1977 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Perolehan Suara pada Pemilu Orde Baru (%)

Tahun	PPP	Golkar	PDI
1977	29,3 %	62,1 %	8,6 %
1982	28,0 %	64,2 %	7,9 %
1987	16,0 %	73,2 %	10,9 %
1992	17,0 %	68,1 %	14,9 %
1997	22,4 %	74,5 %	2,6 %

Sumber : Jamie Mackie and Andrew MacIntyre, 1994: 12; Marwati Djoned Poesponegoro & Nugroho Notosusanto &, 2010.

C. Kehidupan sosial dan ekonomi pada masa Orde Baru

Di awal masa Orde Baru, pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal ekonomi. Hal ini tidak lain karena pada periode sebelumnya, kondisi ekonomi Indonesia ditandai dengan merosotnya pendapatan (PDB) perkepala, meningkatnya inflasi, surutnya penanaman modal, dan berlanjutnya *structural regression*. Permasalahan ini disebabkan hilangnya kendali fiskal dan pengeluaran yang sangat besar karena upaya penumpasan berbagai upaya pemberontakan, proyek mercusuar, serta masalah konfrontasi. Hal ini berdampak dengan terkurasnya cadangan devisa.

Di tahun 1965, inflasi mencapai 284%, sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar meningkat tajam. Pada tahun 1960 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah 45. Sementara itu, di tahun 1965 melonjak menjadi 10.000. Cadangan emas sebagai persentase uang beredar menurun drastis. Di tahun 1960 sejumlah 34,6%. Sementara itu pada 1965 menjadi hanya 0,02%. Hal yang paling parah adalah neraca pembayaran mengalami defisit sebesar -157 juta dolar. Di masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami defisit anggaran yang membengkak dari Rp 6,9 milyar tahun 1960 menjadi sekitar Rp 1,6 trilyun pada 1965. Jumlah uang beredar melonjak drastis dari Rp 47,8 milyar tahun 1960 menjadi sekitar Rp 3 trilyun di tahun 1965. (Muhaimin, 1991; Soesastro, dkk. [ed], 2005; van Zanden dan Marks, 2012).

Di awal pemerintahan Soeharto, kondisi perekonomian semakin memburuk. Ia mendapatkan warisan utang luar negeri sejumlah 2,4 milyar dolar dan laju inflasi mencapai 20-30% sebulan. Kondisi ekonomi yang parah ini telah mendorong pemikir ekonomi dari Universitas Indonesia menyelenggarakan simposium pada 6-9 Mei 1966. Hasil simposium merekomendasikan beberapa prinsip sebagai berikut.

- (1) Azas keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, ekspor dan impor, arus barang dan arus uang, kesempatan bekerja dan penambahan penduduk; (2) azas efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi; (3) azas keadilan dalam pembagian beban dan pembaggian rezeki; dan (4) azas perlunya investasi bagi penumbuhan ekonomi. (Soesastro, dkk. [ed], 2005)

Permasalahan ini kemudian bermuara kepada pergeseran sistem perekonomian. Perubahan tersebut adalah terdapatnya pergeseran corak perekonomian yang semula tertutup dan bersifat nasionalis menjadi perekonomian terbuka terhadap masuknya modal asing dan pinjaman luar negeri. Liberalisasi dalam bidang ekonomi ini dilatarbelakangi keinginan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat dalam rangka pemulihan makroekonomi.

Pada masa kabinet Ampera, Presidium menetapkan serangkaian kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan pada 3 Oktober 1966. Permasalahan yang melatarbelakangi adalah rendahnya daya beli masyarakat karena inflasi yang tinggi. Kebijakan di bidang ekonomi adalah memperbaiki peri kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang pangan. Di bidang keuangan/moneter kebijakan terfokus penekanan inflasi dan peningkatan nilai rupiah. Sasaran dari program ekonomi dan keuangan tersebut adalah (1) pengendalian inflasi, (2) pencukupan kebutuhan pangan dan

sandang, (3) rehabilitasi prasarana ekonomi, dan (4) peningkatan ekspor (Kartaasasmita, 1995). Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut.

- a. Penyesuaian pengeluaran negara dengan pendapatan negara, sehingga terdapat kesimbangan antara pengeluaran dan penerimaan (*balanced budget*);
- b. Pendunduan pembayaran hutng-hutang dari luar negeri dan di lain pihak berusaha mendapatkan kredit baru;
- c. Pengenduran pengaturan dan penguasaan Pemerintah atas kegiatan perdagangan, terutama dalam masalah harga, tarif, dan subsidi;
- d. Perbaikan kembali alat-alat prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; dan
- e. Penyederhanaan dan penertiban aparatur pemerintah.

Langkah-langkah ini kemudian dikuatkan dengan kebijakan lain seperti Peraturan 10 Februari 1967 tentang penyesuaian harga dan tarif dan Peraturan 28 Juli 1967 tentang pembagian bonus ekspor.

Kebutuhan modal yang akan digunakan untuk pembenahan ekonomi secara cepat dilakukan dengan membuka kran bagi investasi asing. Hal ini dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang disahkan pada 10 Januari 1967. Untuk melaksanakannya, dibentuklah Badan Pertimbangan Pnanaman Modal Asing yang dipimpin oleh Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet pada 19 Januari 1967. Selanjutnya badan tersebut digantikan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal. Panitia bertugas untuk menilai kelayakan, memberi pertimbangan, dan melakukan langkah teknis untuk meningkatkan pelaksanaan penanaman modal. Selain membuka kesempatan masuknya modal asing pada 13 Juli 1968 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Dengan peraturan ini diharapkan agar modal swasta nasional dapat diikutsertakan, dibina, dan dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden dan membentuk Kabinet Pembangunan, pada 15 Juni 1968 dibentuk tim ahli ekonomi presiden. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomo 195 tahun 1968, delapan orang ahli ekonomi bertugas untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan mengajukan pertimbangan-pertimbangan mengenai masalah ekonomi kepada presiden.

Kebijakan awal yang diterapkan oleh Orde Baru mulai menampakkan hasilnya. Laju inflasi yang meroket hingga sekitar 650% dalam tahun-tahun 1965-1966 berhasil ditekan menjadi 112% pada 1967. Secara berangsur inflasi menurun pada 1968 menjadi 85% dan di tahun 1969 menjadi 10%. Selain itu defisit anggaran dapat dikendalikan, jika di tahun 1966 defisit terhadap total mencapai 124%, pada tahun berikutnya hanya 3%. Sementara itu pada 1968-1969 mencapai 0%. Selain itu, dalam perundingan Tokyo (19-20 September 1966) yang kemudian dilanjutkan di Paris (24 April 1970), utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ditunda pembayarannya hingga tahun 1972-1978. Selain itu disepakati pula bahwa utang yang harus dibayar dalam tahun 1969 dan 1970 dipertimbangkan untuk ditunda pemabyarannya dengan syarat yang sama lunaknya dengan utang yang seharusnya dibayarkan dalam tahun 1968. Dalam pertemuan Paris bahkan menyepakati bahwa pembayaran pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970-1999. Kemudian pembayaran bunga pinjaman dilakukan dalam 15 angsuran tahunan mulai tahun 1985. (Muhaimin, 1991; Soesastro, dkk. [ed], 2005; van Zanden dan Marks, 2012).

Setelah perundingan Tokyo, dilakukan kembali perundingan di antara beberapa negara maju pada 23-24 Februari 1967 di Amsterdam. Tertemuan ini diikuti oleh negara-negara kreditor seperti Jepang, Perancis, Inggris, Italia, Jerman Barat, Belanda, dan Amerika Serikat. Petermuan ini kemudian memunculkan konsorsium bernama *Inter-Governmental Group for Indonesia* (IGGI) yang memungkinkan Indonesia memperoleh kredit dengan syarat yang lunak. Dari sini, Indonesia berhasil memperoleh pinjaman \$210 juta (1967), \$325 juta (1968), dan \$500 juta (1969). Selain itu, pemerintah juga menjadi anggota badan-badan ekomomi internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Funds* (IMF), *International Development Agency* (IDA), dan *Asian Development Bank* (ADB). Dari lembaga ini Indonesia mendapat bantuan kredit, tenaga ahli, dan rekomendasi untuk menghadapi negara kreditor. (Muhaimin, 1991; Soesastro, dkk. [ed], 2005; van Zanden dan Marks, 2012).

Bantuan luar negeri yang diberikan pada awal Orde Baru memiliki arti penting terhadap pemulihan ekonomi negara. Pertama, sebagian besar bantuan diberikan dalam bentuk bantuan program, sehingga dapat digunakan relatif bebas untuk membiayai impor yang dibutuhkan dan pembentukan dana lokal dari devisa pinjaman

itu. Kedua, antuan dalam bentuk komoditi pangan sangat berarti dalam stabilisasi harga melalui injeksi bahan pangan impor ke pasar.

Keberhasilan yang telah diterapkan di awal Orde Baru telah mendorong diterapkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama. Terhitung sejak 1 April 1969 program dilaksanakan. Repelita I bertujuan untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan sekaligus melatakan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional pada tahap selanjutnya. Sasaran dalam Repelita I mencakup aspek (1) pangan, (2) sandang, (3) perbaikan prasarana, (4) perumahan rakyat, (5) kepuasan tenaga kerja, dan (6) kesejahteraan rohani. Pada Repelita I, sektor pertanian dijadikan titik pusat pembangunan melaluji usaha peningkatan produksi pangan, terutama beras dan semua keiatan lainnya yang menunjang. Pada Repelita I, pertumbuhan ekonomi sangat pesat mencapai 9,4% per tahun. Jumlah ini jauh di atas target yang hanya mematok angka 5%. Pertumbuhan ini terutama terjadi pada sektor pertanian karena meningkatnya kegiatan di bidang kehutanan (21,4% per tahun) dan ekspor kayu gelondongan. Selain itu tingkat produksi barang dan pertambangan juga meningkat. Pesatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh cepatnya arus masuk modal asing dan peningkatan partisipasi modal swasta dalam negeri. (Muhaimin, 1991)

Capaian pada Repelita I yang dianggap sebagai keajaiban ekonomi makin menguatkan dilaksanakannya Repelita II mulai 1 April 1974-31 Maret 1979. Titik fokus pada Repelita II tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya. Hanya saja muncul perdebatan tentang ketimpangan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian, pembangunan Jawa dan luar Jawa, serta antara penguasa pribumi dan Cina. Hal ini kemudian memuncak dengan peristiwa 15 Januari 1974 yang memicu ketengangan politik dalam negeri. Dari sini kemudian muncul konsep tentang pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, dalam Repelita II terdapat program-program yang ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, mencapai distribusi penghasilan yang lebih merata, memperbaiki struktur pasar, meningkatkan pembangunan daerah, meningkatkan transmigrasi, memungkinkan partisipasi massa yang lebih besar dalam pembangunan, dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada pendidikan dan berbagai segi non-ekonomis lainnya. Dalam Repelita II, hasil yang dicapai masih cukup mengesankan. Sejak 1974-1978, rerata pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2% per tahun. Beberapa faktor yang memungkinkan keberhasilan ekonomi pada Repelita

II adalah (1) “boom” minyak bumi dan ekspor kayu gelondongan; (2) terus mengalirnya bantuan dan modal swasta dalam negeri; dan (3) semakin stabilnya perekonomian dan sistem politik yang makin terpusat. Dalam pelita II, 74% peneluaran dapat dibiayai dari pendapatan dalam negeri, sehingga tidak lagi hanya mengandalkan pinjaman asing. (Muhaimin, 1991; Soesastro, dkk. [ed], 2005; van Zanden dan Marks, 2012).

Terjadinya *boom* atau meningkatnya harga minyak dunia pada tahun 1970-dan awal tahun 1980-an sangat menguntungkan Indonesia. Ini karena 74% nilai ekspor Indonesia berasal dari minyak. Peningkatan harga minyak pertama-tama terjadi pada 1973/1974 karena embargo negara-negara Arab terhadap negara-negara Barat akibat mendukung Israel. Kemudian terjadinya revolusi Iran di akhir 1978 turut menaikkan harga minyak. Harga minyak Indonesia meningkat dari US\$ 1,67 per barrel pada tahun 1970 sampai US\$ 35 per barrel pada tahun 1981. Akibat *boom* minyak yang pertama, pembangunan sarana fisik menjadi dimungkinkan. Pada fase *boom* minyak kedua, dimungkinkan pembangunan sekolah secara massif di berbagai penjuru. Akibat fenomena ini lebih dari 100 ribu sekolah dibangun, terutama di daerah pedalaman dan lebih dari 500 ribu guru dipekerjakan. Penghasilan akibat *boom* minyak juga membuka peluang untuk membiayai sistem subsidi untuk beberapa kegiatan di sektor pertanian dan industri yang selama ini kurang efisien. (Wie, 2012)

Pembangunan yang pesat sepanjang periode Repelita I dan II ternyata masih memunculkan masalah. Masalah tersebut adalah ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu pada Repelita III (1 April 1979-31 Maret 1984), mulai dikembangkan prinsip Trilogi Pembangunan. Urutan dalam trilogi pembangunan dalam Repelita III adalah (1) Pemerataan hasil-hasil pembangunan; (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan (3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam Repelita III dikeluarkan pula konsep tentang “delapan jalur pemerataan” meliputi:

- a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- c. Pemerataan pembagian pendapatan;
- d. Pemerataan kesempatan kerja;
- e. Pemerataan kesempatan berusaha;

- f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan;
- g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air;
- h. Pemerataan memperoleh keadilan.

Namun demikian, tampaknya capaian yang diraih pada periode ini tidak setinggi pada periode sebelumnya. Perkembangan perekonomian Indonesia pada periode 1982-1987 ditandai dengan melemahnya harga minyak dunia pada 1982 dan 1986 yang berakibat pada memburuknya kinerja perekonomian Indonesia. Penurunan harga minyak disebabkan melemahnya pasar minyak akibat resesi di negara-negara industri maju. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang menurun 2,3% pada 1982. Hal ini kemudian disiasati dengan sejumlah kebijakan dari sisi makroekonomi antara lain penundaan sejumlah proyek besar, reformasi perpajakan, devaluasi rupiah, deregulasi perbankan, dan deregulasi perdagangan. Oleh karena itu, fokus dari Repelita IV terutama adalah peningkatan ekonomi dengan pengurangan ketergantungan atas sektor migas. Di satu sisi, Indonesia masih mendapatkan kredit dari beberapa negara, terutama Jepang yang akhirnya mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi rata-rata 5% pada 1988. Secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada pelita IV adalah 5,2%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada Pelita V (1989-1993) mengalami peningkatan sejumlah 6,7% dengan tingkat inflasi 8,3% (Soesastro, dkk [ed], 2005).

Di awal tahun 1980-an sektor pendidikan mendapatkan perhatian yang baik. Pada 1984 97% dari anak berusia 7-12 tahun tengah mengenyam bangku pendidikan. Hal ini meningkat tajam dari tahun 1973 yang hanya 57%. Selain itu, angka melek huruf senantiasa meningkat. Sensus penduduk 1980 melaporkan terdapat peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf. 80,4% laki-laki dan 63,6% perempuan di atas 10 tahun telah melek huruf. Kondisi ini meningkat pada tahun 1990, di mana untuk laki-laki adalah 89,6% dan perempuan 78,7% (Soesastro, dkk [ed], 2005).

Di akhir tahun 1980-an kondisi perekonomian Indonesia mulai bermasalah, ketika pada 1985 terjadi perubahan dalam kurs berbagai mata uang asing. Saat itu terjadi devaluasi tajam dari dollar AS terhadap yen Jepang dan mark Jerman. Akibatnya, Indonesia harus banyak mengeluarkan dollar AS untuk melunasi utang

luar negeri yang sebagian besar (40%) dinyatakan dalam yen. Selain itu, jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman yang disepakati pada 1970 makin memberatkan kondisi keuangan Indonesia. Selain itu, anak-anak dan kerabat dari Soeharto menjalankan perusahaan pengumpul uang berskala besar. Perusahaan milik Tommy Soeharto pada 1992 mengumpulkan pendapatan lebih dari 500 juta dollar AS. Sementara itu, 70% kegiatan ekonomi swasta berada di tangan keturunan Tionghoa pada tahun 1990-an. (Ricklefs, 2008)

Berbagai kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi yang dilaksanakan sejak 1983 sampai dengan pertengahan tahun 1990 telah menyebabkan “boom” ekonomi, yang kemudian menimbulkan banyak permasalahan baru seperti meningkatnya utang luar negeri, lemahnya pengawasan perbankan, korupsi kolusi dan nepotisme (Soesastro, dkk [ed], 2005). Inilah yang kemudian membawa Indonesia memasuki gerbang krisis di tahun 1997/1998.

Pada Repelita VI, pemerintah terfokus pada pengembangan industri. Selain itu, program yang juga diprioritaskan adalah peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian yang didukung oleh industri pertanian. Sejak 1994-1996, laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Akan tetapi, pada periode ini, ternyata Indonesia menjadi negara pengutang terbesar ketiga di dunia. Jumlah pinjaman swasta telah menjadi substansial. Kemudian kapitalisasi BEJ (Bursa Efek Jakarta) melebihi aset sektor perbankan. Sementara itu, modal asing mengalir masuk dalam volume terbesar sepanjang sejarah. (Bhakti, dkk, 1999)

D. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru.

Meskipun kerap dilanda permasalahan, sebenarnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 1997 masih stabil. Sejak 1990 sampai 1996, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 7% dengan tingkat inflasi di bawah dua digit. Permasalahan mulai muncul pada pertengahan tahun 1997. Saat itu, terjadi krisis moneter di Thailand karena devaluasi baht terhadap dollar Amerika Serikat. Hal tersebut kemudian menjalar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Akibat keputusan pengalihan dana BUMN dari bank komersial ke SBI dan menaikkan tingkat suku bunga SBI, pasar merespon secara negatif. Hal ini berdampak pada

pembelian kurs dollar AS. Akibatnya rupiah terus merosot dan tidak stabil sampai akhir 1997. (Zon, 2004)

Rupiah yang selama ini berada dalam kisaran Rp 2.500/ US\$, kemudian merosot tajam pada bulan Juli 1997. Pada bulan Agustus, nilai mata uang rupiah sudah menurun 9%. Bank Indonesia mengakui bahwa ia tidak bisa membendung rupiah yang terus merosot. Pada akhir Oktober, nilai tukar rupiah menjadi Rp 4.000/US\$. Dari sini rupiah semakin terpuruk. Pada bulan Januari 1998, rupiah tenggelam hingga level sekitar Rp 17.000/US\$, atau kehilangan 85% nilainya. Menguatnya nilai dollar AS berdampak buruk terhadap neraca pembayaran karena utang luar negeri semakin membengkak karena dalam bentuk dollar AS. Bursa saham Jakarta hancur. Hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut, tabungan kelas menengah lenyap, dan jutaan pekerja diberhentikan dari pekerjaan mereka. Dalam mengatasi masalah itu, Soeharto mengambil langkah dengan menandatangani perjanjian pemberian utang dengan IMF (*International Monetary Fund*). (Zon, 2004)

Ada beberapa faktor yang turut memperparah krisis yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi (1) besar dan meningkatnya modal swasta, yang kebanyakan bersifat jangka pendek dan tidak dilindungi; (2) pertambahan yang cepat dan volatilitas (kerentanan) arus masuk modal swasta; (3) kelemahan manajemen makroekonomi dengan dijalankannya kebijakan nilai tukar mata uang yang tetap atau semi tetap, sementara terjadi arus modal bergerak yang besar. Di satu sisi krisis di Thailand telah menyebabkan kepanikan akibat perubahan besar dalam sentimen. Pelepasan rupiah besar-besaran telah menyebabkan kepanikan berlipat dalam arus modal (Van Zanden dan Marks, 2012).

Di satu sisi, hasil Pemilihan Umum 1997 menetapkan Golkar sebagai pemenang dengan 74,5% suara. Hal ini mendorong dicalonkannya kembali Soeharto yang telah berusia 76 tahun menjadi presiden. Pada 11 Maret 1998 secara aklamasi Soeharto kembali terpilih didampingi oleh B.J. Habibie. Tak lama berselang pada 14 Maret 1998, dibentuklah kabinet yang di dalamnya terdapat beberapa kerabat dekat Soeharto. Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden ditambah dengan kondisi ekonomi yang kian parah telah mendorong munculnya kekuatan oposisi yang telah sekian lama dibatasi gerakannya. (Ricklefs, 2008).

Pada tahun 1990-an berbagai kelompok oposisi mulai bermunculan. Abdurrahman Wahid, pemimpin Nahdlatul Ulama tampil sebagai sosok yang memperjuangkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta pluralisme. Hal yang tidak kalah menarik adalah perpecahan dalam tubuh PDI yang akhirnya mencuatkan nama Megawati Soekarnoputri yang kelak menjadi presiden RI. Akibat perpecahan dalam PDI pada pemilihan 1997, suara PDI anjlok di bawah 3%. Selain itu kelompok-kelompok intelektual dan aktivis mulai bergeliat. Salah satunya adalah Amien Rais yang berinisiatif untuk mengoordinasi beberapa demonstrasi antipemerintah pada Mei 1998.

Merespon masalah ini, berbagai demonstrasi digelar sejak awal 1998. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa menuntut agar segera dilakukan reformasi politik. Akan tetapi, karena merasa tidak mendapat tanggapan, aksi demonstrasi meluas ke luar kampus. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998 setelah pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Pada 4 Mei 1998, harga BBM naik di atas 71% (Zon, 2004; van Zanden dan Marks, 2012; Ricklefs, 2008; Simanjuntak, 2003)

Pada mulanya mahasiswa merencanakan momentum hari kebangkitan nasional pada 20 Mei 1998 sebagai hari reformasi nasional. Akan tetapi, bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa terjadi lebih cepat. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta, telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. Demonstrasi tersebut menuntut dilaksanakannya agenda reformasi sebagai berikut.

- a. Adili Soeharto dan kroni-kroninya,
- b. Laksanakan amandemen UUD 1945,
- c. Hapuskan Dwi Fungsi ABRI,
- d. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya,
- e. Tegakkan supremasi hukum,
- f. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Penembakan terhadap mahasiswa memicu terjadinya demonstrasi yang lebih besar dan tersebar ke beberapa kota di luar Jakarta seperti Solo. Bahkan kerusuhan tidak dapat dielakkan pada 13-14 Mei 1998. M.C. Ricklefs menggambarkan bahwa kerusuhan Mei 1998 merupakan kerusuhan perkotaan terburuk sepanjang sejarah Indonesia, dengan 40 pusat perbelanjaan, ribuan toko, rumah, dan tempat usaha serta kendaraan dihancurkan. Di tengah kondisi ini, Soeharto justru menghadiri kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi G-15 di Mesir pada 9 Mei 1998. Akan tetapi, karena situasi kian memanas Soeharto kembali ke Indonesia pada 15 Mei 1998.

Kerusuhan ini sampai menelan ratusan korban di berbagai kota. Puncaknya pada 17-18 Mei 1998, Gedung DPR/MPR berhasil diduduki oleh mahasiswa. Sebagai reaksi atas aksi tersebut Harmoko selaku pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri’. Setelah peristiwa itu, Soeharto mulai ditinggal para pembantunya. 14 menteri yang dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita menyatakan diri tidak bersedia menjabat dalam kabinet baru serta mendesak presiden untuk mundur.

Merespon hal-hal tersebut, pada 20 Mei 1998, Presiden Soeharto bertemu dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meminta pertimbangan dalam rangka pembentukan Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto sendiri. Akan tetapi, Dewan Reformasi urung dibentuk dan akhirnya Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 dan menyerahkan kepemimpinan ke B.J. Habibie.



Gambar 5. Infografik Peristiwa Menjelang Kejatuhan Soeharto
Sumber: beritagar.id

E. Rangkuman

Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan modul tentang sejarah Indonesia masa Orde Baru. Dengan demikian, Anda sebagai guru sejarah telah mampu menganalisis perkembangan sejarah Orde Baru untuk diajarkan kepada peserta didik. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dalam modul ini adalah sebagai berikut.

~ Tsabit Azinar Ahmad ~

Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan

© Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

1. Orde Baru muncul dengan diawali berbagai kekacauan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi akibat penculikan jenderal pada 1 Oktober 1965. Kondisi ini telah mendorong munculnya Soeharto untuk mengatasi kondisi dan kemudian menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Sebagai pengemban Supersemar, Soeharto menjadi sosok yang kemudian menerima mandat kekuasaan dan menggantikan kepemimpinan Sukarno.
2. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto senantiasa mengutamakan stabilitas politik. Hal ini menjadi prasyarat terjadinya pembangunan secara lebih tertata. Akan tetapi stabilitas tersebut dilakukan secara berlebihan, sehingga lebih mengarah kepada represi dan mengakibatkan partisipasi semu di kalangan masyarakat di bidang politik.
3. Pembangunan menjadi ciri khas dari pemerintahan Soeharto. Dalam pemerintahannya, ia telah berhasil memulihkan kondisi yang parah di masa akhir Demokrasi Terpimpin. Pertumbuhan ekonomi sangat stabil hingga pertengahan tahun 1990-an. Akan tetapi, terjadinya krisis dan permasalahan KKN telah menjadi awal kehancuran perekonomian Indonesia.
4. Respon pemerintah yang tidak menghiraukan aspirasi masyarakat telah memicu munculnya protes secara besar-besaran pada Mei 1998. Protes ini juga yang telah menyulut terjadinya kerusuhan di berbagai kota. Peristiwa-peristiwa ini pada akhirnya telah memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Secara keseluruhan, perkembangan Orde baru dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3. Tahapan penting perkembangan Politik dan Ekonomi Orde Baru

Tahapan	Aspek penting
Pembentukan dan konsolidasi (1966-1969)	<ul style="list-style-type: none"> - Munculnya Surat Perintah Sebelas Maret - Penghancuran PKI - Dibentuknya Kopkamtib - Munculnya UUPMA (1967) dan UUPMD (1968) - Masuknya Irian Barat menjadi bagian Indonesia melalui Pepera.
Pemulihan dan pembenahan struktur (1969-1977)	<ul style="list-style-type: none"> - Menguatnya peran militer di segala bidang - Penyederhanaan struktur partai politik - Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam Pelita I (9,4%) - Mulainya “Oil bombing” sejak 1973/1974

Tahapan	Aspek penting
Kejayaan dan kemakmuran (1977-1987)	<ul style="list-style-type: none"> - Munculnya “Oil bombing” dan keuntungan penjualan minyak yang meningkat. - Indonesia swasembada beras - Menguatnya peran militer di bidang ekonomi. - Pancasila sebagai azas tunggal - Munculnya P4 dan penataran-penataran ideologi.
Kejenuhan dan kesurutan (1987-1997)	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya efek “Oil Bombing” akibat penurunan harga minyak pada 1982 dan 1986. - Jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman sejak 1985. - Munculnya anak-anak Soeharto dalam bisnis Orde Baru - “Perpecahan” di dalam tubuh AD tentang penolakan terhadap Sudharmono - Soeharto Mendekat dengan kubu Islam - Munculnya oposisi dari kelompok Islam, partai politik, intelektual, dan aktivis.
Kejatuhan (1997-1998)	<ul style="list-style-type: none"> - Krisis Ekonomi - Ketidakpuasan golongan intelektual - Kerusuhan Mei 1998

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, Ikrar Nusa dkk. 1999. *Tentara yang Gelisah Hasil Penelitian Yipika tentang Posisi ABRI dalam Gerakan Reformasi*. Jakarta: Peerbit Mizan.
- Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1971*. 1971. Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum.
- Kartasasmita, Ginandjar dkk. 1995. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mackie, Jamie and Andrew MacIntyre. 1994. "Politics". in Hal Hill (ed). *Indonesia's New Order, The Dynamics of Socio-Economic Transformation*. NSW, Australia: Allen & Unwin.
- Muhaimin, Yahya A. 1991. *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES.
- Notosusanto, Nugroho (ed). 1985. *Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan Impelementasi Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Penerbit PT Pustaka Sinar harapan.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto (ed). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Terjemahan. Jakarta: Serambi.
- Santoso, Priyo Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, P.N.H. 2003. *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.
- Soesastro, Hadi dkk. (ed). 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jilid II-IV. Yogyakarta: Kanisius dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Van Zanden, Jan Luiten dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Kompas dan KITLV.
- Widiarto, Aan Eko, M. Ali Syafaat, Herman Suryokumoro. 2007. *Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: In-Trans Publishing.
- Wie, Thee Kian. 2012. "Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan dan Pemerataan. Dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (ed). *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jilid VIII: Orde Baru dan Reformasi.
- Zon, Fadli. 2004. *Politik Huru-Hara Mei 1998*. Jakarta: Institute for Policy Studies.

Indonesia di Masa Orde Baru

Tsabit Azinar Ahmad

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

PIYE KABARE...???

**PENAK JAMAN KU
TOH...!!!**



BUKAN SUATU PENG-GOLONGAN MASJARAKAT
DLM ARTI FISIK TETAPI SUATU SIKAP
MENTAL JG MENGHENDAKI TERWUDJUT
NJA SUATU TATA SUSUNAN MASJARAKAT
JG BARU DI INDONESIA JG DI
DJIWAI MORAL **PANTJASILA**
CHUSUSNJA OLEH SILA -

**KETUHANAN JANG
MAHA ESA.**

APA

①

SIAPA DAN GOLONGAN MANA -
PUN JUGA JG LULUS UDIAN
SEDJARAN 1 OKTOBER
1965 DAPAT DIGOLONGKAN
ORDE BARU ASAL IA MEM-
PUNJAI SIKAP MENTAL JG
MENGHENDAKI TERWUDJUTNJA SUA-
TU TATASUSUNAN MASJARAKAT
ORDE BARU.

SIAPA

②

**DI
MANA**

ORDE BARU HARUS DIWUDJUTKAN
DAN DITEG-AKKAN DI **INDONE-**
SIA SETELAH KITA MENGALA-
MI PENGCHIANATAN DAN PETU-
ALANGAN „**GESTAPU/P.K.I.**“
DENGAN PENGIKUTNJA.

③

**BILA
MANA**

ORDE BARU **HARUS** TERWU-
DJUT **SEBELUM** PEMILIHAN
UMUN PADA TAHUN **1968**
DILAKSANAKAN.

④

**BAGAI-
MANA**

ORDE BARU HARUS DIWUDJUT
KAN DENGAN PENGGUNAAN
LANDASAN Ξ :

IDIIL : **PANTJASILA**
STRUKTURAL : **U.U.D. 45**
OPERASIONAL : **KETETAPAN**
KETETAPAN SIDANG
KE IX M.P.R.S.

⑥

**MENG
APA**

⑤

KARENA ORDE LAMA
TERNJATA MENIMBULKAN
PENJELEWENGAN
REVOLUSI.

Kemunculan Orde Baru dilatarbelakangi oleh peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. setelah peristiwa itu, Soeharto tampil secara memukau dalam mengatasi berbagai permasalahan keamanan. Titik puncaknya adalah ketika Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret 1966



SUPERSEMAR

**SURAT TERTANGGAL 11 MARET 1966,
DISERAHKAN SOEKARNO KEPADA SOEHARTO
YANG MENJADI SEJARAH PROSES PENGALIHAN
ATAU SUKSESI KEKUASAAN**

**SURAT
PERINTAH
11 MARET**

★ **BERPEGANG PADA SURAT ITU,
SOEHARTO MENGAMBIL AKSI
BERUNTUN PADA MARET 1966:**

KEBERADAAN SUPERSEMAR YANG ASLI MASIH SAMAR

Muncul spekulasi,
surat itu sengaja "dihilangkan"
agar tidak terlacak kebenaran
isu kudeta



VERSI ORDE BARU MENYEBUT :

Lewat surat itu Soekarno
memberikan mandat kepada
Soeharto untuk memulihkan
kondisi sosial dan keamanan
pasci gerakan 30 September
1965

Versi lain menyebutkan, ada dugaan
**SOEKARNO DIPAKSA
MENANDATANGANI SURAT**
yang telah dibuat oleh Soeharto untuk
melakukan kudeta.



**Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI) menyimpan dua versi naskah
SUPERSEMAR :**

1

Versi satu, lembar dari
PUSAT PENERANGAN TNI
ANGKATAN DARAT (PUSPEN AD)

2

Versi dua, lembar dari
SEKERTARIAT NEGARA



PADA BAGIAN BAWAH SALINAN ITU TERTULIS:

"Sesuai dengan yang asli, Sekretaris Negara Biro I, Pd. Kepala I Bagian Kearsipan, a.n.b.
Pd. Kepala Seksi Pengetikan, Nj. Sumarkinah" beserta tanda tangan Nyonya Sumarkinah.

**KEDUANYA DISEBUT PALSU KARENA
PADA LAMBANG NEGARA TIDAK
MENGUNAKAN KAPAS DAN BINTANG**

(keterangan Kepala ANRI, M Asichin, 10/3/2012)

ANRI menemukan dokumen lain,
yakni hasil salinan Supersemar,
tetapi TIDAK ADA KOP SURAT,
BAGIAN ATAS surat tertulis "salinan"
dan isinya sama dengan dua dokumen
Supersemar yang dinyatakan PALSU.

SUMBER: Utang KompasDRA/BK/PJU
dihati dari pemberitaan Kompas



**MEMBUBARKAN
PARTAI KOMUNIS
INDONESIA (PKI)**



**MENGONTROL
MEDIA MASSA**

Di bawah Pusat Penerangan
Angkatan Darat (Puspren AD)



**MENANGKAP
15 MENTERI**

Pendukung Soekarno

**MEMULAKAN
TJAKRABIRAWA**

sekitar 4.000
anggota pasukan yang
loyal kepada Presiden
Soekarno

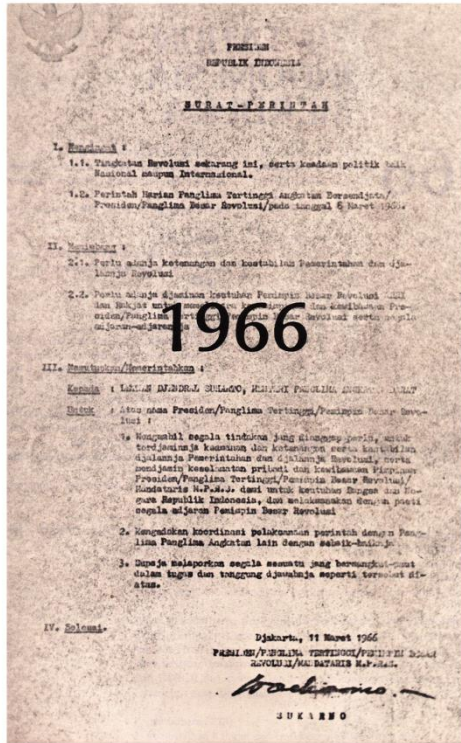


Presented by:

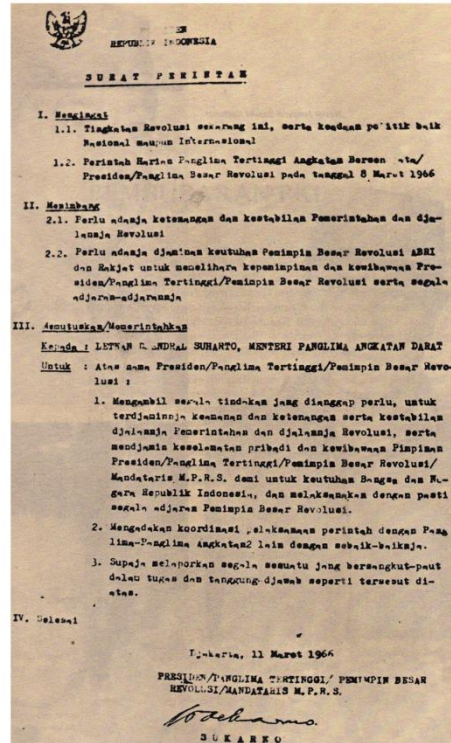
KOMPAS TV
Inspired Indonesia
KOMPAS DATA

POLIGRABS
Creative Graphic Studio

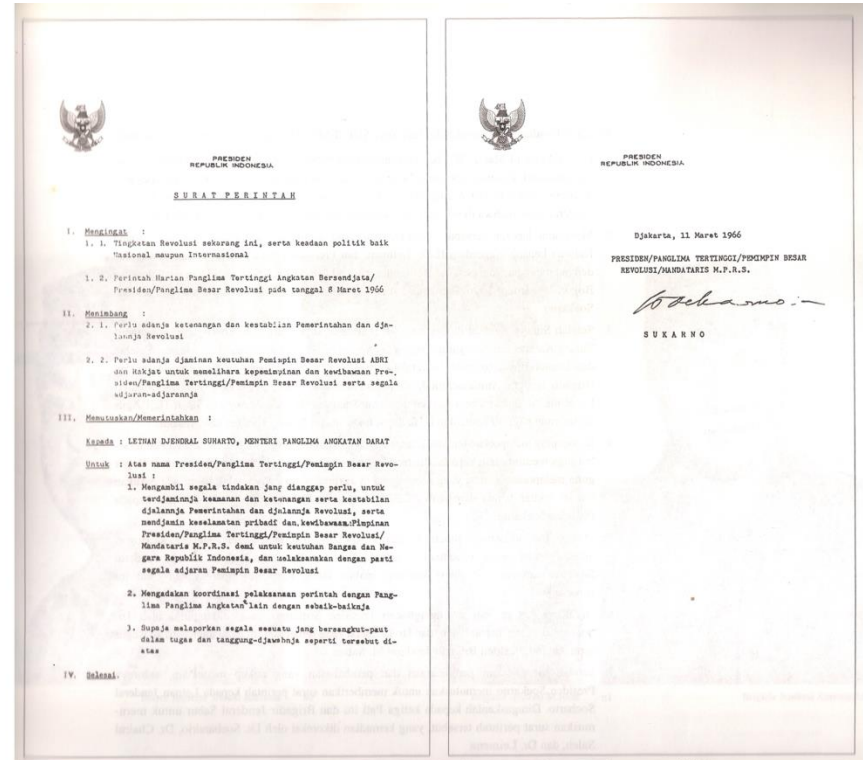
Tiga Jenis Supersemar “Resmi”



Versi 1



Versi 2



Versi 3

Dampak Supersemar


Keputusan Preseden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin besar Revolusi Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966

- Tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI termasuk semua bagian organisasinya dari pusat sampai daerah

Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Maret 1966

- Penahanan terhadap 15 menteri yang dianggap terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September atau memperlihatkan iktikad tidak baik dalam rangka penyelesaian masalah itu.

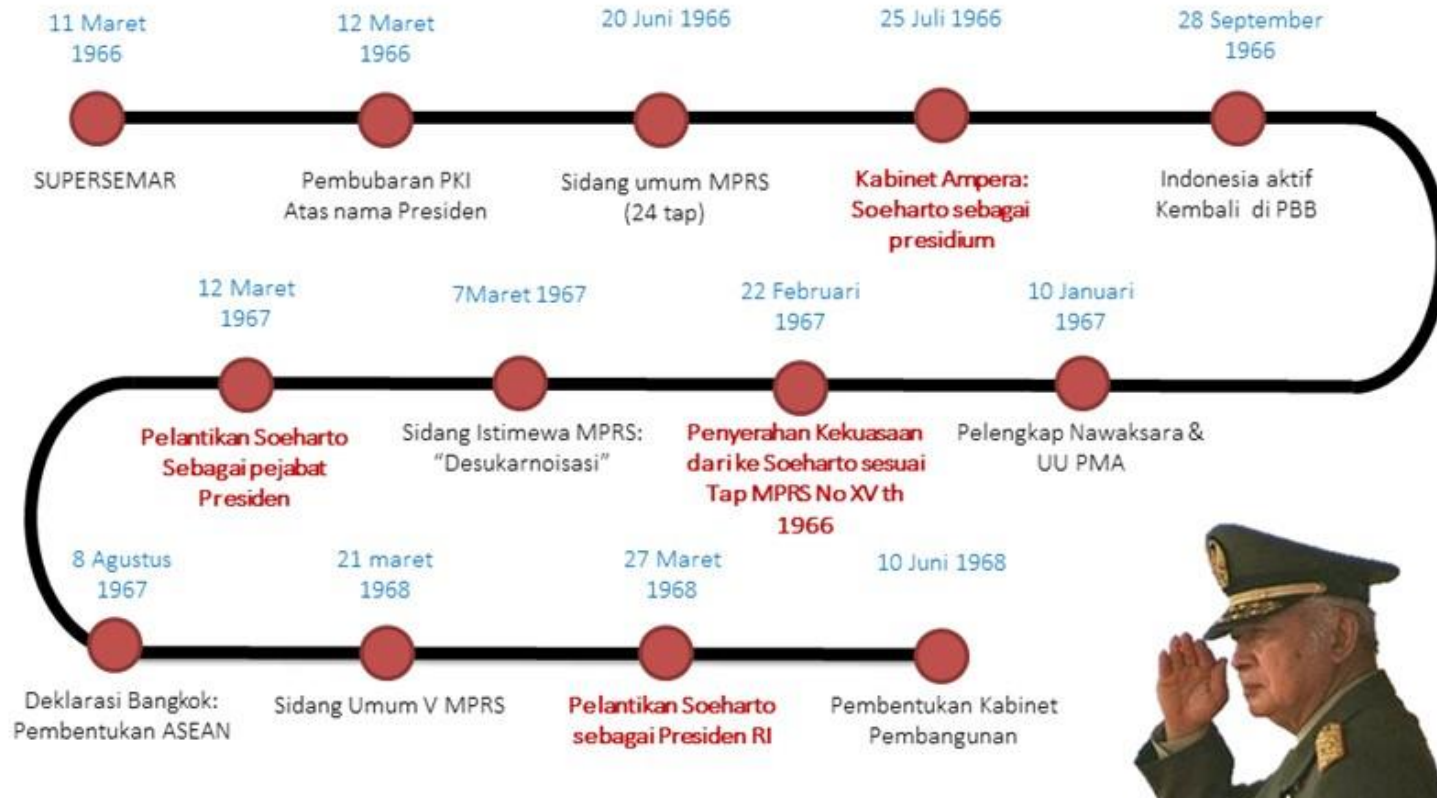
Supersemar ditetapkan sebagai Ketetapan MPRS



Kedudukan Supersemar semakin menguat ketika dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS.

Ketetapan ini dikeluarkan bersama 23 ketetapan lain dalam sidang umum MPRS IV pada 20 Juni 1966 sampai 5 Juli 1966.

Peristiwa Penting setelah Supersemar




Pembenahan Birokrasi di awal Orde Baru

Pembentukan kabinet Pembangunan dan penerapan program Pancakrida



Penyederhanaan kabinet menjadi 5 menteri negara dan 18 menteri/pimpinan departemen



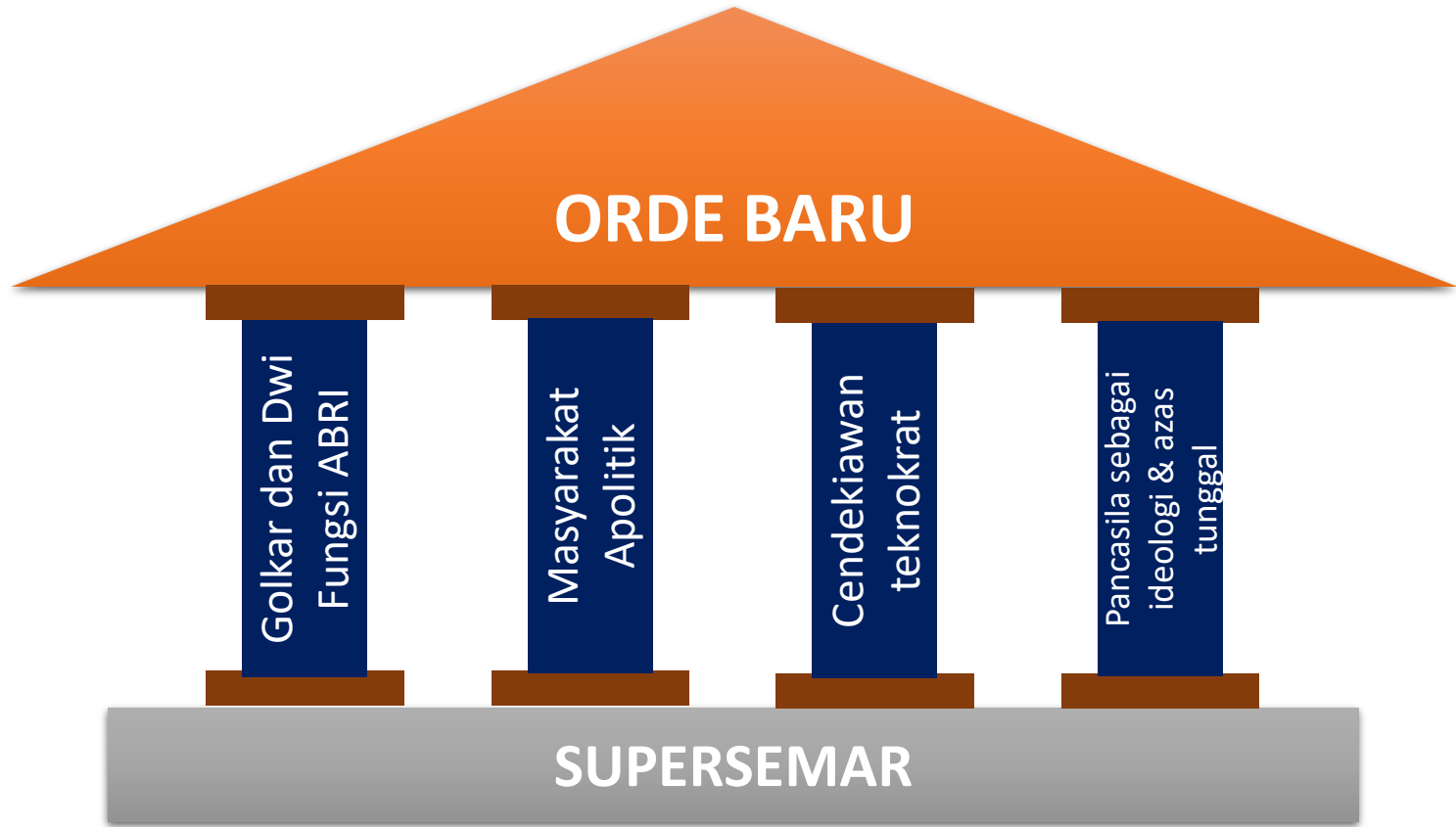
Pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk stabilisasi politik dan keamanan

Karakteristik Orde Baru



Pemerintahan Orde Baru memiliki karakteristik *bureaucratic authoritarian*. Ciri-cirinya adalah: (1) kewenangan tertinggi di tangan militer, (2) adanya mentalitas teknokratik yang merata, (3) adanya proses untuk menciptakan massa mengambang, menciptakan konsensus dan konformitas, (4) upaya untuk mencapai tujuan melalui represi.

Prof. Dwight Y King
(Northern Illinois University, AS)



Orde Baru dilandasi oleh Supersemar yang dikukuhkan dalam Tap MPRS IX dan XX tahun 1966. Setelah itu, diperkokoh dengan beberapa pilar utama. Golkar dan ABRI menjadi kekuatan politik. Masyarakat apolitik dibangun dengan pembatasan partai politik, kontrol media, dan represi terhadap kritik. Teknokrat menjadi otak dan motor pembangunan, dan Pancasila dijadikan sebagai identitas bersama dalam bentuk azas tunggal seluruh organisasi dan diinternalisasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan Partai Politik Awal



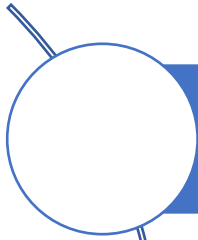
Terdapat 10 partai politik/golongan karya yang berpartisipasi dalam Pemilu 1971. Kecuali Golongan Karya dan Parmusi, seluruh partai politik berasal dari periode Demokrasi Liberal.

Hasil Pemilu 1971

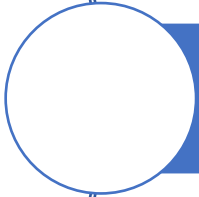
No	Peserta	Jumlah Suara	%
1	Partai Katolik	603.740	1,10
2	Partai Sjarikat Islam Indonesia	1.308.237	2,39
3	Partai Nahdlatul Ulama	10.213.650	18,67
4	Partai Muslimin Indonesia	2.930.746	5,36
5	Golongan Karya	34.348.673	62,80
6	Partai Kristen Indonesia	733.359	1,34
7	Partai Murba	48.126	0,09
8	Partai Nasional Indonesia	3.793.266	6,93
9	Partai Persatuan Tarbiah Indonesia	381.309	0,70
10	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	338.403	0,62
	Jumlah	54.699.509	

Sumber: Diolah dari *Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1971*, 1971.

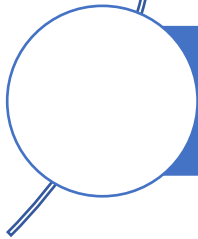
Pemilu lainnya



Pada 1973, dilakukan penyederhanaan partai politik. Setelah itu, peserta Pemilu hanya Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia



Pemilu dilaksanakan beberapa kali, yakni 1977, 1982, 1987, 1992, 1997



Golongan Karya selalu menjadi pemenang dan memperoleh suara terbanyak

Perolehan Suara Hasil Pemilu Orde Baru

Tahun	PPP	Golkar	PDI
1977	29,3 %	62,1 %	8,6 %
1982	28,0 %	64,2 %	7,9 %
1987	16,0 %	73,2 %	10,9 %
1992	17,0 %	68,1 %	14,9 %
1997	22,4 %	74,5 %	2,6 %

Sumber : Jamie Mackie and Andrew MacIntyre, 1994: 12; Nugroho Notosusanto & Marwati Djoned Poesponegoro, 2010



Pembenahan Perekonomian

- Membuka kesempatan modal asing dan modal swasta dalam negeri untuk melakukan investasi melalui UUPMA dan UUPMDN
- Mengembangkan pola perencanaan lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai sejak 1969.
- Melakukan peminjaman/utang luar negeri
- Selama periode Soeharto, pembangunan mengalami kemajuan pesat, tetapi akhirnya goyah pada 1997 karena utang yang membesar dan meningkatnya nilai tukar dollar AS terhadap Rupiah.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Repelita I

- 1 April 1969-31 Maret 1974
- Sasaran utama: pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Repelita II

- 1 April 1974-31 Maret 1979
- Sasaran: tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.

Repelita III

- 1 April 1979-31 Maret 1984
- berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Repelita IV

- 1 April 1984-31 Maret 1989
- Sasaran utama: sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

Repelita V

- 1 April 1989-31 Maret 1994
- Sasaran: pembangunan ditekankan pada sektor pertanian dan industri.

Repelita VI

- 1 April 1994-31 Maret 1999
- Sasaran: sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

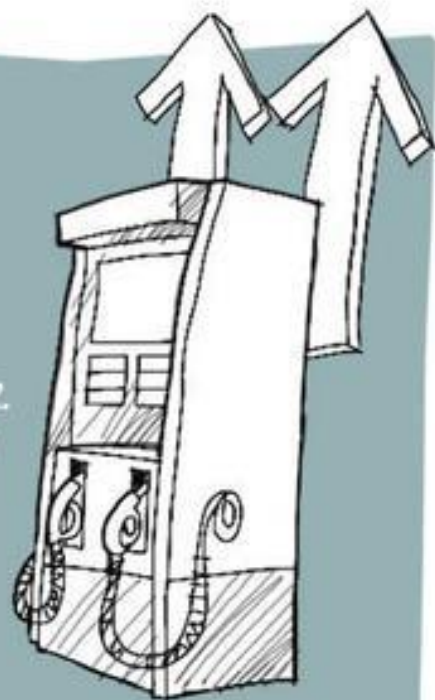
10-11 MARET 1998

SOEHARTO DILANTIK KEMBALI MENJADI
PRESIDEN RI DALAM SIDANG UMUM MPR
YANG DIKETUAI OLEH HARMOKO

BERHUBUNG
'RAKYAT MASIH
MENGHENDAKI',
GW MASIH 'KEPILIH'
JADI PRESIDEN LAGI.
HEHEHE...



TERJADI KRISIS MONETER.
NILAI DOLLAR BERGERAK
DARI RP. 2.400,-
PER-DOLLAR AS
HINGGA MENEMBUS
ANGKA RP. 15.000,-



5 MEI 1998
PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA
BBM DARI RP. 700,- MENJADI
RP. 1.200,- PER-LITER



TERJADI GELOMBANG DEMO BESAR-
BESARAN MENUNTUT MUNDURNYA
SOEHARTO YANG DIPELOPORI
OLEH PARA MAHASISWA

12 MEI 1998

EMPAT MAHASISWA UNIVERSITAS
TRISAKTI: HENDRIAWAN, ELANG MULYA
LESMANA, HERY HERTANTO, DAN
HAFIDIN ROYAN -DITEMBAK, SAAT
BERDEMO DI KAMPUS MEREKA



13 MEI - 14 MEI

TERJADI KERUSUHAN DAN PENJARAHAN
BESAR-BESARAN MELANDA JAKARTA HINGGA SOLO

JUGA TERJADI TINDAKAN INTIMIDASI DAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA WARGA ETNIS CINA.



17 MEI

ANGKA RESMI JUMLAH
KORBAN TEWAS AKIBAT
KERUSUHAN MEI
MENCAPI 499 ORANG.
LEBIH DARI 4.000
RUMAH DAN BANGUNAN
HANCUR ATAU
DIBAKAR MASSA



18 MEI
RIBUAN MAHASISWA MARAH DENGAN KONDISI YANG ADA.
MEREKA MELANJUTKAN DEMO BESAR-BESARAN,
DAN MULAI MENDUDUKI GEDUNG
MPR/DPR SENAYAN
MENUNTUT MPR MENGGELAR
SIDANG ISTIMEWA,
DENGAN AGENDA: TURUNKAN SOEHARTO
DAN MELAKSANAKAN REFORMASI

21 MEI
PRESIDEN SOEHARTO
MENYATAKAN BERHENTI
(LENGSER) DAN MENGALIHKAN
JABATAN PRESIDEN
KEPADA WAKIL-NYA,
BJ. HABIBIE



RIBUAN MAHASISWA
BERSORAK GEMBIRA
MENYAMBUT LENGSEKNYA
SOEHARTO..



OK DEH,
GW LENGSER.
ELU YANG
GANTIIN YA..



SIAP, GAN!

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI DI AWAL REFORMASI

Tsabit Azinar Ahmad

A. Dinamika politik di Indonesia setelah Reformasi

Masa Habibie

Mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 diikuti dengan pelantikan B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Segera setelah itu, melalui siaran pers Jenderal Wiranto selaku Panglima ABRI menyatakan dukungan terhadap suksesi kepemimpinan ini. Wiranto juga mengajak kepada masyarakat untuk dapat menerima hasil ini sekaligus mengajak untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan. Habibie memerintah dalam waktu yang singkat terhitung sejak 21 Mei 1998 hingga dilantiknya Abdurrahman Wahid pada 20 Oktober 1999 sebagai presiden baru. Tidak lama berselang, Presiden Habibie membentuk susunan kabinet bernama Kabinet Reformasi Pembangunan pada 22 Mei 1998. Di dalam kabinet ini, berbagai unsur kekuatan disinergikan. Di dalamnya terdapat unsur ABRI, Golkar, PPP, PDI, daerah, intelektual, serta LSM. Kabinet ini dilantik pada 23 Mei 1998. (Simanjuntak, 2003)

Habibie pada mulanya bukanlah seorang politisi. Ia adalah ilmuwan yang mendunia dengan julukan Mr. Crack karena berhasil menunjukkan bagaimana menghitung urutan keretakan pesawat hingga ke tingkat atom-atomnya. Ia juga adalah penemu Teori Habibie, Faktor Habibie, dan Metode Habibie yang diterapkan dalam dunia penerbangan. Lahir di Parepare Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936, ia melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar tertinggi di bidang aeronautika dari Jerman Barat. Karier politik Habibie dimulai ketika ia diminta untuk memelopori program alih teknologi pada 1974. Saat itu kebutuhan industri dan pesawat tengah dirintis. Ia didaulat untuk menjadi menteri Riset dan Teknologi sejak kabinet Pembangunan III pada 1978. Sejak itu ia terus berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan. (Aning S., 2005)



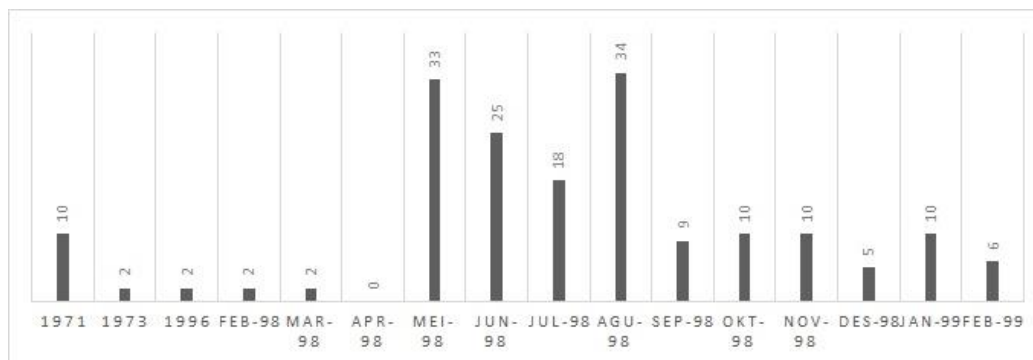
Gambar 1. Pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI
Sumber: id.wikipedia.org

Terdapat lima isu pokok masa kepresidenan Habibie yang harus dituntaskan. Isu tersebut adalah (1) masa depan reformasi, (2) masa depan ABRI, (3) masa depan wilayah-wilayah konflik yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, (4) masa depan Soeharto, keluarganya, harta kekayaan serta kroni-kroni mereka, dan (5) masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengawal masalah ini, pemerintah fokus untuk memperbaiki berbagai perundang-undangan, terutama peninjauan kembali undang-undang tentang subversi. Hal ini terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor II/PNPS/ tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi pada 19 Mei 1999. Selain itu, perhatian serius diberikan tentang otonomi daerah dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dampak dari otonomi ternyata melahirkan delapan provinsi baru dan puluhan kabupaten/kota. (Chairudin, 2011a; Simanjuntak, 2003)

Dalam beberapa minggu setelah menjabat Presiden, Habibie mulai membebaskan para tahanan politik. Hal ini menjadi penting untuk memulai keterbukaan dan rekonsiliasi. Beberapa tokoh yang dibebaskan adalah para pemberontak regional dan tokoh-tokoh PKI yang telah berusia lanjut. Selain itu, ABRI juga membebaskan beberapa aktivis mahasiswa yang telah menghilang sejak masa kampanye pemilu 1997. (Ricklefs, 2008)

Dalam bidang penataan kenegaraan, pemerintah berhasil menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998. Sidang ini bertujuan menghasilkan keputusan untuk memantapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Sebagai tindak lanjutnya terdapat tiga program utama penataan masalah politik, yakni (1) kebijakan pembebasan pendirian partai politik, (2) kebijakan penetralan birokrasi sipil dan militer dalam pemilu, dan (3) kebijakan penguatan lembaga penyelenggara pemilu (Chairudin, 2011a).

Di dibang politik, tindakan Habibie didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Partai Politik pada 1 Februari 1999. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk Partai Politik.”



Gambar 2. Perkembangan Partai Politik di Awal Reformasi
Sumber: Tim Penelitian dan Pengembangan Kompas, 1999:31

Hal ini kemudian mendorong banyak kalangan untuk membentuk partai-partai politik yang dipersiapkan untuk pemilihan umum. Setelah diundangkan, jumlah partai politik yang terdaftar mencapai 141. Setelah diverifikasi oleh tim 11 Komisi Pemilihan Umum, jumlah tersebut menjadi sebanyak 98. Akan tetapi tidak seluruhnya mengikuti pemilihan umum. Pada akhirnya hanya terdapat 48 partai saja yang berpartisipasi dalam pemilihan umum 1999. Salah satu capaian di bidang politik pada pemerintahan Habibie adalah berhasilnya pelaksanaan Pemilihan Umum 1999. Pemilu kali ini diikuti oleh 48 partai. Partai tersebut adalah sebagai berikut.

1. Partai Indonesia Baru
2. Partai Kristen Nasional Indonesia
3. Partai Nasional Indonesia - Supeni
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6. Partai Ummat Islam
7. Partai Kebangkitan Ummat
8. Partai Masyumi Baru
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Syarikat Islam Indonesia
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12. Partai Abul Yatama
13. Partai Kebangsaan Merdeka
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa
15. Partai Amanat Nasional
16. Partai Rakyat Demokratik
17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
18. Partai Katolik Demokrat
19. Partai Pilihan Rakyat
20. Partai Rakyat Indonesia
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
22. Partai Bulan Bintang
23. Partai Solidaritas Pekerja
24. Partai Keadilan
25. Partai Nahdlatul Ummat
26. Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28. Partai Republik
29. Partai Islam Demokrat
30. Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
32. Partai Demokrasi Indonesia
33. Partai Golongan Karya
34. Partai Persatuan
35. Partai Kebangkitan Bangsa
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia
37. Partai Buruh Nasional
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39. Partai Daulat Rakyat
40. Partai Cinta Damai
41. Partai Keadilan dan Persatuan
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia
44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46. Partai Nasional Demokrat
47. Partai Ummat Muslimin Indonesia
48. Partai Pekerja Indonesia



Gambar 3. Lambang Partai Politik Peserta Pemilu 1999

~ Tsabit Azinar Ahmad ~

Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan

© Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Semula banyak kalangan yang menduga bahwa pemilu pertama ini akan diwarnai konflik. Akan tetapi, ternyata kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Pada 7 Juni 1999, pemungutan suara berjalan relatif aman. Hasil dari pemilu kali ini disahkan pada 3 Agustus 1999.

Tabel 1. Hasil Pemilihan Umum 1999

Partai	Suara Masuk		Kursi di DPR	
	Jumlah	%	Jumlah*	%
PDIP	35.689.073	33,74%	153	33,12%
Golkar	23.741.749	22,44%	120	25,97%
PPP	11.329.905	10,71%	58	12,55%
PKB	13.336.982	12,61%	51	11,04%
PAN	7.528.956	7,12%	34	7,36%
PBB	2.049.708	1,94%	13	2,81%
Partai Keadilan	1.436.565	1,36%	7	1,52%
PKP	1.065.686	1,01%	4	0,87%
PNU	679.179	0,64%	5	1,08%
PDKB	550.846	0,52%	5	1,08%
Lainnya	8.378.012	7,92%	12	2,60%
Total	105.786.661		462	

Keterangan *) dengan *stembus accord* (penggabungan sisa suara)

Sumber: Diolah dari *Pemilu Untuk Pemula*, 2010: 41-42

Pada pemilu kali ini, PDI Perjuangan sebagai partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tampil dengan perolehan gemilang. Hal ini dilatarbelakangi sentimen Sukarnoisme yang berkembang dan bangkitnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih terbuka di bidang politik. Di sisi ini Megawati mampu menampilkan diri dan partainya sebagai partai yang ditindas oleh Orde Baru, sehingga momentum ini sangat mendorong lahirnya simpati dari masyarakat. Pada pemilihan ini, masih dipilih anggota DPR dari kelompok ABRI sejumlah 38 orang. Dengan demikian, total keseluruhan jumlah anggota DPR pada tahun 1999 adalah 500 anggota.

Setelah kenaggotaan DPR dan MPR hasil pemilu tersusun, diselenggarakanlah Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1-21 Oktober 1999. Pada 1 Oktober sebanyak 700 anggota DPR/MPR dilantik. Terpilih sebagai Ketua MPR adalah Amien Rais. Sementara itu, Akbar Tanjung menduduki ketua DPR. Pada sidang tersebut, Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban di tanggal 14 Oktober 1999. Akan tetapi, setelah melalui proses pemandangan umum, sejumlah

fraksi menolak pertanggungjawaban Habibie. Fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa. Kemudian setelah mendengarkan pemandangan dari fraksi-fraksi dalam sidang tanggal 20 Oktober 1999 ini hari, MPR secara resmi menolak pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. (Simanjuntak, 2003)

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan penolakan pertanggungjawaban Habibie. Permasalahan yang melatarbelakangi penolakan adalah masalah Timor Timur, masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, permasalahan ekonomi, dan masalah hak azasi manusia. Selain itu, proses pengadilan terhadap Soeharto juga tidak menemukan titik terang. Akibat penolakan ini, Habibie yang dicalonkan oleh Fraksi Golkar menyatakan mundur dari bursa calon presiden.

Setelah Habibie mundur, Fraksi Golkar sempat mengusulkan Akbar Tanjung untuk maju sebagai calon presiden. Akan tetapi, keputusan itu ditarik, sehingga Golkar tidak memiliki calon. Sementara itu, dari Fraksi PDI Perjuangan dicalonkan Megawati Soekarnoputri. Pesaingnya adalah gabungan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Gabungan fraksi yang dikenal dengan sebutan Poros Tengah ini mencalonkan Abdurrahman Wahid. Selain itu ada pula Fraksi Partai Bulan Bintang yang mengusung Yusril Ihza Mahendra sebagai calon, walaupun akhirnya Yusril menyatakan mundur sebagai calon sebelum voting dilakukan. Dengan demikian, praktis hanya terdapat dua calon presiden: Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid. (Simanjuntak, 2003)

Sebagai partai pemenang pemilu, kekuatan PDI Perjuangan di dalam MPR sangatlah besar. Akan tetapi, hal ini tidak lantas menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketuanya mampu mengungguli calon presiden yang lain. Pada pukul 11.30 siang, diselenggarakan Rapat Paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan presiden. Melalui voting Abdurrahman Wahid berhasil mengungguli Megawati dengan perolehan suara 373:313. Sementara itu terdapat 9 suara abstain dan 4 suara tidak sah. Pada malam harinya, Abdurrahman Wahid dilantik sebagai presiden. (Simanjuntak, 2003)



Gambar 4. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri
Sumber: merdeka.com

Masa Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur (Lahir di Jombang 4 Agustus 1940) merupakan salah satu tokoh penting yang mengawal proses reformasi. Ia dikenal sebagai tokoh oposisi Islam pada masa Orde Baru. Sebagai ketua umum Nahdlatul Ulama, ia memiliki basis pendukung yang loyal dari kalangan Islam tradisional. Di awal reformasi, Gus Dur bersama dengan Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengadakan pertemuan di kediaman Gus Dur di Ciganjur pada 10 November 1998. Pertemuan ke empat tokoh tersebut akhirnya menghasilkan Deklarasi Ciganjur yang berisi beberapa pemikiran, antara lain (1) kewajiban mempertahankan keutuhan NKRI dari berbagai ancaman dengan semangat *bhineka tunggal ika*; (2) mengembalikan kedaulatan rakyat dan memberdayakan lembaga perwakilan untuk menyuarakan aspirasi rakyat; (3) mendorong desentralisasi pemerintahan dan perimbangan pembangunan; (4) mendorong pelaksanaan pemilihan umum secepatnya; (5) penghapusan Dwi Fungsi ABRI secara bertahap; (6) pemberantasan KKN dan membawa pelaku-pelakunya, terutama Soeharto dan kroninya ke meja hukum; (7) mendesak seluruh pengamanan PAM Swakarsa Sidang Istimewa MPR untuk membubarkan diri. (Aning S., 2005; Chairudin, 2011b)

Pelantikan Gus Dur sebagai presiden ternyata disambut ketidakpuasan di kalangan pendukung Megawati. Hal ini lantas menyulut kerusuhan massa di beberapa

kota di Jawa, Bali, dan Medan. Kekecewaan masyarakat kemudian mereda setelah Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi wakil presiden dengan mengalahkan Hamzah Haz pada voting di MPR dengan suara 396 berbanding 284. Sementara itu 5 suara menyatakan diri abstain. Mulai tanggal 21 Oktober 1999, Megawati dilantik sebagai wakil presiden mendampingi Gus Dur. (Simanjuntak, 2003; Ricklefs, 2008)

Untuk menjalankan pemerintahan, pada 26 Oktober presiden dan wakil mengumumkan susunan kabinet. Kabinet ini terdiri atas 32 menteri dan 3 pejabat negara setingkat menteri negara. Walaupun kabinet ini sengaja tidak diberi nama, masyarakat kerap menyebut sebagai Kabinet Persatuan Nasional. Di dalamnya terdapat kompromi-kompromi dan akomodasi dari beragam kelompok. Dalam penyusunannya, kabinet disusun bersama dengan Ketua DPR (Akbar Tanjung), Ketua MPR (Amien Rais), dan Panglima TNI (Wiranto). Dalam susunan menteri, Gus Dur menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Kabinet ini kemudian dilantik pada 29 Oktober 1999. (Simanjuntak, 2003; Ricklefs, 2008)

Pembubaran dua departemen sempat menuai kontroversi. Hal ini kemudian memicu reaksi dari DPR yang menganggap pemerintahan Gus Dur justru lebih banyak diwarnai dengan intrik pergantian kabinet. Dari sini, DPR kemudian menggunakan hak interpelasinya untuk meminta keterangan dari presiden pada 18 November 1999. Pada acara ini, presiden tetap bersikukuh dengan kebijakannya dan menyatakan DPR seperti Taman Kanak-Kanak. Inilah yang lantas menyebabkan hubungan antara DPR dan Presiden memanas. (Simanjuntak, 2003; Ricklefs, 2008)

Perjalanan kabinet di masa Gus Dur diwarnai dengan pergantian menteri. Bahkan pada 23 Agustus 2000 presiden mengumumkan susunan kabinet baru. Penyusunan kabinet kali ini melibatkan Presiden, Wakil Presiden, serta tim tiga (Susilo Bambang Yudhoyono, Erna Witoelar, dan Ryaas Rasyid). Namun demikian pada saat pembacaan susunan nama, Megawati berhalangan hadir karena diduga ada beberapa nama yang tidak sesuai. Terbentuknya kabinet baru ini ternyata banyak mendapatkan sorotan negatif seperti kurang dilibatkannya partai politik dan kompetensi personalia yang diragukan. Hal ini mengakibatkan makin berkurangnya dukungan dari parlemen terhadap presiden. (Simanjuntak, 2003; Chairudin, 2011b)

Pada masa pemerintahannya, Gus Dur tidak secara resmi mengumumkan program kerja kabinet. Presiden menjelaskan bahwa Wakil Presiden bertugas

menangani permasalahan daerah seperti Irian Jaya, Maluku, dan Riau. Selain itu, wakil presiden juga bekerja untuk mengawasi kehidupan bangsa di bidang HAM dan lingkungan hidup. Sementara itu masalah Presiden menangani secara langsung permasalahan tentang Aceh, masalah ekonomi, dan pengembangan kelautan. Di sini, menteri-menteri bekerja dengan petunjuk dan pengawasan ketat oleh presiden dan wakil. (Simanjuntak, 2003; Chairudin, 2011b)

Dalam bidang politik luar negeri, Gus Dur kerap melakukan kunjungan ke berbagai negara. Sebulan setelah menjadi presiden, ia mengunjungi negara-negara ASEAN dan beberapa negara besar di kawasan Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, Yorgania dan Republik Rakyat Cina. Di Januari 2000, ia melakukan kunjungan kenegaraan ke Swiss untuk mengikuti Forum Ekonomi Dunia dan dilanjutkan ke Arab Saudi. Pada bulan Februari ia mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang ia singgah di Indoa, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Di Bulan Maret ia mengunjungi Timor Leste. Di bulan April Afrika Selatan dikunjungi oleh Gus Dur dan dilanjutkan ke Kuba untuk menghadiri G-77. Perjalanan itu dilanjutkan lagi ke Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni Gus Dur kembali mengunjungi Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Iran, Pakistan, dan Mesir. Di tahun 2001, ia melakukan junjungan ke Australia.(Chairudin, 2011b; Musa, 2010)

Seringnya Gus Dur melakukan perjalanan dinas ke luar negeri menuai kontroversi. Kunjungannya ke berbagai negara ditanggapi negatif oleh beberapa kalangan karena seolah meninggalkan permasalahan yang terjadi di dalam negeri. Akan tetapi, Gus Dur beralasan bahwa kunjungannya ke berbagai negara memiliki arti strategis untuk menjaga Indonesia tetap memiliki eksistensi di mata internasional. Beberapa hal yang disasar dari rutinnnya perjalanan politik luar negeri antara lain (1) menjalin kembali kerjasama dengan luar negeri yang sempat menegang akibat permasalahan Timor Timur, (2) meminta dukungan terhadap perjuangan menjaga kedaulatan negara karena beberapa tokoh gerakan separatis bertempat tinggal di luar negeri, serta (3) meyakinkan tentang kondisi Indonesia yang kondusif bagi para investor.

Dalam pemerintahannya, berbagai kebijakan acap kali kontroversial. Akhirnya, banyak pihak yang berbeda pandangan dan berseberangan dengan sikap politik Gus

Dur. Tidak terkecuali dari kalangan parlemen yang pada akhirnya menggelar sidang istimewa dan menurunkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Ketegangan Presiden dan DPR diawali dari dugaan terlibatnya presiden terhadap pencairan dan penggunaan dana yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog senilai 35 milyar dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS. Ke dua permasalahan ini disebut sebagai *Buloggate* dan *Bruneigate*. Permasalahan ini mendorong DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusutnya. Pansus menyimpulkan bahwa presiden patut diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog. Presiden juga dianggap inkonsisten dalam pernyataan mengenai aliran dana dari Sultan Brunei. Hasilnya adalah memorandum yang ditujukan kepada presiden pada 1 Februari 2001. Dalam memorandum, presiden dianggap telah melanggar sumpah jabatan dan ketentuan tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Akan tetapi pada pertemuan di sidang paripurna DPR tanggal 28 Maret 2001, presiden menolak isi memorandum tersebut. (Simanjuntak, 2003; Chairudin, 2011b; Ricklefs, 2008)

Setelah keluarnya memorandum dan jawaban dari presiden, kondisi politik makin memanas. Di parlemen muncul gerakan untuk segera menyelenggarakan sidang istimewa MPR. Bahkan, Megawati secara tegas menyatakan ketidakcocokannya dengan presiden. Sementara itu, DPR kembali menjatuhkan memorandum kedua pada 30 April 2001 setelah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi. Dengan keluarnya memorandum kedua ini, Presiden diberikan kesempatan satu bulan lagi untuk memperbaiki kinerjanya. Akan tetapi, apabila dalam satu bulan Presiden tidak mengindahkan, DPR akan meminta MPR untuk menggelar Sidang Istimewa. Hal ini kemudian terbukti dengan diselenggarakannya rapat paripurna DPR pada 30 Mei 2001 yang meminta kepada MPR untuk segera mengadakan Sidang Istimewa. DPR menilai presiden dianggap tidak mengindahkan memorandum DPR sehingga dianggap melanggar UUD 1945. (Simanjuntak, 2003)

Menanggapi hal itu, presiden berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Pada 9 Juli 2001, diundanglah para ketua partai politik. Akan tetapi upaya ini gagal total, karena hanya dihadiri oleh ketua PKB. Pada situasi yang makin memanas ini, Presiden justru melakukan tindakan kontroversial yang memerintahkan Menko Polsoskam dan Wakil Kapolri untuk mengambil tindakan tegas secara hukum

terhadap pelaku-pelaku tindakan insubordinasi di tubuh Polri. Puncaknya adalah ketika Komisaris Jenderal Chairuddin Ismail dilantik sebagai Pemangku Jabatan Sementara Kapolri pada 20 Juli 2001. Hal ini memicu reaksi keras banyak pihak, termasuk dari pimpinan MPR. Dengan tindakannya ini, presiden dianggap melakukan langkah yang semakin membahayakan keselamatan dan integritas bangsa, karena membuat institusi Polri semakin rapuh. Peristiwa ini makin menguatkan tekad dari MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa. Hasilnya adalah pada malam hari tanggal 20 Juli 2001, MPR mengeluarkan surat untuk meminta presiden untuk menyiapkan pertanggungjawaban pada 23 Juli 2001. (Simanjuntak, 2003)

Undangan untuk mengikuti Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001 ditentang oleh presiden. Pada 21 Juli, presiden membalas surat dari MPR yang menyatakan ketidaksediaan dalam menghadiri Sidang Istimewa karena sidang tersebut tidak diputuskan melalui mekanisme rapat paripurna. Presiden berpandangan bahwa tidaklah cukup untuk dapat menyusun pertanggungjawaban dalam beberapa hari setelah rapat paripurna. Menjelang 23 Juli, suasana kian mencekam. Pada 22 Juli 2001 presiden mengeluarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia atau Dekrit Presiden yang dibacakan pada 23 Juli dini hari. Isi dari dekrit presiden tersebut adalah

- a. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan, serta menyusun badan yang diperlakukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun; dan
- c. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sampai menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Namun demikian, dekrit akhirnya tidak dapat dijalankan. Panglima TNI Widodo AS didampingi seluruh kepala staf menggelar jumpa pers yang menyatakan bahwa “jajaran TNI tetap konsisten terhadap sikap yang disampaikan pimpinan TNI sejak Januari 2001 untuk tidak merekomendasikan dekrit.” Secara kelembagaan MPR dan DMPR menyatakan menolak. Di satu sisi Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa bahwa dekrit tidak dapat dijalankan karena hal yang diatur di dalamnya bukanlah wewenang dari presiden. Dengan demikian, pelaksanaan Sidang Istimewa tidak dapat

dibendung. Bahkan dalam sidang ditetapkan Ketetapan MPR RI No I/MPR/2001 yang menyatakan bahwa Maklumat Presiden Republik Indonesia tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (Simanjuntak, 2003; Chairudin, 2011b)

Setelah menghasilkan ketetapan pertama, MPR menyelenggarakan kembali sidang. Di dalam sidang seluruh anggota yang hadir (591 anggota) menyepakati disahkannya rancangan Ketetapan MPR No II/MPR/2001 yang memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Selain itu disahkan pula Ketetapan MPR No III/MPR/2001 yang berisi penetapan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Akhirnya pada sore harinya Megawati Soekarnoputri resmi dilantik menjadi presiden Indonesia dalam Rapat Paripurna keempat Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001.

Di masa kepemimpinannya yang singkat, Gus Dur berhasil melakukan beberapa langkah strategis. Selain membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, ia membubarkan pula Badan Koordinasi dan Stabilisasi Pertahanan Nasional (Bakostanas) dan Penelitian Khusus (Litsus) yang dibentuk pada masa Soeharto. Dalam bidang hak azasi manusia, berhasil dikeluarkan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak-Hak Azasi Manusia. Selain itu beberapa daerah mengalami pemekaran, seperti Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, beberapa kabupaten baru. (Chairudin, 2011b)

Masa Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri adalah presiden wanita pertama Indonesia. Lahir pada 27 Desember 1949, Megawati adalah putri presiden pertama Indonesia. Setelah Gus Dur dimakzulkan melalui sidang istimewa MPR, sebagai wakil presiden ia segera dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan presiden. Megawati sebenarnya digadang-gadang untuk menjadi presiden sejak menjelang pemilihan umum 1999. Pada saat itu, gelombang besar dukungan masyarakat mengalir deras ke PDI Perjuangan, partai yang dipimpinnya. Kesuksesan Megawati muncul dalam kancah politik diawali saat ia terpilih dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa PDI di bulan Desember 1993. Dalam Dalam munaslub tersebut, ia tampil menjadi ketua umum PDI. Akan tetapi, jabatannya tersebut tidak diakui oleh pemerintah. Posisinya sebagai ketua PDI digeser

dengan diselenggarakannya Kongres Medan yang mengukuhkan Soerjadi sebagai ketua PDI. Akibatnya, terjadi perpecahan dalam tubuh PDI. Puncak perpecahan itu adalah terjadinya peristiwa pengambilalihan kantor pusat PDI pada 27 Juli 1996. Bentrokan itu akhirnya mengakibatkan beberapa orang tewas. Sejak saat itu, Megawati selalu menampilkan citra sebagai oposisi dan menjelang pemilu 1999 mendirikan PDI Perjuangan. (Aning S., 2005)

Saat Megawati menggantikan Gus Dur sebagai presiden, duduk sebagai wakilnya adalah Hamzah Haz. Segera setelah itu, diselenggarakan pertemuan dengan para pemimpin partai untuk membicarakan masalah kabinet pada 2 Agustus 2001. Hasilnya adalah pada tanggal 9 Agustus 2001, presiden bersama wakil mengumumkan susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Gotong Royong. Dalam kabinet ini terdapat 30 menteri, yang terdiri atas 3 menteri koordinator, 17 menteri memimpin departemen dan 10 menteri negara, serta 3 pejabat setingkat menteri. Kabinet dilantik pada 10 Agustus 2001. Dalam menjalankan pemerintahan, program kerja kabinet meliputi

- a. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional, melalui kerangka, arah dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap HAM;
- c. Normalisasi kehidupan ekonomi, dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat;
- d. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman, serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, dan melanjutkan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- e. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap Pemerintah; dan
- f. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2004 yang aman, tertib, bebas, rahasia, dan langsung.

Pergantian presiden di masa sulit memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi Megawati. Korupsi makin merajalela bahkan lebih buruk daripada periode

sebelumnya. Untuk itulah pada 16 Desember 2003 didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pembentukan KPK diperkuat dengan didirikannya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberantas dan mengurangi tindak kejahatan pencucian uang. Selain itu, di bidang penegakan hukum, pada masa Megawati berhasil disahkan UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai amanat dari UUD hasil amandemen. (Chairudin, 2011c)

Memasuki tahun 2004, geliat perpolitik mulai tampak untuk menyambut pemilihan umum. Pemilu kali ini adalah pertama kalinya presiden dan wakilnya dipilih secara langsung serta wakil-wakil rakyat dalam DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu berlangsung dalam dua tahap.

Tabel 2. Pelaksanaan Pemilu 2004

Aspek	Tahap I	Tahap II
Tujuan	Memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota)	Memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Waktu	5 April 2004	5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (Putaran II)
Peserta	24 Partai Politik	5 pasangan calon presiden dan wakil presiden

Pelaksanaan pemilu tahun 2004 walaupun masih bersifat multipartai, tetapi jumlah peserta tidak sebanyak tahun 1999. Peserta pemilu kali ini adalah sebagai berikut.



Gambar 5. Partai Politik Peserta Pemilu DPR tahun 2004

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 9. Partai Demokrat Partai Keadilan | 17. Partai Bintang Reformasi |
| 2. Partai Buruh Sosial Demokrat | 10. dan Persatuan Indonesia | 18. Partai Demokrasi Indonesia |
| 3. Partai Bulan Bintang | 11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 19. Perjuangan Partai Damai Sejahtera |
| 4. Partai Merdeka | 12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 20. Partai Golongan Karya |
| 5. Partai Persatuan Pembangunan | 13. Partai Amanat Nasional | 21. Partai Patriot Pancasila |
| 6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 14. Partai Karya Peduli Bangsa | 22. Partai Sarikat Indonesia |
| 7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 15. Partai Kebangkitan Bangsa | 23. Partai Persatuan Daerah |
| 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 16. Partai Keadilan Sejahtera | 24. Partai Pelopor |

Proses penghitungan suara berlangsung selama sebulan dan hasil akhir diumumkan pada 5 Mei 2004. Pada pemilu kali ini Golkar kembali memperoleh kemenangan. Sementara itu untuk DPD berhasil dipilih 128 anggota dari 32 provinsi. Hasil pemilu 2004 adalah sebagai berikut. (Sekretariat Jenderal KPU, 2010)

Tabel 3. Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2004.

Partai	Suara Masuk		Kursi di DPR	
	Jumlah	%	Jumlah*	%
Partai Golongan Karya	24.461.104	21,62%	128	23,27%
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20.710.006	18,31%	109	19,82%
Partai Kebangkitan Bangsa	12.002.885	10,61%	52	9,45%
Partai Persatuan Pembangunan	9.226.444	8,16%	58	10,55%
Partai Demokrat	8.437.868	7,46%	55	10,00%
Partai Keadilan Sejahtera	8.149.457	7,20%	45	8,18%
Partai Amanat Nasional	7.255.331	6,41%	53	9,64%
Partai Bulan Bintang	2.965.040	2,62%	11	2,00%
Partai Bintang Reformasi	2.944.529	2,60%	14	2,55%
Partai Damai Sejahtera	2.424.319	2,14%	13	2,36%
Lainnya	14.548.767	12,86%	12	2,18%
Total	113.125.750	100,00%	550	100,00%

Sumber: Diolah dari *Pemilu Untuk Pemula*, 2010: 43.

Pada pemilihan umum ini dipilih untuk pertama kali pasangan presiden dan wakilnya. Ada lima pasangan calon yang bersaing memperebutkan posisi presiden dan wakil. Ke lima pasangan tersebut adalah

- Wiranto dan Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya)
- Megawati Soekarnoputri dan Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional)
- Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
- Hamzah Haz dan Agum Gumelar (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan)



Gambar 6. Lima Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004
Sumber: wikipedia.org

Pada putaran pertama, belum dapat ditentukan pemenang karena belum mencapai persyaratan lebih dari 50%. Oleh karena itu, dilakukanlah pemilihan untuk putaran kedua yang diikuti oleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla. Dari pemilihan ini akhirnya terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2004-2009. (Sekretariat Jenderal KPU, 2010)



Hasil Pemilihan Putaran 1
Gambar 7. Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004
Sumber: Diolah dari *Pemilu Untuk Pemula*, 2010

Hasil pemilihan umum 2004 menjadi penanda babak baru demokrasi di Indonesia. Dengan ini masyarakat dapat memilih langsung calon wakil rakyat dan presidennya.

B. Kondisi Sosial Ekonomi Indonesia setelah Reformasi

Di pertengahan 1998, kondisi perekonomian Indonesia sangat terpuruk. Tingkat inflasi mencapai 65% dan pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan 13,6%. Suku bunga bank melonjak mencapai 60-90% dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 14.000 – Rp 17.000 untuk tiap US\$ 1. Perusahaan dari skala besar dan kecil tumbang. Dampaknya adalah sekitar 113 juta rakyat Indonesia atau 56% dari seluruh populasi berada di bawah garis kemiskinan. Pada akhir Juni 1998, anggaran negara harus direvisi untuk ketiga kali karena banyak asumsi yang meleset. Untuk mengatasi permasalahan ini, Habibie memilih Ginandjar Kartasasmita sebagai menteri koordinator di bidang ekonomi serta teknokrat senior Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana sebagai penasihat ekonomi. Pemilihan ke tiga orang ini karena mereka memiliki hubungan baik dengan komunitas keuangan internasional. Dampaknya adalah berlanjutnya *disbursement* paket penyelamatan IMF dan Bank Dunia serta program-program bantuan kemanusiaan yang baru. (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; van Zanden dan Marks, 2012; Ricklefs, 2008).

Upaya keras yang dilakukan oleh Habibie dan tim ekonominya membuahkan hasil. Pada bulan Oktober 1998, rupiah menguat sekitar Rp 8000 terhadap dollar AS dan inflasi menurun drastis. Beberapa ekspor kunci nonmigas juga menunjukkan tanda-tanda kepulihan. Setahun kemudian, pada Juni 1999 rupiah sempat menguat di kisaran Rp 6.700 per dollar AS. Habibie berhasil mencegah ekonomi Indonesia berada di ambang kehancuran. Namun demikian, pada masa Habibie akibat terbongkarnya skandal Bank Bali dan masalah Timor Timur, pemulihan ekonomi terhambat dan kepercayaan internasional menurun. (van Zanden dan Marks, 2012; Ricklefs, 2008).

Walau telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan, kondisi ekonomi Indonesia selepas pemerintahan Habibie belum stabil. Ekonom Universitas Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan utang luar negeri menyentuh angka 80 miliar dollar AS. Di satu sisi rekapitalisasi perbankan mencapai Rp 570 triliun. Beberapa permasalahan ekonomi lain yang masih terjadi pada masa transisi adalah penyalahgunaan program JPS (Jaring Pengaman Sosial) sebesar Rp 8 triliun. Di satu sisi para investor luar

negeri beralih ke negara tetangga. Pada Januari-Agustus 1999, nilai investasi Jepang menurun sebesar 70%. Angka pengangguran langsung dan tidak langsung akibat krisis masih mencapai 60,76 juta orang. Selain itu, praktik inefisiensi dan pemborosan ekonomi akibat pola ekonomi besar yang berkait dengan patron-patron politik tingkat tinggi serta maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih belum tertangani secara tuntas. Permasalahan ini menjadi tugas berat bagi pemerintahan Abdurrahman Wahid dan jajaran kabinetnya. (Radjab, 1999; van Zanden dan Marks, 2012; Ricklefs, 2008).

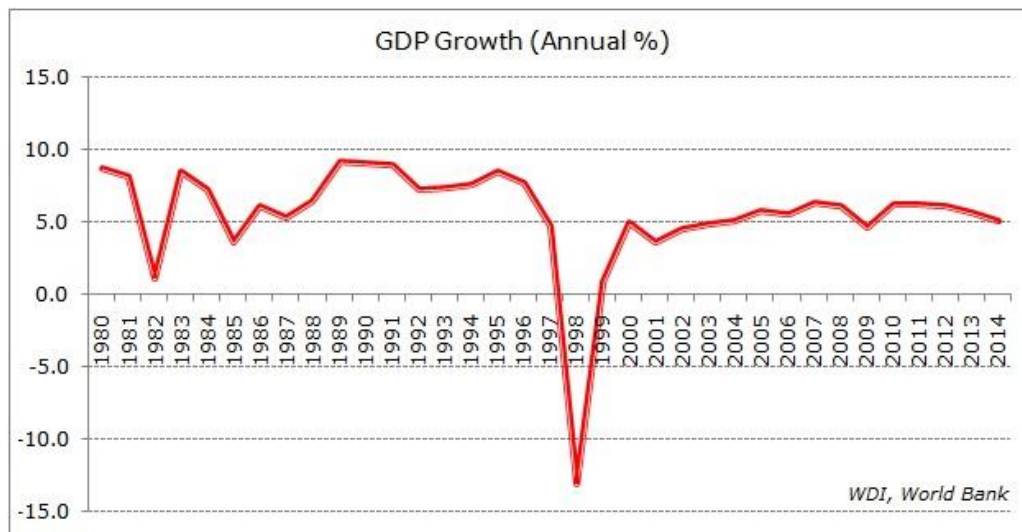
Terdapat beberapa catatan tentang pemulihan perekonomian pada masa Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada Januari 2000 kembali dilakukan penandatanganan persetujuan ketiga dengan IMF dan berlanjut sampai Desember 2002. Konsekuensinya, ada beberapa agenda jangka menengah meliputi: (1) kerangka makroekonomi jangka menengah, (2) kebijakan restrukturisasi, (3) menata ulang institusi perekonomian, serta (4) memperbaiki manajemen sumber daya alam. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan program karena kurangnya koordinasi antara menteri-menteri ekonomi serta konflik antara pemerintah dengan Bank Indonesia yang baru mendapatkan status independen. Di satu sisi, terdapat ketidakpastian dalam susunan kabinet. Selain itu, desentralisasi (otonomi daerah) serta memburuknya hubungan pemerintah dengan parlemen juga membuat reformasi ekonomi pada periode ini kurang berjalan mulus. (Chairudin, 2011b)

Pada masa Gus Dur, pertumbuhan perekonomian mendekati 5%. Namun, kondisi ini belum mampu mengembalikan ekonomi Indonesia seperti sebelum krisis. Walaupun ekspor di tahun 2001 meningkat, kondisi perekonomian internasional justru tidak mendukung karena pada masa itu Amerika Serikat dan Jepang justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dua negara tersebut merupakan tujuan utama ekspor Indonesia. Di satu sisi rupiah kembali melemah di kisaran Rp 11.000, sehingga menyebabkan lesunya sektor riil dan moneter serta terjadinya lonjakan biaya restrukturisasi utang luar negeri. Selain itu, harga kebutuhan pokok di pasaran semakin meningkat. (Hakim dan Giovani, 2012; Aswicahyono, 2007)

Pergantian pemerintahan dari Gus Dur ke Megawati ternyata cukup memberi kepercayaan dan optimisme di kalangan masyarakat dan investor. Segera setelah kabinet baru dilantik, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mengalami penguatan dari

Rp 9.337 menjadi Rp 9.100. Program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah privatisasi BUMN, pengelolaan hutang luar negeri, restrukturisasi keuangan, dan usaha kecil menengah. Pada masa Megawati, di tahun 2002, perekonomian telah tumbuh 3,7% meningkat dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi kondisi ini belum didukung oleh struktur yang seimbang. Pada pidato kenegaraan di tahun 2004, Megawati melaporkan beberapa kemajuan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari target yang ditentukan sebesar 4,8% walau masih berada di bawah potensi perekonomian Indonesia dan belum mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Selain itu diperkirakan pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,4%. (Hakim dan Giovani, 2012; Aswicahyono, 2007; Zanden dan Marks, 2012)

Dalam pembangunan stabilitas makroekonomi, pemerintahan Megawati dinilai cukup berhasil. Hal ini disebabkan kebijakan pengembangan kelembagaan, independensi Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan moneter, serta penataan ulang Kementerian Keuangan. Namun demikian, ada beberapa catatan dalam penyelenggaraan reformasi “mikro” di bidang perekonomian yang ditandai dengan investasi asing langsung yang negatif. Buruknya iklim investasi di akhir pemerintahan Megawati didorong lambatnya usaha privatisasi oleh karena sikap pemerintah yang ambivalen terhadap konsep privatisasi serta pembatalan UU Kelistrikan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2003. Di dalam UU ini terdapat kesempatan untuk meningkatkan partisipasi swasta melalui terbuka melalui *unbundling* di sektor kelistrikan yang diharapkan mampu menurunkan biaya listrik bagi konsumen. Secara keseluruhan, pemerintahan Megawati telah mampu memulihkan kembali stabilitas ekonomi, tetapi masih lemah dalam mempercepat pertumbuhan. (Aswicahyono, 2007; Zanden dan Marks, 2012)



Gambar 8. Pertumbuhan Produk Domesti Bruto (%) sejak 1980-2014
Sumber: investopedia.com

Reformasi tidak hanya mengubah aspek politik dan ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial budaya masyarakat. Salah satu capaian penting sebagai dampak reformasi adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Pada 26 Oktober 1998, pemerintah berhasil mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 dan sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.” (Chairudin, 2011a)

Pada masa Habibie, pengetatan terhadap penerbitan media massa dikendurkan dan membebaskan siapapun untuk menerbitkan media. Selain itu, dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Melalui undang-undang tersebut, dihapuskan Surat Ijin Usaha Perusahaan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Dengan dicabutnya SIUPP kewenangan Departemen Penerangan dalam mengawasi dan menekan media massa menjadi berkurang. Hal ini menjadi penanda keberhasilan pencapaian reformasi dalam aspek penyuaran aspirasi.

Satu capaian penting dalam hal sosial budaya ditorekhan oleh Abdurrahman Wahid. Ia dikenal sebagai sosok yang mendorong pluralisme dan keterbukaan. Perhatiannya kepada kelompok minoritas telah membawanya tampil sebagai sosok penting pembawa perdamaian bangsa. Salah satunya adalah perhatian besar Gus Dur terhadap masyarakat Tionghoa. Pada masa Orde Baru melalui Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang agama kepercayaan dan adat istiadat Cina, aktivitas sosial budaya masyarakat keturunan Tionghoa sangat terbatas. Berbagai perayaan adat dilarang untuk dilakukan di muka umum. Oleh karena itu, Gus Dur mencabut inpres tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2000. Setelah itu, aktivitas sosial budaya masyarakat Tionghoa menjadi lebih terbuka. Oleh pemerintah imlek ditetapkan sebagai libur nasional dan Konghucu diakui sebagai salah satu agama resmi perhatiannya yang sangat besar terhadap etnis tionghoa mengantarkan Gus Dur dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa. (Ricklefs, 2008; Chairudin, 2011b)

C. Masalah Pertahanan dan Keamanan serta Ancaman Disintegrasi

Reformasi memberi pekerjaan rumah yang sangat besar dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam negeri. Tindak kekerasan yang berhasil ditekan melalui kekuatan represi pada masa Orde Baru menjadi tidak dapat dikendalikan. Sebagian besar dilatarbelakangi oleh konflik etnis dan agama. Tidak lama setelah Habibie dilantik, kerusuhan besar kembali melanda. Di Purworejo sekelompok orang menyerang lima gereja pada Juni 1998. Di Jepara pada Juli 1998 terjadi perseteruan berakhir dengan pembakaran dan penjaranan toko. Di Jember, beberapa rumah dan usaha masyarakat Tionghoa dihancurkan. Di Cilacap ribuan nelayan turun dalam kerusuhan anti-Cina pada bulan Agustus. Sementara itu di daerah Jawa Timur beredar isu tentang dukun santet dan “ninja” yang meresahkan. Akibatnya, ratusan orang terbunuh karena isu ini. Di Kalimantan, terjadi sentimen antara masyarakat lokal dengan pendatang dari Madura yang mengakibatkan serangkaian konflik dan pembantaian. Di Kupang (30 November 1998) dan Ambon (Januari 1999) kerusuhan terjadi. (Ricklefs, 2008)

Di pusat negara, kerusuhan juga tidak terbandung. Pada masa Sidang Istimewa di bulan November 1998, mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi yang berakhir dengan bentrok pada 11-13 November 1998. Dalam insiden ini, 17 orang

meninggal. Sementara itu akibat penolakan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya terjadi demonstrasi dan bentrok antara mahasiswa dan aparat pada 24 September 1999. Kejadian ini mengakibatkan seorang mahasiswa meninggal dan ratusan lainnya luka-luka. Ke dua peristiwa ini disebut sebagai Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II. (Ricklefs, 2008)

Konflik bernuansa agama terbesar terjadi di Maluku. Konflik Maluku terjadi selama berkepanjangan sejak 1999-2002. Menurut survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Maluku menduduki posisi teratas sebagai kasus kekerasan terbutuk setelah reformasi. Ribuan warga meninggal akibat konflik dan puluhan ribu lainnya mengungsi. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukanlah Perjanjian Malino II pada 13 Februari 2002. Akan tetapi, setelah itu masih ada gejolak. Konflik ini baru benar-benar tuntas pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selain masalah Maluku, ada pula konflik di Poso yang berlangsung selama 1998-2001, bahkan menimbulkan dampak sampai dengan 2007. Konflik Poso berjalan lama dan berlangsung dalam lima tahapan besar. Dalam tahun-tahun itu, ke dua wilayah itu dilanda situasi yang mencekam. Melalui Perjanjian Malino pada 20 Desember 2001, konflik Poso secara bertahap mulai dipadamkan. (Ricklefs, 2008; Madinier, 2017)

Di awal reformasi, beberapa daerah menjadi sangat rentan untuk melepaskan diri dari Indonesia karena berbagai permasalahan dan warisan pendudukan pada masa Orde Baru. Ke tiga daerah tersebut adalah Timor Timur, Papua, dan Aceh. Timor Timur pada mulanya adalah daerah koloni Portugal. Karena pergolakan pada 1974, Portugis merencanakan untuk menempuh referendum. Akan tetapi penentuan pendapat gagal karena terjadi perang saudara di Timor Timur. Partai Fretilin menyatakan kemerdekaan Timor Timur pada 25 November 1975, tetapi lawan politiknya menyatakan integrasi dengan Indonesia. Akibatnya keadaan semakin keruh. Pada situasi ini militer Indonesia merasa perlu untuk masuk ke wilayah Timor Timur. Akan tetapi, tindakan ini menuai kecaman dari pihak Portugis yang membawa masalah Timor Timur ke Majelis Umum PBB pada 1975. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi untuk meminta penarikan pasukan Indonesia di Timor Timur. Masuknya Timor Timur ke wilayah Indonesia pada akhirnya tidak tuntas dibahas di PBB. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 wilayah ini sudah terlanjur diakui sebagai wilayah Indonesia. (Fernandes, 1989)

Belum selesainya masalah Timor Timur akhirnya mengemuka kembali setelah Reformasi. Kelompok-kelompok yang menghendaki kemerdekaan mendapatkan angin segar setelah selama Orde Baru mereka mendapat tekanan besar dari militer. Melihat situasi ini, Habibie menawarkan pemberian status otonomi yang luas untuk Timor Timur. Akan tetapi, tawaran ini ditolak oleh Ramos Horta dan tokoh perjuangan Timor Timur lainnya. Karena situasi yang kian memanas dan adanya tekanan secara internasional, Habibie menawarkan pilihan referendum bagi Timor Timur. Pada akhirnya di tanggal 5 Mei 1999 ditandatangani Persetujuan New York yang diikuti oleh menteri luar negeri Indonesia dan Portugal dengan disaksikan Sekjen PBB, Kofi Annan. Persetujuan itu berisi tentang kesepakatan melaksanakan penentuan pendapat di Timor Timur. (Ricklefs, 2008; Madinier, 2017)

Referendum berhasil dilaksanakan dengan tenang dan tertib pada 30 Agustus 1999 dan diumumkan hasilnya pada 4 September 1999. Hasilnya adalah sebanyak 446.953 suara yang masuk (98,6% dari seluruh pemilih) terdapat 78,5% yang menghendaki merdeka. Akan tetapi situasi yang tenang berubah mencekam ketika milisi pro-integrasi melakukan serangkaian teror. Akibatnya di sana diberlakukan darurat militer. Karena tekanan internasional, pemerintah mengundang pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk bersama-sama memulihkan keadaan. Sejak itu, situasi Timor Timur berangsur pulih. Akan tetapi, Indonesia mengalami kehilangan salah satu provinsinya. (Ricklefs, 2008; Madinier, 2017)

Masalah Organisasi Papua Merdeka juga menjadi hal yang menyedot perhatian dari pemerintahan Habibie hingga Megawati. Pada Juli 1998 terjadi demonstrasi OPM di Biak yang mengakibatkan 3 orang tewas tertembak aparat. Rentetan peristiwa itu makin membesar hingga pada September 1999 masyarakat membakar gedung DPRD provinsi dan bangunan yang lain. Tuntutan merdeka di kalangan masyarakat Papua mendorong Gus Dur untuk melakukan beberapa tindakan. Dalam kunjungannya ke Papua, ia menyetujui perubahan nama dari Irian Jaya ke Papua. Selain itu, ia juga memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora awalkan posisinya lebih rendah dari bendera merah putih. Di masa Gus Dur ditandatangani UU Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat, walaupun baru satu yang terealisasi, yakni Irian Jaya Barat. Provinsi ini pada 2007 diubah namanya

menjadi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007. (Ricklefs, 2008; Chairudin, 2011b; Madinier, 2017)

Upaya memberikan perhatian kepada Papua digagas oleh pemerintahan Gus Dur melalui pemberian otonomi khusus. Kemudian pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, gagasan itu disahkan dalam UU Nomor 21 tahun 2001 yang mengatur otonomi khusus di Papua. Namun demikian, permasalahan di Papua kembali memanas ketika Pemimpin Besar Dewan Papua Merdeka sekaligus Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay tewas secara mengenaskan.

Di awal reformasi, pemerintah dihadapkan pada permasalahan Aceh. Sejak tahun 1990 sampai 1998 di Aceh diterapkan Daerah Operasi Militer (DOM) yang mengakibatkan aroma kekerasan yang meningkat. Akibatnya kebencian terhadap militer dan pemerintah pusat kian berlipat. Hal ini mendorong makin menguatnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di sana. Sebagai dampaknya, frekuensi kerusakan makin meningkat. Pada Mei 1999, bentrokan antara militer dan masyarakat bahkan mengakibatkan 30 orang meninggal dan ratusan luka-luka. Serangan balasan kemudian dilakukan oleh kelompok separatis dengan menyerang ABRI, sehingga sejumlah anggota militer tewas. Saling serang antara militer dan kelompok separatis terjadi lagi. Kali ini menewaskan lebih dari 50 orang terdiri atas Teungku Bantaqiah, keluarga, dan murid-muridnya. (Ricklefs, 2008)

Permasalahan Aceh belum tertangani pada periode Habibie, sehingga pada masa Gus Dur, ia bahkan secara langsung menangani permasalahan ini. penuntasan masalah Aceh tercapai pada periode Megawati ketika undang-undang baru disahkan. Pada 9 Agustus 2001 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 18 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Setelah undang-undang disahkan, di Aceh berlaku penetapan hukum Islam. Selain itu dijanjikan pembagian 70% pendapatan untuk daerah dan keleluasaan untuk memilih gubernur. Pemberlakuan ini akhirnya membuka jalan perdamaian antara pemerintah dan GAM. Pada Desember 2002 perundingan damai dilangsungkan pada 2002 di Jenewa antara GAM dan pemerintah Indonesia atas sponsor pemerintah Thailand dan Filipina. Setelah itu, gencatan senjata dilakukan. Tsunami tahun 2004 kemudian mendorong dilakukannya perundingan Helsinki pada

Agustus 2005 yang menandai berakhirnya perseteruan. (Ricklefs, 2008; Madinier, 2017)



Gambar 9. Jusuf Kalla dan Penanganan Konflik
Sumber: detik.com

Selain permasalahan domestik, terdapat pula tantangan global dalam aspek pertahanan dan keamanan. Semenjak terjadinya serangan teror di Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang meruntuhkan gedung *World Trade Center* (WTC), kebijakan baru dalam melihat permasalahan terorisme diterapkan. Ternyata jaringan terorisme telah berkembang dan muncul secara mengejutkan. Hal ini pula yang juga terjadi di Indonesia, terutama pada masa Megawati Soekarnoputri. Jaringan terorisme

~ Tsabit Azinar Ahmad ~

Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan
© Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

yang terhubung ke tingkat global mulai melakukan penyerangan. Pertama-tama adalah serangan di Bali pada 12 Oktober 2002. Serangan ini dikenal dengan istilah Bom Bali I. Sebanyak 200 orang meninggal serta melukai sejumlah lainnya. Kedutaan besar Australia juga tidak luput dari penyerangan pada 9 September 2004. Sejak itu, perhatian terhadap penanganan masalah terorisme menjadi salah satu perhatian pemerintah. (Ricklefs, 2008; Madinier, 2017)

Di bidang kelembagaan, aspek pertahanan dan keamanan ditandai dengan adanya reformasi militer dan kepolisian. Setelah Reformasi 1998 terjadi perubahan dalam paradigma perpolisian dari yang semula militeristik mengarah kepada perpolisian yang bersifat sipil. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang berisi Langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara RI dari Angkatan Bersenjata RI. Dengan inpres ini, istilah ABRI digantikan dengan TNI. Kemudian, pada masa presiden Abdurrahman Wahid, keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 1 Juli 2000. Keppres ini menyuratkan bahwa kedudukan Polri berada di bawah presiden. Selain itu, lahir Ketetapan MPR/VII/2000 tentang pemisahan dan peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI dibawah Departemen Pertahanan, sementara Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri. (Ricklefs, 2008; Chairudin, 2011b; Madinier, 2017)

D. Rangkuman

Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan materi tentang kehidupan politik dan ekonomi di awal reformasi. Dengan demikian, Anda diharapkan mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dalam modul ini adalah sebagai berikut.

1. Reformasi telah mendorong perubahan besar dalam perpolitikan di tingkat nasional sampai daerah. Lima tahun setelah reformasi, telah terjadi tiga kali

pergantian presiden. Pada masa itu, perubahan politik sudah sangat terasa, hingga akhirnya melalui pemilu 2004 masyarakat dapat memilih secara langsung wakilnya untuk duduk di parlemen serta presiden dan wakilnya. Pada tahun-tahun ini pula, partai politik bermunculan, sehingga mengembalikan pemilihan umum seperti sebelum Orde Baru. Sifat sentralisasi pemerintahan telah berubah menjadi sangat desentralistik dengan adanya otonomi.

2. Krisis keuangan Asia telah membawa Indonesia memasuki keterpurukan. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk dapat mengembalikan kondisi ekonomi seperti sebelum krisis. Berbagai upaya dilakukan sampai pada akhirnya Indonesia kembali bangkit, walau masih dengan keterbatasan. Di satu sisi reformasi juga telah membawa perubahan dalam kondisi masyarakat. Keterbukaan dalam menyampaikan gagasan dan akomodasi terhadap kepentingan-kepentingan minoritas menemukan momentum untuk bangkit.
3. Pada bidang pertahanan dan keamanan, serangkaian konflik dan kekerasan pecah. Selain itu ancaman disintegrasi juga mengintai. Tiga wilayah di awal reformasi menjadi rentang untuk memisahkan diri, yakni Timor Timur, Aceh, dan Irian Jaya. Pemisahan wilayah akhirnya terjadi dengan dilakukannya referendum di Timor Timur. Untungnya, perpecahan tersebut tidak merembet ke daerah lain. Penyelesaian konflik pada tiap kepemimpinan hampir tidak pernah tuntas, terutama pada masa awal Reformasi. Hal ini tidak lain karena jalannya pemerintahan sangatlah singkat.

Daftar Pustaka

- Aning S, Floriberta. 2005. *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*. Yogyakarta: Narasi.
- Aswicahyono, Haryo dan David Christian. 2007. *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*. Economics Working Paper 02-2017. CSIS Working Paper Series.
- Chairudin. 2011a. *Jasa-Jasa Presiden RI: B.J. Habibie*. Boyolali: Hamudha Prima Media.
- Chairudin. 2011b. *Jasa-Jasa Presiden RI: Abdurrahman Wahid*. Boyolali: Hamudha Prima Media.
- Chairudin. 2011c. *Jasa-Jasa Presiden RI: Megawati Soekarnoputri*. Boyolali: Hamudha Prima Media.
- Fernandes, Frans S. 1989. *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hakim, Abdul dan Guswildan Giovani. 2012. "Perbandingan Perekonomian dari masa Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009)." *Ekonomika-Bisnis*, 3(2): 161-180.
- Juwono, Vishnu. 2001. "Abdurrahman Wahid dan Agenda Pasca-SI MPR. Dalam *Perjalanan Politik Gus Dur*. 2010. Jakarta: Kompas. Hlm. 252-260.
- Madinier, Rémy. 2017. "Dari Revolusi hingga Reformasi: Perjalanan Mutasi Politik yang Tak Kunjung Selesai." Dalam Rémy Madinier (ed). *Revolusi Tak Kunjung Selesai Potret Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia & IRASEC. Hlm. 129-185.
- Musa, Ali Masykur. 2010. *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto (ed). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Radjab, Suryadi A. 1999. "Presiden Gus Dur dan Perbaikan Ekonomi." Dalam *Perjalanan Politik Gus Dur*. 2010. Jakarta: Kompas. Hlm. 31-37.
- Ricklefs, M.C. 2010. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Terjemahan. Jakarta: Serambi.
- Sekretariat Jenderal KPU. 2010. *Pemilu untuk Pemula*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Simanjuntak, P.N.H. 2003. *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Litbang Kompas. 1999. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi, Strategi, dan Program*. Jakarta: Kompas.
- Van Zanden, Jan Luiten dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Kompas dan KITLV.

**PERAN PELAJAR, MAHASISWA, DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM
PERUBAHAN POLITIK DAN KETATANEGARAAN INDONESIA**

Ibnu Sodik

Pada penghujung akhir abad ke-20 Indonesia mengalami peristiwa politik yang cukup menarik perhatian masyarakat yaitu dengan terjadinya perubahan arah politik dari politik otoriter berubah menjadi politik yang lebih humanis dan demokratis. Semua sepakat bahwa sebelum terjadinya perubahan situasi politik memang tidak “bersahabat”. Suasana tegang karena kebijakan politik yang represif selalu menghantui kehidupan warga. Kebebasan berpolitik yang semestinya menjadi hak dasar setiap warga dapat dikatakan telah terampas oleh arogansi kekuasaan. Warga terbelenggu dengan harus mengikuti apa yang menjadi kehendak penguasa. Tidak ada satu warga bangsapun yang merasa tidak tertekan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang begitu represif dalam menjalankan roda pemerintahannya. Semua serba diatur, dikendalikan dan tidak ada yang boleh berbeda. Bagaikan koor paduan suara semua harus sama dengan pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam sejarah Indonesia periode ini dikenal dengan nama Orde Baru, orde dimana kebebasan berdemokrasi tidak diberikan oleh pemerintah kepada warga bangsanya.

Orde Baru merupakan istilah untuk menyebut pemerintahan yang terbentuk pasca tumbangannya pemerintahan sebelumnya yaitu pemerintahan Soekarno yang dikenal dengan nama Orde Lama. Pada masa pemerintahan Orde Lama terjadi peristiwa yang memilukan bagi segenap warga bangsa yaitu terjadinya pemberontakan G 30 S PKI yang didalangi Partai Komunis dalam upaya “merebut” kekuasaan dari tangan Soekarno. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1965, tepatnya pada bulan September dimana dalam peristiwa tersebut terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para Jendral AD yang kemudian jasadnya ditemukan di suatu tempat yang kemudian tempat tersebut dikenal dengan nama Lubang Buaya. Pembunuhan ini diawali karena adanya informasi bahwa ada dewan jendral yang berencana akan melakukan coup de’tat terhadap kekuasaan Soekarno. Oleh karena itu, sebelum para jendral melakukan rencananya, maka

dilancarkanlah operasi penculikan terhadap para Jendral AD yang dicurigai akan melakukan perebutan kekuasaan yang dimaksud.

Penculikan dan pembunuhan inilah yang kemudian memicu kemarahan yang begitu hebat rakyat Indonesia dengan apa yang dilakukan PKI. Rakyatpun kemudian bergerak melakukan “pembersihan” terhadap PKI di seluruh Indonesia. Gerakan pembersihan ini berjalan secara spartan dan cepat. Semua ini tidak terlepas dari dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya RPKAD dibawah pimpinan Sarwo Edi, sehingga dalam waktu relative singkat situasi dan kondisi politik yang sebelumnya begitu panas mulai kondusif dan tenang kembali.

Untuk mempercepat memulihkan kondisi politik, Soekarno sebagai presiden dan panglima tertinggi angkatan bersenjata kemudian menerbitkan surat yang dikenal dengan SUPER SEMAR, Surat Perintah Sebelas Maret yang isinya memberi kekuasaan kepada Jendral Soeharto untuk memimpin mengembalikan situasi aman dan menjaga kehormatan, keamanan Soekarno selaku kepala Negara. Dengan berbekal surat perintah inilah kemudian Jendral Soeharto memulai “menata” Indonesia dengan membersihkan pemerintahan dari pengaruh Komunis pada semua lini.

Surat perintah dari Soekarno inilah yang secara tidak langsung mengantarkan Jendral Soeharto dapat menduduki jabatan tertinggi sebagai kepala “Negara” Dengan lain perkataan, dengan surat tersebut Soeharto bisa melakukan kebijakan politik sesuai dengan yang dikehendaki karena ia berada pada posisi yang memungkinkan untuk itu.

Untuk segera mewujudkan situasi dan kondisi politik sebagaimana yang diharapkan langkah yang dilakukan Soeharto yaitu dengan melakukan “penyederhanaan” dan pengaturan terhadap partai politik Penyederhanaan ini tentu untuk memudahkan mengontrol terhadap partai-partai yang pada masa Soekarno begitu banyak. Hasil penyederhanaan tersebut terbentuklah dua partai dan satu golongan yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. Kedua partai dan satu golongan inilah yang kemudian mengikuti pemilu pada tahun 1973. GOLKAR akhirnya menjadi pemenang pada pemilu tahun 1973 dengan demikian Soehartolah yang kemudian menjadi Presiden karena ia didukung suara mayoritas dalam parlemen.

Terpilihnya Soeharto menjadi presiden menandai Indonesia memasuki babak baru yang sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pada periode ini, dengan alasan untuk mempercepat program pembangunan maka tidak boleh ada perbedaan dalam

melahirkan sebuah kebijakan, semua harus sama dan terpusat. Sistem pemerintahan sentralistiklah yang kemudian dipilihnya dalam menjalankan roda pemerintahannya. Disatu sisi pilihan ini tidaklah salah karena dengan system ini kebijakan politiknya dalam rangka pembangunan dapat dengan cepat terlaksana, sehingga kesejahteraan masyarakat juga menjadi kenyataan. Namun disisi lain, pilihan politik yang sentralistik justru menggiring Soeharto terjerembab dan semakin menjauh dari pemerintahan yang demokratis. Dikemudian hari pemerintahannya justru menjadi pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan yang tidak mengedepankan demokrasi akan tetapi pemerintahan yang kekuasaannya ada disatu tangan yaitu pada dirinya, pemerintahan yang totalitarian. Sistem pemerintahan yang sesungguhnya bertentangan dengan asas demokrasi. Dikatakan bertentangan dengan asas demokrasi karena rakyat tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan mesti sesungguhnya pada pemerintahan Orba perangkat pendukung dalam sebuah pemerintahan yang demokratis sudah tersedia. Namun perangkat pendukung yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, perangkat-perangkat tersebut hanya sebuah asesoris demokrasi semata. Berkaitan dengan masalah ini Carl Freidrich mengatakan pemerintahan yang totalitarian selalu ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. *An Ideology explaining the word, human society and history (including its ultimate goal) an ideology which is to be propagated by all citiziens; 2. The concentration of socialand political power in one party (usually dominated by one leader); 3. The imidation of the people through legal insecurity and arbritrary police terror; 4. A state monopoly of the meansof information and communications; 5. A centralized and more or less planned economy* (Ibnu Sodiq, 2008 : 5, 28).

Kebijakan yang telah berjalan dalam waktu panjang tersebut akhirnya dianggap sebagai kebijakan yang salah, kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Akibat yang ditimbulkannya yaitu memicu kemarahan pada semua warga bangsa yang kemudian ramai-ramai berdemo menuntut Soeharto mundur dari tampuk pemerintahan yang telah dikuasahnya lebih kurang 32th lamanya. Akhirnya pada bulan Mei 1998 Soeharto meletakkan jabatannya setelah gelombang demonstrasi yang dipelopori mahasiswa semakin massif dan tidak dapat dibendung lagi. Dengan mundurnya Soeharto maka pemerintahan yang dalam sejarah Indonesia dikenal dengan periode Orde Baru berakhir yang kemudian diganti dengan Order Reformasi dengan ditandai terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden.

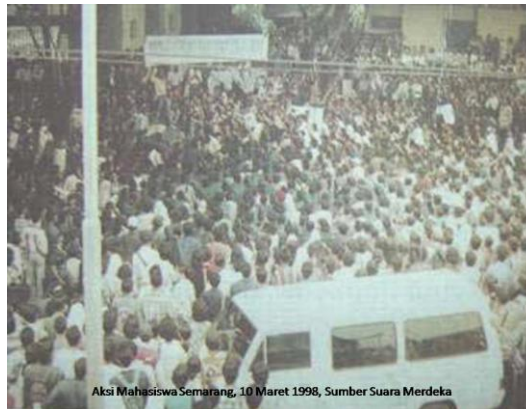
Berawal dari aksi pada hari jum'at 16 Januari 1998 dimana sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan aksi keprihatinan mensikapi atas melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tidak terkendali. Jeritan rakyat akibat harga-harga kebutuhan pokok tidak terbeli didengar oleh mereka. Sebagai jawabannya mereka berkumpul, kemudian melakukan aksi untuk menyuarakan kegelisahan rakyat di kampus mereka. Aksi di ITB tersebut akhirnya didengar dan kemudian diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di universitas lainnya. Bagaikan efek domino aksi di ITB kemudian disusul oleh mahasiswa UI sehingga pada hari Kamis 19 Februari 1998, 1000 mahasiswa Universitas Indonesia melakukan aksi demo didalam kampus UI Depok, Jawa Barat. Isu yang dicanangkan pada aksi itu adalah agar ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok murah segera diatasi. Selain itu mahasiswa juga menuntut dibukannya lapangan pekerjaan untuk mengatasi masalah pengangguran yang sedang terjadi. Aksi mahasiswa UI ternyata mendapat dukungan dari para petinggi kampus hal ini dibuktikan ketika aksi yang dilakukan pada hari Rabu 25 Februari 1998 Prof Dr Mahar Mardjono, mantan Rektor UI dan Prof Dr Sri Edi Swasono, dosen UI bergabung dan menjadi pembicara dalam mimbar bebas yang diselenggarakan di kampus UI Salemba, Jakarta.

Ketika Sidang Umum MPR 1998 pada tanggal 2 Maret 1998 sedang berlangsung di Jakarta dengan agenda pengangkatan kembali Soeharto sebagai presiden. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di berbagai kota bentrok dengan aparat keamanan. Pengangkatan kembali Soeharto untuk kembali menjadi presiden yang disepakati oleh semua anggota MPR semakin membuat marah mahasiswa. Aksi mereka semakin luas dan semakin agresif, Mahasiswa menuntut terjadinya perubahan dan hal itu tidak bisa ditunda lagi. Perubahan menuju pada kondisi yang lebih baik harus segera dilakukan. Hasil sidang umum yang memutuskan untuk mengangkat kembali Soeharto sebagai presiden yang ke 7 kalinya justru berakibat pada semakin seringnya mahasiswa melakukan aksi-aksinya. Dengan seringnya aksi, secara tidak langsung benntrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan volumenya juga sering terjadi. Di Bandung misalnya, bentrokan terjadi dikarenakan mahasiswa yang hendak melakukan aksi long march dari Kampus Universitas Padjajaran (Unpad) ke gedung DPRD Tingkat 1 Jawa Barat. Oleh karena masing-masing pihak tetap bersikeras dengan tujuan masing-masing,

aksi tersebut berakhir dengan bentrokan akibatnya dua mahasiswa terluka akibat dari bentrok tersebut.

A. Peran pemuda masa reformasi

“Berikan aku sepuluh pemuda akan aku ubah dunia”, demikian Soekarno ketika ia diminta pendapatnya tentang pemuda. Soekarno benar, bahwa pemuda merupakan kelompok yang mempunyai ciri yang berbeda dengan kelompok lainnya. Ketika kita membicarakan pemuda maka yang ada dalam pikiran kita adalah kelompok masyarakat yang mempunyai semangat tinggi, dinamis, kritis serta cepat dalam bertindak. Oleh sebab itu, dalam sejarah pemuda sering menjadi penentu dalam sebuah perubahan. M. Hatta 1966 memiliki gagasan bahwa hanya pemuda yang sanggup mengubah tatanan social yang membungkus ketidakadilan, karena pemuda masih murni jiwanya dan ingin melihat pelaksanaan kebijakan pemerintah secara jujur seperti yang telah dijanjikan pada rakyat; dan pemuda dalam status mahasiswa pada pencarian kebenaran, maka wajar jika mahasiswa yang begitu peka terhadap keburukan praktek politik dalam sejarah Indonesia. Pemuda merupakan manusia yang bertanggung jawab di masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah masanya pemuda sekarang. (Daya Negri Wijaya, 2013)



Gambar 1. Aksi Mahasiswa Semarang 10 Maret 1998

Sumber: ferdiasbookelmann.wordpress.com

Dalam Sejarah Indonesia posisi dan peran pemuda sangat begitu menonjol. Sejarah pergerakan Nasional, sejarah perang kemerdekaan sampai sejarah reformasi peran dan posisi pemuda tidak dapat diremehkan, sehingga benar jika pemuda dan mahasiswa merupakan *agent of change* dalam sejarah bangsa Indonesia. Mereka akan bergerak ketika mereka melihat ketidak beresan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintahan Orba yang berkuasa selama lebih kurang 32 th akhirnya harus berakhir ketika gelombang

~ Ibnu Sodik ~

demonstrasi pemuda mahasiswa semakin hari semakin massive dan sulit untuk dibendung. Gerakan ini dikemudian hari dikenal dengan gerakan reformasi mahasiswa Mei 1998. Pergerakan ini tidak datang secara tiba-tiba, mereka sudah bergerak jauh sebelumnya, mulai peristiwa Malari, penolakan terhadap NKK (normalisasi kehidupan kampus) dan ketidak setujuannya ketika Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Gerakan reformasi pemuda mahasiswa Tahun 1998 merupakan puncak dari perjuangan panjang mereka.

Pada awal tahun 1998, pemuda dan mahasiswa kembali melakukan pergerakan ketika mereka melihat bahwa pemerintah Orba dalam menjalankan roda pemerintahannya sudah jauh menyimpang dari cita-cita bangsa. Sebagai jawaban dari kondisi politik demikian, kemudian mereka berkumpul dan bergerak dengan satu tujuan yaitu melengserkan Soeharto dari kursi kekuasaannya. Akhirnya, berkumpullah Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, berhimpun menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dianggap ringan oleh siapa saja yang berhadapan dengannya. Dihampir semua kota-kota besar aksi keprihatinan digelar oleh mereka, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makasar dsb merupakan kota-kota yang tidak pernah sepi dari demonstrasi. Universitas-universitas ternama baik negeri maupun swasta tidak pernah sepi dengan aksi-aksi menuntut mundur Soeharto dari kursi presiden.

B. Gerakan mahasiswa dan reformasi

Aksi-aksi mahasiswa terus berlangsung pada tanggal 12 Maret mahasiswa UI kembali menggelar demo. Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr Amien Rais menjadi salah satu pembicara pada aksi tersebut. Ia disambut oleh ribuan mahasiswa UI pada rapat akbar yang diselenggarakan di depan Balairung Kampus UI Depok, Jawa Barat. Perlawanan mahasiswa dengan terus melakukan aksi semakin hari semakin tidak bisa dibendung di hampir semua kampus setiap hari mahasiswa menyelenggarakan aksi dengan tuntutan sama, yaitu menuntut perbaikan ekonomi dan politik. Aksi keprihatinan mahasiswa yang sebelumnya hanya diselenggarakan di dalam kampus akhirnya mulai bergerak keluar kampus. Akibatnya, bisa diduga bentrokan dengan aparat keamanan sebagai akibat dari aksi tersebut tidak dapat di hindari, akibatnya banyak korban luka-luka di pihak mahasiswa. Kerumunan massa dengan jumlah yang banyak yang diikuti dengan mobilitas tinggi dari mereka sangat memudahkan terjadinya kerusakan apalagi

ketika kanal-kanal untuk menyampaikan tuntutananya tersumbat (Sartono Kartodirjo, 1985).

Menanggapi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan dalam aksi-aksi keprihatinan di kampus, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiranto Arismunandar meminta kepada mahasiswa supaya dalam menyampaikan aspirasinya tidak amatiran dan jangan sampai melupakan peran dan fungsi orang lain. Ia mengingatkan supaya mahasiswa juga menghormati aparat keamanan yang mempunyai peran dan fungsi sebagai penjaga keamanan dan stabilitas keamanan. "masing-masing orang punya fungsi sendiri, jangan sampai itu tidak dimengerti" kata Arismunandar kepada wartawan ketika usai menerima rektor IKIP Negeri se-Indonesia di ruang kerjanya, pernyataan mendikbud dianggap oleh mahasiswa sebagai tindakan pelecehan dan penghinaan yang tidak bisa ditolerir.

Merasa mendapat angin dan dukungan pemerintah pihak keamananpun dalam menangani aksi-aksi mahasiswa semakin represif, aksi mahasiswa di Yogyakarta misalnya dihadapi dengan tindakan keras. Tindakan keras aparat memicu munculnya reaksi dan protes keras atas kekerasan terhadap aksi mahasiswa di kampus. Menanggapi kejadian tersebut Rektor UGM Yogyakarta Prof.Dr. Ichlasul Amal menyatakan reaksi aparat keamanan terhadap aksi keprihatinan mahasiswa Yogyakarta sudah berlebihan, menyebabkan puluhan mahasiswa terluka serta rusaknya berbagai fasilitas di kampus UGM.

Aksi keprihatinan terus berlanjut, hari Sabtu 4 April mahasiswa kembali melakukan aksi. Aksi tersebut dihadiri tidak kurang dari 25.000 mahasiswa dan juga barisan siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) Yogyakarta, yang tergabung dalam Gapci (Gabungan Pelajar Cinta Indonesia) dengan panji-panji OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Menanggapi aksi yang semakin hari semakin sering dengan jumlah massa yang cukup besar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais mengingatkan kepada pemerintah, bahwa aksi mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi harus ditangani secara tepat. Larangan terhadap aksi mahasiswa hanya akan memicu kemarahan mahasiswa dan dikhawatirkan kontra produktif. Baginya aksi mahasiswa tidak lain hanya cara mahasiswa dalam menuntut perbaikan ekonomi, menuntut reformasi, sama sekali bukan dalam menjalankan politik praktis, akan tetapi politik tinggi (*high politics*), yakni politik dalam tatanan etika dan moral yang tidak bisa lagi berdemonstrasi di

kampus, mereka akan mencari saluran lain yang semakin tidak terkendali dan menuju kepada anarkis,” kata Amien. Dia menambahkan, aksi mahasiswa dengan sendirinya akan mereda dan menghilang apabila pemerintah berhasil mengatasi krisis moneter.



Gambar 2. Mahasiswa Menduduki gedung DPR/MPR 1998

Sumber : <http://dynastisomat.blogspot.co.id>

Sementara itu beberapa ketua senat dari beberapa universitas berupaya untuk diberi kesempatan untuk dapat berdialog secara langsung dengan Presiden Soeharto terus dilakukan. Akan tetapi keinginan untuk dapat berdialog dengan Soeharto tidak berhasil. Meski keinginan berdialog tidak melanggar undang-undang, tetap saja Soeharto tidak merespon keinginan mahasiswa. Lewat menteri pertahanan dan keamanan Wiranto, Presiden meminta supaya perwakilan mahasiswa diterima oleh para menternya sebagai pembantu presiden. Keinginan untuk dapat berdialog dengan presiden secara langsung terus diusahakan, beberapa tokoh nasional yang dirasa bisa mengantarkan mereka ketemu presiden hubungi. Akan tetapi tetap saja Presiden Soeharto tidak bersedia dan tetap mendelagasikan kepada para mentrinya. Ketidak bersediaan Presiden Soeharto berdialog secara langsung dengan perwakilan mahasiswa justru semakin membuat mahasiswa kecewa. Akibatnya aksi mahasiswa semakin besar dan sulit dikendalikan dan akhirnya sampai puncaknya ketika mahasiswa berhasil menerobos dan menduduki gedung MPR DPR.

Berhasilnya mahasiswa masuk ke dalam gedung MPR DPR membuat gusar pihak istana. Kegusaran ini tentu saja tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya yaitu mundurnya beberapa menternya dari cabinet yang dipimpinnya. Dengan mundurnya beberapa menteri, berarti bahwa kestabilan pemerintahannya sedang dipertaruhkan, karena bisa berakibat pada jalannya pemerintahan. Pendudukan gedung parlemen oleh mahasiswa menambah kegusaran pihak istana yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto

meletakkan dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B. J. Habibie sebagai Presiden RI.

Aksi mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998 tidak terlepas dengan krisis ekonomi yang pada waktu itu. Krisis ekonomi sesungguhnya telah dimulai pada tahun 1997, akibat dari krisis ini menimbulkan pengaruh pada sektor lainnya, khususnya sektor politik yaitu mulai adanya kekacauan dan ketidakstabilan dalam politik Negara. Ada yang menyebut, bahwa krisis ekonomi yang terjadi bukan disebabkan penurunan nilai tukar rupiah semata akan tetapi sudah menuju pada ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Akibat dari adanya ketidakpercayaan berdampak pada krisis kepercayaan yang luar biasa. Tidak ada satu sektorpun yang tidak terkena dampak dari krisis kepercayaan tersebut. Di bidang hukum misalnya, hukum telah menjadi politik kekuasaan, sehingga jaminan keadilan dan kebenaran seolah-olah hanya merupakan sebuah mimpi. Aturan hukum disalah gunakan seenaknya sendiri dengan alasan demi stabilitas politik.

Sementara Kerusakan disektor ekonomi, tidak lebih baik bila dibanding dengan sektor politik dan hukum. Kesempatan berusaha bagi setiap pelaku ekonomi sangat sulit didapat. Krisis ekonomi telah mengancam sendi sendi kehidupan. Pengangguran karena kurangnya lapangan kerja menjadi pemandangan yang dapat disaksikan setiap harinya, hal ini karena kegiatan ekonomi dalam skala makro telah dikuasai dan dikangkangi oleh elit-elit ekonomi yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan politik. Elite-elite inilah yang memonopoli hampir semua kebutuhan rakyat. Dengan monopoli yang ada digenggamannya mereka dengan sangat mudah menentukan harga pasar sesuai dengan yang dikehendaki. Dampaknya harga-harga tidak terbeli karena harga-harga sulit dijangkau dengan kebutuhan yang pas-pasan.

Ketika pemerintah sedang sibuk mencari jalan keluar berkaitan dengan masalah ekonomi, mahasiswa sibuk mencari jalan keluar membantu masyarakat untuk bisa bertahan dari kelaparan, salah satunya dengan cara melakukan aksi. Upaya pemerintah mengatasi masalah ekonomi tidaklah mudah, sepertinya hampir semua komponen tidak lagi percaya dengan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan semakin sulitnya mempercayai setiap solusi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencoba mengatasi masalah perekonomian. Indikatornya adalah makin terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sangat mengherankan setiap kali pemerintah

membuat kebijakan baru nilai tukar rupiah terhadap dolar bukannya semakin membaik malah justru sebaliknya yaitu semakin semakin terpuruk. Pada tahun 1997 Indonesia memang dalam kondisi yang memprihatinkan. Bersama dengan mulainya krisis ekonomi, bencana alam juga sering menimpa Indonesia. Situasi ini ikut memperburuk kondisi Indonesia.

Lebih memprihatinkan lagi sebagaimana telah sedikit disebutkan di atas, pemerintah tidak mampu menghapus monopoli pasar yang dikuasai oleh elite yang dekat dengan kuasa. Akibatnya, rakyat tidak dapat mencari tempat lain dan hanya bergantung pada satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis" (wikipedia.org/wiki/Pasar_monopol. Diakses pada tanggal, 8 Juni 2011). Akibat dari semua ini, perekonomian menjadi lumpuh, hal itu juga membuat kondisi sosial masyarakat menjadi terganggu. Kondisi yang semacam ini menjadikan masyarakat kecil terus merasakan penderitaan yang berkepanjangan sementara mereka yang berpendidikan tinggi apalagi yang dekat dengan kuasa justru memiliki jabatan dan dapat hidup dengan begitu nyaman. Mereka dengan leluasa dapat mengambil kebijakan untuk menguntungkan diri dan golongannya dengan cara-cara yang tidak patut akhir dari semuanya yaitu melakukan tindakan yang tidak terpuji korupsi, kolusi dan nepotisme.

KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang marak pada waktu itu telah begitu banyak menguras kekayaan negara. Hal inilah yang dikemudian mendorong terjadinya gerakan massa, yang didalamnya melibatkan mahasiswa diseluruh penjuru negeri. Sebagai agen perubahan mahasiswa tentu tidak tinggal diam ketika melihat ketimpangan sosial yang sedang melanda negerinya. Oleh karena itu mereka menagambil peran dengan menjadi pelopor untuk merubah kondisi yang kurang baik menuju pada kondisi yang lebih sejahtera. Dengan kata lain, gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998 merupakan gerakan moral mahasiswa yang menghendaki adanya perubah ketika terjadi ketidakadilan sosial dalam masyarakat, dan sebagai gerakan moral, maka mereka tidak memiliki agenda kepentingan terhadap kekuasaan.

Harus diakui peran mahasiswa dalam sejarah reformasi bukanlah tanpa arti, tidak ada reformasi kalau tidak ada mahasiswa. Kelompok inilah yang begitu peduli ketika melihat ketidakadilan yang sedang menimpa masyarakat. Mahasiswalah salah satu

kelompok yang pertama kali mencetuskan dan mengobarkan semangat pembaharuan. Di dalam diri para mahasiswa hanya ada keyakinan bahwa seberat apapun krisis yang melanda hanya akan terselesaikan jika dilakukan pembenahan dengan cara reformasi. Oleh karena itu, reformasi adalah kata kunci yang harus dilaksanakan.

C. Kelompok Intelek dan Reformasi

Pemerintahan Orde Baru yang pada tahun 1980an merupakan pemerintahan yang cukup stabil ternyata memasuki tahun 1990an mulai memperlihatkan kekurangan-kekurangannya. Semua ini tidak lepas dari kebijakan ambil pemerintahan yang sangat sentralistik, pemerintahan yang terpusat, pemerintahan yang hanya ada pada satu tangan penguasa. Akibat dari kebijakan ini memunculkan kritikan tajam dari para elite yang berada diluar kekuasaan. Akan tetapi, semua kritikan yang dilontarkan tidak mendapat perhatian dan direspon serius pemerintahan. Meskipun Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat rata-rata 7,8%. Sehingga diramalkan tidak akan mengganggu jalannya pembangunan akan tetapi kenyataan dilapangan tidak seperti yang diramalkan Bank Dunia. Kondisi Indonesia tahun 1998 justru berada pada posisi yang sulit. Kondisi sulit diawali terjadinya krisis moneter dengan jatuhnya nilai kurs rupiah pada posisi Rp. 17.000 per US\$1 pada bulan Januari. Jatuhnya nilai tukar rupiah ini kemudian disusul adanya gelombang aksi mahasiswa diberbagai perguruan tinggi di Inonesia. Bermula dikota-kota besar seperti di Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Padang, Ujung Pandang (Makassar). Kemudian virusnya menyebar ke kota-kota lain di penjuru tanah air. (Nugroho dkk, 2013:18).

Sejak terjadinya krisis moneter pada bulan Juli 1997, aksi mahasiswa yang terjadi di kampus-kampus menjadi semakin menggelora. Kampus yang sebelumnya tenang karena keberhasilan pemerintah dalam membungkam suara kritis mahasiswa dengan program NKK BKKnya menjadi lebih dinamis. Dinamika kehidupan kampus secara perlahan-lahan tapi pasti tumbuh dan berkembang bagai cendawan di musim hujan di seluruh pelosok Nusantara. Beban berat kehidupan masyarakat yang diakibatkan daya beli masyarakat yang menurun karena mahalnya kebutuhan pokok, kemudian ditambah dengan rasa ketidakpuasan terhadap terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk memimpin Indonesia semakin meningkatkan rasa kekecewaan berbagai elemen masyarakat. Sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan yang ditandai dengan dominasi

GOLKAR sebagai partai pendukung pemerintahan sehingga menjadikan eksekutif begitu kuat peranannya merupakan faktor-faktor yang kemudian menjadi kekuatan untuk membuka kran demokrasi yang selama pemerintahan ORBA tersumbat. Akibat dari tersumbatnya kran demokrasi kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM sering terjadi, dan menjadi bara api yang sewaktu waktu dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak cukup disini, kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, juga sebagai kekurangan-kekurangan rezim orba kalau tidak boleh dikatakan sebagai kegagalan pemerintahan Soeharto dalam mengawal keamanan perekonomian nasional. Semua itu merupakan pemicu terjadinya ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidak puasan tersebut akhirnya menjadi gelombang protes ketika kemudian beberapa tokoh nasional ikut terlibat didalamnya.

Tokoh-tokoh nasional yang kemudian dikenal sebagai tokoh Reformasi muncul karena mereka sangat gelisah melihat keadaan perekonomian Indonesia yang semakin hari semakin terpuruk karena dihantam badai krisis moneter yang melanda Asia Tenggara. Harapan untuk segera bangkit tidak kunjung terjadi. Suatu yang tidak mungkin terjadi dalam peristiwa besar seperti aksi tahun 1998 tanpa dipelopori oleh tokoh-tokoh besar bangsa, karena pada diri tokoh-tokoh ini sifat kritis dalam menyikapi sebuah kebijakan akan terlihat, apalagi jika kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam menyikapi era orde baru atau masa Presiden Soeharto, mereka dengan atribut-atribut yang dipunyai (Bottomore dalam Sartono Kartodidjo, 1984) sanggup menggerakkan ribuan mahasiswa untuk melakukan protes dan demo kepada Pemerintahan walaupun dibayang-bayangi pihak keamanan Indonesia. Beberapa elite/tokoh nasional yang pada masa reformasi sangat berpengaruh antara lain.:

Amien Rais

Dibalik peristiwa reformasi ada beberapa tokoh yang menonjol perannya sehingga aksi-aksi mahasiswa dapat berjalan secara spartan. Tanpa menafikan peran elite lainnya Amien Rais merupakan salah satu tokoh yang mempunyai peran yang paling menonjol. Jauh sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 Amien Rais sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah baik lisan maupun tulisan. Kritik Amien Rais tidak begitu ditanggapi serius oleh pemerintah. Pemerintah masih begitu yakin dengan kebijakan-kebijakan politiknya. Kritik Amien Rais akhirnya terbukti kebenarannya. Ketika

pemerintah kemudian bergerak dengan mencari jalan keluar untuk meredam gejolak masyarakat yang dipelopori mahasiswa dirasa sudah terlambat. Gelombang aksi kian hari kian marak. Aksi-aksi besar mahasiswa inilah yang kemudian menjadi panggung Amien Rais untuk menyampaikan buah pikirannya. Dapat dikatakan saat reformasi Amien Rais merupakan tokoh sentral yang ditunggu kehadirannya dalam setiap aksi. Tidak ada aksi besarpun yang tidak dihadiri Amien Rais. Puncaknya ketika Amien Rais bersama mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1998 berencana menyelenggarakan aksi di Lapangan Monas terpaksa ia urungkan setelah ia mendapat informasi jika aksi itu tetap dilaksanakan maka Soeharto akan mengeluarkan angkatan bersenjata untuk menghadapinya. Oleh karena mendapat ancaman yang serius iapun dengan bijak mengambil keputusan untuk membatalkannya yang diawali dengan menyelenggarakan siaran pers pagi hari. Ia tidak mau ada korban dipihak mahasiswa hanya karena egoismenya untuk terus melakukan aksi. Baginya nyawa mahasiswa harus dilindungi karena mereka merupakan aset bangsa yang kelak akan menggantikan generasi sebelumnya.

Meskipun acara di Monas tidak jadi terlaksana, para elite terus melakukan konsolidasi mencari cara untuk segera dapat mengakhiri pemerintahan ORBA yang represif. Dilapangan banyak tokoh-tokoh sipil nasional yang ikut dan mengawal aksi mahasiswa. Tentu saja tidak hanya Amien Rais yang berperan dalam aksi tahun 1998. Sri Sultan, Sri Bintang Pamungkas, WS Rendra dsb adalah tokoh-tokoh sipil yang cukup menonjol perannya. Ketika menuntut Soeharto mundur dan meletakkan jabatannya.

Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan dipanggil Gus Dur, merupakan tokoh Nahdhatul Ulama, sebuah ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia. Selain sebagai ulama, ia juga sebagai negarawan yang memiliki wawasan luas khususnya tentang pluralisme. Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang mencetuskan pertemuan Ciganjur yang pada saat itu dihadiri oleh Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Amien Rais. Ke empat tokoh reformasi yang hadir di Ciganjur akhirnya dikenal sebagai kelompok Poros Tengah yang terus berupaya menggulirkan agenda reformasi di Indonesia. Pada saat pemilu pertama pasca runtuhnya orba Gus Dur dijagokan oleh Amin Rais untuk menjadi calon presiden RI akhirnya, Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI menggantikan BJ Habibie, sedangkan Megawati

diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur. Namun di tengah masa pemerintahannya, Gus Dur dicopot mandatnya oleh MPR. Dengan didukungnya Gus Dur oleh Amin Rais berimbang pada semakin eratnya hubungan NU dengan Muhammadiyah, namun ketika Gus Dur harus lengser karena kasus Brune Gate dimana Amin Rais salah satu tokoh yang getol dalam pelengseran Gus Dur, hubungan NU dan Muhammadiyah kembali tidak baik dalam waktu yang cukup lama.

Sri Sultan Hamengkubuwono X

Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan sosok Raja Yogyakarta (Jawa) yang dikenal sebagai raja yang pembawaannya tenang. Ia juga yang memiliki peran yang cukup penting dalam mempersatukan bangsa ini agar tetap bersatu, karena sejak krisis moneter melanda, Indonesia mengalami ancaman disintegrasi. Apalagi, sejak Timor Timur lepas dari pangkuan ibu pertiwi, memicu timbulnya separatisme di beberapa tempat di Indonesia. Banyak yang tidak tahu, bahwa beliau juga merupakan bagian dari tokoh-tokoh reformasi. Pada masa menjelang reformasi, Sri Sultan sering turun ke jalan menenangkan demonstran agar tak bertindak anarkis, terutama di Yogyakarta sehingga membawa dampak baik bagi masyarakat Yogyakarta sendiri. Sebagai salah satu tokoh yang tergabung dalam tokoh-tokoh reformasi, beliau lebih berperan sebagai pengendali massa. Berkat itulah, setelah reformasi, Sri Sultan ditunjuk menjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Sri Paku Alam IX menggantikan gubernur sebelumnya Sri Paku Alam VIII yang telah wafat.

Syarwan Hamid

Salah satu yang tidak sedikit perannya Letnan Jenderal TNI Purn Syarwan Hamid. Dapat dikatakan Syarwan Hamid adalah salah seorang jenderal reformis, seorang jenderal yang tidak pobi dengan aksi-aksi mahasiswa waktu itu. Ia memiliki peran yang menonjol dalam mendukung tuntutan mahasiswa, saat itu. Saat reformasi ia menjadi anggota DPR/MPR dan menjabat sebagai wakil ketua DPR/MPR RI perwakilan Fraksi ABRI (FABRI).

Pada hari Senin, 18 Mei 1998 para mahasiswa yang tergabung dalam masa aksi bergerak menuju Gedung DPR/MPR untuk melakukan audiensi dengan ketua DPR/MPR, Harmoko. Harmoko kemudian mempersilahkan Syarwan Hamid untuk

menyambut langsung kedatangan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada DPR/MPR sebagai wakil rakyat. Setelah perwakilan mahasiswa dipersilahkan masuk ke dalam gedung dimulailah dialog antara Syarwan Hamid selaku pimpinan MPR/DPR dengan perwakilan mahasiswa yang berada diruangan. Dalam pertemuan itu, salah seorang perwakilan mahasiswa menanyakan kepada pak Syarwan yang inti pertanyaannya meminta saran kepada Syarwan Hamid Bagaimana cara terbaik melengserkan Pak Harto. Sebuah pertanyaan yang tidak ia duga sebelumnya. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa tersebut, Syarwan memberikan jawaban dengan 2 opsi yang dianggap konstitusional cara yang tidak melanggar undang-undang, Pertama, melalui sidang istimewa. Jika sidang istimewa bisa dilaksanakan maka usulan untuk mencabut mandat Pak Harto sebagai Presiden akan mudah dilaksanakan. Kedua, melalui tekanan gerakan mahasiswa yang semakin massive dan besar kemudian berpadu dengan kekuatan-kekuatan masyarakat lain Jika mahasiswa bisa melakukan hal tersebut maka akan memudahkan bagi dewan untuk menggelar sidang istimewa, karena aksi itu akan di tangkap oleh pimpinan dewan atau legislatif, yang kemudian oleh pimpinan dewan akan diusulkan diselenggarakan sidang untuk mengusulkan Pak Harto untuk lengser dari kursi presiden.

Harus diakui bahwa peran Syarwan Hamid di era reformasi dengan mengkonsolidasikan dirinya, kedalam aksi aksi mahasiswa dengan mengantarkan mahasiswa sampai ke detik-detik terakhir menjelang lengsernya Soeharto tidaklah bisa dianggap ringan. Mengapa demikian? Tentu saja sesuatu yang amat tidak masuk akal ketika ada elite apalagi berasal dari militer yang kemudian justru menjadi “pembela” aksi-aksi mahasiswa. Mengingat militer pada masa orba merupakan kelompok yang menempatkan dirinya pada posisi yang selalu berada dibelakang Soeharto. Maka sangatlah janggal kalau kemudian ada elite politik apalagi dari militer tidak “loyal” kepada Soeharto yang sangat berpengaruh dan sangat kuat di era Orde baru.

Syarwan Hamid merupakan salah satu sosok yang bisa melepaskan dari pengaruh itu. Ia bukan hanya sekedar elit politik yang lahir dari proses rekrutmen politik dalam tubuh militer, lembaga yang terkenal sangat loyal pada Soeharto, sang patron tertinggi. Jika dikaitkan dengan masa lalu, ia merupakan bagian dari orde sebelumnya dibawah kepemimpinan Soeharto. Pertanyaannya apa yang menyebabkan ia bisa bertahan dan menjadi elite politik yang dikemudian hari cukup menonjol dalam kancah perpolitikan

Indonesia. Padahal kalau diamati lebih seksama satu sisi ia pernah berkiprah dalam politik ORBA yang sangat represif, disisi lain ia kemudian ikut gerbong reformasi yang sangat bertolak belakang dengan system politik yang dianut ORBA. Bisa jadi ketika gelombang mahasiswa mulai marak dalam menentang Soeharto tanpa diketahui banyak orang, Syarwan sudah masuk dalam barisan yang menentang Soeharto. Hal ini bisa dilihat yang pada akhirnya ia menjadi salah satu motor penggerak kemunculan reformasi. Indikator yang bisa dikemukakan bahwa Syarwan Hamid berada di gerbong reformasi, bisa dilihat bagaimana ia sangat familier ketika ia menemui delegasi perwakilan mahasiswa ketika mahasiswa mendatangi gedung MPR/DPR. Yang berikutnya bisa jadi karena di era pemerintahan ORBA Syarwan tidak memiliki kesalahan politik terhadap kelompok reformis dan ia mengambil posisi netral ketika gerakan pro reformasi belum membesar dan menunjukkan pada gejala keberhasilan. Oleh karena itu, ia aman karena ia tidak termasuk elit politik yang masuk dalam daftar untuk dikotak oleh kalangan reformis. Dengan kata lain ia tidak termasuk elit rezim lama yang dianggap menghalang-halangi gerakan mereka. Jejak rekam sejarah sangat jelas, bahwa Syarwan Hamid memiliki andil yang cukup besar ketika ia ikut serta mengkonsolidasikan dan ikut mematangkan proses politik yang digelar oleh kelompok pro reformasi ketika melengserkan Soeharto. Hal inilah yang kemungkinan menjadikan ia tidak di usik posisinya ketika akhirnya reformasi benar-benar terjadi, bahkan sebaliknya justru ia diberi posisi cukup penting dalam perpolitikan Indonesia.

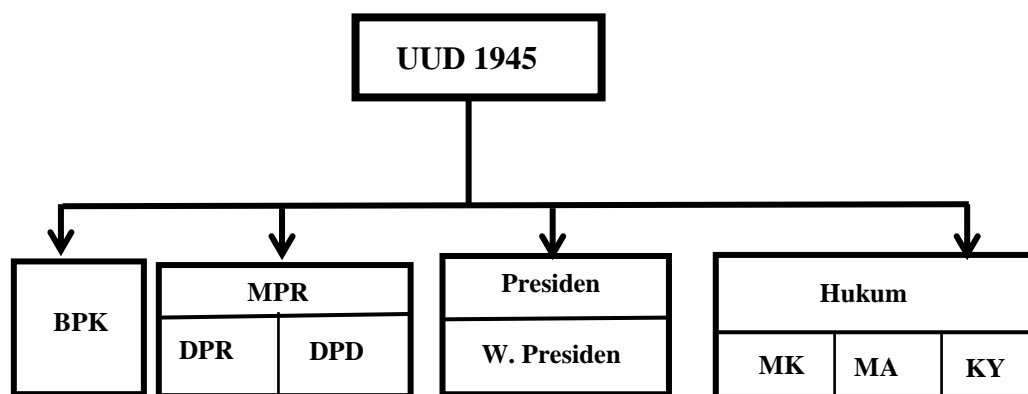
D. Perubahan ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi

Tumbangnya era orde baru yang kemudian masuk dalam era reformasi pada tahun 1999, membawa dampak perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Perubahan-perubahan itu tampak pada perubahan yang hampir menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan undang-undang dasar, sebenarnya terjadi demikian cepat tanpa dimulai oleh sebuah perencanaan matang

Hal ini terjadi karena adanya dorongan oleh tuntutan perubahan-perubahan yang sangat kuat pada awal reformasi diantaranya tuntutan atas kehidupan negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, penegakan hukum yang lebih pasti, penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan berbagai tuntutan perubahan lainnya.

Terhadap berbagai tuntutan tersebut anggota MPR pada waktu merespon dengan memulai perubahan terhadap sesuatu yang sangat mendasar yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya adalah bahwa salah satu sumber permasalahan yang menimbulkan problem politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini adalah karena kelemahan Undang Undang Dasar 1945 antara lain:

- 1) UUD 1945 menyerahkan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden.
- 2) Tidak adanya prinsip check and balances dalam UUD 1945 antara lain menyerahkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.
- 3) UUD 1945, terlalu fleksibel menyerahkan penyelenggaraan negara pada semangat para penyelenggara negara yang dalam pelaksanaannya banyak disalahgunakan.
- 4) Pengaturan mengenai hak asasi manusia yang minim, serta kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi.



Gambar 3. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia setelah Reformasi

Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 yang pertama dilakukan dalam sidang umum tahun 1999, yaitu menghasilkan perubahan penting terhadap 9 pasal yang terkait dengan penyeimbangan kedudukan Presiden dengan DPR. Meski sesungguhnya usul amandemen terhadap UUD 1945 sudah mulai disuarakan pada saat pemerintahan Presiden Habibie bahkan pernah dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Prof. DR. Bagir Manan untuk mengkaji perubahan UUD 1945. Karena itu, ketika terjadi perdebatan dalam sidang MPR terhadap usulan perubahan undang-undang dasar sebagian besar fraksi yang ada saat itu telah menyiapkan rancangan perubahan yang menyeluruh atas undang-undang dasar 1945 itu. Oleh karena waktu yang tidak memungkinkan, perubahan pertama itu hanya terjadi terhadap beberapa pasal yang terkait dengan pembatasan

kekuasaan Presiden dan penguatan DPR, dan perubahan lainnya dicadangkan pada sidang tahunan berikutnya. (hida fatmawati, blogspot.co.id)

Perlu dicatat meskipun terjadi usulan perubahan terhadap UUD 1945 secara luas akan tetapi ada kesepakatan dari, seluruh fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat itu untuk tidak:

- a. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
- d. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
- e. Perubahan dilakukan dengan cara adendum.

Semenjak memasuki era reformasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), telah dilakukan selama 4 kali Pertama tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001 dan Perubahan keempat tahun 2002, secara tidak langsung telah membawa pengaruh politik yang sangat luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tuntutan perubahan sistem politik dan ketatanegaraan dalam bentuk perubahan Undang Undang Dasar 1945, adalah pesan yang sangat jelas disampaikan oleh gerakan reformasi yang dimulai sejak tahun 1998. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya tuntutan tersebut harus dilaksanakan.

Keempat perubahan ini, mencakup aspek yang sangat luas dan mendalam baik dari jumlah pasal yang diubah dan ditambah maupun dari substansi perubahan yang terjadi. UUD 1945 sebelum perubahan hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 47 ayat ditambah 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah 4 kali perubahan, UUD 1945 menjadi 20 bab, 73 pasal, 171 ayat ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Substansi perubahan menyentuh hal-hal yang sangat mendasar dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang berimplikasi pada perubahan berbagai peraturan perundangan dan kehidupan politik Indonesia di masa depan. Dalam kerangka inilah berbagai perundang-undangan baru di bidang politik disusun, yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta UU Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (hida fatmawati, blogspot.co.id)

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa tujuan dari tuntutan amandemen UUD 1945 salah satunya adalah pengurangan kewenangan dan kekuasaan presiden dalam mengambil keputusan. Dengan diamendennya pasal ini maka dengan sendirinya terjadi perubahan yang mendasar dalam ketatanegaraan karena presiden tidak lagi mempunyai kewenangan mutlak sebagaimana sebelum adanya amandemen. Sebagai contoh, ketika terjadi sengketa atau masalah terhadap presiden maka sudah ada mekanisme yang dapat dijadikan sarana dalam memecahkan masalah tersebut. Di bentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas masalah yang pernah menimpa pada presiden Soekarno dan Gus Dur. Dengan amandemen ini, pemberhentian terhadap presiden diharapkan tidak membawa dampak negative terhadap perjalanan ketatanegaraan dikemudian harinya.

Salah satu dinamika ketatanegaraan yang secara nyata diakibatkan oleh reformasi adalah proses pemberhentian presiden sebagai kepala Negara. Pada masa Orde baru pemberhentian presiden sesuatu yang tidak mungkin terjadi mesti sebetulnya proses pemberhentian presiden merupakan sesuatu yang biasa sebagai praktik politik ketatanegaraan di berbagai Negara. Dalam proses politik ketatanegaraan pemberhentian presiden biasa disebut dengan pemakzulan, namun banyak juga yang menyebutnya dengan sebutan impeachment, berasal dari kata “to impeach” yang artinya adalah meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutan terbukti maka konsekuensinya adalah “removal from office” atau pemberhentian dari jabatan. Dalam artian bahwa impeachment sendiri bukanlah hukumannya, namun bagian atau tahapan dari sebuah proses yang bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden (Jimmly Asshidique, 2010 dalam Andy Wijayanto, 2010: 216)

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan terhadap presiden telah terjadi dua kali yaitu pada kasus mantan prseiden Soekarno dan mantan presiden Abdurrahman Wahid. Namun demikian banyak pengamat politik menilai proses pemakzulan terhadap Soekarno dan Abdurrahman Wahid adalah tindakan inkonstitusional, karena tidak berdasar pada pijakan hukum yang kuat. Hal ini disebabkan ketidak jelasan mekanisme pemazulan yang dijadikan landasan dalam mengambil keputusan, karena tidak ada satu pasalpun dalam UUD 1945 yang secara eksplisit yang membicarakan tentang pemakzulan terhadap presiden.

Berbeda dengan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) yang asli, UUD 1945 hasil amandemen secara eksplisit telah memuat tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan pemberhentian presiden. Kondisi demikian tentunya sangat baik jika mengacu kepada prinsip Negara hukum (*rechstaat*), dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 yang berarti terjadinya perubahan dalam susunan lembaga-lembaga tinggi Negara. Ada beberapa lembaga tinggi yang akhirnya harus ditiadakan dan diganti dengan lembaga-lembaga baru yang berfungsi untuk melengkapi susunan ketatanegaraan yang baru.

Suatu lembaga yang kemudian sangat penting keudukannya dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi dari upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga Negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm*, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. (Janedjri M. Gaffar, 2009) Lembaga ini di desain sebagai lembaga yang bertugas untuk menafsiri undang-undang dasar melalui keputusannya. Ide pembentukan mahkamah konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak konstitusi dari setiap warga Negara. Hal ini berarti bahwa segala perundang undangan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sudah diatur dalam konstitusi. Pasal 1 ayat 2 dalam UUD 1945 menyatakan kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pesan yang disampaikan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus dikawal dan dijaga.

Hal ini berarti, bahwa sesungguhnya secara tidak langsung gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa telah mengantarkan posisi Indonesia sebagai Negara hukum. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang terlahir pada masa reformasi merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk menengahi sengketa yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan. Inilah salah satu hasil dari reformasi yang terjadi pada tahun 1998 yang menghasilkan sebuah lembaga yang cukup penting dalam susunan ketatanegaraan Indonesia.

E. Rangkuman

Selamat, anda telah berhasil menyelesaikan modul mengenai Peran, pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Anda

sebagai guru sejarah telah mampu menganalisis dan menjelaskan kepada peserta didik. Hal-hal penting yang telah anda pelajari dari modul ini adalah sebagai berikut:

1. Selama sepuluh tahun sebelum krisis, ekonomi Indonesia tumbuh sangat pesat. Pendapatan per kapita meningkat menjadi dua kali lipat antara 1990 dan 1997. Perkembangan ini didukung oleh suatu kebijakan moneter yang stabil, dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah, dengan tingkat perkembangan nilai tukar mata uang yang terkendali rendah, dengan APBN yang berimbang, kebijakan ekspor yang terdiversifikasi (tidak saja tergantung pada migas), dengan kebijakan neraca modal yang liberal, baik bagi modal yang masuk maupun yang keluar. Dalam waktu yang sangat singkat banyak bermunculan bank-bank swasta di seluruh tanah air dan bertaburan korporasi-korporasi swasta yang memperoleh fasilitas-fasilitas tak terbatas. Proses swastanisasi ini berlangsung tanpa kendali dan penuh korupsi, kolusi dan nepotisme. Dibiidang ekonomi, banyak sekali berbagai praktek-praktek illegal yang menyebabkan banyak kerugian Negara. Sedangkan kemelut krisis yang menghimpit masyarakat Indonesia telah membuat kemiskinan, kelaparan hingga kerusuhan di berbagai wilayah. Di sisi lain, penggalakan dwi fungsi ABRI yang menyebabkan jabatan sipil banyak dikuasai oleh kaum militer, perekrutan tenaga untuk jabatan pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat (DPR/MPR) dengan gaya nepotistik, pembatasan seenaknya terhadap pers, penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis prodemokrasi rekayasa atas beberapa kasus kriminal yang diduga kuat melibatkan anak pejabat dan aparat, pengabaian para pejabat terhadap putusan PTUN, intervensi dan pencengkeraman eksekutif terhadap badan legislatif dan yudikatif, pembiaran atas praktek mafia hukum.
2. Sampai krisis moneter mulai melanda perekonomian Indonesia pada bulan Juli 1997 pun, aksi mahasiswa yang mencoba menuntut perbaikan keadaan tidak begitu jelas terlihat. Reformasi total, itulah tuntutan para Mahasiswa Indonesia. Di Yogya, mahasiswa dari berbagai kampus bahkan menggelar rapat akbar, aksi diam menuntut perubahan, hingga mengadakan mimbar bebas guna mensukseskan gerakan reformasi. Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai aksi mahasiswa akan tuntutan reformasi tersebut menimbulkan ketegangan bahkan bentrokan dengan aparat keamanan hingga mengakibatkan korban jiwa. Adapun korban jiwa yang meninggal dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta adalah

Mozes Gatotkaca seorang alumnus Akprind. Di kota pelajar tersebut, pimpinan sekaligus gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pun ikut dalam mendukung perjuangan para mahasiswa menuntut reformasi. Dengan diadakannya Pisowanan Ageng di Alun-alun kota Yogyakarta, Sri Sultan mengajak seluruh komponen rakyat Yogyakarta dan Indonesia untuk memperjuangkan reformasi di Indonesia. Dalam berbagai aksi yang digelar oleh para mahasiswa di Yogyakarta juga didukung oleh masyarakat, tokoh akademisi serta berbagai kalangan masyarakat. Berbagai peristiwa yang terjadi dalam perjuangan reformasi tersebut akhirnya mencapai puncaknya. Yaitu dengan pengunduran Presiden Soeharto sebagai kepala Negara.

3. Berbagai peran serta para mahasiswa dalam perjuangan reformasi tersebut tentunya memiliki dampak signifikan yang merubah segala bidang kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Dari dihapuskannya sistem pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis, hingga berbagai gerakan dalam pemberantasan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme. Segala perubahan-perubahan tersebut dituangkan dalam berbagai undang-undang baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya hal tersebut membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ajang demokrasi yang bebas pun kian menambah dampak riil dalam perjuangan reformasi. Kebebasan pers dan hak asasi manusia dicanangkan oleh pemerintah. Di bidang pendidikan juga tidak luput dari tuntutan para mahasiswa. Pemerintah memberikan bantuan dana operasional hingga beasiswa dan pembangunan sekolah-sekolah di berbagai daerah di tanah air. Dalam percaturan politik di Indonesia pun menjadi lebih demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Daya Negeri Wijaya. 2013. *Mentalitas pemuda pada masa pergerakan dan masa reformasi di Indonesia: Dari berani berpengetahuan hingga takut berpengetahuan*. Jakarta: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah. Volume 1, nomor 1
- Eko Noer Kritiyanto. 2013. *Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Jurnal Rechtsvinding. Volume 2, nomor 3
- Janedri M.Gaffar. 2009. *Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Saputra, Angga A.W. 2012. Peranan mahasiswa Yogyakarta dalam perjuangan Reformasi di Indonesia 1998. Skripsi. FIS UNY.
- Kartodirdjo, Sartono. 1981. *Elite dalam Perspektif sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya
- M. Mulya. 2017. *The role of lieutenant general TNI Purn. Syarwan Hamid in the 1998-1999 Reformation*. Riau: JOM. Vol 4, No2.
- Muhammad Fauzan. 2011. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam proses Impeachment Presiden menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum. Vol 11, No 1.
- Ibnu Sodiq. 2008. BOM JW MARRIOT Jihad yang Disalahkan. 2008. Semarang: Widya Karya
- Andi Wijayanto. 2010. *Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Jurnal Konstitusi. Volume 7, nomor 3:210

<http://hildafatmawati.blogspot.co.id/2016/02/peran-tokoh-masyarakat-pada-masa.html>

KONTRIBUSI BANGSA INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA

Ibnu Sodiq

A. Konferensi Asia Afrika

Di akhir perang Dunia II, ada keinginan yang besar di kalangan dunia untuk memperoleh kemerdekaan, terutama di kawasan Asia dan Afrika. Di satu sisi, kecemasan dunia semakin meningkat akibat persingan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur. Untuk itulah, pada 18-25 April 1955 di Bandung diselenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) (Kartasasmita dkk., 1995). Konferensi ini diprakarsai oleh lima negara: Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Langka. Sebanyak 29 negara hadir, yakni

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Afghanistan | 18. Mesir |
| 2. Indonesia | 19. Libanon |
| 3. Pakistan | 20. Turki |
| 4. Birma | 21. Ethiopia |
| 5. IranFilipina | 22. Liberia |
| 6. Kamboja | 23. Vietnam (Utara) |
| 7. Irak | 24. Vietnam (Selatan) |
| 8. Iran | 25. Pantai Emas |
| 9. Arab Saudi | 26. Libya |
| 10. Ceylon | 27. India |
| 11. Jepang | 28. Nepal |
| 12. Sudan | 29. Yaman |
| 13. Republik
Rakyat Tiongkok | |
| 14. Yordania | |
| 15. Suriah | |
| 16. Laos | |
| 17. Thailand | |

Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon (Sri Lanka), Sir John Kotelawala, mengundang para perdana menteri dari Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammed Ali). Undangan dimaksudkan untuk mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pimpinan pemerintah negara tersebut. Pertemuan itu ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya Konferensi Kolombo. Pada 28 April – 2 Mei 1954, pertemuan ini membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. (Kartasasmita dkk., 1995; Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010).

Pada 28 – 29 Desember 1954, atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para perdana menteri peserta Konferensi Kolombo (Birma, Ceylon, India, Indonesia, dan Pakistan) mengadakan pertemuan di Bogor, untuk membicarakan persiapan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut berhasil merumuskan kesepakatan tentang agenda, tujuan, dan negara-negara yang diundang pada Konferensi Asia Afrika. Ke lima negara peserta Konferensi Bogor menjadi sponsor Konferensi Asia Afrika dan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada konferensi tersebut, yang ditetapkan akan berlangsung pada akhir minggu April tahun 1955. Presiden Indonesia, Soekarno, menunjuk Kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya konferensi. (Kartasasmita dkk., 1995; Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010).

Berdasarkan Konferensi Bogor (28-31 Desember 1954), terdapat empat tujuan pokok pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Memajukan kemauan baik dan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam menjelajah dan memajukan kepentingan-kepentingan bersama mereka serta memperkuat hubungan persahabatan dan tetangga baik;
- b. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili;
- c. Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili;
- d. Mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika, seperti masalah kedaulatan nasional, rasialisme, dan koonialisme;

- e. Meninjau kedudukan Asia-Afrika dan rakyatnya, serta memberikan sumbangan yang dapat mereka berikan dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Dalam agenda konferensi, pokok pembicaraan mencerminkan masalah internasional yang hangat pada saat itu. Agenda yang dibicarakan antara lain.

- a. Usaha-usaha untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan kebudayaan;
- b. Hak azasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, termasuk soal rasialisme;
- c. Masalah rakyat-rakyat terjajah, antara lain soal Afrika Utara dan Irian Barat;
- d. Perdamaian dunia dan kerjasama internasional, termasuk beberapa aspek mengenai PBB;
- e. Hidup berdampingan (*co-existence*), soal Indocina, Aden, masalah pelucutan senjata (*disarmament*) dan masalah penghancur yang dahsyat.



Gambar 1. Pidato Presiden Sukarno saat KAA
Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Konferensi ini menghasilkan berbagai keputusan penting yang dituangkan dalam suatu komunique bersama. Di samping itu, telah disetujui pula prinsip-prinsip hubungan internasional dalam rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia yang dikenal dengan Dasasila Bandung. (Kartasasmita dkk., 1995). Isi teks Dasasila Bandung adalah sebagai berikut.

~ Ibnu Sodik ~

1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
6. (a) Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun; (b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun.
7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.
8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.
10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.

Dalam keterangan pemerintah kepada DPRS pada tanggal 14 Juni 1955 mengenai hasil-hasil konferensi Asia Afrika dikemukakan bahwa dengan konferensi ini dapat mengelakkan diri menjadi medan pertentangan Perang Dingin. Selain itu, beberapa ketegangan yang timbul di beberapa bagian benua Asia-Afrika dapat diredakan. Selain itu, konferensi ternyata dapat menerima pendekatan tradisional Indonesia, yakni musyawarah dan mufakat. Sistem ini dapat diterapkan pada konferensi dan berhasil dengan baik. (Kartasasmita dkk., 1995; Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Sejarah Konferensi Asia Afrika, 2018).

Bagi Indonesia, penyelenggaraan KAA telah membantu perolehan dukungan tentang perjuangan merebut Irian Barat. Selain itu tercapai pula kesepakatan antara Indonesia dan RRC tentang dwikewarganegaraan, bahwa seseorang dengan dua kewarganegaraan harus memilih di salah satunya dan apabila tidak dapat memilih,

dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Bagi dunia internasional, KAA telah menumbuhkan semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Selain itu, muncul pula semangat solidaritas di antara Negara-negara Asia Afrika, baik dalam menghadapi masalah internasional maupun regional. Beberapa konferensi antarorganisasi dari negara-negara tersebut diselenggarakan, seperti Konferensi Mahasiswa Asia Afrika, Konferensi Setiakawan Rakyat Asia Afrika, Konferensi Wartawan Asia Afrika, dan Konferensi Islam Afrika Asia. (Kartasmita dkk., 1995; Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010; Sejarah Konferensi Asia Afrika, 2018).

B. Gerakan Nonblok

Berakhirnya Perang Dunia II ternyata tidak menyebabkan pertikaian dan tensi politik global mereda. Bahkan, babak baru permasalahan politik global dimulai dengan munculnya dua kekuatan berbasis ideologi yang berbeda. Ada Blok Barat yang mengusung liberalisme dan Blok Timur yang membawa sosialisme-komunisme. Sentral gerakan blok barat adalah Amerika Serikat, sementara itu Blok Timur digawangi oleh Uni Soviet. Melihat permasalahan itu, sejak lama Indonesia telah menyatakan diri menganut netralisme.

Netralisme Indonesia dalam politik luar negeri diwujudkan dalam penerapan prinsip bebas aktif. Penerapan bebas aktif pada masa revolusi dimaknai sebagai pendirian dan sikap dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengejar cita-cita menentukan sikap sendiri, tidak mengikat diri pada blok Amerika atau Rusia. Politik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang dihadapinya. Politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara-negara lain. (Fernandes, 1989)

Pada masa Natsir dalam keterangan program pemerintah kepada parlemen tanggal 21 September 1951 ‘bebas’ diartikan tidak melibatkan diri dalam salah satu blok yang menambah ketegangan. Sementara itu ‘aktif’ dimaknai turut membantu usaha-usaha untuk mencapai cita-cita manusia sebagai yang tercantum di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Soekiman menyatakan bahwa

bebas aktif bukanlah bertumpu pada netralitas yang pasif, melainkan berdaaskan ideologi Pancasila yang secara aktif membela cita-cita perdamaian dan kesejahteraan. (Fernandes, 1989)

Pemaknaan bebas aktif pada masa Wilopo dalam keterangannya di parlemen pada 22 Mei 1952 adalah (1) tidak memihak salah satu pihak dari ke dua blok; (2) tidak memihak dan ikut campur tangan dalam pertentangan dua blok. Sementara itu, pada masa Ali Wongso bebas aktif dimaknai sebagai sikap tidak memihak barat maupun Timur, penyelesaian permasalahan Asia oleh bangsa Asia sendiri, dan mendiadakan bentuk penjajahan dan segala sistemnya. (Fernandes, 1989)

Di tahun 1950-an garis politik nonblok mulai ditunjukkan dengan beberapa point penting yakni

- a. Tanpa mengikatkan diri pada pakta-pakta militer yang ada, berusaha menghapuskan atau setidaknya mengurangi ketegangan-ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia;
- b. Menauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan untuk sebaliknya mengutamakan saluran perundingan-perundingan sebagai alat;
- c. Menghapuskan penjajahan, sehingga pergaulan antara bangsa dan antarnegara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai di mana penghormatan terhadap integritas wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memilih sistem sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. (Fernandes, 1989)

Di masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri selain bersifat bebas aktif, juga harus anti-imperialisme dan kolonialisme. Di sini politik luar negeri bertujuan untuk (1) mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang penuh; (2) mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa-bangsa di dunia; dan (3) mengabdikan pada perjuangan untuk membela perdamaian dunia. (Fernandes, 1989)

Sikap bebas aktif pemerintah ditunjukkan dalam keikutsertaan dalam KTT Non-aligned I pada tanggal 1-6 September 1961 di Beograd (Yugoslavia). Di sinilah awal mula pendirian Gerakan Nonblok (GNB). KTT I GNB dihadiri oleh 25 negara yakni

Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun upaya kerja sama di antara mereka. Pada KTT I juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk menformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. (Kartasmita dkk., 1995)



Gambar 2. Sukarno menyampaikan pidato pada KTT Nonblok I di Beograd
Sumber: 30 tahun Indonesia Merdeka

KTT Beograd menghasilkan tiga dokumen penting, yakni

- a. Pernyataan tentang bahaya perang dan *appeal* untuk perdamaian;
- b. Deklarasi mengenai prinsip-prinsip *non-alignment*, bersama dengan 27 ketentuan persetujuan tentang pemecahan masalah-masalah dunia waktu itu;
- c. Surat bersama kepada Presiden Kennedy dan PM Krushev yang berbunyi “*urging on the Great Powers concerned that negotiation should be resumed and pursued so that the danger of war might be removed from world mankind adopts ways of peace.*” (mendesak kepada kekuatan besar dunia untuk terfokus pada

pelaksanaan dan pencapaian perundingan, sehingga bahaya perang dapat dihapus dan umat manusia dapat menempuh jalan damai).

Konferensi mengutus kepada Presiden Sukarno dan Presiden Medibo Keita untuk menyampaikan surat kepada Presiden Kennedy. Sementara itu surat kepada PM Kruchev disampaikan oleh PM Nehru dan Presiden Nkrumah.

Sukses pelaksanaan KTT Nonblok I disusul dengan pelaksanaan KTT Nonblok II di Kairo pada 1964. Akan tetapi, pelaksanaan KTT II memiliki beberapa perbedaan dengan pertemuan sebelumnya. Jika pada pertemuan pertama situasi pertengahan antara blok barat dan blok timur memanas, pada pertemuan kedua justru terdapat gesekan di negara-negara Asia-Afrika sendiri. Pertentangan di negara-negara Asia-Afrika ditunjukkan dengan beberapa peristiwa sebagai berikut.

- a. Pertentangan India-Pakistan dan India-RRC memuncak, sehingga India berkeberatan jika Pakistan dan RRC diundang.
- b. Konfrontasi Indonesia-Malaysia sehingga Indonesia Menolak diundangnya Malaysia.
- c. Beberapa negara Afrika menolak hadirnya PM Tshombe dari Kongo, sehingga ketika pesawat Tshombe hendak mendarat, pemerintah terpaksa melarangnya. (Kartasasmita dkk., 1995; Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010).

Dalam konferensi ini, Indonesia mengumandangkan garis militan dalam rangka strategi nasakomisasi di tingkat internasional yang sejalan dengan kebijakan politik nasional saat itu. Akan tetapi, negara-negara yang hadir lebih bersedia menerima gagasan tentang hidup berdampingan secara damai daripada konsep konfrontasi antara *New Emerging Forces* dengan *The Old Established Forces* yang dikemukakan Indonesia. (Gerakan Non-Blok, 2014)

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekadar dari peran yang selama ini dikonstruksikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi

dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. (Gerakan Non-Blok, 2014)

Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid; tidak memihak pada pakta militer multilateral; perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme, neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing; perlucutan senjata; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai; penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional; serta kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (*New International Economic Order*). (Gerakan Non-Blok, 2014)

Menyusul runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan kekuatan militer-politik komunisme di Eropa Timur, muncul perdebatan mengenai relevansi, manfaat dan keberadaan GNB. Muncul pendapat yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolar pada konstelasi politik dunia, eksistensi GNB menjadi tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara mengusulkan agar GNB menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dunia pasca-Perang Dingin, di mana ketegangan Utara-Selatan kembali mengemuka dan jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang menjadi krisis dalam hubungan internasional. Perhatian GNB pada masalah-masalah terkait dengan pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, telah menjadi fokus perjuangan GNB di berbagai forum internasional pada dekade 90-an. (Gerakan Non-Blok, 2014)

Dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta pada tahun 1992, sebagian besar ketidakpastian dan keraguan mengenai peran dan masa depan GNB berhasil ditanggulangi. Pesan Jakarta, yang disepakati dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta,

adalah dokumen penting yang dihasilkan pada periode kepemimpinan Indonesia dan memuat visi baru GNB, antara lain:

- a. Mengenai relevansi GNB setelah Perang Dingin dan meningkatkan kerja sama konstruktif sebagai komponen integral hubungan internasional.
- b. Menekankan pada kerja sama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang berhasil dicapai melalui perjuangan GNB sebelumnya.
- c. Meningkatkan potensi ekonomi anggota GNB melalui peningkatan kerja sama Selatan-Selatan. (Gerakan Non-Blok, 2014)

Selaku ketua GNB waktu itu, Indonesia juga menghidupkan kembali dialog konstruktif Utara-Selatan berdasarkan saling ketergantungan yang setara (*genuine interdependence*), kesamaan kepentingan dan manfaat, dan tanggung jawab bersama. Selain itu, Indonesia juga mengupayakan penyelesaian masalah utang luar negeri negara-negara berkembang miskin (HIPC/Heavily Indebted Poor Countries) yang terpadu, berkesinambungan dan komprehensif. Guna memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, KTT GNB ke-10 di Jakarta sepakat untuk mengintensifkan kerja sama Selatan-Selatan berdasarkan prinsip *collective self-reliance*. Sebagai tindak lanjutnya, sesuai mandat KTT Cartagena, Indonesia bersama Brunei Darussalam mendirikan Pusat Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan GNB. (Gerakan Non-Blok, 2014)

Sejak pertemuan Beograd tahun 1961, serangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok telah diselenggarakan yaitu di Kairo, Mesir (1964) diikuti oleh 46 negara dengan anggota yang hadir kebanyakan dari negara-negara Afrika yang baru meraih kemerdekaan, kemudian di Lusaka, Zambia (1970), Algiers, Aljazair (1973), Kolombo, Srilangka (1976), Havana, Cuba (1979), New Delhi, India (1983), Harare, Zimbabwe (1986), Beograd, Yugoslavia (1989), Jakarta, Indonesia (1992), Cartagena de Indias, Kolombia (1995), Durban, Afrika Selatan (1998), Kuala Lumpur, Malaysia (2003), Havana, Kuba (2006), Sharm el-Sheikh, Mesir (2009), Teheran, Iran (2012) dan terakhir di Karakas, Venezuela pada tahun 2015. (Gerakan Non-Blok, 2014)

C. Deklarasi Djuanda

Setelah kemerdekaan, wilayah Indonesia masih terpisah satu sama lain. Hal ini karena lautan yang di antara pulau masih belum secara otomatis masuk menjadi kawasan teritorial Indonesia. Dalam *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie* 1939 (Stbl. 1939 No 422), pulau-pulau di wilayah Indonesia dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh maksimal 3 mil dari garis pantai. Sedangkan laut yang memisahkan pulau-pulau yang ada bebas dilewati oleh kapal asing. Untuk itu, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah mengumumkan suatu pernyataan tentang wilayah perairan negara Republik Indonesia. dalam pengumuman pemerintah tersebut dinyatakan:

Segala perariran di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau perariran nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia.

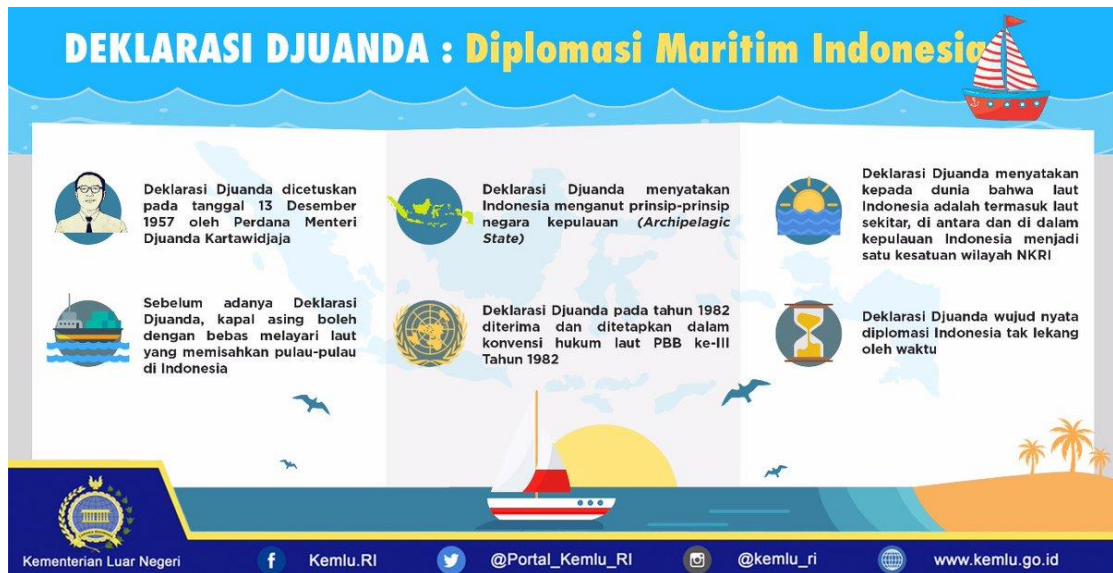
Lalu lintas yang damai di perariran pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil), diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. (Kartasmita dkk., 1995; Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010).

Pengumuman pemerintah ini dikenal dengan istilah Deklarasi Djuanda. Dalam pengumuman tersebut, ditetapkan batas perairan nasional menggunakan prinsip-prinsip yang dikenal sebagai “*archipelago principle*” atau Wawasan Nusantara.

Dasar-dasar pokok pertimbangan penetapan wilayah perairan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri atas (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri;
- b. Bagi kebutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat; dan
- c. Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie* 1939 (Stbl. 1939 No 422) artikel 1 ayat (1), tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena membagi

wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang terpisah dengan perairan teritorialnya sendiri-sendiri. (Kartasasmita dkk., 1995; Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010).



Gambar 3. Infografik Deklarasi Djuanda
Sumber: kemlu.go.id

Dengan peraturan tersebut, perairan Indonesia tidak lagi memisahkan pulau-pulau Indonesia, tetapi justru menyatukan pulau-pulau di Indonesia. Peresmian Deklarasi Juanda ini terdapat dalam UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Isi dari undang-undang tersebut antara lain

- Perairan Indonesia adalah laut wilayah beserta perairan pedalaman Indonesia atau perairan nusantara;
- Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut dari pularu-pulau terluar atau bagian pulau terluar dengan dihubungkan garis lurus antara yang satu dengan yang lain;
- Bila ada selat yang lebarnya melebihi 24 mil laut, garis batas laut wilayah ditarik di tengah-tengah selat;
- Perairan pedalaman Indonesia atau perairan nusantara adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar;

- e. Hak lintas laut damai kendaraan air asing diakui dan dijamin sepanjang tidak mengganggu atau bertentangan dengan keselamatan dan keamanan wilayah bangsa dan negara.

Selain itu, deklarasi ini juga sudah diakui oleh dunia internasional. Pada tahun 1982, PBB menetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III. Selanjutnya deklarasi ini kembali dipertegas dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan.

D. Misi Garuda

Semenjak Perang Dunia II, Timur Tengah selalu bergolak sebagai akibat didirikannya negara Israel di Palestina. Pada 26 Juli 1956 masalah Timur Tengah menjadi lebih panas setelah Terusan Suez dinasionalisasi oleh Mesir. Akibatnya, pertikaian menjadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan tersebut yang berkepentingan. Pada Oktober 1957, Inggris, Perancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Beberapa kota di sepanjang Terusan Suez dibom dan wilayah Mesir di Sinai diduduki. Situasi ini mengancam perdamaian dunia, sehingga Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Akan tetapi perundingan tersebut tidak berjalan dengan lancar. (Kartasasmita dkk., 1995; Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010).

Dalam Sidang Umum PBB, menteri luar negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui sidang dan pada 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk Komando PBB dengan nama *United Nations Emergency Forces* (UNEF). Pada tanggal 8 November 1956, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk turut serta menyumbangkan pasukan dalam UNEF.



Gambar 4. Pelepasan Pasukan Garuda oleh Presiden pada 31 Desember 1956
Sumber: *30 tahun Indonesia Merdeka*

Sebagai pelaksanaannya, pada 28 Desember 1956 dibentuk sebuah pasukan yang berkekuatan satu detasemen (550 orang), terdiri atas kesatuan-kesatuan Teritorium IV/Diponegoro dan Teritorium V/Brawijaya. Sebagai Komandan Kontingan ditunjuk Kolonel Hartoyo, yang kemudian diganti oleh Letnan Kolonel Suadi. Kontingen Indonesia untuk UNEF dinamakan Pasukan Garuda, dan diberangkatkan ke Timur Tengah pada Januari 1957. (Kartasasmita dkk., 1995; Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010).

Pengiriman Kontingen Garuda ke Mesir dilatarbelakangi hubungan yang baik antara Indonesia dan Mesir. Mesir dan negara-negara Liga Arab merupakan salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada 18 November 1946, mereka menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan RI sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan tersebut adalah suatu pengakuan *de jure* menurut hukum internasional.

Setelah pengiriman ke Mesir, pada 1960 Indonesia kembali mengirimkan pasukan perdamaian ke Kongo. Pengiriman ini dilatarbelakangi perang saudara yang meletus di Republik Kongo (sekarang bernama Zaire) ketika bekas jajahan Belgia tersebut memperoleh kemerdekaannya pada Juni 1960. Untuk membantu memulihkan keamanan dan ketertiban, atas prakarsa PBB dikirimkan pasukan bernama *United Nations Operation for the Congo* (UNOC). Kontingen Indonesia dalam UNOC yang diberi nama Pasukan Garuda II dipimpin oleh Letkol Solichin Gautama Purwanegara dan terdiri atas Batalyon 330/Siliwangi, Detasemen Polisi

Militer, dan Peleton STB/KKO-AL. Pasukan ini diberangkatkan dengan kapal dari Tanjung Priok pada 10 September 1960. Batalyon Garuda II menyelesaikan tugas-tugasnya dan kembali ke tanah air pada pertengahan bulan Mei 1961. Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010).

Kontingen Indonesia dalam UNOC kemudian diperbesar kekuatannya menjadi satu brigade dan diberinama Kontingan Indonesia Garuda III tetapi kemudian diganti namanya menjadi Komando Pasukan Indonesia Garuda III. Pimpinan kontingen Garuda III dipimpin oleh Brigadir Jenderal Kemal Idris. Pasukan ini bertugas di Kongo antara bulan Desember 1962 sampai Agustus 1964. Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 2010).

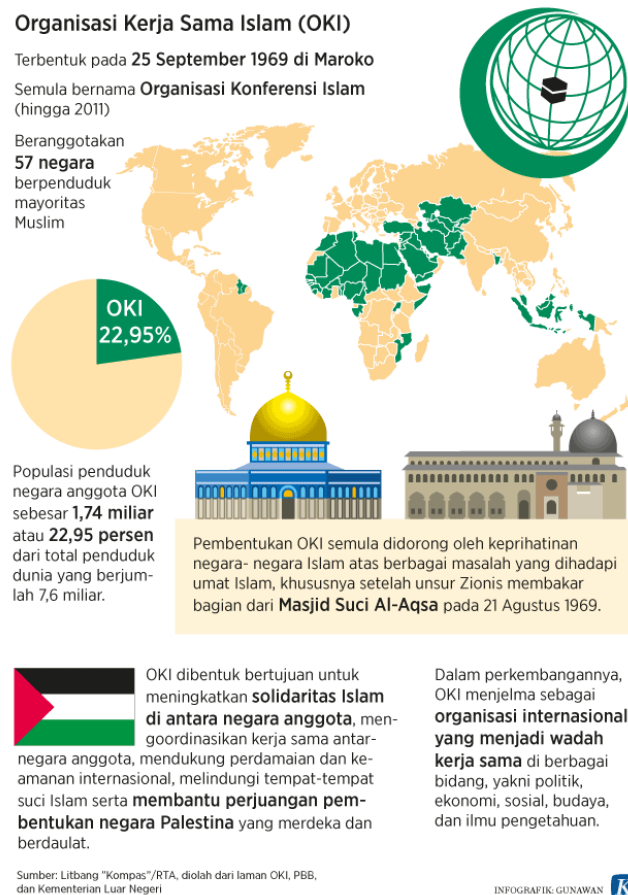
Pada periode-periode Orde Baru, Indonesia kerap mengirimkan Kontingen Garuda. Beberapa negara yang menjadi tujuan antara lain Vietnam (1973, 1974), Timur Tengah (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979), Iran-Irak (1988, 1989, 1990), Namibia (1989), Irak-Kuwait (1992, 1993, 1994, 1995), Kamboja (1992, 1993), Somalia (1992), Bosnia-Herzegovina (1993), Bosnia (1994, 1995), Georgia (1994), Mozambik (1994), Filipina (1994), Tajikistan (1997), Siera Leone (1992-2002).

Pada masa Reformasi, pengiriman pasukan perdamaian kembali dilakukan. Kali ini beberapa negara yang dituju adalah Kongo (2003, 2005), Liberia (2003-2009), Sudan (2008, 2009), Lebanon (2006-2017).

E. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22 - 25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional,

serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. (Organisasi Kerjasama Islam, 2014)



Gambar 5. Arti Penting OKI
Sumber: Kompas

Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia.

Dalam menjalankan fungsinya, terdapat lima prinsip OKI. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mengakui persamaan mutlak antara negara-negara anggota;

~ Ibnu Sodik ~

- b. Menghormati hak dalam menentukan nasib sendiri, tidak ikut campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain;
- c. Menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara;
- d. Menyelesaikan setiap persengketaan yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrase;
- e. Tidak akan menggunakan ancaman maupun kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara. (Organisasi Kerjasama Islam, 2014)

Untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, negara-negara anggota OKI memandang revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendesak. Semangat dan dukungan terhadap perlunya revitalisasi OKI dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa struktur dan kinerja organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. Dalam kaitan ini, telah diadakan rangkaian pertemuan yang berhasil mengkaji dan melakukan finalisasi TOR restrukturisasi OKI yang disiapkan oleh Malaysia.

Pada pertemuan tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (KTT) ke-10 di Putrajaya, Malaysia, 11-17 Oktober 2003, OKI sepakat untuk memulai upaya konkret dalam merestrukturisasi Sekretariat OKI, terutama pada empat aspek, yaitu perampingan struktur, metodologi, peningkatan kemampuan keuangan, dan sumber daya manusia. KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekkah, Arab Saudi, pada 7-8 Desember 2005 telah mengakomodasi keinginan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Macca Declaration dan OIC 10-years Program of Actions yang meliputi restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan Statuta OKI baru yang diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2015. (Organisasi Kerjasama Islam, 2014)

F. ASEAN

Di tengah situasi regional dan internasional yang berubah, ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) berdiri. Sebelum pendiriannya, sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang ingin mendirikan organisasi regional. Pada awal tahun 1955, Organisasi Pakta Asia Tenggara (SEATO – *The Southeast Asian Treaty Organization*) didirikan oleh Amerika Serikat untuk menghadapi komunisme Asia Tenggara. Namun, hanya ada dua anggota, yakni Filipina dan Thailand yang bergabung. Pada 1961 pernah digagas pembentukan *Association of Southeast Asia*

(ASA). Akan tetapi karena konflik antara Malaysia dan Filipina, ASA urung dikembangkan. Setelah itu pada Agustus 1963 muncul pula organisasi Maphilindo yang menggantikan ASA. Organisasi regional ini merupakan kerja sama antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Akan tetapi, karena politik konfrontasi Sukarno, organisasi ini lagi-lagi gagal. Pada masa-masa sebelum 1965, politik konfrontasi benar-benar sangat mewarnai dan mempengaruhi keharmonisan hidup bertetangga di Asia Tenggara. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kerukunan bekerja sama antarnegara tetangga di Asia Tenggara menjadi keinginan yang besar. Hal ini terwujud ketika terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia yang juga mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia. (Alfian, Soeyono, Suhartono, 2007; Cipto, 2010; Suryadinata, 1998)

Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, diadakan pertemuan antara perwakilan lima negara: Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman). Pertemuan tersebut membahas Deklarasi Bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan Deklarasi ASEAN (*The ASEAN Declaration*) atau Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*). Isi Deklarasi Bangkok itu adalah sebagai berikut:

- a. mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara;
- b. meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;
- c. meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
- d. memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada;
- e. meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. (Cipto, 2010; Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN, 2015)



Gambar 6. Penandatanganan Deklarasi Bangkok
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) telah resmi berdiri. Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerja sama antarnegara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama.

Organisasi ini paling tidak memiliki empat norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN. Ke empat norma dan prinsip itu adalah

- a. menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai;
- b. otonomi regional;
- c. prinsip tidak mencampuri urusan negara lain; dan
- d. menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral. (Cipto, 2010)

Searah dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai tersebut, lima negara di luar negara pemrakarsa berkeinginan menggabungkan diri dalam organisasi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/ AMM) di Jakarta, Indonesia.

- b. Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 29-30 Juli 1995
- c. Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, 23-28 Juli 1997.
- d. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam Upacara Khusus Penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi. (Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN, 2015)

Berkenaan dengan keanggotaan ASEAN, Timor Leste yang secara geografis terletak di wilayah Asia Tenggara secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai anggota ASEAN pada tahun 2011. Ihwal keanggotaan Timor Leste tersebut masih dalam pembahasan kesepuluh negara anggota ASEAN.

ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur.

Cita-cita tersebut kemudian dipertegas dengan kesepakatan Bali *Concord I* tahun 1976. Dalam Bali *Concord I* itu, para Pemimpin ASEAN menyepakati Program Aksi yang mencakup kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan penerangan, keamanan, dan peningkatan mekanisme ASEAN. Kesepakatan tersebut menandai tahapan penting bagi kerangka kerja sama ASEAN. Tekad dan upaya keras ASEAN dengan payung Bali *Concord I* telah berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas serta peningkatan kesejahteraan di kawasan. Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN, 2015)

Dalam perkembangan selanjutnya ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Untuk mewujudkan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali *Concord II* pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun

2003 yaitu, menyepakati pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community). Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN, 2015)

G. Jakarta Informal Meeting

Asia Tenggara merupakan salah satu arena pertarungan kepentingan internasional. Berbagai konflik akibat perang dingin mengemuka di kawasan ini. Salah satunya adalah permasalahan yang terjadi di Vietnam dan Kamboja. Setelah kemenangan komunis di Vietnam Utara pada 1975, ASEAN berinisiatif untuk menyatukan pandangan tentang bagaimana menghadapi perkembangan baru di kawasan Indocina. Salah satu keputusan yang dihasilkan oleh ASEAN merespon permasalahan Indocina adalah terciptanya deklarasi ASEAN Concord yang berisi kesepakatan ASEAN untuk menciptakan solidaritas politik dan bila perlu melakukan tindakan bersama. Selain itu disepakati pula agar negara-negara di Indocina menyesuaikan diri dengan kesepakatan ASEAN. Keputusan itu diambil karena kekhawatiran terjadinya konflik lanjutan di Indocina setelah kemengangan Vietnam Utara. (Cipto, 2010; Suryadinata, 1998)

Kekhawatiran terjadinya konflik yang melibatkan negara-negara di kawasan Indocina ternyata terbukti. Setelah Amerika Serikat menarik pasukannya yang selama ini membendung komunisme di kawasan itu, pada Desember 1978 Vietnam menginvasi Kamboja, menggulingkan pemerintahan Pol Pot yang haus darah, dan menanamkan pemerintahan Heng Samrin yang pro Vietnam. Heng Samrin adalah salah satu komandan Kmer Merah bersama-sama dengan Chea Sim dan Hun Sen. (Cipto, 2010; Suryadinata, 1998)

Invasi Vietnam ke Kamboja dianggap ASEAN sebagai bentuk pelanggaran prinsip-prinsip dasar hubungan antarnegara, yakni *non-interference* dan *non-use of force*. Invasi ini menciptakan persoalan serius di wilayah perbatasan Kamboja-Thailand yang membawa instabilitas di Thailand. Pada Januari 1979, ASEAN melalui pertemuan para menteri luar negerinya menyatakan menentang perilaku Vietnam dan secara resmi menolak mendukung pemerintahan Phnom Penh pro Vietnam. Selain itu ASEAN juga mendukung isolasi internasional atas Vietnam, mengusahakan penarikan tanpa syarat pasukan Vietnam dan Kamboja, mencegah penetrasi Vietnam ke Thailan, mendukung Kamboja yang netral, damai, dan demokratis, serta

mendukung kepemimpinan ASEAN dalam mencari solusi damai dalam konflik Kamboja yang bebas dari campur luar. (Cipto, 2010; Suryadinata, 1998)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia juga turut secara aktif memprakarsai perdamaian. Hal ini dilakukan dengan dikeluarkannya Prinsip Kuantan pada Maret 1979 yang bertujuan menjadikan Vietnam sahabat dan mencegah mereka menjadi bagian dari blok Soviet. Sejak saat itu, Indonesia memiliki hubungan erat dengan Vietnam. Hal ini bertujuan agar mampu memberikan masukan yang positif melalui strategi yang persuasif terhadap konflik yang melibatkan Vietnam. (Cipto, 2010; Suryadinata, 1998)

Langkah awal pemecahan masalah Kamboja dilakukan pada November 1985. Indonesia sebagai penghubung resmi ASEAN menyatakan kesediaannya untuk menyelenggarakan sebuah *Coctail Party* atau *Proximity Talks* bagi semua faksi yang terlibat dalam pertikaian Kamboja. Ide ini kemudian berkembang menjadi Pertemuan Informal Jakarta (Jakarta Informal Meeting/JIM) yang berlangsung Juli 1988. Pada pertemuan ini disepakati pemisahan antara isu invasi Vietnam dan pendudukan Kamboja oleh Vietnam dengan perang saudara antar-rakyat Khmer. Setelah pertemuan JIM I, diselenggarakan kembali pertemuan yang kedua pada Februari 1989. Dalam pertemuan kedua yang dipimpin oleh Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dicapai kesepakatan. Dalam pertemuan ini Vietnam bersedia menerima internasionalisasi konflik Kamboja, yakni melalui mekanisme kontrol internasional. Akan tetapi dalam JIM II masih belum ditemukan titik temu dan kesepakatan antara faksi-faksi yang bertikai. Khmer Merah masih tetap merupakan pokok persengketaan dan ASEAN bersikeras agar setiap pemecahan masalah kamboja harus melibatkan Khmer Merah. (Cipto, 2010; Suryadinata, 1998)



Gambar 7. Presiden Soeharto tengah beramah tamah dengan peserta JIM I
Sumber: *50 tahun Indonesia Merdeka*

Walaupun belum ditemukan titik temu, pertemuan dalam JIM I dan II telah membuka kesempatan untuk penyelesaian melalui pembentukan Konferensi Internasional Paris atas Kamboja (PICC). Dalam pertemuan di bulan Juli 1989, seluruh faksi dihadirkan. Akan tetapi masih belum ditemukan titik solusi. Setelah pertemuan Paris, Jepang kemudian mengambil inisiatif untuk menjadi tuan rumah yang mempertemukan antara Hun Sen dan Sihanouk. Keduanya sepakat untuk membentuk koalisi yang baru dan mewakili Kamboja di PBB. Akan tetapi usulan ini tidak diterima oleh pihak Khmer Merah. Setelah itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai perdamaian di Kamboja. (Cipto, 2010; Suryadinata, 1998).

Terobosan dalam masalah Kamboja akhirnya terjadi pada bulan Oktober 1991 ketika pakta perdamaian ditandatangani di Paris. Penandatanganan ini didorong oleh hancurnya kekuatan komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet, sehingga bantuan Soviet atas Vietnam tidak dapat lagi diberikan. Rencana perdamaian PBB yang bertujuan untuk penyelesaian menyeluruh akhirnya juga diterima dan gencatan senjata diumumkan. Pada penandatanganan itu, Indonesia dan Perancis menjadi ketuanya. Hal ini memberikan Indonesia suatu perasaan partisipasi dalam proses tersebut. Dengan demikian, Indonesia tidak luput untuk menjalankan misi mewujudkan perdamaian dunia.

H. Rangkuman

Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan materi tentang kontribusi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Dengan demikian, Anda diharapkan mampu mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi Djuanda, Gerakan Non Blok, ASEAN, OKI, dan *Jakarta Informal Meeting*. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dalam modul ini adalah sebagai berikut.

1. Konferensi Asia Afrika merupakan satu upaya untuk menghimpun kekuatan-kekuatan di kalangan negara berkembang untuk memperoleh kesetaraan dan kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui KAA negara-negara di kawasan Asia Afrika tampil lebih percaya diri untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan. Di sini Indonesia tampil sebagai pemrakarsa sekaligus tuan rumah untuk pertemuan nasional yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat dunia.
2. Gerakan Nonblok muncul sebagai reaksi dari pertentangan dua kekuatan dunia yang muncul setelah perang dunia II. Pada masa ini, terdapat kekuatan besar yang direpresentasikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tarikan kepentingan yang berkutub pada dua negara tersebut disikapi oleh negara-negara nonblok untuk tidak menerapkan netralisme dan memilih tidak terlibat dalam pertarungan ideologi itu. Dalam gerakan nonblok, melalui politik bebas aktif, Indonesia senantiasa mengampanyekan tindakan-tindakan yang konstruktif untuk mencapai perdamaian dunia.
3. Deklarasi Djuanda yang ditetapkan pada 1957 memberikan pengaruh terhadap dunia internasional tentang bagaimana penanganan masalah negara kepulauan (archipelagic state). Wilayah perairan selama ini rawan mengundang konflik, terutama terkait masalah batas negara. Dengan dikeluarkannya deklarasi Djuanda, batas-batas wilayah perairan Indonesia menjadi lebih jelas dan mencegah terjadinya persengketaan terkait batas wilayah dengan negara-negara tetangga. Konsep tentang wilayah perairan membawa Indonesia aktif untuk mengampanyekan pentingnya pembahasa tentang batas wilayah perairan dalam forum-forum internasional.

4. Misi Garuda merupakan langkah nyata Indonesia untuk terjun langsung ke area yang tengah memanas akibat konflik. Hal ini dilatarbelakangi tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dengan mewujudkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejak 1956, Indonesia selalu mengambil bagian menjadi pasukan perdamaian dunia di bawah komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
5. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia secara aktif mengikuti kegiatan Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Organisasi ini menempati posisi strategis isu-isu tentang keamanan dunia dan kerawanan akibat perebutan sumber daya minyak lebih banyak membawa negara-negara Islam.
6. ASEAN merupakan organisasi regional untuk wilayah Asia Tenggara. Organisasi ini lahir dari semangat hidup berdampingan yang dibutuhkan untuk menjaga perdamaian dunia dan mencapai kesejahteraan bersama. Keterlibatan Indonesia dalam organisasi ini sangat tampak dengan ikutnya Adam Malik selaku menteri negara dalam penandatanganan pendirian ASEAN. Selanjutnya, Indonesia juga dijadikan sebagai kantor pusat untuk ASEAN. Saat ini, perkembangan ASEAN semakin memperlihatkan kecenderungan yang positif dengan penguatan kerjasama antarnegara dan pengembangan komunitas masyarakat ASEAN.
7. Sebagai negara yang besar dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menjaga hubungan antarnegara di sini berjalan dengan baik dan konstruktif. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tampil sebagai aktor perdamaian. Pada konflik Vietnam Kamboja, melalui Jakarta Informal Meeting Indonesia menginisiasi tercapainya kesepakatan damai antara kedua negara dan penyelesaian masalah tanpa pertempuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Magdalia, Nana Noerliana Soeyono, Sudarini Suhartono. 2007. *Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial 3*. Jakarta: Esis.
- Bahar, Sjaafroedin, dkk. 1997. *50 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Cipto, Bambang. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fernandes, Frans S. 1989. *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- "Gerakan Non-Blok (GNB)." 28 Januari 2014. Diakses 16 April 2018 dalam <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Gerakan-Non-Blok.aspx>
- Kartasasmita, Ginandjar dkk. 1995. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- "Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)." 9 Januari 2014. Diakses 16 April 2018 dalam <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx>
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto (ed). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
- "Sejarah Konferensi Asia Afrika." 2018. Diakses pada 16 April 2018 dari <http://asianafricanmuseum.org/sejarah-konferensi-asia-afrika/>
- "Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN." 17 Maret 2015. Diakses 16 April 2018 dalam <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx>
- Suryadinata, Leo. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES.

PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI INDONESIA

Atno

A. Perkembangan dan pemanfaatan IPTEK di Indonesia sebelum Orde Baru

Sebenarnya perkembangan IPTEK di Indonesia pada masa sebelum Orde baru atau pada masa Orde Lama ini mengalami peningkatan yang signifikan, namun dari pemerintah Indonesia pada masa itu kurang memperhatikan perkembangan IPTEK yang disebabkan masih banyaknya permasalahan-permasalahan internal pasca kemerdekaan. Banyak pemberontakan-pemberontakan yang memicu terhambatnya untuk memajukan IPTEK serta sibuknya menjalin kerjasama atau diplomasi dengan berbagai negara diluar negeri, sehingga tidak cukup banyak sumber-sumber yang membahas perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada masa Orde Lama ini, dan lebih banyak membahas persoalan politik.

Meski masa ini disibukkan dengan perpolitikan negara, sebagai upaya mewujudkan negara Indonesia yang tidak ketinggalan dalam bidang teknologi serta ilmu pengetahuan berikut perkembangan beberapa IPTEK yang ada di Indonesia pada masa ini:

Radio

Sebenarnya radio ini pertama kali ditemukan pada tahun 1916 oleh ilmuwan Amerika Serikat yang bernama Dr. Lee De Forest (*The Father of Radio*). Cikal bakal perkembangan radio ialah ditemukannya *gramofon* atau *phonograph*. Adalah Thomas Alfa Edison, salah satu ilmuwan dan pengusaha paling berpengaruh dalam sejarah, yang berhasil menemukan *phonograph* di tahun 1877. Setelah itu dua ilmuwan cerdas, Helmholtz Hertz dan James Clerk Maxwell, melakukan riset mengenai fenomena elektromagnetik. Mereka melakukan eksperimen tentang gejala elektromagnetik dan berhasil menemukan gelombang radio. Mereka berkesimpulan bahwa gelombang radio mampu merambat dengan bentuk bulatan. Di tahun 1887, Heinrich Hertz mampu melakukan pengiriman dan penerimaan gelombang radio. Hingga akhirnya di

tahun 1901, ilmuwan bernama Guglielmo Marconi berhasil mengirimkan sinyal dan diterima oleh suatu alat penerima. Beliau mengirim sinyal berupa titik dan garis dari suatu pemancar menggunakan gelombang elektromagnetik. Dengan penemuan inilah, banyak yang menasbihkan Marconi sebagai penemu radio. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah digunakan oleh para tentara Belanda yang ada di Indonesia, pada tanggal 1 April 1933, Mangkunegoro VII dan Sarsitu Mangunkusumo mendirikan SRV (*Solossche Radioi Vereenging*) di Surakarta. SRV sebagai pelopor timbulnya siaran radio yang diusahakan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Radio siaran pertama di Indonesia (waktu itu bernama Nederlands Indie-Hindia Belanda), ialah Bataviase radio siaran Vereniging (BRV) di Batavia (Jakarta tempo dulu) yang resminya didirikan pada tanggal 16 juni 1925 pada saat Indonesia masih dijajah Belanda dan berstatus swasta. Setelah BRV berdiri secara serempak berdiri pula badan-badan radio siaran lainnya di kota Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya dan yang paling terbesar dan terlengkap adalah radio NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroep Mij) di Jakarta, Bandung, dan Medan, karena mendapat bantuan dari pemerintah Hindia Belanda. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia adalah Solosche Radio Vereniging (SRV) yang didirikan di kota Solo pada tanggal 1 April 1933 oleh Mangkuneoro VII dan Ir. Sarsito Mangunkusumo.

Ketika Belanda menyerah pada Jepang tanggal 8 Maret 1942, sebagai konsekuensinya, radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dinonaktifkan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hosokanri Kyoku, merupakan pusat radio siaran yang berkedudukan di Jakarta, serta mempunyai cabang-cabang yang bernama Hosokyoku di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Rakyat Indonesia pada masa ini hanya boleh mendengarkan siaran Hosokyoku saja. Namun demikian di kalangan pemuda terdapat beberapa orang dengan risiko kehilangan jiwa, secara sembunyi-sembunyi mendengarkan siaran luar negeri, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa pada 14 Agustus 1945 Jepang telah menyerah kepada sekutu.

Dengan demikian, ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia, tidak dapat disiarkan langsung melalui radio siaran karena radio siaran masih dikuasai oleh Jepang. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia

baru dapat disiarkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris pukul 19.00 WIB namun hanya dapat didengar oleh penduduk disekitar Jakarta. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945, naskah bersejarah itu dapat dikumandangkan keluar batas tanah air dengan risiko petugasnya diberondong senjata serdadu Jepang. Tak lama kemudian dibuat pemancar gelap dan berhasil berkumandang di udara radio siaran dengan *station call* "Radio Indonesia Merdeka". Dari sinilah Wakil Presiden Mohammad Hatta dan pimpinan lainnya menyampaikan pidato melalui radio siaran yang ditujukan kepada rakyat Indonesia.

Pada tanggal 11 September 1945 diperoleh kesepakatan dari hasil pertemuan antara para pemimpin radio siaran untuk mendirikan sebuah organisasi radio siaran. Pada tanggal 11 September 1945 diadakan rapat di Jakarta yang dipimpin oleh Abdurrachman Saleh dan dihadiri oleh 16 pemimpin dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Adapun hasil rapatnya adalah:

- a) Menetapkan tanggal 11 September 1945 sebagai hari berdirinya RRI.
- b) Semua yang hadir menyatukan diri sebagai pegawai RRI.
- c) Pusat RRI ada di Jakarta.
- d) Abdurrachman Saleh dipilih menjadi ketua umum RRI.
- e) Cabang RRI yang pertama ada di Jakarta, Bandung, Surakarta, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya.
- f) Semboyan RRI adalah "*sekali di udara tetap di udara*"

Tanggal 11 September itu menjadi hari ulang tahun RRI (Radio Republik Indonesia). Sampai akhir tahun 1966 RRI adalah satu-satunya radio siaran di Indonesia yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Peran dan fungsi radio siaran ditingkatkan. Selain berfungsi sebagai media informasi dan hiburan, pada masa orde baru, radio siaran melalui RRI menyajikan acara pendidikan persuasi. Acara pendidikan yang berhasil adalah "Siaran Pedesaan" yang mulai diudarkan pada bulan September 1969 oleh stasiun RRI Regional. Selanjutnya, stasiun RRI Regional juga membantu menginformasikan program-program pemerintah, seperti Keluarga Berencana, transmigrasi, kebersihan lingkungan, imunisasi ibu hamil dan balita. Sejalan dengan perkembangan social budaya serta teknologi, maka bermunculan beberapa radio siaran amatir yang diusahakan oleh perorangan. Keadaan ini tidak dapat dihindari, namun perlu ditertibkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah

No.55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Karena jumlah radio siaran swasta niaga semakin lama semakin banyak, serta fungsi dan kedudukannya penting bagi masyarakat, maka pada tahun 1974 stasiun-stasiun radio siaran swasta niaga berhimpun dalam wadah yang dinamakan Persatuan Radio siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI).

Pesawat Terbang

Kegiatan penerbangan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai tepatnya setahun setelah Wright bersaudara berhasil menemukan pesawat terbang untuk pertama kalinya. Pada tahun pertengahan tahun 1905 orang Belanda yang bernama Ir. Onnen memulai percobaan untuk membuat pesawat terbang dengan menggunakan bahan bambu dan kulit kerbau di daerah Sukabumi, Jawa Barat pada saat itu. Aktifitas semacam ini juga muncul di daerah Jawa Timur, pada tahun 1914 VOC Belanda membuat lembaga khusus untuk membuat eksperimen percobaan penerbangan dengan nama *Proef Vlieg Afdeling* dimana memang lembaga ini memiliki tujuan untuk memproduksi pesawat terbang yang nantinya akan beroperasi di wilayah Asia terutama di Indonesia.

Pada tahun 1923, Belanda berhasil mendirikan *Technische Dienst Luchtvaart Afdeling* yang berlokasi di daerah Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Lembaga ini merupakan cikal bakal dari berdirinya industri pesawat terbang di Indonesia. Pusat lembaga ini pada tahun 1924 dipindah ke lapangan udara Andir, yang mana lapangan Andir yang kita kenal pada saat ini sudah berganti nama menjadi Lapangan Udara Husein Sastranegara. Pada saat itu investasi pemerintah Belanda melalui VOC banyak mengucurkan fasilitas dan dana untuk kegiatan perakitan pesawat pembom yang memang pada saat itu digunakan untuk melawan serangan bangsa Jepang yang juga ingin berkuasa di Indonesia. Pada tahun tersebut muncullah insiyur perakit pesawat terbang seperti Akhmad Taslim dan Tossin yang merupakan tokoh Indonesia yang diajak bekerjasama dengan pemerintah Belanda pada saat itu yang diwakili oleh Ir. M.V. Pattist dan L.W. Walvaren. Mereka berempatlah pioner yang mampu menciptakan beberapa pesawat terbang bermesin tunggal seperti PW1 dan PW2 yang berhasil terbang di udara dengan lancar. Terutama PW2 yang berhasil melakukan perjalanan udara mencapai negeri Belanda pada tahun 1935 dimana pesawat PW2

berhasil mencuri perhatian dunia pada saat itu. Dengan rangkaian peristiwa inilah Indonesia memang menjadi bagian dari sejarah penerbangan kedirgantaraan dunia, bahkan pelopor industri pesawat terbang dunia yang legendaris seperti Anton Herman Gerard Fokker pendiri perusahaan pesawat Fokker ini lahir di Indonesia tepatnya di kota Kediri Jawa Timur.

B. Perkembangan dan pemanfaatan IPTEK di Indonesia pada masa Orde Baru

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia pada masa ini berkembang dengan sangat cepat, berbeda pada masa sebelumnya. Orde Baru sendiri terkenal sebagai era pembangunan Indonesia dan di kepala negarai oleh Soeharto yang terkenal sebagai bapak pembangunan Indonesia. Pada awal tahun 1970-an kemajuan IPTEK mengalami peningkatan yang didukung pemerintah karena faktor-faktor perkembangan ekonomi, perluasan pertanian, dan perubahan sosial budaya. Pada masa Orde Baru terkenal akan perkembangan teknologi yang cukup dibanggakan, bahkan terkenal sampai luar negeri diantaranya:

Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa

Dalam arti luas satelit adalah suatu benda langit yang secara alamiah berputar mengelilingi planet, seperti setelit yang mengelilingi bumi yang disebut bulan. Sesuai dengan kemajuan teknologi, manusia mampu menciptakan satelit buatan. Sistem komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk mengatasi berbagai persoalan. SKSD Palapa adalah sistem satelit komunikasi yang dikendalikan oleh sistem satelit komunikasi pengendali bumi yang dibuat oleh HAC (*Hughes Aircraft Company*) Perumtel Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tanggal 15 Februari 1975 Indonesia menandatangani pengadaan dua satelit yaitu satu stasiun pengendali utama dan 40 stasiun bumi. Para pakar teknologi komunikasi Indonesia dibantu oleh tenaga ahli dari luar negeri, bekerja sama mengoprasikan teknologi komunikasi modern yang kemudian diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Satelit ini dibangun pada tahun 1974-1976 dengan peluncuran generasi 1-A1. Nama palapa ini diambil dari Sumpah Palapa Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara.

Berturut-turut dari generasi satelit yang diluncurkan adalah sebagai berikut:

- a. Palapa A-2 (10 Maret 1977);
- b. Palapa B-1 (19 Juni 1983);
- c. Palapa B-2 (6 Februari 1984);
- d. Palapa B-2P (20 Maret 1987);
- e. Palapa B-2R (20 Maret 1990);
- f. Palapa B-4 (7 Mei 1992);
- g. Palapa C-1 (Februari 1996);
- h. Palapa C-2 yang diluncurkan pada tanggal 16 mei 1966.

Sekarang ini, kita juga mengenal satelit komunikasi yang lain yakni telkomsel-1 dan garuda-1. Sampai tahun 1996 sudah generasi ke tiga dengan kode C2 yang jarak jangkanya dari Irian (Papua) sampai Vladivostok (Rusia), dari Australia sampai Slandia Baru, satelit ini juga dipakai oleh negara-negara tetangga. Selain SKSD Palapa sekarang ini kita mengenal satelit komunikasi yang lain, yaitu Telkom-1 dan Garuda-1. Fungsi dari SKSD Palapa adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan komunikasi antar daerah, antar Negara lebih mudah.
- b. Mempererat penyebaran informasi melalui televisi, internet, facsimile.
- c. Mempermudah komunikasi telepon SLI, SLJJ, STO (Sentral Telepon Otomat).
- d. Sebagai satelit penghubung (*repeater*).

Untuk mengendalikan satelit Palapa telah dibangun beberapa stasiun di bumi. Stasiun tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Stasiun Bumi Lintas Utama (SBLU) di ibukota provinsi
- b. Stasiun Pengendali Utama (SPU) di Cibinong, Jakarta
- c. Stasiun bumi lintas tipis dengan TV yang terdapat di daerah terpencil seperti Bengkulu, Biak, dan Pangkal Pinang
- d. Stasiun bumi lintas tipis dan tanpa TV di daerah lebih terpencil lagi seperti Ternate, Fak Fak, dan Manokwari.

Televisi

Televisi merupakan salah satu media memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat. Hingga ini, televisi masih dianggap sebagai pusat informasi bagi sebagian besar orang di dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu media massa, televisi memiliki dampak yang kuat dalam membentuk opini

publik. Di Indonesia, televisi dan siaran pertelevisian memiliki sejarah yang panjang. Menjelang tahun 1960-an, hampir seluruh Negara (termasuk Indonesia) merintis untuk memiliki jaringan televisi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 20/E/M/1961 dibentuk Panitia Persiapan Pembangunan Televisi Indonesia.

Sejarah televisi Indonesia dimulai dari disiarkannya stasiun televisi pertama Indonesia bernama TVRI (Televisi Republik Indonesia). Dengan kondisi yang terbatas, lahirlah televisi siaran pada tanggal 24 Agustus 1962 dengan jangkauan siaran yang masih sangat terbatas. TVRI memulai siaran perdananya di 17 Agustus 1962. TVRI menyiarkan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta pada saat itu. Berdasarkan surat keputusan Menpen tahun 1961 tersebut TVRI lahir untuk menayangkan/meliput semua kegiatan kejuaraan Asia Games IV di Jakarta. Sebelumnya, TVRI sebenarnya merupakan program khusus yang dilaksanakan untuk menyukseskan ASIAN Games di Jakarta tahun 1962. Presiden Soekarno memiliki andil yang cukup besar dalam pembangunan TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia.

Pada tahun 1976, satelit palapa A1 diresmikan oleh SKSD. Satelit ini memungkinkan TVRI pada saat itu untuk mendistribusikan siarannya menjadi lebih luas sampai skala nasional. Memasuki tahun 1980, TVRI memperkenalkan sistem dual chanel dimana terdapat TVRI nasional dan TVRI lokal dengan saluran dan konten lokal dari beberapa provinsi di Indonesia. Adanya perkembangan ini menimbulkan peluang bagi pihak swasta untuk mengembangkan stasiun televisi baru. Di tanggal 24 Agustus 1989, lahirlah stasiun televisi kedua di Indonesia bernama Rajawali Citra Televisi atau dikenal dengan nama RCTI.

RCTI dimiliki oleh Bambang Trihatmodjo, anak dari Presiden Soeharto yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden RI. RCTI adalah stasiun televisi swasta pertama di Indonesia yang memiliki cakupan siaran nasional. Setelah itu di tanggal 24 Agustus 1990, didirikan stasiun televisi ketiga bernama Surya Citra Televisi atau SCTV. Sebelumnya, SCTV ini memiliki nama SCTI atau Surabaya Centra Televisi Indonesia. SCTV dimiliki oleh Sudwikatmono. Setelah kemunculan RCTI dan SCTV, perkembangan stasiun televisi swasta sangat pesat di Indonesia. Berturut turut lahirlah stasiun televisi swasta di Indonesia sebagai berikut: 1) Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada tahun 1991; 2) Indosiar (1992); 3) Andalas Televisi (ANTV)

pada 1992; 4) Trans TV; 5) Metro TV; 6) Global TV; 7) Lativi; dan 8) TV7. Setelah era tersebut, masih ada kemunculan stasiun televisi lainnya baik stasiun televisi baru maupun stasiun televisi yang berganti wajah seperti Lativi menjadi TVone, TV7 menjadi Trans7, dan TPI menjadi MNC TV.

Sarana Perhubungan dan Penerbangan

Sarana perhubungan pada masa ini digalakan besar-besaran sebagai upaya penunjang kehidupan rakyat, seperti sarana perhubungan darat yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena harganya yang relatif murah, cepat dan mudah dijangkau. Sarana perhubungan darat yang diupayakan adalah pemeliharaan jalan raya yang sudah ada, membangun jalan tol dan jalan layang, pembangunan rel kereta api, dan penggandaan kereta api yang lebih modern. Selain perhubungan darat yang dikemangkan pada masa ini pula meningkatkan sarana perhubungan laut dan udara sebagai sarana penjangkauan dan mempercepat lalu lintas antar pulau, serta upaya untuk meningkatkan perdagangan domestik dan internasional.

Pada jaman pemerintahan Orde Baru IPTN mendapatkan kucuran dana dan fasilitas yang besar dari pemerintah untuk mengembangkan dunia kedirgantaraan di Indonesia agar mampu berbicara lebih di tingkat dunia. Pesawat seperti N-250 dan N-230 berhasil diciptakan, namun IPTN mengalami kegagalan pada saat bekerjasama membuat pesawat Soko Galeb yang pada waktu itu didukung oleh Serbia/Yugoslavia karena proyek ini tidak berjalan dengan baik.

Pada jaman Orde Baru IPTN melalui pemerintah juga mengirimkan beberapa anak muda ke luar negeri untuk menyerap pengetahuan seputar dunia perakitan dan pembuatan pesawat terbang, salah satu lulusan yang terkenal adalah B.J. Habibie.

Revolusi Hijau

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor pertanian di Indonesia tidak lepas dari perkembangan sektor industri pertanian itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian di dunia ditandai dengan munculnya Revolusi Hijau. Munculnya beberapa teknik pertanian pada abad ke-17 dan abad ke-18 dapat dilacak dari jenis tanaman baru dan beberapa perubahan ekonomi. Pada masa sekarang ini di negara yang maju dan sedang berkembang terjadi perbedaan makin

besar dalam taraf hidup masyarakatnya. Hal ini disebabkan perbedaan antara efisiensi teknologi pertanian dan kenaikan jumlah penduduk. Perubahan-perubahan di bidang pertanian sebenarnya telah berkali-kali terjadi dalam sejarah kehidupan manusia yang biasa dikenal dengan istilah revolusi. Perubahan dalam bidang pertanian itu dapat berupa peralatan pertanian,

perubahan rotasi tanaman, dan perubahan sistem pengairan. Usaha ini ada yang cepat dan lambat. Usaha yang cepat inilah disebut revolusi, yaitu perubahan secara cepat menyangkut masalah pembaruan teknologi pertanian dan peningkatan produksi pertanian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Revolusi Hijau merupakan bagian dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pertanian pada abad sekarang ini.

Lahirnya Revolusi Hijau melalui proses panjang dan akhirnya meluas ke wilayah Asia dan Afrika. Revolusi Hijau mulai mendapat perhatian setelah Thomas Robert Malthus (1766–1834) mulai melakukan penelitian dan memaparkan hasilnya. Malthus menyatakan bahwa kemiskinan adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kemiskinan terjadi karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pangan yang tidak seimbang. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan hasil pertanian(pangan). Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, 31, 64, dan seterusnya), sedangkan hasil pertanian mengikuti deret hitung (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya).

Revolusi Hijau adalah proses keberhasilan para teknologi pertanian dalam melakukan persilangan (breeding) antarjenis tanaman tertentu sehingga menghasilkan jenis tanaman unggul untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Jenis tanaman unggul itu mempunyai ciri berumur pendek, memberikan hasil produksi berlipat ganda (dibandingkan dengan jenis tradisional) dan mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun, asal memenuhi syarat, antara lain:

- a. tersedia cukup air;
- b. pemupukan teratur;
- c. tersedia bahan kimia pemberantas hama dan penyakit;
- d. tersedia bahan kimia pemberantas rerumputan pengganggu.

Revolusi Hijau dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan umat manusia, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Keuntungan Revolusi Hijau bagi umat manusia, antara lain sebagai berikut.

- a. Revolusi Hijau menyebabkan munculnya tanaman jenis unggul berumur pendek sehingga intensitas penanaman per tahun menjadi bertambah (dari satu kali menjadi dua kali atau tiga kali per dua tahun). Akibatnya, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak. Demikian juga keharusan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit akan menambah kebutuhan tenaga kerja.
- b. Revolusi Hijau dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan paket teknologi, biaya produksi memang bertambah. Namun, tingkat produksi yang dihasilkannya akan memberikan sisa keuntungan jauh lebih besar daripada usaha pertanian tradisional.
- c. Revolusi Hijau dapat merangsang kesadaran petani dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya teknologi. Dalam hal ini, terkandung pandangan atau harapan bahwa dengan masuknya petani ke dalam arus utama kehidupan ekonomi, petani, dan masyarakat pada umumnya akan menjadi sejahtera.
- d. Revolusi Hijau merangsang dinamika ekonomi masyarakat karena dengan hasil melimpah akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula di masyarakat. Hal ini sudah terjadi di beberapa negara, misalnya di Indonesia.

Revolusi Hijau di Indonesia diformulasikan dalam konsep 'Pancasaha Tani' yaitu:

- a. pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varitas unggul;
- b. pemupukan yang teratur;
- c. pengairan yang cukup;
- d. pemberantasan hama secara intensif;
- e. teknik penanaman yang lebih teratur.

Untuk meningkatkan produksi pangan dan produksi pertanian umumnya dilakukan dengan empat usaha pokok, yaitu sebagai berikut.

- a. Intensifikasi pertanian yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan menerapkan pancasaha tani.
- b. Ekstensifikasi pertanian yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan membuka lahan baru termasuk usaha penangkapan ikan dan penanaman rumput untuk makanan ternak.

- c. Diversifikasi pertanian yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan keanekaragaman usaha tani.
- d. Rehabilitasi pertanian yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.

Dampak negatif munculnya Revolusi Hijau bagi para petani Indonesia, antara lain sebagai berikut.

- a. Sistem bagi hasil mengalami perubahan. Sistem panen secara bersama-sama pada masa sebelumnya mulai digeser oleh sistem upah. Pembeli memborong seluruh hasil dan biasanya menggunakan sedikit tenaga kerja. Akibatnya, kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang.
- b. Pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat.
- c. Ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani.
- d. Peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi modern hanya dirasakan oleh petani kaya.

Industri pertanian adalah industri yang mengolah dan menghasilkan barang yang mendukung sektor pertanian. Industri pertanian meliputi industri pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Adapun tujuan pembangunan industri pertanian adalah sebagai berikut: (a) Meningkatkan hasil dan mutu produksi; (b) Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani, peternak, dan nelayan; (c) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk menunjang pembangunan industri; dan (d) Meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Pembangunan pertanian Indonesia (padi) dengan pancausaha tani mampu mengantarkan Indonesia berswasembada pangan. Upaya meningkatkan produksi beras/nonberas antara lain dengan cara berikut: 1) Pancausaha tani; 2) Penanganan pascapanen; 3) Menentukan harga yang layak bagi produsen dan konsumen; 4) Penyediaan sarana dan prasarana; 5) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi; 6) Pemanfaatan lahan kering pekarangan dan rawa; dan 7) Pengembangan holtikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, dan obat-obatan).

C. Perkembangan dan pemanfaatan IPTEK di Indonesia pada masa Reformasi

Seiring perkembangan zaman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada masa ini mengalami perubahan baik dalam ilmu pengetahuan dan Teknologi yang semakin modern. Pada awalnya perkembangan IPTEK di masa reformasi mengalami kendala akibat berkurangnya porsi anggaran yang disebabkan oleh krisis moneter pada tahun 1998, namun sejak tahun 2008 terjadi krisis kredit rumah yang terjadi di Amerika Serikat, mengakibatkan Indonesia mengalami peningkatan ekonomi dan berbarengan peningkatan pengembangan riset dan teknologi. Meningkatkan prestasi pelajar Indonesia dalam Olimpiade Internasional baik dalam bidang Ilmu Pengetahuan maupun bidang teknologi, kemudian pemerintah dalam hal ini Kemendikbud maupun Kemenristekdikti mengambil kebijakan dengan menaikkan kembali porsi anggaran untuk pengembangan IPTEK di Indonesia. Saat ini perkembangan yang sedang pesatnya adalah media elektronik (HP, Komputer, TV, dsb.) sebagai alat penunjang kehidupan. Untuk saat ini Ilmu Pengetahuan banyak di pelopori sebagian besar mahasiswa akibat didukungnya pemerintah dalam meningkatkan penemuan-penemuan yang bertujuan memajukan Indonesia.

D. Tokoh Ilmuwan, Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Temuan-temuan dari Indonesia

Penemuan hebat ternyata tidak hanya dimonopoli ilmuwan mancanegara. Indonesia juga memiliki banyak ilmuwan jempolan yang karya dan penemuannya mendunia. Tentunya hal ini membuat masyarakat bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jika sebelumnya dalam beberapa buku ilmu pengetahuan sekolah kerap disebutkan penemuan yang diciptakan Thomas Alfa Edison, James Watt ataupun Isaac Newton bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti nama-nama ilmuwan asal Indonesia akan muncul di berbagai buku pelajaran di dunia. Siapa sajakah ilmuwan Indonesia yang karyanya sudah diakui oleh dunia? Berikut ini informasi tentang karya ilmuwan Indonesia yang mendunia.

Sedyatmo

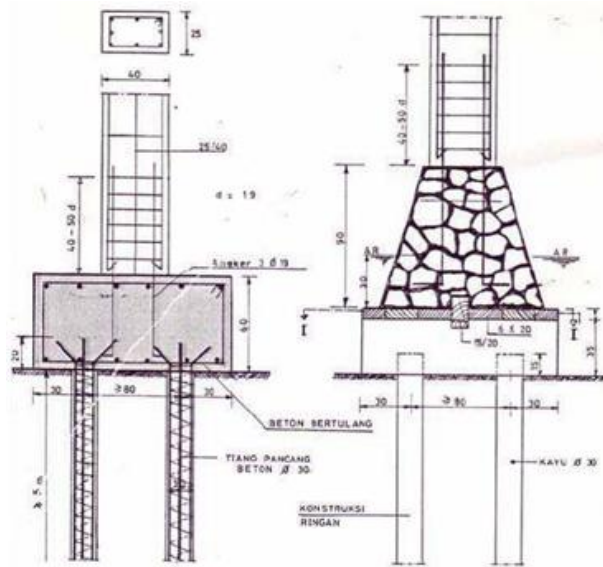
Sedijatmo dikenal karena menemukan "Konstruksi Cakar Ayam" pada tahun 1962. Nama Sedyatmo mungkin masih asing di telinga masyarakat awam di masa sekarang, ternyata dari pemikiran dan kecerdasan beliau lah teknologi pemasangan pondasi yang kokoh diatas tanah labil banyak diterapkan diberbagai bangunan di seluruh dunia. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo nama lengkap adalah putra asli Karanganyar Jawa Tengah, ia adalah tokoh insinyur sipil sekaligus seorang cendikiawan, praktisi, ilmuwan dan guru besar teknik sipil di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebagai seorang pejabat di perusahaan listrik Negara, beliau mengemban tanggung jawab untuk membangun menara listrik bertegangan tinggi di daerah rawa rawa di kawasan Yogyakarta.



Gambar 1. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo

Saat itu dia dihadapkan dengan persoalan struktur tanah di daerah rawa rawa yang lembek dan labil. Sedyatmo pun berpikir keras untuk mencari metode yang lebih efektif hingga muncullah gagasan mendirikan menara diatas pondasi pelat beton dengan ditopang oleh pipa pipa beton dibawahnya. Teknologi ini ditemukan oleh Sedijatmo ketika ia sebagai pejabat PLN diminta mendirikan 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa-rawa Ancol, Jakarta. Pondasi yang dibuatnya ternyata mampu mengurangi hingga 75% tekanan pada permukaan tanah di bawahnya dibandingkan dengan pondasi biasa. Pondasi cakar ayam ini kemudian digunakan di Bandara Juanda, Surabaya yang memungkinkan landasan menahan beban hingga 2.000 ton atau seberat pesawat super jumbo jet. Selain di Indonesia teknologi yang

sudah dipatenkan ini juga digunakan di 9 negara lain, seperti Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Belgia, Kanada, AS, Belanda. Gambar 1. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo



Gambar 2. Konstruksi Cakar Ayam

Tjokorda R Sukawati

Dr. Ir. Tjokorda Raka Sukawati (lahir di Ubud, Bali, 3 Mei 1931 – meninggal di Ubud, Bali, 11 November 2014 pada umur 83 tahun) adalah seorang insinyur Indonesia yang menemukan “konstruksi Sosrobahu”, yang memudahkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu arus lalu lintas pada saat pembangunannya. Sekitar tahun 1980-an, Tjokorda Raka Sukawati nama lengkapnya, menerima tantangan untuk membangun jembatan layang diatas padatnya lalu lintas di ibukota Jakarta yang membentang antara Cawang hingga Tanjung priok. Insinyur asal Bali ini mengajukan gagasan untuk membangun tiang tersebut sejajar dengan jalur dibawahnya. Barulah setelah tiang ini didirikan, lengannya yang berbentuk huruf T akan diputar 90 derajat hingga melintang dan siap digunakan untuk jalan beton diatasnya. Ia kemudian menggunakan sistem hidrolik sehingga lengan beton seberat 180 ton dapat diputar dengan mudah. Dengan efektivitas waktu pembuatan dan minimnya gangguan terhadap arus lalu lintas jalan raya dibawahnya, teknologi ini menuai berbagai pujian dari seluruh kalangan pada waktu itu.

~ Atno ~

Presiden Soeharto yang saat itu ikut menyaksikan kemudian memberi nama “Sosrobahu” untuk metode yang diciptakan Tjokorda R Sukawati ini. Sosrobahu sendiri merupakan nama salah satu tokoh sisipan dalam cerita Mahabarata. Hasil karya anak bangsa yang membanggakan ini kemudian digunakan untuk berbagai rancangan di dunia. Termasuk diantaranya adalah jembatan Seattle di Amerika Serikat, jalan raya metro Filipina dan masih banyak lainnya. Temuan ini juga mendapatkan lisensi hak paten dari beberapa Negara, seperti Jepang, Malaysia dan Filipina. Tjokorda R Sukawati, yang juga pendiri Fakultas Teknik Universitas Udayana, telah pensiun dari PT. Hutama Karya, namun masih tetap berkarya bahkan menghasilkan teknologi sosrobahu versi kedua yang lebih unggul soal kepraktisan dibandingkan versi sebelumnya.



Gambar 3. Dr. Ir. Tjokorda Raka Sukawati

B. J. Habibie

Siapa yang tidak kenal dengan Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936) atau sering dikenal dengan B.J Habibie. Ia belajar teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1954. Pada 1955–1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar *diploma ingenieur* pada 1960 dan gelar *doktor ingenieur* pada 1965 dengan predikat *summa cum laude*.

~ Atno ~

Beliau adalah seorang pioneer kedirgantaraan yang masih hidup sampai sekarang ini.

Sejarah mencatat, pada 1990-an, musibah pesawat terbang masih banyak terjadi karena kerusakan konstruksi yang tak terdeteksi. Kelelahan pada bodi pesawat masih sulit terdeteksi pada waktu itu. Titik rawan kelelahan ini biasanya terletak pada sambungan antara sayap dan badan pesawat terbang, atau antara sayap dengan mesin. Elemen inilah yang mengalami guncangan keras secara terus menerus, baik saat pesawat lepas landas maupun mendarat. Hingga kemudian Pak Habibie menemukan cara bagaimana titik kelelahan pesawat ini bekerja, perhitungan “titik kelelahan” sungguh rinci, sampai pada hitungan atom. Oleh dunia penerbangan internasional, teori Habibie ini lantas dinamakan “*crack progression*”. Sampai sampai nama Habibie terkenal dengan sebutan *mister crack*. Berdasarkan teori ini, pesawat modern jaman sekarang dibuat lebih aman, tidak hanya resiko pada pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaannya mudah dan murah. Dalam dunia penerbangan, terobosan ini dikenal dengan *Factor Habibie*. Dengan begitu daya angkut pesawat pun meningkat dan daya jelajahnya semakin jauh. Secara ekonomi, kinerja pesawat pun dapat ditingkatkan lagi.



Gambar 4. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie

Joe Hin Tjio

Fakta bahwa kromosom manusia 48 buah, yang sudah diketahui dunia sejak setengah abad lamanya, berhasil dipatahkan. Salah seorang ahli psikokenetik asal Indonesia, yaitu Dr. Joe Hin Tjio menemukan fakta bahwa kromosom manusia berjumlah 46 buah (23 pasang). Hasil ini berdasarkan penelitian yang beliau lakukan di laboratorium Institute of Genetics of Sweden's University of Lund. Beliau berhasil menyempurnakan teknik pemisahan kromosom manusia pada gelas preparat yang dikembangkan oleh salah satu dokter di Texas University, US tahun 1961.



Gambar 5. Dr. Joe Hin Tjio

Tjio yang dilahirkan di Pekalongan pada 2 November 1919, lebih sering dikenal sebagai ahli sitogenetika Amerika karena selama 23 tahun terakhir hidupnya dihabiskan di Institut Kesehatan Nasional (*National Institute of Health*), Amerika Serikat. Teknik yang dikembangkan untuk pengamatan kromosom pada manusia merupakan salah satu temuan besar di bidang sitogenetika. Sitogenetika sendiri merupakan ilmu genetika yang mempelajari hubungan antara hereditas dengan variasi dan struktur kromosom. Pak Tjio, panggilannya, membantu pengembangan bidang ini menjadi salah satu bidang penting dalam medis di tahun 1959. Beliau menunjukkan bahwa ada kaitan antara kromosom abnormal dengan penyakit tertentu.

Khoirul Anwar

Prof. Dr. Khoirul Anwar adalah pemilik paten sistem telekomunikasi 4G berbasis OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini bekerja di Nara Institute of Science and Technology, Jepang. Khoirul Anwar adalah lulusan dari Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung dengan cum laude di tahun 2000. Meraih gelar master dan doktor dari Nara Institute of Science and Technology (NAIST) pada tahun 2005 dan 2008.



Gambar 6. Prof. Dr. Khoirul Anwar

Pria asal Kediri kelahiran 1978 ini menciptakan sistem yang mampu menurunkan energi hingga 5 dB atau seratus ribu kali lebih kecil dari yang diperlukan. Khoirul Anwar berhasil menemukan metode komunikasi yang lebih cepat, tapi energi lebih sedikit. Kecepatan pengiriman datanya juga meningkat tajam. Masalah komunikasi di kota-kota besar yang memiliki gedung pencakar langit maupun daerah pegunungan pun bisa diatasi. Di daerah-daerah seperti inilah gelombang yang ditransmisikan mengalami pantulan dan jeda lebih panjang. Ia menemukan teknik transmisi *wireless* dengan dua buah *Fast Fourier transform* (FFT). Teknik ini mendapatkan penghargaan pada Januari 2006 dari IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS) tahun 2006, di California dan menjadi standard *International Telecommunication Union* (ITU), ITU-R S.1878, dan ITU-R S.2173. Pada paten keduanya ini menghapus sama sekali Guard Interval/GI. Hasilnya, membuat

frekuensi yang berbeda akan bertabrakan. Prof. Khoirul mengombinasikan dengan algoritma khusus di laboratorium. Hasil temuan lulusan *cum laude* Teknik Elektro ITB tahun 2000 ini telah digunakan perusahaan elektronik besar asal Jepang. Juga, tengah diujai oleh raksasa telekomunikasi asal Tiongkok yakni Huawei Technology.

Sementara itu di bidang organisasi ilmu pengetahuan yang terkait dengan kegiatan ilmiah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada abad ke-16 ketika Jacob Bontius, yang mempelajari flora Indonesia dan Rompius dengan karyanya yang terkenal berjudul "*Herbarium Amboinese*". Pada akhir abad ke-18 dibentuk *Bataviaasch Genotschap van Wetenschappen*. Pada tahun 1928 Pemerintah Hindia Belanda membentuk *Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie*. Kemudian tahun 1948 diubah menjadi *Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek* (Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam, yang dikenal dengan OPIPA). Badan ini menjalankan tugasnya hingga tahun 1956. Setelah Indonesia merdeka, organisasi ilmu pengetahuan yang ada mulai dibentuk sesuai dengan bidang kajiannya. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya adalah:

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pembentukan LIPI memiliki sejarah yang panjang. Setelah melewati beberapa fase kegiatan ilmiah sejak abad ke-16 hingga tahun 1956, pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) melalui Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 1956. Tugasnya adalah membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijaksanaan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1962, pemerintah membentuk Departemen Urusan Riset Nasional (DURENAS) dan menempatkan MIPI di dalamnya dengan tugas tambahan membangun dan mengasuh beberapa lembaga riset nasional. Hingga pada tahun 1966, status DURENAS menjadi Lembaga Riset Nasional (LEMRENAS).

Sejak Agustus 1967, pemerintah membubarkan LEMRENAS dan MIPI. Setelah itu, pemerintah membentuk LIPI dan menampung seluruh tugas LEMRENAS dan MIPI ke dalam lembaga tersebut. Tugas pokoknya adalah (1) membimbing

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya; (2) mencari kebenaran ilmiah di mana kebebasan ilmiah, kebebasan penelitian serta kebebasan mimbar diakui dan dijamin, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; (3) mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 1991.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Pada 31 Mei 1962, atas arahan Presiden RI Soekarno, dibentuk Panitia Astronautika oleh Perdana Menteri Ir. H. Juanda (selaku Ketua Dewan Penerbangan RI) dan R.J. Salatun (selaku Sekretaris Dewan Penerbangan RI). Untuk mendukung langkah tersebut, pada 22 September 1962 dibentuklah Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA) afiliasi AURI dan Institut Teknologi Bandung. Proyek PRIMA berhasil membuat dan meluncurkan dua roket seri Kartika berikut telemetrinya pada tahun 1964.

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia diawali dari pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivet tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuhnya radioaktif dari uji coba senjata nuklir di Lautan Pasifik. Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berdasarkan UU NO. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Selanjutnya setiap tanggal 5 Desember yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia telah ditetapkan sebagai hari jadi BATAN. Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, maka dibangun beberapa fasilitas penelitian, pengembangan, dan rekayasa (litbangyasa) yang tersebar di berbagai kawasan, antara lain Kawasan Nuklir

Bandung (1965), Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta (1966), Kawasan Nuklir Yogyakarta (1967), dan Kawasan Nuklir Serpong (1987). Sementara itu dengan perubahan paradigma pada tahun 1997 ditetapkan UU no. 10 tentang Ketenaganukliran yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir (BATAN) dengan unsur pengawas tenaga nuklir (BAPETEN).

Badan Informasi Geospasial

Kegiatan survei dan pemetaan setelah kemerdekaan Indonesia dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1951 tentang Pembentukan Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Selanjutnya, pada tanggal 7 September 1965 tentang Pembentukan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional (Desurtanal) serta Komando Survei dan Pemetaan Nasional (Kosurtanal) sebagai pelaksana. Dalam pembagian tugas Desurtanal tercantum kaitan antara pemetaan dengan inventerisasi sumber-sumber alam dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pada periode pemerintahan Orde Baru dengan program pembangunan yang dituangkan dalam Pelita, dirasakan kebutuhan data dasar perpetaan makin mendesak. Dalam periode ini, kegiatan Desurtanal dan Kosurtanal dirasa belum optimal karena: Desurtanal tidak dapat berkumpul secara teratur sehingga kurang berfungsi. Status Kosurtanal sebagai komando dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi dan jiwa orde baru. Atas dasar alasan di atas, Kosurtanal menyampaikan rekomendasi dan mengusulkan perubahan Kosurtanal menjadi Bakosurtanal. Pada tanggal 17 Oktober 1969, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1969 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Dengan Keppres ini, pemerintah juga membubarkan Badan Atlas Nasional dan kegiatannya ditampung serta dilanjutkan oleh Bakosurtanal. Begitu pula fungsi Desurtanal menjadi Badan Penasehat yang menyatu dalam induk organisasi Bakosurtanal. Pada tanggal 27 Desember 2011, pemerintah membentuk Badan Informasi Geospasial (BIG). Bidang tugasnya yang terkait dengan informasi geospasial tetap dilaksanakan oleh Bakosurtanal sampai dengan selesainya penataan organisasi BIG sesuai dengan perpres tersebut. Bakosurtanal

dalam jangka waktu paling lama 1 tahun menyerahkan seluruh arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada BIG.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau disingkat BPPT bermula dari gagasan Presiden Soeharto kala itu kepada B.J. Habibie pada tanggal 28-Januari-1974. Pada tanggal 5 Januari 1974, B.J. Habibie diangkat sebagai penasehat pemerintah dibidang advance teknologi dan teknologi penerbangan yang bertanggung jawab langsung pada presiden dengan membentuk Divisi Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) Pertamina. Tugas pokok adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi dari BPPT adalah sebagai berikut: 1) Pengkajian & penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; 2) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT; 3) Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi; dan 4) Penyelenggaraan pembinaan & pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi & tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan persandian, perlengkapan & rumah tangga.

Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau disingkat Puspiptek didirikan pada tahun 1976 atas gagasan Menteri Riset Republik Indonesia, saat itu, yakni Sumitro Djojohadikusumo dan pelaksanaanya direalisasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie. Tujuan dari Puspитеk adalah untuk mendukung proses industrialisasi di Indonesia maka Puspитеk dirancang untuk menjadi kawasan yang mensinergikan SDM terdidik dan terlatih, peralatan penelitian dan pelayanan teknis yang paling lengkap di Indonesia serta teknologi dan keahlian yang telah terakumulasi selama lebih dari seperempat abad.

Puspiptek didirikan pada tanggal 1 Oktober 1976. Pada saat itu, Puspiptek ditujukan sebagai kawasan terpadu untuk menempatkan sejumlah pusat penelitian milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Penempatan pusat-pusat tersebut dalam satu kawasan dimaksudkan agar dapat membentuk kemampuan yang kuat bagi pengamanan dan pelaksanaan kegiatan penelitian iptek yang berhubungan dengan Program Riset Nasional. Puspiptek diarahkan sebagai sebuah kawasan yang mengintegrasikan unsur-unsur inovasi yang terdiri atas lembaga litbang, pendidikan tinggi, serta sektor bisnis (industri), dalam kerangka sistem inovasi nasional (SINas) dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Dalam kaitan dengan komersialisasi hasil litbang, salah satu aktivitas di Puspiptek ke depan adalah penumbuhan IKM baru berbasis teknologi serta menumbuhkan budaya technopreneurship melalui inkubasi teknologi dan bisnis.

Peran Puspiptek dalam menjadi Pusat Iptek dan Inovasi Kelas Dunia adalah sebagai :

- a. Pusat Penguasaan dan Pengembangan Iptek nasional (*center of excellence*)
- b. Pusat Pelayanan Pengembangan Produk-Produk nasional
- c. Pusat alih teknologi dan Pusat Informasi Iptek (advokasi teknologi, pelayanan teknologi, difusi, diseminasi, komersialisasi teknologi)
- d. Pusat pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan inkubasi industri baru/UKMK berbasis teknologi (inkubator bisnis teknologi, klaster inovasi)
- e. Pusat pendidikan dan latihan untuk SDM industri.

E. Rangkuman

Setelah kegiatan mempelajari uraian materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia selesai, alangkah baiknya mengingak kembali rangkuman dari materi di atas. Harapannya, Anda sebagai guru sejarah mampu mengevaluasi kehidupan Bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak proklamasi sampai reformasi. Dari modul yang sudah dipelajari, dapat diambil beberapa hal penting diantaranya:

1. Perkembangan dan pemanfaatan IPTEK pada masa sebelum Orde Baru ditandai dengan kemajuan diantaranya berdirinya Radio Republik Indonesia (RRI),

- membentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP), berdirinya Televisi Republik Indonesia (TVRI).
2. Perkembangan dan pemanfaatan IPTEK pada masa Orde baru mengalami kemajuan yang cukup pesat ditandai dengan berbagai hal diantaranya: (a) perkembangan televisi dengan munculnya berbagai macam televisi swasta, (b) diluncurkannya Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa pada 15 Februari 1975, (c) kemajuan di sarana perhubungan dan juga penerbangan (didirikannya IPTN), (d) Indonesia berhasil menjadi negara swasebada beras. Upaya produktivitas pertanian di Indonesia dilakukan dengan intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, rehabilitasi pertanian.
 3. Tokoh ilmuwan yang berasal dari Indonesia yang namanya sudah dikenal di dunia Internasional diantaranya : (a) Sedijatmo menemukan "Konstruksi Cakar Ayam" (b) Tjokorda Raka Sukawati yang berhasil menemukan teknologi “konstruksi Sosrobahu” (c) BJ. Habibie menemukan teori “*crack progression*”; (d) Joe Hin Tjio menemukan fakta bahwa kromosom manusia berjumlah 46 buah (23 pasang); dan (e) Khoirul Anwar yang menemukan/ mematenkan sistem telekomunikasi 4G berbasis OFDM, organisasi ilmu pengetahuan, dan temuan-temuan dari Indonesia yang berpengaruh dalam masyarakat.
 4. Organisasi ilmu pengetahuan yang terkait dengan kegiatan ilmiah di Indonesia diantaranya
 - a. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
 - b. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
 - c. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
 - d. Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - e. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
 - f. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pupitek).

DAFTAR PUSTAKA

- Buchanan, Robert Angus. 2006. *Sejarah Teknologi*. Yogyakarta: Pall Mall.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1979. *Sejarah Umum II, III*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1–17*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono 1988. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru II*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumaningrum, Ade 2003. *Radio, Media Alternatif Suara Perempuan?* dalam *Jurnal Perempuan* Edisi Nomor 28, Maret 2003.
- Natakusumah, E.K. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian Informatika.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia IV, V, VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwito, Edy dan Kuswanto. 1989. *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*. Solo: Tiga Serangkai.
- Richardus Eko Indrajit. 2002. *Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi*. Bandung: Fakultas Teknik UNIKOM.
- Soemarwoto. 1990. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Bandung: Penerbit Jembatan.